

DISERTASI

**KEMANDIRIAN DAN KEBERLANJUTAN
ORGANISASI 'AISYIYAH
(Studi Kasus Organisasi 'Aisyiyah di Kota Makassar)**

**NURSALAM
NIM : 080702006**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2012**

ABSTRAK

Nursalam: *Kemandiriandan Keberlanjutan Organisasi ‘Aisyiyah (Studi Kasus Organisasi “Aisyiyah Kota Makassar),* dibimbing oleh: Darmawan Salman, Wahyuddin Hamid, dan Jasruddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kemandirian dan keberlanjutan ‘Aisyiyah di Kota Makassar, dengan focus analisis: Dinamika kemandirian ‘Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan, keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah dalam merespon dinamika lingkungan eksternalnya, dan dinamika kepatuhan anggota kepada ‘Aisyiyah dan kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah di balik kemandirian dan keberlanjutan organisasi tersebut. Penelitian ini merupakan studi kasus, dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena-fenomena kemandirian, keberlanjutan dan kepatuhan sebagai focus pembahasan yang dijelaskan berdasarkan fakta empiris. Analisis data yang digunakan adalah *Analysis during data collection*, yaitu analisis data bersamaan dengan proses empirik terutama focus perhatian diberikan terhadap konsep utama yang diteliti.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa, kemandirian ‘Aisyiyah tidak hanya karena otonomi dirinya tetapi karena ada keterkaitan dengan struktur lain, yaitu Muhammadiyah. Kemandirian ‘Aisyiyah sebagai sistem yang otonom, dapat dilihat dari implementasi tiga konsep dasar yaitu medan visional yang dipahami oleh semua warga sebagai medan dalam bertindak bersama dan berkontribusi untuk mewujudkan visi organisasi; paradox independensi, bahwa posisi ‘Aisyiyah yang paradok (mendua), di satu sisi sebagai sistem yang otonom dalam mengambil keputusan-keputusan secara otonom untuk diamplikasikan secara otonom, namun di sisi lain merupakan bagian dari Muhammadiyah sebagai bahagian dari sistem yang lebih besar, sehingga bisa mengintervensi keputusan-keputusan ‘Aisyiyah; selain itu, ‘Aisyiyah selalu memperbaharui diri dengan melakukan perubahan-perubahan pola interaksi dan komunikasi terhadap lingkungan strategi autopoiesis. ‘Aisyiyah bias mandiri dan berlanjut karena ada kepatuhan anggota kepada ‘Aisyiyah dan kepatuhan ;Aisyiyah kepada Muhammadiyah yang bersifat moral normative dan diwujudkan dalam bentuk kesadaran kolektif pengurus dan anggota yang dibangun atas dasar moral ”amar makruf nahi munkar”.

Kata Kunci : *Kemandirian, keberlanjutan, dankepatuhananggotakepada ‘Aisyiyah, dankepatuhan ‘AisyiyahkepadaMuhammadiyah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN DISERTASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PERNYATAAN KEORISINILAN DISERTASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kemandirian dan Keberlanjutan Organisasi	17
B. Kepatuhan dalam Organisasi	36
C. Hubungan Muhammadiyah dengan ‘Aisyiyah	52
1. Hubungan yang bersifat Komando (Koordinasi)	52
2. Hubungan yang bersifat Struktural	53
3. Hubungan yang bersifat Fungsional	55
4. Hubungan yang bersifat Kultural	57
D. Kerangka Konseptual	73
E. Definisi Fokus (Operasional)	81

BAB III. METODE PENELITIAN	84
A. Pendekatan Kualitatif	84
B. Fokus Penelitian dan Penentuan Informan	88
C. Penentuan Lokasi dan Subjek Penelitian	92
D. Jenis dan Sumber Data	93
E. Teknik Pengumpulan Data	94
F. Teknik Analisis Data	98
G. Pengabsahan Data	101
BAB IV. SETTING LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN	104
A. Sejarah Berdirinya ‘Aisyiyah Kota Makassar	104
B. Sambutan Masyarakat Terhadap ‘Aisyiyah Kota Makassar	119
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja ‘Aisyiyah Kota Makassar	132
D. Revitalisasi Nilai-nilai Gerakan ‘Aisyiyah Kota Makassar	151
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	158
A. Dinamika Kemandirian Organisasi ‘Aisyiyah dalam Berbagai Fase Perkembangan	158
1. Medan Visional ‘Aisyiyah Kota Makassar	159
2. Paradoks Independensi ‘Aisyiyah Kota Makassar	190
3. Autopoiesis ‘Aisyiyah Kota Makassar	202
B. Keberlanjutan Organisasi ‘Aisyiyah dalam Merespons Dinamika Lingkungan Eksternalnya	212
1. Fase Pra Kemerdekaan (17 Agustus 1945)	224
2. Fase Kemerdekaan (17 Agustus 1945)	226
3. Fase Reformasi (1998)	229

C. Dinamika Kepatuhan Anggota Organisasi kepada ‘Aisyiyah dan Kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muham- madiyah di Balik Kemandirian dan Keberlanjutannya	258
D. Pembahasan dan Analisis Sosiologis	284
E. Dalil-dalil Hasil Penelitian	300
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	306
A. Kesimpulan	306
B. Saran-saran (Rekomendasi)	311
DAFTAR PUSTAKA	314
LAMPIRAN	

PRAKATA

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat, dan izinnya jualah sehingga seluruh proses penelitian desertasi ini dapat dirampungkan. Penulis yakin tanpa hidayah, serta nikmat kesehatan dan kekuatanyang Allah berikan maka seluruh proses kegiatan penulisan desertasi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Tak lupa saya panjatkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita ke alam yang beradab, alam yang mampu kita akses, dan terang benderang, dimana kita semua dapat merasakan manfaatnya.

Selain ucapan rasa syukur yang tak terhingga kepada ALLah SWT, atas semua nikmat yang diberikan, maka saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku Hj. Sariba dan Almarhum Katanni, yang dengan bersusah payah membimbing dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, sehingga mendapatkan keberhasilan ini, di tangan kedua orang tua, dan Ridhonyalah sehingga saya dapat tegar menjalani hidup ini. Semoga Allah SWT menyayanginya seperti beliau menyayangi anak-anaknya, Amin ya Rab. Kepada istriku tercinta yang sangat menyayangiku, dengan setia mendampingi, dan membantu saya dalam penyelesaian tulisan ini, demikian pula kedua putriku, St. Adinda Srikandi, dan Dianita Nurrahma yang saya banggakan, dengan penuh ikhlas memberikan motivasi, kepada kakak-kakak saya yang tidak pernah lepas doa-doanya yang dipanjatkan untuk keberhasilan saya, Amin.

Penyelesaian desertasi ini banyak melibatkan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang sangat berjasa membantu saya dalam menyelesaikan desertasi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada yang saya hormati Bapak Prof. Dr. H. Darmawan Salman, M.Si selaku Promotor, yang terus berupaya memberi motivasi dan meluangkan waktunya yang tidak sedikit untuk kepentingan konsultasi dan penyelesaian desertasi ini, memberikan tanggapan yang sangat terbuka, kritis, dan masukan-masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian tulisan ini.

Kepada Bapak Prof. Dr. H. Wahyuddin Hamid, M.Si, selaku kopromotor satu, beliau selalu ikhlas dalam melayani konsultasi, walaupun sangat sibuk namun tetap memberikan waktu, dan menyempatkan diri dalam memberikan saran-saran guna perbaikan desertasi ini. Kepada Bapak Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. selaku kopromotor dua yang sangat membantu dalam memberikan saran dan kritikan, tidak hanya mengikhhlaskan waktu dan ilmunya, tetapi juga memberi semangat untuk terus berjuang dalam menyelesaikan tulisan desertasi ini. Kepada mereka saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas jasa-jasanya, Amin.

Terima kasih yang tak terhingga juga saya haturkan kepada para penguji masing-masing, Bapak Prof. Dr. Andi Agustang, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Muh Tahir

Kasnawi, SU. Bapak Dr. Sulaiman Samad, M.Si, Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si, selaku penguji eksternal. Kesemua penguji telah banyak memberikan saran, arahan, dan kritikan yang sangat bermanfaat dalam membuka wawasan akademik sejak ujian proposal hingga penyelesaian disertasi ini.

Kepada yang terhormat bapak Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Makassar, kepada yang terhormat bapak Prof. Dr. Jasruddin, M.Si, Direktur program Pasca Sarjana UNM, kepada yang terhormat bapak Prof. Dr. Suradi Tahmir, MS dan bapak Prof. Dr. H. Andi Ihsan, M.Kes, masing-masing Asdir I dan Asdir II, kepada yang terhormat bapak Prof. Dr. H. Andi Agustang, M.Si Ketua Program Studi Sosiologi PPS UNM, kepada seluruh bapak dan ibu dosen pada Program Pasca Sarjana UNM, dan kepada seluruh staf pegawai pada Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, kepada mereka semua saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Akhir kata kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih bagi penulisan dan penyelesaian disertasi ini dan tidak sempat disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terima kasih, semoga menjadi amalan kebaikan di sisi Allah SWT, semoga disertasi ini bermanfaat bagi saya pribadi dan ‘Aisyiyah khususnya, Amin.

Makassar,
Desember 2013

Nursalam

DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Penelitian	328
2. Bagan Outline Kajian	336
3. Rencana Outline (Kerangka Isi) Laporan Penelitian	337
4. Daftar Pengodean Latar, Subjek, dan Subtansi Penelitian	339
5. Jadwal Kegiatan Lapangan	340
6. Pedoman Wawancara	341
7. Pedoman Observasi	344
8. Pedoman Wawancara <i>Life History</i>	345
9. Format Catatan Lapangan	347
10. Format Hasil Wawancara	348
11. Catatan Satuan Tematis	349
12. Buku Harian (<i>Log Book</i>) Pengalaman Lapangan	350
13. Surat Izin Penelitian	351

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti
TIT	: Tajdidiyah, Islahiyah, dan Tabsyiriyah
NA	: Nasyiatul ‘Aisyiyah
ZIS	: Zakat, Infak dan Sedekah
IPM	: Ikatan Pelajar Muhammadiyah
TBC	: Tahayul, Bid'ah, dan Churafat
AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
PPA	: Pimpinan Pusat Aisyiyah
PWA	: Pengurus Wilayah Aisyiyah
PWM	: Pengurus Wilayah Muhammadiyah
PDA	: Pimpinan Daerah Aisyiyah
PRA	: Pimpinan Ranting Aisyiyah
BKIA	: Balai Kesehatan Ibu & Anak
BUEKA	: Badan Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah
AMS	: Aisyiyah Maghribi School
PKU	: Pembinaan Kesejahteraan Umat
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
GTT	: Guru tidak tetap
GT	: Guru tetap
GPK	: Guru pendidik khusus

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
2.1	Bagan Kerangka Konseptual	80

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
2.1	Tipologi Hubungan Compliance dari Etzioni	53
3.1	Daftar Informan Penelitian	91
3.2	Prosedur Penelitian dan Pengumpulan Data	97

DISERTASI

**KEMANDIRIAN DAN KEBERLANJUTAN
ORGANISASI 'AISYIYAH
(Studi Kasus Organisasi 'Aisyiyah di Kota Makassar)**

**NURSALAM
NIM : 080702006**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2012**

ABSTRAK

Nursalam: *Kemandiriandan Keberlanjutan Organisasi ‘Aisyiyah (Studi Kasus Organisasi “Aisyiyah Kota Makassar),* dibimbing oleh: Darmawan Salman, Wahyuddin Hamid, dan Jasruddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kemandirian dan keberlanjutan ‘Aisyiyah di Kota Makassar, dengan focus analisis: Dinamika kemandirian ‘Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan, keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah dalam merespon dinamika lingkungan eksternalnya, dan dinamika kepatuhan anggota kepada ‘Aisyiyah dan kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah di balik kemandirian dan keberlanjutan organisasi tersebut. Penelitian ini merupakan studi kasus, dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena-fenomena kemandirian, keberlanjutan dan kepatuhan sebagai focus pembahasan yang dijelaskan berdasarkan fakta empiris. Analisis data yang digunakan adalah *Analysis during data collection*, yaitu analisis data bersamaan dengan proses empirik terutama focus perhatian diberikan terhadap konsep utama yang diteliti.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa, kemandirian ‘Aisyiyah tidak hanya karena otonomi dirinya tetapi karena ada keterkaitan dengan struktur lain, yaitu Muhammadiyah. Kemandirian ‘Aisyiyah sebagai sistem yang otonom, dapat dilihat dari implementasi tiga konsep dasar yaitu medan visional yang dipahami oleh semua warga sebagai medan dalam bertindak bersama dan berkontribusi untuk mewujudkan visi organisasi; paradox independensi, bahwa posisi ‘Aisyiyah yang paradok (mendua), di satu sisi sebagai sistem yang otonom dalam mengambil keputusan-keputusan secara otonom untuk diamplikasikan secara otonom, namun di sisi lain merupakan bagian dari Muhammadiyah sebagai bahagian dari sistem yang lebih besar, sehingga bisa mengintervensi keputusan-keputusan ‘Aisyiyah; selain itu, ‘Aisyiyah selalu memperbaharui diri dengan melakukan perubahan-perubahan pola interaksi dan komunikasi terhadap lingkungan strategi autopoiesis. ‘Aisyiyah bias mandiri dan berlanjut karena ada kepatuhan anggota kepada ‘Aisyiyah dan kepatuhan ;Aisyiyah kepada Muhammadiyah yang bersifat moral normative dan diwujudkan dalam bentuk kesadaran kolektif pengurus dan anggota yang dibangun atas dasar moral ”amar makruf nahi munkar”.

Kata Kunci : *Kemandirian, keberlanjutan, dankepatuhananggotakepada ‘Aisyiyah, dankepatuhan ‘AisyiyahkepadaMuhammadiyah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN DISERTASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PERNYATAAN KEORISINILAN DISERTASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kemandirian dan Keberlanjutan Organisasi	17
B. Kepatuhan dalam Organisasi	36
C. Hubungan Muhammadiyah dengan ‘Aisyiyah	52
1. Hubungan yang bersifat Komando (Koordinasi)	52
2. Hubungan yang bersifat Struktural	53
3. Hubungan yang bersifat Fungsional	55
4. Hubungan yang bersifat Kultural	57
D. Kerangka Konseptual	73
E. Definisi Fokus (Operasional)	81

BAB III. METODE PENELITIAN	84
A. Pendekatan Kualitatif	84
B. Fokus Penelitian dan Penentuan Informan	88
C. Penentuan Lokasi dan Subjek Penelitian	92
D. Jenis dan Sumber Data	93
E. Teknik Pengumpulan Data	94
F. Teknik Analisis Data	98
G. Pengabsahan Data	101
 BAB IV. SETTING LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN	 104
A. Sejarah Berdirinya ‘Aisyiyah Kota Makassar	104
B. Sambutan Masyarakat Terhadap ‘Aisyiyah Kota Makassar	119
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja ‘Aisyiyah Kota Makassar	132
D. Revitalisasi Nilai-nilai Gerakan ‘Aisyiyah Kota Makassar	151
 BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 158
A. Dinamika Kemandirian Organisasi ‘Aisyiyah dalam Berbagai Fase Perkembangan	158
1. Medan Visional ‘Aisyiyah Kota Makassar	159
2. Paradoks Independensi ‘Aisyiyah Kota Makassar	190
3. Autopoiesis ‘Aisyiyah Kota Makassar	202
B. Keberlanjutan Organisasi ‘Aisyiyah dalam Merespons Dinamika Lingkungan Eksternalnya	212
1. Fase Pra Kemerdekaan (17 Agustus 1945)	224
2. Fase Kemerdekaan (17 Agustus 1945)	226
3. Fase Reformasi (1998)	229

C. Dinamika Kepatuhan Anggota Organisasi kepada ‘Aisyiyah dan Kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muham- madiyah di Balik Kemandirian dan Keberlanjutannya	258
D. Pembahasan dan Analisis Sosiologis	284
E. Dalil-dalil Hasil Penelitian	300
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	306
A. Kesimpulan	306
B. Saran-saran (Rekomendasi)	311
DAFTAR PUSTAKA	314
LAMPIRAN	

Lampiran 1 : *Instrumen Penelitian*

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Judul Penelitian

**KEMANDIRIAN DAN KEBERLANJUTAN ORGANISASI 'AISYIYAH
(Studi Kasus organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika kemandirian 'aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan organisasi tersebut?
2. Bagaimana keberlanjutan organisasi'aisyiyah dalam merespon merespons dinamika lingkungan eksternalnya?
3. Bagaimana dinamika kepatuhan anggota kepada organisasi 'Aisyiyah kepada dan kepatuhan Muhammadiyah dibalik kemandirian dan keberlanjutan organisasi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin di wujudkan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendiskripsikan dinamika kemandirian 'Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan.
2. Menjelaskan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah dalam merespon merespons dinamika lingkungan eksternalnya.
3. Menganalisis dinamika kepatuhan anggota kepada organisasi 'Aisyiyah dan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah dibalik kemandirian dan keberlanjutan.

D. Fokus dan Deskripsi Fokus

Fokus perhatian dalam penelitian ini adalah fenomena sosial yang terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah. Untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial secara lebih alami, penuh makna, dan mendalam. Dalam hal ini, fokus yang dimaksud adalah konsep utama yang dikembangkan sekaligus merupakan tujuan yang diharapkan dalam studi ini, yaitu kemandirian dan keberlanjutan organisasi serta kepatuhan pengurus dan anggota 'Aisyiyah (termasuk kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah), meliputi :

1. Dinamika kemandirian organisasi 'Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan, yaitu bagaimana 'Aisyiyah melaksanakan koordinasi dengan unit-unit organisasi (amal usaha) yang terbesar di semua tingkatan organisasi (wilayah, daerah, cabang, dan ranting). Dalam hal ini dibatasi 3 (tiga) fase perkembangan, yaitu fase sebelum (pra) kemerdekaan, Fase kemerdekaan (orde baru) dan fase reformasi
2. Dinamika keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah dalam merespon kondisi lingkungan eksternalnya (pemerintah dan masyarakat), lingkungan internalnya (Muhammadiyah) dalam mengantisipasi kemungkinan yang terjadi untuk melakukan adaptasi (penyusuaian) terhadap perubahan, agar tetap aksis dan berlanjut.
3. Dinamika kepatuhan pengurus dan anggota kepada 'Aisyiyah, serta kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah, dibalik kemandirian dan keberlanjutan

organisasi tersebut. Dalam hal ini, peneliti berusaha mendapatkan data dan informasi tentang bagaimana tingkat kepatuhan pengurus dan anggota kepada ‘Aisyiyah terkait dengan unit-unit organisasi (amal usaha) yang dikelola, yaitu :

(a) Unit Organisasi (amal usaha) di bidang pendidikan, meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), SD, SMP, Madrasah Tsanawiyah (Mts), SMA, SMK, dan madrasah Aliyah. (b) Unit organisasi (amal usaha) di bidang kesehatan, seperti Rumah Sakit dan / atau Rumah Bersalin, Balai Kesehatan, dan (c) Amal usaha di bidang sosial kemasyarakatan, seperti Panti Asuhan.

Terkait dengan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka untuk memperoleh gambaran tentang data dan informasi yang dibutuhkan (deskripsi fokus penelitian), di man informan sebagai sumber utama dapat dipilih secara *purposive* sesuai mekanisme, karakteristik dan kapabilitas yang dimiliki dalam memberikan data dan informasi secara obyektif dan dapat di pertanggung jawabkan. Informan yang dimaksud meliputi:

- a. Informan yang terkait dengan amal usaha bidang pendidikan (sekolah) dipilih pengurus dan Anggota ‘Aisyiyah terutama pengelola amal usaha TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, serta warga masyarakat (tokoh) dan pengurus Muhammadiyah yang memiliki kemampuan serta pemahaman untuk memberikan keterangan dan informasi yang dibutuhkan.
- b. Informan yang terkait dengan amal usaha di bidang kesehatan (Rumah Sakit, dan / atau Rumah Bersalin, Balai Kesehatan ibu dan anak (BKIA), informanyang

dipilih adalah petugas medis (dokter, perawat, bidan), pengurus dan anggota, warga Masyarakat, serta pihak-pihak terkait.

- c. Informan yang terkait dengan amal usaha Panti Asuhan (PA), Informan yang dipilih adalah pengelola PA, dan Warga masyarakat sekitar panti, termasukj anak-anak panti yang dibina (diasuh) untuk memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan fakta di lapangan.

Matriks Kisi-kisi Pengumpulan Data

No.	Fokus	Unsur yang Dikaji/Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data (informan)	Instrumen
1.	Mendeskripsikan dinamika kemandirian 'Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangannya.	<p>Autopoises Proses pembentukan (sejarah) organisasi. Identitas Organisasi Organisasi Sosial Organisasi Keagamaan</p> <p>Paradoks Indepedensi Kebebasan individu mengelola amal usaha Organisasi Otonom Komitmen Organisasi Tanggung jawab sosial</p> <p>Medan Visional Prinsip-prinsip dasar organisasi Visi & misi organisasi Komponen & unit-unit (amal usaha) 'Aisyiyah Tatanan organisasi (Khittah) 'Aisyiyah</p>	Wawancara Observasi Dokumentasi	<p>Pengurus dan Anggota Organisasi 'Aisyiyah</p> <p>Pengelola dan pengurus amal usaha (TK, SD, SMP, SMA, RS, RB, dll)</p>	<p>Peneliti sendiri dilengkapi: Pedoman wawancara Pedoman observasi Tape recorder Kamera Alat tulis</p>

2.	Menjelaskan keberlanjutan organisasi 'Aiswiyah dalam merespons dinamika lingkungan eksternalnya	Sistem Input (sumber daya Proses pelayanan Output (hasil Produk) Contigensi Adaptasi (penyusaian) Sruktur organisasi Srategi pencapaian Lngkungan Ekonomi dan politik Ekonomi Syariah Musyawarah mufakat Masyarakat Madani	Wawancara Observasi Dokumentasi	Warga masyarakat Pengelola Pengurus 'Aisyiyah Pemerintah, pengurus amal usaha Sumber Daya ekonomi dan politik	Peneliti sendiri dilengkapi Pedoman Wawancara Pedoman Observasi Tape recorder Kamera Alat tulis
3.	Menganalisis dinamika kepatuhan anggota kepada organisasi 'Aisyiyah dan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah di Balik kemandirian dan keberlanjutan organisasi tersebut.	Kekuasaan (Power) Koersif-altyernatif Remuneratif-Kalkulatif Normatif- moral Moral- normatif Keteribatan Alineatif-moral Kalkulatif-Moral Moral-Nomatif Kepatuhan Pengurus dan Anggota kepada "aisyiyah ialah Normatif-Moral 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah, adalah Koersif-Moral 'Aisyiyah, pemerintah dan masyarakat, adalah kalkulatif-Moral	Wawancara mendalam Metode life history Observasi	Pengurus & anggota 'Aisyiyah & Muhammadiyah Pemerintah & pengurus dan Anggota Pengurus Muhammadiyah & Pemerintah.	Peneliti Sendiri Dilengkapi: Pedoman wawancara Pedoman observasi Tape recorder Kamera Alat tulis

F. Instrumen Penelitian

Pelaksanaan Peneliti ini dilengkapi dengan instrumen pendukung kegiatan lapangan, sebagai berikut:

1. Outline (kmerangka isi laporan)

Dokumen ini terdiri dari bagian outline dan uraiannya. Tujuannya adalah untuk memberikan batasan pada kegiatan penelitian agar penelitian tidak keluar dari tujuan atau fokus.

2. Daftar Pengkodean Latar dan Subjek Penelitian

Pengamatan akan ditujukan pada latar dan subjek penelitian. Dua dimensi pengamatan ini akan dibuatkan pengkodean dalam rangka memudahkan kategorisasi antar latar dan subyek penelitian.

3. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal Kegiatan penelitian menyajikan rincian kegiatan dan alokasi waktu yang tersedia menurut tahapan proses penelitian. Jadwal ini selain bertujuan sebagai pengendali waktu juga sebagai daftar periksa untuk mengingatkan pengamat terhadap semua aspek informasi yang sudah diperoleh atau belum diperoleh.

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan terbuka yang merupakan penjabaran fokus penelitian, yang ditujukan untuk menggali informasi dari para subjek penelitian. Pedoman wawancara mendalam ditujukan kepada subjek utama penelitian, termasuk di dalamnya pedoman wawancara untuk penyusunan life-history subjek. Pedoman wawancara hanya berfungsi sebagai

petunjuk dalam wawancara dengan subjek agar tidak keluar dari konteks dan fokus penelitian.

b. Pedoman Observasi

Pedoman observasi berisi rumusan item pengamatan yang terkait dengan situasi, konteks, dan peristiwa yang terjadi hubungannya dengan subjek dan latar wilayah penelitian. Untuk melengkapi fungsi peneliti sebagai human instrument, maka peneliti juga menyiapkan (menggunakan) instrumen pencatatan sebagai berikut :

1) Catatan Lapangan

Catatan lapangan adalah pencatatan tentang situasi, konteks, dan peristiwa yang terkait dengan tempat, aktor, dan aktivitas (setting) di selama penelitian berlangsung. Hal ini untuk memudahkan pengamat dalam mengingat temuan yang sudah didapatkan dan sebagai alat bantu dalam melakukan analisis data

2) Pengalaman Lapangan (Log Book)

Merupakan buku harian pengalaman lapangan yang dibuat dengan format tertentu dan diisi setiap hari. Log book dan catatan lapangan akan dimanfaatkan untuk analisis data. Analisis data dimulai sejak hari pertama pengumpulan data, dimulai dengan penyusunan kategori-kategori data

3) Catatan Satuan Tematis

Catatan satuan tematis adalah catatan rinci tentang tema-tema khusus dari penelitian ini, di antaranya peristiwa interpersonal yang memperlihatkan

relasi sosial aktor dalam konteks kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah (studi kasus organisasi 'Aisyiyah di Kota Makassar);

1. Catatan Kronologis

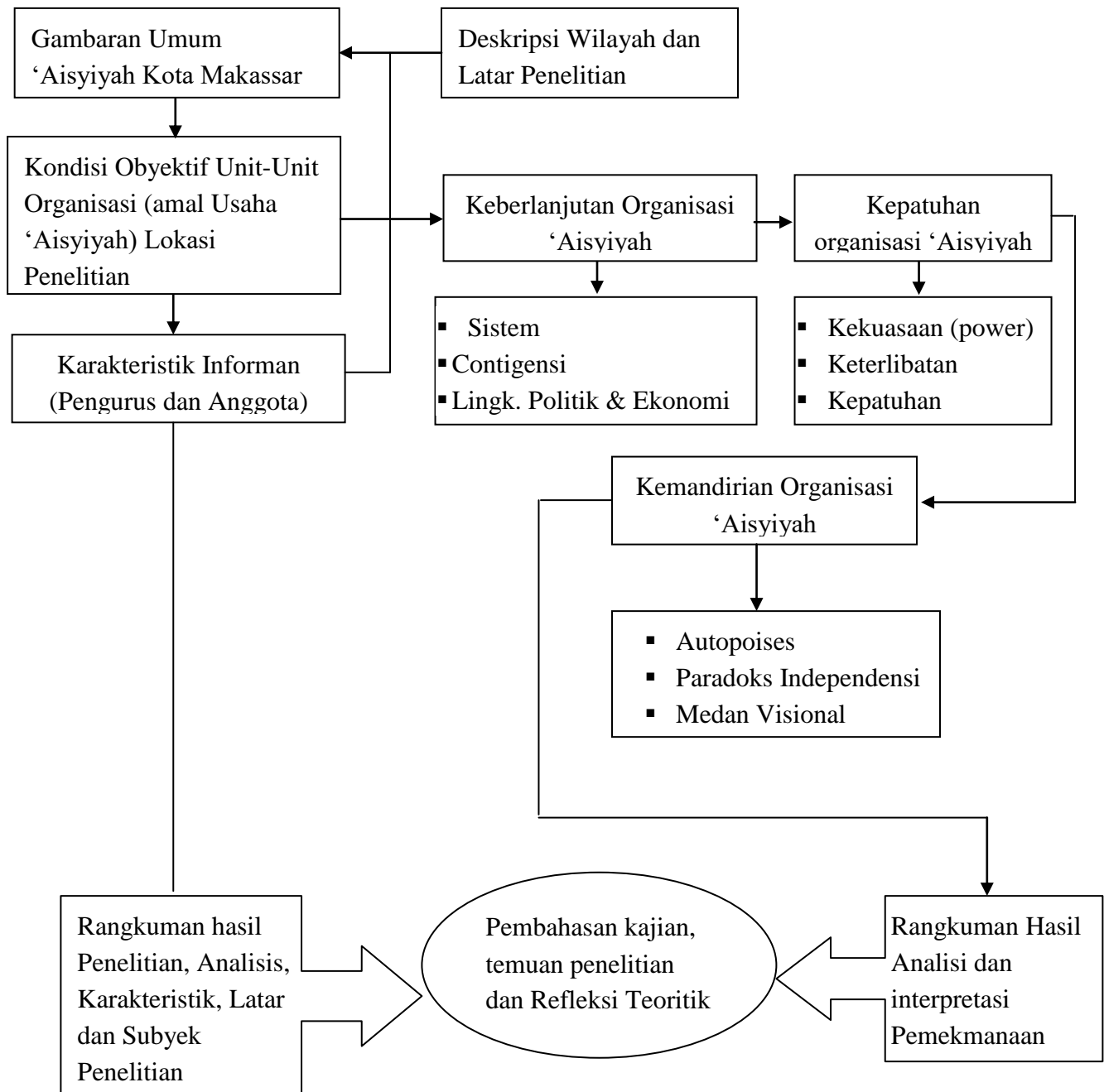
Catatan kronologis adalah rincian catatan selama penelitian lapangan yang dibuat secara kronologis dari waktu ke waktu atas setiap peristiwa atau kejadian penting yang memperlihatkan bentuk, proses, intensitas, dan setting berlangsungnya fenomena kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar

2. Alat perekam suara

Alat perekam suara terutama digunakan untuk membantu pencatatan hasil wawancara dengan para informan. Alat perekaman tidak hanya dilakukan pada saat wawancara dengan subjek, tetapi juga pada saat pengamatan dilaksanakan

3. Alat Kamera Foto

Alat kamera foto digunakan terutama untuk mengabadikan berbagai data visual khususnya menyangkut lokasi dan kondisi fisik organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar, termasuk aktivitas-aktivitas yang mendukung validitas data dan informasi yang diperoleh.

Lampiran-2 : *Bagan Outline Kajian***BAGAN OUTLINE KAJIAN**

Lampiran-3 : *Rencana Outline (Kerangka Isi) Laporan Penelitian*

**RENCANA OUTLINE (KERANGKA ISI)
LAPORAN PENELITIAN**

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian

BAB II. KAJIAN TEORI

- A. Kemandirian dan Keberlanjutan Organisasi
- B. Kepatuhan dalam Organisasi.
- C. Hubungan Muhammadiyah dengan 'Aisyiyah.
- D. Kerangka Konseptual

BAB III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Kualitatif
- B. Fokus Penelitian dan Penentuan Informan
- C. Penentuan Lokasi dan Subyek Penelitian
- D. Jenis dan Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisis Data
- G. Pengabsahan Data
- H. Definisi Konseptual

BAB IV. SETTING LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum 'Aisyiyah Kota Makassar
- B. Sejarah Singkat Berdirinya Organisasi 'Aisyiyah
- C. Kondisi Organisasi (Amal Usaha) 'Aisyiyah
- D. Karakteristik Informan (Subyek) Penelitian

BAB V. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- A. Dinamika Kemandirian Organisasi 'Aisyiyah dalam Berbagai Fase Perkembangan
 - 1. Fase sebelum (Pra) Kemerdekaan (Penjajahan)
 - 2. Fase sesudah (Pasca) Kemerdekaan (Orde Baru)
 - 3. Fase Reformasi (sepuluh tahun) terakhir
- B. Keberlanjutan Organisasi 'Aisyiyah dalam Merespon Dinamika Lingkungan Eksternalnya.

1. Keberlanjutan Organisasi 'Aisyiyah
 2. Respons 'Aisyiyah Terhadap Dinamika Lingkungan
 3. Proses Perubahan dan Adaptasi Organisasi
- C. Dinamika Kepatuhan Anggota Organisasi dan Kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah
1. Kepatuhan Anggota Organisasi 'Aisyiyah
 2. Kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah
 3. Dinamika Perkembangan 'Aisyiyah Kota Makassar

BAB VI. TAFSIRAN DAN ANALISIS SOSIOLOGIS

- A. Tafsiran Sosiologis tentang Kemandirian Organisasi
 1. Autopoiesis Organisasi 'Aisyiyah
 2. Paradoks Independensi Organisasi 'Aisyiyah
 3. Medan Visional Organisasi 'Aisyiyah
- B. Analisis Sosiologis tentang Keberlanjutan Organisasi
 1. Sistem dan Struktur Organisasi 'Aisyiyah
 2. Contigensi dan Daya Saing Organisasi 'Aisyiyah
 3. Perkembangan Lingkungan Politik dan Ekonomi
- C. Kepatuhan dalam Organisasi 'Aisyiyah
 1. Kekuasaan (Power) Organisasi 'Aisyiyah
 2. Keterlibatan Pengurus dan Anggota 'Aisyiyah
 3. Kepatuhan dan Konsistensi Organisasi 'Aisyiyah

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 4 : *Daftar Pengodean Latar. Subjek dan Subtansi Penelitian***DAFTAR PENGODEAN LATAR, SUBJEK, DAN
SUBSTANSI PENELITIAN**

No.	Objek Penkodean Data	Kode Data	Ket
1.	Latar Penelitian 1.1 'Aisyiyah Kota Makassar 1.2 Unit Organisasi-Amal Usaha 1.3 Cabang A'isyiyah dan Ranting "aisyiyah	AKM UO-AU CA&RA	
2.	Subjek Penelitian (informan) 2.1. Informan Pendidikan (sekolah) 2.2. Informan Kesehatan (RS, BKIA) 2.3. Informan Kegiatan sosial 2.4. Informan Muhammadiyah 2.5. Informan Pemerintah 2.6. Informan Tokoh Masyarakat	IP IK IKS IMh IPm ITM	Jika Subjek lebih dari satu orang ditambahkan kode, 1,2, 3, Di belakang kode
3.	Kemandirian Organisasi 3.1. Sejarah Berdirinya Organisasi 3.2. Identitas, Bentuk, dan Eksistensi Organisasi 3.3. Fasilitas dan Ciri-ciri Organisasi 3.4. Struktur dan jaringan organisasi	SBO IBEO FCO SJO	
4.	Keberlanjutan Organisasi 4.1. Sistem pengikat Organisasi 4.2. Kemampuan dan Daya Saing Organisasi 4.3. Kebijakan dan Langkah Antisipasi 4.4. Perubahan dan adaptasi Lingkungan Organisasi	SPO KDSO KLA PALO	
5.	Kepatuhan dalam Organisasi 5.1. Kekuasaan pengurus & anggota 5.2. Keterbilatan Aktif dan Partisipasi 5.3. Bentuk Kepatuhan & Ketaatan 5.4. Konsistensi Visi & Misi Organisasi 5.5. Fleksibilitas Anggota Organisasi	KPA KAP BKK KVMO FAO	
6.	Interpretasi Peneliti 6.1. Analisis Kemandirian Organisasi 6.2. Analisis Keberlanjutan Organisasi 6.3. Tafsiran Kepatuhan Organisasi	KPAP-Hutan KPAP-Masy KPAP-Desa	

Lampiran- 5 : *Jadwal Kegiatan Lapangan***JADWAL KEGIATAN LAPANGAN**

No.	Kegiatan	Bulan ke-						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengurusan Izin	✓						
2.	Observasi latar dan dokumentasi	✓						
3.	Penelusuran subjek	✓	✓	✓	✓	✓		
4.	Wawancara mendalam	✓	✓	✓	✓	✓		
5.	Pengamatan tindakan dan peristiwa sehari-hari	✓						
6.	Pengelolaan data: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reduksi data ▪ Penyajian data ▪ Penarikan Kesimpulan (berlangsung Interaktif dan bersiklus selama penelitian) 	✓	✓	✓	✓	✓		
7.	Pemekrisaan Keabsahan Data		✓	✓	✓	✓		
8.	Penulisan Laporan		✓	✓	✓	✓		
9.	Presentasi dan Diskusi dengan Pembimbing					✓	✓	✓
10.	Seminar dan Promosi						✓	✓

Lampiran- 6 : *Pedoman Wawancara*

PEDOMAN WAWANCARA

1. Nama Lengkap :
2. Nama Panggilan :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
5. Agama :
6. Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin
7. Pekerjaan :
8. Pekerjaan :
9. Alamat :

No.	Item-item Pertanyaan	Kode Kata
A.	<p>Kemandirian Organisasi: Selidik kemandirian organisasi ‘Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan organisasi tersebut melalui item-item pertanyaan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selidiki/tanyakan bagaimana kemandirian organisasi “aisyiyah sebagai komponen perempuan Muhammadiyah yang ditelusuri melalui fase-fase perkembangan organisasi tersebut. 2. Selidiki/tanyakan bagaimana Autopoises organisasi ‘Aisyiyah, meliputi sejarah berdirinya, sruktur organisasi, serta identitas dan eksistensi organisasi ‘Aisyiyah. 3. Selidiki/tanyakan apakah Autopoises organisasi ‘Aisyiyah telah dilaksanakan sesuai dengan prispip dasar oragnisasi, prosedur dan mekanisme yang berlaku. 4. Selidiki/tanyakan bentuk paradoks indepedensi kegiatan apa saja yang dilakukan masing-masing unit organisasi (amal usaha) agar tetap eksis 5. Selidiki/tanyakan bagaimana kemampuan pengurus ‘aisyiyah dalam merealisasikan program organisasi secara otonom dan mencapai hasil seperti yang diharapkan. 6. Selidiki/tanyakan bagaiman’Aisyiyah mengelola amal usaha (unit organmisasi) meliputi bidang pendidikan (TK, SD, MI, SMP, MTs, SMU, dan SMK) bidang kesehatan (RS, RB, dan BKIA) bidang sosial (panti asuhan) tetap dalam koridor organisasi. 7. Selidiki/tanyakan bagaimana pengurus dan anggota ‘Aisyiyah melaksanakan <i>medan visional</i> Organisasi dengan tetap patuh dan taat pada prispip dasar “<i>amar ma’ruf Nahi Munkar</i>” sejak awalk berdirinya hingga sekarang. 8. Selidiki/tanyakan bagaiman sistem pengelolaan amal usaha ‘Aisyiyah yang tersebar di tingkat cabang dan rating ‘Aisyiyah sehingga mampu menjaga keutuhan organisasi. 	WWC-Kemandirian

B.	<p>Keberlanjutan Organisasi Selidiki dan Analisis mendalam terhadap keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah yaitu konsep yang terkait kebijakan para pengurus dan anggota 'Aisyiyah melalui beberapa pertanyaan berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selidiki/tanyakan bagaimana sistem yang diciptakan untuk menjelaskan keberlanjutan organisasi dan menjaga komitmen sehingga 'Aisyiyah menjelang satu abad tetap eksis. 2. Selidiki/tanyakan mengapa 'Aisyiyah sebagai organisasi yang otonomi daerah masih bergantung pada Muhammadiyah pada setiap Muktamar dan kegiatan-kegiatan-kegiatan nasional lainnya. 3. Selidiki/tanyakan bagaimana strategi dan langkah-langkah yang ditempuh 'Aisyiyah dalam menantisipasi perkembangan dan perubahan di lingkungan eksternal maupun internalnya. 4. Selidiki/tanyakan upaya apakah yang dilakukan para pengurus dan anggota organisasi, sehingga memiliki tingkat daya saing (contigensi) dan diperhitungkan organisasi lain. 5. Selidiki/tanyakan bagaimna 'Aisyiyah melakukan kadersasi terhadap anggota dan apakah sistem yang dilakukan sama dengan organisasi otonom lain di Muhammadiyah 6. Selidiki/tanyakan bagaimana kegiatan ekonomi dan politik di lingkungan organisasi 'Aisyiyah kaitannya dengan contigensi dan sistem yang telah disepakati sesuai koridor organisasi. 7. Selidiki/tanyakan apakah lingkungan ekonomi dan politik yang diciptakan mampu beradaptasi seiring dengan perubahan dan perkembangan organisasi 8. Selidiki/tanyakan apakah kegiatan ekonomi yang dikelola oleh ama usah 'Aisyiyah mampu kebutuhan yang terus meningkat. <p>C. Kepatuhan dalam Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selidiki/tanyakan bagaiman 'Aisyiyah berhasil serta mampu menciptakan kepatuhan para pengurus dan anggota organisasi sejak terbentuk hingga sekarang. 2. Selidiki/tanyakan bagaimana kepatuhan pengurus dan anggota 'Aisyiyah dalam melaksanakan program dan titah organisasi di tingkat cabang dan ranting. 3. Selidiki/tanyakan apakah kekuasaan koersif organisasi dapat menciptakan kepatuhan anggota terhadap organisasi 'Aisyiyah terutama kepatuhan yang bersifat moral. 4. Selidiki/tanyakan bagaiman amodel kekuasaan (power) dalam organisasi 'Aisyiyah (Koersif, remunerasi, normatif) diterapkan untuk menciptakan kepatuhan anggota terhadap organisasi. 5. Selidiki/tanyakan apakah power dominan di dalam menciptakan kepatuhan anggota organisasi yang alternatif, kalkulatif dan moral 6. Selidiki/tanyakan bagaimana keterlibatan anggota organisasi di dalam merelasisasikan program organisasi yang bersifat moral, sehingga organisasi tetap eksis dan berlanjut. 	WWC- Keberlanjutan
----	---	-----------------------

	<ol style="list-style-type: none">7. Selidiki/tanyakan bagaimana kepatuhan 'Aisyiyah kepada pengurus dan anggota kepada 'Aisyiyah di dalam di balik kemnandirian & keberlanjutan organisasi tersebut.8. Selidiki/tanyakan bagaimana kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah sebagai organisasi otonom (ortom), ditinjau dari aspek struktural, fungsional dan kultural.	
--	--	--

Lampiran- 7 : *Pedoman Observasi***PEDOMAN OBSERVASI**

No	Unsur Yang Diobservasi	Kode Data	Instrumen Pelengkap
I	<p>OBJEK PENELITIAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Keadaan organisasi Aisyiyah (Kantor Cabang dan Ranting) di Makassar · Keadaan amal usaha 'Aisyiyah (TK, SD, MI, SMP, MTs, SMU, SMK, RS, BKIA, Panti Asuhan, dan lain-lain. · Interaksi pengurus dan pengelola amal usaha dengan warga masyarakat di sekitar obyek penelitian · Aktivitas sehari-hari pengurus dan pengelola amal usaha · Sarana dan prasarana yang dimiliki amal usaha 'Aisyiyah 	<p>DO-OBK-1</p> <p>DO-OBK-2</p> <p>DO-OBK-3</p> <p>DO-OBK-4</p> <p>DO-OBK-5</p>	<p>Kamera</p> <p>Alat Tulis</p>
II	<p>SUBJEK PENELITIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mendengarkan perbincangan antara informan pengelola amal usaha atas perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai organisasi 'Aisyiyah; · Menghayati pengalaman mereka yang diceritakan sehubungan dengan aksi atau sikap masing-masing informan, terkait tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh organisasi. · Mengamati bentuk reaksi, perilaku dan sikap para informan dalam melakukan interaksi terkait dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban. · Mengamati respons masyarakat atas perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai organisasi 'Aisyiyah dan tanggapan pemerintah terhadap amal usaha yang dikelola 'Aisyiyah dalam pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. · Memperhatikan bentuk komunikasi & informasi yang dikembangkan dalam mengelola kegiatan amal usaha yang telah digariskan, untuk mewujudkan sasaran organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi 'Aisyiyah 	<p>DO-OBK-1</p> <p>DO-OBK-2</p> <p>DO-OBK-3</p> <p>DO-OBK-4</p> <p>DO-OBK-5</p>	<p>Tape Recorder</p> <p>Kamera</p> <p>Alat Tulis</p>

Lampiran-8 : *Pedoman Wawancara Life History***PEDOMAN WAWANCARA LIFE HISTORY**

Nama Informan :
 Nama panggilan :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Alamat :

No	Unsur Yang Diobservasi	Subjek	Kode Data
1.	Apakah profesi (pekerjaan) pokok ibu?	Instrumen	DW-Bigrofai
2.	Sejak kapan ibu menjadi pengurus/anggota 'Aisyiyah?		
3.	Apakah jabatan ibu dalam organisasi 'Aisyiyah?		
4.	Fasilitas apa saja yang dimiliki organisasi 'Aisyiyah, sehingga tetap eksis dan bertahan?		
5.	Apakah struktur organisasi 'Aisyiyah sama dengan struktur organisasi Muhammadiyah?		
6.	Bagaimana sistem pembinaan dan kaderisasi 'Aisyiyah		
7.	Bagaimana kemandirian organisasi 'Aisyiyah kaitannya dengan program kegiatan Muhammadiyah?		
8.	Apakah 'Aisyiyah dapat melaksanakan Mukhtamar yang terpisah dengan Muhammadiyah?		
9.	Bagaimana keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah terkait dengan sistem pembinaan dan kaderisasi organisasi?		
10.	Apakah model pembinaan yang dilakukan menjamin keberlanjutan dan eksistensi 'Aisyiyah?		
11.	Bagaimana bentuk kontigensi & daya saing organisasi 'Aisyiyah dalam menghadapi dinamika perubahan!		
12.	Bagaimana pandangan ibu tentang sistem kepatuhan yang dibangun oleh 'Aisyiyah sejak		
13.			
14.			
15.			

16.	<p>terbentuk?</p> <p>Apakah model kepatuhan pengurus dan anggota dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan organisasi?</p>		
17.			
18.	<p>Apakah kepatuhan pengurus dan anggota organisasi ‘Aisyiyah bersifat koersif, remunerasi, atau normative?</p> <p>Apakah kepatuhan pengurus dan anggota ‘Aisyiyah di dalam mengelola amal usaha bersifat moral?</p> <p>Apakah keterlibatan pengurus/anggota ‘Aisyiyah dalam melakukan kegiatan organisasi bersifat alternatif-moral?</p> <p>Bagaimana model kepatuhan yang ditanamkan setiap anggota ‘Aisyiyah sejak usia dini hingga dewasa?</p> <p>Bagaimana sistem dan model kepatuhan berdasarkan ketentuan organisasi dan berlaku di seluruh tingkatan organisasi (pusat sampai ranting)?</p>		
<p>Catatan: Bentuk pertanyaan ini hanya panduan awal, pertanyaan bisa berkembang dan /atau dikembangkan berdasarkan suasana dan konteks ketika sedang wawancara Sumber informasi utama adalah subyek penelitian (informan), yaitu pengurus dan anggota ‘Aisyiyah Kota Makassar, pengelola dan Pembina amal usaha di tingkat cabang dan ranting</p>			

Lampiran- 9 : *Format Catatan Lapangan***FORMAT CATATAN LAPANGAN****(Contoh)**

Hari/Tanggal :

Kode Lahir :

No	Uraian Catatan	Kode Data & Catatan Pinggir
1.	Wawancara dengan dua informan utama (pengurus 'Aisyiyah) yang dilakukan secara terpisah di Kantor 'Aisyiyah Makassar, dan di Rumah Bersalin Sitti Khadidjah III Kota Makassar.	WWC-Historis, WWC-Struktur, <i>Informan berjanji</i>
2.	Mengamati aktivitas pengurus dan anggota 'Aisyiyah dalam melaksanakan proses pelayanan di Rumah Bersalin.	<i>bersedia di wawancarai bila diperlukan</i>
3.	Dst.	

Lampiran-10 : *Format Catatan Hasil Wawancara***FORMAT CATATAN HASIL WAWANCARA****(Contoh)**

Hari/Tanggal (Informan) :.....
 Kode Subjek :.....
 Umur :.....
 Jenis Kelamin :Laki-laki/Perempuan
 Pendidikan :.....
 Pekerjaan :.....
 Alamat :.....
 Hari/Tanggal Wawancara :.....

No	Uraian Catatan	Kode Data & Catatan Pinggir
1.	Pertanyaan: Sejak kapan berdirinya organisasi “Aisyiyah? Jawaban:	WWC-Historis,
2.	Dst.....	

Lampiran – 11 : *Catatan Satuan Tematis***CATATAN SATUAN TEMATIS**

No	Tema Kesatuan Peristiwa	Kode Data
<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Catat secara rinci semua satuan peristiwa yang diamat;- Catat hari, tanggal, jam dari satuan peristiwa, serta kode subyek, kode latar dan catatan lainnya yang penting.		

Lampiran-12 : *Buku Harian (Log Book) Pengalaman Lapangan*

**BUKU HARIAN (LOG BOOK)
PENGALAMAN LAPANGAN**

Hari/Tanggal :

Kode Latar :

No	Jam	Uraian Catatan	Kode Data

BAB I

PENDAHULULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya 'Aisyiyah sebagai komponen Perempuan Muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial keagamaan sudah menjelang satu abad (96 tahun) telah menunjukkan kiprahnya untuk pencerahan, pemberdayaan, dan kemajuan terhadap kemaslahatan bagi kehidupan umat, masyarakat, bangsa, dan negara (dunia kemanusiaan). Keberhasilan dan peran positif 'Aisyiyah merupakan karunia Allah yang diraih karena kekuatan keihlasan, komitmen, dan partisipasi 'Aisyiyah sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar serta tajdid, sehingga selalu menunjukkan semangat yang tinggi untuk berkiprah konstruktif dalam kehidupan. Keberhasilan itu juga diraih karena kepercayaan dan dukungan berbagai pihak yang memiliki semangat yang sama untuk memajukan kehidupan masyarakat.

'Aisyiyah lahir pada tahun 1917 saat situasi dan kondisi masyarakat Indonesia dalam keterbelakangan, kemiskinan, tidak terdidik, awam dalam pemahaman keagamaan, dan berada dalam zaman penjajahan belanda. Kondisi perempuan semakin memprihatinkan ketika pada saat yang sama dibalut dengan budaya masyarakat yang bersifat patriarki, menempatkan perempuan tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang memuliakan dan menjunjung tinggi martabat kaum perempuan. KH.Ahmad Dahlan bersama Nyai Siti Walidah menaruh perhatian besar dan memberikan jalan keluar yang berjangka panjang dalam bentuk usaha terobosan

atas kondisi kaum perempuan yang tidak beruntung dari berbagai aspek kehidupan tersebut. Dengan spirit dan pandangan agama berwawasan tajdid (pembaruan), menjadi keyakinan dan pandangan Kyai Dahlan terhadap kaum perempuan dan umat Islam umumnya, maka diadakan kegiatan-kegiatan pencerahan bagi kaum perempuan muda yang disebut *Sopo Tresno* dan selanjutnya disebut *gerakan 'Aisyiyah*.

Kyai Dahlan berpandangan bahwa perempuan tidak sepatutnya hanya mengurus rumah tangga, namun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan pria dalam tugas-tugas sosial untuk pencerahan dan kesejahteraan masyarakat. Sejak itulah hadir perubahan baru dalam pandangan perempuan muslim dari ranah domestik ke ranah publik sejalan dengan prinsip dan misi Islam sebagai agama yang membawa rahmatan lil-'alamin. Dengan demikian kelahiran 'Aisyiyah adalah bentuk pembaruan yang menjunjung tinggi dan memuliakan kaum perempuan serta mendorong untuk berkiprah di ruang publik guna membawa misi dakwah dan tajdid bagi kemajuan dan perkembangan hidup umat manusia.

Beberapa hasil penelitian tentang 'Aisyiyah Kota Makassar, antara lain: (1) Ismah Salman (2005), meneliti tentang Keluarga Sakinah dalam "Diskursus Gender" di Organisasi Perempuan Muhammadiyah. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian antara lain, "Kehidupan keluarga yang agamais dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan 'Aisyiyah". (2) Hidayah Quraisy (2005), meneliti tentang "Analisis Kinerja Aisyiyah di Desa Binaan (Qoryah Thoyyibah) di Labakkang". Kesimpulan yang diperoleh dari studi ini adalah, "Pembinaan dan kaderisasi warga 'Aisyiyah melalui Desa Binaan adalah sangat efektif demi kelangsungan dan

keberlanjutan amal usaha Muhammadiyah”. (3) Rosmaniah Hamid (2008), meneliti tentang “Implementasi Hadis-Hadis dalam konsep keluarga sakinah Kota Makasar”. Studi ini menyimpulkan bahwa, “Keluarga sakinah merupakan harapan dari setiap keluarga Muslim, karena itu ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah telah memberi contoh melalui kegiatan pengajian secara rutin dan kegiatan keagamaan lainnya”. Mencermati garis besar simpulan dari hasil penelitian di atas, telah memberi inspirasi kepada peneliti untuk melakukan kajian dalam perjalanan sejarah, khususnya peran dan kiprah ‘Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan pendidikan di Indonesia bisa mandiri dan berlanjut.

Realitas gerakan serta manfaat ‘Aisyiyah selama ini telah dapat dirasakan oleh masyarakat luas terlihat dari banyaknya amal usaha yang dilakukan. Sebuah cita-cita yang didambakan oleh Nyi Ahmad Dahlan selangkah demi selangkah, setahap demi setahap mulai diwujudkan. Satu abad bukanlah waktu yang singkat untuk suatu organisasi yang masih tetap eksis. Hal ini mengindikasikan sejauh mana estafet gerakan Aisyiyah telah berjalan diiringi dengan sistem organisasi yang solid dan mekanisme kerja yang terstruktur.

Eksistensi ‘Aisyiyah sebagai sebuah organisasi serta langkah yang ditempuhnya dalam upaya mewujudkan masyarakat madani merupakan salah satu indikator sebagai identitas yang dimiliki untuk mengidentifikasi ada tidaknya perkembangan masyarakat madani. Relevansi indikatornya yaitu termanifestasi dalam organisasi yang dipenuhi oleh gerakan ‘Aisyiyah. Hal ini ditinjau dari prinsip-prinsip

organisasi dipegang oleh masyarakat madani sebagai perwujudan identitasnya secara material. Hal ini berarti masyarakat madani bukan merupakan individu-individu yang partisipatif dan otonom saja, tetapi terdiri dari sekumpulan individu warga yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi yang memiliki tatanan yang menjamin anggotanya mampu mengekspresikan diri, mengembangkan minat, saling menukar informasi, memediasi perbedaan-perbedaan dan menciptakan pola-pola hubungan yang stabil. Di samping itu, mereka juga tertata dalam organisasi modern yang mengembangkan nilai-nilainya sendiri secara konsisten.

Cita-cita menuju masyarakat madani adalah juga sejalan dengan visi pengembangan 'Aisyiyah, yaitu "tercapainya usaha-usaha Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah secara berkualitas, yakni masyarakat Islam yang sebenar-benarnya" merupakan penjabaran berkesinambungan dari visi idealnya untuk tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang dicita-citakan.

Gerakan dakwah yang dimaksud adalah Dakwah Islam Amar Makruf Nahi Munkar. Dakwah Islam; artinya mengajak, menyeru dan memanggil umat manusia untuk memeluk dan melaksanakan serta menegakkan ajaran Islam. Amar makruf; artinya mengajak dan menunjukkan pada hal-hal yang baik, bermanfaat dan terpuji. Nahi Munkar; artinya mencegah, melarang, menolak, menjauhkan dan mengikis hal-hal yang buruk, kotor dan keji.

'Aisyiyah bukan sekadar nama besar sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia. 'Aisyiyah memiliki jaringan struktural yang cukup kuat dan luas

di seluruh wilayah Nusantara yang sangat menunjang gerak dakwah yang dilakukannya. Jaringan struktural 'Aisyiyah tersebar dan berjenjang dalam beberapa level yang mempunyai kewenangan dan wilayah kerja masing-masing. Jaringan yang tersebar di seluruh daerah ini merupakan potensi yang sangat besar untuk membangun umat dan bangsa ini menuju masyarakat utama dalam bentuk sinergi dan jaringan yang kuat di beberapa bidang.

Jaringan struktural merupakan kontribusi 'Aisyiyah terbesar dalam mengakomodasikan warga dalam menyalurkan aspirasinya, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh daerah melalui berbagai aktivitas keagamaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sosial, dan sebagainya. Pengembangan dakwah Islam melalui dakwah jamaah dan dakwah kultural merupakan strategi dakwah masa kini. Strategi ini mengingat tantangan global, perkembangan teknologi, dan pola pikir umat yang semakin berkembang. Konsep tersebut kemudian diwujudkan melalui gerakan Tajdidiyah, Islahiyah, dan Tabsyiriyah (TIT) menggunakan pendekatan sumber daya manusia, ekonomi, kesejahteraan, struktural dan pendekatan global.

Pendekatan sumber daya manusia merupakan upaya mencerdaskan kehidupan umat. Pendekatan ekonomi dan kesejahteraan dilaksanakan dengan mengajarkan etos kerja yang tinggi. Pendekatan struktural tetap ditingkatkan dengan mewujudkan kegiatan politik dan birokrasi sebagai pendukung dan pelindung dakwah. Pendekatan global juga perlu dilakukan dengan tetap berpikir makro dan mikro secara seimbang,

beraktivitas lintas sektoral, membangun kolektivitas dan individual, umum maupun khusus, untuk kemaslahatan umat manusia.

Perkembangan organisasi 'Aisyiyah sejak awal berdirinya dilakukan melalui gerakan Tajdidiyah, Islahiyah, dan Tabsyiriyah, atau disingkat 'TIT'. Tajdidiyah; artinya pembaharuan, peningkatan dalam pemahaman agama atau mengembalikan ajaran agama sesuai tuntunan Qur'an dan Sunnah. Islahiyah; artinya perdamaian, kerukunan dan/atau persaudaraan dalam kemasyarakatan. Tabsyiriyah; artinya penghiburan, pembimbingan serta pemberian dorongan dalam beribadah dan beramal saleh.

Gerakan dakwah melalui TIT yaitu Ibadah, Akhlaq, Tauhid, Tabligh, Kegiatan Jihad, Persatuan dan Syi'ar Islam, Pendidikan, Seni dan Budaya, Kesehatan, Ekonomi, serta amalan-amalan Islam lainnya dengan tujuan utama untuk mewujudkan pribadi muslim, mukmin dan mukhsin. Demikian Misi Gerakan TIT 'Aisyiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan meliputi: (1) menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengalaman, menyebarluaskan ajaran agama Islam dalam segala aspek kehidupan; (2) meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian agama Islam; (3) memperteguh iman, memperkuat dan menggemirakan ibadah, mempertinggi akhlak; (4) meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, membangun dan memelihara tempat ibadah, serta amal usaha yang lain; (5) meningkatkan pendidikan, membangun kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian; (6) memajukan perekonomian dan

kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas; (7) meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, lingkungan hidup; (8) meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa; (9) meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri serta usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

Seluruh aktivitas tersebut dilakukan secara mandiri dan mendorong partisipasi dalam kebersamaan. Bentuk-bentuk masyarakat partisipatif yang demikian inilah yang dikembangkan agar kehidupan yang demokratis dapat ditopang oleh masyarakat madani. Dalam hal ini 'Aisyiyah ikut memberikan jawaban atas berbagai permasalahan, baik problematika daerah, wilayah, nasional maupun global yang dari waktu ke waktu senantiasa mengalami pengembangan. Peran, komitmen serta tanggung jawab 'Aisyiyah semakin besar dan terbuka. Kehadiran dan keterpanggilan 'Aisyiyah di setiap jengkal lahan amal usaha pada setiap kondisi merupakan wujud 'Aisyiyah sebagai gerakan rahmatan lil 'alamin.

Kunci keberhasilan organisasi (semisal 'Aisyiyah) tidak dapat diukur dengan melimpahnya materi, atau bisa memimpin organisasi besar. Banyak pemimpin organisasi besar yang mengecewakan anggotanya, karena tidak adanya komunikasi yang baik antara pemimpin dengan anggotanya. Hal ini terkadang seorang pemimpin lebih mengedepankan sikap otoriter dan mengabaikan aspirasi anggota. Perlu dipahami bahwa organisasi bukan milik individu maka sikap individual harus

dihindari. Setiap orang memiliki kepentingan yang harus dipahami oleh pemimpin organisasi, tetapi bukan berarti pemimpin harus tunduk dan terkontaminasi oleh banyak kepentingan individu-individu anggota organisasi.

Menurut Amien (2005: 220), menemukan format organisasi yang sesuai dengan spirit milenium baru yang senantiasa berubah dengan cepat serta penuh ketidakpastian dijelaskan dengan konsep “Kemandirian Lokal” sebagai acuan utama. Dengan demikian organisasi dapat dilihat sebagai suatu tatanan menjaga atau untuk meningkatkan kualitas kemandirian dari semua komponen tatanan diposisikan sebagai kata kunci. Ini berarti bahwa selain melaksanakan misinya, suatu organisasi seyogyanya berfungsi sebagai pendorong dan fasilitator upaya-upaya para anggotanya untuk meningkatkan kualitas kemandirian mereka (anggota organisasi) dalam mengartikulasikan kepentingan masing-masing.

Fungsi-fungsi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misi organisasi. Demikian halnya dalam organisasi ‘Aisyiyah misi tersebut dapat diimplementasikan pengurus dan anggota ‘Aisyiyah baik di tingkat cabang maupun ranting, berdasarkan jumlah dan jenis amal usaha yang dimiliki. ‘Aisyiyah sebagai gerakan Perempuan Muhammadiyah yang semula bernama *Sopo Tresno* (Perkumpulan kaum perempuan), kemudian berubah menjadi ‘Aisyiyah tanggal 22 April 1917. Dalam perkembangannya menjelang satu abad, ‘Aisyiyah tetap konsisten sesuai dengan tatanan (khittah) perjuangan atau gerakan, yaitu “Amar ma’ruf nahi munkar”.

‘Aisyiyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang memiliki 33 Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi), 370 Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten/kota), 2.332 Pimpinan Cabang (setingkat Kecamatan), dan 6.924 Pimpinan Ranting (setingkat Kelurahan/Desa). Selain itu, ‘Aisyiyah memiliki amal usaha yang bergerak di berbagai bidang (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat). Amal Usaha di bidang pendidikan saat ini berjumlah 4.560 yang terdiri dari Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak (TK), Tempat Penitipan Anak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan lain-lain. Amal usaha di bidang Kesehatan, terdiri dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Badan Kesehatan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan dan Posyandu berjumlah 280 tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai gerakan yang peduli dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan, ‘Aisyiyah hingga kini memiliki sekitar 459 amal usaha yang bergerak di bidang ini meliputi : Rumah Singgah Anak Jalanan, Panti Asuhan, Dana Santunan Sosial, Tim Pengrukti Jenazah dan Posyandu.

Menyadari hal tersebut, bahwa harkat dan martabat perempuan tidak akan meningkat tanpa diikuti peningkatan kemampuan di bidang ekonomi. Karena itu, ‘Aisyiyah dalam mengelola berbagai amal usaha dapat ditunjang oleh bidang ekonomi, antara lain koperasi, Toko dan/ataukios, Badan Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA), Simpan Pinjam, Home Industri, kursus, dan Arisan. Selain itu, Aisyiyah memiliki kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk penyadaran terhadap kehidupan bermasyarakat (muslim), berbaga dan bernegara. Terkait dengan kegiatan ekonomi dalam mengelola amal usaha termasuk pengajian, Qoryah

Thayyibah, Kelompok Bimbingan Haji (KBIH), Badan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS).

Sejalan dengan latar belakang berdirinya ‘Aisyiyah yang diasumsikan sebagai wadah (gerakan) tentang kesejahteraan sosial yang diperjuangkan ‘Aisyiyah ialah terciptanya suatu kondisi ideal dari tata kehidupan masyarakat “*baladatul thayyibatun wa rabbun ghaffur*”, yaitu suatu kehidupan bahagia, sejahtera, penuh limpahan rahmat, dan nikmat Allah saw, di dunia dan di akhirat (tercipta suatu titik keseimbangan aspek jasmaniah dan rohaniah ataupun aspek material dan spiritual. Kelahiran organisasi perempuan sering dipandang sebagai masalah pada masa penjajahan. Hal ini karena gerakan dapat dinilai sebagai batu loncatan untuk menjadikan gerakan perempuan telah mengalami liberalisasi atau emansipasi yang kebablasan di satu pihak, dan di lain pihak lain, gerakan perempuan dilihat dari kondisi strukturalnya apakah benar-benar otonom atau tidak.

Sehubungan dengan itu, perkembangan organisasi ‘Aisyiyah Kota Makassar menuju kemandirian melalui pemberdayaan ekonomi, politik, dan sosialbudaya dalam masyarakat oleh pengurus dan anggota bersama-sama membuat perencanaan kerja sesuai dengan biaya kegiatannya. Beberapa item yang menjadi titik sorot dalam perencanaan kerja ini ialah, kegiatan pendidikan dan penyadaran yang berpihak kepada lingkungan dan rakyat terpinggir (*grassroot*), pemberdayaan pada petani, memperkuat tim (*capacity building*) dan jejaring (*net work*) serta kegiatan yang bersifat mendesak dan karitatif (*emergency and caritatif*).

Kegiatan yang direncanakan dalam jangka waktu lima tahun memiliki kerangka acuan yang sistematis, terinci, dan detail. Selain itu, para anggota organisasi (pengelola amal usaha) dengan mempertajam kegiatan-kegiatan tersebut, kurun waktu satu tahun sebagai langkah terobosan. Walaupun demikian disadari bahwa setiap perencanaan mesti dibarengi dengan usaha dan kerja keras secara bersama-sama, saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Jika ditinjau dari konteks sosiologi organisasi, tipologi organisasi merupakan cara untuk membandingkan satu organisasi dengan organisasi lain. Misalnya, organisasi 'Aisyiyah senantiasa menampilkan suatu susunan tugas dan fungsi, peranan, status serta jabatan-jabatan tertentu. Namun, dari kesamaan-kesamaan itu muncul karakteristik tertentu yang membedakan 'Aisyiyah sebagai organisasi otonom dengan organisasi lainnya.

Mencermati pertanyaan yang sangat mendasar adalah, bagaimana mengembangkan organisasi perempuan Islam dalam memainkan peran sebagai perilaku perubahan sosial. Di sisi lain, fenomena yang ada tentang partai politik menunjukkan kecenderungan mulai dari tingkat pusat, wilayah, cabang, anak cabang, sampai ranting aspirasi mengarah pada partai politik tertentu dan mengusung salah satu pengurusnya menjadi calon anggota DPD, namun hasil yang dicapai tidak signifikan bila dibandingkan dengan jumlah anggota beserta keluarganya yang ada di kota Makassar.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak daerah, wilayah, ranting dan cabang 'Aisyiyah mengalami permasalahan kader; tidak hanya di Daerah, Wilayah, Cabang dan Ranting di tingkat pusat juga kesulitan mencari kader yang mau dan mampu

untuk aktif di 'Aisyiyah. Yang mampu tapi tidak mau banyak, yang mau dan mampu tapi tidak ada waktu juga sangat banyak. Kekurangan kader di 'Aisyiyah bukan berarti 'Aisyiyah tidak diminati oleh kaum perempuan. Namun, pada kenyataannya setiap pengajian dan aneka kegiatan 'Aisyiyah, selalu diminati banyak peserta dan yang datang itu juga mengakui dirinya sebagai anggota 'Aisyiyah dan selalu mendukung setiap kegiatan (program kerja) 'Aisyiyah.

Kajian Sosiologi tentang fenomena yang dihadapi 'Aisyiyah adalah yang mau bergabung dengan 'Aisyiyah secara organisasi cukup banyak, tapi yang mau bergabung dan bertanggung jawab (aktif dalam organisasi) itu yang tidak ada. Ibu-ibu 'Aisyiyah dan kaum perempuan Muhammadiyah, hanya mau jadi anggota, ikut pengajian dan kegiatan lain tetapi jika disertai tanggung jawab mengurus organisasi (pengurus harian), memikirkan agar 'Aisyiyah lebih maju banyak tidak bersedia. Dengan demikian, fenomena yang dihadapi 'Aisyiyah adalah kurangnya kader (krisis kader) yang selalu siap menggerakkan roda organisasi. Meskipun demikian, 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah di mana eksistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) tidak diragukan sejak kelahirannya hingga sekarang.

Menyadari hal tersebut (krisis ideology), maka oleh Pengurus Pusat 'Aisyiyah menempuh beberapa strategi, antara lain: dengan mengadakan sekolah kader Muallimat dan Stikes serta mendirikan Pondok Nyi Ahmad Dahlan, kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Di sekolah-sekolah kader itu para remaja putri dibekali aneka kegiatan yang terkait dengan dakwah, serta ditanamkan nilai dan norma-norma kesadaran bahwa, mereka adalah kader-kader

penerus 'Aisyiyah di masa datang dan harus menjadi penggerak 'Aiyiyah di manapun mereka berada.

Fenomena tersebut mengungkapkan betapa organisasi perempuan sebesar 'Aisyiyah masih tetap memerlukan bantuan dana atau finansial dari sumber lain. Sekalipun amal usaha seperti Rumah Sakit, Sekolah dan amal usaha lainnya sudah merata di setiap daerah. Kemandirian semestinya terlihat pada moment-moment seperti muktamar atau muswil. Jika hal ini tidak dapat dijawab sebagai tantangan berorganisasi maka 'Asyiyah akan mengalami persoalan manajemen keuangan. Dari berbagai persoalan tersebut, Peneliti memfokuskan perhatian pada masalah kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar, dengan asumsi bahwa Kota Makassar adalah Kota Metropolitan tumbuh dan berkembang dengan pesatnya komunitas perempuan ada yang bersifat institusional, profesional dan mandiri, yang mempertegas Kota Makassar sebagai basis organisasi perempuan di Kawasan Timur Indonesia.

Mencermati latar belakang di atas tentang fenomena sosial terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah, terutama di era reformasi sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia yang terus berkembang dan tetap eksis dalam kurun waktu yang relatif lama (sudah menjelang satu abad). Sehubungan dengan itu, dalam disertasi ini konsep kemndirian dibatasi pada tiga aspek yang akan dikaji, yaitu medan visional organisasi 'Aisyiyah; paradoks independensi dalam mengelola amal usaha 'Aisyiyah; dan autopoiesis organisasi, yakni bagaimana 'Aisyiyah melakukan reproduksi diri sendiri terhadap unit-unit

organisasi (meperbaharui dirinya) dan menghasilkan unit-unitnya sendiri sebagai sistem yang otonom dalam mengantisipasi perkembangan serta perubahan organisasi dari fase ke fase, dari periode ke periode sehingga 'Aisyiyah Kota Makassar dapat bertahan dan berkembang sejak didirikan (1926) sampai sekarang.

Selain itu, tentang keberlanjutan organisasi dalam penelitian ini juga dibatasi pada tiga aspek yang saling terkait, yaitu sistem yang otonom, daya kontigensi, dan lingkungan strategis. Dalam hal ini, 'Aisyiyah sebagai sistem yang otonom dalam mengelola unit-unit organisasi mampu mengembangkan daya kontigensi dalam merespon lingkungan strategis melalui program kerja yang disusun secara terarah, sistematis, dan terencana. Kemudian tentang kepatuhan organisasi dalam penelitian ini akan ditelusuri bagaimana bentuk kepatuhan yang dikembangkan anggota kepada 'Aisyiyah dan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah dibalik kemandiridan dan keberlanjutan organisasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas tentang berbagai fenomena sosial yang urgen dan menarik untuk dikaji, terkait dengan problema kemandirian dan keberlanjutan organisasi, maka penulis terpanggil untuk melakukan studi ini dengan judul: Kemandirian dan Keberlanjutan Organisasi Aisyiyah (*Studi Kasus 'Aisyiyah Kota Makassar*).

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari penjelasan dan uraian pada latar belakang di atas, maka fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini merupakan kenyataan yang

dihadapi 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah dengan harapan yang ingin diwujudkan, yaitu kemandirian, keberlanjutan, serta kepatuhan anggota 'Aisyiyah terhadap "Khittah" organisasi sejak didirikan hingga dewasa ini (menjelang satu abad). Sehubungan dengan itu, agar lebih fokus dan terarah pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang akan dikembangkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika kemandirian 'Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan organisasi tersebut?
2. Bagaimana keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah dalam merespons dinamika lingkungan eksternalnya?
3. Bagaimana dinamika kepatuhan anggota kepada organisasi 'Aisyiyah dan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah dibalik kemandirian dan keberlanjutan organisasi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin diwujudkan adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dinamika kemandirian 'Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangannya.
2. Menjelaskan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah dalam merespons dinamika lingkungan eksternalnya.

3. Menganalisis dinamika kepatuhan anggota kepada organisasi 'Aisyiyah dan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah di balik kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan organisasi perempuan umumnya dan 'Aisyiyah pada khususnya sebagai wahana pembaharuan tekad perjuangan perempuan sesuai harkat dan martabatnya. Selain itu, sebagai acuan dalam mengembangkan teori-teori organisasi terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan dalam Muhammadiyah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang mengungkap fakta empiris tentang fenomena kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah khususnya, maupun organisasi perempuan umumnya, diharapkan sebagai acuan praktis dalam pembinaan dan pengkaderan anggota 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan visi dan misi organisasi 'Aisyiyah khususnya di Kota Makassar kini dan ke depan di tengah masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum menjelaskan tinjauan pustaka (kajian teori) yang digunakan dalam studi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan keterkaitan atau hubungan beberapa konsep utama yang dikembangkan ditinjau dari pandangan para ahli yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Terkait dengan beberapa konsep utama yang menjadi fokus perhatian adalah fenomena sosial yang terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah sebagai komponen perempuan Muhammadiyah (organisasi otonom). Dalam hal ini, konsep utama yang dimaksud adalah tujuan penelitian berdasarkan fakta empiris dengan fenomena sosial yang sedang berlangsung.

A. Kemandirian dan Keberlanjutan Organisasi

Pengertian organisasi menurut Sains Lama, Etzioni dalam Liliweri (1997), bahwa sebuah organisasi dibandingkan organisasi lainnya bisa saja lebih otoritarian atau demokratis; sangat terikat peraturan (informal); inovatif atau menolak perubahan; bisa menerima keragaman atau anti-keragaman; bisa membawa atmosfer yang bersahabat atau tidak bersahabat. Menurut Taylor dalam Liliweri (1997), untuk memaksimalkan tugas dan fungsi organisasi maka harus ada gerakan dan tugas yang dialokasikan ke dalam bagian-bagian tertentu. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka organisasi bisa ditata secara ilmiah dan rasional. Oleh karena itu, setiap orang

dapat dilatih untuk tampil secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan tanggung jawabnya.

Karakteristik yang menarik dari pandangan Sains Lama, terhadap organisasi adalah mirip dengan model mesin. Manusia dianggap sebagai perlengkapan mesin, untuk mendapatkan produktivitas sebesar-besarnya. Setiap organisasi harus memanfaatkan tenaga manusia seperti mesin. Bahkan gerakan-gerakan mereka atau tenaga kerja dapat diatur supaya dapat berproduksi lebih banyak. Konsep Taylor tentang manusia sebagai pelengkap banyak mendapat tantangan para ahli. Dalam hal ini, Taylor dianggap melakukan dehumanisasi terhadap nilai-nilai dan moral manusia di zaman itu. Meskipun pandangan Taylor mendapat tantangan dari banyak ahli, namun Taylor tetap dianggap berjasa karena telah meneliti organisasi secara ilmiah, khususnya tentang bagaimana efisiensi penggunaan waktu kerja manusia dapat meningkatkan produksi. Dalam dunia ilmu administrasi Taylor dikenal sebagai bapak ilmu organisasi dan manajemen.

Pengertian organisasi dalam perspektif Sains Baru, adalah sangat kompleks dan beragam. Dalam hal ini organisasi akan dilihat sebagai suatu tatanan dan menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas kemandirian dari semua komponen tatanan diposisikan sebagai kata kunci. Ini berarti bahwa selain melaksanakan misinya, suatu organisasi seyogyanya berfungsi juga sebagai pendorong dan fasilitator upaya-upaya para anggotanya untuk meningkatkan kualitas kemandirian dalam mengartikulasikan kepentingan masing-masing. Dengan demikian, organisasi menurut Sains Baru adalah “suatu tatanan” yang pembahasannya mesti melibatkan berbagai wawasan atau

pengertian baru yang dihasilkan akibat pergeseran paradigma ilmu pengetahuan, Amien (2005:220).

Organisasi dilihat dari perspektif Sains Baru adalah lebih menyerupai organisme ketimbang sebagai suatu mesin. Namun, harus digarisbawahi adanya perbedaan mendasar antara organisasi dan organisme. Perbedaan itu terletak pada fungsi komponen-komponennya. Komponen organisme berfungsi untuk menunjang keberlangsungan keberadaan organisme, sedangkan pada organisasi justru keberadaan organisasi diperlukan untuk menunjang kepentingan komponen-komponennya, (Amien, 2005:221).

Berdasarkan penjelasan di atas tentang pengertian organisasi, baik menurut pendekatan Sains Lama maupun Sains Baru, maka penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan organisasi dalam perspektif Sains Baru yang lebih relevan. Hal ini mengingat 'Aisyiyah merupakan organisasi kemasyarakatan dan social yang mengemban misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran), sehingga pendekatan yang digunakan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan harkat dan martabat manusia khususnya perempuan.

Organisasi sebagai suatu tatanandapat mengacu pada Teori Sistem Hidup (*living system*), sebagaimana direkomendasikan Capra (1996) yang telah dimodifikasi sesuai dengan lingkup pembahasan. Dengan demikian, bahasan tentang tatanan organisasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek utama dari Sistem Hidup, yaitu pola pengaturan, struktur pengaturan, dan proses pengaturan, (Capra dalam

Amien, 2005:222). Pola pengaturan mengacu kepada konsep *autopoiesis* yang dikembangkan oleh Maturana dan Varela (1987), struktur pengaturan pada konsep disipatif struktur yang dikembangkan oleh Prigogine (1991), dan proses pengaturan mengacu kepada konsep yang diperkenalkan oleh Bateson (1980) yang kemudian disempurnakan oleh Maturana dan Varela (1987).

Pola pengaturan merupakan esensi dari setiap tatanan, karena sebagai penjabaran konsep yang melatarbelakangi pembentukan tatanan. Pola tatanan organisasi, meliputi : (1) misi, merupakan penjabaran alasan pembentukan (*raison d'etre*) organisasi, biasanya berupa uraian tugas dan lingkup tugas yang akan diemban organisasi; (2) visi, gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai organisasi; dan (3) nilai atau etika organisasi yang merupakan acuan organisasi dalam bertindak dan mengemban misinya. Umumnya rumusan ketiga elemen pola pengaturan ini bersifat sangat spesifik, sehingga membuat setiap organisasi berbeda dengan organisasi lainnya. Itulah sebabnya, pola pengaturan sering pula diposisikan sebagai *identitas organisasi*, (Amien, 2005:222).

Istilah “pengaturan diri” atau *swatata*, pertama kali diperkenalkan oleh Kant (1770), bahwa organisme berbeda dari mesin, karena organisme memproduksi dan mengatur dirinya sendiri. Dalam sebuah mesin, setiap bagian mendukung bagian lainnya untuk menghasilkan fungsi tertentu (dari mesin itu), sedangkan pada organisme, setiap bagian memakai bagian lain, dalam arti saling menghasilkan satu sama lain. Karena itu, organisme akan mewujudkan dalam bentuk yang teratur dan mengatur dirinya. Pola pengaturan merupakan konfigurasi interkoneksi yang

melahirkan karakteristik-karakteristik utama yang spesifik dari sistem. Pola pengaturan merupakan deskripsi abstrak tentang hubungan-hubungan dan tidak atau bukan mengidentifikasi komponen-komponennya. Maturana dan Varela (1980), berasumsi bahwa *autopoiesis* adalah pola umum pengaturan yang lazim bagi semua sistem hidup, apa pun hakikat komponen-komponennya.

Prinsip dasar organisasi mengandung beberapa elemen penting yang memberikan gambaran tentang hakekat organisasi, yaitu: (1) bahwa organisasi merupakan suatu kerangka sosial, yaitu suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antara individu dalam organisasi; (2) bahwa dalam organisasi terdapat koordinasi yang dirancang untuk mengatur kegiatan kegiatan orang; (3) bahwa dalam organisasi terdapat pembagian kerja yang diatur dengan tingkatan otoritas seluruh kegiatan ditujukan untuk kegiatan pencapaian tujuan bersama, (Juwono, 2009).

Selain prinsip dasar organisasi yang dimaksud, terdapat beberapa azas yang memiliki pengertian sebagai “penyebab dasar pikiran daripada terciptanya sesuatu”. Dasar pikiran tersebut antara lain: (a) suatu pangkal tolak pikiran untuk sesuatu kasus, dan (b) suatu jalan dan sarana untuk menciptakan sesuatu tata hubungan atau kondisi yang dikehendaki. Lebih lanjut untuk memahami konsep kemandirian dengan meminjam ungkapan Toffler dalam Amien (2005: 220), bahwa semua realitas kemanusiaan dan sosial senantiasa tidak berada dalam keadaan stabil dan setimbang.

Organisasi yang menggunakan strategi pendekatan kontrol normatif atau berdasarkan norma-norma akan mendapatkan komitmen anggotanya lebih besar dibanding organisasi yang menggunakan metoda utilitarian dan organisasi dengan

strategi pemaksaan paling kecil komitmen anggotanya. William Ouchi belajar dari pengalaman Jepang menyimpulkan lebih mudah mengontrol orang melalui pergaulan dan norma-norma daripada insentif materi atau peraturan ketat birokratis. Tetapi budaya bisa diinterpretasikan berbeda-beda. Joanne Martin dalam Amien (2005: 221), menjelaskan tiga pendekatan dalam mempelajari organisasi yaitu: integrasi (*integration*), perbedaan (*differentiation*), dan fragmentasi (*fragmentation*). Berdasarkan perspektif integrasi anggota organisasi tahu persis prinsip dasar yang harus dilakukan dalam organisasi, sehingga mereka harus berperilaku. Jika saya rajin atau berprestasi maka gaji saya akan naik atau mendapat bonus.

Struktur adalah perwujudan pola pengaturan. Jika pola pengaturan bersifat abstrak, maka struktur pengaturan merupakan materialisasi atau perwujudan pola itu dalam bentuk struktur organisasi sebagaimana yang dipahami selama ini. Berbeda dengan organisasi klasik yang cenderung mempertahankan strukturnya, pada organisasi kuantum struktur tidaklah bersifat kaku tetapi senantiasa berubah akibat dua hal. *Pertama*, untuk mengikuti aktualisasi identitas dan aturan-aturan dasar organisasi. *Kedua*, untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan eksternal, yang umumnya bersifat probabilistic atau bahkan chaostik. Penyesuaian dimaksud adalah penting, karena struktur merupakan antarmuka (*interface*) organisasi dengan lingkungannya yang menentukan pertukaran materi, energi dan informasi. Pertukaran dimaksud merupakan syarat dan suatu keharusan, karena pada dasarnya organisasi adalah struktur disipatif yang membutuhkan pasokan energy dari luar untuk mempertahankan keberadaannya.

Reformasi struktur merupakan titik kritis dalam perjalanan sejarah keberadaan suatu tatanan organisasi, karena hasil tarik menarik antara tuntutan dinamika lingkungan dan identitas organisasi menentukan corak masa depan organisasi. Pada umumnya organisasi, yang memiliki identitas yang kuat akan mampu bertahan, karena proses reformasi dapat dilakukan pada tataran struktur tanpa harus diikuti dengan perubahan identitas organisasi. Hal ini disebabkan pada dasarnya identitas dapat mewujudkan dalam berbagai format struktur organisasi, (Amien, 2005: 232).

Beberapa dekade terakhir tampak bahwa lingkungan global terus berubah dengan laju yang semakin tinggi dan dengan pola yang terlihat chaotik. Artinya, jika ingin memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan tuntutan lingkungan organisasi, maka reformasi struktur sering dilakukan dengan pola yang chaotik pula. Misalnya, reformasi sulit dilakukan setiap saat karena membutuhkan sumber daya yang tidak kecil dan mengandung resiko yang cukup besar bagi keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, solusi yang harus ditempuh adalah mendesain struktur organisasi dengan mengacu kepada spirit zaman (*zeitgeist*). Hal ini dimungkinkan karena spirit zaman merupakan *strange attractor* yang banyak menentukan arah kecenderungan dari dinamika lingkungan strategis. Dengan strategi ini, reformasi struktur organisasi tidak perlu terlalu sering dilakukan karena spirit zaman cenderung tidak berubah banyak dalam kurun waktu yang relatif lama.

Proses pengaturan adalah aktivitas yang berlangsung secara kontinu untuk mewujudkan pola pengaturan menjadi struktur organisasi. Dalam sistem hidup (*living system*), proses ini berupa pertukaran energi dan materi antara tatanan dengan

lingkungannya agar tatanan bersangkutan dapat mempertahankan atau bahkan mengembangkan dirinya sesuai dengan pola pengaturannya. Proses ini identik dengan proses metabolisme yang dikenal dalam biologi dan proses adaptasi kreatif pada tatanan organisasi, (Amien, 2005: 236).

Setidaknya ada dua gaya pendorong terjadinya proses pengaturan. *Pertama*, dinamika lingkungan eksternal yang menuntut penyesuaian struktur agar tetap menjamin adanya pertukaran energi, materi dan informasi antara tatanan dengan lingkungannya. *Kedua*, dinamika internal antara komponen-komponen pembentuk tatanan. Dinamika ini terjadi karena setiap komponen tatanan pada dasarnya juga merupakan tatanan yang memiliki kreativitas, dalam arti senantiasa ingin melakukan pembaharuan terhadap dirinya, termasuk pembaharuan terhadap format interkoneksitasnya dengan komponen lainnya. Proses pembaharuan ini merupakan proses yang sangat dinamis, karena setiap komponen akan aktif melakukan semua upaya agar tetap mampu mempertahankan identitas dan kualitas keberadannya di dalam tatanan yang melingkupinya.

Adanya pola pengaturan yang jelas dan diterima serta dimengerti oleh semua komponen organisasi akan membuat tatanan organisasi mampu melakukan proses pengaturan secara otomatis. Hal ini berarti, tuntutan untuk berubah akibat dinamika lingkungan eksternal dan internal akan ditanggapi secara otomatis oleh setiap komponen organisasi sesuai dengan otonomi yang dimiliki, dengan tetap mengacu kepada identitas organisasi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa organisasi yang memberi otonomi yang besar kepada komponennya pada umumnya

memiliki kapasitas swatata yang besar. Pengaruh fluktuasi dari lingkungan eksternal didistribusikan kepada seluruh komponen organisasi, selanjutnya akan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan. Dengan demikian, sampai pada batas tertentu, dinamika lingkungan eksternal tidak akan mengubah struktur tatanan secara keseluruhan.

Mencermati penjelasan di atas, harus diakui bahwa ada perbedaan interpretasi dalam organisasi atau bahkan bervariasi pandangan di dalam organisasi yang mencerminkan kelompok interes (kepentingan) berbeda. Atasan bisa saja memiliki pemahaman yang berbeda dengan bawahan atas sikap tidak berat sebelah (*fairness*) dan tanggung jawab. Perspektif ini melihat tidak ada konsensus di tingkat organisasi, tetapi yang ada hanya konsensus di tingkat sub-unit dan pandangan ini cenderung menekankan bagaimana kelompok bawahan melihat organisasi untuk membedakan dengan pandangan integrasi. Perspektif ini sering digunakan untuk meneliti konflik dan keengganan yang tidak muncul dalam retorika manajemen atau organisasi yang menekankan kerja tim, harmoni, dan kerjasama.

Terkait dengan kemandirian organisasi sebagaimana dijelaskan oleh Amien (2005:171), bahwa kemandirian diperlukan untuk menjaga identitas organisasi, agar diversitas keseluruhan yang merupakan syarat untuk mempertahankan kesinambungan organisasi. Kemandirian organisasi yang merekomendasikan terhadap pelaksanaan semua tahapan kegiatan atau program kerja organisasi, dengan memanfaatkan sumber daya internal dan mengacu kepada karakteristik spesifik yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tatanan yang indikator

utamanya adalah tetap terjaganya keadilan berpartisipasi bagi semua komponen organisasi, serta meningkatnya kapasitas swatata tatanan. Tatanan yang dimaksud adalah perwujudan konsep interkoneksi sebagai tulang punggung Sains Baru, artinya, meninggalkan reduksionisme. Tidak kalah pentingnya ialah konsep ini menggeser paham materialisme dan menggantinya dengan pendekatan yang berbasis organik.

Menurut Bateson dalam Amien (2005:172), bahwa entitas yang selama ini didefinisikan sebagai obyek tidak memadai lagi digunakan untuk merepresentasikan semesta (realitas). Oleh karena itu, mengubah semua definisi yang berbasis obyek ke berbasis interkoneksi, maka entitas organisasi juga dilihat sebagai interkoneksi. Masyarakat yang mendiami suatu ruang tertentu dengan kelembagaan dan sistem kepercayaan yang beragam, serta sumber daya alam dan kondisi lingkungan hidup, harus dilihat sebagai satu kesatuan, tepatnya suatu jejaring interkoneksi yang kuat, tetapi tetap terbuka yang merupakan “bagian” dari entitas lain yang memiliki dimensi ruang maupun dimensi fungsional yang lebih luas.

Istilah “komponen” atau “bagian” yang dimaksud adalah seluruh pembahasan atau perwujudan seperangkat interkoneksi, tetapi dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di sekelilingnya. Dengan kata lain, tatanan merupakan sistem tanpa batas yang berbeda dengan pengertian sistem tradisional yang didefinisikan dengan batas yang jelas. Pemilihan model tatanan seperti ini lebih mencerminkan realitas yang sebenarnya, karena pada hakikatnya entitas pembangunan (organisasi) tidak memiliki batas yang kaku. Organisasi ‘Aisyiyah

misalnya, memiliki kelompok masyarakat (sebagai anggota) yang terikat dengan komponen masyarakat lainnya dalam wilayah yang sama (Kota Makassar) di satu sisi, dan di sisi lain memiliki keterkaitan fungsional dengan kelompok lainnya (Muhammadiyah dan Pemerintah) yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, tatanan juga memiliki keterkaitan fisik/ekologi yang sulit dibatasi, terutama menggunakan batas administrasi sebagai batas sistem. Sistem pelayanan, pembinaan dan pengkaderan terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi memiliki keterkaitan administrasi dengan entitas lain yang berada di wilayahnya.

Perwujudan interkoneksi, perhatian tidak pada komponennya tetapi pada interkoneksi yang terjadi. Dalam hal ini tidak akan banyak mempersoalkan ketersediaan sumber daya dalam suatu tatanan, tetapi pada interkoneksi sumber daya itu dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, lebih memperhatikan pola pengelolaan sumber daya, antara lain berupa tekno struktur masyarakat ketimbang sumber dayanya sendiri. Dalam konteks ini, tidak akan banyak memperhatikan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi pada interkoneksi yang tercipta antara kelompok-kelompok itu yang antara lain diukur apakah ada sumber daya dan atau fitur baru yang tercipta akibat keterhubungan itu. Misalnya, dalam bentuk pengembangan dan peningkatan kualitas modal sosial (*social capital*). Interkoneksi tatanan dengan lingkungannya juga menjadi fokus perhatian, yaitu apakah interkoneksi yang dimaksud memberikan sesuatu kepada tatanan, baik dalam arti positif maupun negatif.

Komponen tatanan, baik yang berupa komponen “lunak” seperti manusia dengan sistem nilai, kelembagaan, dan tekno strukturalnya, maupun yang berupa komponen “keras” seperti lingkungan alam dan sumber dayanya, merupakan entitas yang dinamis yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Demikian pula wujud interkoneksitasnya. Oleh karena itu, tatanan seyogyanya dipandang sebagai suatu organisme yang memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk berkembang secara mandiri serta melaksanakan asosiasi atau fusi dengan tatanan lainnya. Asosiasi adalah wujud interkoneksitas di mana setiap tatanan masih mempertahankannya, sedangkan fusi menghasilkan tatanan baru dengan karakteristik yang baru pula karena setiap tatanan yang bergabung lebur ke dalam tatanan baru tersebut. Dalam kondisi semacam ini, biasanya terbentuk sumber daya yang bukan merupakan hasil penggabungan sumber daya tatanan yang bergabung (*emergency resources*). Demikianlah hakikat sebenarnya dari interkoneksitas, karena dengan terciptanya sumber daya baru, maka keberlangsungan keberadaan tatanan akan terjamin. Dengan kata lain, sustainability akan tercapai (Amien, 2005:175).

Di samping ketiga elemen yang disebutkan di atas, terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah, pola pengaturan juga dilengkapi dengan seperangkat aturan-aturan dasar yang menjabarkan fungsi dan pola keterkaitan antarkomponen organisasi. Aturan dimaksud selain dirumuskan dengan mengacu kepada identitas organisasi, juga disesuaikan dengan konsep-konsep tatanan organisasi sehingga hasilnya adalah rumusan aturan dasar yang spesifik yang membuat organisasi kuantum berbeda dari organisasi tradisional. Setidaknya terdapat

tiga konsep dasar yang saling terkait dan saling melengkapi yang membentuk konsep yang utuh tentang tatanan organisasi, yaitu: (a) *autopoiesis*; (b) padadoks interdependensi; dan (c) medan visional (Amien, 2005).

Autopoiesis merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan proses pembentukan dan proses aktualisasi identitas organisasi. Terdapat beberapa teori tentang tatanan, khusus yang terkait dengan organisasi seperti yang dikembangkan oleh Arthur Koestler dalam Amien (2005: 223), menjelaskan bahwa kata *bolon* berasal dari bahasa Yunani *bolos* yang berarti *ubole* (keseluruhan) dan *on* yang berarti *part* (bagian). Hal tersebut sengaja dipilih Koestler untuk mencerminkan karakter dasar dari setiap entitas yang disebut efek Junus (Junus Effect), yaitu berupa kemampuan berinteraksi dengan entitas lainnya, baik dalam peran yang menekankan kebebasan maupun dalam peran ketergantungan.

Koestler menganalogikan *bolon* dengan Dewa Junus yang di dalam mitologi Rumawi digambarkan memiliki dua muka. Satu muka menghadap ke dalam, ke arah *bolon-bolon* kecil yang merupakan bagiannya, merepresentasikan kebebasan yang dimiliki oleh keseluruhan, sedangkan muka lain menghadap keluar, kepada *bolon* lebih besar yang mengandungnya merepresentasikan sifat ketergantungan yang dimiliki oleh bagian. Di dalam tatanan, efek Junus mewujud dalam bentuk dua kecenderungan. *Pertama*, adalah tendensi integratif yang berfungsi untuk mempertahankan posisinya sebagai bagian dari keseluruhan. *Kedua*, adalah tendensi penonjolan diri sebagai refleksi dari fungsi untuk melestarikan identitas dan otonomi individu-dunya. Otonomi yang dimaksud disini mengandung arti bahwa setiap

bolon memiliki pola irama dan fungsi yang spesifik didukung oleh kemampuan untuk mengatur diri (*swatata*) dan mempertahankan pola tersebut.

Kedua kecenderungan ini termanifestasi pada setiap tatanan, dari sel ke individu dan sampai pada kelompok masyarakat. Setiap *bolon* harus menegakkan individualitas atau jatidirinya untuk mempertankan struktur bertingkat sistem, tetapi pada sisi lain ia (individu) harus pula patuh pada tuntutan-tuntutan keseluruhannya agar sistem dapat terus berjalan. Selain itu, kedua tendesi ini saling berlawanan tetapi saling melengkapi, karena itu dinamakan paradoks interdependensi (*paradox of interdependence*). Jika dicermati lebih jauh, paradoks ini merupakan perwujudan dari prinsip komplementaris dan kemenduaan semesta yang merupakan basis dari pengaturan semesta, yaitu diferensiasi dan integrasi.

Terkait dengan pola tatanan yang sehat, baik individu, masyarakat maupun ekosistem terdapat keseimbangan yang dinamis antara kedua kecenderungan di atas. Kemampuan tatanan mempertahankan keberadaannya sangat tergantung kepada keseimbangan dimaksud. Kecenderungan penonjolan diri yang mendominasi menyebabkan kecenderungan integrasi menipis, akan bermuara pada rusaknya tatanan, sebaliknya kecenderungan integrasi yang membesar akan membuat identitas tatanan pembentuk mengecil atau hilang yang pada gilirannya bermuara kepatuhan terhadap tatanan (organisasi) sebagaimana yang diharapkan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebagai suatu tatanan, atau di dalam organisasi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah disebut "Khittah", yaitu perilaku organisasi sesuai dengan perilaku umum tatanan (*khittah*). Dalam hal ini, 'Aisyiyah ikut memberikan

jawaban atas berbagai permasalahan, baik di tingkat daerah, wilayah maupun pusat yang dari waktu ke waktu senantiasa mengalami pengembangan. Peran dan komitmen serta tanggung jawab 'Aisyiyah semakin besar dan terbuka. Kehadiran dan keterpanggilan ortom 'Aisyiyah di setiap jengkal lahan amal di setiap kondisi merupakan wujud 'Aisyiyah sebagai gerakan rahmatan lil 'alamin.

Terkait dengan keberlanjutan organisasi/lembaga (*theory scopt*), di bawah ini akan dijelaskan pandangan Brinkerhoff dan Goldsmith (1990: 19), menjelaskan bahwa keberlanjutan lembaga/organisasi para analis sering kali mengungkapkan alasan tertentu, dengan faktor-faktor penekanannya termasuk pada tingkatan komitmen, khususnya pada sebuah keinginan untuk menyiapkan biaya yang berkali-kali. Penggabungan lembaga atau pemerintah dan swasta secara tepat; pada sektor pemerintah, perutusan yang tepat dari berbagai tingkatan dalam pemerintahan; kepekaan terhadap suatu isu penurunan ekologi dan produktivitas pertanian jangka panjang; dan adopsi dari sistem manajemen yang mengenalkan pembangunan kapasitas. Dalam hal ini, penggambaran formalnya adalah teori sistem, teori kemungkinan dan politik ekonomi.

Kemudian dijelaskan bahwa, lembaga adalah sistem yang dibangun dari sebuah ide. Ada beberapa alasan untuk memulai dasar ini, antara lain: (1) bahwa teori sistem merupakan hal yang cukup umum untuk menutupi keberlanjutan permasalahan dalam lembaga pada semua jenis, mulai dari tanda/kode yang formal sampai kepada yang tidak formal untuk dilakukan; (2) bahwa teori sistem secara simultan ditentukan oleh proses internal dan hubungan diantara sistem dan lingkungannya sendiri. Hal ini

kemudian mendorong untuk memandang secara luas berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, teknis dan lainnya yang mempengaruhi keberlanjutan; (3) bahwa teori sistem menekankan pada hubungan diantara unsur yang terpisahkan, dan memungkinkan untuk memunculkan aspek-aspek agro lingkungan, ekonomi dan aspek manajerial dari keberlanjutan tersebut.

Selanjutnya Brinkerhoff & Goldsmith (1990: 20), bahwa teori sistem menyajikan pedoman tentang bagaimana menggambarkan hubungan antara proses sistem internal dan eksternal. Teori kemungkinan menjadi pengganti kesenjangan ini. Penyajian teori ini agar lembaga-lembaga dapat mencapai hubungan yang lebih baik. Selain itu, alasan penggunaan teori kemungkinan adalah untuk menghindari tendensi, perluasan referensi pada keberlanjutan lembaga yang direkomendasikan secara luas.

Menurut pandangan ilmu sosial, teori sistem yang paling bermanfaat dalam menganalisis lembaga atau organisasi formal, seperti lembaga atau organisasi pemerintahan, perusahaan bisnis, dan universitas. Sebagaimana pandangan Hage dan Aiken dalam Brinkerhoff dan Goldsmith (1990: 21), bahwa : (1) Sistem teori diciptakan dan berlanjut untuk mencapai tujuan umum yang lebih baik daripada tindakan individu; (2) Sistem teori dapat mengembangkan sub sistem untuk tujuan sub devisi dan peningkatan efisiensi; (3) Sistem teori menggunakan pola otoritas dan hubungan komunikasi untuk terhubung dan terintegrasi secara khusus dari kegiatan sub sistem; dan (4) Sistem teori tergantung pada transaksi dengan unsur luar dan penyedia untuk menyiapkan input atau memahami output yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem.

Sehubungan dengan penjelasan di atas terkait dengan keberlanjutan organisasi sebagai sistem, ada beberapa definisi kunci yang perlu dipahami sebagai berikut: (a) Input (sumberdaya), bahan mentah, uang, manusia, informasi dan pengetahuan yang dimiliki organisasi dan lingkungannya, serta kontribusi untuk menciptakan output; (b) Output berupa produk, layanan, program, dan ide yang dihasilkan dari tindakan organisasi; (c) Teknologi (metode dan proses), meliputi mental, fisik dan mekanis untuk mentransformasikan sumberdaya ke dalam output; (d) Lingkungan, terdiri dari lingkungan pekerjaan yang meliputi organisasi eksternal dan kondisi yang mempengaruhi suatu operasi utama dari organisasi dan teknologi, seperti klien, pesaing, pasar dan lingkungan umum meliputi lembaga dan kondisi yang mempengaruhi keberlanjutan organisasi; (e) Maksud-strategi, yakni tujuan, rencana dari pembuat keputusan untuk dominasi organisasi; (f) Sikap dan proses-pola sikap, yaitu hubungan antara individu dan kelompok; (g) Budaya-norma, kepercayaan, nilai kehidupan berorganisasi; dan (h) Struktur-hubungan diantara individu, kelompok, dan unit yang lebih besar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa postulat dasar dari teori kemungkinan yang kontras dengan asumsi yang sering membuat teori secara implisit dalam teori sosial dan ekonomi, yang merupakan pilihan untuk melegalkan kegiatan secara bersama. Persoalan mendasar yang diperoleh dari bagian analisis ini adalah: (1) tidak ada lembaga atau organisasi yang secara prinsip adalah benar untuk semua situasi; (2) kesuksesan organisasi bergantung pada kemampuan dalam penyesuaian lingkungannya; (3) untuk mencapai ketepatan ini, sebuah organisasi harus memiliki

struktur, strategi, budaya dan sebagainya. Demikian yang penting adalah, sebuah organisasi harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya (mendapatkan seseorang yang lebih cocok) untuk menjalankan organisasi tersebut, (Katz dan Kahn dalam Brinkerhoff & Goldsmith, 1990: 22).

Mencermati uraian di atas terkait dengan *Medan Visional* menurut Wheatley dalam Amien (2005: 227), menjelaskan bahwa visi organisasi yang jelas dan diterima oleh semua komponen organisasi akan menimbulkan medan visional di lingkungan organisasi bersangkutan. Medan inilah yang memicu terjadinya sinergi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap komponen organisasi. Keberadaan medan visional menyebabkan tidak diperlukannya upaya pengendalian yang berlebihan yang menjadi ciri khas organisasi *a la* Newtonian, karena walaupun memiliki otonomi, setiap komponen tetap akan memilih secara sukarela untuk bertindak sinergis dengan komponen lainnya. Hal ini merupakan bukti bahwa otonomi individu tidak berarti harus dikendalikan secara ketat karena memiliki potensi untuk memecah belah kesatuan organisasi. Upaya pengendalian dapat digantikan dengan visi yang jelas yang akan membangkitkan medan visional sekaligus berfungsi untuk mengarahkan kebebasan individu untuk mencapai cita-cita bersama.

Konsep medan visional Wheatley tersebut sangat relevan dengan prinsip dasar (khittah) dan konsep keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah yang telah diuraikan terdahulu. Konsep yang serupa dikembangkan Sheldrake tentang medan morfogenesis yang mengatur perilaku makhluk hidup. Hal ini seperti dijelaskan bahwa keberadaan medan ini akan membuat anggota organisasi berikutnya

(kaderisasi) lebih mudah menerima dan melanjutkan visi organisasi dari waktu ke waktu sesuai dengan pendahulunya.

Sejalan dengan penjelasan di atas, khususnya yang terkait dengan konsep *outopoesis*, paradoks interdependensi, dan medan visional dalam hubungannya dengan berdirinya organisasi Nasyyiatul 'Aisyiyah (NA) juga tidak bisa dilepaskan dengan rentang sejarah Muhammadiyah yang sangat memperhatikan keberlangsungan kader penerus perjuangan organisasi. Muhammadiyah dalam membangun ummat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah.

Gagasan mendirikan NA sebenarnya bermula dari ide Somodirdjo, seorang guru *Standart School Muhammadiyah*. Gagasan Somodirdjo ini digulirkan dalam bentuk menambah pelajaran praktek kepada para muridnya, dan diwadahi dalam kegiatan bersama. Dengan bantuan Hadjid, seorang kepala guru agama di *Standart School Muhammadiyah*, maka pada tahun 1919 berhasil mendirikan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putra siswa *Standart School Muhammadiyah*.

Kegiatan SP Wanita adalah pengajian, berpidato, jama'ah subuh, membunyikan kentongan untuk membangunkan umat Islam Kauman agar menjalankan kewajibannya yaitu shalat shubuh, mengadakan peringatan hari-hari besar Islam, dan kegiatan keputrian. Perkembangan SP Wanita cukup pesat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya mulai segmented dan terklasifikasi dengan baik. Kegiatan *Thalabus Sa'adah* diselenggarakan untuk anak-anak di atas umur 15 tahun.

Aktivitas Tajmilul Akhlak diadakan untuk anak-anak berumur 10-15 tahun. Jam'iatul Athfal dilaksanakan seminggu dua kali untuk anak-anak yang berumur 7-10 tahun.

Kegiatan SP Wanita merupakan terobosan yang inovatif dalam melakukan emansipasi wanita di tengah kultur masyarakat feodal saat itu. Kultur patriarkhis saat itu benar-benar mendomestifikasi wanita dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga. Para orang tua seringkali melarang anak perempuannya keluar rumah untuk aktivitas-aktivitas yang emansipatif. Namun dengan munculnya SP Wanita, kultur patriarkhis dan feodal tersebut bisa didobrak. Hadirnya SP Wanita sangat dirasakan manfaatnya, karena SP Wanita membekali wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan.

B. Kepatuhan Dalam Organisasi

Menurut Etzioni dalam Liliweri (1997: 66), sebuah organisasi dapat berjalan karena di dalamnya ada kepatuhan, baik pada level pengurus maupun pada level anggota. Kepatuhan dimaksud melibatkan variabel power dan variabel keterlibatan, dalam hal ini power pada pengurus dan keterlibatan pada anggota organisasi. Etzioni, menyusun skema klasifikasi organisasi berdasarkan sifat-sifat perilaku "*compliance*" (perilaku prososial). Etzioni memasukkan sikap "*compliance*" merupakan sikap yang umumnya dimiliki oleh bagian terbesar semua unit-unit sosial bahkan masyarakat. Menurutnya, perilaku "*compliance*" adalah unsure utama yang menata hubungan antara mereka yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dengan pihak yang dikuasai dan diwenangi.

Power terdiri dari power berdasarkan koersif, power berdasarkan remuneratif, dan power berdasarkan normatif. Sementara keterlibatan meliputi; keterlibatan berdasarkan prinsip alienatif, keterlibatan berdasarkan kalkulatif, dan keterlibatan berdasarkan moral. Lebih jauh dijelaskan Etzioni bahwa, dalam semua organisasi, para anggota selalu dihubungkan dengan anggota lain melalui hubungan hierarki yang menyebabkan para anggota mempunyai kedudukan lebih tinggi diberi kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar, kekuasaan dan kewenangan tersebut diatur dan dilegitimasi. Kedudukan selalu memiliki kuasa dan wewenang dalam menata hubungan atasan dengan bawahan. Karena itu, pimpinan suatu hierarki cenderung bertindak kepada bawahan. Tindakan itu untuk memperlihatkan kekuasaan, kekerasan, ganjaran bahkan membuat perhitungan, akibatnya kedudukan bawahan dianggap sebagai partisipan tingkat rendah (Liliweri, 1997: 67).

Apabila para anggota (bawahan) tetap bertindak sebagai partisipan yang rendah, maka anggota tersebut akan merasa terasing atau seolah-olah diasingkan organisasi. Sebaliknya, jika para anggota tidak diasingkan maka akan merasa dilibatkan dalam organisasi, dan akan merasa memiliki organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tidak mengherankan jika setiap bawahan selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang dapat diperoleh melalui hubungan yang tercipta dalam organisasi.

Lebih jelasnya dapat disimak tabel berikut tentang tipologi hubungan *compliance* dari Etzioni, bahwa dalam setiap organisasi pihak ordinas (atasan) mempunyai 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu koersif, remunerative, dan normative.

Sedangkan subordinasi (bawahan) mempunyai 3 (tiga) jenis keterlibatan, yaitu alienatif, kalkulatif, dan moral, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Tipologi Hubungan Compliance dari Etzioni.

Jenis Kekuasaan	Jenis Keterlibatan		
	Alienatif	Kalkulatif	Moral
Koersif	1	2	3
Remuneratif	4	5	6
Normatif	7	8	9

Sumber : Etzioni dalam Liliweri (1997: 67).

Tabel di atas menjelaskan bahwa di dalam organisasi, kekuasaan atasan merupakan bentuk kekuasaan untuk menekan, memerintah, dan memaksa (*koersif*), kekuasaan memberikan ganjaran/balas jasa (*reward, remunerative*) dan terakhir kekuasaan menetapkan aturan atau norma-norma dalam organisasi. Sedangkan dari pihak bawahan memiliki jenis keterlibatan, yaitu alienatif (keterlibatan rendah), kalkulatif (keterlibatan dengan perhitungan), dan moral (keterlibatan tinggi).

Klasifikasi tipologi *compliance* dari Etzioni pada table di atas memiliki 9 (Sembilan) bentuk hubungan yang bersifat *compliance*, yaitu :

- a. Hubungan yang bersifat *koersif-alienatif*, para bawahan yang merasa diri terasing karena ada tekanan dari atasan.
- b. Hubungan yang bersifat *koersif-kalkulatif*, yaitu para bawahan yang memperhitungkan tekanan dari atasan.

- c. Hubungan yang bersifat *koersif-moral*, adalah bawahan terlibat secara moral karena ada tekanan dari atasan.
- d. Hubungan yang bersifat *remuneratif-alienatif*, bawahan yang merasa diri terasing karena ada tekanan dari atasan.
- e. Hubungan yang bersifat *remuneratif-kalkulatif*, jenis keterlibatan bawahan yang memperhitungkan ganjaran dari atasan.
- f. Hubungan yang bersifat *remuneratif-moral*, bawahan yang secara moral menerima ganjaran dari atasan.
- g. Hubungan yang bersifat *normatif-alienatif*, bawahan merasa diri terasing karena ada norma-norma yang berlaku dari atasan.
- h. Hubungan yang bersifat *normatif-kalkulatif*, yaitu keterlibatan bawahan yang memperhitungkan norma-norma dari atasan.
- i. Hubungan yang bersifat *normatif-moral*, bawahan yang secara moral mengikuti norma-norma yang berlaku dari atasan.

Menurut Etzini, tipe 1, 5 dan 9 menggambarkan tipe hubungan yang bersifat *kongruen*, hubungan yang demikian dipandang lebih efektif untuk diterapkan dalam setiap organisasi (termasuk 'Aisyiyah). Hubungan yang kongruen akan mengakibatkan organisasi sebagai unit sosial (amal usaha) dapat mempertahankan diri dari tekanan "dalam" maupun "luar", termasuk dalam hal ini adalah Muhammadiyah dan Pemerintah. Kondisi demikian dapat dianalogikan seperti yang dialami seorang bawahan atau anggota organisasi meskipun merasa terasing karena

ada ancaman atau tekanan dari atasan (pimpinan organisasi), tetapi secara moral tetap taat (patuh kepada norma-norma yang mengatur hubungan tersebut). Sebagai contoh, organisasi militer; seseorang yang menjadi anggota harus mampu atau dapat memperhitungkan untung rugi menolak disiplin. Moralitas anggota korps sangat ditentukan oleh norma-norma organisasi tersebut. Kemudian Etzioni menjelaskan bahwa, kebalikan dari tipe kongruen ialah *inkongruen*, yaitu (3 dan (7) yang tidak selalu bertahan terhadap tekanan eksternal. Karena itu, langkah yang perlu diantisipasi organisasi adalah mengurangi kekuasaan atau perasaan superioritas.

Lebih jauh Etzioni menjelaskan bahwa, hubungan *normatif-alienasi inkongruen* (7) terjadi ketika seorang pastor, pendeta atau pejabat gereja merasa yakin bahwa anggota jemaat yang melakukan tindakan melawan perkawinan (contoh: “kumpul kebo”) adalah tindakan salah. Anggota jemaat itu harus diasingkan karena telah melawan norma; hubungan itu dapat berubah apabila anggota jemaat mau mengikuti kegiatan gereja sesuai dengan norma yang berlaku.

Bentuk inkongruen berikut ialah koersif-kalkulatif (2), yang ditujukan pada jenis hubungan antara bawahan yang penuh perhitungan terhadap tekanan atasan. Sebagai contoh, hubungan ketaatan para anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) terhadap tekanan dari atasan (pimpinan parpol). Bentuk inkongruen remuneratif-alienatif (4) dapat diilustrasikan dengan keuntungan yang diperoleh seorang prajurit upahan berjuang membela Negara karena mendapat uang. Dengan demikian sedikit bahkan tidak ada idealisme terhadap bangsanya, tetapi hanya membutuhkan upahan.

Tipe inkongruen remuneratif-moral (6) dapat terlihat pada seorang direktur lembaga pemakaman jenazah yang mendapat keuntungan dari bisnis tersebut, namun seringkali harus bersikap prososial membantu keluarga yang berduka. Tipe terakhir adalah hubungan inkongruen normatif kalkulatif (8), sebagai contoh seorang guru besar yang merasa yakin bahwa pendapatan dari pekerjaan atau spesialisasinya merupakan sumber utama untuk menhidupi keluarga. Namun, kadang-kadang harus berusaha untuk mencari penghasilan tambahan di luar tugas pokok seperti memberi kuliah tambahan, seminar, dan sebagainya.

Secara umum Etzioni dalam Liliweri (1997), menawarkan sintesis sistem bahwa organisasi mengadopsi untuk mengamankan kepatuhan anggota. Dalam hal ini adalah cara orang dalam organisasi sesuai dengan persyaratan dan mengikuti standar perilaku yang ditetapkan, berorientasi pada tujuan, organisasi diarahkan kinerja memerlukan kepatuhan anggota. Masalahnya adalah bahwa penyimpangan dari standar ini terjadi karena kelemahan dalam komitmen anggota. Sistem kontrol yang diberikan oleh anggota organisasi lainnya, baik oleh manajer maupun anggota lain. Dalam kepatuhan dipastikan dengan struktur kontrol dan wewenang organisasi, hierarki formal otoritas, pengawasan, definisi pekerjaan, dan prosedur kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan model birokrasi Weber membuat organisasi kurang tergantung pada variabilitas individu dan olahan. Ada elemen motivasi untuk ini karena struktur keterlibatan individu dalam organisasi. Proposisi sederhana adalah bahwa, semakin besar individu berkomitmen, kontrol formal kurang

diperlukan. Dengan demikian, organisasi atau bagian organisasi seperti misalnya mengadopsi sistem sebagai budaya yang berlaku.

Sistem koersif, ialah mencerminkan kemampuan organisasi untuk menerapkan fisik, kekuatan menghambat dan sakit untuk non-compliance. Misalnya organisasi kustodian, sistem kontrol memungkinkan penarikan anggota dan hak kebebasan. Keterlibatan dengan organisasi yang berasal dari sistem kontrol koersif mungkin terasing, paling pasif dengan perasaan negatif dan disassociation. Sistem organisasi ini menawarkan berbagai macam imbalan material atau non-materi untuk mengamankan kepatuhan anggota. Keanggotaan didasarkan pada kontrak dengan organisasi dan tawar-menawar atas hadiah yang diinginkan dengan imbalan kepatuhan, kehandalan loyalitas, kinerja. Anggota menghitung, Apa untungnya bagi saya?. Lembur, kenaikan gaji, promosi, penghasilan tetap, masa depan jangka panjang. Sistem normatif (Keterlibatan Moral), sistem organisasi kontrol tergantung pada nilai-nilai bersama yang dipromosikan dan yang anggota berlangganan. Organisasi sadar generates dan mempertahankan nilai-nilai yang diwakili dalam tanda-tanda dan sybmols - visual, verbal, perilaku dan konseptual. Komitmen terhadap ideologi organisasi membawa kekuatan persuasif, anggota menginternalisasikan nilai-nilai organisasi yang menjadi panduan dan perilaku yang mereka alami.

Istilah *Compliance* yang di-Indonesiakan dalam penelitian ini dengan “Kepatuhan”, hingga sekarang belum ditemukan makna yang lebih tepat (bervariasi). Istilah kepatuhan sering diasumsikan dengan perawatan yang

direkomendasikan dan diresepkan seorang dokter kepada pasien, untuk selalu taat dan patuh terhadap nasehat dokter. Dengan kata lain, konsep kepatuhan lebih mungkin ketika ada kesepakatan dan kepercayaan diri mengenai diagnosa dan prognosis (Liliweri, 1997).

Penelitian di psikiatri, psikologi, dan sosiologi menyediakan banyak penjelasan untuk variasi yang sesuai. Dalam psikiatri, masalah klinis seperti penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol kadang-kadang digunakan untuk menjelaskan ketidakpatuhan. Pasien juga dapat menghentikan minum obat karena efek samping yang tidak diinginkan. Dalam psikologi dan sosiologi, kesehatan kepercayaan dan perilaku (dalam konteks keluarga, pekerjaan, dll) dapat meningkatkan atau membatasi kepatuhan. Jika anggota keluarga individu mendukung kepatuhan pengobatan, dan individu percaya manfaat obat itu, kepatuhan dapat ditingkatkan. Jika seseorang tidak melanjutkan pengobatan maka akan membuat dia mengantuk dan mempengaruhi karya, kepatuhan dapat dikurangi. Orang-orang yang memiliki akses terbatas atau kepercayaan pada dokter, ilmu kedokteran, dan orang-orang yang imannya menghalangi mereka dari beberapa jenis perawatan medis, cenderung untuk mematuhi rekomendasi pengobatan.

Sejumlah teori yang mencoba untuk menangkap jenis atau sumber motivasi mempengaruhi anggota organisasi. Misalnya, dalam membahas penyebab internal dan eksternal perilaku, deCharms (1968) menyarankan dikotomi ekstrinsik motivasi intrinsik dibandingkan untuk mengkarakterisasi lokus yang berbeda dari kausalitas. Perilaku intrinsik termotivasi (perilaku yang terjadi tanpa adanya kontrol eksternal),

dikatakan mewakili kausalitas internal, sedangkan perilaku yang disebabkan kekuatan eksternal dikatakan untuk mewakili kausalitas eksternal (Liliweri, 1997). Kemudian dijelaskan efek imbalan ekstrinsik pada motivasi intrinsik dan dalam melakukannya, mencoba untuk menumpahkan beberapa lampu pada arti motivasi intrinsik. Perilaku intrinsik termotivasi jatuh ke dalam dua kategori, yaitu: a) meliputi perilaku yang individu terlibat dalam mencari situasi yang menantang. Tantangan-tantangan ini merupakan keganjilan antara stimuli dan standar perbandingan; b) mencakup perilaku yang bertujuan mengurangi keganjilan ini, yaitu mengatasi tantangan.

Selain itu, pemahaman motivasi intrinsik yang ditawarkan oleh Katz dan Kahn dalam Liliweri (1997), mereka berpendapat bahwa dasar motivasi dapat dikategorikan dalam hal kepatuhan hukum, penghargaan eksternal, yaitu, kepuasan instrumental dan motivasi diinternalisasi. Dalam hal ini, motivasi diinternalisasikan lebih lanjut dipecah menjadi ekspresi diri, yang berasal langsung dari peran kinerja dan nilai-nilai diinternalisasi, sehingga ketika organisasi menjadi tujuan dimasukkan ke dalam sistem nilai individu. Etzioni (1975), menjelaskan bahwa organisasi mendorong keterlibatan dari anggota mereka oleh salah satu dari tiga cara: alienatif, kalkulatif, atau moral. Ada dua macam keterlibatan moral murni dan sosial. Keterlibatan moral yang murni adalah hasil internalisasi norma-norma, sedangkan hasil keterlibatan sosial dari kepekaan terhadap tekanan kelompok-kelompok primer dan anggota organisasi. Keterlibatan moral tidak didasarkan pada kepuasan yang diharapkan dari kebutuhan dan bahkan dapat menuntut penolakan kepuasan kebutuhan dan pengorbanan kesenangan pribadi. Konsekuensi bertindak

sejalan dengan nilai-nilai diinternalisasi seseorang bukanlah rasa kesenangan atau pemenuhan kebutuhan, melainkan rasa penegasan dicapai ketika orang mematuhi dengan komitmen moralnya.

Dalam penelitian ini kemandirian dan keberlanjutan organisasi dapat dilihat dari perspektif scopt, yaitu ‘Aisyiyah dilihat sudut sistem, terdiri dari unit-unit (amal usaha) yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, dan kemasyarakatan. ‘Aisyiyah ditinjau dari aspek kontigensinya, yaitu hubungan ‘Aisyiyah dengan Muhammadiyah di satu sisi, dan hubungan ‘Aisyiyah dengan pengurus dan anggota di sisi lain. Di samping itu, bagaimana model pembinaan dan pengkaderan para anggota organisasi seiring dengan perubahan dan perkembangan organisasi yang semakin kompleks dan beragam.

Munculnya istilah baru yaitu “Filantropi”, yang secara garis besar telah dijelaskan terdahulu mengingatkan kembali nilai-nilai sosial dalam pembangunan, yaitu nilai-nilai kedermawanan dan kesetiakawanan yang dirangkai dalam istilah asing yang lebih familiar. Kata *philanthropy* yang berasal dari bahasa Yunani dengan makna *phillen* yang berarti mencintai (*to love*) dan *anthropos* (manusia, *human kind*), sehingga *philanthropy* dapat diartikan sebagai ungkapan cinta kasih kepada sesama manusia. Karena itu kata kedermawanan, kesetiakawanan dan Filantropi memiliki esensi yang sama.

Philanthropy didefinisikan sebagai cara membantu sesama dimana “saling memberi perhatian dan saling membagi” adalah esensi utamanya (Seregar dalam Irdam, 2006). Tujuan itu dicapai melalui pengembangan perhatian dan kepekaan pada

orang lain, membuat orang peduli pada kebutuhan sesamanya di dalam suatu komunitas, mewujudkan perhatian dan kepedulian melalui tindakan berusaha menjawab kebutuhan mereka. *Philanthropy* dapat ditempatkan sebagai sebuah proses, di mana ada tindakan (*action*) memberi bantuan uang berupa atau bentuk lain kepada seseorang secara sukarela tanpa unsur paksaan, tekanan (*volunteerism*). Kesukarelaan dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang memberi manfaat bagi orang lain. Kepedulian dan kemaian masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berderma kepada lembaga nir laba akan memberi banyak manfaat keberlanjutan misi dan program organisasi.

Keinginan seseorang atau masyarakat berderma, bermurah hati untuk berbagi pada seseorang, kelompok dan organisasi (masyarakat) sangat dipengaruhi oleh citra atau pandangan yang melekat di dalam lembaga tersebut. Orang tidak akan mau berderma apabila melihat bahwa dana yang diberikannya tidak sampai pada apa yang telah diniatkan. Selain itu, bantuan yang diberikan harus dikelola *se arif* mungkin berdaya guna terhadap sasaran yang diinginkan si penderma. Sebenarnya potensi masyarakat Indonesia untuk berderma cukup besar seperti halnya umat Islam, potensi umat Islam untuk zakat, infak dan sedekah (ZIS) mencapai 3 (tiga) trilyun setiap tahunnya (Mustafa E Nasution, 2001).

Mencermati uraian di atas dapat dijelaskan bahwa, dana tersebut cukup mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Tetapi pengelolaan ZIS tersebut jauh dari harapan. Persoalan yang mengemuka seputar pengelolaan dana kedermawanan sosial (Filantropi) tersebut, adalah image masyarakat yang muncul bahwa lembaga

pengelolaannya belum profesional, kredible dan transparan. Akhir-akhir ini keberadaan lembaga nir laba (ORNOP) mendapat sorotan dan penilaian oleh berbagai komponen masyarakat terhadap aktivitas yang dikerjakan. Pada awalnya masyarakat dan pelaku pembangunan memandang bahwa lembaga nir laba memiliki idealisme, integritas dan dedikasi yang tinggi di dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun citra baik tersebut dirusak dan diganggu oleh tindakan para aktivis dan pegiat lembaga nir-laba yang hanya ingin mendapatkan keuntungan sesaat (intans) dengan mengorbankan prinsip *kepatutan sosial* dan *hukum* (Budiyanto, 2007).

Belajar dari beberapa kasus penyimpangan pengelolaan dana yang melibatkan anggota KPU (Muliana W Kusuma) dan pengelolaan bantuan kemanusiaan Tsunami oleh ORNOP GOA (Fariq Faqih), telah mencoreng lembaga nir laba lainnya. Sedangkan di tingkat daerah (lokal) juga terjadi hal serupa dan konflik internal yang membuat citra dan kesungguhan hati lembaga nir laba dalam memperjuangkan kepentingan kaum marjinal dipertanyakan oleh masyarakat. Kondisi diatas jelas akan menyulitkan para pegiat ORNOP, yang memiliki niat kesungguhan hati memperjuangkan dan mengangkat harkat martabat kaum marjinal sulit masuk karena image (*Streo type*) terhadap tindakan-tindakan tabu yang semestinya tidak perlu terjadi. Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki para pegiat ORNOP, mustahil akan dapat menggalang dana kederawanan sosial (Filantropi) masyarakat yang sesungguhnya memiliki tradisi berderma yang kuat.

Keberlanjutan sebuah lembaga sangat dipengaruhi oleh tersedia sumber dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan operasional dan program yang dirancang. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada satupun lembaga yang dapat bertahan menjalankan aktifitas dan programnya bila tidak didukung oleh sumber dana yang kuat. Disadari bahwa masalah yang amat pelik bagi sebagian besar ORNOP, adalah ketersediaan dana dalam menjalankan programnya. Seringterjadi ORNOP hilang begitu saja (*matisuri*) ketika lembaga donor luar negeri menghentikan bantuan.

Penggalangan dana(*fundraising*) melalui filantropi masyarakat merupakan solusi dalam mengatasi krisis keuangan di lembaga nir-laba ORNOP selain mengefektifkan *fundraising* unit-unit usaha yang dimiliki. Karena itu, para pegiat ORNOP perlu mensiasati upaya menggalang dana melalui filantropi masyarakat, sehingga ketergantungan pada lembaga donor luar negeri menjadi berkurang. Paling ada 4 strategi menggalang dana filantropi masyarakat yang dapat di terapkan pada lembag nir-laba:

1. Membangun *community Awareness* melalui media komunikasi dengan memberikan beberapa contoh, yaitu *best practice* filantropy yang telah mengubah kehidupan seseorang atau kelompok masyarakat dari kondisi yang memprihatinkan (sengsara) kearah hidup yang lebih baik (lebih manusiawi). Cara ini dipandang cukup efektif dalam mengugah dan menyadarkan masyarakat yang memiliki kemampuan berderma.
2. Membangun citra lembaga melalui peningkatan sumber daya manusia dan pengelolaan dana yang dapat dipertanggungjawaban, transparan, *accountable* serta

dana filantropi berdaya guna bagi penerima manfaat (*beneficiaries*). Masyarakat yang sudah berderma akan merasa puas dan berkesan bahwa niat untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung sudah tercapai.

3. Membangun konsistensi sebagai lembaga yang indenpenden, objektif, netralitas, serta profesional dalam menjalankan program-programnya. Biasanya sipenderma (masyarakat) akan melihat lembaga konsistensi dalam menjalankan visi dan misi, lembaga yang latah dengan berbagai kegiatan akan ditinggalkan masyarakat karena dianggap *opportunities*.

Keberlanjutan organisasi sosial masyarakat sipil ORNOP sangat bergantung dengan sumber dana yang dimiliki dalam menjalan visi dan misinya. Salah satu sumber domestik tersebut ialah dana kedermawanan sosial (filanmtropi) masyarakat, karena pada prinsipnya tradisi berderma amat kental dalam praktek setiap agama yang ada di Indonesia. Namun, upaya unuk mencapai sasaran perlu ditempuh dengan strategi yang telah dijelaskan di atas. Ada 2 (dua) tipe atau jenis manusia ,yaitu :

- a. Idealis ideologis, adalah para kader dan anggota yang senantiasa memegang teguh cita-cita ideal awal gerakan.Pikiran dan tindakannya mengarah pada bagaimana cara terwujudnya cita-cita gerakan.
- b. Pragmatis oportunis, mereka adalah para kader dan anggota yang memanfaatkan potensi organisasi hanya untuk memenuhi kemauan pribadinya (hawa nafsunya sendiri). Segala pikiran dan tindakan tertuju pada hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kehendak dan hawa nafsunya sendiri.

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah organisasi pergerakan dakwah amal makruf nahi munkar, di basis inipun tidak lepas dari kedua hal tersebut. Pelajar sebagai basis masanya tentu memiliki potensi yang sangat besar bagi kedua tipe orang di atas. Bagi orang tipe pertama basis masa yang besar tersebut memiliki potensi bagi keberlanjutan eksistensi gerakan dan penerus cita-cita ideal sang pendiri induk gerakan yang kini tengah difilmkan oleh Hanung Bramantyo dengan judul Sang Pencerah. Bagi orang tipe kedua basis masa yang besar tersebut bisa ia jadikan sebagai basis masa mengambang dalam meraih kehendak pribadinya. Ada kalanya basis masa tersebut, hanyalah ia jadikan sebagai pasar potensial bagi bisnisnya dengan melupakan proses internalisasi nilai-nilai dan cita-cita gerakan.

Setiap kader dan anggota tentunya mendambakan terwujudnya cita-cita gerakan, yaitu terwujudnya pelajar yang berakhlak mulia, terampil, dan berilmu sebagai manifestasi cita-cita terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-beanarnya di kalangan pelajar. Hal ini belaku juga bagi Muhammadiyah sebagai induk gerakan yang bercita-cita terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Adanya mereka-mereka yang bertipe pragmatis oportunistis tanpa sadar mereka telah mendekonstruksi makna dan nilai-nilai tujuan atau cita-cita pergerakan dan persyarikatan. Akibatnya dari masa ke masa yang terjadi hanya ada penurunan substansi cita-cita pergerakan meskipun secara simbolis (yang terwujud dalam redaksi kata-kata cita-cita gerakan sebagaimana awal berdirinya gerakan) tetap sama sebagaimana awal berdirinya gerakan.

Pembaca tentunya paham kader yang manakah dibutuhkan untuk menunjang terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau masyarakat utama sebagaimana dicita-citakan oleh KH Ahmad Dahlan sang pendiri Muhammadiyah. Sebagai gerakan yang memberdayakan perempuan, NA jangan bersifat sporadis. Kelompok perempuan, biasanya persoalan atau isu yang muncul selama ini masih dilihat sebagai bisul yang muncul kadangkala. Padahal sesungguhnya kiprah warga NA harus dibuat secara berkelanjutan sebagai sebuah gerakan.

Menjadi sebuah organisasi gerakan yang peduli dengan persoalan perempuan dan lingkungannya, warga apalagi pimpinan NA harus melihat isu tidak sekadar sebagai bisul atau luka yang nanti akan hilang meski kapan muncul lagi. Namun isu itu harus dilihat lebih mendasar hingga akar permasalahan sesungguhnya. Hal tersebut dilakukan dalam sosialisasi menjelang Muktamar NA di Makassar, November 2010. Dikatakan bahwa, sebagai perempuan muda Muhammadiyah kader NA hendaknya memiliki bingkai wawasan yang kuat untuk menganalisis persoalan yang dihadapi. Karena dengan bingkai itu akar persoalan dari sebuah permasalahan bisa diurai untuk kemudian dicari solusi atau kebijakannya.

Kehidupan dan pergaulan dunia yang semakin kompleks, pelbagai persoalan yang dihadapi umat khususnya perempuan, menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam kiprah dan gerak dakwah. Fakta di masyarakat ini menuntut dinamika organisasi yang makin cepat, mengingat tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks. Banyak persoalan yang dihadapi perempuan dewasa ini. Menurut penulis

yang membuat kiprah 'Aisyiyah lebih di-break-down sehingga dirasakan membela dan memberdayakan masyarakat bawah.

C. Hubungan 'Aisyiyah dengan Muhammadiyah

Sebelum menjelaskan hubungan Muhammadiyah dengan 'Aisyiyah secara organisasi, terlebih dahulu dikemukakan perbedaan istilah, fungsi dan kedudukan organisasi 'Aisyiyah dan Nasyyiatul 'Aisyiyah (NA) sebagai organisasi otonom yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian dengan tetap mengedepankan gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, yang diamanatkan Persyarikatan Muhammadiyah. Tugas ini dilakukan baik secara kolektif organisasional maupun secara individu oleh personil-personil NA. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa, hubungan Muhammadiyah, 'Aisyiyah dengan Nasyyiatul 'Aisyiyah baik dilihat dari garis komando, fungsional, struktural dan kultural merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

1. Hubungan yang bersifat Koordinasi.

'Aisyiyah dan NA hadir di kalangan Muhammadiyah berkat adanya kesadaran religius yang positif tentang masa depan dan kelangsungan cita-cita Muhammadiyah. Kesadaran ini menjadi wacana organisasi untuk membangun generasi muda Islam untuk tetap eksis dan memegang peran penting dalam perjuangan bangsa. Upaya ini sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang sedang menapaki tahap kebangkitan bangsa di awal abad ke-20.

Kondisi awal abad ke-20 bangsa Indonesia dihadapkan adanya upaya mempersatukan visi anak bangsa. Kondisi ini telah dibaca para pemuka Muhammadiyah. Siswa Praja Wanita yang merupakan embrio NA merupakan wadah dan wahana untuk menjalin persatuan di antara anak bangsa. Nilai-nilai kejuangan dan kebersamaan selalu ditanamkan kepada mereka sejak dini. Ukhuwah Islamiyah diimplentasikan dalam kehidupan berbangsa agar jalinan persatuan lebih erat, di samping kesamaan dalam penderitaan yang juga menjadi tali pemersatu. Dengan demikian hubungan Muhammadiyah dengan 'Aisyiyah serta hubungan 'Aisyiyah dengan NA, merupakan hubungan komando atau koordinasi, karena melalui kedua ortom ini Muhammadiyah berusaha menanamkan dan mensosialisasikan gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar; memberantas Tahayul, Bid'ah, dan Churafat (TBC); dan membangun akhlakul karimah di kalangan perempuan (kaum ibu-ibu Muhammadiyah) dan generasi muda putri Islam.

2. Hubungan yang bersifat Struktural.

Perkembangan yang lebih positif terjadi tahun 1966, ketika posisi organisasi NA ditingkatkan lagi menjadi organisasi otonom yang struktur organisasinya berjenjang mulai dari Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting melalui Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 1/1966 (PP 'Aisyiyah: 48). Pokok-pokok kedudukan organisasi NA sebagai organisasi otonom dalam Muhammadiyah, adalah: (1) Mempunyai wewenang penuh mengelola, membina, dan mengembangkan organisasi; (2) Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah di bawah PP Muhammadiyah; (3)

Setiap jenjang organisasi terdapat hubungan konsultatif dengan pimpinan organisasi yang setingkat, dalam hal pendirian organisasi, pemilihan pimpinan, dan keputusan musyawarah; (4) Organisasi 'Aisyiyah berwenang mengadakan hubungan/ kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi luar. Bentuk hubungan dengan instansi/lembaga dari luar negeri atas persetujuan persyarikatan (PP Muhammadiyah); (5) Dalam bidang hukum yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah (PP 'Aisyiyah : 51).

Fakta menunjukkan bahwa NA merupakan kader utama 'Aisyiyah. 'Aisyiyah sebagai ibu kandung NA turut bertanggung jawab membina dan membimbing NA (SK Muhammadiyah No. 3/1987 dan Keputusan Munas NA II, 1995), melalui dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Sedang bagi Muhammadiyah, NA merupakan kader yang akan meneruskan dan mengembangkan gerakan Islam dan gerakan dakwah. Karena itu, Muhammadiyah berkewajiban untuk memberikan bekal agama yang cukup kepada kader NA, menentukan arah pembinaan, membekali kemuhammadiyahannya, ilmu dan ketrampilan.

Hubungan 'Aisyiyah dengan NA dalam Muhammadiyah mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai ortom Muhammadiyah. Artinya 'Aisyiyah dan NA mempunyai tugas yang sama, yaitu berusaha mengembangkan serta menghidupkan cita-cita Muhammadiyah, hanya bidang garapannya yang berbeda. NA mempunyai bidang sasaran pada generasi muda wanita untuk dibina agar menjadi pelopor, pelangsun, penyempurna, pembaharu usaha dan cita-cita Muhammadiyah. Meskipun antara 'Aisyiyah dan NA memiliki status yang sama di

Muhammadiyah, namun secara informal 'Aisyiyah mempunyai posisi lebih tinggi ketimbang NA. secara struktural 'Aisyiyah di bawah koordinasi Muhammadiyah, serta NA di bawah koordinasi 'Aisyiyah.

Sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang pembinaan generasi muda wanita Islam, NA mempunyai struktur organisasi yang sama dengan Muhammadiyah, yaitu mulai dari ranting bertempat di kalurahan/desa, cabang pada tingkat kecamatan, daerah yang bertempat di kabupaten/kota, wilayah untuk tingkat propinsi, dan tingkat pusat (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nasyyiatul 'Aisyiyah, 1996). Struktur ini telah mengacu pada susunan dan struktur Persyarikatan Muhammadiyah, seperti yang tertuang pada Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 15 ayat 2, dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 18 ayat 6. Untuk struktur organisasi Nasyyiatul 'Aisyiyah, menurut Anggaran Dasar Nasyyiatul 'Aisyiyah pasal 14 dinyatakan bahwa Pimpinan Pusat/Pimpinan Wilayah/ Pimpinan Daerah NA membentuk Departemen sebagai badan pembantu pimpinan (ayat 1). Dan Pimpinan Cabang/Pimpinan Ranting membentuk Seksi-seksi sebagai pembantu untuk melaksanakan dan memelihara usaha-usaha organisasi (ayat 2).

3. Hubungan yang bersifat Fungsional.

Secara fungsional kebangkitan bangsa Indonesia merupakan modal utama untuk lebih mengefektifkan perjuangan secara organisasional dan menyeluruh. Demi kepentingan bangsa, segala atribut kepentingan pribadi dan golongan dikorbankan

untuk membangun kebersamaan dan kejuangan yang bersatu untuk mengusir kemunkaran. Keberadaan 'Aisyiyah dan NA yang dimulai dari proses perintisan hingga menjadi ortom Muhammadiyah tidak terlepas dari peran aktif tokoh 'Aisyiyah. Berjuang untuk mengangkat NA sebagai ortom yang membina generasi muda putri Muhammadiyah (Islam) melalui proses panjang. Proses pendewasaan NA hingga dipercaya untuk mengelola rumah tangganya sendiri mengalami tiga tahap, yaitu: tahap perintisan, pembinaan, tahap otonomi. Masing-masing tahap memiliki jati diri yang berbeda-beda, sesuai dengan usia, tingkat kedewasaan, dan tantangan zaman.

Atas dasar realitas seperti itu, anggota siswa praja wanita semakin banyak, anggotanya berasal dari berbagai daerah. Kedatangan siswa praja wanita dari berbagai daerah sangat membantu penyebarluasan (*publication effect*) dari keberadaan perkumpulan ini. Setiap anggota siswa praja wanita yang pulang ke daerahnya, diwajibkan kepada mereka untuk mengamalkan dan menyebarluaskan kemampuan dan ketrampilan teknis yang dimiliki kepada remaja putri di kampungnya.

Pada masa kepemimpinan Siti Buchainah, telah dilakukan kegiatan-kegiatan: shalat Jum,at secara jamaah, peningkatan dakwah melalui kampung-kampung, dakwah luar kota, kursus administrasi. Setiap dakwah ke kampung-kampung dan ke luar kota, NA senantiasa membawa induk organisasinya, yaitu Muhammadiyah untuk mengenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat luas, dan untuk mengenalkan

posisi Nasyiatul 'Aisyiyah dalam Muhammadiyah yang turut bertanggung jawab mengemban misi Muhammadiyah di bidang keputrian generasi muda.

4. Hubungan yang bersifat Kultural.

Kesadaran sosio-kultural para pemuka Muhammadiyah ini disadari sebagai fenomena masyarakat Indonesia, terutama di Jawa cenderung memelihara TBC. Marginalisasi ajaran Islam ini dikarenakan oleh proses akulturasi Islam dengan budaya setempat yang tidak segera direformasi. Akibatnya tata kehidupan dan sendi-sendi religius masyarakat tidak menampilkan ciri kehidupan yang Islami. Amar ma'ruf nahi munkar dan ukhuwah Islmiah telah menjadi senjata yang ampuh untuk membangun emosi kesatuan anak bangsa dalam rangka mengusir penjajah.

Sejak tahun 1924 segala macam urusan dan keorganisasian siswa praja wanita menjadi tanggung jawab 'Aisyiyah. Untuk mengefektifkannya, 'Aisyiyah melakukan beberapa terobosan, misalnya pada tahun 1925 Siswa Praja Wanita dibelikan sebuah rumah sebagai pusat kegiatan; pada tahun 1926 aktivitas Siswa Praja Wanita dimuat di Suara 'Aisyiyah. Terobosan ini merupakan upaya mengangkat eksistensi Siswa Praja Wanita mendapat sambutan positif. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak Siswa Praja Wanita, dan dibuka cabang-cabang baru di beberapa daerah.

Sehubungan telah semakin melebarnya sayap Siswa Praja Wanita, maka pada kongres ke-18 telah disepakati bahwa setiap cabang 'Aisyiyah harus mendirikan Siswa Praja Wanita. Hal ini merupakan upaya untuk meligitimasi posisi dan peran Siswa Praja Wanita di dalam wadah 'Aisyiyah. Sesuai hasil kongres Muhammadiyah

ke-20 tahun 1929 di Yogyakarta diputuskan bahwa semua gerakan di dalam tubuh Muhammadiyah harus memakai istilah dalam bahasan Arab, maka Siswa Praja Wanita mengubah diri menjadi NA. Nama baru yang disandang NA tidaklah mengubah visi dan misi gerakannya, karena yang berubah hanyalah baju, sedang wadah dan isinya tetap sama.

Proses otonomi NA dimulai pada Mukhtamar 'Aisyiyah di Palembang tahun 1956, dimana NA dimunculkan suatu pemikiran bahwa NA sebaiknya diberi hak otonom untuk mengelola, memenej, dan membentuk jati dirinya. Prasaran dari Dra.Baroroh Baried ini belum mendapat respon yang serius. Kemudian Mukhtamar 'Aisyiyah pada tahun 1959 di Yogyakarta, Bagian NA yang dipegang oleh Zuhra Daris belum juga diberi hak otonom. Ketika itu NA hanya diberi keleluasaan oleh PP. 'Aisyiyah untuk mengembangkan kegiatannya. Kesempatan ini dimanfaatkan NA mengembangkan diri guna menuju kedewasaannya. Iktikad ini disambut baik oleh PP. 'Aisyiyah dengan dibuktikan oleh diberinya kesempatan bermusyawaran sendiri.

Program pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan setiap Mukhtamar jika terdapat kekurangan dalam periode yang satu, maka akan mewarnai pada periode selanjutnya. Pelaksanaan program jangka panjang ini bersifat akumulatif (menumpuk), namun frekunsinya akan semakin berkurang. Dan yang menjadi stressing program adalah prioritas program pada masing-masing periode. Adapun yang dimaksud program jangka pendek NA yaitu program yang dilaksanakan untuk satu periode dengan memprioritaskan program-program yang dicanangkan dalam program jangka panjang.

Perkembangan IPTEK dan perubahan yang semakin pesat, di satu sisi telah mempermudah kiprah manusia dalam memahami dan menguasai dunia. Namun di sisi lain, perkembangan itu telah merusak sendi-sendi peradaban manusia dan tatanan moral bangsa. Budaya primordial dan hedonistis seakan menjadi idola kehidupan. Batas ruang dan waktu tidak lagi menjadi penghalang. Pada saat yang sama, berbagai macam bentuk budaya menyebar ke segala penjuru dunia.

Kondisi ini perlu adanya kendali moral agar bangsa Indonesia tetap pada bingkai budayanya. Upaya ini hanya bisa dilakukan melalui moral dan akhlak agama dalam kehidupan sehari-hari dengan pembentukan sikap dan perilaku yang baik. Inilah dasar pijakan NA menyusun Matriks Kepribadian. Perjuangan ini memerlukan waktu yang panjang, tidak dibatasi oleh umur manusia. Untuk itu diperlukan generasi penerus yang memahami cita-cita NA. Penyempurnaan matriks Kepribadian NA mutlak diperlukan.

Kepribadian NA merupakan cermin akhlakul karimah yang didasari AD/ART NA. Kepribadian yang dimilikinya tidak sekedar ruh organisasi, tetapi kepribadian itu juga melekat pada segenap anggotanya. Karena itu, kepribadian NA merupakan keseluruhan jiwa raga yang dimiliki oleh setiap anggota NA, baik sebagai kader umat, kader organisasi, dan kader bangsa, yang dimanifestasikan dalam sikap dan perilakunya. Demikian sikap dan perilaku anggota NA tidak sekedar membangun citra dan cita-cita saja, tapi harus mampu membangun moralitas bangsa. Upaya NA ini sangat berarti bagi bangsa Indonesia untuk membangun moralitas bangsa ini.

Kemajuan IPTEK harus dimanfaatkan untuk kemajuan NA di dalam bermain dakwah. Artinya, NA secara bijak harus bersatu dengan IPTEK, dan IPTEK dimanfaatkan untuk sarana dakwah secara ilmiah. Globalisasi informasi sangat membantu penyebaran informasi keagamaan (dakwah bil-lisan) lewat media masa. Derasnya informasi dapat menambah khasanah pemberdayaan sumber daya putri Islam. Di pihak lain, NA dituntut untuk melakukan dakwah interaktif - dialogis di dalam mensikapi proses pergeseran nilai. Menurut Amin Abdullah pada Muktamar NA 1995 di Aceh, "NA perlu terlibat dalam mengenal seluk beluk dan memahami berbagai persoalan moralitas kontemporer.

Persoalan KDRT, tidak mudah membongkar pemahaman karena masih banyak yang menggunakan dalil-dalil agama yang tekstual, tidak kontekstual. 'Aisyiyah selama ini sudah memberikan banyak penyuluhan, jika kemudian laporan bahwa dari waktu ke waktu angka KDRT meningkat, berarti memang ada pemahaman masyarakat bahwa kekerasan itu ada dan kini disadari sebagai sebuah "KDRT". Fakta tersebut merupakan 'PR' besar bagi organisasi perempuan termasuk 'Aisyiyah. Oleh karena itu, masalah ini harus menjadi prioritas perjuangan pergerakan, dan harus diakui bukan hanya menjadi persoalan masyarakat kelas bawah namun juga elite yang ada terutama elite politik.

Sidang Tanwir 'Aisyiyah, sesuai dengan regulasi Organisasi yang berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, merupakan permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar dan menjadi forum permusyawaratan dari Pimpinan

Teras Organisasi yang bersifat nasional. Dalam periode 2005 – 2010. Sidang Tanwir kali ini adalah Sidang Tanwir yang ketiga, Sidang Tanwir yang mempersiapkan persidangan Mukhtamar 'Aisyiyah yang ke-46 yang telah berlangsung di Yogyakarta, tanggal 3 – 8 Juli 2010. Sidang Tanwir ini menjadi forum yang fungsional dan potensial bagi materi dan pembicaraan dalam Sidang Mukhtamar tersebut.

Mukhtamar merupakan ajang tertinggi untuk menentukan kebijakan, strategi, dan langkah konkret gerakan 'Aisyiyah pada periode kerja lima tahun. Mencermati situasi ummat, masyarakat, dan bangsa seperti yang terungkap di atas, situasi dengan krisis kehidupan yang multikompleks, permusyawaratan organisasi yang tertinggi ini menjadi penting. Materi persoalan sebagai bahan mencetak program organisasi perlu mendapat perhatian, penyiapan dan pencermatan untuk merancang program yang kondusif dan aplikatif. Perhatian, pencermatan, dan penyiapan dilakukan dengan berbagai cara yang efektif.

Mengingat pentingnya Sidang Tanwir sebagai forum persiapan Sidang Mukhtamar ke-46, materi pembicaraan dipersiapkan lebih dahulu melalui berbagai kegiatan, antara lain kegiatan yang berupa *Round Table Discussion-Round Table Discussion* dan menghadirkan para narasumber dalam berbagai bidang yang terkait, sesuai dengan bidang kegiatan 'Aisyiyah. Alhamdulillah *Round Tabel Discussion* tersebut telah berhasil menampung isu, pandangan, saran, dan menyiapkan strategi pemecahan serta langkah konkretnya, yang semuanya akan disajikan dalam Sidang Tanwir ini. Selain pembicaraan tentang topik-topik yang ditunjuk oleh regulasi Organisasi, seperti, laporan, peninjauan Anggaran Dasar, dan pemilihan dan

penetapan Anggota dan Ketua Umum Pimpinan Pusatnya, persoalan yang terkait dengan fenomena dalam masyarakat bangsa kita menjadi perhatian utama.

Selain *Round Tabel Discussion*, sejumlah rangkaian kegiatan pun dilaksanakan dengan tema kegiatan yang mendukung, yaitu Rapat Akbar dengan mengambil tema yang diangkat dari situasi masyarakat bangsa yang marak dengan kekerasan, kekerasan yang mendera para warga masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak. Meskipun Undang-undang yang terkait telah diterbitkan tampaknya, regulasi itu belum mampu menyaingi kekerasan yang tetap berlangsung, bahkan mengalami eskalasi.

Menghadapi fenomena tersebut ‘Aisyiyah memandang perlu untuk ‘menyaingi’nya dengan mengangkatnya dalam Rapat Akbar, forum yang dengan citra ke’akbar’annya dan dengan besarnya jumlah partisipannya, adanya dan berkembangnya bencana masyarakat ini dapat dihilangkan, sekurang-kurangnya dieliminasi. Demikianlah Rapat Akbar mengambil tema ‘nirkekerasan’, kehidupan masyarakat tanpa kekerasan. Rangkaian kegiatan yang mengiringi Mukhtamar ‘Aisyiyah ke-46 ini dilahirkan oleh kepentingan bangsa dalam tataran global yang digariskan dalam rancangan menciptakan masyarakat baha-gia dalam lingkup global yang dikenal dengan MDGs.

Menghadapi program di atas, ‘Aisyiyah menyelenggarakan seminar internasional yang diikuti oleh para peserta dan pengamat baik dari dalam maupun dari luar negeri. Topik utama seminar diangkat dari fenomena kunci MDGs, yaitu bidang ekonomi. Hakikatnya, ekonomi yang dipandang mampu untuk mencapai

MDGs. Program dunia yang diharapkan dapat tercapai tahun 2015 itu, dievaluasinya bulan September 2010. Seminar mengajak para pemerhati baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendiskusikan, membahas strateginya, dan merancang langkahnya, bagi pencapaian MDGs khususnya, di Indonesia dapat sesuai dengan jadwal yang telah digariskan. Seminar itu menampilkan pembicara baik tingkat nasional maupun internasional.

Rangkaian kegiatan yang lain berupa bazar dan pameran yang menampilkan produk dari kegiatan Organisasi, produk amal usahanya, hasil kerjanya, bahkan proses kerja yang dapat diikuti dengan teknologi yang relatif canggih. Hal itu sejalan dengan program Organisasi yang memotivasi, menggerakkan jiwa dan semangat independensi para warga masyarakat dalam menjalani kehidupan. Kemandirian menjadi topik utama bagi penyelamatan bangsa. Mencermati isu-isu tersebut, 'Aisyiyah terus meningkatkan daya tampilnya dalam peran kebangsaan. Di samping itu, yang menjadi dasar gerakan persoalan sosiologis, ekonomis, pendidikan, kesehatan, keadilan, hukum, dan lingkungan seperti dikemukakan di atas dihadapi oleh 'Aisyiyah dengan semangat iman yang diperoleh melalui cinta tanah air. Sebagai pelaku perempuan gerakan Muhammadiyah, sikap, semangat, dan gerak langkah 'Aisyiyah diarahkan oleh ideologi yang digariskan Muhammadiyah, yaitu ideologi yang dijiwai oleh Islam yang *rachmatan li'l- 'alamin* dan yang bersemangat *tajdid*.

Rancangan pemikiran yang dibawakan dalam Sidang Tanwir ialah langkah konkret telah digariskan, yaitu mengefektifkan gerak langkah dengan menjalin kemitraan, baik dengan instansi pemerintah maupun institusi non pemerintah. Dalam

Muktamar 'Aisyiyah ke-46, telah diadakan peresmian kerjasama dengan pihak pemerintah dalam bentuk penanda tangan nota kesepahaman (MOU) yang menggariskan langkah konkret program. Terkait dengan kemitraan dengan pemerintah, kerjasama dalam bidang hukum dan HAM perlu dilakukan dan dikonkretkan dalam bentuk kegiatan yang konkret pula.

Situasi masyarakat yang memperlihatkan gejala kriminalitas yang makin tinggi yang berakibat pada berjejalnya penghuni lapas. Situasi ini membuka suatu kebutuhan bagi kehidupan mental spiritual dan perhatian terhadap kondisi kesehatannya. 'Aisyiyah memandang bahwa kehidupan sebagai orang yang sedang dalam konsinyasi lapas memerlukan siraman rohani bagi kehidupan mental spiritualnya, dan pelayanan kesehatan bagi kondisi fisiknya. Dua kepentingan tersebut diharapkan menghindarkan lapas sebagai ajang peningkatan ketrampilan kriminalitas, ajar penyubur penyakit. Penanganan kedua hal tersebut, akan menghilangkan sekurang-kurangnya mengurangi dampak yang berakibat pada bencana masyarakat luas. Untuk itulah MOU ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.

Bencana nasional berupa rusaknya lingkungan yang selama ini menjarah wilayah tanah air, telah menjadi program 'Aisyiyah untuk tetap menjadi perhatian. Pada tanggal 5 Juli 2007, 'Aisyiyah seluruh Indonesia telah melakukan gerakan nasional penanaman pohon dengan tekad HIJAU BUMIKU LESTARI ALAMKU, maka dalam event Muktamar, tekad tersebut lebih dikonkretkan dengan gerakan massal nasional penanaman pohon. Gerakan massal nasional penanaman

pohon di event Mukhtar merupakan peningkatan perhatian atas meluasnya kepedulian lingkungan. Peningkatan ini sejalan dengan jumlah pohon yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu apabila program semula 'satu juta pohon' pada periode ini ditingkatkan menjadi 'satu miliar pohon'.

Mukhtar Aisyiyah selama ini diselenggarakan bersamaan dengan Mukhtar Muhammadiyah, baik waktu maupun tempat berlangsungnya Mukhtar. Tentu penyelenggaraan yang demikian mengandung untung dan rugi bagi perjuangan perempuan Muhammadiyah. Di pandang dari segi penyelenggaraan, sangat menguntungkan karena Aisyiyah tinggal mempersiapkan materi yang akan dibahas dalam Mukhtar sedangkan mengenai tempat penyelenggaraan dan fasilitas lain cukup diurus oleh panitia bentukan Muhammadiyah. Dari segi kepentingan perempuan Muhammadiyah, Aisyiyah kurang bisa memperjuangkan kepentingan tersebut dalam Mukhtar Persyarikatan.

Timbul pemikiran untuk menyelenggarakan Mukhtar tersendiri secara terpisah di kemudian hari. Paling tidak lontaran pemikiran ini timbul dari pucuk pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiyah. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa, pemisahan penyelenggaraan Mukhtar tersebut selain akan menambah kemandirian Aisyiyah, juga maksimal dalam memperjuangkan kepentingan perempuan Muhammadiyah. Lebih lanjut Menurut Ketua Aisyiyah Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah Soeratno, menegaskan bahwa perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah dari aspek perempuan yang tertuang dalam keputusan Mukhtar kurang optimal, karena ketetapan organisasi yang dilakukan Aisyiyah

dimusyawarahkan dalam waktu yang bersamaan dengan waktu memusyawaratkan garis-garis perjuangan yang menjadi dasar, dan strategi Muhammadiyah.

Akibatnya, keputusan berupa hasil musyawarah Persyarikatan Muhammadiyah dari segi keperempuan tersebut diambil tidak dari garis-garis kebijaksanaan yang dilahirkan permusyawaratan yang dilakukan Aisyiah Keberadaan wakil Aisyiyah di Muktamar Muhammadiyah yang diselenggarakan dalam waktu bersamaan dengan Muktamar Aisyiyah juga tidak akan mengakomodasi keberhasilan penyelenggaraan perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah oleh Aisyiyah. Beberapa pertimbangan lain tentang Muktamar yang terpisah ini adalah sebagai berikut:

- a. Aisyiyah merupakan komponen Persyarikatan Muhammadiyah dan berfungsi menyelenggarakan perjuangan Persyarikatan dalam aspek kewanita.
- b. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pergerakan yang berjuang menciptakan masyarakat utama juga memerlukan Aisyiyah. Ini karena jumlah sasaran perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah berupa masyarakat perempuan lebih dari 50 persen.
- c. Perkembangan dan kemajuan yang dicapai pada sasaran perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah yang berupa perempuan menuntut perkembangan, kemajuan, perhatian dan penanganan terhadap program Persyarikatan Muhammadiyah dari sisi kiprah sasaran perjuangan wanita.
- d. Muktamar Muhammadiyah merupakan forum tertinggi Organisasi di dalam Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk organisasi otonom, yang

memusyawarahkan garis-garis kebijaksanaan perjuangan yang menjadi dasar perjuangan komponen yang lain, termasuk Aisyiyah.

- e. Gerakan Aisyiyah sebagai pelaksana kebijakan di lapangan perlu menyesuaikan gerakan dengan garis-garis perjuangan. Persyarikatan Muhammadiyah, adalah forum yang memusyawarahkan perjuangan Aisyiyah. Hal ini berarti bahwa forum yang membicarakan perjuangan Aisyiyah perlu diatur dengan memperhatikan waktu penyelenggaraan, Dengan demikian, Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyiyah merupakan forum yang memusyawarahkan kegiatan yang memiliki porsi yang besar bagi keberhasilan perjuangan.

Pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa, timbulnya kesadaran sosio-kultural para pemuka Muhammadiyah ini didasari oleh fenomena masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, yang cenderung memelihara TBC. Marginalisasi ajaran Islam ini dikarenakan oleh proses akulturasi Islam dengan budaya setempat yang tidak segera direformasi. Akibatnya tata kehidupan dan sendi-sendi religius masyarakat tidak menampilkan ciri kehidupan yang Islami. Amar ma'ruf nahi munkar dan ukhuwah Islmiyah telah menjadi senjata yang ampuh untuk membangun emosi kesatuan anak bangsa dalam rangka mengusir penjajah. Kebangkitan bangsa Indonesia merupakan modal utama untuk lebih mengefektifkan perjuangan secara organisasional dan menyeluruh. Demi kepentingan bangsa, segala atribut kepentingan pribadi dan golongan dikorbankan untuk membangun kebersamaan dan kejuangan yang bersatu untuk mengusir kemunkaran.

Keberadaan NA yang dimulai dari proses perintisan hingga menjadi organisasi otonom Muhammadiyah tidak terlepas dari peran tokoh NA. Mereka berjuang untuk mengangkat NA sebagai salah satu organisasi yang membina generasi muda putri Islam. Proses pendewasaan NA hingga dipercaya untuk mengelola rumah tangganya sendiri mengalami proses tiga tahap, yaitu: tahap perintisan, tahap pembinaan, dan tahap otonomi.

1. Tahap Perintisan

Embrio NA bermula dari idealisme Somodirdjo yang memikirkan kelangsungan dan masa depan Muhammadiyah. Bahwa kelangsung dan masa depan Muhammadiyah sangatlah bergantung pada upaya pengkaderan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Untuk itu, Riwayat Singkat Nasyyatul 'Aisyiyah dan Khittah Perjuangannya, bermula dari pemikiran ini yang kemudian mendapat bantuan dari R.H. Hadjid, kepala guru agama di Standart School Muhammadiyah, idealisime Somodirdjo ini kemudian dituangkan ke dalam wadah/diorganisasi yang dinamakan Siswa Praja pada tahun 1919. Wadah ini merupakan organisasi yang menampung remaja putra dan putri Standart School Muhammadiyah.

Mengingat urgensitas perkumpulan ini, maka wadah ini kemudian disebarluaskan ke berbagai cabang dan ranting Muhammadiyah. Perkembangan selanjutnya, tahun 1919 telah diadakan pemisahan antara Siswa Praja Putra dan Siswa Praja Putri. Setelah lima bulan dari pemisahan ini, Siswa Praja Putri

diserahkan kepada Siti Wasilah sebagai Ketua, Umayah sebagai Wakil Ketua, Penulis dan Bendahari dipegang oleh Siti Juhainah dan Siti Zuhriyah. Dengan menggunakan fasilitas tempat Haji Irsjad (Mushola 'Aisyiyah Kauman Yogyakarta sekarang) Siswa Praja Wanita melaksanakan kegiatan-kegiatannya, seperti pengajian, berpidato, jama'ah sholat, mengadakan peringatan hari besar Islam, kegiatan jaiian keputrian, dan lain-lain.

Awalnya kegiatan yang dilakukan Siswa Praja Wanita mengalami hambatan yang cukup serius. Para orang tua siswa pada umumnya merasa keberatan untuk melepas putrinya guna mengikuti tambahan pelajaran dan kegiatan keputrian yang diadakan oleh Siswa Praja Wanita. Berkat kesabaran, ketekunan, dan kerja keras pengurus untuk memberikan pengarahan kepada para orang tua, maka akhirnya mereka sadar dan mengerti arti dan manfaat pelajaran tambahan dan kegiatan keputrian. Ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya ketrampilan praktis wanita, wawasan pengetahuann dan keagamaan para Siswa Praja Wanita. Atas dasar realitas itu, anggota Siswa Praja Wanita semakin hari semakin banyak. Bahkan anggotanya berasal dari berbagai daerah. Kedatangan anggota Siswa Praja Wanita dari berbagai daerah sangat membantu atas penyebarluasan (*publication effect*) dari keberadaan perkumpulan ini. Setiap anggota Siswa Praja Wanita yang pulang ke daerahnya, diwajibkan kepada mereka untuk mengamalkan dan menyebarkan kemampuan dan ketrampilan teknisnya kepada remaja putri di kampungnya, merupakan ibadah, penyebaran ini sangat membantu eksistensi dan pengembangan Siswa Praja Wanita di masa datang.

Pada tahun 1924 segala macam urusan dan keorganisasian Siswa Praja Wanita menjadi tanggung jawab 'Aisyiyah. Untuk mengefektifkan Siswa Praja Wanita, 'Aisyiyah melakukan beberapa terobosan, antara lain pada tahun 1925 Siswa Praja Wanita dibelikan sebuah rumah sebagai pusat kegiatan; pada tahun 1926 aktivitas Siswa Praja Wanita dimuat di Suara 'Aisyiyah. Hal ini merupakan upaya mengangkat eksistensi Siswa Praja Wanita yang mendapat sambutan banyak. Ini dibuktikan dengan semakin suburnya anggota Siswa Praja Wanita, dan tumbuhnya cabang-cabang baru di beberapa daerah.

2. Tahap Pembinaan

Sehubungan dengan semakin melebarnya sayap Siswa Praja Wanita, maka pada kongresnya ke-18 telah disepakati bahwa setiap cabang 'Aisyiyah harus mendirikan Siswa Praja Wanita. Ini merupakan upaya untuk meligitimasi posisi dan peran Siswa Praja Wanita di dalam wadah 'Aisyiyah. Sesuai hasil kongres Muhammadiyah ke-20 pada tahun 1929 di Yogyakarta diputuskan bahwa semua gerakan di dalam tubuh Muhammadiyah harus memakai istilah dalam bahasan Arab, maka Siswa Praja Wanita mengubah diri menjadi NA. Nama baru yang disandang NA tidaklah mengubah visi dan misi gerakannya, karena yang berubah hanyalah baju, sedang wadah dan isinya tetap sama. NA baru semakin hari semakin menampakkan kegiatannya. Pada masa era kepemimpinan Siti Buchainah, dilakukan kegiatan-kegiatan shalat Jum'at secara jamaah,

peningkatan dakwah melalui kampung-kampung, dakwah luar kota, kursus administrasi.

Setiap dakwah ke kampung-kampung dan ke luar kota, 'Aisyiyah senantiasa membawa induk organisasinya, yaitu Muhammadiyah. Hal ini bertujuan: (1) Mengenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat luas; (2) Mengenalkan posisi Nasyiatul 'Aisyiyah dalam organisasi Muhammadiyah yang turut bertanggung jawab mengemban misi Muhammadiyah di bidang keputrian generasi muda.

Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada tahun 1938 telah diambil keputusan tentang simbol padi sebagai simbol NA. Pada tahun ini, Achyar Anies mengarang lagu simbol padi dan kemudian dijadikan mars NA. Masa pendudukan Jepang sampai masa revolusi kemerdekaan, organisasi Muhammadiyah dan ortomnya mengalami stagnasi. Baru pada tahun 1950, suhu politik Indonesia sudah agak menurun, Muhammadiyah mengadakan muktamar di Yogyakarta. Muktamar ini bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan dan langkah Muhammadiyah. Muktamar ini ada beberapa perubahan yang fundamental, yaitu 'Aisyiyah diangkat menjadi organisasi otonom Muhammadiyah. Kemudian NA dijadikan bagian yang diistimewakan oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, sehingga NA diberi wewenang untuk mengelola dan memenej organisasinya di seluruh nusantara. Bahkan keistimewaan NA sampai pada diberi wewenang oleh 'Aisyiyah untuk mengadakan konferensi sendiri. Sejak saat itu penampilan NA lebih mandiri dan meyakinkan.

3. Tahap Otonomi

Proses otonomi NA dimulai pada Mukhtamar 'Aisyiyah tahun 1956 di Palembang, dimana NA dimunculkan suatu pemikiran bahwa NA sebaiknya diberi hak otonom untuk mengelola, dan membentuk jati dirinya. Prasaran dari Dra.Baroroh Baried ini belum mendapat respon yang serius.Kemudian pada Mukhtamar 'Aisyiyah pada tahun 1959 di Yogyakarta, Bagian NA yang dipegang oleh Zuhra Daris belum juga diberi hak otonom.Ketika itu NA hanya diberi keleluasaan oleh PP. 'Aisyiyah untuk mengembangkan kegiatannya.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh NA mengembangkan diri guna menuju kedewasaannya.Iktikad ini disambut baik oleh PP.'Aisyiyah dengan dibuktikan oleh diberinya kesempatan bermusyawaran tersendiri. Pada Mukhtamar 'Aisyiyah di Jakarta tahun 1962 merupakan sinyalemen bahwa NA harus dituntut untuk mulai memikirkan kebutuhan dan pengembangan dirinya. Untuk itu pada kesempatan ini Bagian NA di bawah kepemimpinan Siti Karimah membuat rencana kerja baru yang meliputi : kaderisasi, popularisasi NA, pembinaan, dll. Semangat Jakarta ini betul-betul menjadi motivasi bagi NA untuk membenahi diri dan membina rumah tangganya.

Semangat Jakarta ini betul-betul telah menjadi Nasyiatul 'Aisyiyah dewasa.Pada sidang tanwir 1963 telah disepakat bahwa NA diberi status otonom.Siti Karimah dan kawan-kawan mulai mengadakan persiapan-persiapan untuk mengadakan musyawarah pertamanya di Bandung.Persiapan ini mendapat bimbingan dari majlis bimbingan pemuda.Sebelum mukhtamar, terlebih dahulu

diadakan konferensi NA di Solo. Konferensi ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi NA; mempersiapkan program-program kerja, penyusunan AD, berbagai hal yang berkaitan dengan keorganisasian, dan lain-lain.

D. Kerangka Konseptual

Masyarakat Indonesia dengan keberagaman etnik, bahasa, agama dan adat istiadat telah memiliki mekanisme dan pengaturan sosial yang berbeda-beda. Namun demikian seluruh aktivitas tersebut dilakukan secara mandiri dan mendorong partisipasi dalam kebersamaan. Bentuk masyarakat partisipatif demikian inilah yang kembangkan 'Aisyiyah dan Muhammadiyah dalam kehidupan yang demokratis dapat ditopang oleh masyarakat madani. Dalam hal ini, 'Aisyiyah memberikan jawaban atas berbagai permasalahan, baik problematika daerah, wilayah maupun global yang dari waktu ke waktu mengalami pengembangan. Peran, fungsi, komitmen serta tanggung jawab 'Aisyiyah semakin besar dan terbuka. 'Aisyiyah lahir sebagai komponen perempuan Muhammadiyah, yang didirikan pada tanggal 27 Rajab 1375 bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 di Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan. Bermula dari perkumpulan gadis-gadis dalam pengajian rutin yang dikenal sebagai Sapa Tresna pada Tahun 1914, para kader 'Aisyiyah yang kemudian berkembang sampai pada kalangan ibu-ibu rumah tangga, kemudian diajak untuk memikirkan persoalan kemasyarakatan khususnya masalah peningkatan harkat kaum perempuan.

Dalam perkembangannya, gerakan 'Aisyiyah dari waktu ke waktu terus meningkatkan peran dan memperluas jaringannya dalam rangka peningkatan

dan pemajuan harkat wanita Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan sekolah dari Taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, rumah sakit, balai bersalin, panti asuhan, panti jompo, rumah-rumah sosial, lembaga ekonomi dan lain-lain. Perkumpulan 'Aisyiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang bercita-cita untuk *memperbaharui* aspek pemahaman dan pengembangan agama Islam di dalam masyarakat untuk dikembalikan pada ajaran Islam murni yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Struktural 'Aisyiyah tersebar dan berjenjang dalam beberapa level yang mempunyai kewenangan dan wilayah kerja masing-masing. Jaringan yang tersebar di seluruh daerah ini merupakan potensi yang sangat besar untuk membangun umat dan bangsa ini menuju masyarakat utama dalam bentuk sinergi dan jaringan yang kuat di beberapa bidang. 'Aisyiyah sangat besar dalam mengakomodasikan warga untuk menyalurkan aspirasinya, sekaligus mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh daerah melalui berbagai aktivitas, seperti keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan sebagainya. Pengembangan dakwah Islam melalui dakwah jamaah dan dakwah kultural merupakan strategi dakwah masa kini. Strategi ini mengingat tantangan global, perkembangan teknologi, dan pola pikir umat yang semakin berkembang. Konsep tersebut diwujudkan melalui gerakan TIT 'Aisyiyah melalui pendekatan sumber daya manusia, ekonomi, dan kesejahteraan, pendekatan struktural serta global.

Peran dan partisipasi 'Aisyiyah menjadi sangat berarti, terutama di dalam hal gerakan Desa Qoryah Toyyibah, Desa Siaga, yang merupakan gerakan pemberdayaan

untuk meningkatkan status desa agar menjadi tentram, tenang, sejahtera baik lahir maupun batin yang terpancar pada setiap keluarga, yang pada gilirannya tercermin pada masyarakat. Untuk lebih jelasnya kerangka konseptual tersebut dapat digambarkan dalam bentuk skema atau bagan, yang akan dikembangkan sesuai dengan fakta empiris yang diteliti berdasarkan peran dan fungsi masing-masing komponen, serta keterkaitan antar variabel (fenomena) yang dibahas.

Dinamika kemandirian organisasi, adalah sebuah proses yang terkait dengan proses pelaksanaan aktivitas secara kontinu untuk mewujudkan pola pengaturan menjadi struktur organisasi. Proses yang dimaksud adalah pola pengaturan energi dan materi antara tatanan dengan lingkungannya sesuai dengan pola pengaturan yang berlaku. Setidaknya ada 2 (dua) jenis pendorong terjadinya proses pengaturan, yaitu: (1) Dinamika lingkungan eksternal yang menuntut penyesuaian struktur agar tetap menjamin adanya pertukaran energi, materi dan informasi antara tatanan dengan lingkungan; (2) Dinamika internal yaitu antara komponen-komponen pembentuk tatanan karena pada dasarnya setiap komponen tatanan memiliki kreativitas, dalam arti senantiasa ingin melakukan pembaharuan terhadap dirinya, termasuk pembaharuan terhadap format interkoneksi dengan komponen lainnya. Pembaharuan ini merupakan proses yang sangat dinamis, karena setiap komponen aktif melakukan berbagai upaya agar tetap mempertahankan identitas dan kualitas keberadaannya di dalam tatanan organisasi.

Demikian halnya kemandirian organisasi 'Aisyiyah sejak berdirinya hingga dewasa ini. Hal ini karena upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi tidak lagi

didasarkan pada desain yang ketat oleh segelintir pimpinan puncak organisasi, tetapi lebih merupakan aktivitas spontan yang dipilih dan dilaksanakan oleh semua komponen (pengurus dan anggota 'Aisyiyah). Model ini tetap dipertahankan sejak awal berdirinya organisasi 'Aisyiyah, karena mampu memberikan jawaban yang lebih tepat terhadap berbagai masalah yang dipicu oleh dinamika lingkungan strategis. Selain itu, sumber daya yang dimiliki berupa amal usaha yang meliputi pendidikan, kesehatan, panti asuhan, dan lain-lain dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin karena dikelola sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, secara teoritis kemandirian organisasi 'Aisyiyah sebagai salah satu ortom perempuan Muhammadiyah memiliki otonomi seluas-luasnya dapat bersinergi membentuk organisasi yang efektif dan efisien, dengan menggunakan cara pandang Sains Baru. Secara teoritis kerangka konseptual penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) konsep utama yang terkait dengan kemandirian. *Autopoiesis*, mengandung pengertian kemandirian atau otonomi (mengatur diri sendiri). Dalam hal ini, 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah yang diberikan otonomi untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri unit-unit organisasi (amal usaha 'Aisyiyah). Namun, tetap dalam bingkai (koridor) induk organisasi 'Aisyiyah dan kontrol dari Muhammadiyah sebagai satu kesatuan sistem yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Paradoks interdependen, ialah secara menyeluruh 'Aisyiyah dapat mengontrol unit-unit organisasi (amal usaha) yang dimiliki, namun secara internal setiap unit organisasi memiliki hak otonomi untuk mengembangkan

amal usaha tersebut. Medan visional, adalah visi dan misi atau dalam 'Aisyiyah lebih dikenal istilah "khittah" untuk mengikat setiap pengurus dan anggota agar tetap konsisten menjalankan fungsi organisasi. Dengan demikian, organisasi 'Aisyiyah memiliki fungsi mengembangkan sumber daya yang dimiliki sehingga berhasil mengikat para pengurus dan anggotanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konsep keberlanjutan organisasi, dapat dikaji melalui 3 (tiga) unsur pokok, meliputi: sistem, kontigensi, serta lingkungan politik dan ekonomi. Keberlanjutan suatu organisasi dapat dianalogikan sebagai suatu sistem yang dibangun dengan pertimbangan antara lain, sistem merupakan hal-hal yang cukup umum untuk menutupi keberlanjutan permasalahan organisasi dan mencakup semua jenis usaha atau kegiatan, baik yang bersifat formal maupun non-formal yang telah digariskan oleh organisasi. Di samping itu, organisasi sebagai sistem karena secara simultan ditentukan oleh proses internal dan hubungan diantara sub-sub sistem atau komponen organisasi berupa unit-unit kegiatan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Organisasi sebagai sistem yang menekankan pada hubungan diantara unsur yang terpisahkan dan memungkinkan untuk memunculkan aspek-aspek agro lingkungan, ekonomi, politik dan sosial budaya yang dapat dikelola secara sistematis dan konsisten dalam aspek manajerial keberlanjutan organisasi bersangkutan.

Demikian kelahiran 'Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan di tengah masyarakat yang sedang mengalami kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga memiliki kontigensi serta membawa pencerahan di berbagai bidang

kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Realitas gerakan dan manfaat 'Aisyiyah selama ini telah dirasakan oleh masyarakat luas terlihat dari banyaknya amal usaha yang dilakukan. Sebuah cita-cita yang didambakan oleh Nyi Ahmad Dahlan selangkah demi selangkah dan setahap demi setahap mulai diwujudkan. Menjelang usia satu abad bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah organisasi yang masih tetap eksis. Hal ini mengindikasikan sejauh mana estafet gerakan 'Aisyiyah telah berjalan diiringi dengan sistem organisasi yang solid dan mekanisme kerja yang terstruktur.

Eksistensi 'Aisyiyah sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan politik senantiasa menyesuaikan (beradaptasi) dengan perkembangan serta langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan masyarakat madani, merupakan salah satu indikator sebagai identitas yang dimiliki untuk mengidentifikasi ada tidaknya perkembangan. Relevansi indikatornya ialah termanifestasi dalam organisasi yang dipenuhi oleh gerakan 'Aisyiyah. Hal tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip organisasi dipegang teguh oleh masyarakat madani (termasuk pengurus dan anggota) sebagai perwujudan identitasnya secara material.

Dalam hal kepatuhan dalam organisasi sebagaimana dijelaskan oleh Etzioni, bahwa sebuah organisasi akan tetap bertahan dan berlanjut karena di dalamnya ada kekuasaan, keterlibatan, dan kepatuhan. Demikian halnya dengan organisasi 'Aisyiyah, di mana kepatuhan pengurus dengan anggota kepada 'Aisyiyah, dan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah sebagai organisasi otonom ialah lebih bersifat "kongruen" dengan jenis power yang kuersif. Dalam hal ini, 'Aisyiyah

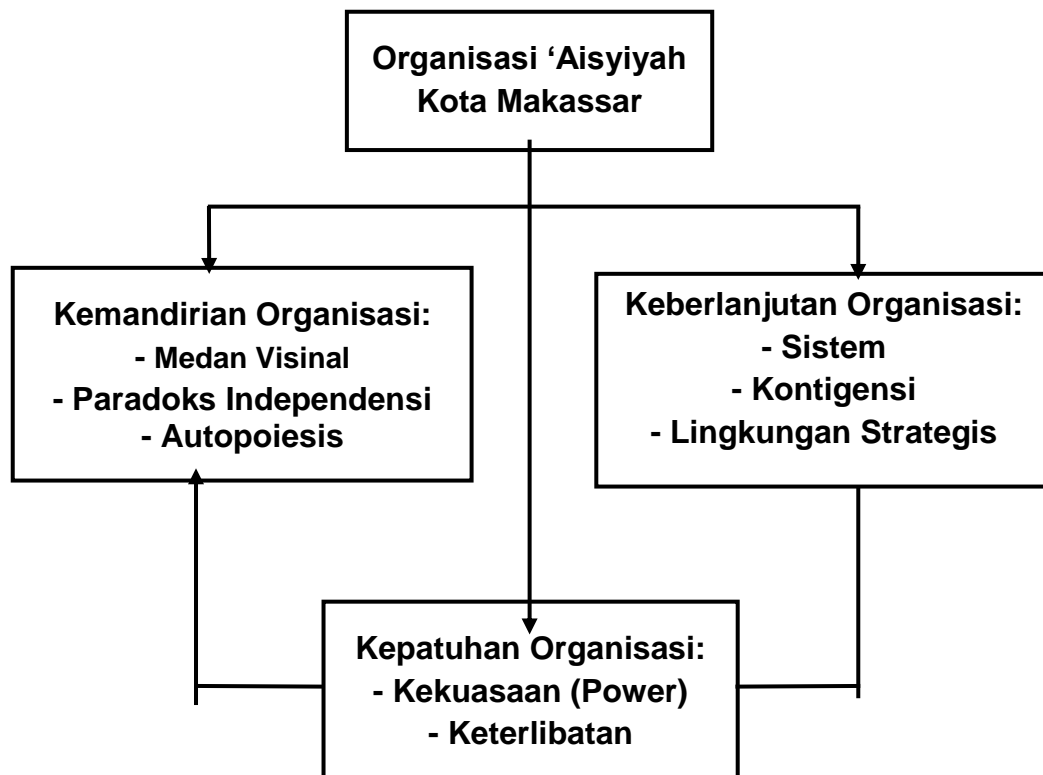
sebagai organisasi dakwah pengurus dapat menerapkan normatif power dalam menjalankan unit-unit organisasi (amal usaha).Demikian pula keterlibatan dan kepatuhan para anggota terhadap organisasi 'Aisyiyah lebih didasarkan pada pertimbangan moral.Kemudian kepatuhan 'Aisyiyah secara organisasi kepada Muhammadiyah didasarkan pada normatif power, serta keterlibatan dan kepatuhan yang lebih bersifat moral ketimbang alienatif atau kalkulatif.

Mencermati penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, variasi power (kekuasaan) yang dikembangkan organisasi 'Aisyiyah sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang berkembang, sesuai dengan jenis kegiatan (amal usaha) serta tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, kondisi dan situasi yang bagaimana 'Aisyiyah menerapkan power kuersif dengan jenis keterlibatan alienatif, kalkulatif atau moral. Namun, secara umum tipe yang dikembangkan 'Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan adalah normatif power dengan hubungan yang lebih efektif antara Muhammadiyah dengan 'Aisyiyah.Hal ini mengakibatkan 'Aisyiyah sebagai unit sosial dapat mempertahankan diri dari tekanan baik dari dalam maupun dari luar, dalam hal ini adalah Muhammadiyah dan Pemerintah.

Adapun hubungan atau kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah kurang lebih sama, yaitu pengurus 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah lebih bersifat normatif power, sedangkan kepatuhan anggota kepada 'Aisyiyah adalah moral. Sebagai contoh, dalam hal mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani bukan dalam arti individu-individu yang partisipatif dan otonom saja, tetapi terdiri atas sekumpulan individu warga yang tergabung dalam unit-unit organisasi yang memiliki tatanan

yang menjamin pengurus dan anggota untuk mampu mengekspresikan diri, mengembangkan minat, saling menukar informasi, memediasi perbedaan dan menciptakan pola-pola hubungan yang stabil. Di samping itu, tertata dalam organisasi modern yang mengembangkan nilai-nilainya sendiri secara konsisten. Karena itu, cita-cita menuju masyarakat madani sejalan dengan visi pengembangan ‘Aisyiyah, yaitu tercapainya usaha-usaha yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah lebih berkualitas menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagai penjabaran yang berkesinambungan dari visi idealnya, yaitu tegaknya agama Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah Rasulullah saw.

Bagan Kerangka Konseptual



E. Definisi Fokus (Operasional)

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah atau konsep utama yang perlu didefinisikan secara jelas, untuk menyamakan persepsi dan kesamaan pandangan tentang makna dan tujuan penelitian ini. Selain itu, definisi operasional dalam studi ini dimaksudkan untuk memberi batasan terhadap tujuan agar tidak menimbulkan penafsiran yang telampau luas. Konsep-konsep utama tersebut, adalah:

1. Kemandirian yang dimaksud dalam disertasi ini adalah kedudukan atau posisi 'Aisyiyah yang tidak hanya karena otonomi dirinya, tetapi karena ada keterkaitan dengan struktur lain terutama Muhammadiyah sebagai induk organisasi dan merupakan lingkungan strategis terdekat.
 - a. Medan visional, ialah medan magnet yang mengikat semua anggota organisasi untuk bergerak bersama dan berkontribusi mewujudkan visi dan tujuan yang telah ditentukan, yaitu "Tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".
 - b. Paradoks independensi, adalah kedudukan organisasi 'Aisyiyah di satu sisi sebagai sistem yang otonom, namun di sisi lain merupakan bahagian dari sistem yang lebih besar yaitu Muhammadiyah.
 - c. Austopoiesis, adalah 'Aisyiyah selalu mereproduksi diri sendiri serta memperbaharui unit-unitnya sendiri untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan organisasi dari waktu ke waktu, dari fase ke fase sehingga mampu bertahan dan eksis.

2. Keberlanjutan dalam penelitian ini, dapat diartikan sebagai kemampuan 'Aisyiyah dalam merespon lingkungan strategis terdekat Muhammadiyah dan lingkungan strategis yang lebih luas (masyarakat baik secara lokal, regional maupun global) melalui program kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah dibuat secara terarah, sistematis, dan terencana.
 - a. Sistem, adalah unit-unit yang diciptakan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan organisasi secara keberlanjutan suatu melalui input, proses, dan output.
 - b. Kontigensi, adalah strategi, kebijakan, dan langkah-langkah yang ditempuh organisasi berdasarkan teori kemungkinan agar organisasi senantiasa melakukan perubahan, perbaikan dan adaptasi terhadap perkembangan lingkungan eksternal maupun internal organisasi. Hal ini dimaksudkan agar 'Aisyiyah memiliki daya saing.
 - c. Lingkungan strategis, adalah Muhammadiyah, masyarakat, bangsa, dan negara yang mewarnai perkembangan organisasi sebagai suatu sistem yang harus mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang terkait dengan kondisi objektif 'Aisyiyah sejak awal didirikan hingga sekarang.
3. Kepatuhan yang dimaksud dalam studi ini, dimaknai sebagai kombinasi antara kekuatan yang diterapkan organisasi dengan keterlibatan semua anggota (warga 'Aisyiyah) dalam berorganisasi di balik kemandirian dan keberlanjutan organisasi tersebut. Dalam hal ini, kekuatan (power) yang diterapkan organisasi 'Aisyiyah

adalah bersifat kongruen;sedangkan keterlibatan semua warga (anggota dan pengurus) adalah bersifat moral normatif.

- a. Kekuasaan (power),adalah kepatuhan pengurus 'Aisyiyah terhadap Muhammadiyah yang bersifat kongruen dalam mengendalikan unit-unit organisasi (amal usaha 'Aisyiyah) sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang telah disepakati bersama untuk mewujudkan visi dan tujuan yang telah ditentukan.
- b. Keterlibatan, adalah bentuk kepatuhan yang dilakukan semua warga 'Aisyiyah dalam mengelola amal usaha yang bersifat moral normatif, bukan karena honor atau insentif, janji atau paksaan melainkan semata-mata karena "amar makruf nahi munkar".

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif yang dikembangkan oleh Creswell (1997), adalah Tradisi Biografi, Fenomenologi, Grounded Theory, Etnometodelogi, dan Studi Kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus analisis pada tingkat individual dan pengalaman individu (*human document*) dalam mengelola organisasi. Pendekatan kualitatif dimaksud adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metodologi untuk mengkaji suatu fenomena dan masalah manusia (Bungin, 2001). Dalam kaitan ini, peneliti membuat suatu gambaran yang kompleks untuk menjelaskan fenomena kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah berdasarkan fakta empiris. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa, metode kualitatif lebih mudah ketika berhadapan dengan kenyataan ganda, untuk menjelaskan hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. Dengan kata lain, metode kualitatif di mana data yang dikumpulkan berupa artikel (embrio) cikal bakal berdirinya 'Aisyiyah (bukan angka-angka) tapi deskriptif yang dapat dianalisis berdasarkan interpretasi peneliti untuk memberikan gambaran serta penjelasan secara komprehensif fenomena sosial yang berkaitan dengan konsep yang diteliti, yaitu kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah. Dalam hal ini, peneliti menelusuri latar belakang

dari fenomena yang dibahas sebagai suatu konsep yang utuh ditinjau dari aspek sejarah (historis) dan sosiologis.

Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini, adalah suatu studi yang bertujuan mendeskripsikan suatu masalah dengan batasan yang sistematis dan terperinci, pengambilan data yang mendalam dan melibatkan berbagai sumber (informan). Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, di mana kasus yang dibahas adalah organisasi 'Aisyiyah, yang meliputi: (1) sejarah organisasi yaitu informasi tentang sejarah berdirinya 'Aisyiyah; (2) dinamika organisasi, dalam hal ini informasi tentang perkembangan 'Aisyiyah sejak didirikan hingga sekarang; (3) Aspek-aspek kemandirian organisasi, yakni konsep yang digunakan dalam menjelaskan proses pembentukan dan aktualisasi identitas organisasi (*autopoiesis*), paradoks independensi dalam mengelola unit-unit organisasi (amal usaha), serta medan visional dalam menjaga komitmen dan konsistensi organisasi yang telah disepakati; (4) Aspek keberlanjutan organisasi, meliputi data dan informasi tentang sistem organisasi yang berkelanjutan. Kontigensi organisasi dalam mengantisipasi kemungkinan yang akan dihadapi dan proses adaptasi terhadap perubahan di lingkungan eksternal dan internal, agar organisasi tetap eksis; dan (5) Aspek kepatuhan organisasi, data dan informasi yang dibutuhkan meliputi kekuasaan (power) pengurus 'Aisyiyah dalam mengendalikan unit-unit organisasi, keterlibatan anggota 'Aisyiyah dalam mengelola amal usaha, serta kepatuhan pengurus dan anggota terhadap 'Aisyiyah; di samping kepatuhan organisasi 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah dibalik kemandirian dan keberlanjutan organisasi tersebut.

Penelitian kualitatif tidak sekedar diartikan sebagai pemilihan metode yang difokuskan pada jenis data dan analisis yang bersifat kualitatif, tetapi mempunyai landasan filosofis yang mendasari lahirnya paradigma tertentu tentang metode. Pemilihan metode bukanlah hal yang sederhana, karena di dalamnya menyangkut asumsi-asumsi dasar tentang teori sosial. Peneliti kualitatif telah membuat rel sendiri untuk tidak menggunakan pendekatan ilmu alam di dalam mempelajari masyarakat. Bila pendekatan kuantitatif dikembangkan penganut aliran *positivisme*, maka pendekatan kualitatif dikembangkan penganut *filsafat hermeneutika*. Hermeneutika adalah aliran filsafat ilmu pengetahuan yang selama beberapa dekade terakhir menjadi pokok perdebatan ilmu-ilmu sosial (Strauss & Juliet, 2003).

Studi kasus dipilih sebagai desain penelitian yang dikembangkan dalam studi ini, dikombinasi dengan jenis-jenis penelitian yang relevan, antara lain: studi sejarah (historis), grounded research, dan studi etnografi sebagai salah satu kerangka kerja yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Sebagai suatu kategori desain penelitian, studi ini tidak mudah didispezifikasi dari segi akurasi dan generalisasi. Meskipun demikian, dari aspek-aspek ini dapat dijelaskan sesuai dengan pandangan berbagai ahli, bahwa pemahaman atas makna, proses pemaknaan, dan produksi makna oleh interaksionisme simbolik, etnometodologi, dan etnografi praktis, semuanya mengarah kepada penentuan obyek yang spesifik. Penggunaan jenis dan tipe penelitian yang dimaksud adalah analisis data secara induktif, bertujuan untuk mencari kesamaan-kesamaan secara komprehensif atau menyeluruh (*universalitas*), dan membuat kategori-kategori umum melalui pemberian makna secara ketat sesuai

dengan konsep-konsep utama yang dikembangkan dalam penelitian ini (Kerlinger, 2002).

Penggunaan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif-kualitatif berupa informasi lisan dan tertulis dari berbagai subjek yang diteliti, serta tingkah laku yang dapat diamati secara holistik (Bogdan dan Taylor, 1993). Hal ini sejalan dengan pendekatan fenomenologi, yang menekankan makna subjektif dari perilaku berdasarkan struktur kesadaran dan pengalaman hidup sehari-hari. Peneliti fenomenologi berusaha masuk ke dalam dunia konseptual subjek yang diteliti, sehingga dipahami apa dan bagaimana suatu fenomena dikembangkan dalam kehidupan (Moleong, 1995).

Melalui pendekatan ini diharapkan temuan empiris dari lapangan (*setting*) berupa jawaban, ucapan, kata-kata, dan tindakan atau perilaku subjek yang teramati, dapat dideskripsikan secara lebih terinci dan akurat ditinjau dari berbagai aspek yang berkaitan dengan fenomena kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar. Untuk memahami dan menafsirkan makna-subjektif tentang pikiran, ucapan, perilaku, dan tindakan orang yang diteliti, dalam hal ini pengurus dan anggota 'Aisyiyah dalam konteks lapangan, yaitu kemandirian, keberlanjutan dan kepatuhan pengurus dan anggota kepada organisasi melalui metode *vrestehen* yakni pengertian interpretatif terhadap pemahaman subjektif manusia (Ritzer, 1992); atau memahami pengertian subjek menurut sudut pandang mereka sendiri (Moleong, 1995). Metode tersebut sejalan dengan apa yang disebut *perspektif emik*, yaitu menggali data dan informasi berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan

dilakukan subjek (pengurus dan semua warga 'Aisyiyah) dalam mengelola amal usaha, dan bukan berdasarkan apa yang dipikirkan peneliti (Sugiyono, 2007).

Keseluruhan data dan informasi tersebut dapat diorganisir kemudian dijelaskan secara komprehensif dalam bentuk narasi secara sistematis dan mendalam tentang kasus organisasi 'Aisyiyah, meliputi kemandirian dan keberlanjutan melalui fase-fase tertentu. Proses penelitian ini mulai dari pengumpulan data, analisis data, sampai penarikan kesimpulan, peneliti adalah instrumen utamanya (*human instrument*), tinggal di lapangan dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena dipandang dari segi pendekatan yang digunakan, maka kelak hasil penelitian ini akan melahirkan suatu kajian yang berparadigma sosiologi interpretatif (Berger & Kellner, 1985).

B. Fokus Penelitian dan Penentuan Informan

Fokus perhatian dalam penelitian ini adalah fenomena sosial yang terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah. Untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial secara lebih alami, penuh makna, dan mendalam (Muhajir, 2008). Sebagaimana telah dijelaskan bahwa, fokus penelitian ialah konsep utama yang dikembangkan sekaligus merupakan tujuan yang diharapkan dalam disertasi ini, yaitu tercipta kemandirian dan keberlanjutan organisasi serta kepatuhan pengurus dan anggota kepada 'Aisyiyah, termasuk kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah. Secara garis besar fokus penelitian yang hendak ditelusuri disertasi ini adalah:

1. Dinamika kemandirian ‘Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan. Dalam hal ini, data dan informasi yang terkait dengan perkembangan ‘Aisyiyah Kota Makassar sejak didirikan Tahun 1926 dan dinamika yang dilalui ‘Aisyiyah yang secara garis besar dibagi dalam tiga fase, yaitu: (1) fase pra kemerdekaan 17 Agustus 1945; (2) fase kemerdekaan, dan (3) fase reformasi. Dengan kata lain, konsep kemandirian yang ditelusuri adalah medan visional, paradoks independensi, dan autopoiesis.
2. Keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah Kota Makassar dalam merespon dinamika lingkungan eksternal, yaitu data dan informasi tentang strategi atau langkah-langkah yang dilakukan ‘Aisyiyah dalam kaitannya dengan dinamika perubahan dan perkembangan lingkungan strategis terdekat, yaitu Muhammadiyah dan lingkungan strategis yang lebih luas termasuk di dalamnya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk melakukan adaptasi (penyesuaian) terhadap perubahan tersebut. Dalam hal ini strategis dan langkah-langkah yang dimaksud, antara lain program kerja dan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dll.
3. Dinamika kepatuhan anggota kepada ‘Aisyiyah dan kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah, di balik kemandirian dan keberlanjutan adalah data dan informasi tentang bagaimana tingkat kepatuhan pengurus dan anggota kepada ‘Aisyiyah terkait dengan unit-unit organisasi atau amal usaha yang dikeola, yaitu: (a) amal usaha di bidang pendidikan, meliputi Taman Kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah; (b) amal usaha di bidang

kesehatan, antara lain Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), dan (c) amal usaha di bidang sosial kemasyarakatan, seperti Panti Asuhan.

Selanjutnya untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan fokus penelitian di atas, maka penentuan Informan sebagai sumber utama (data primer) dapat dipilih secara *purposive* sesuai dengan mekanisme, karakteristik, dan kapabilitas yang dimiliki dalam memberikan keterangan, data, dan informasi secara obyektif. Sehubungan dengan itu, informan yang dipilih sebanyak 20 orang meliputi: Ketua dan wakil ketua, Sekretaris dan wakil sekretaris, Bendahara dan wakil bendahara 'Aisyiyah Kota Makassar sebanyak 10 orang; Ketua-ketua Majelis dan Lembaga, Guru (Pendidikan), Petugas Kesehatan (Perawat), dan Pengelola Panti Asuhan sebanyak 8 orang; Pengurus Wilayah Aisyiyah (PWA) Sulawesi Selatan 1 orang; dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan 1 orang. Lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data dan informasi tentang kemandirian dan fase-fase perkembangan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar dijelaskan oleh informan Ketua dan wakil ketua, Sekretaris dan wakil sekretaris, serta Bendahara dan wakil bendahara sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban dalam organisasi.
- b. Data dan informasi yang terkait dengan keberlanjutan organisasi dalam merespon dinamika lingkungan strategis (eksternal) dapat dijelaskan oleh informan Ketua-ketua Majelis dan Lembaga, Guru (Pendidikan), Petugas kesehatan, dan

Pengelola Panti Asuhan melalui program kerja yang dikembangkan sesuai dengan amal usaha yang dikelola.

- c. Data dan Informasi yang terkait dengan dinamika kepatuhan anggota kepada ‘Aisyiyah dan kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah di balik kemandirian dan keberlanjutan organisasi tersebut, dijelaskan oleh pengurus ‘Aisyiyah (ketua dan wakil ketua), Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah, dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan.

Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Pekerjaan/Jabatan
1.	Hj. Chaeriah Akib	Ketua ‘Aisyiyah Kota Makassar
2.	Hj. Aisyah Damopoli	Wakil Ketua ‘Aisyiyah Kota Makassar (Bidang Ekonomi, Pengkajian & Pengemb)
3.	Dra. Hj. Muliati Amin, M.Ag	Wakil Ketua ‘Aisyiyah Kota Makassar (Bidang Pendidikan dan Kebudayaan)
4.	Dra. Hj. Khaeriah Jabar	Wakil Ketua ‘Aisyiyah Kota Makassar (Bidang Pengembangan Kader)
5.	Hj. Tuty Suciaty, SH., MH	Wakil Ketua ‘Aisyiyah Kota Makassar (Bidang Hukum dan HAM)
6.	St. Rahmah Abdullah	Wakil Ketua ‘Aisyiyah Kota Makassar (Bidang Kesejahteraan Sosial)
7.	Djuharmi Mustari	Sekretaris ‘Aisyiyah Kota Makassar
8.	Ratna Dewi Ibrahim, SS., M.Hum	Wakil Sekretaris ‘Aisyiyah Kota Makassar
9.	Hj. Rukiah Khalid	Bendahara ‘Aisyiyah Kota Makassar
10.	St. Zohrah Marzuki	Ketua Majelis Tabligh ‘Aisyiyah Kota Mks
11.	Dra. Hj. Syahribulan K., M.Pd	Ketua Majelis Pendidikan Dasar & Menengah (Dikdasmen) ‘Aisyiyah Kota Mks.
12.	Dra. Hj. Hamdana Dahlan, M.Kes	Ketua Majelis Kesehatan ‘Aisyiyah Kota Makassar
13.	Maryam Siking	Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial ‘Aisyiyah Kota Makassar

LANJUTAN TABEL 3.1		
14.	Budiarti Bachtiar, SE	Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan 'Aisyiyah Kota Makassar
15.	Sulfiah Wahab, SP	Ketua Majelis Pembinaan Kader 'Aisyiyah Kota Makassar
16.	Hj. Djalaliah Jamal	Ketua Majelis Hukum dan HAM 'Aisyiyah Kota Makassar
17.	Dra. Munirah, M. Pd.	Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan 'Aisyiyah Kota Makassar
18.	Dr. St. Aida Azis, S.Pd., M.Pd	Ketua Lembaga Kebudayaan 'Aisyiyah Kota Makassar
19.	Dra. Hidayah Quraisy, M.Pd	Pengurus Wilayah 'Aisyiyah (Ketua PWA) Sulawesi Selatan
20.	K.H. Iskandar Tompo	Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan

Sumber: Penentuan Informan Penelitian, Februari 2012.

C. Penentuan Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar, yang mencakup semua unit organisasi (amal usaha) yang dikelola 'Aisyiyah dan tersebar baik di tingkat wilayah, daerah, cabang dan ranting. Menyadari akan kompleks dan luasnya lokasi penelitian ini, maka penentuan lokasi dilakukan secara purposive dan proporsional berdasarkan fokus dan tujuan penelitian. Lokasi penelitian tidak ditetapkan begitu saja, melainkan dibingkai dalam kerangka teoretik dan fakta empirik yang telah ditentukan, serta dilandasi pertimbangan teknis-operasional. Sehubungan dengan lokasi penelitian tersebut, maka subjek penelitian yang dimaksud adalah pengurus dan anggota organisasi 'Aisyiyah; semua unit organisasi atau amal usaha yang dikelola oleh 'Aisyiyah; hubungan 'Aisyiyah dengan Muhammadiyah; serta hubungan 'Aisyiyah dengan warga masyarakat di lingkungan

amal usaha termasuk hubungannya dengan pemerintah. Unit organisasi atau amal usaha yang dikelola (dimiliki) 'Aisyiyah sebagaimana telah disebutkan, meliputi pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi; bidang kesehatan meliputi rumah sakit dan/atau rumah bersalin, BKIA, dll; serta bidang sosial kemasyarakatan, antara lain Panti Asuhan dan sebagainya.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. *Pertama*, Data primer adalah jenis data utama yang diperoleh (bersumber) dari informan melalui wawancara serta data dan informasi tentang masalah pokok yang dibahas, yaitu kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar. *Kedua*, Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh (bersumber) dari literature, dokumen atau bahan pustaka yang terkait dengan masalah pokok yang dikaji. Dalam hal ini, data primer dalam penelitian kualitatif adalah informasi atau keterangan yang diperoleh langsung dari informan dalam bentuk narasi, ceritera dan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terhadap objek sasaran, yaitu unit-unit organisasi (amal usaha) 'Aisyiyah meliputi pendidikan atau sekolah (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK, dan MA) yang dikelola 'Aisyiyah Kota Makassar. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dan atau tersedia di lokasi penelitian termasuk dengan masalah pokok.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah terkait dengan penelitian kualitatif, yaitu observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

1. Pengamatan (*Observasi*).

Pengamatan yang dilakukan adalah langsung kepada objek yang diteliti, yaitu unit-unit organisasi (amal usaha) yang dikelola 'Aisyiyah di dalam merealisasikan program kerja yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan amal usaha 'Aisyiyah, seperti TK Bustanul Atfal untuk melihat langsung keberadaan amal usaha tersebut. Demikian pula langsung terhadap kegiatan yang dilakukan rumah sakit atau BKIA dalam melayani masyarakat (pasien), serta Panti Ausahan dalam membina dan membina dan mengasuh anak-anak panti. Instrument penelitian yang digunakan ialah:

- a. Buku catatan, untuk mencatat hal-hal (data) yang dipandang perlu (penting);
- b. alat elektronik seperti *tape recorder*, *handycam* atau camera HP;
- c. pengamatan dipusatkan pada data yang relevan; dan
- d. melakukan klarifikasi data yang diperoleh dengan informan.

2. Wawancara (*Interview*).

Wawancara yang dilakukan ialah wawancara mendalam (*indepht interview*), di samping wawancara bebas. Wawancara mendalam adalah ditujukan

kepada Ketua dan wakil ketua, Sekretaris dan Bendahara PDA Kota Makassar termasuk pengurus dan pengelola amal usaha 'Aisyiyah meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan Panti Asuhan.

- a. Informan bidang pendidikan terutama pengurus dan pengelola amal usaha yang juga sebagai guru di TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) yang dikelola 'Aisyiyah untuk memberi data dan informasi tentang input, proses, dan output sesuai dengan standar pelayanan, prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- b. Informan bidang kesehatan, terutama pengurus yang juga sebagai pengelola Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, Bidan, dan Perawat untuk menjelaskan proses pelayanan (input, proses, dan output). Dalam hal ini dibatasi informasi yang relevan dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah.
- c. Informan di bidang kemasyarakatan dan keagamaan (Pengelola dan Pembina Panti Asuhan), termasuk pengurus dan anggota 'Aisyiyah yang terlibat langsung dalam pembinaan anak-anak panti untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.
- d. Warga masyarakat di sekitar amal usaha (unit organisasi) 'Aisyiyah yang memahami dan menerima akses dari amal usaha tersebut.

3. Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang data sekunder, meliputi sejarah berdirinya 'Aisyiyah, akta pendirian serta asset atau sumber daya

yang dimiliki. Data dokumentasi tersebut berupa laporan kegiatan, program kerja, jumlah amal usaha yang dikelola dan di bawah koordinasi 'Aisyiyah, struktur organisasi dan tata kerja, tanggung jawab dan kewenangan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah sebagai ortom secara periodik dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas tentang metode penelitian dalam studi ini, mulai dari tipe penelitian yang meliputi pendekatan, fokus, penentuan informan, sumber dan teknik pengumpulan data dapat dirangkul dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Prosedur Penelitian dan Pengumpulan Data

Tujuan	Konsep	Aspek-aspek	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Mendeskripsikan dinamika kemandirian 'Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan.	1. Kemandirian	<p>3) Medan Visional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip dasar organisasi - Visi dan tujuan organisasi - Unit-unit organisasi (amal usaha 'Aisyiyah) - Tatanan (Khittah) 'Aisyiah <p>2) Paradoks Independensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem yang otonom dalam Mengelola amal usaha - Bagian dari Muhamadiyah - Komitmen pada organisasi - Tanggungjawab bersama <p>1) Autopoiesis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mereproduksi diri sendiri - Menghasilkan unit-unit di dalam organisasi sendiri - Menyesuaikan diri dengan perkembangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua & Wkll Ketua, Sekretaris Aisyiyah Kota Mks - Pengelola Amal Usaha -Ketua-ketua Majelis dan Lembaga - Pengurus & Pengelola Amal Usaha -Ketua-ketua Majelis dan Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara Mendalam - Dokumentasi - Wawancara Mendalam - Pengamatan Langsung - Wawancara Mendalam - Dokumentasi
Menjelaskan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah dalam merespon dinamika lingkungan	2. Keberlanjutan	<p>1) Sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Input dari lingkungan - Proses pelaksanaan dan Pelayanan organisasi - Output (hasil produksi) <p>2) Daya Contigensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan adaptasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua-ketua Majelis dan Lembaga - Ketua & Wkll 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara Mendalam - Pengamatan Langsung

eksternal dan strategis		<ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi - Strategi pencapaian <p>3) Lingkungan strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muhammadiyah - Masyarakat & Pemerintah - Lokal, Regional, & Global 	<p>Ketua, Sekretaris 'Aisyiyah Kota Mks</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua PWA Sul – Sel & Pengurus PWM Sulsel 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara Mendalam - Dokumentasi
Menganalisis dinamika kepatuhan anggota kepada 'Aisyiyah dan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah di balik kemandirian & keberlanjutan organisasi tersebut.	3. Kepatuhan	<p>1) Kekuasaan (Power)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan pada organisasi - Pengurus ialah kongruen - Bersifat Normatif – Moral <p>2) Keterlibatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota pada organisasi Bersifat Moral - Normatif - Visi dan tujuan bersama <p>3) Kepatuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota kepada 'Aisyiyah adalah Normatif – Moral - 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah adalah kongruen dan Moral - Normatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua dan Wakil Ketua 'Aisyiyah - Ketua-ketua Majelis dan Lembaga - Ketua PWA Sul - Sel - Pengurus PWM Sul-Sel 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara Mendalam - Wawancara Mendalam - Wawancara Mendalam - Dokumentasi

Sumber : Klasifikasi Data Penelitian, Februari 2012

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data mengandung arti pengaturan data secara logis dan sistematis,

dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data di lapangan hingga seluruh proses penelitian selesai, serta peneliti sendiri sebagai instrumen utama, yang sejak awal telah berinteraksi dengan latar dan subjek, sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam sistem, pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema yang dapat diangkat menjadi teori substantif. Proses ini dimulai: (1) menelaah seluruh data yang telah diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahaminya; (2) mereduksikan data dengan cara abstraksi, yaitu menganalisis dan merangkum intisari data; (3) menyusun data tersebut dalam satuan uraian atau klasifikasi; (4) satuan itu kemudian dikategorisasi berupa sambil membuat *koding*; (5) memeriksa keabsahan data (Moleong, 1995).

Analisis data hasil penelitian ini adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh meliputi wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Pada tahap reduksi data, kegiatan yang dilakukan adalah merangkum, memilih, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang telah diperoleh dari hasil catatan lapangan untuk dicari tema dan polanya. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti mempertajam fokus, membuat kategorisasi, dan menyusun klasifikasi guna pendalaman dan penyusunan rencana kerja lebih lanjut. Pada tahap ini data yang tidak relevan dengan pertanyaan dasar penelitian, disisihkan.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data (*data display*) ke dalam pola hubungan yang bermakna, sehingga semakin mudah memahaminya. Kegiatan ini bermanfaat untuk mendalami masalah yang diteliti, yaitu fenomena yang berkaitan dengan kemandirian organisasi dan konsekuensinya. Penyajian dapat berupa uraian singkat dalam bentuk bagan, matriks, *flowchart*, namun yang lebih banyak ialah dengan teks bersifat naratif-tematik. Peneliti akan berupaya menyajikan data sebaik mungkin guna menghasilkan analisis data yang baik pula, bahkan apabila memungkinkan membangun teori *substantif*. Langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang merupakan tahap ketiga analisis data, yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi dari hasil reduksi dan penyajian data sebelumnya. Ketiga model analisis ini mengalir terus-menerus, interaktif, dan bersiklus selama pengumpulan data lapangan hingga seluruh proses penelitian berakhir.

Analisis data berdasarkan fakta empiris adalah teori berdasarkan data, bukan teori hasil telaah deduktif-logik. Teori substantif ditemukan dan dibentuk untuk daerah substantif tertentu. Dalam penelitian kualitatif dengan analisis induktif ialah teori berdasarkan data, sedang teori formal ditemukan dan dibentuk untuk kawasan kategori konseptual teoritik. Dalam klasifikasi Merton adalah “teori taraf menengah” (*middle range theories*), yang menampilkan keberlakuannya pada daerah substantif tertentu, dan tidak pada apa yang disebut *grand theoris*. Secara umum, pengolahan data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan interpretatif (Creswell, 1998). Tujuannya adalah menafsirkan terus-menerus data dan informasi yang diperoleh

melalui keterkaitan antarfenomena berdasarkan kerangka konseptual yang telah ditentukan. Dalam hal ini digunakan *verstehen* dua tingkat, *verstehen* secara emik berdasarkan pemahaman subjek dan *verstehen* ala etik berdasarkan kategori peneliti. Pendekatan ini bermakna bahwa data yang telah dianalisis tidak hanya dideskripsikan begitu saja, tetapi ditelaah secara kritis melalui diskusi dan abstraksi teoretik berkenaan dengan fenomena kemandirian dan *sustainability* organisasi.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data ialah bentuk pertanggungjawaban kebenaran dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, pengabsahan data yang dianjurkan ialah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, pengecekan anggota, analisis kasus negatif, kecukupan referensi, uraian rinci, dan *audit trail* (Moleong, 1995; Muhajir, 2007). Teknik ini berguna untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh betul-betul akurat, memenuhi kriteria keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), dan kebergantungan (*dependability*).

Perpanjangan keikutsertaan, adalah selain tinggal di lapangan dan berinteraksi lebih lama untuk membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan subjek (*rapport*), juga untuk menguji secara terus-menerus ketidakbenaran data atau informasi yang diakibatkan oleh *distorsi*; baik distorsi dari peneliti sendiri, (misalnya: menjadi asing, minder, atau *overaction* di lapangan); maupun distorsi dari informan (seperti: memberi informasi hanya sekedar menyenangkan peneliti, berdusta atau tidak, berpura-pura atau tidak, menipu atau tidak).

Ketekunan pengamatan ialah melakukan pengamatan secara lebih cermat, teliti, dan berkesinambungan terhadap faktor, ciri, atau unsur yang relevan dengan pokok persoalan (isu) yang sedang dicari. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, ketekunan pengamatan menyediakan *kedalaman* makna. Dalam hal ketekunan ini termasuk membaca berbagai referensi, hasil penelitian, dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Hal ini sekaligus terkait pengabsahan melalui dukungan kecukupan referensi lainnya, seperti catatan lapangan, hasil wawancara dan pengamatan, rekaman wawancara, foto-foto.

Trianggulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data dengan cara memanfaatkan sumber lain di luar data sebagai pembanding. Teknik ini berupa: trianggulasi sumber (mengecek informasi pada sumber yang berbeda); trianggulasi metode (mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik berbeda, atau sebaliknya); trianggulasi waktu (memeriksa data atau informasi melalui sumber dan metode dalam waktu atau situasi yang berbeda); trianggulasi teori (menjelaskan fakta penelitian dengan penjelasan pembanding (*rival explanations*) dari satu atau berbagai teori. Trianggulasi dalam penelitian ini tidak hanya diperlakukan sebagai teknik pengumpulan data, tetapi juga alat (strategi pengabsahan data).

Analisis kasus negatif digunakan untuk mencari contoh dan kasus yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan. Hal ini berguna untuk mengetahui suatu informasi secara lebih mendalam agar keteralihan laporan penelitian benar-benar dapat dilakukan melalui

pengabsahan uraian rinci (*thick description*) secermat mungkin, menggambarkan konteks dan fokus penelitian, serta penafsiran berdasarkan kejadian nyata.

Pemeriksaan sejawat dilakukan dengan kolega untuk memperoleh masukan dan kritik agar kualitas analisis lebih dipertanggungjawabkan. Demikian pula pengecekan anggota (*member check*) dilakukan dengan informan untuk menanyakan kembali pernyataan yang telah terangkum dalam pemahaman peneliti, guna memastikan kebenaran makna yang telah dibuat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengundang mereka untuk berkumpul dalam suatu diskusi bersama (semacam *focus group discussion*, FGD), ataupun dengan mendatangi satu persatu sambil membandingkan kritik atau pendapat mereka. Dengan cara ini dapat dilakukan *cross check* dan sekaligus konfirmasi dalam menarik kesimpulan.

Ketika seluruh catatan pelaksanaan proses dan hasil studi menjadi lengkap, dilakukan penelusuran audit (*audit trail*) menguji keakuratan data (catatan lapangan, hasil rekaman, dokumen, dan foto), hasil analisis data (rangkuman, konsep-konsep), hasil sintesis data (tafsiran, kesimpulan, definisi, interelasi tema, pola hubungan literatur atau teoretik, dan laporan akhir), dan proses yang digunakan (metode, disain strategi, prosedur). Auditing ini berguna untuk memeriksa dan mengetahui kepastian dan kebergantungan data, baik terhadap proses maupun hasil atau luaran.

BAB IV

SETTING LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya ‘Aisyiyah Kota Makassar

Sebelum menjelaskan sejarah terbentuknya ‘Aisyiyah Kota Makassar, terlebih dahulu akan dikemukakan pentingnya makna sejarah dalam suatu organisasi, khususnya ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia. Karena dengan mengetahui sejarah berdirinya organisasi, maka akan menentukan gerak langkah sehingga tetap komitmen dengan tujuan didirikannya Organisasi karena dengan melihat sejarah dapat menumbuhkan semangat juang para pelanjut setelah betapa gigihnya para pendiri Aisyiyah dalam memelopori dan memperjuangkan, seperti halnya dengan masuknya Aisyiyah di kota Makassar.

Sebagaimana diketahui bahwa ‘Aisyiyah lahir pada 27 Rajab 133 H, bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 dimana kondisi wanita pada saat itu sangat memprihatinkan, dalam hal ini kaum wanita hanya dijadikan teman untuk urusan rumah tangga saja, itu disebabkan umat Islam pada saat itu beku tertutup oleh Bid’ah Khurafat dan Tahayyul, hal itu berlaku pula pada wanita-wanita di kota Makassar.

Menyadari hal tersebut, maka sejak mendirikan Muhammadiyah, KH.Ahmad Dahlan sangat memperhatikan pembinaan terhadap kaum wanita. Karena itu, untuk pertama anak-anak wanita yang benar-benar mendapat penggemblengan dan dipersiapkan agar nantinya menjadi pengurus wanita Muhammadiyah, ada enam

orang yang dipersiapkan ketika itu, adalah: (1) Siti Bariyah; (2) Siti Dawimah; (3) Siti Dalalah; (4) Siti Busyro (puteri beliau sendiri); (5) Siti Wadingah; dan (6) Siti Badilah Zuber.

Meskipun mereka masih anak-anak yang paling tinggi usianya baru 15 tahun, namun mereka sudah diajak untuk memikirkan masalah-masalah kemasyarakatan. Sebelum `Aisyiyah secara resmi terbentuk, sifat gerakan pembinaan wanita itu baru merupakan kelompok anak-anak yang senang berkumpul kemudian diberi bimbingan oleh K.H. Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan dengan pelajaran agama. Kelompok anak-anak ini belum merupakan suatu organisasi, tetapi hanya kelompok anak-anak yang diberi pengajian. Disamping para gadis, para orang tua ataupun para perempuan Muhammadiyah yang sudah kawin menjadi perhatian beliau. Karena ajaran dalam agama Islam tidak diperkenankan mengabaikan wanita. Mengingat pentingnya peranan wanita yang harus mendapatkan tempat yang layak, Nyai Dahlan bersama KH Ahmad Dahlan mendirikan kelompok pengajian wanita yang anggotanya para gadis dan wanita yang sudah kawin.

Dalam perkembangannya kelompok pengajian wanita itu diberi nama "*Sapa Tresna*", ketika itu belum berupa organisasi tetapi hanya sebagai suatu gerakan pengajian saja. Maka untuk memberikan suatu nama yang konkrit menjadi suatu perkumpulan, K.H. Mokhtar mengadakan pertemuan dengan K.H. Ahmad Dahlan yang juga dihadiri oleh K.H. Fachruddin dan Ki Bagus Hadikusumo serta pengurus Muhammadiyah lainnya di rumah Nyai Ahmad Dahlan. Waktu memberikan nama perkumpulan itu diusulkan nama FATIMAH, tetapi nama itu tidak diterima rapat.

Kemudian oleh KH Fahrodin dicetuskan nama 'AISYIYAH. Nama inilah dianggap paling tepat sebagai organisasi wanita pertama itu. Mengapa nama 'Aisyiyah dipandang tepat, karena diharapkan perjuangan perkumpulan keum perempuan itu meniru perjuangan 'Aisyiyah isteri Nabi Muhammad saw. yang selalu membantu berdakwah. Setelah secara aklamasi perkumpulan wanita itu diberi nama 'Aisyiyah, kemudian diadakan upacara peresmian.

Upacara peresmian itu waktunya bersama-sama dengan peringatan isro' mi'roj Nabi Muhammad saw. pada tanggal 27 Rajab 1335 H, yang bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 M, diadakan oleh Muhammadiyah untuk yang pertama kalinya. Tempat duduk murid-murid wanita dan kaum ibu dipisahkan dengan kelambu berwarna merah jambu. Adapun yang bertindak sebagai pembuka kelambu pada upacara itu ialah K.H. Mokhtar. Susunan pengurus 'Aisyiyah hasil kesepakatan dalam pembentukan telah ditetapkan adalah sebagai berikut: (1) Siti Bariyah (ketua); (2) Siti Badilah (Penulis); (3) Siti Aminah Harowi (Bendahari); (4) Ny. H. Abdullah (Pembantu); (5) Ny. Fatimah Wasool (Pembantu); (6) Siti Dalalah (Pembantu); (7) Siti Wadingah (Pembantu); (8) Siti Dawimah (Pembantu); dan (9) Siti Busyro (Pembantu). Selanjutnya K.H. Mokhtar memberi bimbingan administrasi dan organisasi, sedang untuk bimbingan jiwa keagamaannya dibimbing langsung oleh K.H. Ahmad Dahlan.

Maksud dan tujuan KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah/Aisyiyah untuk mengajak umat Islam Indonesia kembali kepada ajaran Islam yang murni bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Bertitik tolak dari sejarah berdirinya Aisyiyah

sebagai organisasi perempuan, dengan latar belakang serta tujuan yang telah disebutkan di atas, maka organisasi 'Aisyiyah lahir di Kota Makassar tahun 1926 dipelopori oleh beberapa ibu dan pada saat itu masih merupakan bagian dari Muhammadiyah dan masih disebut cabang, yaitu Cabang Makassar.

Adapun kepengurusan dan periodisasi 'Aisyiyah kota Makassar sejak didirikan hingga sekarang, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh secara garis besar digambarkan sebagai berikut :

1. Tahun 1926, susunan pengurus atau tokoh pendiri 'Aisyiyah Makassar, ketika itu masih merupakan cabang, yaitu :

Ketua : Hj. Fatimah (Hj. Tima)

Wakil Ketua : Hj. Maemunnah Dg. Rumpu

Sekretaris : St. Hidayah

Bendahara : Hj. Jasi

Pembantu-pembantu : 1) Hj. Sapuma

2) Dg. Macora

3) St. Hasanah

4) Tuan Mina (Ny. Mansyur Al-Yamani)

Kegiatan Organisasi 'Aisyiyah waktu itu berpusat di Jl. Diponegoro / Jl. Muhammadiyah, karena keuletan, ketulusan, dan semangat juang pengurus dalam mengembangkan organisasi sehingga berhasil membentuk 4 Ranting, kemudian berkembang menjadi cabang, yaitu :

- a. Ranting Bonto Ala;
- b. Ranting Kampung Pisang;
- c. Ranting Ujung Tanah, dan
- d. Ranting Mariso.

Perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1940 secara resmi berdiri Cabang Makassar, kemudian pada tahun 1966 berubah status atau ditingkatkan statusnya menjadi Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Makassar. Adapun kepengurusan PDA kota Makassar hingga tahun 2000 sebagai berikut :

- 2. Tahun 1937 – 1940, Ketua : St. Djawiah SS Jamaan.
- 3. Tahun 1940 – 1950, Ketua : Muliati Abbas.
- 4. Tahun 1955 – 1965, Ketua : ZY. Intan, dan Sekertaris : Hadjrah Yusuf.
- 5. Tahun 1978 – 1985, Ketua : Hj. Wettoeing Saleh, dan Sekertaris : Dra. Hj. Rahmiah Kaduppa.
- 6. Tahun 1985 – 1990, Ketua : Hj. Djohrah AD, dan Sekertaris Dra. Rahmiah Badaruddin.
- 7. Tahun 1990 – 1995, Ketua : Hj. Djohrah AD, dan Sekertaris Dra. Rahmiah Badaruddin.
- 8. Susunan Pengurus ‘Aisyiyah Kota Madya Ujung Pandang Periode 1995 – 2000, terdiri dari :

Ketua : Hj. Djohrah AD

Wakil Ketua : Hj. St. Nursiah Zubair

Wakil Ketua II : Hadjrah Yusuf Yuddin

Wakil Ketua III	: Hj. St. Marwiah Abbas
Sekretaris I	: Dra. Ramiah Badaruddin
Sekretaris II	: Chaeriyah Akib
Sekretaris III	: Hj. Suryati Djabbar
Bendahara I	: Hj. Rukiah Khalid
Bendahara II	: Hj. Nasyiah Abdullah
Ketua Bidang Tabliq	: St. Ramlah Yunus
Ketua Bidang PK	: Hj. St. Zaenab Rakib
Ketua Bidang PKS	: St. Rusmah Lailu Abdullah
Ketua Bidang Ekonomi	: Hj. Suryati SM. Sanggu
Ketua Bidang Pembinaan Kader	: Hj. Misbahu Abdullah, S.Ag.

9. Periode 2000 – 2005, sesuai dengan Keputusan Musyawarah Daerah Aisyiyah Ke-13 tanggal 01 – 03 Dzulqadah 1421 H, bertepatan dengan tanggal 26 – 28 Januari 2001 M, bertempat di Cabang Mariso, dengan susunan Kepengurusan sebagai berikut :

Ketua	: Dra. Ramiah Badaruddin
Wakil	: Ramlah Yunus
Wakil	: St. Rusmah Abdullah
Wakil	: Hj. Chaeriyah Akib
Sekretaris	: Hadjrah Yusuf Yuddin
Wakil Sekretaris	: Badria Solo
Wakil Sekretaris	: Djuharni Mustari

Bendahara	: Hj. Rukiah Khalid
Wakil Bendahara	: Hj. Nasyiah Abdullah
Wakil Bendahara	: Hj. Rafiah H.
Ketua Tabligh	: Dra. Hj. Khaeriyah A. Jabbar
K. Dikdasmen	: Dra. Hj. Aisyiyah Damopolli
Ketua Binkes/LH	: Dra. Hj. Hamdana Dahlan, M.Kes.
Ketua PKS	: Maryam Siking
Ketua Ekonomi	: Hj. Suryati SM. Sanggu
Ketua Kader	: Sulaifah Wahab SP.
Ketua LPP	: Hj. Tuty Suciaty SH. M.Si
Ketua HLO	: Hj. Hj. Cendrawati Arfah
Ketua Lembaga Budaya	: Aida Azis, S.Pd. M.Pd.

10. Periode 2010 – 2015, berdasarkan Keputusan Musyawarah Daerah ‘Aisyiyah kota Makassar Ke-14, tanggal 14 Rabiul Akhir 1427 H, yang bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2006 M, bertempat di Cabang Tallo, menetapkan kepengurusan PDA kota Makassar sebagai berikut :

Ketua	: Hj. Chaeriyah Akib
Wakil Ketua	: Dra. Hj. Aisyiyah Damopolli
Wakil Ketua	: Dra. Rahmiah Badaruddin, M.Si
Wakil Ketua	: Dra. Hj, Khaeriyah A. Jabbar
Wakil Ketua	: Hj. Tuty Suciaty SH. M.Si
Wakil Ketua	: St. Rusmah Abdullah

Sekretaris	: Djuharni Mustari
Wakil Sekretaris	: Ratna Dewi Ibrahim SS. M.Hum
Wakil Sekretaris	: Hadjarah Yusuf Yuddin
Bendahara	: Hj. Rukiah Khalid
Wakil Bendahara	: Badria Solo
Ketua Majelis Tabligh	: St. Zohrah Marzuki
Ketua Majelis Dikdasmen	: Dra. Hj. Syahribulan K. M.Pd
Ketua Majelis Kesj. Sosial	: Maryam Siking
Ketua Majelis Kesehtan/LH	: Dra. Hj. Hamdana Dahlan, M.Kes
Ketua Majelis Ekonomi	: Budiarti Bachtiar SE.
Ketua Majelis Kader	: Sulaifah Wahab SP.
Ketua LPP	: Dra. Hj. Cendranawati Arfah
Ketua LHOHA	: Hj. Djalailah Jamal
Ketua L. Hub. Pub.	: Hj. Ir. Faidah Azuz, M.Si

Setelah terbentuknya kepengurusan 'Aisyiyah kota Makassar secara resmi, dalam perkembangannya tetap mengacu serta berpedoman kepada struktur organisasi maupun tujuan didirikan 'Aisyiyah, dalam merealisasikan program kerja sebagaimana amanah K.H. Ahmad Dahlan memberikan bekal perjuangan sebagai berikut :

- a. Dengan keiklasan hati menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam sesuai dengan bakat dan kecakapannya, tidak menghendaki sanjung puji dan tidak mundur selangkah karena dicela.

- b. Penuh keinsyafan bahwa beramal itu harus berilmu
- c. Jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap sah oleh Tuhan Allah hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan
- d. Membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam
- e. Menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sekerja dan seperjuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah (PPA), Dra.Hj. Nurjannah di Yogyakarta, tanggal 22 Maret 2012, bertempat di Kantor Pimpinan Pusat 'Aisyiyah menjelaskan bahwa, "Realitas gerakan dan manfaat 'Aisyiyah selama ini telah dirasakan oleh masyarakat luas terlihat dari banyaknya amal usaha yang dilakukan. Sebuah cita-cita yang didambakan Nyai Ahmad Dahlan sejak didirikan 'Aisyiyah; selangkah demi selangkah, setahap demi setahap mulai diwujudkan. Satu abad bukan waktu yang singkat untuk sebuah organisasi yang masih tetap eksis. Hal ini menunjukkan estafet gerakan Aisyiyah telah berjalan diiringi dengan sistem organisasi yang solid dan mekanisme kerja yang terstruktur.

Demikian halnya program kerja 'Aisyiyah kota Makassar, terutama program yang diprioritaskan sesuai dengan visi dan misi organisasi setelah resmi didirikan adalah, program konsolidasi organisasi, meningkatkan dan menggerakkan cabang dan ranting Aisyiyah sebagai basis dan ujung tombak gerakan di tingkat akar rumput refitalisasi ranting dengan kegiatan kunjungan pembinaan cabang dan ranting secara terpadu. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh bahwa, PDA kota Makassar sampai dengan tahun 2011 sebanyak 25 cabang dari 14 Kecamatan, dan 103 Ranting yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di kota Makassar.

Seiring dengan itu beberapa program kerja yang diprioritaskan yang secara garis besar dapat dijelaskan terkait dengan visi, misi, dan tujuan yang melatar belakangi didirikan 'Aisyiyah (Muhammadiyah), khususnya di kota Makassar yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam konteks program kerja 'Aisyiyah kota Makassar, terutama program operasional Thayyibah.

- 1) Program Qariyah Thayyibah, adalah wadah yang sangat tepat untuk meningkatkan program bidang secara terpadu. Tanggal 17-08-2008, PDA kota Makassar mengadakan sosialisasi Qarya Thayyibah yang dihadiri 25 cabang. PCA Ujung Tanah dan Manggala merupakan pembinaan secara terpadu kegiatan lintas dialogis cabang Bara-baraya dan Mariso dalam pembinaan tahap awal.
- 2) Menjadikan amal usaha khususnya TK ABA dengan wadah terbinanya "Hidup Sehat" dan penanaman nilai dasar keagamaan secara dini sasaran adalah murid dan guru-guru sebagai program lintas majelis MKLH Pendidikan dan Tabligh.
- 3) Konsolidasi Organisasi, dalam rangka meingkatkan profesionalisme pengelolaan administrasi, sehingga tercapai kearifan dan keefisienan PDA Makassar membangun kantor dengan nama "Pusat Dakwah Aisyiyah Makassar" terletak di jalan Landak Baru Lr II No. 9A. Dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Pembebasan tanah seluas 210 m² dan 333 m² jumlah 543 m² tahun 2002.

- (2) Peletakan batu pertama ; fondasi kantor dan aula tanggal 19 agustus 2006.
- (3) Pembangunan kantor selesai tahun 2007.
- (4) Pembangunan aula seluas 22,5 m rencana penyelesaian akhir 2010.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, eksistensi ‘Aisyiyah sebagai sebuah organisasi serta langkah yang ditempuhnya dalam upaya mewujudkan masyarakat madani merupakan salah satu indikator sebagai identitas yang dimiliki untuk mengidentifikasi ada tidaknya perkembangan masyarakat madani. Relevansi indikatornya yaitu termanifestasi dalam organisasi yang dipenuhi oleh gerakan ‘Aisyiyah. Hal tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip organisasi yang dipahami oleh masyarakat madani sebagai perwujudan identitasnya secara material. Dengan demikian, masyarakat madani bukan merupakan individu- individu yang partisipatif dan otonom saja, tetapi terdiri atas sekumpulan individu warga yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi yang memiliki tatanan, serta menjamin anggota-anggotanya untuk mampu mengekspresikan diri, mengembangkan minat, saling menukar informasi, memediasi perbedaan-perbedaan dan menciptakan pola-pola hubungan yang stabil. Di samping itu, mereka tertata dalam organisasi modern yang mengembangkan nilai-nilainya sendiri secara konsisten.

Hal senada diungkapkan oleh salah satu Pengurus Pusat ‘Aisyiyah (Dra. Hj. Shoimah), tanggal 25 Maret 2012 di Yogyakarta, bahwa makna gerakan ‘Aisyiyah sebagai manifestasi dari cita-cita menuju masyarakat madani juga sejalan dengan visi pengembangan organisasi ‘Aisyiyah, yaitu “tercapainya amal usaha Aisyiyah yang

mengarah terhadap penguatan dan pengembangan dakwah yang lebih berkualitas menuju masyarakat madani (masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”) yang merupakan penjabaran berkesinambungan dari visi idealnya untuk tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang utama.

Gerakan dakwah yang dimaksud adalah *Dakwah Islam Amar Makruf Nahi Munkar*. Dakwah Islam; artinya mengajak, menyeru dan memanggil kepada umat manusia untuk memeluk dan melaksanakan (menegakkan) ajaran Islam. Amar makruf; artinya mengajak dan menunjukkan pada hal-hal yang baik, bermanfaat dan terpuji. Dan, Nahi Munkar; artinya mencegah, melarang, menolak, menjauhkan dan mengikis hal-hal yang buruk, kotor dan keji. ‘Aisyiyah bukan hanya sekadar nama besar sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia. ‘Aisyiyah memiliki jaringan struktural yang cukup kuat dan luas di seluruh wilayah Nusantara yang sangat menunjang gerak dakwah yang dilakukannya.

Jaringan struktural organisasi ‘Aisyiyah tersebar dan berjenjang dalam beberapa level yang mempunyai kewenangan dan wilayah kerja masing-masing. Jaringan yang tersebar di seluruh daerah ini merupakan potensi yang sangat besar membangun umat dan bangsa ini menuju masyarakat utama dalam bentuk sinergi dan jaringan yang kuat di dalam berbagai bidang. Jaringan struktural merupakan kontribusi ‘Aisyiyah yang sangat besar dalam mengakomodasikan warga menyalurkan aspirasinya, sekaligus mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh daerah melalui berbagai aktivitas dakwah keagamaan, pendidikan, kesejahteraan, sosial, kesehatan dan sebagainya.

Pengembangan dakwah Islam melalui dakwah jamaah dan dakwah kultural merupakan strategi dakwah masa kini. Strategi ini dikembangkan mengingat tantangan global semakin kompleks, perkembangan teknologi, dan pola pikir umat yang semakin berkembang. Konsep tersebut kemudian diwujudkan melalui gerakan TIT 'Aisyiyah dengan menggunakan pendekatan sumber daya manusia (SDM), pendekatan ekonomi dan kesejahteraan, pendekatan struktural serta pendekatan global.

Pendekatan sumber daya manusia melalui upaya mencerdaskan kehidupan umat. Pendekatan ekonomi dan kesejahteraan dilaksanakan dengan mengajarkan etos kerja yang tinggi. Pendekatan struktural tetap ditingkatkan dengan mewujudkan kegiatan politik dan birokrasi sebagai pendukung dan pelindung dakwah. Pendekatan global juga perlu dilakukan dengan berpikir makro dan mikro secara seimbang, beraktivitas lintas sektoral, membangun kolektivitas dan individual, umum maupun khusus, untuk kemaslahatan umat dunia.

Dalam melaksanakan gerakannya, penggarapan masyarakat umum atau individu yang telah beragama Islam dilakukan melalui gerakan TIT tersebut, yaitu Tajdidiyah artinya pembaruan; Islahiyah artinya peningkatan, dalam pemahaman agama atau mengembalikan ajaran agama sesuai tuntunan Qur'an dan Sunnah. Islahiyah artinya perdamaian, kerukunan atau persaudaraan dalam kemasyarakatan. Tabsyiriyah artinya penggembiraan, pembimbingan serta pemberian dorongan dalam beribadah dan beramal saleh. Di antara bidang garap yang dapat diTITkan, yaitu Ibadah, Akhlaq, Tauhid, Tabligh, Kegiatan Jihad, Persatuan dan

Syi'ar Islam, Pendidikan, Seni dan Budaya, Kesehatan, Ekonomi, serta amalan-amalan Islam lainnya dengan tujuan untuk mewujudkan pribadi muslim, mukmin dan mukhsin.

Misi Gerakan TIT 'Aisyiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan meliputi: menanamkan keyakinan, memperdalam, memperluas pemahaman, meningkatkan pengalaman, menyebarkan ajaran agama Islam dalam segala aspek kehidupan; meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap agama Islam; memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, serta mempertinggi akhlak; meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, membangun dan memelihara tempat ibadah, serta amal usaha yang lain; meningkatkan pendidikan, membangun kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian.

Selain itu, memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas; meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup; meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan, kebenaran serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa; meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri serta usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

Masing-masing masyarakat di Indonesia dengan keberagaman etnis, bahasa, agama dan adat istiadat telah memiliki mekanisme dan pengaturan sosial yang berbeda-beda. Namun demikian, perlu dipahami bahwa seluruh aktivitas tersebut

dilakukan secara mandiri dan mendorong partisipasi dalam kebersamaan. Bentuk-bentuk masyarakat partisipatif yang demikian inilah yang terus dikembangkan agar kehidupan yang demokratis dapat ditopang oleh masyarakat madani. Hal tersebut, 'Aisyiyah ikut memberikan jawaban atas berbagai permasalahan, baik problematika daerah, wilayah maupun global yang dari waktu ke waktu senantiasa mengalami pengembangan. Peran dan komitmen serta tanggung jawab 'Aisyiyah semakin besar dan terbuka. Kehadiran dan keterpanggilan 'Aisyiyah di setiap jengkal lahan amal usaha merupakan wujud gerakan rahmatan lil 'alamin.

Seperti halnya Muhammadiyah, berdirinya 'Aisyiyah dilatarbelakangi adanya keprihatinan mendalam akan kondisi bangsa Indonesia, khususnya perempuan. Pada awal abad ke 20, paham budaya yang mensubordinasi derajat dan kedudukan kaum perempuan telah menjadi sumber kebodohan dan ketertinggalan. Pada masa itu, sekolah-sekolah hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki, itupun terbatas pada kalangan tertentu (priyayi). Jadi, tidaklah mengherankan jika peran perempuan pada masa itu dibatasi pada sektor domestik. Pandai di dapur dan mengasuh anak menjadi tolok ukur kualitas gadis-gadis masa itu. Demikianlah, "ketika para wanita disibukkan oleh pekerjaan domestik, KH. Ahmad Dahlan justru berpikir sebaliknya, dan mengatakan kepada wanita untuk menjalankan tugas dalam menghadapi masyarakat (publik)".

Setelah berdirinya organisasi 'Aisyiyah di kota Makassar tahun 1926, mulai melaksanakan kerja-kerja sosial untuk kemajuan dan peningkatan harkat dan martabat perempuan di daerah ini. Dalam hal hal ini 'Aisyiyah termasuk organisasi yang turut

memprakarsai dan membidangi terbentuknya organisasi wanita pada tahun 1928. Demikian, 'Aisyiyah bersama dengan organisasi wanita lain bangkit berjuang membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan kebodohan. Badan federasi ini diberi nama Kongres Perempuan Indonesia yang sekarang menjadi KOWANI (Kongres Wanita Indonesia). Lewat federasi ini berbagai usaha dan bentuk perjuangan bangsa dapat dilakukan secara terpadu.

B. Sambutan Masyarakat Terhadap 'Aisyiyah Kota Makassar

Kelahiran 'Aisyiyah pada Tahun 1926 di kota Makassar, pada zaman sebelum kemerdekaan sebagai organisasi kemasyarakatan didasari oleh semangat kebangsaan mengambil peran aktif untuk turut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, khususnya dalam mendampingi pejuang-pejuang kemerdekaan di kota Makassar, dalam membela harkat dan martabat bangsa Indonesia. Kegiatan awal yang dilaksanakan adalah membentuk kelompok-kelompok pengajian untuk para ibu-ibu dan remaja putri berupa pengajian pondokan. Kegiatan ini mendapat sambutan baik di berbagai kalangan masyarakat.

Perkembangan selanjutnya, 'Aisyiyah membuka lembaga pendidikan formal yang dikelola oleh pengurus yang menangani masalah pendidikan yang samapai sekarang masih digunakan istilah *Majelis Pendidikan*. Kemampuan 'Aisyiyah membuka lembaga pendidikan formal saat itu masih berorientasi pada pendidikan Taman Kanak-kanak di Indonesia yang pertama yaitu pada tahun 1940 dan diberi nama "Bustanul Athfal".

Melihat sambutan baik masyarakat terhadap keberadaan TK (Taman Kanak-kanak, maka Aisyiyah berusaha membuka lembaga pendidikan formal yang lebih tinggi yaitu “Sekolah Dasar” sehingga berdirilah Sekolah Dasar Aisyiyah di Cabang Makassar yang berlokasi di Jl. Muhammadiyah. Dalam bidang keagamaan yang dikelola oleh bagian Tabligh di cabang Mamajang didirikan mesjid yang diberi nama Aisyiyah yaitu “Mesjid Aisyiyah Cabang Mamajang”. Pada periode 1990-1995 sampai sekarang, salah satu program unggulan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) kota Makassar ialah “Pembinaan Karya Thoyyibah” yang berlokasi di cabang Manggala dilaksanakan oleh masing-masing PCA tersebut dalam rangka pembinaan karya thoyyibah hanya bersifat temporer seperti pembagian bantuan sembako, pemberian makanan tambahan, sunatan missal, pengobatan gratis bagi masyarakat khususnya warga binaan dan tidak menutup kemungkinan menjangkau masyarakat umu walaupun tidak terdaftar sebagai warga binaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat menjelang Hari Raya Islam atau dalam rangka Milad Aisyiyah.

Dalam rangka beberapa kegiatan yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat terhadap eksistensi Aisyiyah ditengah-tengah masyarakat cukup positif karena semua kegiatan yang dilaksanakan sangat relevan dan signifikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan karena selalu didukung oleh masyarakat. Dengan demikian, ‘Aisyiyah adalah sebuah organisasi atau gerakan perempuan Muhammadiyah yang lahir sebagai organisasi Islam di Indonesia. Dalam kiprahnya sebagai komponen perempuan Muhammadiyah hampir satu abad di Indonesia, saat ini ‘Aisyiyah telah

memiliki 33 Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) setingkat Provinsi, 370 Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) setingkat kabupaten/kota, 2.332 Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA) setingkat kecamatan, dan 6.924 Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah (PRA) setingkat kelurahan/desa. Selain itu, ‘Aisyiyah memiliki amal usaha yang bergerak di berbagai bidang yaitu: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat (Dokumen PPA, 2000: 39).

Amal Usaha dibidang pendidikan saat ini berjumlah 4.560 yang terdiri dari Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak (TK), Tempat Penitipan Anak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan lain-lain. Sedangkan amal usaha di bidang kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Badan Kesehatan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan dan Posyandu berjumlah 280 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai gerakan yang peduli dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan, ‘Aisyiyah hingga kini telah memiliki sekitar 459 amal usaha yang bergerak di bidang ini meliputi: Rumah Singgah Anak Jalanan, Panti Asuhan, Dana Santunan Sosial, Tim Pengrukti Jenazah dan Posyandu (Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 2000:57).

‘Aisyiyah menyadari, bahwa harkat martabat perempuan Indonesia tidak akan meningkat tanpa diikuti peningkatan kemampuan ekonomi di lingkungan perempuan. Karena itu, berbagai amal usaha yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi ini diantaranya koperasi, Baitul Maal wa Tamwil, Toko/kios, Simpan Pinjam, home industri, kursus ketrampilan dan arisan. Jumlah amal usaha ini hingga kini sebanyak 503 buah. Kemudian ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan

keagamaan yang terbesar di wilayah Indonesia juga memiliki beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya penyadaran terhadap kehidupan bermasyarakat muslim Indonesia. Hingga saat ini kegiatan yang mencakup pengajian, Qoryah Thayyibah, Kelompok Bimbingan Haji (KBIH), badan zakat infaq dan shodaqoh serta musholla berjumlah 3785 buah.

Sejalan dengan latar belakang lahirnya 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah, termotivasi oleh pemahaman kesejahteraan sosial yang diperjuangkan 'Aisyiyah adalah terciptanya suatu kondisi ideal dari tata kehidupan masyarakat yang *baldatun thayyibatun warabbun ghaffur*, yaitu suatu kehidupan bahagia sejahtera penuh limpahan rahmat dan nikmat Allah swt.di dunia dan akhirat. Dengan demikian, akan tercipta suatu titik keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah maupun aspek material dan spiritual. Sejak berdirinya 'Aisyiyah kota Makassar tahun 1926, kegiatan kesejahteraan sosial telah dimulai dengan kegiatan sosial yang membantu kaum miskin dan anak yatim. Dalam perkembangannya hingga sekarang, program kesejahteraan sosial 'Aisyiyah tersistim ke dalam unit-unit kegiatan sosial yang meliputi :

1. Kepedulian usaha-usaha pelayanan dan penyantunan bagi kelompok masyarakat Dhuafa (miskin).
2. Pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial yang dikelola oleh 'Aisyiyah seperti panti asuhan, panti jompo, balai latihan, rumah singgah, dan lain-lain.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan.

4. Pelayanan dan penanggulangan bencana (musibah).
5. Advokasi publik yang menyangkut masalah-masalah sosial di berbagai lapisan masyarakat.
6. Mengembangkan pola pencegahan dan pemberian bantuan terhadap korban trafficking serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terkait dengan sejarah berdirinya 'Aisyiyah kota Makassar sebagai organisasi perempuan yang pertama, termasuk memelopori hari lahirnya IBI (Ikatan Bidan Indonesia) yang seluruh anggotanya terdiri atas kaum wanita telah diterima menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) pada tahun 1951, hingga saat ini IBI khususnya yang dipelopori 'Aisyoyah kota Makassar aktif mendukung program-program KOWANI bersama organisasi wanita lainnya dalam meningkatkan derajat kaum wanita. Selain itu, sesuai dengan UU RI No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, maka IBI terdaftar sebagai salah satu Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) di kota Makassar. Untuk pertama kalinya IBI melangsungkan Kongres di luar pulau Jawa, tepatnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan dan dalam kongres ini juga didahului dengan pertemuan ICM Regional Meeting for Western Pacific yang dihadiri anggota ICM dari Jepang, Australia, New Zealand, Phillipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya pada tahun 1986 IBI secara organisatoris mendukung pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana oleh bidan Praktek Swasta melalui BKKBN.

Memasuki awal abad XX sebagian besar kondisi yang terbentuk di sepanjang abad XIX terus berlangsung. Dalam konteks ekonomi, perluasan aktivitas ekonomi

sebagai dampak perluasan penanaman modal swasta asing maupun perluasan pertanian rakyat belum mampu menimbulkan perubahan ekonomi secara struktural sehingga kondisi hidup sebagian besar penduduk di kota Makassar masih tetap relatif rendah. Di beberapa tempat penduduk pribumi memang berhasil mengembangkan pertanian khususnya tanaman ekspor dan mendapat keuntungan yang besar, akan tetapi ekonomi mereka masih sangat labil terhadap perubahan pasar.

Perluasan aktivitas ekonomi tersebut menimbulkan persaingan yang semakin besar sehingga para pengusaha industri pribumi Kota Makassar, harus bersaing dengan produk impor yang lebih berkualitas dan lebih murah di pasar-pasar lokal, sedangkan para pedagang pribumi harus bersaing ketat dengan pedagang-pedagang asing yang terus mendominasi perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional. Dalam perkembangan selanjutnya persaingan ini, khususnya di Kota Makassar tidak lagi hanya terbatas pada masalah ekonomi, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial, kultural, maupun politik. Walaupun dalam bidang politik terjadi pergeseran dari kekuasaan administratif yang tersentralisasi ke arah desentralisasi pada tingkat lokal (Kota Makassar), kontrol yang ketat pejabat Belanda terhadap pejabat pribumi masih tetap berlangsung.

Terkait dengan kondisi tersebut di atas, komitmen organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar untuk menegakkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dimulai sejak organisasi ini berdiri. Melalui majelis ekonomi mengimplementasikan berbagai program ekonomi dan program pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Program pengembangan ekonomi di mulai dari tingkat

ranting dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan usaha-usaha yang selama ini dirintis dan dikelola di tingkat ranting. Pengembangan ekonomi ini kemudian diwadahi dalam bentuk badan usaha ekonomi keluarga Aisyiyah (BUEKA). Secara garis besar keberadaan serta perkembangan BUEKA Kota Makassar, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. BUEKA merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan dan idealism yang sama untuk mengembangkan bisnis mereka;
- b. Wadah organisasi ini (BUEKA) tidak hanya bergerak dalam usaha pengembangan tetapi juga member pendidikan ketrampilan;
- c. Pengorganisasian anggota;
- d. Pemasaran, sewa menyewa, dan Simpan menyimpan;
- e. Pelatihan manajemen usaha, dan pengembangan ekonomi Aisyiyah juga difokuskan pada pemberdayaan perempuan.

Hal ini dimaksudkan agar mendorong mereka menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan tidak menjadi beban keluarga. Usaha-usaha yang dirintis dan dikembangkan 'Aisyiyah Kota Makassar, meliputi: koperasi, toko/kios, warung kantin, kursus ketrampilan, arisan, simpan pinjam, home industry, dan membina putri-putri dalam kegiatan bazaar. Tantangan Aisyiyah ke depan yang memiliki anggota yang banyak merupakan sesuatu yang potensial dalam mengembangkan ekonomi dan masih lemahnya sistem pemberdayaan.

Kebijakan ekonomi pemerintah kadang tidak mengakomodasikan dan tidak berpihak kepada kaum perempuan. Untuk itu Aisyiyah harus mampu mengembangkan

sumber dayanya secara optimal, agar dapat menciptakan peluang membangun hubungan kerja. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, serta menghidupkan ranting dalam menjalin silaturahmi.

Selain itu, peran 'Aisyiyah dalam bidang sosial tidak perlu diragukan. Sejak awal berdirinya organisasi ini mulai dari tingkat pusat sampai daerah (Kota Makassar) memiliki kepedulian sangat tinggi kepada masyarakat akar rumput (lapisan bawah). Melalui Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) dalam 5 (lima) tahun terakhir program yang dikembangkan terkait dengan bidang sosial 'Aisyiyah Kota Makassar membina :

- 1) Panti asuhan sejumlah 5 buah;
- 2) Memberi sumbangan pada kaum dua'fa/fakir miskin;
- 3) Member bantuan kunjungan ke lokasi musibah, longsor dan kebakaran;
- 4) Kunjungan silaturahmi kepada anggota Aisyiyah yang sakit dan keduakaan dan bantuan ini berupa pakaian, makanan, obat-obatan, dan dana yang sumbernya dari partisipasi anggota;
- 5) Pengajian, pembinaan pada kunjungan silaturahmi dipanti asuhan;
- 6) Mengadakan infaq dan zakat fitrah pada bulan ramadhan kepada masyarakat kecil.

Dengan demikian, gerakan Aisyiyah sangat menyentuh kepedulian masyarakat yang layak memperolehnya. Sementara itu, kebijakan Politik Balas Budi atau Politik Etis yang difokuskan pada bidang edukasi, irigasi, dan kolonisasi yang dilaksanakan sejak dekade pertama abad XX, telah memberikan kesempatan lebih

luas kepada penduduk pribumi termasuk Pengurus 'Aisyiyah Kota Makassar mengikuti pendidikan Barat dibandingkan dengan masa sebelumnya, yaitu melalui pembentukan beberapa lembaga pendidikan khusus bagi penduduk pribumi sampai di tingkat desa, tetapi, kesempatan ini tetap saja masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pribumi secara keseluruhan.

Kesempatan tersebut, masih tetap diprioritaskan bagi kelompok elit penduduk pribumi, atau kesempatan pertama yang ada hanya terbuka untuk pendidikan rendah, sedangkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di tingkat menengah dan tinggi masih sangat terbatas. Seperti pada masa sebelumnya, kondisi seperti ini terbentuk selain disebabkan oleh kebijakan pemerintah kolonial, juga dilatarbelakangi sikap antipati dari kelompok Islam, yang menjadi pendukung utama masyarakat pribumi terhadap pendidikan Barat itu sendiri.

Secara umum mereka lebih suka mengirimkan anak-anak mereka ke pesantren, atau hanya sekedar ke lembaga pendidikan informal lain yang mengajarkan pengetahuan dasar agama Islam. Namun, sebenarnya ada dualisme cara memandang pendidikan Barat ini. Di samping dianggap sebagai perwujudan dari pengaruh Barat atau Kristen terhadap lingkungan sosial dan budaya lokal maupun Islam, pendidikan Barat juga dilihat secara objektif sebagai faktor penting untuk mendinamisasi masyarakat pribumi yang mayoritas beragama Islam.

Pendidikan Barat yang telah diperkenalkan pada penduduk pribumi secara terbatas ini ternyata telah menciptakan kelompok intelektual dan profesional yang telah mampu melakukan perubahan-perubahan maupun memunculkan ide-ide baru di

dalam masyarakat maupun sikap terhadap kekuasaan kolonial. Perubahan dan pencetusan ide-ide baru itu pada masa awal hanya terbatas pada bidang sosial, kultural, dan ekonomi, akan tetapi kemudian mencakup juga permasalahan politik. Walaupun feodalisme dalam sikap maupun struktur yang lebih makro di dalam masyarakat, khususnya di Kota Makassar masih tetap berlangsung, pembentukan "organisasi modern" merupakan salah satu realisasi yang penting dari upaya perubahan dengan ide-ide baru tersebut.

Peran 'Aisyiyah Kota Makassar dalam bidang pendidikan secara garis besar dapat digambarkan bahwa, pendidikan merupakan salah satu elemen dasar dalam pembangunan bangsa. Pendidikan menyimbolkan kapasitas sosial dari sebuah masyarakat untuk menyerap pengetahuan dan sains yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. 'Aisyiyah dengan misi utam mengangkat harkat dan martabat wanita. Kondisi kaum wanita saat lahirnya 'Aisyiyah kurang berperan sesuai fungsinya, dan sisi ideologi pendidikan di daerah ini (Kota Makassar) sebenarnya sudah cukup mendapat tempat dari pendiri bangsa. Hal ini dapat terwujud dengan masuknya pendidikan sebagai salah satu prioritas utama. Dalam pembukaan UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) juga mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak rakyat dan kewajiban pemerintah untuk membiayainya. Kemudian UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mensyaratkan belanja pendidikan pada APBN sebesar 20% melalui majelis Dikdasmen.

Program Kerja 'Aisyiyah Kota Makassar bidang pendidikan meliputi :

- a) Aisyiyah kota Makassar membina taman kanak-kanak Bustanul Athfal sejumlah 56 buah. Suatu rekor terbesar di banding binaan organisasi lainnya. Walaupun masih sangat bervariasi pengelolaannya dan kapasitas baik guru maupun sarana dan prasarana, telah menyebar di setiap ranting di kota Makassar. Jelas Aisyiyah telah maksimal membantu pemerintah sebagai mitra untuk mencerdaskan bangsa;
- b) Di samping itu, membina satu SMU, satu SMP dan satu SD;
- c) Untuk meningkatkan mutu SDM, tenaga kependidikan dan karyawan, majelis Dikdasmen selalu mengadakan pelatihan/pentaran untuk meningkatkan pembelajaran;
- d) Aktif mengadakan pertemuan dengan semua taman kanak-kanak Bustanul Athfal bersama guru-gurunya sebagai pembinaan, dan
- e) Secara kontinyu melakukan kunjungan silaturahmi dan evaluasi kegiatan di setiap sekolah.

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis data yang diperoleh, harapan semua pengurus dan pimpinan 'Aisyiyah Kota Makassar, semoga usaha-usaha yang telah dilakukan dalam bidang pendidikan sains dapat ditingkatkan dan mendapat ridho dari Allah swt. Kepedulian dan peranserta 'Aisyiyah Kota Makassar dalam bidang pendidikan sejak berdirinya hingga dewasa ini, sejalan dengan Dunia Islam pada umumnya dan Masyarakat Muslim di Indonesia secara makro, perkembangan dunia Islam pada akhir abad XIX dan awal abad XX yang ditandai oleh usaha untuk

melawan dominasi Barat setelah sebagian besar negara yang penduduknya beragama Islam secara politik, sosial, ekonomi, maupun budaya telah kehilangan kemerdekaan dan berada di bawah kekuasaan kolonialisme dan imperialisme Barat sejak beberapa abad sebelumnya. Dalam masyarakat Muslim sendiri muncul usaha untuk mengatasi krisis internal dalam proses sosialisasi ajaran Islam, akidah, maupun pemikiran sebagian besar masyarakat, baik yang disebabkan oleh dominasi kolonialisme dan imperialisme Barat, maupun sebab-sebab lain yang ada dalam masyarakat Muslim itu sendiri.

Dalam kehidupan beragama ini terjadi kemerosotan *ruhul Ishmi*, jika dilihat dari ajaran Islam yang bersumber dari Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Pengamalan ajaran Islam bercampur dengan bid'ah, khurafat, dan syi'ah. Di samping itu, pemikiran umat Islam juga terbelenggu oleh otoritas mazhab dan taqlid kepada para ulama sehingga ijtihad tidak dilakukan lagi. Dalam pengajaran agama Islam, secara umum Qur'an yang menjadi sumber ajaran hanya diajarkan pada tingkat bacaan, sedang terjamahan dan tafsir hanya boleh dipelajari oleh orang-orang tertentu saja. Sementara itu, pertentangan yang bersumber pada masalah khilafiyah dan firu'iyah sering muncul dalam masyarakat Muslim, akibatnya muncul berbagai firqah dan pertentangan yang bersifat laten.

Terkait dengan kemerosotan tersebut, 'Aisyiyah Kota Makassar sejak berdirinya tahun 1926 muncul ide-ide pemurnian ajaran dan kesadaran politik di kalangan umat Islam melalui pemikiran dan aktivitas tokoh-tokoh di daerah ini terutama dipengaruhi oleh pemikiran Jamaludin Al-Afgani, Muhammad Abduh,

Rasyid Ridha, dan para pendukung Muhammad bin Abdul Wahab. Jamaludin Al-Afgani banyak bergerak dalam bidang politik, yang diarahkan pada ide persaudaraan umat Islam dan gerakan perjuangan pembebasan tanah air oleh umat Islam dari kolonialisme Barat. Sementara itu, Muhammad Abduh dan muridnya, Rasyid Ridha, berusaha memerangi kestatisan, syirik, bid'ah, khurafat, taqlid, dan membuka pintu ijtihad di kalangan umat Islam. Restrukturisasi lembaga pendidikan Islam dan mewujudkan ide-ide ke dalam berbagai penerbitan merupakan wujud usaha pemurnian dan pembaharuan yang dilakukan oleh para ulama daerah ini.

Selain itu, seperti yang terjadi di dalam dunia Islam secara umum, terutama di Kota Makassar pada abad XIX juga mengalami krisis kemurnian ajaran, kestatisan pemikiran maupun aktivitas, dan pertentangan internal. Perjalanan historis penyebaran agama Islam di daerah ini sejak masa awal, melalui proses akulturasi dan sinkretisme, pada satu sisi telah berhasil meningkatkan kuantitas umat Islam. Akan tetapi secara kualitas muncul kristalisasi ajaran Islam yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Di Pulau Jawa misalnya; persoalan kemurnian ajaran Islam ini sangat terasa karena unsur-unsur lokal sangat berpengaruh proses sosialisasi ajaran Islam dalam masyarakat seperti tahlilan, dan sebagainya.

Pemerintah kolonial cenderung melihat Islam sebagai ancaman yang langsung terhadap eksistensi kekuasaan kolonial. Karena itu, setiap aktivitas yang terkait dengan Islam selalu dicurigai dan dianggap sebagai langkah melawan penguasa. Berdasarkan konsep yang dikembangkan C. Snouck Hurgronje akhir abad XIX pemerintah kolonial secara tegas memisahkan Islam dari politik, namun Islam sebagai

ajaran agama dan kegiatan sosial dibiarkan untuk berkembang walaupun tetap berada dalam pengawasan yang ketat. Kecurigaan pemerintah kolonial yang berlebihan terhadap Islam, membatasi kreativitas umat, baik dalam pengertian ajaran, pemikiran, dan penyesuaian diri terhadap dinamika dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat secara umum.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh munculnya sikap taqlid kepada para ulama tertentu pada sebagian besar umat Islam di Kota Makassar, dan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Pemerintah kolonial juga berusaha mengeksploitasi perbedaan yang ada dalam masyarakat yang berhubungan dengan Islam, seperti perbedaan sosio-antropologis antarkelompok sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Selain itu, aktivitas kristenisasi yang dilakukan oleh misi Katolik maupun Protestan terhadap penduduk pribumi yang telah beragama Islam terus berlangsung tanpa halangan dari penguasa kolonial. Lembaga pendidikan dasar sampai menengah, panti asuhan, dan rumah sakit yang didirikan oleh missionaries sebagai pendukung proses kristenisasi, dan mendapat bantuan dana yang besar dari pemerintah.

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 'Aisyiyah Kota Makassar

Struktur organisasi adalah rangkaian aturan yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi organisasi yang meliputi pimpinan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan organisasi. 'Aisyiyah sebagai organisasi formal memerlukan adanya struktur organisasi yang sehat dan efisien. Organisasi yang sehat

berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tertib, sedang struktur organisasi yang teratur berarti dalam menjalankan peranannya itu, masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja (wawancara setelah diolah, Maret 2012).

'Aisyiyah merupakan suatu organisasi formal dan informal. Suatu organisasi formal belum tentu bekerja secara sehat dan efisien, apabila hanya didasarkan pada struktur formalnya, sedangkan segi informalnya diabaikan. Karena itu, organisasi informal merupakan sesuatu yang akan melengkapi segi formal dari organisasi tersebut ('Aisyiyah Kota Makassar). Adapun peranan organisasi informal sebagai saluran informasi untuk mempertajam perasaan dan keutuhan pribadi, percaya diri dan kebiasaan bertindak kepada orang-orang yang tergabung dalam organisasi ('Aisyiyah). Dengan demikian, organisasi informal bertujuan untuk memperlancar hubungan dalam melaksanakan peran, tugas, fungsi, dan tanggungjawab yang diemban dalam organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang makna struktur organisasi dan tata kerja, maka berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian berdasarkan fakta lapangan dalam lima tahun terakhir susunan kepengurusan dan tata kerja 'Aisyiyah Kota Makassar Periode Tahun 2010 – 2015 sebagai berikut :

1. Ketua (Hj. Chaeriah Akib), mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab meliputi:
 - a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Makassar.

- b. Mengarahkan, membimbing, mengendalikan pelaksanaan program organisasi.
- c. Mengkoordinasikan anggota Pimpinan Daerah lainnya dalam menjalankan tugas masing-masing.
- d. Melakukan peran-peran strategis organisasi yang terkait dengan peran keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan sesuai prinsip dan kepentingan organisasi.
- e. Melakukan peran-peran pelayanan organisasi dan warga ‘Aisyiyah maupun pelayanan umat (masyarakat).
- f. Mewakili Pimpinan Daerah baik ke dalam maupun keluar organisasi, sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Memimpin rapat-rapat Pimpinan Daerah.
- h. Membina dan mengkoordinasikan unsur Badan Pembantu Pimpinan.

Dalam merealisasikan program kerja yang diamanahkan organisasi baik secara formal diatur oleh ketentuan yang berlaku maupun secara informal merupakan tugas serta tanggung jawab Ketua Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kota Makassar dibantu oleh: (1) Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan; (2) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan.

2. Wakil Ketua (Hj. Aisyah Damopoli), yang mengemban tugas, fungsi, dan tanggung jawab :
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah yang diserahkan kepadanya.

- b. Mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan program konsolidasi organisasi, serta mengkoordinasikan dengan majelis terkait.
- c. Membantu Ketua dalam melakukan pelayanan-pelayanan organisasi
- d. Membantu Ketua dalam melakukan tugas ke dalam maupun keluar organisasi sesuai mandat.
- e. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Daerah.
- f. Membina dan mengkoordinasikan unsur Badan Pembantu Pimpinan.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Wakil Ketua PDA Kota Makassar sebagaimana disebutkan di atas, juga dibantu oleh: (1) Majelis Tabligh, dan (2) Majelis Kesehatan.

3. Wakil Ketua (Dra. Hj. Muliati Amin, M.Ag), mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah yang diserahkan kepadanya.
- b. Membantu Ketua dalam melakukan pelayanan-pelayanan organisasi
- c. Membantu Ketua dalam melakukan tugas ke dalam maupun keluar organisasi sesuai mandat.
- d. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas, Wakil Ketua PDA Kota Makassar dibantu oleh: (1) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dan (2) Lembaga Kebudayaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

4. Wakil Ketua (Dra. Hj. Khaeriyah A. Jabbar), mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Membantu Ketua dalam melakukan tugas ke dalam maupun keluar organisasi sesuai mandat.
 - c. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Daerah.
 - d. Mengkoordinasikan bidang organisasi yang terkait dengan regulasi.
 - e. Membina dan mengkoordinasikan unsur Badan Pembantu Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di atas, Wakil Ketua PDA Kota Makassar dibantu oleh Majelis Pengembangan Kader.

5. Wakil Ketua (Hj. Tuty Suciaty, SH., M.Si), mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Membantu Ketua dalam melakukan tugas ke dalam maupun keluar organisasi sesuai mandat.
 - c. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Daerah.
 - d. Membina dan mengkoordinasikan unsur Badan Pembantu Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di atas, Wakil Ketua PDA Kota Makassar dibantu oleh Majelis Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Wakil Ketua (St. Rusmah Abdullah), yang mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah yang diserahkan kepadanya.
- b. Membantu Ketua dalam melakukan tugas ke dalam maupun keluar organisasi sesuai mandat.
- c. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Daerah.
- d. Membina dan mengkoordinasikan unsur Badan Pembantu Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di atas, Wakil Ketua PDA Kota Makassar dibantu oleh Majelis Kesejahteraan Sosial.

7. Sekretaris (Djuharni Mustari), yang diamanahi tugas, fungsi dan tanggung jawab:

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
- b. Mengendalikan segala informasi masukan dan informasi keluaran yang diperlukan organisasi.
- c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Pimpinan Daerah, serta menyiapkan dan menyelesaikan hasil yang tertuang dalam kesimpulan dan/atau rumusan keputusan.
- d. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan rapat-rapat Pimpinan Daerah.
- e. Membantu Ketua Umum dan Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Daerah ketika mereka berhalangan.

- f. Memimpin kegiatan Sekretariat Pimpinan Daerah.
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan Sekretaris Pimpinan Daerah diperlukan oleh unsur Badan Pembantu Pimpinan.
8. Wakil Sekretaris (Ratna Dewi Ibrahim, SS., M.Hum), mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Membantu Sekretaris Umum dalam mengendalikan informasi masukan dan informasi keluaran yang diperlukan organisasi.
 - c. Membantu Sekretaris Umum dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Pimpinan Daerah, serta menyiapkan dan menyelesaikan hasil yang tertuang dalam kesimpulan dan/atau rumusan keputusan.
 - d. Membantu Sekretaris Umum dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan rapat-rapat Pimpinan Daerah.
 - e. Membantu Sekretaris Umum dalam memimpin kegiatan rapat Sekretaris Pimpinan Daerah ketika berhalangan.
9. Wakil Sekretaris (Hadjrah Yusuf Yuddin), mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Membantu sekretaris umum dalam mengendalikan informasi masukan dan informasi keluaran yang diperlukan organisasi.

- c. Membantu sekretaris umum dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus (Pimpinan Daerah), serta menyiapkan dan menyelesaikan hasil yang tertuang dalam kesimpulan dan/atau rumusan keputusan.
 - d. Membantu Sekretaris Umum dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan rapat-rapat Pimpinan Daerah.
 - e. Membantu Sekretaris Umum dalam memimpin kegiatan Sekretaris Pimpinan Daerah (Kota Makassar).
10. Bendahara (Hj. Rukiah Khalid), yang diamanahi tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Melaksanakan usaha-usaha penggalan dan pengelolaan dana organisasi
 - c. Menyusun dan mengatur RAPB organisasi
 - d. Menyusun sistem keuangan organisasi transparan dan akuntabel
 - e. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban keuangan.
11. Wakil Bendahara (Badria Solo), memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Membantu Bendahara Umum dalam usaha-usaha penggalan dan pengelolaan dana organisasi.
 - c. Membantu Bendahara Umum menyusun dan mengatur RAPB organisasi
 - d. Menyusun laporan keuangan secara periodik

- e. Secara khusus, bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan Kantor Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kota Makassar, yang berlokasi di Jalan Landak Baru Kota Makassar.
12. Ketua Majelis Tabligh (St. Zohrah Marzuki), mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Majelis Tabligh
 - c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang Tabligh dan Kehidupan Islami berdasarkan keputusan Mukhtamar, Tanwir, dan Kebijaksanaan Pimpinan Pusat.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Majelis Tabligh.
13. Ketua Majelis Dikdasmen (Dra. Hj. Syahribulan K., M.Pd), mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Majelis Dikdasmen.
 - c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang Pendidikan, khususnya pendidikan pra sekolah sampai pendidikan menengah berdasarkan keputusan Mukhtamar, Tanwir, dan Kebijaksanaan Pimpinan Pusat.

- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Majelis Dikdasmen.
14. Ketua Majelis Kesehatan (Dra. Hj. Hamdana Dahlan, M.Ks), memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Majelis Kesehatan.
 - c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup berdasarkan keputusan Mukhtar, Tanwir, dan Kebijakan Pimpinan Pusat.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Majelis Kesehatan.
15. Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial (Maryam Siking), memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial.
 - c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang Kesejahteraan Sosial berdasarkan keputusan Mukhtar, Tanwir, dan Kebijakan Pimpinan Pusat.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Majelis Kesejahteraan Sosial.

16. Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (Budiarti Bachtiar, SE), memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab:
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Majelis Ekonomi.
 - c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan berdasarkan keputusan Mukhtamar, Tanwir, dan Kebijaksanaan Pimpinan Pusat.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Majelis Ekonomi.
17. Ketua Majelis Pembinaan Kader (Sulaifah Wahab, SP), mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab :
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Majelis Pembinaan Kader
 - c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang Pembinaan Kader dan Ketenagakerjaan berdasarkan keputusan Mukhtamar, Tanwir, dan Kebijaksanaan Pimpinan Pusat.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Majelis Pembinaan Kader.
18. Ketua Majelis Hukum dan HAM (Hj. Djalaliah Jamal), mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM.
 - c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang Hukum dan HAM berdasarkan keputusan Mukhtar, Tanwir, dan Kebijakan Pimpinan Pusat.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Majelis Hukum dan HAM.
19. Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan (Dra. Munirah, M.Pd), mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan (LPP).
 - c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan berdasarkan keputusan Mukhtar, Tanwir, dan Kebijakan Pimpinan Pusat.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Lembaga Pengkajian dan Pengembangan.
20. Ketua Lembaga Kebudayaan (Dr. St. Aidah Azis, S.Pd., M.Pd), yang mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
- b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Lembaga Kebudayaan.
- c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang kebudayaan berdasarkan keputusan Mukhtamar, Tanwir, dan Kebijaksanaan Pimpinan Pusat.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Lembaga Kebudayaan.

Mencermati uraian di atas tentang struktur organisasi dan tata kerja 'Aisyiyah Kota Makassar dalam lima tahun terakhir (2010 – 2015), dapat dipahami bahwa, Khitta perjuangan 'Aisyiyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah sejak didirikan tahun 1926, yaitu 9 tahun setelah 'Aisyiyah Pusat didirikan (1917), terutama dalam era reformasi berdasarkan Khitta Denpasar tahun 2002, dapat memberi peluang (kebebasan) bagi kadernya, untuk terjun dalam kancah politik praktis. Kebebasan kader 'Aisyiyah dalam memilih organisasi (partai politik) sebagai kendaraan berpolitik menjadikan integrasi sikap politik 'Aisyiyah tidak boleh berafiliasi (mendukung) kekuatan organisasi politik tertentu. 'Aisyiyah dalam berbagai aksi dan praktek yang berhubungan dengan politik selalu menjaga jarak dengan partai politik dan tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik.

Kebebasan berpartai tanpa menyalahi ideologi persykerkatan telah tercermin dalam hasil Mukhtamar Muhammadiyah ke-38 yang menegaskan bahwa 'Aisyiyah merupakan Gerakan Dakwah Islam, beramal dalam segala bidang kehidupan manusia

dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu Partai Politik atau Organisasi apapun. Setiap anggota 'Aisyiyah (Kota Makassar) sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Organisasi 'Aisyiyah.

Sikap politik yang demikian ini menjadi landasan dalam memandang pergolakan perpolitikan di Indonesia. Dengan demikian, dipahami bahwa para kader, pengurus dan warga 'Aisyiyah (termasuk Kota Makassar) tidak menjamin jumlah suara yang diperlukan karena kebebasan yang diberikan organisasi induk. Dalam hal ini warga 'Aisyiyah menggunakan hak berpolitik yaitu instruksi yang tidak mengikat dan lebih bersandar pada penghormatan hak asasi (kebebasan memilih dan dipilih). Fenomena yang lain juga terlihat pada setiap kegiatan rutin seperti Muswil atau Muktamar yang diadakan setiap lima tahun, para pengurus secara rutin meminta bantuan dana baik kepada pemerintah kota maupun pemerintah propinsi untuk menutupi biaya-biaya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan hajatan tersebut.

Perkembangan selanjutnya, gerakan 'Aisyiyah dari waktu ke waktu terus meningkat dengan memperluas kerja dalam rangka peningkatan dan kemajuan harkat wanita Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan sekolah dari Taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, rumah sakit, balai bersalin, panti asuhan, panti jompo, rumah-rumah sosial, lembaga ekonomi dan lain-lain. Sebagai organisasi sosial, semua kegiatan dibiayai iuran anggota serta bantuan baik berupa hibah, zakat, donasi, maupun kerjasama dengan berbagai pihak baik

dalam maupun luar negeri. Selain itu, juga mendirikan berbagai amal usaha baik sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain yang hasil keuntungannya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat dan kemanusiaan (Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sul – Sel, 2011).

Semangat tinggi yang dimiliki para pengurus dan anggota 'Aisyiyah dapat dilihat dari indikator yang ada bahwa walaupun banyak pengurus yang sudah berusia lanjut tetapi keinginan untuk tetap menjadi pengurus tetap sangat besar dan terkesan tidak ikhlas untuk diganti. Namun demikian mereka tetap dibatasi masa bakti periode lima tahunan lewat musyawarah besar atau kongres. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang pengurus, Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulawesi Selatan; Dra. Hidayah Quraisy, M.Pd, bahwa "hal seperti inilah ciri dan keunikan yang membedakan organisasi 'Aisyiyah dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya di Indonesia dan khususnya di Kota Makassar (Wawancara, 12 Februari 2012).

'Aisyiyah sebagai komponen Perempuan Muhammadiyah bergerak di bidang sosial keagamaan dalam usianya menjelang satu abad (95 tahun) 'Aisyiyah Pusat, dan 86 tahun 'Aisyiyah Kota Makassar telah menunjukkan kiprahnya terutama dalam pencerahan, pemberdayaan, dan kemajuan yang memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umat, masyarakat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Keberhasilan dan peran positif 'Aisyiyah Kota Makassar tersebut merupakan karunia Allah yang diraih karena kekuatan keikhlasan, komitmen, potensi, dan partisipasi 'Aisyiyah sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar serta tajdid sehingga selalu menunjukkan semangat yang tinggi untuk berkiprah konstruktif dalam kehidupan. Keberhasilan ini

juga diraih karena kepercayaan dan dukungan berbagai pihak yang memiliki semangat yang sama untuk memajukan kehidupan masyarakat.

Sebagai gerakan perempuan Muhammadiyah, organisasi ‘Aisyiyah dalam menjalankan usaha-usaha untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya senantiasa di dasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam diantaranya ajaran dakwah amar maruf nahi munkar, berbuat kebaikan, beramal shaleh baik bagi laki-laki maupun perempuan dan lain sebagainya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron:104.

﴿وَيُحْيِي الْمَيِّتَ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبِتُ بِالْأَشْجَارِ أَتَى عَلَى الْمَوْتِ مَنَاقِبُ إِنَّكُم مِّنْ عِندِ رَبِّكُمْ وَأَنْتُمْ مُسْتَعْتَبُونَ﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (QS Ali Imran [3]: 104).

Kemudian firman Allah dalam al-Qur’an Surat An-Nahl: 97.

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ عَمَلًا سُوءًا يَجِدْ لَهُ أَجْرًا غَيْرَ الْيَقِينِ إِنَّهُ يَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS An-Nahl [16]: 97).

‘Aisyiyah Kota Makassar sebagai komponen organisasi perempuan Muhammadiyah terus berjuang dalam konteks saat ini dan berada dalam dinamika,

masalah, dan tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, 'Aisyiyah semakin dituntut untuk meningkatkan peran gerakannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan aksi yang langsung dan menyentuh denyut kehidupan masyarakat luas. Peningkatan peran tersebut baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif selain didasarkan atas idealisme gerakan yang menjadi bingkai perjuangan, dikembangkan atas respons terhadap berbagai masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Menghadapi dinamika dan tantangan yang demikian kompleks itu, 'Aisyiyah Kota Makassar dituntut untuk memberikan jawaban (solusi) melalui usaha yang bersifat konkrit, terorganisasi, dan berkesinambungan. Usaha 'Aisyiyah tersebut diwujudkan dalam berbagai macam program, amal usaha, dan kegiatan yang disusun secara sistematis untuk meraih tujuan utama terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Namun demikian, dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut, maka setiap periode 'Aisyiyah senantiasa berada dalam situasi (konteks) kehidupan yang sarat masalah, baik dalam konteks kehidupan umat, bangsa, maupun perkembangan global. Di antara masalah-masalah tersebut, antara lain :

1) Masalah Umat Islam.

- a) Umat Islam Kota Makassar dan Sulawesi Selatan, meskipun dari segi jumlah merupakan penduduk mayoritas, tetapi dari segi kualitas masih tertinggal dan mengalami masalah kemiskinan, lemah secara politik, marjinal secara sosial-budaya, dan belum menunjukkan diri sebagai kekuatan masyarakat madani (*civil society*) yang handal sebagai kekuatan strategis bangsa.

- b) Umat Islam, khususnya Kota Makassar dan Sulawesi Selatan saat ini dicitrakan secara negatif dalam stigma terorisme dan radikalisme yang menapikan arus utama Islam yang secara mayoritas bersifat moderat dan menampilkan sikap yang damai, toleran, dan maju.
 - c) Organisasi-organisasi Islam termasuk 'Aisyiyah mengalami sejumlah permasalahan, seperti menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, kecenderungan pada politik praktis, jaringan yang belum optimal, dan belum menunjukkan kekuatan masyarakat madani.
 - d) Kecenderungan sebagian anggota dan pengurus 'Aisyiyah yang lebih mengedepankan simbol dan formalitas ketimbang substansi, politisasi agama, dan komoditisasi agama yang melemahkan misi Islam yang lebih luas, mendasar, dan strategis sebagai agama pem bawa risalah rahmatan lil-'alamin.
- 2) Masalah Nasional
- a) Bangsa Indonesia setelah reformasi 1998, meskipun secara relatif menunjukkan kemajuan dalam demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik; namun selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir sejak Muktamar di Malang tahun 2005 dan Yogyakarta tahun 2010; persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa semakin kompleks baik menyangkut masalah-masalah politik, ekonomi, hukum, maupun sosial-budaya yang krusial serta memerlukan pemecahan secara cepat dan komprehensif. (1) dalam aspek politik, muncul masalah kerancuan tatanegara antara sistem presidensial dan parlementer, jumlah partai yang banyak, dan pragmatisme

politik. (2) dalam aspek ekonomi, masalah kebijakan yang tarik menarik antara orientasi pasar dan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu memecahkan kemiskinan dan ketenagakerjaan. (3) masalah sosial budaya, yang muncul adalah lemahnya kohesi dan solidaritas sosial, konflik horizontal, dan lemahnya karakter bangsa. (4) adalah masalah korupsi, mafia hukum, semakin memprihatinkan serta memerlukan pemecahan yang serius dan konsisten.

- b) Di bidang politik terdapat kecenderungan demokrasi prosedural lebih menonjol ketimbang demokrasi substansial, kerancuan dalam sistem ketatanegaraan antara presidensial dan parlementer, sentralisasi dan desentralisasi, berkembangnya lembaga-lembaga komisioner yang bersifat sementara, dan pragmatisme politik yang dialami elite dan partai politik.
- c) Di bidang ekonomi masih ditandai oleh kemiskinan, pengangguran, dualisme ekonomi, kecenderungan ekonomi yang liberal dan tidak sejalan dengan ekonomi konstitusi, rusaknya aset dan sumberdaya alam yang menjadi potensi bangsa dan negara.
- d) Dalam bidang hukum ditandai dengan korupsi yang masih meluas, pemberantasan korupsi yang tebang pilih, lemahnya penegakan hukum, maraknya mafia hukum, dan krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum.

- e) Bidang sosial budaya ditandai oleh melemahnya karakter, solidaritas sosial, toleransi, kemandirian, krisis moral yang dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- f) Terkait dengan perempuan, masih terdapat kecenderungan kurang penghargaan dan terjadinya ketidakadilan gender, baik karena masalah struktural maupun kultural yang bercorak patriarki.

Menghadapi masalah-masalah tersebut, baik masalah umat Islam maupun masalah-masalah nasional, di mana struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana telah dijelaskan di atas, oleh 'Aisyiyah Kota Makassar dapat menyesuaikan dengan lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diemban masing-masing majelis dan lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada pembahasan.

D. Revitalisasi Nilai-nilai Gerakan 'Aisyiyah Kota Makassar

Revitalisasi nilai-nilai gerakan dalam disertasi ini dimaknai sebagai upaya untuk menggali dan mengungkap kembali nilai-nilai gerakan 'Aisyiyah di masa lalu untuk menjelaskan gerakan organisasi dalam konteks kekinian yang merupakan target Muktamar XI 'Aisyiyah di Kota Makassar. Dalam hal ini, bagaimana 'Aisyiyah yang sudah menjelang satu abad mampu bertahan dan tetap eksis dalam memelihara serta memperbaharui kembali gerakannya; semacam revitalisasi. Gerakan aksi menjadi salah satu upaya revitalisasi keberadaan organisasi 'Aisyiyah. Melalui kegiatan ini dapat dikatakan bahwa 'Aisyiyah bermaksud menghidupkan kembali nilai-nilai

gerakan dan tentang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat."Kami ingin merangsang diri kami dengan gerakan aksi supaya benar-benar sesuai fakta lapangan, tidak berada pada tingkat mengawang-awang" (hasil wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Kader 'Aisyiyah Kota Makassar, 12 April 2012).

Berikut ini dikemukakan kutipan artikel yang terkait dengan rivitalisasi nilai-nilai gerakan, "Deradjat kaoem iboe di tanah Arab zaman dahoeleoe orang telah mengetahoei boeroeknja.Orang perempoean disamakan dengan binatang ternak dan sesamanja.Pada zaman itoe orang Arab soedah djadi kebiasaannja memboenoeh anaknja jang keloear perempoean meskipoen ta'berdosa" (Soeara Aisyiyah, No.1-4/September 1929; Analisis dokumentasi 'Aisyiyah Kota Makassar, April 2012).

Senada dengan hal itu, penjelasan yang disampaikan salah seorang pengurus (Ketua) PWA Sulawesi Selatan yang memberikan naskah mentah penelitiannya tentang kiprah 'Aisyiyah di dunia pers. Kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa:

Mencermati sebegitu besar peran perempuan Muhammadiyah bagi bangsa Indonesia. Di tengah dominasi pemahaman maskulin suara pena 'Aisyiyah menjadi gerbang memasuki kesadaran perempuan di Indonesia. Artikel dalam Soeara 'Aisyiyah yang ditulis sebelum Indonesia merdeka.Seperti diketahui bahwa, perempuan di era prakemerdekaan eksistensinya tidak dihargai. Karena itu, Nyai K.H. Ahmad Dahlan meningkatkan gerakan perempuan Muhammadiyah, waktu itu dikenal dengan nama perkumpulan Sopo Tresno. Perkumpulan kaum perempuan ini kemudian berubah menjadi 'Aisyiyah 22 April 1917 M (hasil wawancara HQ, 15 Maret 2012).

Ringkasan hasil penelitian Syafaat R Selamat, tentang kiprah Soeara 'Aisyiyah dalam dunia pers. Hasil penelitian ini menyadarkan bangsa atas peran perempuan sebelum kemerdekaan sampai negeri ini merdeka. Hal ini penting termasuk menginspirasi peneliti untuk mengkaji kemandirian organisasi 'Aisyiyah di

berbagai aspek pembangunan, serta untuk menghemat kavling (ruang) bagi artikel diringkas seringkas-ringkasnya, sehingga dapat dinikmati, ditelaah, diresapi, dan dihayati peran 'Aisyiyah bagi sistem pengokohan nasionalisme perempuan di negeri ini.

Perkumpulan Aisyiyah ialah organisasi otonom Muhammadiyah yang bercita-cita 'memperbaharui' aspek pemahaman dan pengembangan agama Islam di dalam masyarakat untuk dikembalikan pada ajaran Islam murni yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam rentang waktu 3 tahun (1917-1920), Aisyiyah bergerak menyertai gerakan Muhammadiyah. Utamanya setelah bergerak di Pulau Jawa sejak tahun 1920. Aisyiyah mengalami perkembangan sangat pesat bukan saja di Yogyakarta, tetapi juga di luar Yogyakarta. Terutama perkembangan ini setelah Kongres Muhammadiyah ke-11 tahun 1923 di Yogyakarta.

Pada kongres tersebut, setiap cabang dan groep Muhammadiyah wajib mengadakan bagian Aisyiyah, sehingga perkembangan organisasi perempuan Muhammadiyah ini semakin pesat. Anggota-anggotanya tidak saja gadis-remaja. Melainkan juga ibu-ibu rumah tangga. Bahkan dua tahun setelah Aisyiyah berdiri (1919), Aisyiyah sudah merintis Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau *Play Group*. Yang kemudian berkembang menjadi Taman Kanak-Kanak bernama TK Bustanul Athfal yang tersebar di seluruh Hindia Belanda. Selain itu pula mendirikan Siswo Proyo Wanito, sebuah perkumpulan murid-murid puteri di luar sekolah. Perkumpulan ini kemudian tahun 1930 berkembang menjadi Nasyi'atul 'Aisyiyah (NA).

Tahun 1922 Aisyiyah berkembang pesat di daerah kelahirannya. Kondisi ini mendorong pengurusnya untuk semakin intensif melakukan pertemuan, rapat-rapat persiapan untuk melakukan kegiatan-kegiatan. 'Aisyiyah berhasil mendirikan tempat pertemuan dan pendidikan khusus kalangan perempuan, yang dikenal dengan Masjid (Mushala) Isteri. Sebagai satu-satunya Masjid Perempuan pertama di Indonesia. Mushala ini menjadi sentral kegiatan 'Aisyiyah dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya. Dari sinilah muncul ide-ide baru untuk membuka amal usaha organisasi. Setahun kemudian, Aisyiyah mengadakan pemberantasan buta huruf baik buta huruf Latin maupun buta huruf Arab. Upaya ini diharapkan dapat menghilangkan kebodohan, karena dengan membaca dan menulis, orang dapat menggali ilmu-ilmu yang bermanfaat. Upaya ini memberikan bukti bahwa Aisyiyah memang benar-benar berperan dalam memajukan bangsa. Setelah 9 tahun berdirinya, tahun 1926, Aisyiyah berkembang pesat. Aisyiyah mengiringi perkembangan Muhammadiyah selama 9 tahun (1917-1926).

Kemudian bulan Oktober 1926 bertepatan dengan bulan Jumadil Akhir 1345 H, Aisyiyah menerbitkan majalah organisasi yang bernama Soeara Aisyiyah. Majalah organisasi yang sederhana, menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Dengan menerbitkan majalah ini berarti Aisyiyah benar-benar memahami perlunya alat komunikasi yang cepat sampai kepada umat, karena waktu itu 'Aisyiyah sudah mulai berkembang jauh dari Yogyakarta. Dengan demikian 'Aisyiyah dapat memberikan informasi tentang kemajuan organisasi penjelasan kepada umat melalui media massa (Majalah Soeara Aisyiyah). Majalah ini berisi tentang penyebaran agama

Islam. Misalnya, agar kaum wanita menutup aurat, memakai kerudung, menjauhi pergaulan bebas, menaati adat sopan santun keislaman, dan sebagainya. Majalah ini juga dijadikan alat dakwah melalui media massa dan menjadi bacaan bagi ibu-ibu, murid atau pengikut Aisyiyah Maghribi School (AMS).

Menarik untuk dicermati, waktu itu belum ada sebuah penerbitan yang dikelola langsung oleh sebuah organisasi kaum wanita. Kalau pun ada sebelumnya yang bergerak dalam dunia pers, belum berbentuk organisasi dalam pengertian modern. Tetapi perkumpulan sederhana belum memiliki tata aturan organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Organisasi. Misalnya koran Poetri Hindia (PH) yang terbit tahun 1908 itu karena dirintis RM. Tirta Adhi Soerjo, bukan oleh sebuah organisasi wanita. Disinilah letak keistimewaan gerakan pena yang digagas 'Aisyiyah, di mana organisasi ini merupakan partner dari gerakan Muhammadiyah yang lahir karena ingin memberikan pendidikan dan kesadaran kaum perempuan. Dengan wahana sebuah penerbitan berkala Majalah Soeara 'Aisyiyah cita-cita gerakan dapat tersampaikan ke setiap pelosok nusantara, sehingga terjadi semacam pembentukan kesadaran kolektif, bahwa perempuan juga mesti berperan dalam kebangunan negara Indonesia, di mana pada masa prakemerdekaan perempuan nasibnya masih di dominasi kaum laki-laki. Demikian ringkasan hasil penelitian tentang majalah Soeara 'Aisyiyah yang dilakukan Syafaat R Selamat dan D. Anindita.

Selain makna revitalisasi nilai-nilai gerakan 'Aisyiyah di atas, juga untuk menyegarkan kembali gerakan perempuan di tubuh Muhammadiyah, menjelang satu abad, naskah yang sudah diedit dapat dijadikan telaah awal dalam merancang bentuk

gerak perempuan di Muhammadiyah. Mencermati revitalisasi nilai-nilai gerakan 'Aisyiyah sebagai organisasi otonom terutama hubungannya dengan perilaku organisasi dapat dijelaskan bahwa, perilaku organisasi adalah suatu ilmu terapan yang dibangun atas sumbangan dari sejumlah disiplin ilmu. Bidang-bidang ilmu tersebut, antara lain: (1) Psikologi, ialah ilmu sains yang berusaha mengukur, menjelaskan dan bisa mengubah perilaku manusia; (2) Sosiologi, mempelajari sistem sosial dimana individu-individu mengisi peran mereka, dalam kaitan hubungan dengan sesama; (3) Psikologi sosial, merupakan perpaduan bidang ilmu antara psikologi dan sosiologi, yang berfokus pada pengaruh orang terhadap yang lainnya. Sumbangan perilaku organisasi adalah memberikan kontribusi dalam hal pengukuran, pemahaman, dan perubahan sikap, pola komunikasi, cara-cara bagaimana kegiatan kelompok memuaskan kebutuhan individu dan proses pengambilan keputusan kelompok; (4) Antropologi, mempelajari tentang budaya organisasi, lingkungan organisasi, budaya nasional, internasional, serta perbedaan nilai fundamental, sikap, dan perilaku diantara orang dalam negara yang berlainan dalam organisasi yang berbeda.

Selanjutnya untuk mengklasifikasikan lingkungan eksternal organisasi menjadi dua macam, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus.

- a. Lingkungan umum, adalah kekuatan-kekuatan yang berinteraksi dan berpengaruh terhadap seluruh sektor kehidupan manusia, meliputi komponen: (1) budaya (*culture*); (2) iklim ekonomi (*economic climate*); (3) lingkungan hukum dan politik (*legal and political*), dan (4) lingkungan pendidikan.

- b. Lingkungan khusus, sejumlah kekuatan yang terdiri atas organisasi, individu-individu dan lembaga yang berinteraksi dengan organisasi, yang meliputi komponen: (1) pemasok input (*input suppliers*), seperti tenaga kerja (*labor*), money, raw materials (bahan mentah); (2) penyalur output (*output distributors*), atau dunia perdagangan; (3) Pesaing/competitors, yaitu lembaga yang merupakan bagian dalam penyebaran *output* yang secara bersama-sama memperebutkan pasar; (4) peraturan pemerintah (*government jurisdiction*), dan (5) kelompok khusus (*special group*), seperti serikat buruh dan kaum professional.

‘Aisyiyah merupakan organisasi perempuan yang bergerak di bidang sosial keagamaan dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks, baik yang berskala global, nasional, maupun lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut penting untuk diidentifikasi sebagai dasar dalam merumuskan program dan kegiatan ‘Aisyiyah dalam jangka waktu 5 tahun (Periode 2010–2015). ‘Aisyiyah sebagai organisasi yang memiliki ruang lingkup gerakan nasional, maka memerlukan langkah-langkah strategis dalam berkontribusi memecahkan permasalahan nasional maupun permasalahan yang ada di tingkat akar rumput sehingga kehadiran ‘Aisyiyah benar-benar dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat luas dan membawakan Islam sebagai rahmatan lil alamin.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Kemandirian Organisasi ‘Aisyiyah dalam Berbagai Fase Perkembangan.

Mengawali pokok bahasan tentang dinamika kemandirian organisasi ‘Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan, dengan mengutip pandangan H.M Amin Rais, mantan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dalam Tanwir II ‘Aisyiyah beliau mengatakan bahwa, “Bangsa Indonesia saat ini masih memprihatinkan kondisinya dibandingkan dengan berbagai Negara, dilihat dari berbagai aspek, yaitu sumber daya manusia, lemahnya memanfaatkan potensi yang dimiliki, daya saing yang lemah, dan karakter bangsa yang belum kuat”. Karena itu, diperlukan strategi untuk membangun bangsa yang bermartabat di tengah percaturan dunia. Lebih lanjut Amien Rais mengajak ‘Aisyiyah untuk melakukan tiga hal yaitu: memperkuat aqidah, memperkuat kemampuan bersaing, dan meningkatkan kekuatan multi dimensional antara lain peningkatan kualitas pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Telaah Dokumen PP ‘Aisyiyah, Yogyakarta, 2012).

Berdasarkan ilustrasi di atas sebagai landasan berpikir mengantarkan peneliti untuk menjelaskan dinamika kemandirian organisasi ‘Aisyiyah Kota Makassar dalam berbagai fase perkembangan, yang ditelusuri melalui tiga aspek kemandirian, yaitu “Medan Visional”, “Paradoks Independensi”, dan “Autopoiesis”. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, ‘Aisyiyah Kota Makassar berdiri sejak Tahun

1926. Seperti halnya struktur organisasi ‘Aisyiyah Pusat dimana ‘Aisyiyah Kota Makassar terdiri atas 7 (tujuh) majelis, yaitu: (1) Majelis Tabligh; (2) Majelis Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah); (3) Majelis Kesejahteraan Sosial; (4) Majelis Kesehatan; (5) Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan; (6) Majelis Pembinaan Kader, dan (7) Majelis Hukum dan HAM (Hak Azasi Manusia), sedangkan 2 lembaga, yaitu: (1) Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan (2) Lembaga Kebudayaan. Secara garis besar ketujuh bidang (majelis) tersebut merealisasikan program kerja atau bidang-bidang kegiatan yang telah direncanakan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2010 – 2015), dapat ditelusuri berdasarkan data dan fakta yang diperoleh sebagai berikut :

1. Medan Visional ‘Aisyiyah Kota Makassar

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa visi organisasi ‘Aisyiyah Kota Makassar sama dengan visi ‘Aisyiyah Pusat sekaligus visi Muhammadiyah, yaitu *“Tegaknya Agama Islam dan Terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenarnya”*. Visi tersebut menjadi medan magnet yang mengikat dan menggerakkan semua warga ‘Aisyiyah dalam merumuskan, mengarahkan, dan memberi terhadap semangat semua pengurus untuk bergerak bersama serta melakukan tindakan berdasarkan visi organisasi. Dengan demikian, medan visional yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah lingkup kegiatan atau program kerja yang menjadi pegangan semua unsur dalam organisasi untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menyadari bahwa 'Aisyiyah merupakan organisasi yang bergerak di bidang dakwah keagamaan, kegiatan sosial dan kemasyarakatan dengan perinsip dasar "amar makruf nahi munkar". Berdasarkan perinsip dasar dan visi utama di atas, maka dirumuskan visi pengembangan organisasi, yaitu: "Tercapainya usaha-usaha 'Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah amar makruf nahi munkar secara lebih berkualitas menuju masyarakat madani (*civil society*), yakni masyarakat utama yang diridhoi oleh Allah swt.Selanjutnya dalam upaya mewujudkan perinsip dasar dan visi 'Aisyiyah di atas, maka dirumuskan misi organisasi 'Aisyiyah dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta menyebarkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran Islam.
- d. Memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, serta mempertinggi akhlak.
- e. Meningkatkan semangat ibadah, jihad zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, serta membangun dan memelihara tempat ibadah, dan amal usaha yang lain.
- f. Membina Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Puteri untuk menjadi pelopor, pelangsun, dan penyempurna gerakan 'Aisyiyah.
- g. Meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian.

- h. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
- i. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup.
- j. Meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa.
- k. Meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
- l. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

Selanjutnya program kerja 'Aisyiyah Kota Makassar Periode 2010 – 2015, meliputi:

- 1) Bidang Dakwah, yaitu: (1) mengintensifkan pembinaan aqidah, ahklak, ibadah, di kalangan 'Aisyiyah dan masyarakat melalui pengajian dan kajian-lajian; (2) mengintensifkan kajian tafsir al-Qur'an dan al-Hadist bagi anggota, kader, dan pimpinan; (3) memasyarakatkan pelaksanaan kehidupan sehari-hari berdasarkan pedoman kehidupan Islami sesuai tuntutan tarjih Muhammadiyah; (4) meningkatkan dan mengembangkan kemampuan muballigat dalam berbagai aspek seperti: penguasaan metode, materi serta strategi dakwah; (5) meningkatkan fungsi masjid, mushallah, dan sarana dakwah lainnya sebagai pusat kegiatan Tabligh atau penyiaran Islam secara terprogram; (6) mengintensifkan program pembelajaran al-Qur'an bagi anggota 'Aisyiyah.

Program kerja ‘Aisyiyah di bidang dakwah di atas, dilaksanakan oleh Majelis Tabligh berdasarkan visi organisasi sebagai medan pergerakan dalam melaksanakan program kerja yang telah ditentukan, yaitu untuk: menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, serta meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita sesuai dengan ajaran Islam.

- 2) Bidang Pendidikan, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kreatifitas dalam penyelenggaraan pendidikan dasar tingkat PAUD dan TK ‘Aisyiyah; (2) menjadikan lembaga pendidikan ‘Aisyiyah sebagai basis kaderisasi ‘yang dilakukan secara sistematis; (3) meningkatkan kualitas pendidikan melalui jenajng pendidikan, forum diskusi dan berbagai cara yang lain; (4) meningkatkan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan organisasi berdasarkan kinerja, komitmen dan pengabdian terhadap ‘Aisyiyah; (5) membuat data base sebagai pusat informasi dan basis pengembangan pendidikan ‘Aisyiyah; (6) penggunaan administrasi anak didik dari organisasi; (7) penggunaan RAPBO/RAPBS; (8) iuran anak didik, dan (9) infaq guru.

Kesembilan program kerja bidang pendidikan di atas direalisasikan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

- 3) Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi: (1) pendataan amal usaha; (2) konsolidasi dan penguatan organisasi; (3) meningkatkan usaha-usaha dan kualitas penanggulangan bencana antara lain pada tanggap darurat, kesiapan SDM dan sinergi dengan amal usaha; (4) pelatihan perawatan jenazah; (5) membantu

masyarakat dhuafa/fakir miskin; (6) meningkatkan sosialisasi penghapusan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keenam program kerja dan kegiatan tersebut direalisasikan oleh Majelis Kesejahteraan Sosial.

- 4) Bidang Kesehatan, meliputi: (1) meningkatkan kualitas sumber daya di bidang kesehatan melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan seminar-seminar; (2) meningkatkan upaya penurunan angka kematian bayi dan balita melalui imunisasi ASI eksklusif dan pemberian gizi seimbang; (3) meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan keluarga, amal usaha, tempat umum, dan tempat ibadah; (4) meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, TB, dan penyakit lainnya; (5) meningkatkan sinergi kerjasama dengan pemerintah dan berbagai pihak lain dalam rangka meningkatkan peran 'Aisyiyah dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kelima program kerja bidang kesehatan tersebut, dilaksanakan oleh Majelis Kesehatan.
- 5) Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, yaitu: (1) kewirausahaan melalui penguatan dan pengembangan usaha makro, menengah yang dikelola oleh perempuan agar mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya; (2) optimalisasi pembinaan ekonomi melalui Badan Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah (BUEKA); (3) mengadakan berbagai macam pelatihan dan keterampilan, dan (4) mengadakan bazaar. Keempat program kerja tersebut dilaksanakan oleh Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan.

- 6) Bidang Pengkaderan, meliputi: (1) mengembangkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengkaderan di tingkat daerah sampai di tingkat ranting secara terencana, periodic, dan berkelanjutan; (2) optimalisasi fungsi dalam peran amal usaha sebagai pendidikan dan pembinaan kader; (3) mengoptimalkan pembinaan kader, melalui keluarga, amal usaha, AMM, untuk menjadi pelopor dan pelangsup gerakan. Ketiga program kerja di bidang pengkaderan ini dilaksanakan oleh Majelis Pembinaan Kader.
- 7) Bidang Hukum dan HAM, yaitu: (1) berpartisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum dan HAM di Indonesia, sehingga terwujud rasa keadilan bagi setiap warga negara; (2) meningkatkan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencegahannya; (3) meningkatkan pengawasan dan pencegahan perdagangan manusia. Ketiga program kerja tersebut, dilaksanakan oleh Majelis Hukum dan HAM.

Selain program kerja ketujuh majelis yang telah disebutkan di atas, juga program kerja lembaga, yaitu: Lembaga Penelitian dan Pengembangan adalah: (1) mengembangkan penelitian dan pengkajian masalah-masalah keorganisasian untuk mendukung kebijakan dan pengembangan organisasi; (2) meningkatkan dan mengembangkan fungsi data dan informasi sebagai salah satu sumber penting dalam pengambilan kebijakan organisasi dan pengembangan gerakan, dan (3) mengembangkan publikasi hasil kajian dan penelitian secara luas melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Sementara program kerja Lembaga Kebudayaan, meliputi: (1) meningkatkan perhatian terhadap masalah-masalah social

budaya, seperti: kesenian, perubahan budaya masyarakat, termasuk gaya hidup, kepariwisataan, serta aspek social lainnya, dan (2) mengembangkan apresiasi seni budaya masyarakat religious yang membawa pada pencerahan akal budi atau akhlak dalam kerangka dakwah Islam.

Selanjutnya dalam merealisasikan program kerja ketujuh majelis dan dua lembaga 'Aisyiyah Kota Makassar, secara garis besar berpedoman pada visi organisasi sebagai medan yang mengikat semua anggota, yaitu:

- a) Majelis Tabligh, bahwa 'Aisyiyah sebagai organisasi dakwah keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan melaksanakan aktivitas penanggulangan masalah kemiskinan dengan prinsip bahwa:

Masalah kemiskinan telah menjadi permasalahan sosial yang sangat memprihatinkan dan menuntut perhatian serius semua pihak, termasuk 'Aisyiyah. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (sandang, pangan, dan papan atau perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial). Salah satu penyebab kemiskinan menurut saya sebagai pribadi dan sebagai salah satu Pengurus 'Aisyiyah Kota Makassar adalah semakin menipiskannya keberpihakan kebijakan publik terhadap kelompok masyarakat miskin akibat adopsi terhadap paham ekonomi pasar yang berlebihan. Karena itu, 'Aisyiyah tetap menjadikan masalah kemiskinan sebagai salah satu kegiatan dengan berpedoman pada visi organisasi (hasil wawancara AD, tanggal 15 Maret 2012).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa salah satu tujuan organisasi 'Aisyiyah adalah membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung (penyandang masalah sosial). Dalam menangani masalah kemiskinan dengan mekanisme pasar dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat untuk menyediakan berbagai kebutuhan dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, air dan listrik yang merupakan pelayanan dasar,

lebih baik bila diserahkan kepada pasar karena dianggap pasarlah yang dapat melayani dengan efisien. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa, 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan yang peduli terhadap berbagai persoalan yang dihadapi ibu-ibu rumah tangga terutama pelayanan dasar (air dan listrik), sebagaimana dijelaskan Ketua Majelis Tabligh bahwa:

Banyak ibu rumah tangga yang semakin berat menghadapi kenaikan tarif air dan tarif dasar listrik yang melaju lebih kencang dibanding laju pertumbuhan pendapatan keluarga. Dengan paradigma pasar, pelayanan rumah sakit dan pendidikan juga bukan lagi hak dasar yang wajib untuk dapat diakses seluruh rakyat, tetapi sudah menjadi industri jasa yang memerlukan modal, kekuatan dalam persaingan untuk mengaksessnya. Menyadari hal tersebut Majelis Tabligh menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk mengatasi masalah ini (wawancara ZM, 12 Maret 2012).

Berpedoman pada visi 'Aisyiyah terkait dengan paradigma ekonomi pasar, peran pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja secara aktif bagi rakyat juga telah bergeser. Paham bahwa pemerintah wajib untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat sesuai amanah UUD 1945, tidak berlaku lagi. Menurut pemikiran ekonomi pasar bahwa pasarlah yang akan menyediakan lapangan kerja, karena diyakini akan lebih efisien dibanding pemerintah. Dalam paradigma ini, 'Aisyiyah memandang bahwa masyarakat miskin dan penganggur yang memiliki berbagai keterbatasan tidak akan memiliki peluang yang sama. Keluarga miskin masuk dalam putaran lingkaran kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah menjadikan posisi tawar kelompok miskin sangat lemah, sehingga peluang lapangan pekerjaan dan pendapatan juga akan sangat terbatas dan pada

akhirnya tidak mungkin memberikan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi generasi penerusnya.

Masalah kemiskinan yang menjadi pusat perhatian ‘Aisyiyah Kota Makassar bukan semata-mata masalah individual dan sosial, tetapi sudah menjadi masalah politik karena proses pemiskinan secara sistematis. Oleh karena itu, memerlukan paradigma dalam memandang kemiskinan. Paradigma yang berbeda terhadap kemiskinan akan berdampak pada strategi yang berbeda dalam menyelesaikannya. Masalah kemiskinan di Kota Makassar harus dipandang sebagai kemiskinan struktural sehingga strategi penanggulangan tidak semata-mata melakukan program-program *income generating*, karena itu harus dibarengi proses penyadaran kolektif terhadap kelompok miskin dan masyarakat penyandang masalah sosial melalui gerakan memperjuangkan perubahan kebijakan menghentikan kemiskinan dan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Hal ini karena kemiskinan memiliki dampak yang sangat besar terhadap perempuan. Tidak sedikit saat ini dari persoalan ekonomi dan krisis global yang terjadi menyebabkan timbulnya persoalan bagi perempuan. Di antara persoalan yang timbul akibat kemiskinan adalah, tingginya angka kematian ibu; menurunnya anak perempuan yang mengikuti pendidikan formal tingkat sekolah lanjutan; terpusatnya pekerja perempuan di sektor yang rendah pendidikan, rendah keterampilan dan rendah upah, serta mudah terjadi kekerasan terhadap perempuan.

Masalah tersebut merupakan persoalan yang krusial bagi kehidupan manusia. Sebab kemiskinan bukan hanya dipandang sebatas bagian dari aspek ekonomi yang tidak terkait dengan aspek lain. Akan tetapi, problem kemiskinan membawa dampak terhadap aktivitas lain dan menghambat manusia untuk meraih kualitas hidup yang ideal. Karena itu, diperlukan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap individu agar tidak ada hambatan menjalankan kehidupan yang lebih baik dan terjamin setiap warga negara. Sudah selayaknya negara menjamin distribusi kekayaan (sumber daya) kepada seluruh rakyat, yaitu menjamin distribusi yang adil bagi pemenuhan kebutuhan pokok secara keseluruhan.

- b) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen); berdasarkan visi organisasi sebagai medan yang mengikat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran Islam serta memperteguh iman, memperkuat dan mengembangkan ibadah, serta mempertinggi akhlak di dalam mengelola amal usaha di bidang pendidikan.

Visi organisasi yang menjadi medan gerakan semua warga ‘Aisyiyah dalam mengelola amal usaha di bidang pendidikan, seperti dijelaskan oleh Ketua Majelis Dikdasmen, bahwa:

Kota Makassar termasuk salah satu kota di Sulawesi Selatan yang cukup baik dalam hal penyediaan layanan akses pendidikan dasar. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi pendidikan dasar mencapai lebih dari 70 persen baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam menerima pendidikan, bahkan perempuan untuk dapat mengakses pendidikan semakin sulit. Karena itu, saya sebagai penanggung jawab di bidang pendidikan tetap mengarahkan semua warga untuk menjadikan visi ‘Aisyiyah sebagai pedoman dalam mengelola amal usaha pendidikan mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, dengan memberikan kesempatan

yang samabaik laki-laki maupun perempuan memperoleh pendidikan seperti yang diharapkan (hasil wawancara SK, 15 Februari 2012).

Lebih jauh dijelaskan bahwa, dalam hal perbandingannya dengan laki-laki yang tidak mampu membaca, menulis dan/atau berhitung (tidak sekolah): 1 laki-laki buta huruf berbanding dengan 3 perempuan buta huruf. Data lain juga memperlihatkan kecenderungan yang sama, dimana perempuan sangat jauh ketinggalan dalam mengakses pendidikan dibandingkan laki-laki. Senada dengan itu, menurut salah satu pengurus (Wakil Ketua Aisyiyah Kota Makassar, yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan) dalam laporannya tentang pemberantasan buta aksara baik Latin maupun Arab menjelaskan bahwa:

Upaya pengurangan angka buta huruf telah dilakukan. Namun diakui bahwa, representasi perempuan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Bagi perempuan buta huruf (tidak tamat SD), dalam hal kerja selain dibebani kendala gender (karena dia perempuan), maka pekerjaan yang cocok ialah pekerjaan perempuan seperti di bidang garmen, elektronik, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Pekerjaan yang dapat ia peroleh hanyalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kecekatan dan ketelitian, tanpa membutuhkan keahlian atau pendidikan formal (hasil wawancara KJ, tanggal 10 Maret 2012).

Penjelasan di atas tampak bahwa, meskipun UUD 1945 maupun UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional telah memberikan akses yang luas bagi kaum perempuan untuk menikmati pendidikan, namun nilai-nilai (budaya) masyarakat yang masih mendahulukan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan telah berpengaruh sangat besar pada partisipasi perempuan di bidang pendidikan. Kurikulum, buku-buku teks pelajaran sekolah dan praktek pengajaran yang bias gender dan kebijakan umum negara tentang perempuan telah

memperkuat prasangka dan stereotip gender dalam masyarakat. Hal ini berakibat pada terbatasnya akses kaum perempuan pada bidang-bidang pekerjaan yang ada. Untuk meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, diperlukan perubahan nilai-nilai budaya di tingkat masyarakat dan kebijakan yang mengarah pada hilangnya segala bentuk perbedaan peran dan fungsi jenis kelamin serta penstereotipan perempuan.

Masalah pendidikan lainnya adalah mahalnya biaya pendidikan yang sangat variatif di masyarakat yang mengakibatkan masyarakat miskin dan tidak mampu semakin jauh untuk dapat mengakses pendidikan, sehingga tidak sedikit masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pendidikan atau berhenti. Rendahnya persentase pendidikan perempuan, khususnya di Kota Makassar akan mudah terjadi ketimpangan sosial, dimana mereka yang rendah kualitas pendidikannya akan selalu menjadi subordinat atau menjadi sasaran persoalan sosial yang terjadi. Seperti kaum perempuan yang selama ini masih banyak yang sulit mengakses dunia pendidikan akibat berbagai faktor seperti ekonomi, budaya serta sosial.

Munculnya ketimpangan perempuan dalam masalah pendidikan ini, sebagai akibat masih kuatnya budaya patriarkhi dalam masyarakat yang mendiskriminasikan perempuan untuk mengakses pendidikan. Budaya yang dipahami bahwa perempuan bukan pencari nafkah utama dan perempuan sebagai penanggung jawab utama dalam urusan-urusan domestik, maka perempuan ditempatkan sebagai kelompok yang kurang penting mengakses pendidikan. Karena rendahnya tingkat pendidikan tersebut maka berdampak padasebagian

besar perempuan terserap dalam pekerjaan-pekerjaan di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, TKW dengan upah rendah, pedagang kecil, industri rumah tangga, serta buruh rendahan lainnya. Di samping persoalan rendahnya SDM serta proses ketimpangan sosial yang mengiringinya, persoalan lain dalam dunia pendidikan yang memprihatinkan adalah kurangnya korelasi antara sistem pendidikan dengan pembentukan karakter manusia. Dalam hal ini, untuk melahirkan SDM yang kuat, dimulai dari pembentukan karakter manusia yang utuh, sebagai basis pembentukan kepribadian, sikap, dan tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang utama dalam kehidupan.

Kecenderungan yang berjalan selama ini, seakan-akan terjadi jarak antara pendidikan di satu sisi dengan karakter manusia pada sisi lain karena belum terintegrasinya proses dan sistem pendidikan ke dalam setiap aspek kehidupan. Proses dan sistem pendidikan yang dijalankan kemungkinan besar lebih ditekankan pada pembentukan kualitas kognisi dan psikomotorik, terbatas pada kemampuan yang bersifat instrumental. Pendidikan kurang memberikan perhatian terhadap pembentukan afeksi dan *life skill* yang utuh. Sebagai akibatnya subjek didik kurang dibentuk kapasitas dirinya selaku manusia yang berprinsip pada kebenaran, kebaikan, kepatutan, dan nilai-nilai utama dalam hidup.

- c) Majelis Kesejahteraan Sosial; fakta yang menunjukkan bahwa semua warga menjadikan visi organisasi sebagai medan yang menggerakkan berbagai aktivitas amal usaha termasuk bidang kesejahteraan sosial dan penyandang masalah sosial, seperti anak terlantar, anak jalanan, putus sekolah, dan lain-lain dijelaskan oleh

salah satu pengurus Panti Asuhan juga sebagai Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa:

‘Aisyiyah mengelola beberapa Panti Asuhan, selain Panti Asuhan yang dibina oleh Muhammadiyah dalam merumuskan langkah-langkah pembinaan dengan mengarahkan semua warga tetap upaya mewujudkan visi di atas sebagai semua warga untuk mematuhi visi ‘Aisyiyah dalam membina anak-anak panti, meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, serta membangun dan memelihara tempat ibadah, dan amal usaha yang lain (wawancara MS, 15 Maret 2012).

- d) Majelis Kesehatan; fakta yang menunjukkan bahwa visi organisasi yang menjadi medan magnet dalam mengelola amal usaha bidang kesehatan, untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup. Hal ini dijejaskan oleh Ketua Majelis Kesehatan bahwa:

Saya sebagai ketua Majelis Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan, mengarahkan semua pengelola Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA untuk berpegang teguh pada visi organisasi dalam memberikan pelayanan. Kualitas kesehatan masyarakat di Kota Makassar masih sangat memprihatinkan khususnya bagi masyarakat lapisan bawah dan kelompok marginal terutama perempuan. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat tidak terlepas dari kondisi kemiskinan, sehingga tidak dapat menikmati kesehatan yang seharusnya menjadi hak bagi setiap warga masyarakat. ‘Aisyiyah sebagai organisasi dakwah dan sosial, selain visi organisasi sebagai medan pelayanan juga berpegang pada prinsip dasar, yaitu “amar makmuf hani munkar”. Permasalahan dan rendahnya derajat kesehatan perempuan. Akses perempuan terhadap pelayanan reproduksi yang bermutu belum sepenuhnya menjadi prioritas pembangunan selama ini. Akibatnya, angka kematian ibu (AKI) yang disebabkan oleh kehamilan dan persalinan masih tinggi di Kota Makassar (hasil wawancara HD, tanggal 20 April 2012).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, secara medis penyebab kematian ibu di Kota Makassar pada umumnya adalah perdarahan (terutama pasca persalinan), eklampsia, dan pre-eklampsia (tekanan darah tinggi yang terjadi pada kehamilan),

Infeksi, serta persalinan macet. Secara fisik, hal ini terjadi karena masih banyak ibu yang terlalu muda melahirkan, terlalu singkat jarak antara persalinan, terlalu sering melahirkan, serta masih melahirkan pada usia yang sudah terlalu tua.

Senada dengan penjelasan di atas, diperkuat oleh pandangan salah seorang pengurus (Wakil Ketua 'Aisyiyah Kota Makassar) bahwa:

Selain peningkatan angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan yang disebabkan minimnya anggaran yang diperuntukkan untuk penurunan AKI ini masih dibawah satu persen dari APBN dan APBD Kota Makassar. Karena 'Aisyiyah sebagai komponen perempuan Muhammadiyah tetap memiliki komitmen mewujudkan visi organisasi sebagai medan gerakan yang memberi semangat pengelola Rumah Sakit, Rumah Bersalin, dan BKIA. Persoalan tingginya AKI melahirkan tersebut semakin diperparah oleh kuatnya pengaruh budaya patriarki yang melingkupi kehidupan masyarakat (hasil wawancara TS, tanggal 15 Maret 2012).

Selanjutnya dijelaskan bahwa, masyarakat termasuk warga Aisyiyah masih menganut pandangan bahwa hamil dan melahirkan merupakan kodrat perempuan. Oleh karena itu, penderitaan dan kesakitan, bahkan kematian yang dialami perempuan sebagai akibat (resiko) dari fungsi reproduksi juga merupakan "kodrat" yang sudah seharusnya ditanggung oleh kaum perempuan. Sebagai akibatnya, penanganan kesakitan dan penderitaan selama hamil dan penurunan AKI bersalin sangat lambat dan kurang mendapat perhatian masyarakat, termasuk perempuan sendiri.

Problem kesehatan lainnya yang kini menjadi fenomena ;Aisyiyah di Kota ialah menyangkut persoalan Epidemii HIV/AIDS di masyarakat. HIV adalah virus yang ditemukan pada tubuh manusia yang menyebabkan AIDS. HIV merupakan singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* (virus defisiensi imun manusia).

Lebih umum dikenal sebagai virus penyebab menurunnya sistem kekebalan manusia. Sedangkan kata AIDS merupakan singkatan dari *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome*. Secara medis AIDS berarti sindrom kumpulan dari berbagai gejala dan infeksi sebagai akibat dari kerusakan spesifik sistem kekebalan tubuh karena infeksi virus HIV pada tubuh manusia.

Pejelasan di atas diperkuat oleh informan lain, Sekretaris 'Aisyiyah Kota Makassar sebagai berikut:

Para ahli menyebutkan bahwa dibanding laki-laki, risiko terkena HIV pada perempuan jauh lebih besar, terutama apabila berhubungan seks tanpa memakai kondom. Organ-organ reproduksi pada diri perempuan lebih rentan dibanding dengan organ reproduksi laki-laki. Kerentanan ini lebih tinggi terjadi pada perempuan remaja, karena perempuan terhadap virus ini tampak dalam banyak aspek. Perempuan dalam kehidupan sosial sering dinomorduakan dan didiskriminasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksinya. Akibat budaya yang menciptakan ketertutupan perempuan untuk mengungkapkan fakta-fakta biologisnya, berbagai penyakit yang berkaitan dengan organ-organ reproduksinya sering tidak terdeteksi (hasil wawancara DM, tgl. 20 Maret 2012).

Mencermati masalah ini, dalam ranah domestik perempuan rentan terhadap pemaksaan hubungan seks, termasuk dalam banyak kasus oleh suaminya. Perempuan seringkali tidak bisa menolak hubungan suami istri, meski mengetahui suami telah terinfeksi HIV. Karena di ruang publik, perempuan juga seringkali mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Apabila pola hubungan laki-laki dan perempuan masih seperti ini, maka masuk akal kalau banyak perempuan terkena virus HIV. Hal ini lebih membahayakan pada saat hamil. Virus yang ada dalam tubuhnya dapat menular kepada bayinya. Selain itu, anak dan remaja juga sangat

mudah terserang penyakit HIV/AIDS ini, sebagaimana diberitakan oleh salah satu media nasional, hanya dalam tempo empat bulan terakhir ini, terdapat 60 bayi yang positif mengidap virus HIV/AIDS.

- e) Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, dalam merealisasikan program kerja tetap berpedoman pada visi organisasi sebagai medan perjuangan dalam memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah peraikan hidup yang berkualitas. Upaya mewujudkan visi organisasi sesuai dengan permasalahan ekonomi selain masalah kemiskinan yang berdampak luas dalam kehidupan, terkait dengan usaha mikro dan kecil di Kota Makassar, khususnya yang dihadapi oleh perempuan yang mengelola usaha (Amal Usaha 'Aisyiyah). Sektor ekonomi mikro dan kecil merupakan tumpuan kehidupan bagi banyak keluarga lapis bawah dan miskin. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan bahwa:

Saya sebagai penanggung jawab Majelis Ekonomi mengarahkan semua warga untuk mematuhi visi organisasi. Ketika krisis ekonomi tahun 1998 diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), ratusan ribu orang menggantungkan hidupnya pada sektor ekonomi mikro yang kebanyakan dikelola oleh kaum perempuan. 'Aisyiyah Kota Makassar dengan usaha mikro kecil mampu bertahan pada situasi krisis ekonomi dan berperan sebagai penyangga perekonomian masyarakat bawah yang sebagian besar pelakunya adalah perempuan. Walaupun usaha mikro kecil (UMK) menjadi tumpuan masyarakat lapisan bawah, nampaknya kebijakan pemerintah dan implementasi kebijakan belum menyentuh akar persoalan agar benar-benar berpihak pada mereka. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang berdampak pada UMK adalah pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas (hasil wawancara BB, tanggal 20 Maret 2012).

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh perempuan yang mengelola usaha mikro (amal usaha) 'Aisyiyah adalah terkait dengan ketidakadilan gender yang

terjadi di masyarakat pada umumnya maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang bias gender. Hambatan tersebut antara lain akses memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal (perbankan). Ini terjadi dikarenakan berbagai kendala dan keterbatasannya, seperti lokasi kelompok-kelompok perempuan pengusaha mikro yang sangat jauh dari lembaga formal, kegiatan usaha yang masih kecil, sehingga dana tambahan yang dibutuhkan sangat kecil maka tidak akan dilayani oleh lembaga formal, karena tidak efisien. Selain itu, usaha mikro belum memiliki administrasi keuangan yang dikelola dengan baik, sehingga tidak memenuhi standar pembukuan yang disyaratkan oleh lembaga keuangan formal. Persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan merupakan rangkaian masalah yang tidak terpisahkan. Hal ini dipertegas oleh salah seorang informan (Bendahara 'Aisyiyah Kota Makassar), bahwa:

Persoalan ekonomi juga berkaitan sangat erat dengan kemiskinan. Problem ekonomi yang menimpa suatu kelompok keluarga, mendorong setiap keluarga untuk mencari berbagai pilihan yang bisa dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Ketika krisis ekonomi keluarga terjadi, seperti pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh suami, atau pengangguran, maka inisiatif kerja diambil oleh seorang ibu/perempuan untuk menempuh usaha yang mudah dilakukan. Salah satunya adalah menjadi tenaga kerja di luar negeri atau lebih dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Mereka biasanya bekerja di sektor informal dengan gaji yang sangat rendah, seperti pembantu rumah tangga, buruh bangunan, penjaga toko dan sebagainya. Upaya tersebut sebagai bentuk pemahaman visi 'Aisyiyah (hasil wawancara RK, 22 Maret 2012).

Sehubungan dengan itu berbagai masalah pun tidak bisa dihindari, terutama pekerja perempuan, seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, penganiyaan, dan sebagainya. Meskipun demikian halnya yang terjadi, tidak menyurutkan para pekerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Bahkan angka migrasi tenaga kerja

Indonesia ke luar negeri ini semakin meningkat. Hal ini karena problem ketenagakerjaan dalam negeri belum terpecahkan dengan baik khususnya di Kota Makassar.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebagian besar tenaga kerja (buruh migran) berada pada usia produktif (di atas 18 - 35 tahun), namun banyak yang berada pada usia anak-anak. Kenyataan ini terjadi karena banyak yang memalsukan identitas yang sebenarnya. Oleh karena itu, kekerasan dalam proses migrasi mendapat perhatian serius pemerintah termasuk 'Aisyiyah terutama perempuan sebagai tenaga kerja di luar negeri dengan membuat target jumlah pengiriman tenaga kerja tanpa diikuti dengan perbaikan perlindungan. Sementara keluarga menjadikan perempuan sebagai tumpuan untuk menyelamatkan kebutuhan ekonomi keluarga, sebagian masyarakat melalui calo yang mengambil manfaat atas proses pengiriman tenaga kerja secara illegal dan tidak bertanggung jawab.

Di satu sisi buruh migran adalah penyumbang devisa yang sangat besar, tapi tidak diperlakukan sebagaimana layaknya warga Negara. Mereka sering sekali menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mulai dari penipuan upah, pelecehan seksual, penganiayaan, hingga pembunuhan. Semakin jelaslah bahwa proses migrasi ini rentan dengan eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan perempuan. Lemahnya perlindungan dan penanganan bagi perempuan yang bermigrasi yang menjadi korban eksploitasi, kekerasan dan perdagangan menjadi siklus kekerasan yang sistematis. Arus migrasi perempuan ke luar negeri

sebagai akibat program pembangunan yang dilakukan pemerintah masih mengabaikan kontribusi ekonomi perempuan.

- f) Majelis Pembinaan Kader, sebagai bukti bahwa visi organisasi sebagai medan yang memberi arahan dan semangat untuk membina Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Puteri untuk menjadi pelopor, pelangsup, dan penyempurna gerakan 'Asiyiyah. Masyarakat Kota Makassar pada dasarnya adalah masyarakat yang religius dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Masyarakat religius, nilai-nilai agama terpancar dalam kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi kehidupan dalam keluarga, masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, misi organisasi kehidupan masyarakat menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan maraknya kegiatan-kegiatan yang berdimensi ibadah di masyarakat seperti kegiatan-kegiatan pengajian, majelis taklim, membangun musholla, masjid, hari-hari besar Islam dan lain-lain. Beberapa permasalahan dalam praktek kehidupan beragama yang memerlukan perhatian AMM Puteri sebagai bentuk atas pemahaman visi organisasi, diungkapkan oleh Ketua Majelis Pembinaan Kader sebagai berikut:

Saya sebagai penanggung jawab bidang pengkaderan 'Aisyiyah, selalu menekankan visi organisasi sebagai medan pergerakan semua warga AMM Puteri dalam mengatasi:

- (1) Lahirnya kelompok-kelompok sempalan, aliran keagamaan yang berbeda dari arus besar Islam yang berkembang di Indonesia pada umumnya dan Kota Makassar pada khususnya yang membelokkan paham keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan jauh dari prinsip-prinsip aqidah Islam;
- (2) Konflik-konflik kelompok keagamaan yang berbeda paham secara tajam dan menimbulkan perpecahan dalam tubuh umat Islam;

- (3) Penyalahgunaan agama yang mendorong dan membawa kepada banyak penyimpangan, kekerasan, dan menjadikan agama sebagai komoditas politik, ekonomi untuk kepentingan individu, kelompok, dan golongan;
- (4) Pandangan keagamaan yang menimbulkan bias gender serta berbaur dengan budaya masyarakat, sehingga melahirkan diskriminasi dan ketidakadilan perempuan;
- (5) Pandangan keagamaan yang cenderung radikal, karena radikalisme keagamaan yang sering bersikap eksklusif, mengklaim pandangannya yang paling benar dan membawa muatan konflik dengan pihak lain yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bahwa, nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Qur'an dan Sunnah adalah membawa perdamaian, toleransi, dan ukhuwah Islamiyah;
- (6) Praktek keagamaan yang penuh simbol-simbol dan semarak secara ritual, tidak dibarengi dengan pemaknaan secara substantif, sehingga membawa kesalehan sosial dan amal yang bersifat mencerahkan;
- (7) Pemahaman dan pengamalan keagamaan yang kurang peduli dengan masalah-masalah kemasyarakatan dalam menghadapi kemiskinan, kekerasan, persoalan perempuan dan anak, serta masalah sosial lainnya (hasil wawancara SW, tanggal 20 Maret 2012).

Menghadapi berbagai persoalan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Di satu pihak diperlukan penanaman pemahaman keislaman yang mendalam, luas, dan menyeluruh sehingga ajaran agama Islam tidak dipahami secara parsial. Di pihak lain diperlukan pemecahan berbagai persoalan secara bijak baik sosial, ekonomi, dan politik terkait dengan keberagamaanumat yang berpengaruh satu sama lain.

- g) Majelis Hukum dan HAM (Hak Azasi Manusia), menjadikan visi sebagai medan pergerakan dalam meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran, serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Indonesia sebagai negara sedang berkembang, persoalan perempuan dan anak ialah persoalan yang selalu muncul. Salah satunya adalah masalah kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Perkembangan terkini kekerasan terhadap

perempuan penting sebagai sebuah ukuran kemajuan pemenuhan HAM. 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah juga memiliki perhatian terhadap kekerasan berbasis gender telah diakui sebagai bagian dari pelanggaran HAM serta melanggar nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Diantara masalah yang sering muncul dan mendapat perhatian dari 'Aisyiyah, seperti dijelaskan oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM, bahwa:

Majelis Hukum dan HAM dibentuk di era reformasi sebagai wujud kepedulian 'Aisyiyah terhadap masalah yang berkembang terkait dengan masalah hukum dan HAM, terutama kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Intensitas kekerasan terhadap perempuan dinilai sangat tinggi. Fakta menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan dominasi dan diskriminasi laki-laki terhadap perempuan (hasil wawancara JJ, 22 Maret 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa, bentuk kekerasan terhadap perempuan secara umum dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu: (1) kekerasan dalam rumah tangga (ranah domestik), dan (2) kekerasan di luar rumah tangga (ranah publik). Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga (domestik), adalah salah satu bentuk ketidakadilan jender (*gender inequalities*). Ketidakadilan jender dalam realitas sehari-hari melahirkan pelbagai bentuk, seperti pemiskinan ekonomi, perkosaan, prostitusi, penyunatan anak wanita, kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi keluarga berencana, dan dalam bentuk pelecehan seksual yang banyak terjadi akhir-akhir ini.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang rumit dan kompleks. Banyak kasus tentang KDRT, tetapi hanya sedikit yang

terungkap. Berbagai alasan mengapa sulit memperoleh data: (1) terjadi dalam rumah tangga sehingga sulit dipantau dan terabaikan; (2) masyarakat memandang persoalan ini sebagai masalah internal keluarga (persoalan privat) sehingga tidak perlu campur tangan dari pihak lain; dan (3) sebagian besar masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga, sebagai bunga-bunga hidup berumah tangga.

Fenomena lain terkait dengan kekerasan dalam ranah publik adalah pelecehan seksual, pemerkosaan, penjualan anak perempuan untuk pekerja seks komersial (PSK), eksploitasi, dan sebagainya. Fenomena kedua ini semakin meningkat, bahkan persoalan kekerasan dalam ranah publik banyak terjadi di lembaga pendidikan, kantor dan lebih ironisnya terjadi dalam lembaga perwakilan rakyat. Tentu saja jika dilihat fenomena tersebut sangat banyak dan terjadi dimana-mana. Namun, pertanyaan yang muncul adalah mengapa kekerasan terhadap perempuan sering terjadi. Setidaknya ada beberapa faktor, yaitu: (1) ketimpangan gender; (2) pemahaman terhadap ajaran Islam yang bias; (3) tatanan hukum yang belum memadai; dan (4) nilai-nilai patriarki yang begitu dominan.

Dalam konteks ini 'Aisyiyah memberi apresiasi atas perkembangan yang signifikan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penegakan hak-hak perempuan termasuk penanganan dan penghapusan kekerasan atas perempuan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Setidaknya ada beberapa kebijakan telah dihasilkan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kebijakan tersebut, antara lain UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU No 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornografi.

Bentuk kekerasan lain yang sering terjadi dan mendapat perhatian dari ‘Aisyiyah adalah fenomena kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang dilakukan kepada anak biasanya dalam berbagai bentuk, antara lain kekerasan seksual yang meliputi sodomi, pemerkosaan, pencabulan atau hubungan seksual sedarah. Bentuk kekerasan lainnya meliputi kekerasan fisik seperti pekerja anak, pemukulan, penganiyaan, dan lain-lain. Selain itu, kekerasan dalam bentuk psikis, ialah dipermalukan, dihina, dikucilkan, diancam (ditolak), selanjutnya kekerasan dalam bentuk penggunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya. Semua fenomena ini menjadi bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak yang sering muncul kepermukaan. Kemudian dijelaskan oleh Wakil Sekretaris ‘Aisyiyah, bahwa:

Bentuk kekerasan terhadap anak selain terjadi dalam lingkungan keluarga, juga terjadi di lingkungan sosial atau ranah publik. Di Kota Makassar, bentuk kekerasan terhadap anak ini selalu menjadi isu utama yang muncul dalam masyarakat. Hampir tiap tahun, jumlah kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan. Maraknya peristiwa kekerasan yang terjadi pada anak sesuai pengalaman saya sebagai pengurus yang sering menangani kasus kekerasan yang dialami anak terutama yang ditangani ‘Aisyiyah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ada kultur kekerasan yang sangat kuat di sebagian masyarakat, dimana anak dilihat sebagai milik mutlak yang harus takluk untuk *menggayuh* keinginan orang dewasa. Anak menjadi target dalam rangka memenuhi ambisi orang dewasa, dan ketika tidak bisa memenuhi anak akan diperlakukan dengan kekerasan (hasil wawancara RD, tanggal 17 Maret 2012).

Tindakan kekerasan terhadap anak ini tidak hanya di dalam rumah, atau komunitas tertentu saja, bahkan di sekolah, dimana anak mestinya memperoleh jaminan rasa aman, terjadi juga praktek kekerasan. Selain itu, masih banyak guru

yang menganggap, kekerasan adalah bagian dari proses pendidikan. Mereka lupa, atau mungkin tidak memahami bahwa dasar pendidikan adalah cinta. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan komitmen yang dibangun pemimpin dan pengelola amal usaha 'Aisyiyah sejak usia dini (PAUD dan TK), dengan simbol-simbol: Jangan mendidik, jangan mengajar, bila gelora hatinya bukan gelora cinta, sebaliknya gelora dendam dan kebencian.

Terkait dengan latar belakang munculnya perilaku represif terhadap anak, faktor lain yang juga turut mendukung terjadi kekerasan terhadap anak antara lain: immaturitas/ketidakmatangan orang tua, kurangnya pengetahuan bagaimana menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis pada kemampuan dan perilaku anak, pengalaman negatif masa kecil orang tua, isolasi sosial, problem rumah tangga, serta problem obat-obat terlarang dan alkohol. Ada orang tua yang tidak menyukai peran sebagai orang tua sehingga sering terlibat pertentangan dengan pasangan dan yang menjadi sasaran amarah dan kebencian.

- h) Lembaga Penelitian dan Pengembangan, bahwa visi organisasi sebagai medan pergerakan dalam melakukan tindakan meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian. Realitas yang menunjukkan bahwa, semua warga termasuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah Kota Makassar menjadikan visi organisasi sebagai medan yang mengikat dalam melaksanakan setiap aktivitas penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap isu-isu yang berkembang, seperti perdagangan manusia (*trafficking*) merupakan bentuk

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan melanggar nilai-nilai agama. Lebih lanjut dikemukakan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan, bahwa:

Masalah perdagangan manusia menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan dan kompleks. Hal ini sebenarnya menjadi tugas Majelis Hukum dan HAM, tetapi saya sebagai penanggung jawab lembaga yang membidangi penelitian dan pengembangan merasa perlu dan terpanggil untuk melakukan kajian terhadap masalah ini. Hal ini karena tidak mudah mengidentifikasi kegiatan perdagangan perempuan, sebab pelakunya seringkali merupakan sindikat yang terorganisir rapi dan berkedok sebagai pencari tenaga kerja legal. Umumnya, mereka datang untuk menawarkan pekerjaan, seperti menjadi TKW di luar negeri (sebagai *migrant worker*), pekerja industri dan pekerjaan lainnya. Mereka melakukan operasinya dengan cara merayu, membujuk, dan janji-janji muluk yang menggiurkan, gaji besar, hidup senang, dan sebagainya. Namun, kenyataan sebaliknya (hasil wawancara MR, tanggal 20 Maret 2012).

Perdagangan perempuan dan anak jelas adalah tragedi kemanusiaan yang berlangsung rapi dan terorganisir, namun persoalan ini tidak mendapat perhatian serius, terutama dari kalangan pemerintah, sehingga upaya untuk menghentikan perilaku biadab ini masih menjadi impian kosong. Demikian, 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan yang memiliki komitmen, visi, dan tujuan yang jelas dapat memahami bahwa perdagangan perempuan dan anak seringkali melibatkan sejumlah orang, mulai dari perekrut yang datang ke desa mencari perempuan dan anak-anak sampai kepada orang terakhir yang membeli atau menerima korban, seperti pemilik tempat kerja paksa, atau orang yang menahan orang tersebut dalam kondisi seperti perbudakan. Umumnya mereka ditempatkan atau diperdagangkan dalam kondisi yang sangat eksploitatif dan kejam, seperti dalam industri garmen, pertanian, perikanan, perkebunan, mengemis, dan seks, termasuk dalam bentuk kerja domestik sebagai pembantu rumah tangga.

Timbulnya bentuk kejahatan *trafficking* ini kebanyakan akibat kaum perempuan memilih meninggalkan rumah dan keluarganya untuk bermigrasi dengan alasan ekonomi, untuk meningkatkan pendapatan bagi keluarga, membayar uang sekolah anaknya, membayar hutang, membayar biaya perawatan orang tua yang sakit berkepanjangan, membeli sebidang tanah untuk digarap sebagai sumber kehidupan, dan membangun rumah tempat tinggal yang lebih layak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa umumnya perempuan bermigrasi dengan harapan dapat memperbaiki kondisi hidup, khususnya untuk masa depan anak-anak mereka.

Selain itu, globalisasi dalam bidang ekonomi telah mengubah pola perburuhan di seluruh dunia. Kini peluang lebih terbuka untuk lalu lintas arus barang dan produk, dan lebih terbuka peluang bagi buruh untuk bermigrasi kerja ke negara dengan ekonomi yang lebih maju. Sayangnya, hal ini dapat menciptakan situasi dimana majikan memperoleh keuntungan lebih besar dengan mempekerjakan buruh migran dari negara lebih miskin. Karena itu, berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global seperti telah diuraikan di atas.

Wujud kepedulian dan komitmen 'Aisyiyah terhadap visi organisasi sebagai medan yang menggerakkan semua warga tidak terlepas dari latarbelakang lahirnya 'Aisyiyah adalah untuk keselamatan umta terutama kaum wanita sebagai masyarakat utama tiang Negara. Seperti diketahui bahwa kaum wanita rusak maka rusaklah Negara. Keadaan masyarakat menjelang abad ke XX yang percaya tahyul, bid'ah dan

khurafat, sehingga jauh dari tuntunan ajaran Islam yang sebenarnya. Sehubungan dengan itu, menurut penjelasan Ketua Majelis Pembinaan Kader, bahwa:

Sejak lahirnya Aisyiyah dengan visi organisasi yang lebih domain dalam bidang sosial dan keagamaan mengingatkan kepada semua warga agar tidak membawa nama organisasi dalam kegiatan politik praktis. Hal ini karena di khawatirkan menimbulkan perpecahan umat. Warga 'Aisyiyah bebas memilih orang yang sesuai dengan hati nurani. Terkait dengan hak politik 'Aisyiyah beliau mengingatkan semua warga untuk menggunakan hak pilihnya sebagai simbol tanggung jawab terhadap perubahan bangsa dan negara. Sebagai warga Negara yang baik perlu menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya karena merupakan sarana untuk mencari pemimpin yang baik (hasil wawancara SW, tanggal 20 Maret 2012).

Sebagaimana diketahui bahwa, salah satu pengurus 'Aisyiyah Kota Makassar mencalonkan diri sebagai DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004 dan 2009, namun belum berhasil. Hal ini perlu ditegaskan sebagai bentuk partisipasi 'Aisyiyah dalam mendorong anggota dan/atau pengurus yang berkiprah dalam dunia politik agar tetap istiqamah bahwa setelah duduk dalam legislatif harus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan tetap dalam koridor visi 'Aisyiyah. Dengan demikian simbol yang digunakan dalam hal politik warga 'Aisyiyah, adalah "Sukseskan pemilu legislatif dan jadilah warga Negara yang baik dan bertanggung jawab".

Seiring dengan perkembangan dan perubahan yang dialami 'Aisyiyah Kota Makassar dilihat dari sisi kemandirian melalui visi organisasi sebagai medan pergerakan yang mengikat semua warga, juga dijelaskan oleh Ketua Lembaga Kebudayaan, yang merupakan salah satu lembaga yang dibentuk seiring dengan perkembangan dan perubahan tersebut, bahwa:

Lembaga Kebudayaan, seperti halnya majelis dan lembaga “Aisyiyah lainnya dalam merealisasikan program kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati, saya selalu mengarahkan semua anggota untuk tetap menjadikan visi organisasi sebagai medan yang memberi semangat bagi warga untuk meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan komunikasi, ukhuwah Islamiah, kerjasama berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri (hasil wawancara AA, tanggal 12 April 2012).

Berdasarkan penjelasan dan uraian terdahulu tentang medan visional ‘Aisyiyah Kota Makassar, maka dapat ditegaskan bahwa semua anggota dan elemen dalam organisasi ‘Aisyiyah menjadikan perinsip dasar, “amar makruf nahi munkar”, dan visi utama “terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” sebagai medan pergerakan, perjuangan, serta tujuan bersama demi tercapainya perinsip dasar dan visi utama yang dimaksud. Dengan demikian, kemandirian ‘Aisyiyah dilihat dari visi organisasi sejak awal hingga sekarang karena adanya perinsip dasar organisasi dan visi utama yang telah dipahami bersama oleh semua anggota, serta dapat mengilhami setiap gerakan, tindakan, dan usaha yang dilakukan pimpinan, pengurus, dan pengelola amal usaha ‘Aisyiyah Kota Makassar sehingga terus bertahan dan mandiri sebagaimana yang diharapkan.

Fakta yang dapat ditunjukkan sesuai hasil penelitian, yaitu antara lain: setelah berdiri Tahun 1926, ‘Aisyiyah Kota Makiassar terus berjuang untuk kemajuan perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga menjadi saksi sejarah bagi perkembangan umat manusia dengan berkiprah amaliah di berbagai bidang kehidupan. Setelah kemerdekaan, ‘Aisyiyah Kota Makassar memasuki babak baru dalam perjalanan dan perjuangan yang penuh dinamika sejak masa Orde Lama,

Orde Baru, dan reformasi. Gerakan 'Aisyiyah dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan fungsi dan peran serta memperluas jaringan kerja dalam meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia, khususnya di Kota Makassar.

Realitas lain terkait dengan visi organisasi yang dapat direalisasikan di dalam mengelola amal usaha 'Aisyiyah, sebagaimana dikemukakan salah seorang pengurus yang juga sebagai Wakil Ketua PDA Kota Makassar, yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pembinaan Panti Asuhan (PA), mengkoordinir pelaksanaan program kerja Majelis Dikdasmen dan Lembaga Kebudayaan, menjelaskan bahwa :

Berdasarkan visi organisasi, saya sebagai penanggung jawab dalam pembinaan PA dimana 'Aisyiyah membina beberapa panti, antara lain: Panti Asuhan Ummu Aiman di jalan Beruang, dan Panti Asuhan Sejati di jalan Cakalang Kota Makassar, mengarahkan semua warga agar dalam membina dan mengasuh anak-anak panti tetap berpedoman pada visi 'Aisyiyah sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, dalam hal ini tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar- benarnya (hasil wawancara RB, tanggal 17 Februari 2012).

Pernyataan di atas menegaskan kembali bahwa, semua pengurus dan anggota 'Aisyiyah Kota Makassar dalam merealisasikan program kerja yang telah ditentukan tetap dalam satu komitmen, satu prinsip, dan satu tujuan yang dirangkul dalam satu visi bersama sehingga menuntun semua unsur dalam bergerak dan bertindak bersama di bidang pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, gerakan dakwah yang dilakukannya telah membentuk akhlak, keperibadian, dan kecerdasan masyarakat sebagai bagian dari visi ideal membentuk masyarakat madani, yakni masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Namun demikian masih terdapat berbagai masalah yang perlu dihadapi dan dijawab dengan

langkah-langkah kegiatan yang sistematis sehingga 'Aisyiyah dalam melaksanakan gerakannya tetap menjadi pembawa risalah *rahmatan lil-'alamin* dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dalam kehidupan umat Islam khususnya dan masyarakat Kota Makassar umumnya.

Demikian halnya di bidang pendidikan, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), bahwa:

'Aisyiyah Kota Makassar sebagai salah satu ortom Muhammadiyah dalam mengelola amal usaha di bidang pendidikan mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, sampai SMA/SMK dan Madrasah Aliyah (MA) tetap berpegang teguh visi organisasi sebagai medan yang memberi petunjuk dan arahan sehingga semua warga memahami dan mewujudkan visi tersebut dalam menggerakkan sektor pendidikan yang dikelola 'Aisyiyah sehingga akan tercipta tunas-tunas muda 'Aisyiyah yang siap melanjutkan visi organisasi di masa mendatang (hasil wawancara SK, tanggal 22 Februari 2012).

Pernyataan di atas diperkuat oleh Ketua Lembaga Kebudayaan PDA Kota Makassar, bahwa peningkatan fungsi dan peran 'Aisyiyah baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif selain didasarkan atas prinsip dasar dan visi ideal gerakan yang menjadi bingkai perjuangan, juga dikembangkan atas respon atau antisipasi terhadap berbagai masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga 'Aisyiyah terus eksis, bertahan dan mandiri karena mampu memanfaatkan faktor-faktor yang menjadi kelebihan, kelemahan, peluang, dan tantangan dimana visi organisasi sebagai medan sekaligus acuan dalam menentukan langkah-langkah 'Aisyiyah baik yang bersifat strategis maupun operasional.

Demikian halnya pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Kesehatan 'Aisyiyah Kota Makassar: terkait dengan visi organisasi sebagai medan pergerakan

pengurus dan anggota dalam mengelola amal usaha di bidang kesehatan, menjelaskan bahwa:

Saya sebagai penanggung jawab Majelis Kesehatan ‘Aisyiyah dalam mengelola Rumah Sakit, Rumah Bersalin, dan BKIA yang dibina ‘Aisyiyah mengarahkan semua warga untuk mematuhi visi organisasi. Dalam hal ini, semua tindakan pelayanan yang dilakukan oleh petugas kesehatan harus sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan visi tersebut, khususnya kesehatan ibu dan anak sebagai fungsi utama yang menjadi tugas pokok Majelis Kesehatan, yang harus diprioritaskan sehingga mengembangkan program kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik secara internal dengan Muhammadiyah maupun secara eksternal dengan Pemerintah (Dinas Kesehatan) sebagai medan pergerakan atau lingkup kerja yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan visi organisasi ‘Aisyiyah (hasil wawancara HD, tanggal 12 Maret 2012).

Berdasarkan penjelasan, uraian, dan pernyataan beberapa informan di atas, tentang keseluruhan tindakan, gerakan, dan dinamika organisasi yang berkembang didasarkan atas visi organisasi yang menjadi medan magnet yang mengikat semua warga sehingga tercipta medan visional ‘Aisyiyah Kota Makassar dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, keseluruhan penjelasan dari informan terkait dengan kemandirian ‘Aisyiyah dapat disimpulkan bahwa semua warga ‘Aisyiyah Kota Makassar menjadikan visi organisasi sebagai medan yang mengikat mereka dalam mengelola dan membina amal usaha, sehingga dari fase ke fase tercipta komitmen dan kerjasama semua warga tetap terpelihara dalam visi organisasi yang telah ditentukan.

2. Paradoks Independensi ‘Aisyiyah Kota Makassar

‘Aisyiyah berada dalam posisi paradoks independensi, artinya di satu sisi ‘Aisyiyah adalah sistem yang otonom; yaitu sistem yang terdiri atas unit-unit atau

bagian-bagian yang utuh dalam mengambil keputusan-keputusan secara otonom dan diaplikasikan secara otonom untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditentukan melalui program-program kerja dan kegiatan-kegiatan bersama untuk mewujudkan visi tersebut. Namun, di sisi lain, 'Aisyiyah merupakan bahagian dari sistem yang lebih besar, yaitu Muhammadiyah terutama dalam merealisasikan nilai-nilai dan norma-norma yang telah digariskan visi organisasi.

Data dan informasi yang menunjukkan bahwa, 'Aisyiyah adalah sistem yang otonom dalam mengambil keputusan-keputusan secara mandiri karena berada dalam posisi paradoks (mendua), terutama memiliki kewenangan, struktur, jaringan, dan unit-unit yang utuh dalam mengelola amal usaha secara otonom untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, khususnya terkait dengan prosedur dan mekanisme kewenangan 'Aisyiyah. Keputusan-keputusan yang diambil secara otonom terhadap prosedur dan mekanisme kewenangan 'Aisyiyah tersebut, untuk :

- a. Menguatkan fungsi dan peran 'Aisyiyah sebagai gerakan perempuan di bidang da'wah keagamaan, social, dan kemasyarakatan.
- b. Menguatkan posisi dan peran 'Aisyiyah sebagai kekuatan strategi di dalam memberi kontribusi dinamika pencegahan dan perberdayaan.
- c. Mengembangkan sistem kepemimpinan kolektif, kolegial, visioner, efektif, dan responsif.
- d. Mengembangkan manajemen organisasi yang baik dan dinamis, sehingga mampu mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.

- e. Mengembangkan sistem koordinasi dan komunikasi efektif antar pimpinan dan jajarannya secara kontinyu dan dinamis.
- f. Mengembangkan komunikasi dan kerjasama organisasi yang semakin luas dengan berbagai pihak terkait.
- g. Mengembangkan jumlah cabang dan ranting sesuai pengembangan kecamatan sehingga berdiri cabang-cabang dan ranting-ranting baru sebagai basis gerakan di tingkat akar rumput.

Penjelasan di atas dapat dipertegas pula oleh Ketua dan Sekretaris 'Aisyiyah Kota Makassar bahwa, dalam posisi yang paradoks 'Aisyiyah tetap memiliki kewenangan dalam merealisasikan program kerja 5 (lima) tahunan (2010 – 2015) sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing unit (amal usaha), bertujuan untuk “Meningkatkan kualitas pimpinan dalam mengelola dan mengarahkan organisasi serta kualitas, komitmen, wawasan, visi dan misi kemampuan operasional kader sebagai gerakan”. Kegiatan yang dapat dilakukan meliputi: (1) mendata dan memberdayakan potensi yang dimiliki pimpinan dan anggota; (2) seminar pemberdayaan perempuan, dan (3) pelatihan kepemimpinan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, 'Aisyiyah sebagai sistem yang otonom dalam menjalankan keputusan di atas adalah bertujuan untuk:

“Meningkatkan kualitas pimpinan dalam mengelola, mengarahkan, dan menggerakkan organisasi, serta meningkatkan komitmen, wawasan, dan kemampuan operasional kader 'Aisyiyah terhadap visi organisasi”. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung posisi 'Aisyiyah sebagai sistem yang otonom adalah: (1) menyusun wilayah pembinaan cabang-cabang; (2) kunjungan pimpinan, pembinaan, dan supervise; dan (3) mendorong berdirinya

cabang-cabang dan ranting-ranting dalam wilayah kewenangan 'Aisyiyah Kota Makassar (hasil wawancara CA dan DM, tanggal 17 Februari 2012).

Selanjutnya contoh lain tentang keputusan-keputusan yang diambil menunjukkan bahwa posisi 'Aisyiyah adalah paradoks seperti pengurus di masing-masing majelis dalam menentukan langkah-langkah pengembangan organisasi, terutama terkait dengan majelis yang dipimpin misalnya; Majelis Dikdasmen mengambil keputusan tentang pengembangan TK Bustanul Atfal, keputusan tentang kurikulum SD, MI, SMP, dan MTs yang dibina 'Aisyiyah secara otonom dan diaplikasikan secara otonom oleh pengelola amal usaha tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Majelis Dikdasmen bahwa:

Majelis Dikdasmen memiliki kewenangan seperti halnya majelis lain, dalam mengambil keputusan tentang pengembangan pendidikan yang akan diaplikasikan secara otonom. Namun demikian, tetap mengacu pada sistem yang berlaku secara nasional terutama sistem pendidikan di Muhammadiyah. Demikian pula tentang kurikulum, Majelis Dikdasmen mengambil keputusan secara otonom dalam menyusun kurikulum SD, MI, SMP, dan MTs sesuai dengan tingkat jenjang pendidikan yang dibina 'Aisyiyah dan menjadikan KBK dan KTSP sebagai dasar penyusunan kurikulum, serta ketentuan yang digariskan oleh Muhammadiyah (hasil wawancara SK, 22 Februari 2012).

'Aisyiyah menyadari bahwa, posisi paradoks dalam kemandirian bidang pendidikan adalah suatu proses panjang bukan bawaan atau sesuatu yang datang secara simultan. Ada peroses yang dibutuhkan yaitu di satu sisi dia otonom, namun di sisi yang lain tetap mempertimbangkan kekuatan (sistem) yang lebih besar (Muhammadiyah dan Pemerintah). Proses ini berlangsung secara terus menerus, konsisten, dan tetap dalam kolidor organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Demikian halnya, Majelis Kesehatan dalam mengambil keputusan-keputusan tentang pengelolaan dan pengembangan Rumah Sakit, Rumah Bersalin, dan BKIA terutama langkah-langkah yang diambil agar pasien dan warga yang berobat mendapat pelayanan seperti yang diharapkan, semua keputusan ditentukan secara otonom untuk dilaksanakan secara otonom. Namun, tidak berarti mengabaikan kebijakan-kebijakan yang berlaku umum baik oleh Muhammadiyah maupun Pemerintah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Majelis Kesehatan 'Aisyiyah Kota Makassar, yang bertanggung jawab dan membina beberapa amal usaha, menjelaskan bahwa:

Dalam hal pengabilan keputusan tentang pelayanan kesehatan yang akan diterapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki 'Aisyiyah adalah secara otonom, karena yang paling memahami proses pelayanan adalah pengurus dan anggota yang memiliki latar belakang pendidikan serta pengalaman bidang kesehatan, termasuk Rumah Sakit dan Rumah Bersalin yang dikelola oleh Muhammadiyah, seperti Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadidjah di Jalan Kartini, dan Rumah Sakit Sitti Khadidjah III di Jalan Veteran Selatan. Dalam hal ini, segala keputusan dan kebijakan tentang pelayanan ditentukan oleh 'Aisyiyah dengan tetap berkoordinasi dengan Muhammadiyah (hasil wawancara HD, 12 Maret 2012).

Data dan informasi yang menunjukkan bahwa, 'Aisyiyah merupakan bahagian dari Muhammadiyah dan keputusan-keputusan yang ditetapkan secara otonom, kemudian diintervensi oleh Muhammadiyah antara lain: (1) Keputusan tentang pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Dalam hal ini, Majelis Dikdasmen 'Aisyiyah mengambil keputusan tentang pengelolaan pendidikan dengan tetap mengacu kepada standar yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah, di samping Standar Nasional (SN) yang ditentukan oleh UU. Misalnya, standar penilaian, standar

kelulusan, standar kurikulum, dan kompetensi guru. Apabila Majelis Dikdasmen 'Aisyiyah menetapkan sebuah keputusan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan di atas, maka Muhammadiyah melakukan intervensi terhadap keputusan tersebut, agar 'Aisyiyah tetap memelihara posisi paradoks.

Demikian pula keputusan-keputusan yang diambil secara otonom oleh majelis lain, seperti penjelasan dari Ketua Majelis Kesehatan bahwa:

'Aisyiyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah tetap memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri pengelolaan amal usaha, namun tetap dalam koordinasi Muhammadiyah. Misalnya, dalam hal memberikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan warga Muhammadiyah, tanpa menyalahi prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan. Apabila ada keluhan dari warga bahwa keputusan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, maka Muhammadiyah melakukan intervensi terhadap keputusan itu, agar 'Aisyiyah lebih memperhatikan warga Muhammadiyah sebelum warga lain demi menjaga kemandirian dan keberlanjutan organisasi (hasil wawancara HD, 12 Maret 2012).

Demikian, para pimpinan dan semua pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap majelis sesuai dengan struktur di tingkat cabang dan ranting berhubungan satu sama lain, dimana 'Aisyiyah sebagai organisasi otonom untuk mencapai tujuan organisasi tetap memelihara posisiparadoks dengan Muhammadiyah. 'Aisyiyah sebagai bagian dari sistem menciptakan sikap kemandirian dalam menjalankan roda organisasi, sehingga mampu menjaga dan memelihara posisi paradoks. Dengan kata lain, semua anggota dan pengurus 'Aisyiyah dituntut untuk membangun kemandirian dengan memberikan kontrol secara berkala dan berkelanjutan.

Selanjutnya keputusan yang menunjukkan sebagai posisi paradoks, kapan ‘Aisyiyah otonom, dan kapan diintervensi oleh Muhammadiyah. Hal ini seperti dikemukakan oleh Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial bahwa:

Saya sebagai penanggung jawab Majelis Kesejahteraan Sosial di dalam mengelola amal usaha ‘Aisyiyah, khususnya Panti Asuhan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku termasuk kebijakan tentang pembinaan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah bahwa, pembinaan yang dilakukan harus mengutamakan warga Muhammadiyah & ‘Aisyiyah (anak yatim, piatu, dan/atau yatim piatu, serta anak-anak yang kurang beruntung/tidak mampu karena sesuatu sebab (penyandang masalah sosial), sebelum warga lain (bukan Muhammadiyah). Apabila kebijakan atau ketentuan tersebut tidak diperhatikan atau diabaikan oleh pengelola panti, maka Muhammadiyah sewaktu-waktu mengintervensi atau tidak memberi dukungan terhadap ‘Aisyiyah. Dengan sendirinya kemandirian atau posisi paradoks ‘Aisyiyah akan terganggu. Demikian kondisi tersebut terus berjalan (hasil wawancara MS, tanggal 20 Maret 2012).

Kebijakan lain yang menunjukkan bahwa, ‘Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah yang sewaktu-waktu dapat diintervensi apabila ‘Aisyiyah mengambil keputusan secara otonom yang tidak sesuai dengan kebijakan Muhammadiyah, adalah berkaitan dengan upaya mewujudkan masyarakat madani sebagai salah satu indikator untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya pengembangan program-program kerja setiap majelis. Dalam hal ini, relevansi indikatornya termanifestasi dalam amal usaha yang dibina ‘Aisyiyah ditinjau dari prinsip-prinsip organisasi yang dianut oleh masyarakat madani sebagai perwujudan identitasnya secara material.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa realisasi program kerja ‘Aisyiyah Kota Makassar periode (2010 – 2015) melalui tujuh majelis dan dua lembaga yang telah disebutkan sebelumnya, terkait dengan masyarakat madani yang dicita-citakan dan

terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar- benarnya sebagai visi utama ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah. Di samping itu, pelaksanaan nilai-nilai dan norma-norma yang partisipatif dan otonom oleh warga ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi yang memiliki tatanan yang menjamin semua anggota untuk mampu mengekspresikan diri, mengembangkan minat, saling menukar informasi, memediasi perbedaan-perbedaan dan menciptakan pola-pola hubungan yang stabil. Oleh karena itu, warga juga tertata dalam organisasi modern yang mengembangkan nilai-nilainya sendiri secara konsisten.

Posisi ‘Aisyiyah dalam mengelola organisasi yang sewaktu-waktu di intervensi oleh Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat madani serta memelihara otonomi sebagaimana dikemukakan oleh salah satu Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, membidangi dakwah dan kerjasama antar lembaga bahwa “tercapainya amal usaha Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah secara berkualitas menuju terciptanya masyarakat madani. Selanjutnya ditegaskan bahwa, ‘Aisyiyah sebagai bahagian dari Muhammadiyah dalam penjabaran secara berkesinambungan visi idealnya untuk tegaknya agama Islam berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadist. Kemudian disebutkan bahwa:

‘Aisyiyah dalam mengambil keputusan tentang pelaksanaan dakwah tetap mengikuti ketentuan dari Muhammadiyah, biasa disebut “Gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar”. Dakwah Islam ialah mengajak, menyeru dan memanggil manusia untuk memeluk, melaksanakan, dan menegakkan ajaran agama Islam. Amar makruf, adalah mengajak dan menunjukkan hal-hal yang baik, bermanfaat dan terpuji. Nahi munkar, artinya mencegah, melarang, menolak,

mengikis, dan menjauhkan hal-hal yang buruk, kotor dan keji (hasil wawancara HQ, 20 Maret 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa 'Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah yang memiliki jaringan struktural yang sangat luas di dalam menunjang gerakan dakwah Islam. Jaringan struktural yang tersebar dan berjenjang dalam beberapa level yang mempunyai kewenangan dan wilayah kerja sesuai dengan kebijakan Muhammadiyah. Jaringan yang tersebar di seluruh daerah ini merupakan potensi yang sangat besar untuk membangun umat menuju masyarakat utama dalam bentuk sinergi dan jaringan yang kuat di beberapa bidang. Jaringan struktural merupakan kontribusi 'Aisyiyah yang besar sebagai sistem yang otonom dalam mengakomodasikan warga dalam menyalurkan aspirasinya, sekaligus mengkoordinasikan gerakan Islamiyah di Kota Makassar melalui berbagai aktivitas dakwah, keagamaan, pendidikan, kesejahteraan, sosial, kesehatan dan sebagainya.

Contoh lain yang dapat dikemukakan hubungannya dengan posisi 'Aisyiyah yang paradoks dalam mengambil keputusan secara otonom, serta diintervensi oleh Muhammadiyah dalam memelihara kemandirian, adalah kebijakan tentang struktur dan program-program pembinaan keluarga, yaitu "Terbina dan berkembangnya kualitas kehidupan keluarga yang meliputi semua aspek menuju terciptanya keluarga sakinah". Kebijakan dan program tersebut sejalan dengan keputusan Muhammadiyah, sehingga didukung. Jika tidak sejalan akan diintervensi. Kebijakan dan program yang dimaksud ialah: (1) meningkatkan kelompok desa binaan karya tayyibah dengan keluarga sakinah; (2) sosialisasi tentang pendampingan anak dalam beradaptasi

dengan media dan informasi; (3) sosialisasi UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Senada dengan hal tersebut, dijelaskan oleh salah satu Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Sulawesi Selatan, bahwa:

‘Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah tetap menjaga dan memelihara kemandirian dalam pengembangan dakwah Islam melalui dakwah jamaah dan dakwah kultural sebagai strategi dakwah masa kini. Hal ini mengingat ‘Aisyiyah sebagai sistem yang otonom di satu sisi, dan di sisi lain sebagai bagian dari kompleksitas sistem (Muhammadiyah), sehingga harus konsisten dalam menghadapi berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, dan pola pikir umat manusia yang semakin kompleks. Karena itu, diwujudkan melalui gerakan Tajdidiyah, Islahiyah, dan Tabsyiriyah (TIT) melalui pendekatan sumber daya manusia (SDM), ekonomi dan kesejahteraan, pendekatan struktural serta pendekatan global” (hasil wawancara HQ, tanggal 20 Maret 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pendekatan ‘Aisyiyah dalam pengembangan kualitas SDM melalui upaya mencerdaskan kehidupan umat. Pendekatan ekonomi dan kesejahteraan dilaksanakan untuk mengajarkan etos kerja. Pendekatan struktural dapat ditingkatkan dengan mewujudkan kegiatan politik dan birokrasi sebagai pendukung dakwah. Pendekatan global dilakukan dengan berpikir makro dan mikro secara seimbang, beraktivitas lintas sektoral, membangun kolektivitas dan individual, umum dan khusus, untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks ini posisi ‘Aisyiyah tetap menjadi bagian dari Muhammadiyah sebagai proses bimbingan.

Dalam konteks keputusan politik yang diambil secara otonomi, serta diintervensi oleh Muhammadiyah. Sebagai contoh; pada Pemilihan Umum (Pemilu Legislatif) Tahun 2004 dan 2009 ‘Aisyiyah mengambil keputusan mencalonkan salah

satu pengurus (Ketua) untuk menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sulawesi Selatan, dan menghimbau semua warga 'Aisyiyah untuk mendukung Keputusan tersebut diintervensi (tidak didukung) oleh Muhammadiyah, karena mempunyai calon sendiri untuk maju sebagai DPD Pemilu 2004 dan 2009. Pada akhirnya baik calon dari 'Aisyiyah maupun Muhammadiyah gagal meloloskan wakilnya di DPD dalam dua kali Pemilu tersebut. Akibat dari keputusan yang tidak sejalan ini, sempat terganggu kemandirian 'Aisyiyah (posisi paradoks). Namun, seiring dengan berjalannya waktu posisi paradoks independensi dapat kembali normal. Dengan kata lain, 'Aisyiyah menyadari posisinya sebagai sistem yang otonom di satu sisi, tapi di sisi lain dia adalah bagian dari Muhammadiyah, sehingga keputusan-keputusan yang diambil kapan-kapan dapat diintervensi.

Sehubungan dengan keputusan politik yang diambil dalam Pemilu 2004 dan 2009 di atas, diperkuat oleh Ketua 'Aisyiyah bahwa :

Tidak mudah mengelola organisasi besar seperti 'Aisyiyah, terutama untuk menjaga dan memelihara kemandirian dalam mengambil sebuah keputusan secara otonom, dengan memperhatikan keputusan-keputusan dari sistem yang lebih besar (Muhammadiyah) sebagai induk organisasi. Oleh karena itu, baik pimpinan maupun semua anggota harus memahami posisi paradoks tersebut. Di satu sisi dia otonom di dalam menentukan kebijakan dan program kerja secara mandiri. Namun, di sisi lain 'Aisyiyah adalah bagian dari Muhammadiyah yang harus menerima konsekuensi-konsekuensi yang telah digariskan. Kematangan dan komitmen tersebut menjadi pegangan semua warga untuk menjalankan amanah organisasi dengan baik. (hasil wawancara CA, 17 Februari 2012).

Lebih lanjut dijelaskan oleh ketua PDA Kota Makassar bahwa, seluruh anggota dan pengurus 'Aisyiyah menyadari akan posisi dan kedudukan di atas, sehingga dalam merealisasikan program kerja dan kegiatan yang telah ditentukan,

dengan tetap memperhatikan aspek-aspek yang menjadi otonom 'Aisyiyah dan aspek-aspek yang tidak boleh dilanggar sebagai bagian dari Muhammadiyah. Hal ini sudah menjadi komitmen dalam menyusun struktur organisasi sesuai dengan pedoman Persyarikatan Muhammadiyah.

Fakta yang menunjukkan bahwa 'Aisyiyah Kota Makassar sebagai bagian dari Muhammadiyah, ialah perkembangan awal terdapat dua cabang sebagai pelopor dan merupakan cabang tertua yaitu: Cabang Makassar dan Bontoala. Berdirinya organisasi 'Aisyiyah untuk membantu Muhammadiyah dalam pembinaan masyarakat, khususnya perempuan yang dalam banyak hal tertinggal bila dibandingkan dengan laki-laki. Namun, pada kenyatannya terutama dalam perkembangan selanjutnya; 'Aisyiyah lebih agresip sehingga wilayah kerja 'Aisyiyah lebih banyak dari pada Muhammadiyah. Hingga saat ini, 'Aisyiyah telah memiliki 25 cabang dari 14 kecamatan di Makassar; dan 96 ranting di tingkat kelurahan. Dalam satu kecamatan terdapat lebih dari satu cabang. Bahkan ada kecamatan terdapat empat cabang. Demikian pula di tingkat ranting dimana dalam satu kelurahan terdapat beberapa ranting. Hal ini menunjukkan perkembangan 'Aisyiyah lebih cepat dibanding dengan Muhammadiyah, terutama dalam hal pembinaan kader.

Kunci keberhasilan pengurus, pimpinan, dan anggota 'Aisyiyah tidak dapat diukur dengan materi dalam memimpin. Karena banyak para pemimpin organisasi ternyata mengecewakan anggotanya. Hal ini terutama disebabkan beberapa hal, antara lain: (1) tidak adanya komunikasi yang baik antara pemimpin dengan anggota. Seorang pemimpin lebih mengedepankan sikap otoriternya dan mengabaikan aspirasi

anggota. Harus dipahami organisasi bukan milik individu, perorangan atau kelompok karena itu sikap individual harus dihindari, dan (2) setiap orang memiliki kepentingan dan penting bagi seorang pemimpin memahami kepentingan anggotanya. Hal ini tidak berarti pemimpin harus tunduk dan terkontaminasi oleh banyak kepentingan.

3. Autopoiesis ‘Aisyiyah Kota Makassar

Sepanjang perjalanan ‘Aisyiyah menjelang satu abad dan ‘Aisyiyah Kota Makassar kurang lebih 86 tahun terus bertahan dan tetap eksis karena mampu mereproduksi dirinya. Dengan demikian, Autopoiesis adalah proses pembaharuan dari sistem dalam perjalanan panjang suatu organisasi. Dalam hal ini, ‘Aisyiyah Kota Makassar didirikan Tahun 1926 selalu memperbaharui dirinya, menyesuaikan dengan perkembangan serta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan hal-hal yang baru, sehingga ‘Aisyiyah terus bertahan dan berkembang menyesuaikan diri dengan segala tuntutan baik terhadap lingkungan internal (Muhammadiyah) maupun terhadap lingkungan eksternal (masyarakat dan pemerintah).

Secara etimologis, istilah “autopoiesis” terdiri dari dua kata yaitu *auto* artinya sendiri, dan *poiesis* artinya diri sendiri. Dengan demikian *autopoiesis* mengandung pengertian, selalu berusaha memperbaharui dan memproduksi diri sendiri. Autopoiesis ‘Aisyiyah Kota Makassar adalah sebuah organisasi yang terdiri dari unit-unit atau bagian-bagian yang utuh, dalam perjalanannya yang penuh dinamika selalu berusaha memperbaharui dan memproduksi hal-hal yang baru sesuai dengan tuntutan

perubahan dan perkembangan, sehingga tidak ketinggal dalam memperjuangkan visi utama dan tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Data dan informasi yang menunjukkan bahwa, 'Aisyiyah Kota Makassar melakukan autopoiesis (memperbaharui, mereproduksi diri) dari periode ke periode sesuai dengan pola perubahan yang berjalan terus menerus untuk menyesuaikan diri dengan pola perkembangan dalam lingkungan strategis terdekatnya (Muhammadiyah) dan lingkungan strategis yang lebih luas, yaitu masyarakat dan pemerintah. Sebagai contoh, perubahan struktural bidang pendidikan, sebelumnya menggunakan Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Demikian pula perubahan struktural bidang lain seperti, Pembinaan Kesejahteraan Umat (PKU); sekarang berubah Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Majelis Kesejahteraan Sosial. Majelis Hukum dan HAM, sebelumnya hanya bagian dari majelis lain. Perubahan-perubahan tersebut, menunjukkan bahwa 'Aisyiyah selalu mereproduksi diri dan menghasilkan unit-unitnya sendiri untuk menyesuaikan dengan perkembangan di lingkungan internal dan eksternal, demi terwujudnya visi, misi, dan tujuan yang telah ditentukan.

Contoh yang dapat ditunjukkan bahwa, pola lama yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ditinjau dari berbagai aspek. diganti dengan pola baru sesuai dengan tuntutan perubahan dalam konteks lokal, nasional, dan global untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita 'Aisyiyah Kota Makassar khususnya, dan Muhammadiyah pada umumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Pembinaan Kader bahwa:

‘Aisyiyah dalam perjalanan panjang mampu bertahan dan mandiri, karena memiliki kekuatan dan daya autopoiesis, mereproduksi diri dalam berbagai bidang, khususnya bidang kaderisasi yang bertujuan untuk: (1) meningkatkan kualitas pimpinan dan kader sebagai penggerak organisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) meningkatkan kualitas sumber daya pimpinan di setiap tingkatan dalam menjalankan fungsi-fungsinya; (3) optimalisasi fungsi dan peran amal usaha sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan kader; (4) melibatkan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Puteri setiap kegiatan sesuai tingkatan, dan (5) menyusun data base pimpinan dan kader untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki (hasil wawancara MS, tanggal 20 Maret 2012).

Dalam merealisasikan program-program kerja tersebut, majelis kader menjalin hubungan dan kerjasama secara internal dengan majelis lainnya sesuai dengan bidang tugas, peran dan fungsi serta tujuan organisasi setiap bidang dalam organisasi ‘Aisyiyah. Selain itu, menjalin hubungan eksternal dengan organisasi perempuan terutama pemerintah, untuk mengembangkan jejaring dengan organisasi keagamaan sosial dan kelompok strategis lainnya di setiap tingkatan. Selain itu, meningkatkan dan mengembangkan kemitraan yang harmonis dan saling memberi manfaat kepada organisasi sosial lainnya seperti LSM, Yayasan, Pemerintah, dan institusi swasta.

Hasil penelusuran lapangan terkait dengan autopoiesis ‘Aisyiyah Kota Makassar melalui program kerjasama yang dikembangkan dari fase ke fase, dalam konteks memproduksi diri sendiri bertujuan, agar terus terjalin secara optimal hubungan organisasi dalam menjalankan misi serta memajukan dan memperluas gerakan organisasi secara internal maupun eksternal. Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan untuk mendukung kelancaran program kerja tersebut, serta terwujudnya tujuan yang dimaksud adalah: (1) mengadakan Baitul Arqam dan Darul Arqam; (2)

melaksanakan pembinaan langsung terhadap Amal Usaha; (3) menyusun data base organisasi, dan (4) menjalin kerjasama dengan organisasi keagamaan, organisasi sosial melalui diskusi dan temu wicara.

Selanjutnya masih terkait dengan penerapan autopoiesis, 'Aisyiyah Kota Makassar di dalam merealisasikan program kerja melalui setiap majelis dan lembaga, termasuk dalam hal pembangunan masyarakat madani bukan saja penting, tetapi juga merupakan kondisi dan jaringan yang menyertai terbangun serta bekerjanya demokrasi, penegakan hukum, persamaan hak tanpa diskriminasi, keadilan sosial dan perdamaian. Gerakan 'Aisyiyah Kota Makassar sejak berdiri (1926) masih tetap eksis hingga sekarang. Salah satu hal yang mengikat semua anggota dan pimpinan, adalah berpegang teguh pada prinsip dasar, visi utama, dan tujuan bersama.

Dengan demikian kemandirian organisasi 'Aisyiyah sangat bergantung pada kemampuan semua anggota pengurus dan pimpinan dalam meramu program kerja, baik program otonom 'Aisyiyah maupun program dari sistem yang lebih besar Muhammadiyah termasuk pemahaman tentang masyarakat madani. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh, yaitu kegiatan yang dikembangkan oleh masing-masing majelis secara garis besar dapat dikatakan bahwa pengembangan dan pembangunan masyarakat yang membangun komunitas yang tidak pecah secara eksklusif oleh perbedaan pandangan dan kepentingan. Perbedaan tersebut justru sebagai pentingnya komunitas masyarakat yang inklusif, toleran, terbuka dan berbudaya, serta harus terus dikembangkan dan dibangun. Bentuk nyata masyarakat madani dapat dilihat dari kemampuan masyarakat mengembangkan musyawarah dan

toleransi. Dengan kata lain, masyarakat telah mampu mengembangkan budaya kebebasan berpendapat, menghormati perbedaan dan menghargai keberagaman. Upaya merealisasikan wacana masyarakat madani menjadi perhatian besar dari organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar.

Sebagai organisasi sosial keagamaan, 'Aisyiyah Kota Makassar dapat merespon carut-marutnya peradaban masyarakat di era globalisasi dengan melakukan ijtihad untuk membangun peradaban yang luhur. Kenyataan menunjukkan bahwa upaya keterlibatan dan kepedulian 'Aisyiyah terhadap problematika masyarakat khususnya di Kota Makassar semakin kompleks, tercermin dari pertumbuhan dan perkembangan kualitas serta kuantitas amal usaha yang dikelola masing-masing majelis dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang positif (hasil wawancara setelah diolah, Maret 2012).

Pelaksanaan gerakan terhadap masyarakat (umum) yang beragama Islam melalui TIT, yaitu Tajdidiyah, yang artinya pembaharuan, peningkatan dalam pemahaman agama (mengembalikan) ajaran agama sesuai tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah. Islahiyah, yang artinya perdamaian, kerukunan, persaudaraan dalam masyarakat, dan Tabsyiriyah, artinya penghiburan, pembimbingan serta pemberian dorongan dalam beribadah dan beramal saleh. Bidang-bidang yang dapat di-TIT-kan adalah Ibadah, Akhlaq, Tauhid, Tabligh, Kegiatan Jihad, Persatuan, Syi'ar Islam, Pendidikan, Seni Budaya, Kesehatan, Ekonomi, serta amalan-amalan Islam lainnya dengan tujuan utama untuk mewujudkan pribadi muslim, mukmin dan mukhsin. Hal senada juga dijelaskan oleh Ketua Majelis Tabligh, bahwa:

‘Aisyiyah sebagai organisasi dakwah selalu memperbaharui dirinya, terutama dalam pengembangan dakwah keagamaan dan sosial, selalu menyesuaikan diri dengan perubahan baik struktur maupun materi yang akan disampaikan. Misalnya, “Misi Gerakan TIT diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan program kerja yang bertujuan: menanamkan keyakinan, memperdalam, memperluas pemahaman, menambah pengalaman, dan menyebarluaskan ajaran agama Islam dalam segala aspek kehidupan; meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap agama Islam; memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, serta mempertinggi akhlak” (hasil wawancara ZM, 25 Maret 2012).

Penjelasan di atas sejalan dengan hasil pengamatan penulis tentang aktivitas TIT pada beberapa Amal Usaha ‘Aisyiyah Kota Makassar, tampak bahwa gerakan tersebut dapat meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, serta membangun dan memelihara tempat ibadah, serta amal usaha yang lain; meningkatkan pendidikan, membangun kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, menggairahkan penelitian; memajukan perekonomian, kewirausahaan, dan perbaikan hidup yang berkualitas; meningkatkan dan mengembangkan kegiatan di bidang sosial, kesejahteraan, kesehatan, serta lingkungan hidup; meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan, memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa; meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang baik dalam dan luar negeri serta usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi ‘Aisyiyah Kota Makassar.

Terkait dengan dinamika kemandirian ‘Aisyiyah Kota Makassar, serta fase-fase perkembangan organisasi sejak didirikan hingga sekarang, dalam era reformasi sejumlah kisah sukses di berbagai bidang kehidupan, seperti keberhasilan dalam demokrasi, pemulihan krisis ekonomi, resolusi konflik di beberapa daerah

(Sulselbar), diakui bahwa hingga kini masih menghadapi berbagai masalah sosial keagamaan yang kompleks. Di antaranya masalah politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang memerlukan prioritas dan perhatian untuk dipecahkan dalam perjalanan Kota Makassar ke depan.

Setelah reformasi (1998), peranan 'Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan khususnya Kota Makassar menunjukkan dinamika antara keberhasilan dan permasalahan yang harus dihadapi, yang seringkali tidak mudah dikelola karena berbagai kendala dan kelemahan termasuk masalah kepemimpinan dan cara mengurus organisasi. Reformasi 1998 merupakan pilihan yang niscaya dan telah menjadi bagian penting dari sejarah 'Aisyiyah sebagai jalan keluar dari kondisi dan era otoritarian rezim Orde Baru pada masa sebelumnya.

Peran dan tanggung jawab 'Aisyiyah di era baru ini diharapkan dapat membawa perubahan ke arah perbaikan sistem politik dan ekonomi seperti tertuang dalam program kerja masing-masing majelis dan lembaga 'Aisyiyah. Dalam sejumlah kasus telah menunjukkan prestasi atau perkembangan yang positif terutama dalam demokratisasi. Karena dengan reformasi 'Aisyiyah tetap berada dalam posisi paradoks, yaitu di satu pihak menjadi organisasi yang otonom dalam mengelola amal usaha, di sisi lain 'Aisyiyah merupakan bagi dari Muhammadiyah terutama dalam merealisasikan nilai dan norma yang telah digariskan sebagai wilayah perjuangan bersama dalam rangka mencapai visi dan tujuan bersama.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa konsep kemandirian menjadi faktor sangat penting dalam sebuah organisasi termasuk 'Aisyiyah. Konsep ini tidak hanya

mencakup pengertian kecukupan diri (*self-sufficiency*) bidang ekonomi, politik, sosial budaya tetapi juga faktor manusia secara pribadi, di dalamnya mengandung unsur penemuan diri (*self-discovery*) berdasarkan kepercayaan diri (*self-confidence*). Kemandirian adalah suatu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi pelbagai masalah demi mencapai tujuan, tanpa menutup diri terhadap pelbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan.

Dalam pengertian sosial atau pergaulan antar manusia, kemandirian juga bermakna sebagai organisasi diri (*self-organization*) atau manajemen diri (*self-management*). Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi dan melengkapi satu sama lain sehingga muncul suatu keseimbangan. Dewasa ini, pencarian pola yang tepat, agar interaksi antar unsur selalu mencapai keseimbangan, menjadi penting. Setiap keseimbangan yang dicapai akan menjadi landasan bagi perkembangan berikutnya. Dengan demikian, proses kemandirian yang dicapai ‘Aisyiyah adalah proses yang berjalan tanpa ujung. Dalam konteks pembangunan, sikap mandiri harus dijadikan tolok ukur keberhasilan, yakni warga ‘Aisyiyah atau masyarakat menjadi lebih mandiri atau malah semakin bergantung. Misalnya, pendiri dan pengelola amal usaha ‘Aisyiyah; apakah lebih bebas atau malah semakin bergantung pada organisasi ‘Aisyiyah atau Muhammadiyah, atau Pemerintah (Kota Makassar).

Implikasi dari saling bergantung dari unsur-unsur dalam kemandirian, khususnya ‘Aisyiyah Kota Makassar diwujudkan dalam program kerja majelis dan lembaga baik di tingkat daerah, cabang, dan ranting. Program-program kerja di bidang ekonomi bagi golongan miskin harus dirancang secara tepat, sesuai dengan

tingkat keseimbangan yang ada pada mereka. Kemiskinan yang mereka tanggung tidak boleh dilihat semata-mata sebagai masalah fisik, melainkan harus dilihat sebagai tantangan atau dorongan bagi hadirnya harapan baru atau kondisi yang lebih baik. Dengan demikian program kerja masing-masing bidang (majelis dan lembaga), harus dapat dijangkau oleh kemampuan organisasi. Karena itu, program harus memungkinkan golongan miskin ikut berpartisipasi, mulai dari tahap implementasi sampai pada tingkat pengambilan keputusan sesuai dengan fakta yang dihadapi.

Dinamika kemandirian 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan tetap eksis, sekaligus merupakan gerakan dakwah, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan diharapkan interaksi unsur-unsur dalam kemandirian menjadi efektif dan perkembangan ke arah *selfish* bisa dihindari, perkembangan pribadi individu yang positif dibangun lewat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk dan diselenggarakan secara wajar secara bertahap. Dalam kelompok semacam inilah proses belajar-mengajar akan berlangsung, dimana kesenjangan antara penerima pelajaran dan pengajar disebabkan perbedaan latar belakang sosial-ekonomi, bisa dihindari.

Dengan demikian, kecenderungan ke arah *selfish* sebagai pola lama mulai terkikis karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan, akan diganti oleh pola baru yaitu *empati* yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Bila kemampuan individu (anggota) 'Aisyiyah yang bertindak sebagai murid dari proses perkembangan golongan miskin. Proses ini menuntut komitmen, dedikasi, dan pandangan hidup

yang baik dari pendamping. Artinya, mereka harus memperhatikan proses kemandirian yang terjadi dalam KSM seperti yang terjadi pada dirinya sendiri.

Sehubungan dengan proses kemandirian melalui autopoiesis tersebut, menurut Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 'Aisyiyah Kota Makassar, menjelaskan bahwa:

Pengembangan organisasi 'Aisyiyah menuju kemandirian melalui autopoiesis dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, ialah "Para pengurus dan anggota bersama-sama membuat *work plan* (perencanaan kerja) yang terperinci dan detail dengan budget kegiatannya. Beberapa item yang menjadi titik sorot dalam perencanaan kerja adalah; kegiatan pendidikan dan penyadaran pro lingkungan dan pro rakyat terpinggir (*grassroot*), pemberdayaan pada petani di kampung, memperkuat tim dan jejaring (*net work*) serta kegiatan yang bersifat mendesak dan karitatif(hasil wawancara MR, tanggal 25 Februari 2012).

Penjelasan ini mempertegas bahwa, dalam perencanaan kerja yang dilakukan selama priode kepemimpinan lima tahun, khususnya wilayah kerja PDA Kota Makassar (2010 – 2015), kegiatan yang direncanakan merupakan hasil reproduksi dari periode sebelumnya. Kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam merealisasikan program kerja yang telah ditentukan, namun para anggota memperhatikan hal-hal yang terkait dengan program kerja masing-masing majelis dan lembaga kebudayaan untuk mempertajam kegiatan tersebut dalam rentang waktu satu tahun sebagai langkah gerakan. Hal ini sebagai bentuk reproduksi diri pengurus dan anggota, menyadari bahwa setiap perencanaan mesti dibarengi dengan usaha dan kerja keras secara bersama-sama saling mengisi dan melengkapi.

Autopoiesis Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kota Makassar, proses pembaharuan mencapai kemandirian seperti sekarang merupakan upaya yang

berkesinambungan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dan penyadaran terhadap semua pihak. Dalam hal ini, sebagai fasilitator untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kemandirian. Dengan kata lain, PDA Kota Makassar mengajak semua pengurus dan anggota untuk lebih mampu melakukan kegiatan pemberdayaan dengan metode inovatif dan kreatif melalui daya autopoiesis.

B. Keberlanjutan Organisasi ‘Aisyiyah dalam Merespons Dinamika Lingkungan Eksternalnya

Prinsip dasar keberlanjutan sebuah organisasi adalah terletak pada sistem yang bersiklus melalui imput dari lingkungan, kemudian memproses imput tersebut sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari lingkungan agar dapat menghasilkan output seperti yang diharapkan oleh lingkungan eksternalnya. Dalam hal ini, keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah seperti telah dijelaskan di atas bahwa, ‘Aisyiyah merupakan sistem yang otonom terdiri atas unit-unit yang utuh menerima imput dalam merespon tuntutan dari lingkungan untuk memproses input tersebut sesuai dengan tuntutan yang berlaku, sehingga menghasilkan output yang diharapkan oleh lingkungan (masyarakat).

Dengan demikian, di balik kemandirian ‘Aisyiyah sebagai sistem yang otonom, juga dapat memelihara keberlanjutan organisasi karena komponen atau sistem yang dimiliki berkembang melalui ketiga aspek yang dimaksud, yaitu input, proses, dan output. Sebagai contoh, sistem atau unit-unit yang mengelola bidang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, dan Madrasah Aliyah (MA), yang di bawah koordinasi Majelis Dikdasmen

melakukan perubahan-perubahan dalam menerima input berupa calon siswa dari lingkungan (masyarakat), kemudian diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu TK diproses selama 2 tahun untuk menghasilkan output calon-calon siswa SD/MI. Kemudian diproses selama 6 tahun untuk menghasilkan output calon-calon siswa SMP/MTs, kemudian melalui proses selama 3 tahun dan menghasilkan output calon-calon siswa SMA/SMK dan MA untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku selama 3 tahun, sehingga menghasilkan output calon-calon mahasiswa sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Demikian pula sistem yang mengelola bidang kesehatan, menerima input berupa calon pasien di rumah sakit atau rumah bersalin, kemudian diproses dalam hal ini menjalani perawatan dan pengobatan kesehatan atau persalinan bagi, sehingga menghasilkan output yang diharapkan yaitu para pasien mendapat pelayanan yang baik dan memuaskan sehingga sembuh dari penyakit yang diderita, atau melahirkan dengan baik.

Sementara sistem yang menangani bidang dakwa keagamaan dapat menerima input berupa calon da'i baik di Pesantren maupun lembaga yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan dakwah, untuk diproses sesuai kebutuhan sehingga menghasilkan output yaitu para da'i atau ustadz yang handal yang mampu memberikan cemahan dan dakwah sebagaimana yang diharapkan masyarakat dan pemerintah (lingkungan eksternal). Dengan kata lain, input, proses dan output yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dakwah adalah untuk merespon tuntutan perkembangan serta perubahan berbagai aspek, terutama metode, materi dan

substansi dakwah yang terus berubah serta berkembang demikian kompleks agar tidak ketinggalan sebagaimana yang dijelaskan pada konteks autopoiesis hubungannya dengan kedudukan atau posisi 'Aisyiyah yang paradoks agar tetap bertahan dan berlanjut.

Data dan informasi yang menunjukkan bahwa, 'Aisyiyah merespons dinamika lingkungan strategis, baik Muhammadiyah maupun Pemerintah melalui daya kontingensi terhadap berbagai program kerja dan kegiatan yang diemban masing-masing majelis dan lembaga setiap periode. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah proses perkembangan dan perubahan yang dialami dari periode ke periode khususnya periode 2010/2015 yang terungkap dalam wawancara dengan Wakil Ketua PDA Kota Makassar, yang membidangi pengembangan kader, menjelaskan bahwa:

Keberkelanjutan 'Aisyiyah sebagai salah satu ortom Muhammadiyah bergerak dan berkontribusi memajukan bidang pembinaan dan kaderisasi termasuk anak-anak yang sedang dan akan dibina di Panti Asuhan (PA). Melalui input anak-anak yatim, piatu, anak terlantar, dan anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau biasa disebut penyandang masalah sosial untuk diproses atau dibina dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dialami, serta menghasilkan output yaitu anak-anak yang mandiri dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara seperti yang diharapkan. Demikian pula halnya dengan penyandang masalah sosial lain seperti lanjut usia di Panti Jompo dengan input dari lingkungan para usia lanjut (lansia) yang tidak mampu dan terlantar (hasil wawancara KA, tanggal 17 Maret 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa, keberlanjutan 'Aisyiyah karena mampu merespon lingkungan strategis terdekat terutama Muhammadiyah. Selain itu, keberlanjutan tersebut merupakan karunia Allah yang diraih atas kekuatan yang lahir dari keikhlasan, komitmen, potensi, dan partisipasi semua warga sebagai

gerakan dakwah amar makruf nahi munkar, serta tajdid sehingga selalu menunjukkan semangat tinggi untuk berkiprah konstruktif dalam kehidupan. Dengan demikian, keberlanjutan merupakan daya kontigensi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan strategis serta kepercayaan dan dukungan berbagai pihak yang memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan visi dan tujuan organisasi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kemandirian 'Aisyiyah Kota Makassar karena mampu mengelaborasi tiga aspek utama organisasi, yaitu medan visional yang telah dipahami oleh semua anggota serta menjadi pegangan dalam melaksanakan semua kegiatan dan program kerja 'Aisyiyah dengan tetap memposisikan diri paradoks independensi, serta berautoposis menyesuaikan diri dari fase ke fase; dari waktu ke waktu seiring perubahan dan perkembangan sejak didirikan hingga sekarang. Sementara ditinjau dari aspek keberlanjutan, 'Aisyiyah terus berkembang dan berlanjut karena telah melakukan tiga hal penting dengan baik, yaitu input, proses, dan output yang diterima dari lingkungan strategis melalui program kerja setiap majelis dan lembaga seperti dalam periode (2010-2015).

Data dan informasi yang dapat ditunjukkan dalam disertasi ini, antara lain: Majelis Tabligh, program kerja yang direalisasikan sebagai respon dari lingkungan strategis meliputi: (a) mengintensifkan pembinaan aqidah, akhlak, dan ibadah di kalangan 'Aisyiyah dan masyarakat melalui pengajian serta kajian-kajian; (b) mengintensifkan kajian tafsir al-Qur'an dan Hadist bagi anggota, kader dan pimpinan 'Aisyiyah; (c) memasyarakatkan pelaksanaan kehidupan sehari-hari berdasarkan pedoman kehidupan Islam sesuai tuntunan tarjih Muhammadiyah; (d) meningkatkan

dan mengembangkan kemampuan muballigh dalam berbagai aspek, seperti penguasaan metode, materi, serta strategi da'wah; (e) meningkatkan fungsi mesjid, mushallah dan sarana dakwah lainnya sebagai pusat kegiatan Tabligh (penyiaran Islam secara terprogram), dan (f) mengintensifkan program pembelajaran al-Qur'an bagi anggota 'Aisyiyah.

Selanjutnya, data dan informasi tersebut dipertegas oleh salah satu Wakil Ketua PDA Kota Makassar yang membidangi pengembangan kader, bahwa:

Tujuan yang ingin diwujudkan melalui program-program di atas ialah "Terbangunnya kualitas aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah kalangan umat, atau masyarakat luas yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah melalui pesan-pesan yang bersifat pencerahan dan kemajuan". Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka proses kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) Pengajian tentang aqidah, akhlak, dan ibadah; (2) Sosialisasi tentang pedoman kehidupan Islami sesuai HTP; (3) Pelatihan muballigh secara berkala, dan (4) Memfungsikan mesjid dan mushallah pada setiap kegiatan (hasil wawancara KJ, tanggal 10 Maret 2012).

Selanjutnya masih terkait dengan program kerja Majelis Tabligh PDA Kota Makassar, dalam pembinaan keluarga ialah meliputi: (a) meningkatkan dan menguatkan pembinaan keluarga dengan basis nilai-nilai agama untuk membentuk manusia yang memiliki iman, mentalitas dan karakter yang kuat; (b) meningkatkan dan mengintensifkan peran keluarga (orang tua) sebagai pendamping anak dalam beradaptasi dengan media dan informasi, dan (c) sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, dan UU tentang penghapusan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).

Data dan informasi yang menunjukkan keberlanjutan 'Aisyiyah melalui program kerja Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), yaitu: (a)

meningkatkan kualitas dan kreativitas penyelenggaraan pendidikan dasar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) ‘Aisyiyah dalam wilayah Kota Makassar; (b) menjadi lembaga pendidikan ‘Aisyiyah sebagai basis kaderisasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan; (c) meningkatkan kualitas pendidikan melalui jenjang pendidikan, forum diskusi dan berbagai cara yang lain yang telah digariskan; (d) meningkatkan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan organisasi berdasarkan kinerja, komitmen dan pengabdian terhadap ‘Aisyiyah di Kota Makassar; (e) membuat data base sebagai pusat informasi dan basis pengembangan pendidikan ‘Aisyiyah di Kota Makassar, dan (f) penggunaan administrasi anak didik dan organisasi.

Menurut salah seorang Wakil Ketua ‘Aisyiyah Kota Makassar Periode (2010-2015), yang bertanggung jawab di bidang pendidikan mengatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan di atas sebagai wujud keberlanjutan organisasi adalah untuk meningkatkan kualitas keunggulan ‘Aisyiyah sebagai strategi pembentukan manusia yang utuh, berilmu dan berkarakter sesuai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) kunjungan pembinaan dan supervise langsung terhadap amal usaha yang dibina oleh ‘Aisyiyah Kota Makassar; (2) mengikutsertakan pendidikan dan latihan kepada tenaga kependidikan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan ‘Aisyiyah; (3) penataran/pelatihan kurikulum dan pembahasan ke ‘Aisyiyahan dan ke Muhammadiyah; (4) melaksanakan seminar tentang pendidikan pengurus dan guru-guru; (5) menetapkan kesejahteraan setiap pendidik dan tenaga kependidikan sesuai

dengan kondisi lembaga (amal usaha) masing-masing; (6) memberikan penghargaan terhadap guru yang memiliki masa kerja 10 tahu ke atas; (7) membuat data base (anak didik, guru dan pengurus); (8) menggunakan administrasi anak (peserta) didik seperti: Ijazah, laporan pendidikan, buku induk; (9) membuat RAPBO/ RAPBS, dan (10) menetapkan uang infaq siswa Rp 3000/Tahun/Anak, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Pimpinan Cabang 'Aisyiyah (PCA) = 40%; (b) Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) = 35%; (c) Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (PWA) = 15%, dan (d) PPA Pimpinan Pusat 'Aisyiyah = 10%; (11) menetapkan dana pembinaan organisasi tingkat daerah Rp. 5000/Tahun/Anak, dan (12) Zakat Profesi.

Senada dengan penjelasan di atas, diperkuat oleh pandangan Ketua Lembaga Kebudayaan 'Aisyiyah Kota Makassar, bahwa:

'Aisyiyah sebagai salah satu organisasi dakwah keagamaan, sosial dan budaya dalam era reformasi tidak terlepas dari krisis multikompleks, dan multidimensional yang muncul antara lain dalam bidang keuangan, politik, hukum yang dialami oleh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar dari hari ke hari terus berlangsung dan berkepanjangan. Namun, 'Aisyiyah telah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola daya kontigensi amal usaha yang dikelola melalui program kerja secara berkelanjutan termasuk Lembaga Kebudayaan, sebagai salah satu dari dua lembaga 'Aisyiyah yang dibentuk seiring dengan perkembangan dan perubahan, merespon lingkungan strategis terutama untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi sehingga 'Aisyiyah terus berkembang dan berlanjut (hasil wawancara AA, 22 Maret 2012).

Keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar dalam merespon lingkungan strategis serta persoalan yang dihadapi dengan langkah konkrit. Dalam Sidang Tanwir 'Aisyiyah 2010 mengimplementasikan semua program kerja masing-masing majelis dan lembaga serta membulatkan sikap dan tekad, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam era yang penuh

dengan kompetisi (persaingan) segenap komponen bangsa, terutama warga Aisyiyah, dituntut untuk lebih cerdas dalam menanggapi serta memecahkan persoalan-persoalan bangsa. Situasi krisis multidimensi yang dialami hubungannya dengan program kerja masing-masing majelis dan lembaga telah direspon sebagaimana yang diharapkan.

Data yang menunjukkan bahwa ‘Aisyiyah tetap eksis karena mampu merespon perubahan lingkungan strategis, khususnya dalam satu dekade terakhir antara lain menangani berbagai persoalan yang dihadapi perempuan seperti kekerasan, diskriminasi termasuk KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) memberi kesempatan kepada semua majelis dan lembaga di bawah koordinasi Majelis Hukum dan HAM untuk menanggapi isu yang berkembang dengan langkah-langkah konkrit. Misalnya, masalah gender hubungannya dengan kedudukan perempuan dalam Islam. Menurut Wakil Sekretaris PDA Kota Makassar bahwa:

‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia terus berbenah diri menyesuaikan dengan perkembangan, terutama masalah-masalah yang dihadapi dewasa ini semakin kompleks. Namun, ‘Aisyiyah tetap menyadari keberlanjutan organisasi ini prinsip dasar dan azas yang dikembangkan bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Karena itu, dalam mengatasi persoalan perempuan baik diskriminasi, KDRT atau bentuk kekerasan lain yang dialami perempuan apalagi dikaitkan dengan gender, maka ‘Aisyiyah perlu mengkaji ulang berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah tentang kedudukan, hak, dan kewajiban perempuan dalam Islam. Dengan demikian, ‘Aisyiyah merespon lingkungan strategis tidak hanya program rutinitas tetapi juga mengikuti perkembangan regional, nasional maupun global (hasil wawancara RD, 17 Maret 2012).

Konsekuensi dari pilihan gerakan ‘Aisyiyah Kota Makassar, terutama dilihat dari kualitas kegiatan bahwa peningkatan perhatian terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik pimpinan maupun segenap warganya, peningkatan kualitas

kegiatan, dan kualitas organisasi. Kepedulian 'Aisyiyah dan kepekaan terhadap isu-isu sosial dalam segenap aspek kehidupan. Isu-isu yang berkembang dalam masyarakat dari fenomena-fenomena sosial menjadi sasaran garapan 'Aisyiyah, antara lain bidang ekonomi, bidang yang fenomenal (isu gender), dan bidang sosial dalam meningkatnya kualitas dan kuantitas yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Fakta lain yang menunjukkan bahwa, 'Aisyiyah merespon berbagai persoalan dari lingkungan strategis juga dijelaskan oleh Sekretaris PDA Kota Makassar, bahwa seiring dengan perubahan bidang-bidang strategis, maka 'Aisyiyah mengubah bidang kerja TKI/TKW dan PRT menjadi tenaga ahli. Hal ini karena 'Aisyiyah memiliki potensi untuk menyelenggarakannya. Demikian pula bidang pendidikan, seperti TK, SD dan pendidikan formal. 'Aisyiyah menyelenggarakan sekolah unggulan, dengan program beasiswa menjadi hal yang penting. Program beasiswa dalam hal ini merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan, untuk merespon tuntutan kelompok masyarakat yang tidak mampu mendapatkan pendidikan yang layak.

Senada dengan penjelasan ini diperkuat oleh salah satu Wakil Ketua Majelis 'Aisyiyah Kota Makassar yang membidangi pendidikan menawarkan program kerja dalam Sidang Tanwir 'Aisyiyah 2010-2015; yang memberikan beasiswa bagi anak-anak yang memerlukan keberlanjutan studi. Program ini ditindak lanjut oleh semua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah sebanyak 33 PWA di seluruh Indonesia, disediakan beasiswa Rp. 300 ribu untuk siswa di tingkat cabang. Program ini kemudian

direalisasikan PDA Kota Makassar dalam 25 cabang yang tersebar di 14 kecamatan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

Selain program-program kerja dalam bidang pendidikan ini, Aisyiyah juga menyelenggarakan pendidikan luar sekolah, seperti Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Program PLS yang dilaksanakan oleh Majelis Dikdasmen PDA Kota Makassar sebagai respon atas perkembangan dan tuntutan dari lingkungan strategis, sekaligus untuk menjawab besarnya jumlah drop out yang dialami anak-anak usia sekolah. Hal ini menunjukkan 'Aisyiyah sebagai organisasi sosial budaya yang memiliki lembaga pendidikan yang tetap eksis dan mampu menyediakan paket-paket pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kebutuhan anak-anak dari masyarakat yang tidak mampu (putus sekolah). Penyelenggaraan paket-paket semacam ini telah menjadi "profesi Aisyiyah" selama ini. Tentu harus dijawab dengan langkah konkrit bagi Aisyiyah (hasil wawancara MA, 15 Maret 2012).

Selain bidang pendidikan yang merupakan program andalan sejak organisasi ini didirikan di Kota Makassar, juga dalam bidang hukum yang fenomenal antara lain dipicu oleh hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dengan tindak kekerasan, terutama kepada perempuan yang lepas dari tindakan hukum. Karena itu, 'Aisyiyah menyelenggarakan lembaga *Crisis Centre* untuk menghadapi berbagai macam kekerasan.

Selain masalah-masalah di atas yang bersifat lokal (Kota Makassar), masalah-masalah yang bersifat nasional, dan global/internasional, sebagai bentuk kepedulian (respons) 'Aisyiyah terhadap permasalahan di lingkungan eksternal (masyarakat dan bangsa). Dalam hal ini 'Aisyiyah Kota Makassar setelah reformasi (1998), meskipun secara relatif menunjukkan kemajuan demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik. Namun demikian, 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah selama sepuluh tahun terakhir sejak Muktamar 2005 merespons berbagai persoalan yang

dihadapi masyarakat, baik yang menyangkut politik, ekonomi, hukum, maupun sosial dan budaya yang krusial dan memerlukan pemecahan yang komprehensif.

Respons ‘Aisyiyah sebagai organisasi modern yang tetap konsisten terhadap visi dan misi gerakan sosial keagamaan, terutama di tingkat pusat sekaligus sebagai bentuk kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah yang direalisasikan di tingkat daerah, khususnya di Kota Makassar dalam rangka merespons perkembangan politik global menuju era dunia yang lebih adil dan damai, tetapi dalam praktik masih ditandai oleh hubungan antar negara terutama antar negara maju dengan sedang berkembang yang masih belum adil dan terjadi hegemoni kekuatan negara-negara besar yang merugikan masyarakat negara-negara sedang berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Globalisasi cenderung menjadi alat kekuatan ekonomi dan politik internasional yang semakin memperluas cengkeraman kapitalisme global dan hadirnya neoliberal yang memporak-porandakan kekuatan nasional dan lokal di negara-negara sedang berkembang, terutama Indonesia.

Meluasnya gaya hidup global yang membawa sikap hidup bebas seperti pornografi, perilaku asusial, penghargaan yang berlebihan terhadap materi (materialisme) dan kesenangan duniawi (hedonisme), permisivisme, kebebasan tanpa batas nilai (liberalisme/nihilisme), dan budaya populer yang bertentangan dengan norma-norma agama, moral, dan budaya Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain juga membawa dampak negatif terhadap masyarakat dan mempengaruhi perkembangan kebudayaan nasional maupun lokal Indonesia. Dampak negatif yang

dimaksud, adalah terbukanya kecenderungan materialisme (faham kebendaan), sekularisme (memisahkan urusan dunia dengan nilai-nilai agama), hedonisme (memuja kesenangan duniawi), dan pragmatisme (mementingkan nilai kegunaan) yang meminimalisasikan, serta menihilkan nilai-nilai luhur, moral spiritual, dan norma-norma agama.

Berikut ini sekilas tentang fase-fase perkembangan 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan di Indonesia, termasuk Kota Makassar. Sebagaimana diketahui bahwa 'Aisyiyah Kota Makassar didirikan tahun 1926, tepatnya 9 tahun setelah 'Aisyiyah Pusat didirikan (1917) di Yogyakarta. Pertumbuhan yang demikian cepat ini tidak terlepas dari kerja keras para pengurus dan pimpinannya yang tanpa pamrih kecuali hanya mengharap ridha Allah swt., dan meyakini bahwa mengurus organisasi 'Aisyiyah merupakan pekerjaan mulia. Hal ini diperkuat beberapa informan, bahwa perkembangan 'Aisyiyah yang demikian cepat merupakan penanam pendidikan yang baik. Organisasi ini diminati para anggota karena gerak langkahnya merupakan amal ibadah kepada Allah. Azas maupun tujuannya jelas. Melalui organisasi 'Aisyiyah, para remaja perempuan dan ibu-ibu yang telah berumah tangga berbuat dan berkarya dimana organisasi ini berakidah Islam.

Organisasi ini bagi umat Islam bukanlah tempat berjuang yang sia-sia, tetapi dijadikan media untuk beramal. Azas dan tujuan organisasi didasarkan prinsip bahwa Islam itu harus dikembangkan. Pendidikan untuk menghadapi masa depan perempuan harus diperluas. Dalam hal ini, Nyai Ahmad Dahlan sebagai pendiri 'Aisyiyah pertama bersama-sama dengan Muhammadiyah telah berkembang lebih maju dalam

berbagai aspek. Pondok atau asrama yang hanya untuk mendidik wanita-wanita terus dikembangkan. Pendidikan yang dirintis Nyai Ahmad Dahlan benar-benar telah tampak hasilnya. Mereka yang telah digembleng dalam 'Aisyiyah bangkit sebagai generasi penerus yang percaya pada kemampuan sendiri. Selanjutnya mereka mengamalkan pendidikan yang telah diperoleh dalam mengembangkan 'Aisyiyah. Dalam hal ini, fase-fase perkembangan 'Aisyiyah secara dibagi dalam tiga fase.

1. Fase Pra Kemerdekaan (17 Agustus 1945)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa 'Aisyiyah Kota Makassar didirikan pada Tahun 1926 (sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945), yaitu 9 tahun setelah 'Aisyiyah Pusat diresmikan (1917) di Yogyakarta. Amal Usaha 'Aisyiyah dijadikan modal dan diteruskan sebagai pedoman gerak langkah organisasi. Hal ini telah mendorong 'Aisyiyah untuk lebih memperhatikan pendidikan kaum wanita. Tiap-tiap cabang 'Aisyiyah dalam wilayah Makassar diharapkan dapat mengurus anak-anak di wilayahnya, seperti asrama dan lain-lain. Kesempatan untuk anak-anak perempuan bersekolah sekarang ini menumbuhkan kesyukuran 'Aisyiyah bahwa rintisan Nyai Ahmad Dahlan dahulu diteruskan dan dikembangkan hingga menjelang satu abad, tetap eksis dan terus berlanjut

Perkembangan selanjutnya, amal usaha rintisan K.H. Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan baik di pusat maupun di daerah, khususnya di Kota Makassar telah menjadi keputusan Muktamar dengan dibukanya sekolah-sekolah kejuruan, antara lain: Sekolah Bidan, Sekolah Perawat, Sekolah Kepandaian Puteri, Sekolah Guru

Kepandaian Puteri, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, dan lain-lain. Usaha ini merupakan dorongan dan semangat 'Aisyiyah untuk memperhatikan kemajuan puteri-puteri pada umumnya dan gadis-gadis khususnya agar kelak mengganti meneruskan amal usaha yang telah didirikan. Generasi muda inilah yang diharapkan mengemudikan gerak langkah organisasi 'Aisyiyah dengan sebaik-baiknya.

Keberlanjutan 'Aisyiyah Kota Makassar dalam merespon lingkungan strategis dengan memperluas amal usaha yang ada, antara lain membuka Rumah Sakit Bersalin. Program ini bersifat pendidikan atau kemasyarakatan sebagai wujud semakin majunya pemikiran, pengetahuan dan pengalaman maka dalam penyampaian agama Islam bukan hanya melalui pengajian, tetapi juga melalui pendirian panti-panti asuhan, sekaligus dapat dijadikan media dakwah untuk membantu bidang sosial dan kemasyarakatan sehingga tercapai sasaran organisasi yang lebih baik.

Terkait dengan perkembangan 'Aisyiyah pada masa penjajahan, maka dibentuk gerakan kepanduan, yaitu Padvinders Muhammadiyah. Kemudian atas usul Hajid nama pandu itu diganti menjadi Hizbul Wathon. Pembentukan organisasi siswa praja sebagai wadah kegiatan ekstra kurikuler bagi seluruh siswa sekolah Muhammadiyah. Terbentuknya kelompok-kelompok pengajian remaja putri, orang dewasa, dan ibu rumah tangga sehingga mendorong perkembangan dan kemajuan 'Aisyiyah termasuk di Kota Makassar. Selain itu, setelah berdiri secara resmi 'Aisyiyah di Kota Makassar, remaja putri lulusan sekolah Muhammadiyah dikirim ke seluruh pelosok Sulawesi Selatan dalam upaya mengembangkan visi dan misi 'Aisyiyah.

Fase perkembangan ‘Aisyiyah Kota Makassar semakin pesat setelah Kongres Muhammadiyah ke-21 (1935) diselenggarakan di Makassar, yang memutuskan supaya Muhammadiyah menerbitkan surat kabar (*dagblaad*). Pelaksanaannya diserahkan kepada Pengurus Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Cabang Solo. Kemudian sekolah lima tahun yang akan menyambung ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs yang setingkat SLTP saat ini) bagi murid tamatan *vervolgschool* atau *standaardschool* kelas V. Dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah ini juga dipakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah Muhammadiyah saat itu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang didirikan pribumi yang dapat menyamai kemajuan pendidikan sekolah Belanda, sekolah Katolik, dan sekolah Protestan. Dalam hal ini, lembaga-lembaga pendidikan formal yang dirintis oleh ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah pada masa penjajahan (pra kemerdekaan) merupakan satu-satunya lembaga pendidikan bagi pribumi, untuk semua lapisan masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang diharapkan.

2. Fase Kemerdekaan (17 Agustus 1945)

Fase perkembangan ‘Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah pasca kemerdekaan (17 Agustus 1945), memberikan perhatian dan pembinaan sehingga konsep kemandirian organisasi ini masih dalam proses perjuangan. Sidang darurat Muhammadiyah pada tahun 1947, ‘Aisyiyah belum memiliki status otonom tetapi garis perjuangan ‘Aisyiyah tetap konsisten mendukung perjuangan Muhammadiyah hingga tahun 1950, Majelis ‘Aisyiyah diganti menjadi Pimpinan Pusat (PP)

‘Aisyiyah, tepatnya tanggal 21–26 Desember 1950 dalam Kongres XXXI atau Mukhtar I yang berlangsung di Yogyakarta. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam Mukhtar ini, yaitu:

- a. Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah untuk memperbaiki kerusakan akhlak.
- b. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan rakyat.
- c. Menyediakan *studiefonds* untuk membiayai para pelajar yang sekolah di luar negeri, dan mendirikan Universitas Muhammadiyah.
- d. Menghormati organisasi lain yang non-Islam selama tidak merugikan dan bersedia bekerjasama, saling menghargai agar tidak terjadi salah paham yang dapat merugikan perjuangan pokok Islam.
- e. Muhammadiyah dan/atau ‘Aisyiyah, baik sebagai organisasi maupun perorangan diperkenankan menjadi anggota DPR.

Tahun 1963 Nasyiatul ‘Aisyiyah (NA) diberi status otonom lepas dari ‘Aisyiyah. Ahmad Badawi diangkat menjadi Penasehat Pribadi Presiden di bidang agama. Berbagai gerakan dan aksi perjuangan yang dilakukan K.H. Fakhruddin adalah dalam rangka memperbaiki nasib dan kondisi umat serta bangsa Indonesia dari lumpur kebodohan, kehinaan dan ketertindasan di tangan penjajahan kolonial Belanda. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan, Pemerintah RI memberinya penghargaan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 162/1964. Kemudian penangkapan dan penahanan HAMKA

hingga 1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena dituduh pro-Malaysia. Dalam penjara beliau menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya terbesarnya.

Fase perkembangan 'Aisyiyah dalam masa pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998), mengalami dinamika perkembangan yang ditandai dengan pasang surut perubahan dan kemajuan, antara lain tanggal 16 Agustus 1966 Badan Koordinasi Amal (Muslimin) terbentuk. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi pendukung utama dari 16 organisasi yang tergabung dalam badan ini. Dengan demikian 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang dilakukan Muhammadiyah sebagai induk organisasi.

Perubahan mendasar yang pernah dialami 'Aisyiyah semasa rezim pemerintahan Orde Baru, adalah perubahan azas organisasi yang dilakukan Muhammadiyah, yang sebelumnya berazaskan agama Islam; berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, berubah menjadi azas tunggal yaitu Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan UU yang berlaku. Perubahan yang dilakukan 'Aisyiyah sebagai wujud respon atas lingkungan strategis dalam memelihara keberlanjutan organisasi.

Fase selanjutnya Ahmad Badawi diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Faqih Usman bersama Hasan Basri, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Anwar Haryono, mantan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mengirim nota politik kepada pemerintah Orde Baru, yang

dikenal dengan Nota KH. Faqih Usman; isinya permintaan agar Pemerintah Orde Baru merehabilitasi Masyumi sebagai partai terlarang. Hal ini terkait dengan “medan visional” yang ditulis para tokoh Muhammadiyah, terutama Ustadz K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA Ketua PP Muhammadiyah (1990-1995), secara khusus menulis Misi Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam. Muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh (1995), terpilihnya Prof. DR. H. M. Amien Rais, MA sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Wilayah kerja Majelis Tarjih tidak saja di bidang fikih, namun juga pengembangan pemikiran Islam. Karena itu, majelis ini sejak Muktamar Aceh berganti nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI).

3. Fase Reformasi (1998)

Fase reformasi (1998), adalah fase dimana berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah mundurnya Presiden Soeharto Wakil Presiden BJ. Habibie, menerima mandat sebagai Presidensi RI keempat menggantikan Soeharto. Sejumlah agenda reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya mewarnai perjalanan reformasi yang kini memasuki kurang lebih 15 tahun. Fase ini bagi ‘Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah cukup penting, karena sejumlah petinggi Muhammadiyah merupakan penggerak reformasi sehingga perubahan yang terjadi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah. Sebagaimana diketahui bahwa, Prof. Dr.

H.M. Amien Rais, MA merupakan tokoh utama reformasi, ketika itu sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Fase reformasi yang terkait dengan keberlanjutan 'Aisyiyah, seperti dijelaskan di atas bahwa tokoh utama reformasi Amien Rais sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah mengambil langkah untuk terlibat langsung dalam politik praktis. Maka Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif sebagai Ketua Umum menggantikan Prof. Dr. H.M. Amien Rais, MA yang meletakkan jabatan karena memimpin Partai Amanah Nasional (PAN), sebagai lanjutan dari amanat reformasi. Kemudian Tahun 2000 Muktamar XLIV Muhammadiyah di Jakarta, terpilih kembali Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif sebagai Ketua Umum. Kemudian Tahun 2002 Tanwir Muhammadiyah di Denpasar Bali, tanggal 24s/d 27 Januari 2002 menyepakati perlunya Muhammadiyah menyiapkan kader terbaiknya sebagai pemimpin nasional (Khittah Kehidupan Berbangsa dan Bernegara). Sidang Tanwir membahas Khittah Muhammadiyah dalam berbagai persoalan, termasuk rekomendasi Muhammadiyah bagi kemajuan bangsa dan negara. Masalah lainnya, adalah pembahasan tentang Bank Persyarikatan, di mana akan diputuskan apakah manajemen perbankan dapat diselenggarakan secara syariah atau secara konvensional.

'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah melakukan perubahan dan penyesuaian baik struktur maupun program. Sidang Tanwir 2009, di Bandar Lampung merupakan Sidang Tanwir kedua di era reformasi jelang Muktamar yang ke-46 di Yogyakarta pertengahan tahun 2010. Sidang Tanwir 2009 memiliki tujuan antara lain dihasilkannya keputusan untuk meningkatkan peran Muhammadiyah dan

'Aisyiyah sebagai Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dalam membangun kembali visi dan karakter bangsa, di tengah pergulatan bangsa-bangsa lain yang semakin maju. Sidang Tanwir 2009 dilaksanakan menjelang Pemilu 2009 dimana suasana politik Indonesia menghangat. Muhammadiyah dan 'Aisyiyah memberikan rekomendasi terkait Pemilu 2009, antara lain:

- a. Mendesak partai politik dan seluruh komponen untuk tidak menjadikan Pemilu 2009 sebagai ajang perebutan kursi kekuasaan yang menjurus pragmatisme dan menghalalkan segala cara. Pemilu harus dijadikan momentum untuk menghasilkan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden yang bertanggungjawab dalam menjalankan amanat rakyat, mengurus pemerintahan dengan benar, menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat kecil, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan etika publik, membangun kepercayaan, tidak menggunakan aji mumpung dalam melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya.
- b. Muhammadiyah menyerukan kepada segenap komponen untuk memilih pemimpin nasional yang memiliki: (1) visi, misi dan karakter yang kuat sebagai negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; (2) berani mengambil berbagai keputusan penting dan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak (umat), mampu menyelesaikan persoalan-persoalan krusial bangsa secara tegas, serta melakukan penyelamatan aset dan kekayaan negara, dan (3) mampu menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman baik di dalam maupun di luar negeri, serta mampu mewujudkan *good governance* termasuk melakukan pembe-

rantasan korupsi tanpa pandang bulu; dan (4) melepaskan jabatan di partai politik apapun dan berkonsentrasi dalam memimpin bangsa dan negara.

Fase perkembangan 'Aisyiyah di era reformasi menurut salah seorang Ketua PWA Sulawesi Selatan, yang sebelumnya Pengurus 'Aisyiyah Kota Makassa menilai bahwa:

Banyak perubahan yang harus dilakukan 'Aisyiyah dalam reformasi, baik struktur organisasi maupun program-program kerja terutama dalam bidang politik. Langkah perubahan perlu dilakukan merespon lingkungan strategis khususnya Muhammadiyah termasuk keterlibatan kader-kader terbaik 'Aisyiyah dalam politik praktis. Hal ini penting menurut tanggapan saya sebagai peribadi sekaligus mewakili pengurus 'Aisyiyah Sulawesi selatan, dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan organisasi, diantaranya melepaskan jabatan di 'Aisyiyah jika mengambil keputusan untuk terlibat dalam politik praktis seperti pengurus partai, dan lain-lain sebagaimana langkah yang diambil oleh Amien Rais. Selain itu, quota 30% perempuan dalam legislatif perlu dipertimbangan pengurus, dengan ketentuan tidak membawa nama organisasi karena kader-kader 'Aisyiyah harus tetap konsisten menjaga dan memelihara kemandirian dan keberlanjutan organisasi (hasil wawancara HQ, 12 Maret 2012).

Selain masalah politik praktis yang menjadi isu hangat awal reformasi, juga masalah yang terkait dengan responsif gender sebagai kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan. Dalam hal ini, konsep gender sebagai konstruksi peran sosial ditinjau dari sosiologis. Reformasi pemikiran di berbagai bidang khususnya peran perempuan merupakan ciri gerakan pembaruan. Demikian dapat ditegaskan bahwa "Kita tidak melupakan kodrat perempuan atau ingin mendominasi laki-laki, tapi yang kita minta adalah dilibatkan dalam peran kebangsaan, yakni 'Aisyiyah memainkan peran bagi seluruh bangsa. Kalau perempuan dilibatkan, akan lebih sempurna". Penegasan ini menunjukkan bahwa, budaya global dan Ideologi

globalisasi yang semakin meluas ditandai dengan paham dan sikap hidup masyarakat yang sangat mengagungkan materi dan kesenangan inderawi.

Perlu dipahami bahwa, respon ‘Aisyiyah dalam aplikasinya terhadap globalisasi lebih cenderung melahirkan manusia-manusia yang berwatak materialis, individualis, egois, hedonis dan bahkan materialis. Pengagungan manusia terhadap nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan bergeser menjadi pengagungan manusia terhadap nilai-nilai materi dan kekayaan. Watak dan karakter manusia yang demikian, jauh sebelumnya sudah ditantang dan dikritik keras oleh Aristoteles. Menurut Filusuf ternama ini, “Bahwa semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan dan materi, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan”.

Sikap individualisme secara diam-diam akan menyertai paham yang memutlakkan materialisme. Karena itu tidak heran jika penyebaran ideologi globalisasi ke dalam struktur sosial masyarakat, beriringan dengan retaknya etika, moralitas serta ikatan sosial yang sudah lama terbangun dalam kultur sosial masyarakat. Dasar-dasar, nilai-nilai keagamaan, kultural lambat laun namun pasti mulai terkikis seiring kuatnya hegemoni ideologi globalisasi dalam seluruh struktur sosial yang ada, mulai dari level negara, organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan, hingga pada level keluarga. Bahkan tidak asing lagi, jika ideologi yang sangat menganut paham materialisme dan rasionalisme mutlak ini, juga mendorong terjadinya proses liberalisasi agama sebagai komoditas pasar yang

diperjualbelikan, diiklankan dan dicitrakan dalam berbagai bentuk demi kepentingan ekonomis dan status sosial.

Masalah lain yang tidak luput dari respons 'Aisyiyah Kota Makassar, karena sangat memprihatinkan adalah praktek pornografi yang tersebar di ruang publik yang diproduksi dan tersebar secara meluas di media masa dan dunia maya yang vulgar dan menjadi komoditi. Hal ini menurut pandangan salah satu Wakil Ketua 'Aisyiyah, bahwa:

Masalah-masalah yang dihadapi dalam reformasi sangat kompleks sehingga 'Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan, merasa perlu untuk melakukan gerakan dan tindakan nyata melalui program-program kerja sebagai bentuk kepedulian dan respon terhadap masalah-masalah tersebut, agar tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap masyarakat khususnya generasi muda. Masalah ini diperparah oleh makin terbukanya sajian-sajian televisi, media cetak dan media lainnya yang menampilkan sikap kekerasan, perilaku permisif, serta hal-hal yang dapat melemahkan mental dan nilai budaya lokal maupun nasional. Permasalahan tersebut akan merusak nilai-nilai yang substansi dari ajaran agama sekaligus menjauhkan fungsi sosial dan kemanusiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, peran dan fungsi 'Aisyiyah dalam memberdayakan masing-masing majelis dan lembaga untuk mengatasi berbagai persoalan dalam reformasi sangat diperlukan (hasil wawancara RA, 25 Maret 2012).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa, pola kehidupan masyarakat yang demikian harus dibendung melalui kegiatan-kegiatan pendidikan rohani dan religius dengan pendekatan baru sehingga dapat membangkitkan dan menampilkan kesalehan manusia secara individual dan kolektif, serta tercipta peradaban yang Islami dan mengontrol peradaban seiring dengan dinamika kehidupan manusia. Agama dalam hal ini harus mampu menawarkan ajaran yang dapat menyembuhkan masalah sosial, kultural sekaligus menjadi landasan moral dan spiritual bagi terbentuknya kebudayaan dan peradaban yang membawa keselamatan hidup umat manusia.

Masalah budaya lainnya yang masih menjadi kendala khususnya dalam pemberdayaan perempuan adalah masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Budaya ini cenderung menegaskan posisi perempuan, melahirkan diskriminasi, dan relasi-relasi bias gender, yang bertentangan dengan peradaban mulia umat manusia dan ajaran agama Islam.

Kehidupan demokrasi mengalami kemajuan yang pesat, tetapi terjadi kecenderungan demokrasi prosedural yang tidak diimbangi dengan bentuk demokrasi substantif, sehingga kualitas dan perilaku berdemokrasi cenderung pragmatis serta mengalami penurunan terutama nilai-nilai moral. Respons 'Aisyiyah dalam menjaga keberlanjutan terhadap dinamika organisasi internal (lingkungan strategis Muhammadiyah) dan organisasi eksternal (lingkungan strategis Pemerintah) dalam kehidupan berdemokrasi cenderung menganut paham demokrasi liberal, sehingga dalam jangka panjang akan menimbulkan persoalan termasuk dalam hubungan moral dan agama. Dalam konteks ini, 'Aisyiyah yang sebelumnya berlandaskan agama Islam dan berpedoman kepada al-Qur'an menerima Pancasila sebagai azas tunggal sesuai dengan UU yang berlaku seolah kehilangan dasar orientasi nilai-nilai moral dalam membingkai demokrasi. Demikian halnya kecenderungan demokrasi liberal yang tampak menguat dalam mengembangkan otonomi dan melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Respons 'Aisyiyah terhadap masalah-masalah yang berskala nasional maupun lokal tersebut, sebagai wujud keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah di dalam merespon lingkungan strategis secara internal dan secara eksternal. Dalam hal sistem politik

multipartai di Kota Makassar semakin menunjukkan kerancuan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, disertai dengan perilaku elite politik dan parpol yang pragmatis, yakni orientasi politik yang berpusat pada kekuasaan semata sehingga menghalalkan segala cara juga menjadi sorotan 'Aisyiyah dalam Pemilu Legislatif maupun Pilkada.

Keberlanjutan 'Aisyiyah dalam reformasi selama kurang lebih 15 tahun juga direalisasikan melalui program kerja Majelis Kesehatan, meliputi: (a) meningkatkan kualitas SDM dalam bidang kesehatan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan; (b) upaya penurunan angka kematian bayi dan balita melalui imunisasi ASI Eksklusif dan pemberian gizi seimbang; (c) meningkatkan pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga, amal usaha, tempat umum, dan tempat ibadah; (d) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti malaria, TB dan penyakit lainnya, dan (e) meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan peran 'Aisyiyah terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Ketua Majelis Kesehatan, dalam memelihara keberlanjutan 'Aisyiyah merespon lingkungan strategis bertujuan untuk:

Meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat luas secara khusus bagi perempuan dan anak berbasis pada al-Qur'an Surat Al-Ma'un. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan meliputi: (1) senam lansia (lanjut usia); (2) pelatihan perawatan kulit bayi; (3) seminar kesehatan lanjut usia; (4) pelatihan kesehatan gizi anak; (5) penyuluhan sosialisasi pemberian makanan tambahan; (6) pelatihan kader deteksi dini kelainan tumbuh kembang bayi dan anak; (7) penyuluhan pembinaan dan sosialisasi PHBS; (8) bakti sosial, pengobatan gratis, pembinaan kelompok lansia;

(9) penyuluhan tentang bahasa NAPZA; (10) deteksi dini penyakit menular; dan (11) seminar kanker serviks (hasil wawancara HD, 12 Maret 2012).

Data dan informasi tentang pembangunan di bidang ekonomi banyak kemajuan yang telah diraih, yaitu pertumbuhan dan pendapatan perkapita penduduk terus meningkat. Namun, perhatian pemerintah terhadap ekonomi masyarakat semakin nyata dengan banyak dan beragamnya skema program ekonomi yang ditujukan pada masyarakat golongan menengah-bawah masih kurang. Karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai kemajuan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan dan stabilitas makro ekonomi masih jauh dari memadai, serta bias terhadap fakta-fakta ekonomi yang ada. Penjelasan dari Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, bahwa:

Saya sebagai penanggung jawab Majelis Ekonomi, melihat fondasi dan ketahanan ekonomi Kota Makassar masih lemah, hal ini disebabkan oleh orientasi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan kepada aspek pertumbuhan bertumpu pada investasi asing, utang luar negeri, dan konglomerasi. Kondisi ini mengakibatkan hasil pembangunan hanya dikuasai dan dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, kesenjangan melebar, dan sendi-sendi kehidupan sosial-ekonomi tumbuh tanpa akar yang kuat. Beberapa persoalan ekonomi nasional yang mendasar dan bersifat struktural adalah paradigma ekonomi yang tidak konsisten dan dualistik, di satu pihak kebijakan fiskal belum mandiri, sistem keuangan dan perbankan yang tidak memihak kepada rakyat, dan kebijakan industri yang liberal (hasil wawancara BB, tanggal 20 Maret 2012).

Keberlanjutan 'Aisyiyah dalam bidang sosial-budaya terutama di Kota Makassar telah mencapai berbagai keberhasilan. Menurut salah satu Wakil Ketua 'Aisyiyah yang mengkoordinir kegiatan sosial budaya, bahwa:

Kegiatan di bidang pendidikan terdapat peningkatan secara kualitas dan kuantitas pendidikan, pemerataan kesempatan belajar, peningkatan prestasi belajar anak-anak khususnya siswa yang dibina sekolah-sekolah 'Aisyiyah tingkat regional dan internasional. Di bidang penegakan hukum terdapat keseriusan

'Aisyiyah Kota Makassar di dalam pemberantasan korupsi yang membawa implikasi pada moralitas publik, disertai lahirnya produk perundang-undangan yang berpihak pada hak asasi manusia, perlindungan perempuan dan anak, serta penegakan moral. Di bidang kehidupan beragama semakin meluas iklim dan kesadaran untuk hidup rukun dalam kemajemukan (hasil wawancara RA, 22 Maret 2012).

Dalam hubungan sosial masih cukup kuat budaya gotong royong dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan ketika menghadapi bencana alam. Namun demikian, masih terdapat permasalahan sosial-budaya yang perlu mendapatkan pemecahan yang serius, di antaranya memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan, disorientasi nilai keagamaan, memudarnya kohesi sosial, dan melemahnya mentalitas yang positif. Menyadari hal tersebut, 'Aisyiyah Kota Makassar melalui program-program kerja yang dicanangkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, serta Lembaga Kebudayaan dalam upaya mencegah dan menanggulangi masalah-masalah yang dimaksud. Masalah lain yang kecenderungan melemahkan karakter bangsa adalah kekerasan yang terorganisir termasuk kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan, kriminalitas, perjudian, pornografi dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya serta merusak nilai-nilai agama dan moral.

Realisasi program kerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Periode (2010 – 2015), yaitu: (1) mengembangkan penelitian dan pengkajian masalah keorganisasian untuk mendukung kebijakan dan pengembangan organisasi; (2) meningkatkan dan mengembangkan fungsi data dan informasi sebagai salah satu sumber penting dalam pengambilan kebijakan organisasi dan pengembangan gerakan, dan (3) mengembangkan publikasi hasil kajian dan penelitian secara luas melalui

media, baik cetak maupun elektronik. Di samping itu, tujuan yang hendak diwujudkan melalui program kerja tersebut di atas, adalah terbangunnya kesadaran dan perilaku ramah lingkungan bagi anggota dan pimpinan di setiap tingkatan dan amal usaha.

Realitas yang menunjukkan bahwa, dalam upaya mencapai tujuan tersebut sebagai wujud keberlanjutan organisasi, seperti disampaikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan, meliputi: (1) membuat peta wilayah untuk mengadakan survey untuk mengetahui jumlah cabang 'Aisyiyah yang aktif; (2) mengumpulkan data atau informasi terkait dengan sasaran obyek kajian, dan (3) mempublikasikan kegiatan penelitian melalui media. Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

Realisasi program kerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan, kurang waktu lima tahun terakhir menunjukkan hasil positif, maka program kerja lima sampai sepuluh tahun ke depan harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dengan merespon lingkungan strategis secara berkelanjutan. Secara politik, respons 'Aisyiyah terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan Muhammadiyah, baik struktural maupun program kerja, meskipun belum mencapai stabilitas politik yang permanen. Secara ekonomi, 'Aisyiyah mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi belum menjamin adanya pemerataan dan keadilan untuk kemakmuran semua warga. Selain itu, 'Aisyiyah juga menghadapi berbagai masalah sosial yang tidak mudah untuk diselesaikan di bidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan, mengatasi kerusakan lingkungan, dan menjaga martabat serta kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, 'Aisyiyah tetap konsisten menjaga, memelihara, dan mempertahankan keberlanjutan organisasi (hasil wawancara MR, 20 Maret 2012).

Sementara budaya populer akan semakin menjadi kecenderungan yang luas dalam masyarakat seiring dengan perkembangan media elektronik yang sangat pesat, memungkinkan kebudayaan nasional dan daerah berada di persimpangan jalan dalam dinamika globalisasi yang semakin kompleks. Karena itu, 'Aisyiyah Kota Makassar memerlukan strategi dalam menghadapi globalisasi maupun dinamika masyarakat

majemuk yang sering mengalami konflik sosial. Selain itu, keragaman bahasa, sistem ekonomi, politik, strata sosial, religi, dan kesenian, cenderung menguat dengan semakin efektifnya proses demokrasi dan otonomi daerah, yang dapat membawa konsekuensi luas dalam sistem kebudayaan masyarakat Kota Makassar dan Indonesia. Hal tersebut akan menjadi tantangan besar bagi organisasi Muhammadiyah yang telah berkembang semakin besar dan kompleks, dengan jangkauan wilayah yang sangat luas untuk menghadirkan gerakan Islam berwawasan kebangsaan dan kebudayaan yang mampu memberikan alternatif jawaban mencerahkan, membebaskan, dan memberdayakan kepentingan kejayaan masa depan umat dan bangsa.

Menghadapi situasi dan kondisi yang demikian, segenap Pengurus dan Pimpinan 'Aisyiyah Kota Makassar, lima sampai sepuluh tahun ke depan memerlukan revitalisasi visi, misi dan karakter organisasi sebagai tolok ukur melakukan konsolidasi internal dan eksternal reformasi. Dengan menyadari nilai positif yang dihasilkan reformasi dan kesadaran adanya masalah yang kompleks tersebut, maka kini diperlukan penajaman-penajaman terhadap visi dan misi 'Aisyiyah secara berkelanjutan. Reformasi 'Aisyiyah perlu dirancang ulang yang diintegrasikan ke dalam pembangunan yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga reformasi berada dalam arah dan jalur yang benar. Pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan perlu dikembangkan dalam bingkai paradigma pembangunan berkelanjutan yang bermakna (*sustainable development with meaning*).

Paradigma ini bertumpu pada prinsip pengembangan sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan, pemanfaatan sumberdaya alam secara produktif dengan menjaga kelestarian, kebijakan ekonomi dan politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi moralitas dan menjaga martabat bangsa. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan dan bermakna sebagai upaya perbaikan dalam kehidupan manusia dengan menjaga keseimbangan material dan spiritual, individu dan masyarakat. Cara untuk meningkatkan martabat bangsa melalui rekonstruksi.

Hal ini menurut salah satu Wakil Ketua PDA 'Aisyiyah Kota Makassar, menegaskan bahwa:

Sejak awal berdirinya 'Aisyiyah berada *on the track* untuk menjawab problem mentalitas ini, karena 'Aisyiyah merupakan *jam'iyah* (organisasi massa) dan gerakan yang dinamis membentuk bangsa yang bermartabat. Salah satu hal yang penting dalam memperkuat pemahaman mengenai *jihad* dalam arti luas. Hal ini disebabkan lemahnya karakter dan martabat manusia dapat menimbulkan banyak masalah di bidang agama, politik, sosial, ekonomi, hukum dan pendidikan. Masalah-masalah tersebut yang menjadi perhatian dan komitmen 'Aisyiyah dalam melahirkan berbagai rekomendasi dalam upaya membangun kemandirian dan keberlanjutan organisasi (hasil wawancara BB, tanggal 22 Maret 2012).

Lebih jauh dijelaskan bahwa, 'Aisyiyah sebagai organisasi massa dan memiliki komitmen sejak awal didirikan hingga sekarang terus diperjuangkan secara berkesinambungan, khususnya di Kota Makassar dalam merespons berbagai persoalan termasuk kasus tenaga kerja wanita asal Indonesia yang teraniaya di Malaysia dan Arab Saudi sebagai wujud kepedulian masalah-masalah sosial yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh sebab itu 'Aisyiyah mendesak pemerintah dan lembaga-lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri untuk lebih serius dan

selektif dalam pengiriman Tenaga Kerja Wanita. Selanjutnya pemerintah wajib memberi perlindungan serta advokasi terhadap para TKI khususnya TKW yang sering menjadi korban kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi melalui langkah-langkah yang lebih tegas dan optimal. Selain itu 'Aisyiyah juga mendesak pemerintah agar menindak tegas pihak-pihak yang melakukan perdagangan manusia (*trafficking*) dan mengefektifkan pelaksanaannya.

Selanjutnya informasi lain terkait dengan keberlanjutan organisasi di dalam merespons lingkungan strategis, menurut salah seorang Wakil Ketua yang membidangi dakwah keagamaan, mengatakan bahwa:

Perkembangan 'Aisyiyah lebih cepat dibanding dengan pemerintah sejak didirikan, karena kemampuan dalam mengelola daya kontigensi, ketekunan, dan kesungguhan semua warga dan para pengurus. Saya juga tidak tahu persis mengapa kondisi itu bisa terjadi, padahal kalau dilihat dari segi tanggung jawab terutama para pengurus yang pada umumnya berkeluarga, selain mengurus rumah tangga dan profesinya (pekerjaannya) sebagai PNS (umumnya adalah guru), tetap menyisihkan waktunya untuk mengurus 'Aisyiyah sehingga dalam perkembangannya sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia, hingga saat tetap berlanjut dan bertahan dalam goncangan serta desakan arus globalisasi dan modernisasi yang demikian kompleks, dan ke depan 'Aisyiyah tetap menunjukkan jati dirinya sebagai organisasi perempuan modern di dalam membina ummat (masyarakat) sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, (hasil wawancara, AD, tanggal 17 Februari 2012).

Dinamika keberlanjutan 'Aisyiyah Kota Makassar dilihat dari realisasi program-program kerja yang telah dirancang secara sistematis, kemudian diimplementasikan sesuai dengan kondisi masing-masing majelis di tingkat cabang dan ranting secara berkeberlanjutan. Sebagai contoh, pemahaman 'Aisyiyah tentang bidang kesejahteraan sosial yang diperjuangkan adalah terciptanya suatu kondisi ideal dari tata kehidupan masyarakat yang *baladun thayyibatun wa rabbun ghaffur*, yaitu

suatu kehidupan bahagia sejahtera penuh limpahan rahmat dan nikmat Allah swt. di dunia dan akhirat. Dengan demikian, tercipta suatu titik keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah ataupun aspek material dan spiritual.

Menurut Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial bahwa, sejak berdirinya ‘Aisyiyah Kota Makassar kegiatan kesejahteraan sosial telah dimulai dalam bentuk membantu kaum miskin dan anak yatim. Dalam perkembangan saat ini, program kesejahteraan sosial tersistem ke dalam unit-unit kegiatan sosial antara lain: (1) kepedulian dan usaha-usaha pelayanan terhadap kelompok dhuafa; (2) pengembangan dan pemberdayaan lembaga-tembaga sosial yang dikelola oleh ‘Aisyiyah seperti panti asuhan, panti jompo, balai latihan, dan rumah singgah; (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan; (4) pelayanan korban dan penanggulangan bencana atau musibah; (5) advokasi publik yang menyangkut masalah- masalah sosial di berbagai lapisan masyarakat, dan (6) mengembangkan pola pencegahan dan pemberian bantuan terhadap korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan lain-lain.

Jenis dan bentuk program Dakwah Terpadu terkait dengan dinamika keberlanjutan ‘Aisyiyah Kota Makassar, adalah:

- a) Tabligh Bina Ummat, yaitu bentuk penyiaran Islam (dakwah bil-lisan) yang diprogram secara intensif dan berkelanjutan. Tabligh ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemahaman dan pengamalan. Tabligh ini mengarah pada pembinaan yang dilakukan secara dialogis, intensif, dan berkelanjutan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan Islam secara kaffah.

Tabligh Bina Umat berbentuk kelompok kajian, dan konsultasi keagamaan tentang persoalan keseharian, dan lain-lain.

- b) Tabligh Media, yakni dakwah bil lisan dengan melalui media masa. Dakwah ini berbentuk penyebaran informasi keagamaan dengan melalui tulisan (brusur, pamflet, bulletin) dan kaset, dengan sasaran kelompok-kelompok kajian yang anggotanya masih awam dalam pemahaman, kesadaran, dan pengamalan ajaran Islam.
- c) Bina Remaja Putri, yaitu pembinaan yang khusus diberikan kepada para remaja putri Islam di semua lapisan masyarakat: bimbingan keagamaan, kesadaran hukum, partisipasi politik, dan ketrampilan wanita dalam rangka pengembangan potensi dan sumber daya remaja putri Islam.
- d) Bina Keluarga Dhu'afa, yaitu kegiatan dakwah yang khusus bertujuan untuk membantu memecahkan masalah dan peningkatan taraf hidup kehidupan masyarakat yang lemah ekonominya. Bentuk dakwah ini meliputi membuka lapangan kerja, pendidikan ketrampilan wirausaha, pelayanan kesehatan, pembinaan keluarga sakinah.
- e) Kesehatan bagi Wanita, yakni program dakwah yang khusus untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, baik secara individu, jamaah, ataupun kesehatan masyarakat. Jenis kegiatan yang dikembangkan adalah penyuluhan dan pelayanan kesehatan, apotik hidup, kesehatan mental, kesehatan ibu dan anak, dan kegiatan lain yang menuju pada perilaku hidup sehat. Sebagai sasarannya yaitu kelompok kaum wanita, baik remaja maupun ibu rumah tangga.

Program Kerja Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaanterkait dengan dinamika keberlanjutan ‘Aisyiyah Kota Makassar, meliputi: (1) kewirausahaan melalui penguatan dan pengembangan usaha makro, menengah yang dikelola oleh perempuan agar memperjuangkan hak dan kepentingannya; (2) optimalisasi pembinaan ekonomi melalui BUEKA, dan (3) mengadakan berbagai macam pelatihan dan keterampilan.

Ketiga program kerja di atas bertujuan agar “Terbangunnya kesadaran dan perilaku ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga, umat dan masyarakat”. Untuk mencapai tujuan ini, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan melakukan kegiatan: (1) Membuat home industry; (2) Mengaktifkan BUEKA di setiap cabang ‘Aisyiyah; (3) Pendataan pengusaha ‘Aisyiyah di cabang-cabang; (4) Mengadakan kursus kue dan makanan, (5) Pameran dan Bazaar d. Mengadakan bazaar

Program kerja Majelis Pengkaderan (Pembinaan Kader), meliputi: (a) mengembangkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengkaderan di tingkat cabang dan ranting secara terencana dan berkelanjutan; (b) optimalisasi fungsi dalam peran amal usaha sebagai pendidikan dan pembinaan kader; (c) mengoptimalkan pembinaan kader melalui keluarga, amal usaha, AMM, untuk menjadi pelopor dan pelangsupng gerakan.

Tujuan yang hendak diwujudkan dalam merealisasikan program kerja Majelis Pengkaderan (Pembinaan Kader), ialah meningkatkan kuantitas dan kualitas kader yang memiliki integritas, kompetensi, keagamaan, keilmuan, sikap dan tindakan yang berpegang pada nilai-nilai Islam. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka

kegiatan yang dilakukan adalah : (a) Penataran pimpinan; (b) Job Training kesekretariatan dan kebidaharaan; (c) Pelatihan kepemimpinan dan keprotokuleran; (d) Cerdas cermat tentang ke 'Aisyiyahan dan ke Muhammadiyah.

Program kerja Majelis Hukum dan HAM, meliputi: (a) berpartisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum dan HAM, sehingga terwujud rasa keadilan bagi setiap warga Negara; (b) meningkatkan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencegahannya; (c) meningkatkan pengawasan dan pencegahan perdagangan manusia.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program kerja Majelis Hukum dan HAM, adalah terbangunnya kesadaran perilaku hukum dan HAM dalam menciptakan keadilan, ketertiban dan kebaikan hidup bersama yang berbasis pada norma-norma hukum, agama, dan budaya bangsa. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) Penataran pimpinan; (2) Job Training kesekretariatan dan kebidaharaan; (3) Pelatihan kepemimpinan dan keprotokuleran; (4) Cerdas cermat tentang ke 'Aisyiyahan dan ke Muhammadiyah.

Program Nasional yang bersifat umum, terkait dengan keberlanjutan 'Aisyiyah Kota Makassar, ialah: (a) mengembangkan pedoman atau tuntunan dan materi tabligh dalam berbagai aspek kehidupan untuk pembinaan masyarakat yang bersifat peneguhan dan pencerahan; (b) mengembangkan peta dakwah sebagai panduan pelaksanaan tabligh di seluruh tingkatan dari tingkat pusat sampai tingkat ranting; (c) mengintensifkan pembinaan aqidah, akhlak, ibadah, dikalangan warga 'Aisyiyah dan masyarakat luas melalui pengajian, kajian, publikasi dan media lainnya

secara terprogram sesuai faham agama dalam Muhammadiyah yakni Islam yang berkemajuan; (d) mengintensifkan pembinaan dhuafa', muallaf dan masyarakat khusus (suku terasing, nelayan, petani, jermal, dan lain sebagainya); (e) mengintensifkan kajian tafsir Al Qur'an dan hadits bagi anggota, kader, dan pimpinan untuk meningkatkan pemahaman Islam yang benar; (f) pelaksanaan kehidupan sehari-hari berdasarkan pedoman kehidupan Islami; (g) mengintensifkan pembinaan keluarga yang berpedoman pada tuntunan keluarga sakinah serta mengembangkan media konsultasi keluarga.

Selanjutnya dipertegas oleh salah satu Wakil Ketua PWM Sulawesi Selatan, bahwa 'Aisyiyah Kota Makassar memelihara keberlanjutan dengan melaksanakan kegiatan Dakwah Islamiah, meliputi:

- (1) Gerakan jamaah pengajian dan kajian-kajian keagamaan di tingkat komunitas sebagai basis perintisan program Qaryah Thayibah.
- (2) Pembinaan paham agama sesuai dengan tuntutan Muhammadiyah bagi kelompok-kelompok bimbingan haji Aisyiyah.
- (3) Meningkatkan penyiapan ulama tarjih perempuan yang memahami dan mampu menguasai perkembangan fiqh dan masalah-masalah Islam sebagaimana faham agama di Muhammadiyah.
- (4) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mubalighot dalam berbagai aspek seperti penguasaan metode, materi, strategi dakwah serta penguasaan IT (*information technology*).
- (5) Mengembangkan media tabligh sebagai sarana pembinaan umat melalui media cetak dan elektronik untuk memperluas jaringan dan jangkauan dakwah yang bersifat peneguhan dan pencerahan.
- (6) Melaksanakan tuntunan dakwah kultural melalui kegiatan tabligh dalam berbagai aspek kehidupan bagi masyarakat yang majemuk sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah.
- (7) Meningkatkan fungsi masjid, mushalla, dan sarana-sarana dakwah sebagai pusat kegiatan penyiaran Islam secara terprogram.
- (8) Mengembangkan tabligh dengan pemahaman Islam secara benar yang mendorong pencapaian ketaqwaan tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mencegah berbagai bentuk radikalisasi, kekerasan, dan ketidak

adilan sejalan dengan misi Islam rahmatan lil-alamin yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (hasil wawancara IT, tanggal 25 Maret 2012).

Program Khusus Pembinaan Keluarga, dengan tujuan: Terbina dan berkembangnya kualitas kehidupan keluarga dalam seluruh aspek secara berkeadilan dan berkemakmuran menuju terciptanya keluarga sakinah. Hal ini dapat direalisasikan melalui program-program sebagai berikut:

- 1) Memperkuat pembinaan keluarga dengan basis nilai-nilai agama, untuk membentuk manusia yang memiliki kekokohan iman, mentalitas dan karakter yang kuat agar mampu mengembangkan potensi dan kapasitas diri yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan bangsa.
- 2) Memperluas sosialisasi dan peningkatan kualitas pembinaan keluarga berpedoman pada tuntunan keluarga Sakinah bagi masyarakat luas melalui berbagai model yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 3) Mengintensifkan pembinaan keluarga khususnya bagi anak-anak dan remaja yang berpedoman pada tuntunan keluarga Sakinah.
- 4) Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dan kewajiban dalam keluarga serta kesadaran tentang kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
- 5) Meningkatkan peran keluarga (orang tua dan orang dewasa) sebagai pendamping anak dalam beradaptasi dengan dunia media dan informasi yang sangat berpengaruh pada perkembangan kejiwaan dan kehidupan anak-anak melalui pendidikan media literasi.

- 6) Mengembangkan pendekatan, model-model perlindungan dan bantuan hukum bagi para perempuan korban kekerasan dan anak-anak korban berlandaskan pendekatan agama dan hukum.
- 7) Memasyarakatkan usaha pencegahan dini terhadap bahaya-bahaya miras, napza, demoralisasi, seks bebas, kriminalitas, dan bentuk-bentuk penyakit social lainnya melalui pembinaan keluarga secara langsung, penyebaran leaflet, booklet, dan publikasi media cetak dan elektronik.
- 8) Mengembangkan model pendidikan bagi orang tua (parenting) dalam pembinaan karakter anak di keluarga melalui berbagai model sesuai dengan tuntunan keluarga sakinah.

Program Bidang Pengkaderan, bertujuan Meningkatnya kuantitas kader yang memiliki integritas, kompetensi keagamaan dan keilmuan, serta sikap dan tindakan yang berpegang pada nilai-nilai Islam, meliputi:

- a) Sistem perkaderan yang mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam yang berkemajuan, nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dan nilai-nilai ‘Aisyiyah untuk mewujudkan kader-kader yang berkualitas, memiliki mentalitas tangguh, kesadaran, keyakinan, perilaku, dan komitmen dalam perjuangan.
- b) Mengembangkan pelaksanaan perkaderan dari tingkat pusat sampai tingkat ranting secara terencana, periodik dan berkelanjutan melalui Darul Arqam, Baitul Arqam, kajian intensif, dan model kajian lainnya agar mampu berperan sebagai kader umat, dan kader bangsa.

- c) Optimalisasi fungsi dan peran amal usaha ‘Aisyiyah sebagai lembaga pembibitan dan pembinaan kader ‘Aisyiyah, termasuk pada lembaga pendidikan tinggi.
- d) Mengoptimalkan pembinaan kader melalui keluarga, amal usaha, dan transformasi AMM putri untuk memperkokoh kelangsungan gerakan.
- e) Mengembangkan pembinaan kader ulama perempuan sesuai dengan pemahaman Islam dalam Muhammadiyah.
- f) Mengembangkan model perkaderan untuk pendidikan kader bangsa dalam rangka meningkatkan peran ‘Aisyiyah dalam melaksanakan misi dakwah kebangsaan.
- g) Mengembangkan model pembinaan kader lintas ilmu-profesi baik di amal usaha ‘Aisyiyah maupun melalui kelompok di masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan lintas majelis/lembaga.
- h) Pemetaan potensi, kebutuhan, dan distribusi kader baik yang ada dalam struktur maupun di luar struktur untuk mendukung proses kaderisasi sistemik dengan menggunakan strategi pengembangan *interest group* (kelompok minat) di masyarakat.
- i) Mengembangkan dan memobilisasi transformasi kader AMM putri sebagai pelopor dan pelangsupng gerakan ‘Aisyiyah.

Bidang Pendidikan, dengan tujuan meningkatnya kualitas keunggulan pendidikan 'Aisyiyah sebagai strategi pembentukan manusia yang utuh, berilmu dan berkarakter sesuai dengan tujuan pendidikan.

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sampai Perguruan Tinggi baik jumlah maupun kualitas yang diarahkan kepada pencerahan, pencerdasan, dan pemberdayaan agar menjadi manusia yang taqwa, berilmu, terampil, berkepribadian, mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.
- b) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tingkat perguruan tinggi baik kuantitas maupun kualitas yang mencakup berbagai bidang ilmu untuk pengembangan dakwah.
- c) Meningkatkan mutu pendidikan 'Aisyiyah termasuk kurikulum sesuai UU yang berlaku, sehingga mampu memenuhi standart pendidikan nasional dan mengembangkan lembaga pendidikan 'Aisyiyah yang memiliki keunggulan khusus dan ciri khas 'Aisyiyah.
- d) Mengembangkan jenis, jenjang dan jalur pendidikan baru seperti pendidikan kejuruan, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan anak yang berkebutuhan khusus, dan model-model pendidikan informal sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat luas.
- e) Meningkatkan kualitas pendidik, peningkatan jenjang pendidikan, pelatihan kependidikan, pelatihan penguasaan IT, forum seminar dan diskusi, berbagai

cara lain yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah.

- f) Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan organisasi berdasarkan sistem kinerja disertai dengan pembinaan komitmen dan pengabdian terhadap 'Aisyiyah.
- g) Revitalisasi TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal dalam berbagai aspek agar mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain.
- h) Meningkatkan peran lembaga pendidikan sebagai basis kaderisasi yang dilaksanakan masing-masing lembaga pendidikan 'Aisyiyah.
- i) Mengembangkan data base lembaga pendidikan 'Aisyiyah sebagai pusat informasi dan basis pengembangan pendidikan.
- j) Meningkatkan program keaksaraan fungsional dengan life skill yang dikembangkan melalui berbagai kegiatan bersinergi dengan majelis dan lembaga (lintas majelis/lembaga).

Program kerja bidang kesehatan, bertujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, khususnya kaum perempuan, bayi dan anak yang berbasis pelayanan kesehatan dan komunitas, dengan kegiatan:

- a) Menyusun dan mengembangkan pedoman dan tuntunan manajemen amal usaha di bidang kesehatan yang berorientasi pada mutu dan profesionalisme serta berbasis pada nilai-nilai a-Qur'an, sehingga mampu bersaing dengan lembaga kesehatan lain di masyarakat.

- b) Mengembangkan panduan pengelolaan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan untuk menjadi acuan bagi para penggerak/penggiat kesehatan di masyarakat.
- c) Meningkatkan kualitas sumberdaya di bidang kesehatan melalui berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan, pelatihan, magang, dan kegiatan lainnya untuk peningkatan kapasitas.
- d) Meningkatkan upaya penurunan angka kematian ibu yang melahirkan melalui berbagai kegiatan.
- e) Meningkatkan upaya penurunan angka kematian bayi dan balita dengan prioritas program seperti Imunisasi, ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), pemberian gizi seimbang dan tumbuh kembang anak, dan program lainnya.
- f) Meningkatkan kualitas Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana (KB) yang berkeadilan dan berbasis nilai-nilai Islam.
- g) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilingkungan keluarga, lingkungan amal usaha 'Aisyiyah, tempat umum, tempat ibadah dan di lingkungan komunitas masyarakat luas.
- h) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit menular (malaria, TBC, dan penyakit lainnya seperti diabetes millitus, kanker, stroke, dan HIV/AIDS).
- i) Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui implementasi konsep Keluarga sakinah dan

Qaryah Thayyibah di bidang kesehatan atau Desa Siaga (Pengembangan Taman Obat Keluarga, dan Posyandu Balita).

- j) Meningkatkan kuantitas dan kualitas motivator kesehatan masyarakat yang siap sebagai penggerak perilaku hidup sehat.
- k) Meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan dengan pemerintah dan berbagai pihak secara lebih aktif untuk memperluas peran 'Aisyiyah dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- l) Revitalisasi amal usaha kesehatan 'Aisyiyah antara lain Rumah Sakit (RS), Rumah Bersalin (RB), Balai Pengobatan (BP), dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) secara profesional dan berorientasi al Ma'un sehingga lembaga-lembaga pelayanan kesehatan 'Aisyiyah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
- m) Memperkuat sinergi Amal Usaha Pendidikan Kesehatan 'Aisyiyah dan Muhammadiyah dalam program magang kerja, pelatihan, penempatan tenaga kesehatan baik dalam maupun luar negeri.
- n) Mengembangkan data base Amal Usaha Kesehatan 'Aisyiyah sebagai pusat informasi dan basis peningkatan kualitas layanan maupun pengembangan amal usaha kesehatan.

Bidang Kesejahteraan Sosial, bertujuan agar berkembangnya atau meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan penyantunan masyarakat dhuafa dan berbagai kelompok yang termarginalkan melalui kegiatan:

- a) Menyusun dan mengembangkan pedoman dan tuntunan manajemen amal usaha di bidang kesejahteraan sosial antara lain panti asuhan, rumah singgah, dan amal usaha lainnya yang berorientasi pada mutu dan profesionalisme sehingga mampu bersaing dengan lembaga layanan sosial yang berkembang di masyarakat.
- b) Meningkatkan usaha pemberdayaan, pelayanan, dan penyantunan melalui berbagai model aksi bagi kelompok masyarakat miskin, anak-anak terlantar, anak jermal, Lansia, penyandang cacat atau orang yang memiliki kebutuhan khusus, korban narkoba, serta kelompok lain yang termarginalkan.
- c) Meningkatkan fungsi dan peran panti asuhan sebagai wadah untuk menggali dan mengembangkan potensi anak asuh yang berbakat serta menjadi pusat perlindungan anak.
- d) Meningkatkan sosialisasi pemahaman dan pendampingan bagi warga masyarakat lansia untuk menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- e) Mengembangkan sistem dan implementasi konsep asuhan keluarga sebagai bagian dakwah dalam bidang sosial.
- f) Pendampingan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan

peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan menggunakan berbagai model dan pendekatan yang pelaksanaannya dilakukan dengan lintas majelis maupun lembaga.

- g) Meningkatkan sosialisasi untuk penghapusan berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta melakukan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- h) Meningkatkan sosialisasi tindakan preventif terhadap perdagangan manusia serta pendampingan terhadap korban *trafficking*.
- i) Merintis program pelayanan anak dengan kebutuhan khusus dan layanan khusus lainnya sesuai kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat dhu'afa.
- j) Melakukan Advokasi publik yang menyangkut kebijakan masalah-masalah sosial khususnya bagi masyarakat yang termarginalkan dan dhuafa untuk mendapatkan rasa keadilan.
- k) Meningkatkan usaha-usaha dan kualitas penanggulangan bencana antara lain pada tahap tanggap darurat, manajemen bencana, kesiapan SDM, yang pelaksanaannya bersinergi dengan amal usaha.
- l) Mengintensifkan sosialisasi model kesiapsiagaan perempuan dalam menghadapi yang berbasis pada masyarakat baik melalui lembaga pendidikan maupun komunitas masyarakat.

Keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah juga dilihat dari implementasi program kerja bidang Ekonomi dan ketenagakerjaan, yang bertujuan agar:terbangunnya

kesadaran dan perilaku ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga 'Aisyiyah khususnya dan warga masyarakat pada umumnya, meliputi:

- a) Mengembangkan pedoman dan tuntunan pelaksanaan amal usaha di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan dengan berorientasi kepada profesionalisme serta berbasis pada nilai-nilai Islam, sehingga mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lain.
- b) Menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui pengembangan dan penguatan usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh perempuan untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi ummat.
- c) Optimalisasi pendampingan dan pembinaan ekonomi melalui Bina Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah (BUEKA).
- d) Menguatkan posisi dan kondisi usaha kecil yang dikelola perempuan dalam hal akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi.
- e) Membangun solidaritas dengan berbagai pihak dalam melakukan advokasi atas bentuk-bentuk ketidakadilan serta advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan usaha mikro-kecil.
- f) Melakukan pendampingan terhadap tenaga kerja wanita (buruh) baik buruh migran (bekerja di luar negeri) maupun buruh yang bekerja di dalam negeri seperti pemahaman tentang hak, perlindungan hukum, dan kondisi budaya di tempat kerja maupun pendampingan.

Bidang Pendidikan Politik, bertujuan agar terbangunnya kesadaran perilaku warga negara akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak warga negara melalui pengajian, pelatihan, diskusi, kegiatan forum warga, dan media kegiatan lainnya sebagai perwujudan penguatan masyarakat sipil (*civil society*)/masyarakat madani, yaitu: (a) meningkatkan peran kontrol sosial masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan secara bijak melalui berbagai saluran; (b) meningkatkan partisipasi politik warga negara dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan hak-hak politik warga, dan (c) mengembangkan jaringan sinergis dengan kader dan simpatisan 'Aisyiyah yang berada di lembaga pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya untuk meningkatkan peran dakwah 'Aisyiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Dinamika Kepatuhan Anggota Organisasi kepada 'Aisyiyah dan Kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah di Balik Kemandirian dan Keberlanjutannya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data menunjukkan bahwa, kekuasaan moral yang diaplikasikan oleh pengurus organisasi dan keterlibatan moral anggota 'Aisyiyah, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang pengurus 'Aisyiyah Kota Makassar (Wakil Ketua yang membidangi pendidikan dan kebudayaan), mengemukakan bahwa:

‘Aisyiyah merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, dimana dalam perkembangannya menghadapi berbagai dinamika dengan tetap berpegang teguh prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) dengan keikhlasan hati menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam sesuai dengan bakat dan percakapannya, tidak menghendaki sanjung puji dan tidak akan mundur selangkah pun karena dicela; (2) penuh keinsyafan, bahwa beramal itu harus berilmu; (3) jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap syah oleh Allah, hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan; (4) membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam, dan (5) menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sekerja dan seperjuangan (hasil wawancara RB, 12 Feb. 2012).

Bertitik tolak dari hasil wawancara di atas dapat ditegaskan bahwa, kekuasaan moral yang ditunjukkan para pengurus organisasi ‘Aisyiyah dan keterlibatan moral anggota telah diaplikasikan sejak awal berdirinya ‘Aisyiyah pada tahun 1926. Misalnya: Keputusan Pengurus ‘Aisyiyah Pusat di dalam mengantisipasi dinamika pendidikan bersamaan dengan berdirinya ‘Aisyiyah Kota Makassar. Dalam hal ini, keputusan tersebut berlandaskan moral dalam merintis pendidikan dini untuk anak-anak sehingga keterlibatan anggota dan pengurus ‘Aisyiyah, tunduk dan patuh keputusan ini karena pertimbangan moral. Sebagai contoh: Keputusan Ketua PDA Kota Makassar ketika itu, dan memberi perintah agar pendidikan dini untuk anak-anak dijadikan dasar atau landasan untuk mendirikan Taman Kanan-Kanak pertama di Kota Makassar. Keputusan atau perintah tersebut semata-mata karena pertimbangan moral, sehingga keterlibatan anggota ‘Aisyiyah juga berlandaskan pertimbangan moral, kemudian taman kanak-kanak ini diseragamkan namanya menjadi TK Aisyiyah Bustanul Athfal yang saat ini telah mencapai 54 TK yang dikelola ‘Aisyiyah di Kota Makassar, di mana setiap TK terdapat Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), dan 2 PAUD.

Selain itu, fakta dan data yang menunjukkan bahwa kekuasaan moral yang diaplikasikan oleh pengurus 'Aisyiyah dan keterlibatan moral anggota di dalam gerakan pemberantasan kebodohan yang menjadi salah satu pilar perjuangan 'Aisyiyah di Kota Makassar, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Majelis Dikdasmen, bahwa:

Kekuasaan moral oleh pengurus organisasi dan keterlibatan moral anggota 'Aisyiyah yang menjadi pertimbangan utama dalam mengadakan pemberantasan buta huruf, baik buta huruf arab maupun latin. Karena itu, dalam kegiatan ini peserta terdiri dari para gadis-gadis dan ibu-ibu rumah tangga belajar bersama, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi perempuan dalam dunia publik. Kemudian kekuasaan moral oleh pengurus dan keterlibatan moral anggota dalam berbagai kegiatan pendidikan berdasarkan keputusan 'Aisyiyah Pusat dengan menerbitkan majalah yang diberi nama Suara Aisyiyah. Melalui majalah bulanan inilah Aisyiyah, mengkomunikasikan semua program dan kegiatannya termasuk konsolidasi internal organisasi (hasil wawancara SK, 22 Feb. 2012).

Contoh lain yang dapat ditunjukkan berdasarkan hasil penelitian ialah, pengurus 'Aisyiyah memberi perintah terhadap kepala sekolah (pengelola amal usaha), dasar kuasanya adalah normatif. Kepala sekolah terlibat dan patuh melaksanakan perintah tersebut karena pertimbangan moral. Dengan demikian, secara moral kepala sekolah tunduk dan patuh kepada perintah tersebut demi kelangsungan dan kelanggengan organisasi semata-mata atas pertimbangan moral. Misalnya, keputusan atau perintah dari Muhammadiyah tentang libur selama bulan Ramadhan bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah dan 'Aisyiyah, kemudian 'Aisyiyah terlibat dan patuh kepada perintah atau keputusan tersebut karena pertimbangan moral. Dalam hal ini, meliburkan siswa mulai dari TK sampai SMA/SMK yang dikelola 'Aisyiyah

selama bulan Ramadhan. Untuk lebih jelasnya dikemukakan pernyataan salah satu

Wakil Ketua PDA Kota Makassar, bahwa:

‘Aisyiyah sebagai organisasi dakwah, sosial, dan kemasyarakatan dimana latar belakang pendiriannya sama dengan Muhammadiyah, yaitu memberikan pencerahan terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh umat manusia (masyarakat, bangsa dan negara). Oleh karena itu, segala keputusan dan perintah dalam organisasi dasar kuasanya adalah moral, demikian pula keterlibatan anggota juga bersifat moral. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang telah digariskan Persyarikatan Muhammadiyah, secara normatif-moral telah dipatuhi ‘Aisyiyah terutama untuk memprakarsai berdirinya organisasi wanita di Indonesia. Dalam hal ini, ‘Aisyiyah bersama dengan organisasi wanita lainnya berjuang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan dan kebodohan karena pertimbangan moral (hasil wawancara RA, tanggal 15 Maret 2012).

Penjelasan di atas semakin memperkuat bahwa, dinamika kepatuhan anggota kepada ‘Aisyiyah dalam bentuk keterlibatan dengan pertimbangan moral, serta kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah karena atas dasar normatif-moral. Contoh kasus yang dapat ditunjukkan berdasarkan data dan fakta yang ditemui adalah, ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia, karena atas dasar pertimbangan moral telah membentuk Badan federasi dan melakukan Kongres Perempuan Indonesia, sekarang menjadi KOWANI (Kongres Wanita Indonesia). Lewat federasi ini berbagai usaha dan perjuangan ‘Aisyiyah dapat dilakukan dengan pertimbangan moral.

‘Aisyiyah Kota Makassar berkembang pesat seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat dalam menemukan bentuknya sebagai organisasi wanita modern. ‘Aisyiyah Kota Makassar dalam mengembangkan berbagai program untuk pembinaan dan pendidikan kaum wanita. Diantara program-program ‘Aisyiyah yang

mendapat sambutan positif untuk mengembangkan kemampuan wanita ialah kegiatan di luar sekolah sebagai kader 'Aisyiyah. Selanjutnya Kongres Muhammadiyah ke-20 tahun 1931 Siswa Praja Wanita menjadi Nasyi'atul Aisyiyah (NA). Di samping itu, 'Aisyiyah juga mendirikan Urusan Madrasah yang bertugas mengurus madrasah khusus puteri, Urusan Tabligh yang mengurus penyiaran agama lewat pengajian, kursus dan asrama, serta Urusan Wal'asri yang mengusahakan beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. Selain itu 'Aisyiyah pada tahun 1935 juga mendirikan Urusan Adz-Dzakirat yang bertugas mencari dana untuk membangun Gedung 'Aisyiyah dan modal mendirikan koperasi.

Perkembangan Aisyiyah selanjutnya pada tahun 1939 mengalami titik kemajuan yang sangat pesat, dengan menambah Urusan Pertolongan (PKU) yang bertugas menolong kesengsaraan umum. Karena sekolah-sekolah putri yang didirikan 'Aisyiyah sudah semakin banyak, maka Urusan Pengajaran didirikan di Aisyiyah. Di samping itu 'Aisyiyah juga mendirikan Biro Konsultasi Keluarga, yang menjadi gerakan wanita Islam yang mendobrak kebekuan feodalisme dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat pada masa itu, serta sekaligus melakukan advokasi pemberdayaan kaum perempuan.

Senada dengan penjelasan di atas, bahwa dinamika kepatuhan yang mengawali perkembangan 'Aisyiyah yang didominasi oleh kekuasaan moral, dan keterlibatan anggota organisasi bersifat moral. Hal ini sejalan dengan penegasan salah

satu Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan tentang kepatuhan 'Aisyiyah, bahwa:

Kekuasaan pengurus yang berlandaskan pertimbangan moral, serta keterlibatan moral anggota dalam berbagai upaya yang telah dilakukan secara berkesinambungan di atas, merupakan wujud kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah, termasuk keputusan membentuk NA (Nasyiatul 'Aisyiyah) sebagai organisasi otonom (kader) yang tunduk dan patuh kepada 'Aisyiyah karena pertimbangan moral dalam bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. NA tetap mengedepankan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar seperti yang diamanatkan oleh Muhammadiyah sebagai keputusan moral. Tugas luhur ini dilakukan baik secara kolektif organisasional maupun secara individu (personil-personil) anggota organisasi (hasil wawancara IT, tanggal 12 Maret 2012).

Nasyiatul 'Aisyiyah (NA) hadir berkat adanya suatu kesadaran religius yang positif tentang masa depan dan kelangsungan 'Aisyiyah. Kesadaran ini menjadi wacana organisasi untuk membangun generasi muda Islam untuk tetap eksis dan memegang peran penting dalam perjuangan bangsa. Upaya ini sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang sedang menapaki tahap kebangkitan bangsa pada awal abad XX. Tuntutan sejarah inilah kemudian melatarbelakangi kelahiran NA sebagai wadah pembinaan dan pendidikan generasi muda putri Islam. Bangsa Indonesia sedang dihadapkan adanya upaya mempersatukan visi anak bangsa. Kondisi ini telah dibaca para pemuka Muhammadiyah. Siswa Praja Wanita yang merupakan embrio NA merupakan wadah dan wahana untuk menjalin persatuan di antara anak bangsa. Nilai-nilai kejuangan dan kebersamaan selalu ditanamkan kepada para anggota Siswa Praja Wanita sejak dini.

Ukhuwah Islamiyah diimplentasikan dalam kehidupan berbangsa agar jalinan persatuan lebih erat, disamping kesamaan dalam penderitaan yang juga menjadi tali

pemersatu yang diwujudkan dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada visi dan tujuan organisasi. Bentuk kepatuhan AMM Puteri yang tergabung dalam Naisyiatu 'Aisyiyah sebagai organisasi yang dilahirkan oleh 'Aisyiyah untuk menopang kemandirian dan keberlanjutan organisasi, secara rinci dikemukakan oleh Ketua 'Aisyiyah Kota Makassar, bahwa:

Sebagaimana diketahui 'Aisyiyah merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, di samping beberapa organisasi otonom lain, seperti: Naisyiatul 'Aisyiyah (NA), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Tapak Suci, Hisbul Watan, dan Pemuda Muhammadiyah. Khusus NA sebagai ortom Muhammadiyah dan berada di bawah binaan, koordinasi dan tanggung jawab 'Aisyiyah di dalam melakukan berbagai aktivitas, karena latar belakang lahirnya NA sebagai anak kandung 'Aisyiyah tidak terlepas dari perjuangan pendiri Muhammadiyah berkat adanya suatu kesadaran religius yang positif tentang masa depan dan demi kelangsungan cita-cita Muhammadiyah (hasil wawancara KA, tanggal 12 Februari 2012).

Kesadaran ini menjadi wacana organisasi dalam upaya membangun generasi muda Islam untuk tetap eksis dan memegang peran penting dalam perjuangan bangsa. Upaya ini amat penting dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang sedang menapaki tahap kebangkitan bangsa di awal abad ke-20. Tuntutan sejarah inilah yang melatarbelakangi kelahiran NA sebagai wadah pembinaan dan pendidikan generasi muda putri Islam umumnya dan Muhammadiyah pada khususnya.

Keterangan di atas diperkuat oleh salah satu Wakil Ketua 'Aisyiyah Kota Makassar, bahwa berbicara tentang kemandirian organisasi 'Aisyiyah dalam mengelola amal usaha, memang betul-betul swadaya. Hal ini tidak berarti tanpa bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat baik internal Muhammadiyah maupun eksternal Pemerintah. Hal ini karena mengingat proses perjalanan panjang 'Aisyiyah

terutama yang berhubungan dengan pencarian dana untuk mengelola atau mendirikan amal usaha; saya sebagai ketua betul-betul merasakan jerih-payah, susah-senang, jatuh-bangun para pengurus dan anggota untuk mewujudkan impian menjadi kenyataan.

Menyimak penjelasan di atas, juga dipertegas kembali oleh pengurus lain (Bendahara 'Aisyiyah Kota Makassar) bahwa:

Sebagai anggota maupun pengurus merasakan suka-duka, dalam mengelola amal usaha khususnya di Makassar. Sampai saat ini, 'Aisyiyah Kota Makassar memiliki amal usaha di bidang pendidikan, antara lain: Taman Kanak-kanak (TK) 'Aisyiyah sebanyak 54, selain TK yang dibina oleh Muhammadiyah tetapi secara operasional dikelola 'Aisyiyah. Selain itu, 'Aisyiyah memiliki satu buah Sekolah Dasar (SD 'Aisyiyah).Memang 'Aisyiyah baru memiliki satu buah SD, tetapi betul-betul baik, unggul dan dapat diandalkan kualitasnya (hasil wawancara RK, 25 Maret 2012).

Kemudian amal usaha sosial kemasyarakatan 'Aisyiyah membia dua Panti Suhan (PA), yaitu PA Ummu Aiman di Jl. Beruang, dan PA Sejati di Jl. Cakalang.Selain itu, Panti Asuhan Bahagia di Jl. Muhammadiyah milik Muhammadiyah dan dikelola oleh 'Aisyiyah tapi tidak pernah mengklain PA Bahagia sebagai milik 'Aisyiyah.Amal usaha di bidang kesehatan, sejauh ini 'Aisyiyah membina empat BKIA bekerjasama dengan Muhammadiyah.Khusus di bidang kesehatan, 'Aisyiyah belum memiliki Rumah Sakit (RS) maupun Rumah Bersalin (RB), tetapi kebanyakan pengurus serta anggota berpartisipasi dalam membina RS dan/atau RB milik Muhammadiyah.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, 'Aisyiyah Kota Makassar memiliki TK sebanyak 54, tapi SD yang benar-benar milik 'Aisyiyah hanya satu.Kondisi yang

betul-betul sulit dipahami oleh masyarakat. Semesttinya agar pembinaan dapat berkelanjutan di mana TK sebanyak 54, maka SD yang dibina 'Aisyiyah paling sedikit 10 – 15 SD agar mampu menampung tamatan (lulusan) TK 'Aisyiyah tersebut. Namun, penjelasan selanjutnya dikaitkan dengan kedudukan 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah yang memiliki misi perjuangan mendukung terciptanya “masyarakat utama”, yaitu masyarakat yang sehat sejahtera jasmani dan rohani. Dengan kata lain, 'Aisyiyah telah meletakkan dasar-dasar pendidikan Islam melalui Taman Kanak-kanak, kemudian tersebar di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang dibina oleh Muhammadiyah, bahkan sampai Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, tentang hubungan 'Aisyiyah dengan NA sebagai ortom Muhammadiyah dijelaskan oleh salah satu Wakil Ketua PDA bahwa, antara 'Aisyiyah dengan NA mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Artinya 'Aisyiyah dan NA mempunyai tugas yang sama, yaitu membantu, membina dan mengembangkan cita-cita (visi, misi, dan tujuan) Muhammadiyah dengan bidang garapannya yang berbeda. NA mempunyai bidang sasaran pada generasi muda wanita untuk dibina agar menjadi pelopor, pelangsong, penyempurna, dan pembaharu usaha cita-cita Muhammadiyah. Meskipun antara 'Aisyiyah dan NA memiliki status yang sama di Muhammadiyah, namun secara informal 'Aisyiyah mempunyai posisi yang lebih tinggi dibanding NA.

Fakta yang menunjukkan bahwa NA merupakan kader dari 'Aisyiyah. Karena itu, 'Aisyiyah sebagai ibu kandung NA turut bertanggung jawab membina dan

membimbing NA berdasarkan SK Muhammadiyah No.3/1987 dan Keputusan Munas NA II, 1995, p.41-43), dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Sedang bagi Muhammadiyah, NA merupakan kader yang akan meneruskan dan mengembangkan gerakan Islam yang telah ditentukan Muhammadiyah. Karena itu, Muhammadiyah berkewajiban untuk memberikan bekal agama yang cukup kepada NA, menentukan arah pembinaan dengan membekali kemuhammadiyah, ilmu pengetahuan dan ketrampilan, serta kemampuan manajemen.

Bentuk kepatuhan anggota kepada 'Aisyiyah termasuk NA sebagai AMM Puteri, sekaligus kader penerus dan pelanjut 'Aisyiyah adalah "moral", sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Sekretaris PDA Kota Makassar sekaligus newakili beberapa guru mengatakan bahwa:

Tanggung jawab saya di 'Aisyiyah Kota Makassar, adalah sebagai Wakil Sekretaris; tugas pokok saya adalah sebagai dosen dan mengajar Bahasa Inggris di beberapa sekolah yang dibina 'Aisyiyah. Keterlibatan dan wujud kepatuhan saya sama dengan pengurus yang lain mempunyai kesibukan dan kegiatan pokok yang sangat padat, baik sebagai guru atau PNS maupun wiraswasta, namun tetap meluangkan waktu semata-mata karena panggilan moral; bukan karena insentif (honor), paksaan maupun bentuk lain. Karena mengurus 'Aisyiyah bagi saya begitu juga pengurus lain adalah panggilan jiwa untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Inilah yang membuat saya selalu patuh dan menyisihkan waktu, sesibuk apapun untuk 'Aisyiyah tetap bila perlu mengorbankan kegiatan lain. Hal ini karena prinsip yang tertanam di 'Aisyiyah bukan semata-mata untuk duniawi, tetapi untuk akhirat (hasil wawancara RD, 17 Maret 2012).

Demikian pula bentuk kepatuhan yang diperlihatkan oleh pengelola dan pengurus amal usaha seperti Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, dan lembaga kesehatan yang dikelola 'Aisyiyah dan Muhammadiyah. Mengutip pernyataan Ketua

Majelis Kesehatan 'Aisyiyah Kota Makassar yang mewakili tenaga medis (dokter, bidan, perawat, dan suster), bahwa:

Kalau dibandingkan dengan bekerja di tempat lain seperti RS Stela Maris, Akademis, dan RS yang dikelola organisasi swasta lain memiliki pendapatan (honor) lebih tinggi. Namun saya dan teman-teman pengurus baik sebagai dokter, perawat, bidan maupun suster rata-rata merupakan kader 'Aisyiyah sehingga masalah honor bukan satu-satunya faktor yang menjadi ukuran melainkan yang dominan adalah panggilan moral (jiwa), agar kehadiran 'Aisyiyah tetap bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara (hasil wawancara HD, tanggal 12 Maret 2012).

Kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah dapat dilihat melalui berbagai gerakan sejak Siswa Praja Wanita, Muhammadiyah juga berusaha untuk menanamkan dan mensosialisasikan gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar; memberantas Tahayul, Bid'ah, Churafat (TBC); dan membangun akhlakul karimah di kalangan generasi muda putri Islam. Kesadaran sosio-kultural para pemuka Muhammadiyah ini didasari oleh fenomena masyarakat Indonesia, yang cenderung memelihara TBC. Marginalisasi ajaran Islam ini dikarenakan oleh proses akulturasi Islam dengan budaya setempat yang tidak segera direformasi. Akibatnya, tata kehidupan yang religius masyarakat tidak menampakkan ciri kehidupan yang Islami.

Wujud kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah dapat dilihat pada program kerja Majelis Kesejahteraan Sosial dan Majelis Kesehatan Periode 2010 – 2015, antara lain: (1) pendataan amal usaha; (2) konsolidasi dan penguatan organisasi; (3) meningkatkan usaha dan kualitas penanggulangan bencana, antara lain pada tanggap darurat, kesiapan SDM 'Aisyiyah dan sinergi dengan amal usaha; (4) pelatihan perawatan jenazah; (5) membantu masyarakat dhuafa (fakir miskin); (6)

meningkatkan sosialisasi penghapusan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dinamika kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah di balik kemandirian dan keberlanjutannya mengalami pasang surut. Secara garis besar dijelaskan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa, bentuk kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah pada masa pra kemerdekaan 17 Agustus 1945, adalah kongruen sampai 'Aisyiyah sebagai ortom yang ditetapkan dalam Mukhtamar di Yogyakarta. Demikian pula halnya perkembangan 'Aisyiyah pasca kemerdekaan sampai pada tahun 1950, suhu politik mulai menurun, kepatuhan 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah adalah "normatif-moral" dan mengadakan muktamar secara mandiri. Dalam Mukhtamar ini bertujuan untuk mempercepat langkah 'Aisyiyah, ada beberapa perubahan yang fundamental, yaitu NA dijadikan bagian yang diistimewakan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, sehingga NA diberi wewenang untuk mengelola organisasinya sendiri.

Proses otonomi NA dimulai pada Mukhtamar 'Aisyiyah di Palembang tahun 1956, dimana NA dimunculkan suatu pemikiran bahwa NA sebaiknya diberi hak otonom untuk mengelola, memenej, dan membentuk jati dirinya. Prasaran dari Dra. Baroroh Baried ini belum mendapat respon yang serius. Kemudian Mukhtamar 'Aisyiyah pada tahun 1959 di Yogyakarta, Bagian NA yang dipegang oleh Zuhra Daris belum juga diberi hak otonom (Ibid). Ketika itu NA hanya diberi keleluasaan oleh PP. 'Aisyiyah untuk mengembangkan kegiatannya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh NA mengembangkan diri guna menuju kedewasaannya.

Iktikad ini merupakan salah satu bentuk keputusan atas pertimbangan moral yang disambut baik PP.'Aisyiyah dengan dibuktikan oleh diberinya kesempatan bermusyawaran tersendiri. Pada Muktamar 'Aisyiyah di Jakarta tahun 1962 merupakan sinyalemen bahwa NA harus dituntut untuk mulai memikirkan kebutuhan dan pengembangan dirinya. Untuk itu pada kesempatan ini Bagian NA di bawah kepemimpinan Siti Karimah membuat rencana kerja baru yang meliputi: kaderisasi, popularisasi NA, pembinaan, dan lain-lain. Semangat Jakarta ini betul-betul menjadi motivasi bagi NA untuk membenahi diri dan membina rumah tangganya. Semangat Jakarta ini betul-betul telah menjadi Nasyyatul 'Aisyiyah dewasa.

Sidang Tanwir 1963 telah disepakat bahwa NA diberi status otonom. Siti Karimah dan kawan-kawan mulai mengadakan persiapan-persiapan untuk mengadakan musyawarah pertamanya di Bandung. Persiapan ini mendapat bimbingan dari majlis bimbingan pemuda. Sebelum muktamar, terlebih dahulu diadakan konferensi NA di Solo. Konferensi ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi NA; mempersiapkan program-program kerja, penyusunan AD, berbagai hal yang berkaitan dengan keorganisasian. Berbekal hasil konferensi Solo, NA berhasil menggelar Muktamar NA yang perdana di Bandung tahun 1965, bersamaan Muktamar Muhammadiyah. Dari muktamar ini ternyata menjadi suatu hal yang surprise bagi NA, karena muktamar ini dihadiri oleh 66 daerah dan 166 cabang. Kehadiran sejumlah muktamirin NA ini menjadikan Muhammadiyah bangga, sehingga pada Muktamar Muhammadiyah berikutnya secara resmi NA mendapat

status otonom dari Muhammadiyah. Secara organisatoris, NA telah terlepas dari 'Aisyiyah dan mendapat pengawasan langsung dari Muhammadiyah.

Sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang pembinaan generasi muda wanita Islam, NA mempunyai struktur organisasi yang sama dengan Muhammadiyah, mulai dari ranting yang bertempat di kalurahan/desa, cabang pada tingkat kecamatan, daerah yang bertempat di kabupaten/ kota madya, wilayah untuk tingkat propinsi, dan tingkat pusat (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nasyyiatul 'Aisyiyah, 1996). Struktur organisasi Nasyyiatul 'Aisyiyah, menurut Anggaran Dasar Pasal 14 dinyatakan bahwa Pimpinan Pusat/Pimpinan Wilayah/Pimpinan Daerah NA membentuk Departemen sebagai badan pembantu pimpinan (ayat 1). Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting dapat membentuk Seksi-seksi sebagai pembantu untuk melaksanakan dan memelihara usaha-usaha organisasi (ayat 2). Rincian struktur ini lebih diperjelas pada pasal 16 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Nasyyiatul 'Aisyiyah, yaitu Departemen/Seksi dalam NA, meliputi: (1) Departemen/ Seksi Kader; (2) Departemen/ Seksi Dakwah; (3) Departemen/Seksi Dokumentasi dan Informasi, dan (4) Departemen/Seksi Khusus dan Biro. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa usaha/kegiatan yang tidak dapat dimasukkan dalam salah satu Departemen/Seksi, dibentuk Lembaga Khusus atau Biro (AD/ART, 1996, p.34).

NA sebagai gerakan AMM Putri dalam mencapai tujuannya melalui beberapa periodisasi dalam mendukung 'Aisyiyah. Masing-masing periode memiliki prioritas dan spesialisasi program yang berbentuk program jangka pendek satu tahun, dan

jangka menengah lima tahun, sedang untuk program jangka panjang 25 tahun, dan telah dipahami bahwa masing-masing periode waktu mempunyai prioritas program yang berkaitan dan saling tergantung (interdependensi program) dengan bentuk kepatuhan “moral-normatif”.

Program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dalam konteks kepatuhan moral normatif, bertujuan untuk membentuk pribadi putri AMM yang bermakna bagi agama, bangsa, dan negara menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah swt. Oleh karena itu, Keputusan Musyawarah Nasional Pimpinan Pusat (PP) Nasyiatul 'Aisyiyah II, bulan April 1995, telah mengambil keputusan mengenai prioritas periode untuk program jangka panjang meliputi: (1) Prioritas periode Kaderisasi pada tahun (1985-1990); (2) Prioritas periode Kemubalighatan (1990-1995); (3) Prioritas periode Kemasyarakatan, tahun (1995-2000); (4) Prioritas periode Kebangsaan (2000-2005); dan (5) Prioritas periode Internasionalisasi pada tahun (2005 - 2010).

Implementasi program NA di atas dapat diartikan bahwa jika terdapat kekurangan dalam periode yang satu, maka akan mewarnai pada periode selanjutnya. Pelaksanaan program jangka panjang ini bersifat akumulatif (menumpuk), namun frekunsinya akan semakin berkurang. Yang menjadi stressing program adalah prioritas program pada masing-masing periode. Adapun yang dimaksud program jangka pendek NA, adalah program yang dilaksanakan untuk satu periode dengan memprioritaskan program-program yang dicanangkan dalam program jangka panjang.

Program kerja NA yang sinergi dengan 'Aisyiyah sebagai organisasi induk merupakan kelanjutan dan rangkaian program periode sebelumnya, dan program ini yang menjadi dasar bagi pembuatan program selanjutnya setelah diadakan evaluasi dan revisi. Secara garis besar program NA yang terkait dengan kepatuhan adalah : (a) Bidang Konsolidasi Organisasi; (b) Bidang Kaderisasi; (c) Bidang Dakwah; (d) Bidang Kemasyarakatan; (e) Bidang Pengkajian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan dunia yang semakin mengglobal, satu sisi telah mempermudah kiprah manusia dalam memahami dan menguasai dunia. Namun di sisi lain, perkembangan itu telah merusak sendi-sendi peradaban manusia dan tatanan moral agama. Budaya primordial dan hedonistis seakan menjadi idola kehidupan. Batas ruang dan waktu tidak lagi menjadi penghalang bagi transfer of technology and communication. Sehubungan dengan ini, segala macam bentuk budaya yang menyebar ke segala penjuru. Iklim keterbukaan ini perlu adanya kendali moral agar bangsa Indonesia tetap pada bingkai budayanya.

Upaya ini hanya dapat dilakukan melalui implementasi akhlak agama dalam kehidupan sehari-hari dengan melalui pembentukan sikap dan perilaku bangsa ini. Inilah yang mendasari NA untuk menyusun Matan Kepribadian. Perjuangan ini memerlukan waktu yang panjang, tidak dibatasi umur manusia. Untuk itu diperlukan generasi penerus untuk meneruskan dan menyempurnakan cita-cita NA. Penyempurnaan matan Kepribadian NA mutlak diperlukan, karena semenjak gagasan Dra. Chamamah Suratno, PP NA periode 1965 - 1968, dalam perjalanan waktu senantiasa menghadapi tantangan yang berfariatif.

Mengingat tantangan yang semakin kompleks, maka rumusan Matan Kepribadian NA perlu mendapat perhatian selaras dengan tantangan yang dihadapi. Rumusan pertama Matan Kepribadian disahkan pada Mukhtamar NA ke-2 di Yogyakarta tahun 1968, dan sebagai tim perumusanya adalah Muslimah Humam, BA. Rumusan ini ditinjau ulang dan direvisi pada Rapim PP NA 1986 kemudian disahkan pada Sidang Pleno III pada 5 September 1986, dan kemudian dikukuhkan dalam Munas tahun 1987. Penyempurnaan itu meliputi sistematika, redaksi, dan penyajiannya. Rumusan ini pada sidang Tanwir 'Aisyiyah Tahun 2005 – 2010 mengikaji ulang dan mengadakan penyempurnaan pada segi metodologi, materi, sistematika.

Kepribadian merupakan suatu keadaan jiwa yang terpancar pada sikap dan perilaku seseorang. Karena itu, sebagai ruh; kepribadian mampu membedakan antara orang yang satu dengan yang lain. Demikain pula halnya dengan NA, Kepribadian NA menjadi jati dirinya untuk membedakan antara organisasi ini dengan organisasi yang lain. Kepribadian NA, menurut Tanwir NA 1996, adalah "keseluruhan proses dan keadaan yang melekat pada gerakan NA yang meliputi hakekat dan missinya dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat, sehingga berbeda dengan organisasi lainnya". Kepribadian NA bercirikan akhlakul karimah sesuai AD/ART NA.

Bagi NA, kepribadian yang dimilikinya tidak sekedar ruh organisasi saja, tetapi juga melekat pada segenap anggotanya. Karena itu kepribadian NA merupakan keseluruhan jiwa raga yang dimiliki oleh setiap anggota NA, baik sebagai kader umat, kader organisasi maupun kader bangsa, yang dimanifestasikan dalam sikap dan

perilakunya. Dengan demikian sikap dan perilaku anggota NA tidak sekedar membangun citra dan cita-cita, tapi juga harus mampu membangun moralitas bangsa. Secara integral, upaya ini sangat berarti bagi Indonesia untuk membangun moralitas bangsa ini.

Sebagai ruh organisasi dan sikap serta perilaku anggota NA, Matan Kepribadian NA disusun dan dirumuskan atas dasar: (a) Muqaddimah Anggaran Dasar NA, memuat prinsip-prinsip dasar usaha dan perjuangan NA; (b) Anggaran Dasar Bab I Pasal 1 tentang nama, identitas dan kedudukan yang mencerminkan hakekat dan misi NA, sebagai organisasi otonom dan kader Persyarikatan Muhammadiyah/'Aisyiyah, serta sebagai kader umat dan bangsa; (c) Anggaran Dasar Bab II Pasal 3 tentang maksud dan tujuan NA, dan (d) Anggaran Dasar Bab II Pasal 4 tentang usaha yang harus dilakukan NA untuk mencapai tujuannya.

Dasar usaha dan perjuangan di atas dapat diartikan bahwa, NA memiliki prinsip : (1) hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah SWT; (2) menunaikan segala kewajiban agama, negara, dan bangsa untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang diridhoi Allah SWT; (3) menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ikhlas dalam beramal shalih, dan memiliki akhlakul karimah. Menegakkan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, seperti dicita-citakan Persyarikatan Muhammadiyah.

Secara esensi, dasar perjuangan matan Kepribadian NA merupakan upaya untuk membentuk anggota NA dan organisasi sebagai pelopor dan penerus perjuangan Persyarikatan. Inilah yang menjadi hakekat dan misi NA yang

memperjuangkan dan membina putri Islam. Artinya NA berusaha menggerakkan putri-putri Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, serta mengajak dan mengarahkan orang lain sesuai dengan kehendak al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu terciptanya masyarakat putri Islam yang mampu mengimplementasikan akhlakul karimah.

NA sebagai organisasi kader 'Aisyiyah mempunyai tanggung jawab dalam merealisasikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini sesuai visi dan tujuan 'Aisyiyah/Muhammadiyah. Dalam upaya merealisasikan tanggung jawab ini, NA mengambil terobosan penyiaran ajaran Islam, yaitu Dakwah Terpadu, yaitu gerakan dakwah NA yang meliputi segala aspek kehidupan dengan menggunakan metode pendekatan integratif, antara gerakan dakwah bil-lisan dengan dakwah bil-hal. Hal ini dapat diartikan bahwa, Dakwah Terpadu meliputi gerakan dakwah yang bersifat penyebaran informasi dan gerakan dakwah yang bersifat amal shalih. Upaya ini memerlukan perangkat manajemen dan sumber daya manusia yang terlatih. Karena di dalam Dakwah Terpadu meliputi beberapa program untuk mempersiapkan *software* dan *hardware* pelaksanaan Dakwah Terpadu NA. Program ini sangat berarti bagi NA dalam rangka mendinamisasikan NA di dalam mengantisipasi tuntutan dan permasalahan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

Bentuk kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah sebagai salah satu ortom juga diimplementasikan melalui Program Dakwah Terpadu NA yang dilatarbelakangi oleh faktor internal, meliputi : (1) peran NA di bidang kemasyarakatan yang terkesan belum menonjol, baik dari kuantitas maupun kualitasnya; (2) masih adanya perbedaan

visi di kalangan pimpinan NA di dalam mensikapi pengembangan dan liberasi sosial kemasyarakatan; (3) masih sedikitnya tenaga penggerak (motivator) dakwah NA di bidang kemasyarakatan yang berperan ganda, yaitu sebagai mubalighot dan pengembang masyarakat, dan (4) belum adanya tanggapan (respon) yang serius dari NA mengenai kondisi sosio-kultural dan sosio-ekonomi sebagai sasaran dakwah yang tepat. Faktor Eksternal, meliputi: (1) kondisi sosio-ekonomi masyarakat menuntut adanya model dakwah implementatif dalam kehidupan sosio-ekonomi sehari-hari. Hal ini menjadi modal Dakwah Terpadu NA yang strategis dan praktis untuk membentuk kultur sosio-ekonomi masyarakat yang Islami; (2) perkembangan daya nalar dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat, sehingga membutuhkan model dakwah aplikatif (dakwah kemasyarakatan yang menggabungkan teori ajaran Islam dengan kondisi dan perkembangan masyarakat, dan (3) perubahan beberapa aspek kehidupan yang makin cepat telah menimbulkan polarisasi kebudayaan dan bermacam-macam kecenderungan.

Menghadapi fenomena ini, NA tetap mendapat arahan dari 'Aisyiyah sebagai wujud kepatuhan organisasi dan masyarakat perlu diberi penjelasan secara dini. Berbagai trend sosio-kultural yang ditandai oleh peningkatan peran wanita di dalam berbagai aspek kehidupan (sosil, ekonomi, politik, budaya) yang menuju pada kemandirian wanita. Sinyalemen ini bagi NA harus dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam mempersiapkan sumber daya AMM Putri. NA menjadi sarana strategis dalam membina dan mendidik AMM putri agar memiliki kredibilitas, kapabilitas, dan profesionalisme.

Dakwah Terpadu yang dapat dijalankan 'Aisyiyah sebagai kepatuhan kepada Muhammadiyah, bertujuan:

- a) Memadukan antara dakwah bil-lisan dengan dakwah bil hal mampu menjawab tantangan dan perkembangan zaman dengan pemenuhan tuntutan dan menjawab permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian dalam jangka panjang, eksistensi dan peran 'Aisyiyah di masyarakat akan dirasakan kehadirannya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
- b) Mampu menjawab permasalahan sosio-kultural dan sosio-ekonomi dengan menegakkan gerakan amar ma'ruf nahi munkar di kalangan putri Islam. Tujuan ini dilaksanakan jika didukung oleh pemahaman kaidah Islam, baik secara integral maupun diferensiasi ajaran.
- c) Menyamakan visi dan misi 'Aisyiyah, mengingat kesatuan pandangan organisasi sangat bermanfaat untuk mengefektifkan gerakan yang dijalankan oleh NA. Program ini mampu menambah tenaga penggerak yang berperan ganda, yaitu sebagai mubalighot dan pengembang kemasyarakatan.
- d) Menyelaraskan aspek kehidupan masyarakat dengan perkembangan IPTEK, yang bermanfaat bagi kebangkitan dunia wanita, mengingat dakwah ini mengangkat dan membina peran wanita secara Islami.

'Aisyiyah merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah. Dengan demikian 'Aisyiyah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan cita-cita Muhammadiyah, hanya bidang garapannya yang berbeda. NA mempunyai bidang sasaran pada generasi muda wanita untuk dibina agar menjadi pelopor,

pelangung, penyempurna, dan pembaharu usaha dan cita-cita Muhammadiyah. Antara 'Aisyiyah dan NA memiliki status yang sama di Muhammadiyah, namun secara informal 'Aisyiyah mempunyai posisi lebih tinggi dibanding NA. Fakta menunjukkan bahwa NA merupakan kader utama 'Aisyiyah. Karena itu, 'Aisyiyah sebagai ibu kandung dari NA, ikut bertanggung jawab membina dan membimbing NA (SK Muhammadiyah No.3/1987 dan Keputusan Munas NA II, 1995, p.41-43), melalui dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Sedang bagi Muhammadiyah, NA merupakan kader yang akan meneruskan dan mengembangkan gerakan Islam dan gerakan dakwah Muhammadiyah. Karena itu, Muhammadiyah berkewajiban memberikan bekal agama kepada NA, serta menentukan arah pembinaan (Dokumentasi PPA, Yogyakarta, Maret 2012).

Hasil analisis dan penelusuran fakta empirik menunjukkan bahwa, Kecenderungan awal abad ke-21 akan diwarnai berbagai perubahan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perspektif ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, sehingga telah mempermudah umat manusia di dalam mengembangkan jati dirinya. Kondisi ini telah merubah sikap manusia di dalam berkompetisi menguasainya. Karena itu bagi yang menguasainya, maka dunia akan mudah ditaklukkan. Namun itu sulit dilakukan, karena masing-masing bangsa memiliki motivasi untuk berkompetisi. Akibatnya adalah memasuki millenium III akan diwarnai interdependensi global dalam segala bidang.

Potret manusia abad ke-21 hubungannya dengan kepatuhan akan diwarnai berbagai bentuk dinamika dan perubahan. Menurut Toeffler (dalam Sztompka, 2004),

perkembangan teknologi, komunikasi, komputerisasi, dan bio-teknologi telah menyebabkan perubahan masyarakat sedemikian cepat. Penemuan dan pengembangan teknologi informasi telah menyebabkan terjadinya globalisasi informasi dan budaya. Ruang dan waktu tidak lagi menjadi batas untuk pertukaran arus informasi. Bahkan masyarakat sangat dipengaruhi dan bergantung pada informasi. Artinya setiap orang yang ingin survive, maju, dan memiliki kualitas tertentu selalu membutuhkan informasi. Tanpa memiliki informasi, orang akan terlindas dan tertinggal.

Seorang pelaku bisnis akan menguasai pasar, jika dia menguasai informasi pasar, konsumen, moneter, manajemen, dan teknologi. Demikian pula halnya seorang pemimpin akan memiliki kualitas, jika dia didukung oleh kapabilitas informasi yang dimilikinya, seperti pranata sosial, perundang-undangan, peraturan, dan perangkat lunak lainnya. Demikian pentingnya informasi bagi manusia ternyata telah menggeser nilai-nilai dan tatanan masyarakat. Pola hidup dan budaya asing lambat laun telah memarginalkan nilai-nilai dan tatanan agama.

Manusia secara formal menganut suatu agama, namun keberadaan Tuhan merupakan Dzat yang "sangat jauh" di sana. Tuhan tidak menyatu dan mewarnai perilaku manusia. Masyarakat cenderung dipengaruhi oleh nilai-nilai sekularisme, pesimisme, materialisme, hedonisme, serta nativisme, bahkan primordialisme dan anarkhisme. Kondisi ini diperparah lagi dengan timbulnya masyarakat saintifik, yaitu masyarakat yang lebih menitikberatkan pada logika, rasionalitas dan objektivitas, sementara faktor relijiusitas dapat dikesampingkan. Menghadapi kenyataan ini,

kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah dalam merealisasikan program kerja mempunyai peran yang sangat strategis di dalam menyikapinya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan strategis yang semakin kompleks.

Muhammadiyah bertanggung jawab untuk membina generasi muda melalui Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) agar AMM turut memikul penyebaran ajaran Islam dan moralitas agama kepada masyarakat. Karena itu, NA secara struktural merupakan salah satu bagian dari AMM yang turut bertanggung jawab atas cita-cita Muhammadiyah. Dengan kata lain, NA dan 'Aisyiyah dituntut untuk kreatif dan inovatif di dalam memainkan perannya dalam masyarakat sesuai wilayah otonom yang dimiliki, namun tetap dalam koridor kepatuhan organisasi yang telah ditentukan. Kemajuan IPTEK harus dimanfaatkan untuk kemajuan NA di dalam bermain dakwah. Artinya, NA secara bijak harus bersatu dengan IPTEK, serta IPTEK dimanfaatkan untuk sarana dakwah secara ilmiah.

Globalisasi informasi membantu penyebaran informasi keagamaan (dakwah bil-lisan) lewat media masa. Derasnya informasi dapat menambah khasanah pemberdayaan sumber daya putri Islam. Di pihak lain, NA dituntut melakukan dakwah interaktif-dialogis di dalam mensikapi proses pergeseran nilai-nilai. Menurut salah seorang informan yang banyak membina NA, juga sebagai pengurus 'Aisyiyah menjelaskan bahwa NA sebagai kader utama 'Aisyiyah dan Muhammadiyah perlu terlibat dalam mengenal seluk beluk dan memahami berbagai persoalan moralitas terutama nilai-nilai dan norma-norma Islam kontemporer. Keterlibatan NA ini secara aktif melalui telaah historis-problematika dan telaah sosiologis. Hal ini

merupakan agenda yang sangat urgen untuk menentukan kebijakan program Dakwah Terpadunya. Tanpa adanya sikap peduli terhadap masalah moralitas yang kontemporer, niscaya posisi NA akan terlibas dalam percaturan informasi global. Karena itu, NA sejak dini telah memiliki jati diri, terutama sebagai gerakan moralitas keagamaan yang dibangun berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam bahasa yang sederhana, NA harus kreatif dan inovatif di dalam membumikan semangat dan pesan al-Qur'an dan as-Sunnah guna membangun moralitas generasi muda yang berlandaskan keagamaan dalam mensikapi perkembangan dunia yang semakin pesat. Semangat keagamaan harus menjadi modal utama bagi NA di dalam percaturan informasi global. Senada dengan itu, penjelasan ketua PDA Kota Makassar bahwa kedudukan 'Aisyiyah sebagai system yang otonom tetap patuh kepada Muhammadiyah, dan NA sebagai organisasi kader tetap dalam kolidor dan kendali 'Aisyiyah dalam mengelola dan mengembangkan amal usaha.

Pertimbangan yang perlu diklarifikasi terkait dengan kepatuhan dan keberlanjutan 'Aisyiyah agar tidak menimbulkan kesalah-pemahaman, Hal ini telah lama dipikirkan semua pengurus dan anggota 'Aisyiyah Kota Makassar. Apabila dicermati berbagai pertanyaan selama ini muncul tentang "mengapa 'Aisyiyah belum melaksanakan Mukhtar sendiri?. Jawabnya jelas, 'Aisyiyah telah melaksanakan Mukhtar sendiri terpisah dari Muhammadiyah, hanya waktunya yang bersamaan demikian juga tempat (daerah/kota yang sama) sehingga terkesan 'Aisyiyah selalu bergantung kepada Muhammadiyah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, keterlibatan moral anggota dan bentuk kekuasaan normatif 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah dapat ditunjukkan didalam pelaksanaan Mukhtamar secara terpisah. Hal ini sebagai bukti bahwa, keterlibatan tersebut semata-mata karena pertimbangan moral, sedangkan kekuasaan yang diaplikasikan adalah normatif. Hal ini seperti dijelaskan oleh salah satu Wakil Ketua 'Aisyiyah Kota Makassar, bahwa:

- 1) Hal tersebut telah menjadi pertimbangan semua pengurus dan anggota 'Aisyiyah bahwa berkaitan dengan kepatuhan melalui pembinaan kader dari usia dini (TK – SD) bahkan perguruan tinggi. Namun, alasan-alasan rasional terkait dengan posisi 'Aisyiyah yang paradoks, yaitu di satu sisi sebagai sistem yang otonom; namun di sisi lain 'Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah sehingga menjadi pertimbangan utama.
- 2) Meskipun 'Aisyiyah baru membina satu SD, tetapi pengelolaannya cukup permanen dan layak dibanding SD yang dibina Muhammadiyah. Karena itu, ke depan 'Aisyiyah sudah memikirkan untuk menambah SD sebagai jawaban atas pertanyaan dan desakan berbagai kebutuhan, terutama di kalangan 'Aisyiyah sendiri. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan ialah "aspek kemandirian". Harus dipahami bahwa, kemandirian 'Aisyiyah dalam mengelola amal usaha adalah betul-betul swadaya.
- 3) Sekali lagi saya tekankan, bukan berarti kami tidak menerima bantuan dari pihak lain (terutama Muhammadiyah dan Pemerintah). Tapi kami mengelola dan mengembangkan amal 'Aisyiyah usaha atas prakarsa dan swadaya murni dari

segenap pengurus dan anggota. Dengan kata lain, ada atau tidak ada bantuan amal usaha 'Aisyiyah harus berjalan. Fakta menunjukkan, setelah berkembang baru berdatangan bantuan sebagai keberlanjutan dari amal usaha tersebut, karena semua amal usaha yang dikelola 'Aisyiyah adalah milik ummat untuk membantu mencerdaskan kehidupan dan keterbelakangan masyarakat.

- 4) Khusus di bidang kesehatan, amal usaha yang di bawah koordinasi Majelis Kesehatan sudah banyak melakukan berbagai kegiatan, seperti pengobatan gratis, dan lain-lain. Sebagai contoh, cabang Bontoala sudah memiliki jadwal dan nama-nama pasien (keluarga) yang akan dibantu. Oleh karena itu, Majelis Kesehatan sudah mempunyai jadwal tetap pengobatan gratis yang akan dilaksanakan.

Berbagai kekuasaan dan keterlibatan yang telah dikemukakan di atas, sebagai wujud kepatuhan moral anggota organisasi dan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah juga merupakan kepatuhan yang bersifat moral, kemudian direalisasikan secara mandiri dan berkesinambungan hingga saat ini, yaitu: "Terbangunnya kualitas aqidah, akhlak, ibadah, dan muammalah di kalangan umat yang berlandaskan nilai-nilai Qur'an dan Sunnah".

D. Pembahasan dan Analisis Sosiologis

Kajian sosiologi tentang kemandirian sebuah organisasi, khususnya 'Aisyiyah Kota Makassar yang dibahas dalam penelitian ini ditinjau dari tiga aspek, yaitu medan visional, paradoks independensi, dan autopoiesis. Dalam hubungan dengan sosiologi, ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan melalui pandangan teoritis sistem terkemuka dalam sosiologi yaitu Niklas Luhmann, mengembangkan suatu pendekatan

sosiologis yang mengombinasikan elemen dalam fungsionalisme struktural Talcott Parsons dengan teori sistem umum serta memperkenalkan konsep dari biologi kognitif, sibernetika dan fenomenologi. Luhmann memandang ide-ide Parsons yang belakangan sebagai satu-satunya teori umum yang cukup kompleks untuk membentuk basis bagi pendekatan sosiologi baru yang merefleksikan temuan terakhir dalam sistem biologi dan sibernetik.

Lebih lanjut Luhmann menjelaskan bahwa, *Social Systems* tidak bertujuan untuk melakukan analisis sosiologis ataupun merumuskan teori tentang masyarakat, tetapi hendak mengelaborasi kerangka konseptual atas teori-teori masyarakat tersebut. Dalam hal ini, *Social Systems* menyediakan suatu instrumen konseptual untuk mengamati berbagai gejala yang ada di dalam realitas sosial, seperti masyarakat, organisasi, dan interaksi-interaksi yang terjadi di dalamnya. Teori sistem hendak mempertanyakan kondisi-kondisi kemungkinan bagi analisis tentang dunia sosial. Akan tetapi, tidak seperti yang dilakukan oleh Kant, teori sistem Luhmann tidak menganalisis subyek yang mengetahui, melainkan berpaling kepada realitas sosial yang memiliki karakter penentuan dan pengaturan dirinya sendiri yang dapat diamati secara inderawi. Fokus dari seluruh analisis teori sistem adalah problematika kompleksitas sosial sebagai subsistem yang bersifat partikular, yakni dari ilmu-ilmu sosial dengan analisis kualitatif.

Dalam konteks ini, kemandirian 'Aisyiyah ditinjau dari sudut pandang sosiologi terkait dengan pandangan Luhmann di atas, 'Aisyiyah merupakan subsistem dari kompleksitas sosial yang lebih besar, yaitu Muhammadiyah yang dibangun di

atas pondasi “amar makruf nahi munkar” (medan visional) yang sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, ‘Aisyiyah Kota Makassar didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka (1926), terus berkembang dan mandiri karena medan visional yang mengikat para anggota untuk bergerak bersama, serta berkontribusi mewujudkan visi dan tujuan organisasi, yaitu “tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.

Terkait dengan paradoks independensi tentang kemandirian ‘Aisyiyah dalam kajian sosiologi, sebagaimana Luhmann mendefinisikan apa yang dimaksud kompleksitas (*complexity*) dengan dua konsep, yakni antara sistem yang saling terkait dengan elemen-elemen atau sistem-sistem di sekitarnya, dan keterkaitan tersebut tidak lagi menjadi signifikan. Dalam kajian teori-teori informatika, kompleksitas sistem tidak lagi diteropong melalui keterkaitannya dengan sistem ataupun dengan lingkungan (sesuatu yang di luar sistem), melainkan dengan keseluruhan sistem itu sendiri. Dalam posisi paradoks (mendua), di satu sisi ‘Aisyiyah adalah sistem otonom dalam mengelola amal usaha, namun di sisi lain, ‘Aisyiyah merupakan bagian dari Muhammadiyah dari waktu ke waktu sehingga tetap eksis dan mandiri.

Kompleksitas selalu membutuhkan pemilahan untuk dapat dimengerti, dan pemilahan seringkali menciptakan reduksi, yaitu reduksi kompleksitas melalui pembedaan. Dalam hal ini, Luhmann menyebut pembedaan tersebut sebagai ‘pembedaan kompleksitas’ antara sistem di satu sisi, dan lingkungan di sisi lain. Dengan demikian, kemampuan untuk mereduksi kompleksitas dapat dianggap sebagai mekanisme perlindungan diri (*defense mechanism*) dari sistem

tersebut.Reduksi juga memungkinkan sistem untuk mengatur dimensi internalnya sendiri, sehingga kompleksitas yang tidak tertata dapat diubah menjadi kompleksitas yang tertata (*organized complexity*).Seperti telah disinggung sebelumnya, kompleksitas membutuhkan pemilahan, dan pemilahan tentu menyediakan kemungkinan-kemungkinan pembedaan, dan kemungkinan itu tentunya mengandaikan adanya resiko.

Dengan demikian, realitas yang berlangsung di ‘Aisyiyah sejak awal didirikan hingga sekarang ternyata relevan dengan apa yang dijelaskan oleh Luhmann tentang kompleksitas sebuah sistem dalam kondisi paradoks, yaitu kemungkinan selalu mengandaikan adanya resiko (*risk*). Pilihan yang tidak tepat dari berbagai kemungkinan akan membuat sistem hancur. Tantangan terberatnya tentu saja adalah sulitnya memberikan definisi-definisi yang koheren terhadap kompleksitas sistem tersebut.Kompleksitas tidak pernah sungguh-sungguh dapat diamati dan dipilah-pilah. Setiap upaya memahami kompleksitas selalu mengikutsertakan proses reduksi, yakni mengubah kompleksitas yang tidak terorganisir menjadi teorganisir.

Proses reduksi yang dimaksud Luhmann dalam kompleksitas sistem relevan dengan proses perubahan yang dilakukan ‘Aisyiyah, yaitu dengan perhitungan-perhitungan yang bersifat strategis. Dalam hal ini, organisasi ‘Aisyiyah adalah subsistem yang otonom melihat potensi perkembangan dari kompleksitas sistem yang lebih besar, yaitu Muhammadiyah.Artinya, semua anggota dan pengurus harus siap menerima bahwa, ‘Aisyiyah adalah bagian dari Muhammadiyah, karena terikat oleh visi dan tujuan bersama.

Dalam kemandirian 'Aisyiyah terkait dengan autopoiesis ditinjau dari aspek sosiologis Luhmann banyak dipengaruhi oleh Humberto Maturana, terutama pada tesisnya bahwa sistem memiliki ciri yang bersifat autopoiesis. Suatu sistem, demikian Maturana, terdiri dari jaringan-jaringan produksi dari komponen-komponen, yang melalui interaksinya, membentuk dan menyadari jaringan yang memproduksi mereka, di dalam ruang dimana mereka ada, batas-batas jaringan sebagai komponen yang berpartisipasi di dalam perwujudan jaringan tersebut. Yang membedakan sistem yang bersifat autopoiesis dengan sistem tertutup adalah karakter rekursifitasnya, yakni bahwa mereka tidak hanya memproduksi dan mengganti sendiri struktur-struktur mereka, tetapi semua yang digunakan sebagai unit di dalam sistem diproduksi juga sebagai unit di dalam sistem itu sendiri. Demikian 'Aisyiyah Kota Makassar terus berkembang dan mandiri karena sistem autopoiesis yang dilakukan dari waktu ke waktu, dari fase ke fase selalu memproduksi dirinya sendiri seiring dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan lingkungan eksternalnya, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara.

Refleksi tentang teori sistem sebenarnya dapat dirunut dalam sejarah filsafat itu sendiri. Ide tentang adanya sistem yang mampu mengatur dan mereproduksi dirinya sendiri memiliki logika internal, bahwa adanya tujuan final dari seluruh gerak alam. Semua refleksi semacam ini dapat ditemukan di dalam metafisika Aristoteles, *Monadology* tulisan Leibniz, dan *Critique of Judgment*-nya Immanuel Kant. Dengan munculnya dominasi kaum borjuis pada abad ke-18, hampir semua teori politik, ekonomi, dan etika mulai untuk menyelidiki bagaimana relasi antara bagian dengan

keseluruhan, yakni tentang bagaimana individu-individu sebagai bagian dari komunitas akhirnya dapat membentuk komunitas bersama tanpa saling menghancurkan. Refleksi ini banyak dikenal sebagai problem tatanan. Sampai sekarang, problematika tatanan tetap berada di dalam selubung misteri yang hanya dapat dipikirkan secara spekulatif dalam perdebatan panjang, dan tidak pernah berakhir. Tapi 'Aisyiyah memposisikan diri sebagai organisasi dakwah yang memiliki visi yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka perdebatan serupa, teori sistem banyak dipengaruhi terjadinya dua perubahan paradigma yang membuat problematika tatanan tidak lagi sekedar spekulasi metafisika, tetapi menjadi bagian dari penelitian saintifik. *Pertama*, perubahan paradigma yang dimotori oleh Ludwig von Bertalanffy, seorang biofisiolog dari Jerman pada pertengahan dekade 1950-an. Dalam hal ini, mengganti pembedaan antara bagian dan keseluruhan dengan pembedaan antara sistem dan lingkungan. Dengan pembedaan ini memungkinkan refleksi problematika tatanan berelasi dengan analisis dari disiplin ilmu lainnya. Misalnya; sibernetik, teori informasi, dan ilmu komputer. *Kedua*, perubahan paradigma ditandai dengan perubahan distingsi antara sistem dengan lingkungan menjadi suatu teori tentang sistem yang dapat membentuk dan mereproduksi dirinya sendiri.

Prinsip pengaturan diri ini disebut oleh Heinz von Foerster sebagai tatanan yang muncul dari kegaduhan. Penelitian tentang hal ini berkembang menjadi sebuah kajian multidisipliner yang melibatkan fisika, sibernetika, dan biologi. Jika para ahli dapat menemukan kesamaan pola di dalam gerakan atom-atom yang berkumpul, sel-

sel biologis, pola pergantian cuaca, terciptanya koloni-koloni serangga, serta pergerakan pasar, maka mereka dapat merumuskan sebuah teori yang mampu mengkonseptualisasi semua kesamaan itu tanpa menghilangkan perbedaan antara fenomena yang beragam tersebut.

Luhmann ikut ambil bagian di dalam proyek multidisipliner ini, tetapi setelah melalui penelitian yang terus menerus, proyek ini pun mengalami halangan yang besar, terutama dari argumen yang menyatakan bahwa ada perbedaan yang bersifat ontologis antara realitas kehidupan sosial manusia dengan realitas non sosialitas manusia. Oleh karena itu, pendekatan untuk memahaminya pun juga berbeda. Setiap upaya mereduksi realitas sosial ke dalam sistem dan fungsi selalu dicurigai sebagai timpang baik etis maupun politis. Pendekatan yang bersifat autopoiesis terhadap masyarakat mendapat tantangan baru. Di satu sisi, pertanyaan tentang pelestarian dan reproduksi sistem beralih menjadi pertanyaan tentang bagaimana struktur sistemik dapat digambarkan sebagai tatanan yang timbul dari kekacauan.

Bertitik tolak dari perkembangan ini, Luhmann menolak teori Parsons yang bersifat fungsionalis. Hal ini karena konsep autopoiesis tidak dapat diterapkan untuk menganalisis realitas sosial. Alasannya, jika sudah sepakat bahwa masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang dibentuk oleh elemen-elemen organisme yang hidup (manusia), maka tidak mungkin menjelaskan proses reproduksi sistem sosial tersebut tanpa menjelaskan elemen-elemen pembentuknya. Dengan manuver teoritis yang brilian, Luhmann mengajukan solusi atas dilema ini dengan mengkonseptualisasi ulang realitas sosial yang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan penerapan

konsep autopoiesis. Ia berpendapat bahwa premis Aristoteles yang menyatakan bahwa sistem sosial analog dengan organisme hidup (*living organism*) haruslah dilepaskan. Sistem sosial jangan dipikirkan sebagai sebuah organisme hidup, melainkan sebagai sistem yang terdiri dari komunikasi-komunikasi elemen terdasarnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu, dan membentuk tatanan yang muncul dari kompleksitas masyarakat yang bersifat temporal.

Karakter temporalitas tidak hanya dapat diterapkan di dalam analisis tentang sistem sosial, tetapi juga dapat diobservasi pada proses reproduksi sel-sel tubuh, sel-sel otak, serta perkembangan sistem psikis manusia. Akan tetapi, pola autopoiesis, temporalitas, dan kompleksitas sistem sosial tentu berbeda dengan sistem-sistem biologis. Proses reproduksi sel terjadi pada proses-proses kimia. Otak berfungsi juga dengan berdasarkan impuls-impuls neurofisiologis, sedangkan sistem sosial berfungsi dan berkembang dengan menjadikan kesadaran sebagai elemen dasarnya. Kesadaran itu terlihat di dalam proses komunikasi (*Social Systems Communications*), dan proses komunikasi membutuhkan makna untuk proses reproduksinya.

Konsep makna memiliki peranan sentral dalam teori sistem Luhmann. Konsep ini digunakan tidak dalam oposisi dengan “ketidakbermaknaaan” (*meaninglessness*), seperti dalam tradisi-tradisi hermeneutika, melainkan dalam arti fenomenologis (*phenomenological sense*). Artinya, konsep makna merupakan sebuah kerangka kemungkinan yang hadir dalam semua bentuk sistem sosial. Dengan kata lain, makna merupakan kondisi-kondisi yang memungkinkan sistem sosial terbentuk dan beroperasi. Luhmann tidak dapat memaksudkan hal ini sebagai kesadaran diri

transcendental, yang menurut Kant, menjadi kondisi yang paling mendasar bagi terciptanya pengetahuan, melainkan sebagai kondisi kemungkinan yang terlebih dahulu harus dipenuhi bagi gerak empiris dari sistem sosial yang memiliki karakter autopoiesis dan mereproduksi diri sendiri dari period eke periode.

Dengan demikian, memandang 'Aisyiyah sebagai sistem berarti sama halnya memandang masyarakat sebagai proses-proses komunikasi makna yang membentuk sebuah realitas sosial yang bersifat kompleks, temporal, dan autopoiesis. Tesis ini tentunya mengubah seluruh konsepsi mengenai hakekat dari tindakan sosial individu, peran bahasa, dan status subyek di dalam analisis sosiologi. Dalam hal ini, Luhmann menggabungkan analisis fungsionalis di dalam sosiologi dengan pendekatan fenomenologis di dalam filsafat yang dirumuskan oleh Husserl, untuk mendekatkan dua tradisi ini membuka ruang dimana berbagai disiplin tradisional dapat dipikirkan kembali dengan cara yang dapat membawa tradisi berpikir humaniora melampaui hermeneutika, dan menuju era informasi.

Dalam hal keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar ditinjau dari sudut pandang sosiologi terkait dengan pandangan, sebagaimana telah dijelaskan oleh Brinkerhoff dan Goldsmith, bahwa keberlanjutan organisasi atau lembaga oleh para analis sering kali mengungkapkan alasan tertentu. Lembaga merupakan sistem yang dibangun dari sebuah ide. Ada beberapa alasan yang dimaksud, antara lain: (1) bahwa teori sistem merupakan hal yang cukup umum untuk menutupi keberlanjutan permasalahan dalam lembaga pada semua jenis, mulai dari tanda atau kode yang formal sampai kepada yang tidak formal untuk dilakukan; (2) bahwa teori sistem

secara simultan ditentukan oleh proses internal dan hubungan diantara sistem dan lingkungannya sendiri. Hal inilah kemudian mendorong untuk memandang secara luas berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, teknis dan lainnya yang mempengaruhi keberlanjutan, dan (3) bahwa teori sistem menekankan pada hubungan diantara unsur-unsur yang terpisahkan, dan memungkinkan untuk memunculkan aspek-aspek agro lingkungan, ekonomi dan aspek manajerial dari keberlanjutan tersebut.

Lebih lanjut Brinkerhoff & Goldsmith menjelaskan bahwa, teori sistem menyajikan pedoman tentang bagaimana menggambarkan hubungan antara proses sistem internal dan eksternal. Teori kemungkinan menjadi pengganti kesenjangan ini. Penyajian teori ini agar lembaga-lembaga dapat mencapai hubungan yang lebih baik. Selain itu, alasan penggunaan teori kemungkinan adalah untuk menghindari tendensi, perluasan referensi pada keberlanjutan lembaga yang direkomendasikan secara luas. Dengan demikian penjelasan ini relevan dengan pola keberlanjutan yang dikembangkan oleh 'Aisyiyah dalam mengelola unit-unit organisasi (amal usaha) sebagai suatu kesatuan (subsistem) dalam keberagaman dan kompleksitas sistem untuk memenuhi tuntutan kebutuhan lingkungan eksternalnya, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku melalui input, proses, dan output.

Konsep keberlanjutan yang dikembangkan dalam organisasi 'Aisyiyah, ternyata relevan dengan pandangan para ahli sosiologi terkait dengan upaya mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku organisasi umumnya berasal dari teori sistem. Sebagai contoh, ahli biolog Ludwig von Bertalanffy menyatakan bahwa teori sistem dianalogikan dengan sistem yang ada pada organisme. Organisme sel itu terdiri

atas sel-sel, dan sel-sel membentuk suatu molekul. Tiap bagian yang ada membentuk sistem terintegrasi dan terdiri dari struktur yang saling terkait dan bekerja secara harmonis. Tiap molekul tahu tugasnya masing-masing dan bekerjasama serta memenuhi aturan yang ada.

Hukum keteraturan merupakan konsep yang bersifat menyeluruh. Ide tentang keteraturan adalah ide dasar dalam memahami dan menganalisis situasi yang kompleks. Dengan demikian, teori sistem memiliki dua konsep dasar yaitu: pertama, konsep subsistem yang melihat hubungan antar bagian sebagai hubungan sebab akibat. Konsep kedua memandang bahwa sebab jamak sebagai hubungan yang saling berkaitan yakni tiap bagian merupakan kompleks (kumpulan) yang tiap faktornya saling berkaitan.

Dalam konteks keberlanjutan, ada dua pola sistem yakni *open system* (sistem terbuka) dan *closed system* (sistem tertutup) dalam hubungan organisasi dengan lingkungan eksternal. Suatu sistem adalah “terbuka”, jika mempunyai transaksi dengan lingkungan mana ia berada. Transaksi antara suatu organisasi dengan lingkungannya mencakup “input” dan “output”. Input biasanya dalam bentuk informasi, energi, uang, pegawai, material dan perlengkapan yang diterima organisasi dari lingkungannya. Output organisasi pada lingkungannya dapat berbentuk bermacam-macam tergantung pada sifat organisasi. Demikian halnya yang dikembangkan ‘Aisyiyah adalah sistem terbuka (*open system*) dalam mengelola unit-unit (amal usaha).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa, hubungan pada tiap aspek input, proses, dan output yang ada di tiap-tiap unit dengan lingkungan yang lebih luas (masyarakat dan pemerintah) merupakan suatu interaksi yang membentuk siklus yang tiada akhir. Konsep input, proses, dan output sering kali disebut sebagai model linear, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana sistem dapat dijelaskan dalam konteks dunia nyata. Dalam hal ini, suatu teori yang beranjak dari konsep umum ke khusus yang tampak logis, rasional dan teratur berupaya untuk mencari jawaban terhadap upaya menghubungkan nilai input, proses, dan nilai output sehingga menghasilkan efisiensi biaya. Dalam konteks 'Aisyiyah sebagai organisasi sosial yang bergerak di bidang dakwah keagamaan dan kemasyarakatan, seperti sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan, berupaya mewujudkan visi dan tujuan yang telah ditentukan dengan keyakinan, komitmen, dan prinsip yang dipahami bersama.

Sejalan dengan penjelasan di atas, bahwa keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah terkait dengan teori sistem dalam menganalisis program kerja dan kebijakan organisasi sesuai dengan pandangan Brinkerhoff dan Goldsmith, antara lain: (1) sistem teori diciptakan dan berlanjut untuk mencapai tujuan umum yang lebih baik daripada tindakan individu; (2) sistem teori dapat mengembangkan subsistem, mencapai tujuan organisasi, dan peningkatan efisiensi; (3) sistem teori menganut pola otoritas dan hubungan komunikasi untuk terhubung dan terintegrasi secara khusus dari kegiatan subsistem, dan (4) sistem teori tergantung pada transaksi dengan unsur luar dan lingkungan untuk menyiapkan input, memahami proses, dan mendapatkan output yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem.

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan keberlanjutan organisasi sebagai sistem, ada beberapa definisi kunci yang perlu dipahami sebagai berikut: (a) Input ialah berupa sumberdaya, bahan mentah, uang, manusia, informasi dan pengetahuan yang dimiliki organisasi dan lingkungannya, serta kontribusi untuk menciptakan output; (b) proses adalah rangkaian kegiatan atau program sesuai dengan kebutuhan input yang diterima dari lingkungan, dan (c) output adalah berupa produk atau jasa, layanan, program, dan ide yang dihasilkan dari tindakan organisasi. Selain itu, keberlanjutan sebuah organisasi juga ditentukan teknologi meliputi mental, fisik dan mekanis untuk mentransformasikan sumberdaya ke dalam output.

Lingkungan, terdiri dari lingkungan pekerjaan yang meliputi organisasi eksternal dan kondisi yang mempengaruhi suatu operasi utama dari organisasi dan teknologi, seperti klien, pesaing, pasar dan lingkungan umum meliputi lembaga dan kondisi yang mempengaruhi keberlanjutan organisasi. Kemudian maksud-strategi, yakni tujuan, rencana dari pembuat keputusan untuk dominasi organisasi, dan yang tidak kalah pentingnya ialah memahami budaya, norma, kepercayaan, nilai kehidupan berorganisasi, dan struktur hubungan semua anggota dan unit-unit yang lebih besar.

Mengenai kepatuhan 'Aisyiyah sebagai organisasi yang berkembang dan berkelanjutan sebagaimana dijelaskan oleh Etzioni dalam Liliweri bahwa, sebuah organisasi dapat berjalan karena di dalamnya ada kepatuhan, baik oleh pengurus maupun anggota. Kepatuhan dalam organisasi dapat diukur dari power dan keterlibatan. Power pada pengurus dan keterlibatan pada anggota. Sehubungan dengan hal itu, Etzioni menyusun skema klasifikasi organisasi berdasarkan sifat-sifat perilaku

(*compliance*). Etzioni memasukkan *compliance* sebagai sikap yang umumnya dimiliki sebagian besar unit-unit sosial bahkan masyarakat. Menurutnya, perilaku (*compliance*) adalah unsur utama yang menata hubungan antara mereka yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dengan pihak yang dikuasai dan diwenangi.

Dalam konteks sosiologi, power yang dimaksud adalah berdasarkan koersif, remuneratif, dan normatif, sedangkan keterlibatan ialah berdasarkan prinsip alienatif, kalkulatif, dan moral. Karena itu, Etzioni menjelaskan bahwa, dalam semua organisasi, para anggota selalu dihubungkan dengan anggota lain melalui hubungan hierarki yang menyebabkan para anggota mempunyai kedudukan lebih tinggi diberi kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar. Kekuasaan dan kewenangan tersebut diatur dan dilegitimasi. Demikian pula, kedudukan selalu memiliki kuasa dan wewenang dalam menata hubungan atasan dengan bawahan.

Apabila para anggota (bawahan) tetap bertindak sebagai partisipan yang rendah, maka anggota tersebut akan merasa terasing atau ditinggalkan. Sebaliknya, jika para anggota merasa tidak ditinggalkan maka akan terlibat di dalam organisasi, sekaligus merasa memiliki organisasi. Dengan demikian, setiap bawahan selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang dapat diperoleh melalui hubungan yang tercipta dalam organisasi. Kondisi ini tidak ditemui dalam organisasi 'Aisyiyah, karena kepatuhan yang tercipta dan berkembang dalam organisasi ini ialah atas dasar moral, bukan remunerasi, honor (insentif), atau paksaan, tetapi rasa memiliki bersama semua amal usaha dalam berkontribusi dengan prinsip "amar makruf nahi munkar".

Secara umum dapat ditegaskan bahwa, realitas kepatuhan anggota kepada ‘Aisyiyah dan kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah adalah relevan dengan penjelasan teori kepatuhan oleh Etzioni yang menawarkan sintesis sistem organisasi untuk mengamankan kepatuhan anggota. Hal ini, sesuai dengan persyaratan dan mengikuti standar perilaku yang ditetapkan, berorientasi pada tujuan, diarahkan kinerja memerlukan kepatuhan anggota. Namun, fakta menunjukkan bahwa penyimpangan dari standar terjadi karena kelemahan dalam komitmen anggota. Sistem kontrol yang diberikan anggota organisasi, baik manajer maupun anggota lain. Dalam kepatuhan dipastikan dengan struktur kontrol dan wewenang organisasi, hierarki formal otoritas, pengawasan, definisi pekerjaan, dan prosedur kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu, sistem koersif ialah mencerminkan kemampuan organisasi menerapkan fisik, kekuatan menghambat dan sakit untuk non-compliance. Misalnya organisasi kustodian, sistem kontrol memungkinkan penarikan anggota dan hak kebebasan. Keterlibatan dengan organisasi yang berasal dari sistem kontrol koersif mungkin terasing, paling pasif dengan perasaan negatif dan disassociation. Sistem ini menawarkan berbagai macam imbalan material atau non-material untuk mengamankan kepatuhan anggota. Dalam hal ini, keanggotaan didasarkan pada kontrak dengan organisasi dan tawar-menawar atas hadiah yang diinginkan dengan imbalan kepatuhan, loyalitas, dan kinerja semua unit-unit yang saling terkait.

Selanjutnya Istilah *Compliance* yang di-Indonesiakan dalam penelitian ini adalah “Kepatuhan”, hingga sekarang belum ditemukan makna yang lebih tepat

(bervariasi). Istilah kepatuhan sering diasumsikan dengan perawatan yang direkomendasikan (diresepkan) seorang dokter kepada pasien, untuk selalu patuh terhadap nasehat dokter. Dengan kata lain, konsep kepatuhan lebih mungkin ketika ada kesepakatan dan kepercayaan mengenai diagnosa dan prognosis. Penelitian di psikiatri, psikologi, dan sosiologi menyediakan banyak penjelasan untuk variasi yang sesuai. Dalam psikiatri, masalah klinis seperti penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol kadang-kadang digunakan untuk menjelaskan ketidakpatuhan. Pasien juga dapat menghentikan minum obat karena efek samping yang tidak diinginkan. Demikian kepatuhan dalam 'Aisyiyah terus berlangsung karena berdasarkan "normatif moral".

Dalam psikologi dan sosiologi, kesehatan, kepercayaan, dan perilaku terkait dengan keluarga dan pekerjaan, dapat meningkatkan atau membatasi kepatuhan. Jika anggota keluarga mendukung kepatuhan pengobatan, dan individu percaya manfaat obat itu, maka kepatuhan dapat ditingkatkan. Jika seseorang tidak melanjutkan pengobatan akan membuat dia mengantuk dan mempengaruhi karya, maka kepatuhan dapat dikurangi. Orang-orang yang memiliki akses terbatas atau kepercayaan pada dokter, ilmu kedokteran, dan orang yang menghalangi mereka dari beberapa perawatan medis, cenderung untuk mematuhi rekomendasi pengobatan.

Sejumlah teori yang mencoba untuk menangkap jenis atau sumber motivasi mempengaruhi anggota organisasi. Misalnya; dalam membahas penyebab internal dan eksternal perilaku, deCharms menyarankan dikotomi ekstrinsik motivasi intrinsik dibandingkan untuk mengkarakterisasi lokus yang berbeda dari kausalitas. Perilaku

intrinsik termotivasi dan mewakili kausalitas internal, sedangkan perilaku yang disebabkan kekuatan eksternal dikatakan mewakili kausalitas eksternal. Kemudian dijelaskan efek imbalan ekstrinsik pada motivasi intrinsik dan dalam melakukannya, mencoba menumpahkan beberapa lampu pada arti motivasi intrinsik. Perilaku intrinsik termotivasi jatuh ke dalam dua kategori, yaitu: (a) meliputi perilaku yang individu terlibat dalam mencari situasi yang menantang. Tantangan-tantangan ini merupakan keganjilan antara stimuli dan standar perbandingan; (b) mencakup perilaku yang bertujuan mengurangi keganjilan ini, yaitu mengatasi tantangan.

E. Dalil-dalil Hasil Penelitian

Berdasarkan paparan sebelumnya tentang kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar, maka beberapa proposisi yang terkait dengan konsep utama yang dibahas berupa dalil-dalil hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kemandirian sebuah organisasi ditentukan oleh kemampuan mereproduksi dirinya seiring dengan tuntutan lingkungan eksternalnya dan menghasilkan unsur-unsur atau unit-unit untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan strategisnya.

Proposisi atau dalil tersebut di atas, penjabarannya di 'Aisyiyah dapat dilihat pada proses pembaharuan yang dilakukan oleh unit-unit organisasi (Amal Usaha 'Aisyiyah) secara terus menerus (mereproduksi diri sendiri) sesuai dengan tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan strategisnya, yaitu lingkungan strategis terdekat Muhammadiyah dan lingkungan strategis yang lebih luas masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, 'Aisyiyah melakukan perbaikan dan penyesuaian dari fase

ke fase (periode ke periode) terhadap unit-unit amal usaha 'Aisyiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.

Kemandirian 'Aisyiyah berdasarkan fakta empiris menunjukkan bahwa, sebagai organisasi dakwah keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan telah melakukan perubahan dan penyesuaian struktural bidang pendidikan, sebelumnya menggunakan Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, berubah menjadi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Demikian pula perubahan struktural bidang lain seperti, Pembinaan Kesejahteraan Umat (PKU); sekarang berubah Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup, dan Majelis Kesejahteraan Sosial. Majelis Hukum dan HAM, sebelumnya merupakan bagian dari majelis lain.

2. Sebuah organisasi dikatakan mandiri karena adanya otonomi pada dirinya dan di sisi lain ada keterkaitan dengan struktur lain yang lebih besar.

'Aisyiyah merupakan sistem yang otonom dalam mengambil kebijakan dan keputusan secara otonom untuk menggerakkan unit-unit organisasi (amal usaha) di satu sisi, namun di sisi lain 'Aisyiyah adalah bahagian dari sistem yang lebih besar, yaitu Muhammadiyah. Dalam hal ini, untuk menjaga dan memelihara kemandirian tersebut, 'Aisyiyah tetap berada dalam posisi mendua (dua eksistensi), yaitu di satu sisi merupakan organisasi otonom dalam melaksanakan program-program kerja secara mandiri, tetapi di sisi lain terikat atau bagian yang tidak terpisahkan dengan organisasi induk (Muhammadiyah).

'Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah memiliki jaringan struktural yang sangat luas dalam menunjang gerakan dakwah Islam. Jaringan struktural yang

tersebar dan berjenjang dalam beberapa level mempunyai kewenangan dan wilayah kerja sesuai dengan kebijakan Muhammadiyah. Jaringan tersebut tersebar di seluruh daerah, ini merupakan potensi yang sangat besar untuk membangun umat menuju masyarakat utama dalam bentuk sinergi dan jaringan yang kuat di beberapa bidang. Jaringan struktural merupakan kontribusi 'Aisyiyah yang besar sebagai sistem yang otonom dalam mengakomodasikan warga dalam menyalurkan aspirasinya, sekaligus mengkoordinasikan berbagai gerakan melalui aktivitas dakwah keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan sebagainya.

3. Keberlanjutan organisasi ditentukan oleh visi atau perinsip dasar yang menjadi medan magnet yang mengikat, menggerakkan dan menjadi pegangan semua unsur dalam organisasi untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Eksistensi dan kemandirian 'Aisyiyah sejak didirikan hingga menjelang satu abad, karena diikat oleh visi organisasi dan prinsip dasar yang kuat, serta dipatuhi oleh semua pengurus dan anggota. Visi 'Aisyiyah sekaligus visi Muhammadiyah adalah "Tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya", sedangkan prinsip dasar tetap dipegang teguh adalah "Amar ma'ruf nahi munkar". Hal inilah yang menjadi medan magnet yang mengikat dan menggerakkan semua pengurus dan anggota untuk bergerak bersama, berkontribusi melalui program kerja yang telah disepakati dalam mewujudkan visi organisasi tersebut.

Dengan demikian, keberlanjutan 'Aisyiyah sejak dibentuk hingga sekarang karena semua pengurus dan anggota dalam merealisasikan program kerja yang telah

ditentukan tetap dalam satu komitmen, satu prinsip, dan satu tujuan yang dirangkul dalam satu visi sehingga menuntun semua unsur dalam organisasi bertindak bersama untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, gerakan dakwah yang dilakukannya telah membentuk akhlak, kepribadian, dan kecerdasan masyarakat sebagai bagian dari visi ideal membentuk masyarakat madani, yakni masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

4. Keberlanjutan sebuah organisasi dipengaruhi oleh sistem yang bersiklus melalui input, proses, dan output sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungan eksternalnya.

Keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah sebagai sistem yang otonom terdiri atas unit-unit yang utuh menerima input dalam merespon tuntutan dari lingkungan untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat menghasilkan output (hasil) yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian, di balik kemandirian 'Aisyiyah sebagai sistem yang otonom, juga dapat memelihara keberlanjutan organisasi karena semua komponen atau unit-unit organisasi berkembang melalui ketiga aspek yang dimaksud, yaitu input, proses, dan output. Dengan demikian, unit-unit organisasi (amal usaha) yang mengelola bidang pendidikan, dilaksanakan Majelis Dikdasmen dalam menerima input berupa calon siswa dari lingkungan, kemudian diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian halnya, majelis lain seperti Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Pembinaan

Kader, serta Majelis Hukum dan HAM, melaksanakan hal yang sama sehingga ‘Aisyiyah tetap berkembang dan berkelanjutan.

Keberlanjutan ‘Aisyiyah karena mampu merespon lingkungan strategisnya, selain merupakan karunia Allah yang diraih atas kekuatan yang lahir dari keihlasan, komitmen, potensi, dan partisipasi semua warga sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar, serta tajdid sehingga selalu menunjukkan semangat tinggi untuk berkiprah konstruktif dalam kehidupan. Dengan demikian, keberlanjutan merupakan daya kontigensi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan strategis serta kepercayaan dan dukungan berbagai pihak yang memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan visi dan tujuan organisasi.

5. Adanya kepatuhan yang ditunjukkan oleh pengurus dan anggota dapat menunjang kemandirian dan keberlanjutan sebuah organisasi.

Kepatuhan pengurus dan anggota ‘Aisyiyah dalam mengantisipasi dinamika kemandirian organisasi semata-mata berlandaskan moral dalam merintis amal usaha. Dalam hal ini, keterlibatan anggota dan pengurus ‘Aisyiyah mengelola organisasi lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan moral. Keputusan Ketua PDA Kota Makassar ketika itu, agar pendidikan dini untuk anak-anak dijadikan dasar untuk mendirikan Taman Kanan-Kanak pertama di Kota Makassar. Keputusan tersebut karena pertimbangan moral, sehingga keterlibatan anggota juga karena pertimbangan moral.

Kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah karena atas dasar moral. Kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah dapat dilihat melalui berbagai gerakan

sejak Siswa Praja Wanita Muhammadiyah yang terus berusaha untuk menanamkan dan mensosialisasikan gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar; memberantas Tahayul, Bid'ah, Churafat (TBC); dan membangun akhlakul karimah di kalangan generasi muda putri Islam. Kesadaran sosio-kultural para pemuka Muhammadiyah ini didasari oleh fenomena masyarakat Indonesia, yang cenderung memelihara TBC. Marginalisasi ajaran Islam ini dikarenakan oleh proses akulturasi Islam dengan budaya setempat yang tidak segera direformasi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dinamika kemandirian 'Aisyiyah Kota Makassar dalam berbagai fase perkembangan menunjukkan bahwa, posisi 'Aisyiyah tidak hanya karena otonomi dirinya melainkan ada keterkaitan dengan struktur lain yang lebih besar, yaitu Muhammadiyah. Kemandirian yang dimaksud, ditinjau dari tiga konsep dasar, medanvisional, paradoks independensi, dan autopoiesis.

1. Dilihat dari aspek medan visional, warga 'Aisyiyah telah bergerak dalam arah yang sama dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan yang sama, yaitu "tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya" sebagai visi 'Aisyiyah sekaligus visi Muhammadiyah.
2. Dilihat dari aspek paradoks Independensi, posisi 'Aisyiyah berada dalam dua eksistensi, di satu sisi dia otonom, dalam merumuskan kebijakan-kebijakan, mengambil keputusan-keputusan untuk diaplikasikan secara otonom pula. Namun, di sisi lain 'Aisyiyah merupakan bagian dari Muhammadiyah dimana keputusan-keputusan yang telah diambil secara otonom bisa atau dapat diintervensi oleh Muhammadiyah sebagai organisasi induk (sistem yang lebih besar), jika tidak sesuai atau tidak sejalan dengan visi.
3. Dilihat dari aspek autopoiesis, ditemukan 'Aisyiyah selalu memperbaharui diri (memproduksi) dirinya sendiri sesuai dengan tuntutan lingkungan eksternal dan

menghasilkan unsur-unsur atau unit-unitnya sendiri untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan strategisnya, dalam hal ini Muhammadiyah, Pemerintah, dan masyarakat secara luas. Dengan demikian, 'Aisyiyah senantiasa melakukan perubahan-perubahan pola interaksi dan komunikasi terhadap lingkungannya (mereproduksi) terhadap unit-unit organisasi yang dimiliki dari period eke periode terus menerus dan berkelanjutan, sehingga tetap eksis dan bertahan hingga sekarang.

Sebagai sistem social, kemandirian 'Aisyiyah juga bermakna sebagai organisasi diri (*sef-organization*) atau manajemen diri (*self-management*). Dengan kata lain, unsur-unsur tersebut saling berinteraksi dan melengkapi sehingga muncul suatu keseimbangan. Dewasa ini, pencarian pola yang tepat, agar interaksi antar unsur selalu mencapai keseimbangan, menjadi sangat penting. Setiap keseimbangan yang dicapai akan menjadi landasan bagi perkembangan berikutnya. Proses kemandirian adalah proses yang berjalan tanpa ujung.

Dalam konteks pembangunan di berbagai bidang, sikap kemandirian telah dijadikan tolok ukur keberhasilan, sebagaimana 'Aisyiyah dalam setiap fase perkembangannya telah menunjukkan kemandirian dari waktu ke waktusehingga dia berlanjut dan berkembang sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan. Fase-fase perkembangan 'Aisyiyah merupakan suatu proses perjalanan panjang dalam mewujudkan visi organisasi.

Keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah dalam merespons dinamika yang terus berubah, terutama perkembangan bangsa saat ini memprihatinkan. Dalam hal ini

'Aisyiyah sebagai organisasi otonom yang bergerak di bidang sosial keagamaan dalam usianya yang relatif lama dan telah menunjukkan kiprahnya dalam memberikan pencerahan, pemberdayaan, kemaslahatan, dan kemajuan terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Keberhasilan dan peran positif 'Aisyiyah tersebut merupakan karunia Allah yang diraih karena kekuatan keihlasan, komitmen, potensi, dan partisipasi organisasi 'Aisyiyah sebagai gerakan dakwah "amar makruf nahi munkar" serta tajdid sehingga selalu menunjukkan semangat yang tinggi untuk berkiprah konstruktif dalam berbagai aspek kehidupan.

Keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar, dapat diukur dari sistem yang dikembangkan dalam unit-unit organisasi (amal usaha) melalui input, proses dan output. Dalam hal ini, 'Aisyiyah sebagai sistem yang utuh dan otonomi dapat menerima input dari lingkungan, yaitu calon murid untuk sekolah; calon pasien untuk rumah sakit; dan calon binaan untuk Panti Asuhan; kemudian diproses sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari lingkungan, sehingga menghasilkan output seperti yang diinginkan.

Input, adalah bahan baku berupa sumber daya atau potensi yang diterima dari lingkungan (masyarakat), dalam hal ini murid atau siswa untuk unit organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang dikelola 'Aisyiyah Kota Makassar sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan.

Proses, adalah pelaksanaan program kegiatan, kebijakan, dan tindakan yang ditempuh semua elemen organisasi ('Aisyiyah) terhadap input yang telah diterima dari lingkungan (masyarakat) sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari input, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Output, adalah hasil yang diharapkan dalam hal ini berupa produk yang dihasilkan dari proses kegiatan atau program kerja yang telah ditentukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, input, proses, dan output adalah rangkaian kegiatan dari sebuah sistem yang saling terkait, untuk mencapai hasil produksi yang optimal berupa jasa pelayanan yang memuaskan, kualitas pendidikan, kesehatan pasien, dan masa depan anak-anak binaan (panti asuhan) yang terjamin.

Dinamika kepatuhan anggota kepada 'Aisyiyah dalam mengelola dan mengembangkan amal usaha adalah normatif-moral, sedangkan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah di balik kemandirian dan keberlanjutan organisasi, diwujudkan dalam bentuk kesadaran kolektif dan komitmen moral semua pengurus dan anggota dalam mengelola serta mengembangkan unit-unit amal usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan anggota dan pengurus kepada 'Aisyiyah dilihat pada kesadaran kolektif dan komitmen moral yang dibangun di atas pondasi "amar makruf nahi munkar" untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khaerat), dan keikhlasan dalam berorganisasi, sehingga kesulitan apapun dihadapi bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dengan demikian, kekuasaan yang diaplikasikan adalah normatif dan keterlibatan yang diaplikasikan adalah moral, sehingga kepatuhan anggota kepada pengurus 'Aisyiyah dan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah berciri normatif – moral. Ciri kepatuhan koersif – alienatif dan remuneratif – kalkulatif kurang teraplikasikan pada organisasi 'Aisyiyah dan hubungan 'Aisyiyah dengan Muhammadiyah.

Dinamika kepatuhan anggota kepada 'Aisyiyah dan kepatuhan kepada Muhammadiyah adalah bersifat normatif moral, yang mengikat pengurus dan semua anggota. Dengan kata lain, model kepatuhan yang dianut bukan sistem koersif yang mencerminkan kemampuan organisasi menerapkan fisik, kekuatan menghambat dan sakit untuk *non-compliance*. Selain itu, sistem kontrol memungkinkan penarikan anggota dan hak kebebasan. Keterlibatan dengan organisasi yang berasal dari sistem kontrol koersif mungkin terasing, pasif dengan perasaan negatif dan *disassociation*. Sistem ini menawarkan berbagai macam imbalan material untuk mengamankan kepatuhan anggota. Dalam hal ini, keanggotaan didasarkan pada kontrak dengan organisasi dan tawar-menawar atas hadiah yang diinginkan dengan imbalan kepatuhan, loyalitas, dan kinerja semua unit-unit yang saling terkait. Dengan demikian, model kepatuhan anggota kepada 'Aisyiyah dan kepatuhan Aisyiyah kepada Muhammadiyah, adalah “normatif moral”, bukan remuneratif, bukan insentif, dan bukan paksaan.

1. Power yang bekerja di 'Aisyiyah ialah kekuasaan yang sifatnya normatif. Dalam hal ini, kekuasaan yang diaplikasikan dalam organisasi 'Aisyiyah terhadap unit-

unit organisasi (amal usaha) adalah normatif. Oleh karena itu, power yang berlaku dalam ‘Aisyiyah memiliki kuasa dan wewenang dengan dasar pertimbangan normatif – moral.

2. Keterlibatan, bahwa di ‘Aisyiyah lebih banyak keterlibatan moral, alienatif, dan kalkulatif. Dengan demikian, keterlibatan anggota dan pengurus di dalam mengelola unit-unit organisasi (amal usaha ‘Aisyiyah) dominan moral – normatif. Dengan kata lain, kekuasaan pengurus dalam organisasi ‘Aisyiyah adalah bersifat normatif dan keterlibatan anggota dalam unit-unit organisasi semata-mata karena pertimbangan moral.
3. Kepatuhan, adalah hubungan yang bersifat *kongruen*, hubungan yang demikian dipandang lebih efektif untuk diterapkan dalam setiap organisasi termasuk ‘Aisyiyah. Dalam hal ini, kepatuhan hubungan yang kongruen akan mengakibatkan organisasi sebagai unit sosial (amal usaha) dapat mempertahankan diri dari tekanan internal maupun eksternal, dalam hal ini adalah Muhammadiyah dan Pemerintah, sehingga ‘Aisyiyah tetap eksis (bertahan), komitmen, mandiri, dan berkelanjutan.

B. Saran-saran (Rekomendasi)

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas sebagai inti pembahasan, maka dikemukakan beberapa saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Saran untuk pengurus Aisyiyah, bahwa Aisyiyah perlu lebih meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota dalam merespon secara adaptif perubahan pada lingkungan strategis, melalui peningkatan kompetensi dan kapabilitas pengurus dan anggota dalam urusan dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan maupun dalam urusan spiritualitas, serta peningkatan kapasitas organisasi terutama dalam membangun jejaring dengan organisasi lain yang visi dan misinya tidak bertentangan dengan organisasi 'Aisyiyah.
2. Saran terkait hubungan 'Aisyiyah dengan Muhammadiyah, menyadari bahwa 'Aisyiyah sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang didirikan untuk memperkuat Muhammadiyah dalam membina umat khususnya terkait dengan masalah-masalah perempuan yang dalam banyak hal masih tertinggal dibanding dengan laki-laki. Oleh karena itu, untuk memelihara kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah, semua pengurus dan anggota harus memahami visi, misi, dan posisinya di dalam menjalankan roda organisasi agar tetap langgeng sebagaimana telah terjalin selama ini.
3. Saran kepada Pemerintah dalam membina dan memfasilitasi organisasi perempuan semacam 'Aisyiyah. Dalam hal ini, 'Aisyiyah merupakan salah satu organisasi perempuan pertama di Indonesia yang keberadaannya atau eksistensinya menjelang satu abad perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, terutama dalam menangani masalah-masalah perempuan yang semakin kompleks antara lain: isu gender, kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia (*trafficking*) yang kebanyakan

korbannya adalah perempuan. Di samping itu, 'Aisyiyah perlu menjalin kerjasama dengan lembaga atau Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar dalam menanggulangi berbagai persoalan yang dihadapi kaum perempuan.

4. Saran kepada masyarakat umum, harus dipahami bahwa posisi 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah, belum dikenal luas oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, 'Aisyiyah masih perlu lebih banyak mensosialisasikan program-program kerja kepada masyarakat umum, baik dakwah keagamaan, sosial budaya, dan kegiatan kemasyarakatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Hal ini penting, karena fakta menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat belum mengenal 'Aisyah terutama kalangan bawah (petani, nelayan, dan kaum buruh). Di samping itu, sebagian warga Muhammadiyah juga belum akrab dengan 'Aisyiyah sehingga banyak program-program kerja yang tidak tersentuh oleh mereka dalam mengatasi berbagai kesulitan hidup. Dengan kata lain, 'Aisyiyah perlu lebih giat mensosialisasikan visi, misi, dan program kerja kepada warga Islam secara umum sehingga eksistensi, fungsi, dan peran yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat umum, umat Islam, bangsa dan negara mencapai hasil yang memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, A.G., 2001. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*, Jakarta: Penerbit Arga.
- Ahmadi, Rulam, 2005. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press).
- Ali, Fachri, dan Bahtiar Effendy. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*. Jakarta: Mizan.
- Amien, A. Mappadantji, 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Amirin, Tatang M. 1984. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anwar, Dewi Fortuna, (et.al) (ed) 2005. *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, (LESMA – CNRS), KITLV.
- Arifin, M. 1991. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: CV. Bina Aksara.
- Artir, Mustafa O. (et.al) (ed) 1989. *Sosiologi Modernisasi: Telaah Kritis Tentang Teori, Riset, dan Realitas*. Terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Awang, San Afri, 2006. *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Konstruksi Sosial dan Perlawanan*. Yogyakarta: Debut Press.
- Azhar, Muhammad. 1997. *Filsafat Politik – Perbandingan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barry, John, 1999. *Environment and Social Theory*. New York: Routledge.
- Berger, Peter L., dan Hansfried Kellner, 1985. *Sosiologi Ditafsirkan Kembali: Esei tentang Metode dan Bidang Kerja*. Terj. Herry Joediono. Jakarta: LP3ES.

- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann, 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Berger, Peter L., 1994. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Terj. Hartono. Jakarta: LP3ES.
- Bertens, K., 1990. *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia.
- Bobbi Deporter & Mieke Hernachi, 2002. *Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*, Bandung: Kaifa.
- Bodine, Richard J., 1998. *The Handbook of Conflict Resolution Education: a Guide to Building Quality Programs in Schools*. Josses Bass USA.
- Bogdan, Robert, dan Steven J. Taylor, 1993. *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Borgatta, Edgar F., dan Marie L. Borgatta, 1992. *Encyclopedia of Sociology*. Volume 1,2,3,4. New York: Macmillan Publishing Company.
- Brannen, Julia. 1999. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Terj. H. Nukthah Arfawie Kurde, Imam Safe'i, dan Noorhaedi, H.A. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Brinkerhoff, Derick W., and Goldsmith, Arthur A., 1990. *Institutional Sustainability in Agriculture and Rural Development A Global Perspective*. New York: Westport, Connecticut London.
- Brojonegoro, Arjuno. 2000. *Indonesia Menapak Abad 21-Kajian Ekonomi Politik*. Jakarta: LPSK – LIPI.
- Budiman, Arief, 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Idiologi*. Jakarta: Gramedia.
- Budiyanto, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____, 2008. *Majalah Suara 'Aisyiyah No. 11 Tahun ke-85*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Pers 'Aisyiyah.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Bungin, Burhan (ed.). 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial; Sketsa Penilaian Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Coser, Lewis A., 1966. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press-London: Collier-McMillan Limited.
- Criblin, J., 1982. *Leadership Strategies for Organizations Effectiveness*. New York: Amacom.
- Creswell, John W., 1994. *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. Delhi: SAGE Publication.
- _____, 1997. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions*. India: SAGE Publication.
- Culla, Adi Suryadi, 1999. *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Davis & Newstrom, 1981. *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill International Editions.
- Djohar, 2003. *Pendidikan Strategik Alternatif Untuk Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: LESFI.
- Donald P. Kauchosck And Paul D. Eggen, 1998. *Learning And Teaching Research Based Methods*. Baston: Allya And Baron.
- DuBrin, A.J., 1984. *Foundation of Organizational Behavior an Applied Perspective*. London: Prentice-Hall International Inc.
- Durkheim, Emile. 1984. *The Devision of Labor in Society*. Introduction: Lewis A. Coser. New York: The Free Press.
- Fauzi, Noer, 2005. *Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Insist Press.
- Feldman, D.C. dan Arnold, H.J., 1983. *Managing Individual and Group Behavior in Organizations*. London: McGraw-Hill International Book Company.

- Fisher, Simon, dkk., 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Terj. S.N. Karikasari, dkk. Jakarta: The British Council Indonesia.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1996. *Organization: Structure, Processes, Behavior*. Dallas: Business Publications Inc.
- Giddens, Anthony. 1981. *Perbedaan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*. Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 1984. *The Constitution of Society-Teori Struktural untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Pedati.
- _____, 1986. *Kapitalisme dan Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Marx, Durkheim dan Max Weber*. Terj. Soeheba Kramadibrata. Jakarta: UI Press.
- _____, 2004. *Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*. Terj. Dari judul aslinya: *The Constitution of Society*. Pasuruan: Pedati.
- Giddens, A., (et.al). 2004. *Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. Terj. Ninik Rochani Sjams, Editor: Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Gilbert H. Hunt, et al., 1999. *Efectie Teaching, Preparation And Implementation*. Illinois: Charless C. Thomas Publiesher.
- Ginting, C., 2003. *Kiat Belajar di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Goldschider, Calvin. 1985. *Populasi, Modernisasi, dan Struktur Sosial*. Terj. Nin Bakdi Sumanto. Jakarta: CV. Rajawali.
- Greenberg, Edward S., 1990. *State Changes: Approaches and Concept*, dalam Edward S. Greenberg dan Thomas F. Mayer (eds), 1990. *Changes in the State: Causes and Concequences*. Newbury Park California: Sage Publication.
- Hamid, Abu, 1994. *Syeh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hardiman, Fransisco Budi, 2004. *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Buku Baik.
- Harris, Marvin. 1979. *Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture*. New York: Random House.

- Henslim, James M. 2007. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi, Edisi 6, Jilid 1*. Terj. Kamanto Sunarto. Jakarta: Erlangga.
- Hunsaker, Phillip L., 2001. *Training in Management Skills*. New Jersey: Prentice Hall.
- Jerry Aldridge, and Renetta Soldman, 2002. *Current Issues And Trends In Education*. Boston, USA: Allya And Baron.
- Johnson, Doyle Paul, 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (2)*. Terj. Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- _____, 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (1)*. Terj. Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Juwono, Sudarmawan. 2009. *Teori Tindakan Rasional dan Moral*. Online (<http://sukawayang.wordpress.com/2009/02/03>).
- Kartodirdjo, Sartono, 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kerlinger, Fred N. 2002. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Terj. Landung R. Simatupang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat (ed). 1990. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo, 2000. *Kesadaran dan Perilaku dalam Menuju Tata Indonesia Baru*. Editor: Selo Sumardjan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuper, Adam & Jasica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Terj. Haris Munandar (et.al), dari judul aslinya: *The Social Sciences Encyclopedia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Laeyendecker, L., 1983. *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Terj. Samekto. Jakarta: Gramedia.
- Liliweri, Alo. 1997. *Sosiologi Organisasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lauer, Robert H. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Lederach, J, Building Oeace: 1997. *Sustainable Reconciliation in Diveded Societies*. Washington .D.C: USIP Press.
- Luthans, F., 1985.*Organizational Behavior*.New York: McGraw-Hill Bokk Company.
- Magnis Suseno, Frans, 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Maksum A., dan Ruhendi, L.Y., 2004. *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modern Mencari Visi Baru' atas 'Realitas Baru' Pendidikan Kita*. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.
- Merton, Robert King, 1968. *Social Theory and Social Structure*.Edition. New York: Enlarged Free Press.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng H. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metafisik, Telaah Studi Teks & Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Muhadjir, Noeng, 2007. *Metodologi Keilmuan*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulkham, Abdul Munir. 1989. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965 – 1987 dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mulwoso, E., 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsp, Karakteristik dan Implementas*. Bandug: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. E. 2004. *Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional*.Banaung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munandar, AS., 1987. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*, Seminar Strategi Pengendalian Konflik dalam Organisasi. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto (ed.). 2006. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.

- Nasikun, 2000. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nashir, Haedar. 1999. *Pragmatisme Politik Kaum Elit*. Pustaka Yogyakarta: Pelajar.
- _____ 2000. *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang.
- Nattingham, Elizabeth K. 1997. *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Terj. Abdul Muis Naharong, dari judul aslinya: *Religion and Society*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, H. Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- North, Douglass C., 2007. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.
- Owens, R.G., 1991. *Organization Behavior in Education*. Boston: Allyn and Bacon.
- Paloma, Margaret M., 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Terj. Tim Yasogama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Parsons, Talcott. 1969. *Political and Social Structure*. New York: The Free Press.
- Papayungan, M.M. 1992, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Teori & Praktek)*. Ujung Pandang: Pusat Studi Kependudukan UNHAS.
- Philipus, Ng dan Nurul Aini. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Punch, Keith F. 1998. *Introduction to Social Research Quantitative and Qualitative Approaches*. New Delhi: SAGE Publication.
- Paulo Freire, 2002. *Politik Pendidikan dan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dan ead.
- Polak, M., 1982. *Sosiologi: Suatu Buku Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT Ictiar Baru.

- Prabu-Mangkunegara A., 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rosdakarya.
- Priyono, B. Herry, 2003. *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Rahardjo, M. Dawan. 1993. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*. Bandung: Mizan.
- Raho, Bernard, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ritzer, George, 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Terj. Alimandan. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 1992. *Sociological Theory*. Third Edition. Singapore: McGraw-Hill Co-International Edition.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Terj. Alimandan. Jakarta: Kencana.
- Robbins, Stephen P., 1990. *Organization Theory: Structure, Design and Applications*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- , 2003. *Organizational Behavior*. Diterjemahkan oleh Indeks. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Rosyada, Dede, 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Rusmadi. 2008. *Krisis Lingkungan Dalam Bingkai Teori Strukturasi: Antara Governance dan Governmentality Lingkungan*. (online), (http://rusmadi-rusmadi.blogspot.com/2008/02/artikel_1848.html, diakses 01 Maret 2008)
- Salim, Agus, 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku untuk Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sanderson, Stephen K., 2003. *Sosiologi Makro; Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas*. Terj. Farid Wajidi dan S. Menno. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Sanit, Arbi. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat: Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum, dan Hak Asasi*. Jakarta: CV. Rajawali.

- _____. 2000. *Badai Revolusi: Sketsa Kekuasaan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schermerhorn, R. A., 1987. *Masyarakat dan Kekuasaan*. Terj. Soerjono Soekanto & Agus Brotosusilo. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Priyo Budi. 1993. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspektif Cultural dan Struktural*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sedarmayanti, 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan Ditinjau dari Beberapa Aspek Esensial dan Aktual*. Bandung: CV Mandar Maju.
- _____, 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siahaan, Hotman M., 1997. *Dinamika Politik Kelompok Marginal*, dalam Basis Susilo (ed). *Masyarakat dan Negara*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Simmel, Georg, 1995. *Conflict and the Web of Group-Affiliations*. New York: The Free Press.
- Siswanto, Sastrohadiwiryo B., 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Smith, Eugene D., 1985. *Agama dan Modernisasi Politik – Suatu Kajian Analitis*. Terj. Mahnun Husein. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, dan Winarno Yudho. 1986. *Georg Simmel: Beberapa Teori Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sodiq. A. Kuntoro., 1985. *Dimensi Manusia dalam Pemikiran Indonesia*. Yogyakarta: CV Bur Cahaya.
- Soekanto, Soerjono, 1991. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Strike, K.A dan Soltis, J.F., 2003. *Etika Profesi Kependidikan, Alih Bahasa F. Sinaradi*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.

- Subuki, Makyun. 2006. *Komunikasi dalam Interaksionisme Simbolis, Strukturasi, dan Konvergensi*. (online), <http://tulisanmakyun.blogspot.com/2008/02/teori-komunikasi-29.html>, diakses 01 Maret 2008)
- Sudarwan, Danim, 2003. *Agenda Pemabruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik: Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Susetiawan, 1999. *Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial : Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2000. *Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahatah, H., 2004. *Kiat Islami Meraih Prestasi*. Jakarta: Gema Insani.
- Syamsuddin, Din. 2000. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos.
- Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan, Editor: Triwibowo Budi Santoso, dari judul aslinya: *The Sociology of Social Change*. Jakarta: Prenada.
- Tahel, Elza Peldi (ed). 1994. *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Taneko, Soleman B. 1996. *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*. Bandar Lampung: Fajar Agung.
- Tilaar, H.A R., 2004. *Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tosi, H.L., Rizzo, J.R. & Carrol, S.J., 1990. *Managing Organizational Behavior*. (2nd Edition). New York: Harper Collins Publihsers.
- Turner, Bryan S. 1984. *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*. Terj. G.A. Ticoalu, dari judul aslinya: *Weber and Islam*. Jakarta: CV. Rajwali.

- _____ 1994. *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat*. Terj. Sirojuddin (et.al), dari judul aslinya: *Orientalism, Postmodernism and Globalism*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.
- Turner, Jonathan H., 1991. *The Structure Of Sociological Theory*. Belmont California: Wodsworth Inc.
- Veeger, K.J. 1993. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi, Akdam H. 2005. *Manajemen Konflik dalam Organisasi: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Efektif*. Bandung: Alfabeta.
- Wallace, Walter L. 1994. *Metode Logika Ilmu Sosial*. Terj. Yayasan Solidaritas Gajah Mada. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warsito, Tulus. 1999. *Pembangunan Politik: Refleksi Atas Krisis*. Jakarta: Bigraf Publishing.
- Warnaen, Suwarsih. 2002. *Stereotip Etnis Dalam Masyarakat Multietnis*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Walton, R.E., 1987. *Managing Conflict: Interpersonal Dialogue and Third-Party Roles*. (2nd Edition). Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Weber, Max, 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: The Free Press.
- _____ 2000. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. Terjemahan Yusup Priyasudiarja. Surabaya: Pustaka Promethea.
- _____ 2002. *Sosiologi Agama*. Terj. Muhammad Yamin, dari judul asli: *The Sociology of Religion*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- _____ 2009. *Sosiologi From Max Weber: Essays in Sociology*. Terj. Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widyanta, A. B., 2002. *Problem Modernitas dalam Kerangka Sosiologi Kebudayaan Georg Simmel*. Yogyakarta: Cindelaras.

- Weilenman, Alexander. 1994. *Riset Evaluasi dan Perubahan Sosial*. Terj. H. Soenarwan. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Wertheim, W. F., 1999. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Winardi, 1994. *Manajemen Konflik: Konflik Perubahan dan Perbandingan*. Bandung: Mandar Mamuju.
- Windhu, Marsana I. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan : Menurut Johan Galtung*. Jakarta: Kanisius.
- Worsley, Peter, (et.al). 1992. *Introducing Sociology*. Diterjemahkan oleh Hartono Hadikusumo, dengan judul: *Pengantar Sosiologi-Sebuah Pembanding*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Wuisman, J.J.J.M. 1996. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusup, Yusmar. 1988. *Dinamika Kelompok: Kerangka Studi dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Bandung: Armico.
- Zeitlin, Irving M. 1998. *Memahami Kembali Sosiologi (Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

PRAKATA

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat, dan izinnya jualah sehingga seluruh proses penelitian desertasi ini dapat dirampungkan. Penulis yakin tanpa hidayah, serta nikmat kesehatan dan kekuatanyang Allah berikan maka seluruh proses kegiatan penulisan desertasi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Tak lupa saya panjatkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita ke alam yang beradab, alam yang mampu kita akses, dan terang benderang, dimana kita semua dapat merasakan manfaatnya.

Selain ucapan rasa syukur yang tak terhingga kepada ALLah SWT, atas semua nikmat yang diberikan, maka saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku Hj. Sariba dan Almarhum Katanni, yang dengan bersusah payah membimbing dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, sehingga mendapatkan keberhasilan ini, di tangan kedua orang tua, dan Ridhonyalah sehingga saya dapat tegar menjalani hidup ini. Semoga Allah SWT menyayanginya seperti beliau menyayangi anak-anaknya, Amin ya Rab. Kepada istriku tercinta yang sangat menyayangiku, dengan setia mendampingi, dan membantu saya dalam penyelesaian tulisan ini, demikian pula kedua putriku, St. Adinda Srikandi, dan Dianita Nurrahma yang saya banggakan, dengan penuh ikhlas memberikan motivasi, kepada kakak-kakak saya yang tidak pernah lepas doa-doanya yang dipanjatkan untuk keberhasilan saya, Amin.

Penyelesaian desertasi ini banyak melibatkan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang sangat berjasa membantu saya dalam menyelesaikan desertasi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada yang saya hormati Bapak Prof. Dr. H. Darmawan Salman, M.Si selaku Promotor, yang terus berupaya memberi motivasi dan meluangkan waktunya yang tidak sedikit untuk kepentingan konsultasi dan penyelesaian desertasi ini, memberikan tanggapan yang sangat terbuka, kritis, dan masukan-masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian tulisan ini.

Kepada Bapak Prof. Dr. H. Wahyuddin Hamid, M.Si, selaku kopromotor satu, beliau selalu ikhlas dalam melayani konsultasi, walaupun sangat sibuk namun tetap memberikan waktu, dan menyempatkan diri dalam memberikan saran-saran guna perbaikan desertasi ini. Kepada Bapak Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. selaku kopromotor dua yang sangat membantu dalam memberikan saran dan kritikan, tidak hanya mengikhhlaskan waktu dan ilmunya, tetapi juga memberi semangat untuk terus berjuang dalam menyelesaikan tulisan desertasi ini. Kepada mereka saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas jasa-jasanya, Amin.

Terima kasih yang tak terhingga juga saya haturkan kepada para penguji masing-masing, Bapak Prof. Dr. Andi Agustang, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Muh Tahir

Kasnawi, SU. Bapak Dr. Sulaiman Samad, M.Si, Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si, selaku penguji eksternal. Kesemua penguji telah banyak memberikan saran, arahan, dan kritikan yang sangat bermanfaat dalam membuka wawasan akademik sejak ujian proposal hingga penyelesaian disertasi ini.

Kepada yang terhormat bapak Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Makassar, kepada yang terhormat bapak Prof. Dr. Jasruddin, M.Si, Direktur program Pasca Sarjana UNM, kepada yang terhormat bapak Prof. Dr. Suradi Tahmir, MS dan bapak Prof. Dr. H. Andi Ihsan, M.Kes, masing-masing Asdir I dan Asdir II, kepada yang terhormat bapak Prof. Dr. H. Andi Agustang, M.Si Ketua Program Studi Sosiologi PPS UNM, kepada seluruh bapak dan ibu dosen pada Program Pasca Sarjana UNM, dan kepada seluruh staf pegawai pada Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, kepada mereka semua saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Akhir kata kepada semua pihak yang memberikan sumbangsiah bagi penulisan dan penyelesaian disertasi ini dan tidak sempat disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terima kasih, semoga menjadi amalan kebaikan di sisi Allah SWT, semoga disertasi ini bermanfaat bagi saya pribadi dan ‘Aisyiyah khususnya, Amin.

Makassar,
Desember 2013

Nursalam

RIWAYAT HIDUP



Nursalam, lahir di Enrekang pada tahun 1960 oleh pasangan Katanni, dan Hj. Sariba sebagai anak terakhir dari tiga orang bersaudara. Menamatkan pendidikan dasar di SDN 2 Kab Enrekang 1972, tingkat menengah pertama PGAN 4 Th di Kab Enrekang 1975, dan sekolah menengah atas di PGAN 6 Th di Kab.Enrekang pada tahun 1979, kemudian melanjutkan pendidikan di Univ. Veteran RI Ujung Pandang jurusan Pendidikan Umum, dan tamat pada tahun 1986.

Pada tahun 1988 diangkat menjadi Dosen Kopertis Wil. IX Diperkerjakan pada Univ.Muhammadiyah Makassar, tahun 1999 melanjutkan pendidikan pada Program Magister di Universitas Hasanuddin di bidang kajian Komunikasi Pendidikan, dan menyelesaikan studi pada tahun 2003.

Tahun 2004 diangkat menjadi sekretaris jurusan Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2006–sekarang. Tahun 2008 melanjutkan pendidikan Program Doktor di Universitas Negeri Makassar bidang kajian sosiologi.

Melakukan berbagai penelitian diantaranya :

1. Hubungan Intensitas Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Produktivitas Kerja Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Bantaeng. padatahun 2004
2. Peran Komunikasi Dalam Modernisasi di Sulawesi Selatan (Jurnal Ilmiah) 2005
3. Perilaku Mahasiswa Dalam Keluarga Single Parents (jurnal Ilmiah) 2006
4. Mobilitas Sosial Ekonomi Pedagang Buah-buahan dikota Makassar. (Jurnal Ilmiah) 2007.

Tahun 1993 menikah dengan Rahmawati, SP. MP. dan dikarunia dua orang putri : St.Adinda Srikandi , (16 tahun) siswa SMAN 17 Makassar, dan Dianita Nurrahma, (4 tahun), TK Kharisma Makassar, dan kami sekeluarga tinggal di Jl. Veteran Utara 41/55 Makassar.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Penelitian	328
2. Bagan Outline Kajian	336
3. Rencana Outline (Kerangka Isi) Laporan Penelitian	337
4. Daftar Pengodean Latar, Subjek, dan Subtansi Penelitian	339
5. Jadwal Kegiatan Lapangan	340
6. Pedoman Wawancara	341
7. Pedoman Observasi	344
8. Pedoman Wawancara <i>Life History</i>	345
9. Format Catatan Lapangan	347
10. Format Hasil Wawancara	348
11. Catatan Satuan Tematis	349
12. Buku Harian (<i>Log Book</i>) Pengalaman Lapangan	350
13. Surat Izin Penelitian	351

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti
TIT	: Tajdidiyah, Islahiyah, dan Tabsyiriyah
NA	: Nasyiatul ‘Aisyiyah
ZIS	: Zakat, Infak dan Sedekah
IPM	: Ikatan Pelajar Muhammadiyah
TBC	: Tahayul, Bid'ah, dan Churafat
AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
PPA	: Pimpinan Pusat Aisyiyah
PWA	: Pengurus Wilayah Aisyiyah
PWM	: Pengurus Wilayah Muhammadiyah
PDA	: Pimpinan Daerah Aisyiyah
PRA	: Pimpinan Ranting Aisyiyah
BKIA	: Balai Kesehatan Ibu & Anak
BUEKA	: Badan Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah
AMS	: Aisyiyah Maghribi School
PKU	: Pembinaan Kesejahteraan Umat
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
GTT	: Guru tidak tetap
GT	: Guru tetap
GPK	: Guru pendidik khusus

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
2.1	Bagan Kerangka Konseptual	80

Lampiran 1 : *Instrumen Penelitian*

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Judul Penelitian

**KEMANDIRIAN DAN KEBERLANJUTAN ORGANISASI 'AISYIYAH
(Studi Kasus organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika kemandirian 'aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan organisasi tersebut?
2. Bagaimana keberlanjutan organisasi'aisyiyah dalam merespon merespons dinamika lingkungan eksternalnya?
3. Bagaimana dinamika kepatuhan anggota kepada organisasi 'Aisyiyah kepada dan kepatuhan Muhammadiyah dibalik kemandirian dan keberlanjutan organisasi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin di wujudkan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendiskripsikan dinamika kemandirian 'Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan.
2. Menjelaskan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah dalam merespon merespons dinamika lingkungan eksternalnya.
3. Menganalisis dinamika kepatuhan anggota kepada organisasi 'Aisyiyah dan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah dibalik kemandirian dan keberlanjutan.

D. Fokus dan Deskripsi Fokus

Fokus perhatian dalam penelitian ini adalah fenomena sosial yang terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah. Untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial secara lebih alami, penuh makna, dan mendalam. Dalam hal ini, fokus yang dimaksud adalah konsep utama yang dikembangkan sekaligus merupakan tujuan yang diharapkan dalam studi ini, yaitu kemandirian dan keberlanjutan organisasi serta kepatuhan pengurus dan anggota 'Aisyiyah (termasuk kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah), meliputi :

1. Dinamika kemandirian organisasi 'Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan, yaitu bagaimana 'Aisyiyah melaksanakan koordinasi dengan unit-unit organisasi (amal usaha) yang terbesar di semua tingkatan organisasi (wilayah, daerah, cabang, dan ranting). Dalam hal ini dibatasi 3 (tiga) fase perkembangan, yaitu fase sebelum (pra) kemerdekaan, Fase kemerdekaan (orde baru) dan fase reformasi
2. Dinamika keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah dalam merespon kondisi lingkungan eksternalnya (pemerintah dan masyarakat), lingkungan internalnya (Muhammadiyah) dalam mengantisipasi kemungkinan yang terjadi untuk melakukan adaptasi (penyusaian) terhadap perubahan, agar tetap aksis dan berlanjut.
3. Dinamika kepatuhan pengurus dan anggota kepada 'Aisyiyah, serta kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah, dibalik kemandirian dan keberlanjutan

organisasi tersebut. Dalam hal ini, peneliti berusaha mendapatkan data dan informasi tentang bagaimana tingkat kepatuhan pengurus dan anggota kepada ‘Aisyiyah terkait dengan unit-unit organisasi (amal usaha) yang dikelola, yaitu :

(a) Unit Organisasi (amal usaha) di bidang pendidikan, meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), SD, SMP, Madrasah Tsanawiyah (Mts), SMA, SMK, dan madrasah Aliyah. (b) Unit organisasi (amal usaha) di bidang kesehatan, seperti Rumah Sakit dan / atau Rumah Bersalin, Balai Kesehatan, dan (c) Amal usaha di bidang sosial kemasyarakatan, seperti Panti Asuhan.

Terkait dengan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka untuk memperoleh gambaran tentang data dan informasi yang dibutuhkan (deskripsi fokus penelitian), di man informan sebagai sumber utama dapat dipilih secara *purposive* sesuai mekanisme, karakteristik dan kapabilitas yang dimiliki dalam memberikan data dan informasi secara obyektif dan dapat di pertanggung jawabkan. Informan yang dimaksud meliputi:

- a. Informan yang terkait dengan amal usaha bidang pendidikan (sekolah) dipilih pengurus dan Anggota ‘Aisyiyah terutama pengelola amal usaha TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, serta warga masyarakat (tokoh) dan pengurus Muhammadiyah yang memiliki kemampuan serta pemahaman untuk memberikan keterangan dan informasi yang dibutuhkan.
- b. Informan yang terkait dengan amal usaha di bidang kesehatan (Rumah Sakit, dan / atau Rumah Bersalin, Balai Kesehatan ibu dan anak (BKIA), informanyang

dipilih adalah petugas medis (dokter, perawat, bidan), pengurus dan anggota, warga Masyarakat, serta pihak-pihak terkait.

- c. Informan yang terkait dengan amal usaha Panti Asuhan (PA), Informan yang dipilih adalah pengelola PA, dan Warga masyarakat sekitar panti, termasukj anak-anak panti yang dibina (diasuh) untuk memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan fakta di lapangan.

Matriks Kisi-kisi Pengumpulan Data

No.	Fokus	Unsur yang Dikaji/Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data (informan)	Instrumen
1.	Mendeskripsikan dinamika kemandirian 'Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangannya.	<p>Autopoises Proses pembentukan (sejarah) organisasi. Identitas Organisasi Organisasi Sosial Organisasi Keagamaan</p> <p>Paradoks Indepedensi Kebebasan individu mengelola amal usaha Organisasi Otonom Komitmen Organisasi Tanggung jawab sosial</p> <p>Medan Visional Prinsip-prinsip dasar organisasi Visi & misi organisasi Komponen & unit-unit (amal usaha) 'Aisyiyah Tatanan organisasi (Khittah) 'Aisyiyah</p>	Wawancara Observasi Dokumentasi	<p>Pengurus dan Anggota Organisasi 'Aisyiyah</p> <p>Pengelola dan pengurus amal usaha (TK, SD, SMP, SMA, RS, RB, dll)</p>	<p>Peneliti sendiri dilengkapi: Pedoman wawancara Pedoman observasi Tape recorder Kamera Alat tulis</p>

2.	Menjelaskan keberlanjutan organisasi 'Aiswiyah dalam merespons dinamika lingkungan eksternalnya	Sistem Input (sumber daya Proses pelayanan Output (hasil Produk) Contigensi Adaptasi (penyusaian) Sruktur organisasi Srategi pencapaian Lngkungan Ekonomi dan politik Ekonomi Syariah Musyawarah mufakat Masyarakat Madani	Wawancara Observasi Dokumentasi	Warga masyarakat Pengelola Pengurus 'Aisyiyah Pemerintah, pengurus amal usaha Sumber Daya ekonomi dan politik	Peneliti sendiri dilengkapi Pedoman Wawancara Pedoman Observasi Tape recorder Kamera Alat tulis
3.	Menganalisis dinamika kepatuhan anggota kepada organisasi 'Aisyiyah dan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah di Balik kemandirian dan keberlanjutan organisasi tersebut.	Kekuasaan (Power) Koersif-altyernatif Remuneratif-Kalkulatif Normatif- moral Moral- normatif Keteribatan Alineatif-moral Kalkulatif-Moral Moral-Nomatif Kepatuhan Pengurus dan Anggota kepada "aisyiyah ialah Normatif-Moral 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah, adalah Koersif-Moral 'Aisyiyah, pemerintah dan masyarakat, adalah kalkulatif-Moral	Wawancara mendalam Metode life history Observasi	Pengurus & anggota 'Aisyiyah & Muhammadiyah h Pemerintah pengurus dan Anggota Pengurus Muhammadiyah & Pemerintah.	Peneliti Sendiri Dilengkapi: Pedoman wawancara Pedoman observasi Tape recorder Kamera Alat tulis

F. Instrumen Penelitian

Pelaksanaan Peneliti ini dilengkapi dengan instrumen pendukung kegiatan lapangan, sebagai berikut:

1. Outline (kmerangka isi laporan)

Dokumen ini terdiri dari bagian outline dan uraiannya. Tujuannya adalah untuk memberikan batasan pada kegiatan penelitian agar penelitian tidak keluar dari tujuan atau fokus.

2. Daftar Pengkodean Latar dan Subjek Penelitian

Pengamatan akan ditujukan pada latar dan subjek penelitian. Dua dimensi pengamatan ini akan dibuatkan pengkodean dalam rangka memudahkan kategorisasi antar latar dan subyek penelitian.

3. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal Kegiatan penelitian menyajikan rincian kegiatan dan alokasi waktu yang tersedia menurut tahapan proses penelitian. Jadwal ini selain bertujuan sebagai pengendali waktu juga sebagai daftar periksa untuk mengingatkan pengamat terhadap semua aspek informasi yang sudah diperoleh atau belum diperoleh.

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan terbuka yang merupakan penjabaran fokus penelitian, yang ditujukan untuk menggali informasi dari para subjek penelitian. Pedoman wawancara mendalam ditujukan kepada subjek utama penelitian, termasuk di dalamnya pedoman wawancara untuk penyusunan life-history subjek. Pedoman wawancara hanya berfungsi sebagai

petunjuk dalam wawancara dengan subjek agar tidak keluar dari konteks dan fokus penelitian.

b. Pedoman Observasi

Pedoman observasi berisi rumusan item pengamatan yang terkait dengan situasi, konteks, dan peristiwa yang terjadi hubungannya dengan subjek dan latar wilayah penelitian. Untuk melengkapi fungsi peneliti sebagai human instrument, maka peneliti juga menyiapkan (menggunakan) instrumen pencatatan sebagai berikut :

1) Catatan Lapangan

Catatan lapangan adalah pencatatan tentang situasi, konteks, dan peristiwa yang terkait dengan tempat, aktor, dan aktivitas (setting) di selama penelitian berlangsung. Hal ini untuk memudahkan pengamat dalam mengingat temuan yang sudah didapatkan dan sebagai alat bantu dalam melakukan analisis data

2) Pengalaman Lapangan (Log Book)

Merupakan buku harian pengalaman lapangan yang dibuat dengan format tertentu dan diisi setiap hari. Log book dan catatan lapangan akan dimanfaatkan untuk analisis data. Analisis data dimulai sejak hari pertama pengumpulan data, dimulai dengan penyusunan kategori-kategori data

3) Catatan Satuan Tematis

Catatan satuan tematis adalah catatan rinci tentang tema-tema khusus dari penelitian ini, di antaranya peristiwa interpersonal yang memperlihatkan

relasi sosial aktor dalam konteks kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah (studi kasus organisasi 'Aisyiyah di Kota Makassar);

1. Catatan Kronologis

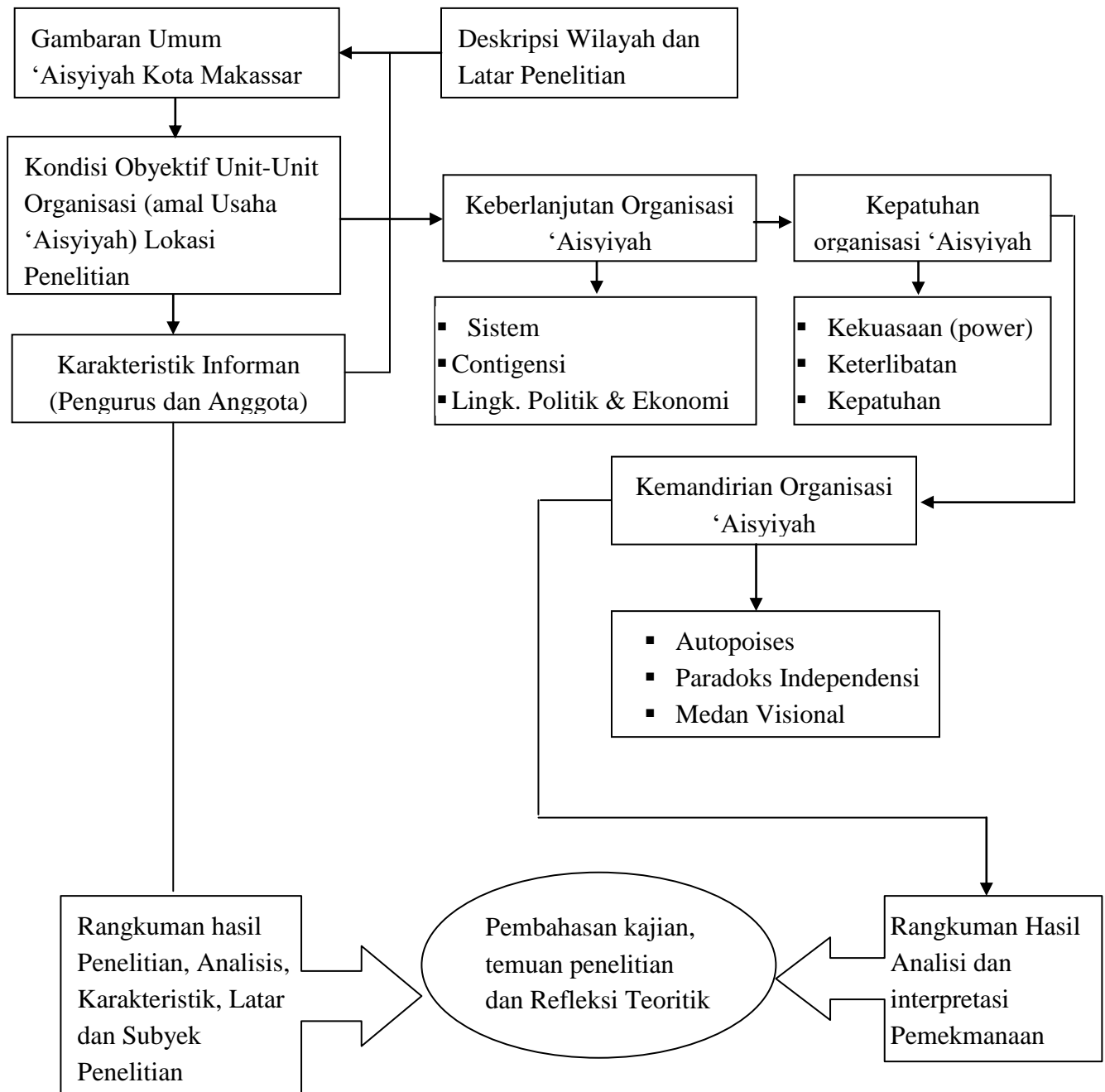
Catatan kronologis adalah rincian catatan selama penelitian lapangan yang dibuat secara kronologis dari waktu ke waktu atas setiap peristiwa atau kejadian penting yang memperlihatkan bentuk, proses, intensitas, dan setting berlangsungnya fenomena kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar

2. Alat perekam suara

Alat perekam suara terutama digunakan untuk membantu pencatatan hasil wawancara dengan para informan. Alat perekaman tidak hanya dilakukan pada saat wawancara dengan subjek, tetapi juga pada saat pengamatan dilaksanakan

3. Alat Kamera Foto

Alat kamera foto digunakan terutama untuk mengabadikan berbagai data visual khususnya menyangkut lokasi dan kondisi fisik organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar, termasuk aktivitas-aktivitas yang mendukung validitas data dan informasi yang diperoleh.

Lampiran-2 : *Bagan Outline Kajian***BAGAN OUTLINE KAJIAN**

Lampiran-3 : *Rencana Outline (Kerangka Isi) Laporan Penelitian*

**RENCANA OUTLINE (KERANGKA ISI)
LAPORAN PENELITIAN**

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian

BAB II. KAJIAN TEORI

- A. Kemandirian dan Keberlanjutan Organisasi
- B. Kepatuhan dalam Organisasi.
- C. Hubungan Muhammadiyah dengan 'Aisyiyah.
- D. Kerangka Konseptual

BAB III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Kualitatif
- B. Fokus Penelitian dan Penentuan Informan
- C. Penentuan Lokasi dan Subyek Penelitian
- D. Jenis dan Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisis Data
- G. Pengabsahan Data
- H. Definisi Konseptual

BAB IV. SETTING LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum 'Aisyiyah Kota Makassar
- B. Sejarah Singkat Berdirinya Organisasi 'Aisyiyah
- C. Kondisi Organisasi (Amal Usaha) 'Aisyiyah
- D. Karakteristik Informan (Subyek) Penelitian

BAB V. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- A. Dinamika Kemandirian Organisasi 'Aisyiyah dalam Berbagai Fase Perkembangan
 - 1. Fase sebelum (Pra) Kemerdekaan (Penjajahan)
 - 2. Fase sesudah (Pasca) Kemerdekaan (Orde Baru)
 - 3. Fase Reformasi (sepuluh tahun) terakhir
- B. Keberlanjutan Organisasi 'Aisyiyah dalam Merespon Dinamika Lingkungan Eksternalnya.

1. Keberlanjutan Organisasi 'Aisyiyah
 2. Respons 'Aisyiyah Terhadap Dinamika Lingkungan
 3. Proses Perubahan dan Adaptasi Organisasi
- C. Dinamika Kepatuhan Anggota Organisasi dan Kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah
1. Kepatuhan Anggota Organisasi 'Aisyiyah
 2. Kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah
 3. Dinamika Perkembangan 'Aisyiyah Kota Makassar

BAB VI. TAFSIRAN DAN ANALISIS SOSIOLOGIS

- A. Tafsiran Sosiologis tentang Kemandirian Organisasi
1. Autopoiesis Organisasi 'Aisyiyah
 2. Paradoks Independensi Organisasi 'Aisyiyah
 3. Medan Visional Organisasi 'Aisyiyah
- B. Analisis Sosiologis tentang Keberlanjutan Organisasi
1. Sistem dan Struktur Organisasi 'Aisyiyah
 2. Contigensi dan Daya Saing Organisasi 'Aisyiyah
 3. Perkembangan Lingkungan Politik dan Ekonomi
- C. Kepatuhan dalam Organisasi 'Aisyiyah
1. Kekuasaan (Power) Organisasi 'Aisyiyah
 2. Keterlibatan Pengurus dan Anggota 'Aisyiyah
 3. Kepatuhan dan Konsistensi Organisasi 'Aisyiyah

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 4 : *Daftar Pengodean Latar. Subjek dan Subtansi Penelitian***DAFTAR PENGODEAN LATAR, SUBJEK, DAN
SUBSTANSI PENELITIAN**

No.	Objek Penkodean Data	Kode Data	Ket
1.	Latar Penelitian 1.1 'Aisyiyah Kota Makassar 1.2 Unit Organisasi-Amal Usaha 1.3 Cabang A'isyiyah dan Ranting "aisyiyah	AKM UO-AU CA&RA	
2.	Subjek Penelitian (informan) 2.1. Informan Pendidikan (sekolah) 2.2. Informan Kesehatan (RS, BKIA) 2.3. Informan Kegiatan sosial 2.4. Informan Muhammadiyah 2.5. Informan Pemerintah 2.6. Informan Tokoh Masyarakat	IP IK IKS IMh IPm ITM	Jika Subjek lebih dari satu orang ditambahkan kode, 1,2, 3, Di belakang kode
3.	Kemandirian Organisasi 3.1. Sejarah Berdirinya Organisasi 3.2. Identitas, Bentuk, dan Eksistensi Organisasi 3.3. Fasilitas dan Ciri-ciri Organisasi 3.4. Struktur dan jaringan organisasi	SBO IBEO FCO SJO	
4.	Keberlanjutan Organisasi 4.1. Sistem pengikat Organisasi 4.2. Kemampuan dan Daya Saing Organisasi 4.3. Kebijakan dan Langkah Antisipasi 4.4. Perubahan dan adaptasi Lingkungan Organisasi	SPO KDSO KLA PALO	
5.	Kepatuhan dalam Organisasi 5.1. Kekuasaan pengurus & anggota 5.2. Keterbilatan Aktif dan Partisipasi 5.3. Bentuk Kepatuhan & Ketaatan 5.4. Konsistensi Visi & Misi Organisasi 5.5. Fleksibilitas Anggota Organisasi	KPA KAP BKK KVMO FAO	
6.	Interpretasi Peneliti 6.1. Analisis Kemandirian Organisasi 6.2. Analisis Keberlanjutan Organisasi 6.3. Tafsiran Kepatuhan Organisasi	KPAP-Hutan KPAP-Masy KPAP-Desa	

Lampiran- 5 : *Jadwal Kegiatan Lapangan***JADWAL KEGIATAN LAPANGAN**

No.	Kegiatan	Bulan ke-						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengurusan Izin	✓						
2.	Observasi latar dan dokumentasi	✓						
3.	Penelusuran subjek	✓	✓	✓	✓	✓		
4.	Wawancara mendalam	✓	✓	✓	✓	✓		
5.	Pengamatan tindakan dan peristiwa sehari-hari	✓						
6.	Pengelolaan data: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reduksi data ▪ Penyajian data ▪ Penarikan Kesimpulan (berlangsung Interaktif dan bersiklus selama penelitian) 	✓	✓	✓	✓	✓		
7.	Pemekrisaan Keabsahan Data		✓	✓	✓	✓		
8.	Penulisan Laporan		✓	✓	✓	✓		
9.	Presentasi dan Diskusi dengan Pembimbing					✓	✓	✓
10.	Seminar dan Promosi						✓	✓

Lampiran- 6 : *Pedoman Wawancara*

PEDOMAN WAWANCARA

1. Nama Lengkap :
2. Nama Panggilan :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
5. Agama :
6. Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin
7. Pekerjaan :
8. Pekerjaan :
9. Alamat :

No.	Item-item Pertanyaan	Kode Kata
A.	<p>Kemandirian Organisasi: Selidik kemandirian organisasi ‘Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan organisasi tersebut melalui item-item pertanyaan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selidiki/tanyakan bagaimana kemandirian organisasi “aisyiyah sebagai komponen perempuan Muhammadiyah yang ditelusuri melalui fase-fase perkembangan organisasi tersebut. 2. Selidiki/tanyakan bagaimana Autopoises organisasi ‘Aisyiyah, meliputi sejarah berdirinya, sruktur organisasi, serta identitas dan eksistensi organisasi ‘Aisyiyah. 3. Selidiki/tanyakan apakah Autopoises organisasi ‘Aisyiyah telah dilaksanakan sesuai dengan prispip dasar oragnisasi, prosedur dan mekanisme yang berlaku. 4. Selidiki/tanyakan bentuk paradoks indepedensi kegiatan apa saja yang dilakukan masing-masing unit organisasi (amal usaha) agar tetap eksis 5. Selidiki/tanyakan bagaimana kemampuan pengurus ‘aisyiyah dalam merealisasikan program organisasi secara otonom dan mencapai hasil seperti yang diharapkan. 6. Selidiki/tanyakan bagaiman’Aisyiyah mengelola amal usaha (unit organmisasi) meliputi bidang pendidikan (TK, SD, MI, SMP, MTs, SMU, dan SMK) bidang kesehatan (RS, RB, dan BKIA) bidang sosial (panti asuhan) tetap dalam koridor organisasi. 7. Selidiki/tanyakan bagaimana pengurus dan anggota ‘Aisyiyah melaksanakan <i>medan visional</i> Organisasi dengan tetap patuh dan taat pada prispip dasar “<i>amar ma’ruf Nahi Munkar</i>” sejak awalk berdirinya hingga sekarang. 8. Selidiki/tanyakan bagaiman sistem pengelolaan amal usaha ‘Aisyiyah yang tersebar di tingkat cabang dan rating ‘Aisyiyah sehingga mampu menjaga keutuhan organisasi. 	WWC-Kemandirian

B.	<p>Keberlanjutan Organisasi Selidiki dan Analisis mendalam terhadap keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah yaitu konsep yang terkait kebijakan para pengurus dan anggota 'Aisyiyah melalui beberapa pertanyaan berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selidiki/tanyakan bagaimana sistem yang diciptakan untuk menjelaskan keberlanjutan organisasi dan menjaga komitmen sehingga 'Aisyiyah menjelang satu abad tetap eksis. 2. Selidiki/tanyakan mengapa 'Aisyiyah sebagai organisasi yang otonomi daerah masih bergantung pada Muhammadiyah pada setiap Muktamar dan kegiatan-kegiatan-kegiatan nasional lainnya. 3. Selidiki/tanyakan bagaimana strategi dan langkah-langkah yang ditempuh 'Aisyiyah dalam menantisipasi perkembangan dan perubahan di lingkungan eksternal maupun internalnya. 4. Selidiki/tanyakan upaya apakah yang dilakukan para pengurus dan anggota organisasi, sehingga memiliki tingkat daya saing (contigensi) dan diperhitungkan organisasi lain. 5. Selidiki/tanyakan bagaimna 'Aisyiyah melakukan kadersasi terhadap anggota dan apakah sistem yang dilakukan sama dengan organisasi otonom lain di Muhammadiyah 6. Selidiki/tanyakan bagaimana kegiatan ekonomi dan politik di lingkungan organisasi 'Aisyiyah kaitannya dengan contigensi dan sistem yang telah disepakati sesuai koridor organisasi. 7. Selidiki/tanyakan apakah lingkungan ekonomi dan politik yang diciptakan mampu beradaptasi seiring dengan perubahan dan perkembangan organisasi 8. Selidiki/tanyakan apakah kegiatan ekonomi yang dikelola oleh ama usah 'Aisyiyah mampu kebutuhan yang terus meningkat. <p>C. Kepatuhan dalam Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selidiki/tanyakan bagaiman 'Aisyiyah berhasil serta mampu menciptakan kepatuhan para pengurus dan anggota organisasi sejak terbentuk hingga sekarang. 2. Selidiki/tanyakan bagaimana kepatuhan pengurus dan anggota 'Aisyiyah dalam melaksanakan program dan titah organisasi di tingkat cabang dan ranting. 3. Selidiki/tanyakan apakah kekuasaan koersif organisasi dapat menciptakan kepatuhan anggota terhadap organisasi 'Aisyiyah terutama kepatuhan yang bersifat moral. 4. Selidiki/tanyakan bagaiman amodel kekuasaan (power) dalam organisasi 'Aisyiyah (Koersif, remunerasi, normatif) diterapkan untuk menciptakan kepatuhan anggota terhadap organisasi. 5. Selidiki/tanyakan apakah power dominan di dalam menciptakan kepatuhan anggota organisasi yang alternatif, kalkulatif dan moral 6. Selidiki/tanyakan bagaimana keterlibatan anggota organisasi di dalam merelasisasikan program organisasi yang bersifat moral, sehingga organisasi tetap eksis dan berlanjut. 	WWC- Keberlanjutan
----	---	-----------------------

	<p>7. Selidiki/tanyakan bagaimana kepatuhan 'Aisyiyah kepada pengurus dan anggota kepada 'Aisyiyah di dalam di balik kemnandirian & keberlanjutan organisasi tersebut.</p> <p>8. Selidiki/tanyakan bagaimana kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah sebagai organisasi otonom (ortom), ditinjau dari aspek struktural, fungsional dan kultural.</p>	
--	--	--

Lampiran- 7 : *Pedoman Observasi***PEDOMAN OBSERVASI**

No	Unsur Yang Diobservasi	Kode Data	Instrumen Pelengkap
I	<p>OBJEK PENELITIAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Keadaan organisasi Aisyiyah (Kantor Cabang dan Ranting) di Makassar · Keadaan amal usaha 'Aisyiyah (TK, SD, MI, SMP, MTs, SMU, SMK, RS, BKIA, Panti Asuhan, dan lain-lain. · Interaksi pengurus dan pengelola amal usaha dengan warga masyarakat di sekitar obyek penelitian · Aktivitas sehari-hari pengurus dan pengelola amal usaha · Sarana dan prasarana yang dimiliki amal usaha 'Aisyiyah 	<p>DO-OBK-1</p> <p>DO-OBK-2</p> <p>DO-OBK-3</p> <p>DO-OBK-4</p> <p>DO-OBK-5</p>	<p>Kamera</p> <p>Alat Tulis</p>
II	<p>SUBJEK PENELITIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mendengarkan perbincangan antara informan pengelola amal usaha atas perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai organisasi 'Aisyiyah; · Menghayati pengalaman mereka yang diceritakan sehubungan dengan aksi atau sikap masing-masing informan, terkait tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh organisasi. · Mengamati bentuk reaksi, perilaku dan sikap para informan dalam melakukan interaksi terkait dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban. · Mengamati respons masyarakat atas perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai organisasi 'Aisyiyah dan tanggapan pemerintah terhadap amal usaha yang dikelola 'Aisyiyah dalam pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. · Memperhatikan bentuk komunikasi & informasi yang dikembangkan dalam mengelola kegiatan amal usaha yang telah digariskan, untuk mewujudkan sasaran organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi 'Aisyiyah 	<p>DO-OBK-1</p> <p>DO-OBK-2</p> <p>DO-OBK-3</p> <p>DO-OBK-4</p> <p>DO-OBK-5</p>	<p>Tape Recorder</p> <p>Kamera</p> <p>Alat Tulis</p>

Lampiran-8 : *Pedoman Wawancara Life History***PEDOMAN WAWANCARA LIFE HISTORY**

Nama Informan :
 Nama panggilan :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Alamat :

No	Unsur Yang Diobservasi	Subjek	Kode Data
1.	Apakah profesi (pekerjaan) pokok ibu?	Instrumen	DW-Bigrofai
2.	Sejak kapan ibu menjadi pengurus/anggota		
3.	'Aisyiyah?		
4.	Apakah jabatan ibu dalam organisasi 'Aisyiyah?		
5.	Fasilitas apa saja yang dimiliki organisasi 'Aisyiyah, sehingga tetap eksis dan bertahan?		
6.	Apakah struktur organisasi 'Aisyiyah sama dengan struktur organisasi Muhammadiyah?		
7.	Bagaimana sistem pembinaan dan kaderisasi 'Aisyiyah		
8.	Bagaimana kemandirian organisasi 'Aisyiyah kaitannya dengan program kegiatan Muhammadiyah?		
9.	Apakah 'Aisyiyah dapat melaksanakan Mukhtamar yang terpisah dengan Muhammadiyah?		
10.	Bagaimana keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah terkait dengan sistem pembinaan dan kaderisasi organisasi?		
11.	Apakah model pembinaan yang dilakukan menjamin keberlanjutan dan eksistensi 'Aisyiyah?		
12.	Bagaimana bentuk kontigensi & daya saing organisasi 'Aisyiyah dalam menghadapi dinamika perubahan!		
13.	Bagaimana pandangan ibu tentang sistem kepatuhan yang dibangun oleh 'Aisyiyah sejak		
14.			
15.			

16.	<p>terbentuk?</p> <p>Apakah model kepatuhan pengurus dan anggota dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan organisasi?</p>		
17.			
18.	<p>Apakah kepatuhan pengurus dan anggota organisasi ‘Aisyiyah bersifat koersif, remunerasi, atau normative?</p> <p>Apakah kepatuhan pengurus dan anggota ‘Aisyiyah di dalam mengelola amal usaha bersifat moral?</p> <p>Apakah keterlibatan pengurus/anggota ‘Aisyiyah dalam melakukan kegiatan organisasi bersifat alternatif-moral?</p> <p>Bagaimana model kepatuhan yang ditanamkan setiap anggota ‘Aisyiyah sejak usia dini hingga dewasa?</p> <p>Bagaimana sistem dan model kepatuhan berdasarkan ketentuan organisasi dan berlaku di seluruh tingkatan organisasi (pusat sampai ranting)?</p>		
<p>Catatan: Bentuk pertanyaan ini hanya panduan awal, pertanyaan bisa berkembang dan /atau dikembangkan berdasarkan suasana dan konteks ketika sedang wawancara Sumber informasi utama adalah subyek penelitian (informan), yaitu pengurus dan anggota ‘Aisyiyah Kota Makassar, pengelola dan Pembina amal usaha di tingkat cabang dan ranting</p>			

Lampiran- 9 : *Format Catatan Lapangan*

FORMAT CATATAN LAPANGAN

(Contoh)

Hari/Tanggal :

Kode Lahir :

No	Uraian Catatan	Kode Data & Catatan Pinggir
1.	Wawancara dengan dua informan utama (pengurus 'Aisyiyah) yang dilakukan secara terpisah di Kantor 'Aisyiyah Makassar, dan di Rumah Bersalin Sitti Khadidjah III Kota Makassar.	WWC-Historis, WWC-Struktur, <i>Informan berjanji</i>
2.	Mengamati aktivitas pengurus dan anggota 'Aisyiyah dalam melaksanakan proses pelayanan di Rumah Bersalin.	<i>bersedia di wawancarai bila diperlukan</i>
3.	Dst.	

Lampiran-10 : *Format Catatan Hasil Wawancara***FORMAT CATATAN HASIL WAWANCARA****(Contoh)**

Hari/Tanggal (Informan) :.....
 Kode Subjek :.....
 Umur :.....
 Jenis Kelamin :Laki-laki/Perempuan
 Pendidikan :.....
 Pekerjaan :.....
 Alamat :.....
 Hari/Tanggal Wawancara :.....

No	Uraian Catatan	Kode Data & Catatan Pinggir
1.	Pertanyaan: Sejak kapan berdirinya organisasi “Aisyiyah? Jawaban:	WWC-Historis,
2.	Dst.....	

Lampiran – 11 : *Catatan Satuan Tematis***CATATAN SATUAN TEMATIS**

No	Tema Kesatuan Peristiwa	Kode Data
<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Catat secara rinci semua satuan peristiwa yang diamat;- Catat hari, tanggal, jam dari satuan peristiwa, serta kode subyek, kode latar dan catatan lainnya yang penting.		

Lampiran-12 : *Buku Harian (Log Book) Pengalaman Lapangan*

**BUKU HARIAN (LOG BOOK)
PENGALAMAN LAPANGAN**

Hari/Tanggal :

Kode Latar :

No	Jam	Uraian Catatan	Kode Data

BAB I

PENDAHULULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya 'Aisyiyah sebagai komponen Perempuan Muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial keagamaan sudah menjelang satu abad (96 tahun) telah menunjukkan kiprahnya untuk pencerahan, pemberdayaan, dan kemajuan terhadap kemaslahatan bagi kehidupan umat, masyarakat, bangsa, dan negara (dunia kemanusiaan). Keberhasilan dan peran positif 'Aisyiyah merupakan karunia Allah yang diraih karena kekuatan keihlasan, komitmen, dan partisipasi 'Aisyiyah sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar serta tajdid, sehingga selalu menunjukkan semangat yang tinggi untuk berkiprah konstruktif dalam kehidupan. Keberhasilan itu juga diraih karena kepercayaan dan dukungan berbagai pihak yang memiliki semangat yang sama untuk memajukan kehidupan masyarakat.

'Aisyiyah lahir pada tahun 1917 saat situasi dan kondisi masyarakat Indonesia dalam keterbelakangan, kemiskinan, tidak terdidik, awam dalam pemahaman keagamaan, dan berada dalam zaman penjajahan belanda. Kondisi perempuan semakin memprihatinkan ketika pada saat yang sama dibalut dengan budaya masyarakat yang bersifat patriarki, menempatkan perempuan tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang memuliakan dan menjunjung tinggi martabat kaum perempuan. KH.Ahmad Dahlan bersama Nyai Siti Walidah menaruh perhatian besar dan memberikan jalan keluar yang berjangka panjang dalam bentuk usaha terobosan

atas kondisi kaum perempuan yang tidak beruntung dari berbagai aspek kehidupan tersebut. Dengan spirit dan pandangan agama berwawasan tajdid (pembaruan), menjadi keyakinan dan pandangan Kyai Dahlan terhadap kaum perempuan dan umat Islam umumnya, maka diadakan kegiatan-kegiatan pencerahan bagi kaum perempuan muda yang disebut *Sopo Tresno* dan selanjutnya disebut *gerakan 'Aisyiyah*.

Kyai Dahlan berpandangan bahwa perempuan tidak sepatutnya hanya mengurus rumah tangga, namun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan pria dalam tugas-tugas sosial untuk pencerahan dan kesejahteraan masyarakat. Sejak itulah hadir perubahan baru dalam pandangan perempuan muslim dari ranah domestik ke ranah publik sejalan dengan prinsip dan misi Islam sebagai agama yang membawa rahmatan lil-'alamin. Dengan demikian kelahiran 'Aisyiyah adalah bentuk pembaruan yang menjunjung tinggi dan memuliakan kaum perempuan serta mendorong untuk berkiprah di ruang publik guna membawa misi dakwah dan tajdid bagi kemajuan dan perkembangan hidup umat manusia.

Beberapa hasil penelitian tentang 'Aisyiyah Kota Makassar, antara lain: (1) Ismah Salman (2005), meneliti tentang Keluarga Sakinah dalam "Diskursus Gender" di Organisasi Perempuan Muhammadiyah. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian antara lain, "Kehidupan keluarga yang agamais dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan 'Aisyiyah". (2) Hidayah Quraisy (2005), meneliti tentang "Analisis Kinerja Aisyiyah di Desa Binaan (Qoryah Thoyyibah) di Labakkang". Kesimpulan yang diperoleh dari studi ini adalah, "Pembinaan dan kaderisasi warga 'Aisyiyah melalui Desa Binaan adalah sangat efektif demi kelangsungan dan

keberlanjutan amal usaha Muhammadiyah”. (3) Rosmaniah Hamid (2008), meneliti tentang “Implementasi Hadis-Hadis dalam konsep keluarga sakinah Kota Makasar”. Studi ini menyimpulkan bahwa, “Keluarga sakinah merupakan harapan dari setiap keluarga Muslim, karena itu ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah telah memberi contoh melalui kegiatan pengajian secara rutin dan kegiatan keagamaan lainnya”. Mencermati garis besar simpulan dari hasil penelitian di atas, telah memberi inspirasi kepada peneliti untuk melakukan kajian dalam perjalanan sejarah, khususnya peran dan kiprah ‘Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan pendidikan di Indonesia bisa mandiri dan berlanjut.

Realitas gerakan serta manfaat ‘Aisyiyah selama ini telah dapat dirasakan oleh masyarakat luas terlihat dari banyaknya amal usaha yang dilakukan. Sebuah cita-cita yang didambakan oleh Nyi Ahmad Dahlan selangkah demi selangkah, setahap demi setahap mulai diwujudkan. Satu abad bukanlah waktu yang singkat untuk suatu organisasi yang masih tetap eksis. Hal ini mengindikasikan sejauh mana estafet gerakan Aisyiyah telah berjalan diiringi dengan sistem organisasi yang solid dan mekanisme kerja yang terstruktur.

Eksistensi ‘Aisyiyah sebagai sebuah organisasi serta langkah yang ditempuhnya dalam upaya mewujudkan masyarakat madani merupakan salah satu indikator sebagai identitas yang dimiliki untuk mengidentifikasi ada tidaknya perkembangan masyarakat madani. Relevansi indikatornya yaitu termanifestasi dalam organisasi yang dipenuhi oleh gerakan ‘Aisyiyah. Hal ini ditinjau dari prinsip-prinsip

organisasi dipegang oleh masyarakat madani sebagai perwujudan identitasnya secara material. Hal ini berarti masyarakat madani bukan merupakan individu-individu yang partisipatif dan otonom saja, tetapi terdiri dari sekumpulan individu warga yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi yang memiliki tatanan yang menjamin anggotanya mampu mengekspresikan diri, mengembangkan minat, saling menukar informasi, memediasi perbedaan-perbedaan dan menciptakan pola-pola hubungan yang stabil. Di samping itu, mereka juga tertata dalam organisasi modern yang mengembangkan nilai-nilainya sendiri secara konsisten.

Cita-cita menuju masyarakat madani adalah juga sejalan dengan visi pengembangan 'Aisyiyah, yaitu "tercapainya usaha-usaha Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah secara berkualitas, yakni masyarakat Islam yang sebenar-benarnya" merupakan penjabaran berkesinambungan dari visi idealnya untuk tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang dicita-citakan.

Gerakan dakwah yang dimaksud adalah Dakwah Islam Amar Makruf Nahi Munkar. Dakwah Islam; artinya mengajak, menyeru dan memanggil umat manusia untuk memeluk dan melaksanakan serta menegakkan ajaran Islam. Amar makruf; artinya mengajak dan menunjukkan pada hal-hal yang baik, bermanfaat dan terpuji. Nahi Munkar; artinya mencegah, melarang, menolak, menjauhkan dan mengikis hal-hal yang buruk, kotor dan keji.

'Aisyiyah bukan sekadar nama besar sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia. 'Aisyiyah memiliki jaringan struktural yang cukup kuat dan luas

di seluruh wilayah Nusantara yang sangat menunjang gerak dakwah yang dilakukannya. Jaringan struktural 'Aisyiyah tersebar dan berjenjang dalam beberapa level yang mempunyai kewenangan dan wilayah kerja masing-masing. Jaringan yang tersebar di seluruh daerah ini merupakan potensi yang sangat besar untuk membangun umat dan bangsa ini menuju masyarakat utama dalam bentuk sinergi dan jaringan yang kuat di beberapa bidang.

Jaringan struktural merupakan kontribusi 'Aisyiyah terbesar dalam mengakomodasikan warga dalam menyalurkan aspirasinya, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh daerah melalui berbagai aktivitas keagamaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sosial, dan sebagainya. Pengembangan dakwah Islam melalui dakwah jamaah dan dakwah kultural merupakan strategi dakwah masa kini. Strategi ini mengingat tantangan global, perkembangan teknologi, dan pola pikir umat yang semakin berkembang. Konsep tersebut kemudian diwujudkan melalui gerakan Tajdidiyah, Islahiyah, dan Tabsyiriyah (TIT) menggunakan pendekatan sumber daya manusia, ekonomi, kesejahteraan, struktural dan pendekatan global.

Pendekatan sumber daya manusia merupakan upaya mencerdaskan kehidupan umat. Pendekatan ekonomi dan kesejahteraan dilaksanakan dengan mengajarkan etos kerja yang tinggi. Pendekatan struktural tetap ditingkatkan dengan mewujudkan kegiatan politik dan birokrasi sebagai pendukung dan pelindung dakwah. Pendekatan global juga perlu dilakukan dengan tetap berpikir makro dan mikro secara seimbang,

beraktivitas lintas sektoral, membangun kolektivitas dan individual, umum maupun khusus, untuk kemaslahatan umat manusia.

Perkembangan organisasi 'Aisyiyah sejak awal berdirinya dilakukan melalui gerakan Tajdidiyah, Islahiyah, dan Tabsyiriyah, atau disingkat 'TIT'.Tajdidiyah; artinya pembaharuan, peningkatan dalam pemahaman agama atau mengembalikan ajaran agama sesuai tuntunan Qur'an dan Sunnah.Islahiyah; artinya perdamaian, kerukunan dan/atau persaudaraan dalam kemasyarakatan.Tabsyiriyah; artinya penggembiraan, pembimbingan serta pemberian dorongan dalam beribadah dan beramal saleh.

Gerakan dakwah melalui TIT yaitu Ibadah, Akhlaq, Tauhid, Tabligh, Kegiatan Jihad, Persatuan dan Syi'ar Islam, Pendidikan, Seni dan Budaya, Kesehatan, Ekonomi, serta amalan-amalan Islam lainnya dengan tujuan utama untuk mewujudkan pribadi muslim, mukmin dan mukhsin. Demikian Misi Gerakan TIT 'Aisyiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan meliputi: (1) menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengalaman, menyebarluaskan ajaran agama Islam dalam segala aspek kehidupan; (2) meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian agama Islam; (3) memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, mempertinggi akhlak; (4) meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, membangun dan memelihara tempat ibadah, serta amal usaha yang lain; (5) meningkatkan pendidikan, membangun kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian; (6) memajukan perekonomian dan

kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas; (7) meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, lingkungan hidup; (8) meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa; (9) meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri serta usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

Seluruh aktivitas tersebut dilakukan secara mandiri dan mendorong partisipasi dalam kebersamaan. Bentuk-bentuk masyarakat partisipatif yang demikian inilah yang dikembangkan agar kehidupan yang demokratis dapat ditopang oleh masyarakat madani. Dalam hal ini 'Aisyiyah ikut memberikan jawaban atas berbagai permasalahan, baik problematika daerah, wilayah, nasional maupun global yang dari waktu ke waktu senantiasa mengalami pengembangan. Peran, komitmen serta tanggung jawab 'Aisyiyah semakin besar dan terbuka. Kehadiran dan keterpanggilan 'Aisyiyah di setiap jengkal lahan amal usaha pada setiap kondisi merupakan wujud 'Aisyiyah sebagai gerakan rahmatan lil 'alamin.

Kunci keberhasilan organisasi (semisal 'Aisyiyah) tidak dapat diukur dengan melimpahnya materi, atau bisa memimpin organisasi besar. Banyak pemimpin organisasi besar yang mengecewakan anggotanya, karena tidak adanya komunikasi yang baik antara pemimpin dengan anggotanya. Hal ini terkadang seorang pemimpin lebih mengedepankan sikap otoriter dan mengabaikan aspirasi anggota. Perlu dipahami bahwa organisasi bukan milik individu maka sikap individual harus

dihindari. Setiap orang memiliki kepentingan yang harus dipahami oleh pemimpin organisasi, tetapi bukan berarti pemimpin harus tunduk dan terkontaminasi oleh banyak kepentingan individu-individu anggota organisasi.

Menurut Amien (2005: 220), menemukan format organisasi yang sesuai dengan spirit milenium baru yang senantiasa berubah dengan cepat serta penuh ketidakpastian dijelaskan dengan konsep “Kemandirian Lokal” sebagai acuan utama. Dengan demikian organisasi dapat dilihat sebagai suatu tatanan menjaga atau untuk meningkatkan kualitas kemandirian dari semua komponen tatanan diposisikan sebagai kata kunci. Ini berarti bahwa selain melaksanakan misinya, suatu organisasi seyogyanya berfungsi sebagai pendorong dan fasilitator upaya-upaya para anggotanya untuk meningkatkan kualitas kemandirian mereka (anggota organisasi) dalam mengartikulasikan kepentingan masing-masing.

Fungsi-fungsi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misi organisasi. Demikian halnya dalam organisasi ‘Aisyiyah misi tersebut dapat diimplementasikan pengurus dan anggota ‘Aisyiyah baik di tingkat cabang maupun ranting, berdasarkan jumlah dan jenis amal usaha yang dimiliki. ‘Aisyiyah sebagai gerakan Perempuan Muhammadiyah yang semula bernama *Sopo Tresno* (Perkumpulan kaum perempuan), kemudian berubah menjadi ‘Aisyiyah tanggal 22 April 1917. Dalam perkembangannya menjelang satu abad, ‘Aisyiyah tetap konsisten sesuai dengan tatanan (khittah) perjuangan atau gerakan, yaitu “Amar ma’ruf nahi munkar”.

‘Aisyiyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang memiliki 33 Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi), 370 Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten/kota), 2.332 Pimpinan Cabang (setingkat Kecamatan), dan 6.924 Pimpinan Ranting (setingkat Kelurahan/Desa). Selain itu, ‘Aisyiyah memiliki amal usaha yang bergerak di berbagai bidang (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat). Amal Usaha di bidang pendidikan saat ini berjumlah 4.560 yang terdiri dari Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak (TK), Tempat Penitipan Anak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan lain-lain. Amal usaha di bidang Kesehatan, terdiri dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Badan Kesehatan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan dan Posyandu berjumlah 280 tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai gerakan yang peduli dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan, ‘Aisyiyah hingga kini memiliki sekitar 459 amal usaha yang bergerak di bidang ini meliputi : Rumah Singgah Anak Jalanan, Panti Asuhan, Dana Santunan Sosial, Tim Pengrukti Jenazah dan Posyandu.

Menyadari hal tersebut, bahwa harkat dan martabat perempuan tidak akan meningkat tanpa diikuti peningkatan kemampuan di bidang ekonomi. Karena itu, ‘Aisyiyah dalam mengelola berbagai amal usaha dapat ditunjang oleh bidang ekonomi, antara lain koperasi, Toko dan/ataukios, Badan Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA), Simpan Pinjam, Home Industri, kursus, dan Arisan. Selain itu, Aisyiyah memiliki kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk penyadaran terhadap kehidupan bermasyarakat (muslim), berbaga dan bernegara. Terkait dengan kegiatan ekonomi dalam mengelola amal usaha termasuk pengajian, Qoryah

Thayyibah, Kelompok Bimbingan Haji (KBIH), Badan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS).

Sejalan dengan latar belakang berdirinya ‘Aisyiyah yang diasumsikan sebagai wadah (gerakan) tentang kesejahteraan sosial yang diperjuangkan ‘Aisyiyah ialah terciptanya suatu kondisi ideal dari tata kehidupan masyarakat “*baladun thayyibatun wa rabbun ghaffur*”, yaitu suatu kehidupan bahagia, sejahtera, penuh limpahan rahmat, dan nikmat Allah saw, di dunia dan di akhirat (tercipta suatu titik keseimbangan aspek jasmaniah dan rohaniah ataupun aspek material dan spiritual. Kelahiran organisasi perempuan sering dipandang sebagai masalah pada masa penjajahan. Hal ini karena gerakan dapat dinilai sebagai batu loncatan untuk menjadikan gerakan perempuan telah mengalami liberalisasi atau emansipasi yang kebablasan di satu pihak, dan di lain pihak lain, gerakan perempuan dilihat dari kondisi strukturalnya apakah benar-benar otonom atau tidak.

Sehubungan dengan itu, perkembangan organisasi ‘Aisyiyah Kota Makassar menuju kemandirian melalui pemberdayaan ekonomi, politik, dan sosialbudaya dalam masyarakat oleh pengurus dan anggota bersama-sama membuat perencanaan kerja sesuai dengan biaya kegiatannya. Beberapa item yang menjadi titik sorot dalam perencanaan kerja ini ialah, kegiatan pendidikan dan penyadaran yang berpihak kepada lingkungan dan rakyat terpinggir (*grassroot*), pemberdayaan pada petani, memperkuat tim (*capacity building*) dan jejaring (*net work*) serta kegiatan yang bersifat mendesak dan karitatif (*emergency and caritatif*).

Kegiatan yang direncanakan dalam jangka waktu lima tahun memiliki kerangka acuan yang sistematis, terinci, dan detail. Selain itu, para anggota organisasi (pengelola amal usaha) dengan mempertajam kegiatan-kegiatan tersebut, kurun waktu satu tahun sebagai langkah terobosan. Walaupun demikian disadari bahwa setiap perencanaan mesti dibarengi dengan usaha dan kerja keras secara bersama-sama, saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Jika ditinjau dari konteks sosiologi organisasi, tipologi organisasi merupakan cara untuk membandingkan satu organisasi dengan organisasi lain. Misalnya, organisasi 'Aisyiyah senantiasa menampilkan suatu susunan tugas dan fungsi, peranan, status serta jabatan-jabatan tertentu. Namun, dari kesamaan-kesamaan itu muncul karakteristik tertentu yang membedakan 'Aisyiyah sebagai organisasi otonom dengan organisasi lainnya.

Mencermati pertanyaan yang sangat mendasar adalah, bagaimana mengembangkan organisasi perempuan Islam dalam memainkan peran sebagai perilaku perubahan sosial. Di sisi lain, fenomena yang ada tentang partai politik menunjukkan kecenderungan mulai dari tingkat pusat, wilayah, cabang, anak cabang, sampai ranting aspirasi mengarah pada partai politik tertentu dan mengusung salah satu pengurusnya menjadi calon anggota DPD, namun hasil yang dicapai tidak signifikan bila dibandingkan dengan jumlah anggota beserta keluarganya yang ada di kota Makassar.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak daerah, wilayah, ranting dan cabang 'Aisyiyah mengalami permasalahan kader; tidak hanya di Daerah, Wilayah, Cabang dan Ranting di tingkat pusat juga kesulitan mencari kader yang mau dan mampu

untuk aktif di 'Aisyiyah. Yang mampu tapi tidak mau banyak, yang mau dan mampu tapi tidak ada waktu juga sangat banyak. Kekurangan kader di 'Aisyiyah bukan berarti 'Aisyiyah tidak diminati oleh kaum perempuan. Namun, pada kenyataannya setiap pengajian dan aneka kegiatan 'Aisyiyah, selalu diminati banyak peserta dan yang datang itu juga mengakui dirinya sebagai anggota 'Aisyiyah dan selalu mendukung setiap kegiatan (program kerja) 'Aisyiyah.

Kajian Sosiologi tentang fenomena yang dihadapi 'Aisyiyah adalah yang mau bergabung dengan 'Aisyiyah secara organisasi cukup banyak, tapi yang mau bergabung dan bertanggung jawab (aktif dalam organisasi) itu yang tidak ada. Ibu-ibu 'Aisyiyah dan kaum perempuan Muhammadiyah, hanya mau jadi anggota, ikut pengajian dan kegiatan lain tetapi jika disertai tanggung jawab mengurus organisasi (pengurus harian), memikirkan agar 'Aisyiyah lebih maju banyak tidak bersedia. Dengan demikian, fenomena yang dihadapi 'Aisyiyah adalah kurangnya kader (krisis kader) yang selalu siap menggerakkan roda organisasi. Meskipun demikian, 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah di mana eksistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) tidak diragukan sejak kelahirannya hingga sekarang.

Menyadari hal tersebut (krisis ideology), maka oleh Pengurus Pusat 'Aisyiyah menempuh beberapa strategi, antara lain: dengan mengadakan sekolah kader Muallimat dan Stikes serta mendirikan Pondok Nyi Ahmad Dahlan, kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Di sekolah-sekolah kader itu para remaja putri dibekali aneka kegiatan yang terkait dengan dakwah, serta ditanamkan nilai dan norma-norma kesadaran bahwa, mereka adalah kader-kader

penerus 'Aisyiyah di masa datang dan harus menjadi penggerak 'Aiyiyah di manapun mereka berada.

Fenomena tersebut mengungkapkan betapa organisasi perempuan sebesar 'Aisyiyah masih tetap memerlukan bantuan dana atau finansial dari sumber lain. Sekalipun amal usaha seperti Rumah Sakit, Sekolah dan amal usaha lainnya sudah merata di setiap daerah. Kemandirian semestinya terlihat pada moment-moment seperti muktamar atau muswil. Jika hal ini tidak dapat dijawab sebagai tantangan berorganisasi maka 'Asyiyah akan mengalami persoalan manajemen keuangan. Dari berbagai persoalan tersebut, Peneliti memfokuskan perhatian pada masalah kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar, dengan asumsi bahwa Kota Makassar adalah Kota Metropolitan tumbuh dan berkembang dengan pesatnya komunitas perempuan ada yang bersifat institusional, profesional dan mandiri, yang mempertegas Kota Makassar sebagai basis organisasi perempuan di Kawasan Timur Indonesia.

Mencermati latar belakang di atas tentang fenomena sosial terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah, terutama di era reformasi sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia yang terus berkembang dan tetap eksis dalam kurun waktu yang relatif lama (sudah menjelang satu abad). Sehubungan dengan itu, dalam disertasi ini konsep kemndirian dibatasi pada tiga aspek yang akan dikaji, yaitu medan visional organisasi 'Aisyiyah; paradoks independensi dalam mengelola amal usaha 'Aisyiyah; dan autopoiesis organisasi, yakni bagaimana 'Aisyiyah melakukan reproduksi diri sendiri terhadap unit-unit

organisasi (meperbaharui dirinya) dan menghasilkan unit-unitnya sendiri sebagai sistem yang otonom dalam mengantisipasi perkembangan serta perubahan organisasi dari fase ke fase, dari periode ke periode sehingga 'Aisyiyah Kota Makassar dapat bertahan dan berkembang sejak didirikan (1926) sampai sekarang.

Selain itu, tentang keberlanjutan organisasi dalam penelitian ini juga dibatasi pada tiga aspek yang saling terkait, yaitu sistem yang otonom, daya kontigensi, dan lingkungan strategis. Dalam hal ini, 'Aisyiyah sebagai sistem yang otonom dalam mengelola unit-unit organisasi mampu mengembangkan daya kontigensi dalam merespon lingkungan strategis melalui program kerja yang disusun secara terarah, sistematis, dan terencana. Kemudian tentang kepatuhan organisasi dalam penelitian ini akan ditelusuri bagaimana bentuk kepatuhan yang dikembangkan anggota kepada 'Aisyiyah dan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah dibalik kemandiridan dan keberlanjutan organisasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas tentang berbagai fenomena sosial yang urgen dan menarik untuk dikaji, terkait dengan problema kemandirian dan keberlanjutan organisasi, maka penulis terpanggil untuk melakukan studi ini dengan judul: Kemandirian dan Keberlanjutan Organisasi Aisyiyah (*Studi Kasus 'Aisyiyah Kota Makassar*).

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari penjelasan dan uraian pada latar belakang di atas, maka fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini merupakan kenyataan yang

dihadapi 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah dengan harapan yang ingin diwujudkan, yaitu kemandirian, keberlanjutan, serta kepatuhan anggota 'Aisyiyah terhadap "Khittah" organisasi sejak didirikan hingga dewasa ini (menjelang satu abad). Sehubungan dengan itu, agar lebih fokus dan terarah pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang akan dikembangkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika kemandirian 'Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan organisasi tersebut?
2. Bagaimana keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah dalam merespons dinamika lingkungan eksternalnya?
3. Bagaimana dinamika kepatuhan anggota kepada organisasi 'Aisyiyah dan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah dibalik kemandirian dan keberlanjutan organisasi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin diwujudkan adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dinamika kemandirian 'Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangannya.
2. Menjelaskan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah dalam merespons dinamika lingkungan eksternalnya.

3. Menganalisis dinamika kepatuhan anggota kepada organisasi 'Aisyiyah dan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah di balik kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan organisasi perempuan umumnya dan 'Aisyiyah pada khususnya sebagai wahana pembaharuan tekad perjuangan perempuan sesuai harkat dan martabatnya. Selain itu, sebagai acuan dalam mengembangkan teori-teori organisasi terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan dalam Muhammadiyah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang mengungkap fakta empiris tentang fenomena kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah khususnya, maupun organisasi perempuan umumnya, diharapkan sebagai acuan praktis dalam pembinaan dan pengkaderan anggota 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan visi dan misi organisasi 'Aisyiyah khususnya di Kota Makassar kini dan ke depan di tengah masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum menjelaskan tinjauan pustaka (kajian teori) yang digunakan dalam studi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan keterkaitan atau hubungan beberapa konsep utama yang dikembangkan ditinjau dari pandangan para ahli yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Terkait dengan beberapa konsep utama yang menjadi fokus perhatian adalah fenomena sosial yang terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah sebagai komponen perempuan Muhammadiyah (organisasi otonom). Dalam hal ini, konsep utama yang dimaksud adalah tujuan penelitian berdasarkan fakta empiris dengan fenomena sosial yang sedang berlangsung.

A. Kemandirian dan Keberlanjutan Organisasi

Pengertian organisasi menurut Sains Lama, Etzioni dalam Liliweri (1997), bahwa sebuah organisasi dibandingkan organisasi lainnya bisa saja lebih otoritarian atau demokratis; sangat terikat peraturan (informal); inovatif atau menolak perubahan; bisa menerima keragaman atau anti-keragaman; bisa membawa atmosfer yang bersahabat atau tidak bersahabat. Menurut Taylor dalam Liliweri (1997), untuk memaksimalkan tugas dan fungsi organisasi maka harus ada gerakan dan tugas yang dialokasikan ke dalam bagian-bagian tertentu. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka organisasi bisa ditata secara ilmiah dan rasional. Oleh karena itu, setiap orang

dapat dilatih untuk tampil secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan tanggung jawabnya.

Karakteristik yang menarik dari pandangan Sains Lama, terhadap organisasi adalah mirip dengan model mesin. Manusia dianggap sebagai perlengkapan mesin, untuk mendapatkan produktivitas sebesar-besarnya. Setiap organisasi harus memanfaatkan tenaga manusia seperti mesin. Bahkan gerakan-gerakan mereka atau tenaga kerja dapat diatur supaya dapat berproduksi lebih banyak. Konsep Taylor tentang manusia sebagai pelengkap banyak mendapat tantangan para ahli. Dalam hal ini, Taylor dianggap melakukan dehumanisasi terhadap nilai-nilai dan moral manusia di zaman itu. Meskipun pandangan Taylor mendapat tantangan dari banyak ahli, namun Taylor tetap dianggap berjasa karena telah meneliti organisasi secara ilmiah, khususnya tentang bagaimana efisiensi penggunaan waktu kerja manusia dapat meningkatkan produksi. Dalam dunia ilmu administrasi Taylor dikenal sebagai bapak ilmu organisasi dan manajemen.

Pengertian organisasi dalam perspektif Sains Baru, adalah sangat kompleks dan beragam. Dalam hal ini organisasi akan dilihat sebagai suatu tatanan dan menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas kemandirian dari semua komponen tatanan diposisikan sebagai kata kunci. Ini berarti bahwa selain melaksanakan misinya, suatu organisasi seyogyanya berfungsi juga sebagai pendorong dan fasilitator upaya-upaya para anggotanya untuk meningkatkan kualitas kemandirian dalam mengartikulasikan kepentingan masing-masing. Dengan demikian, organisasi menurut Sains Baru adalah “suatu tatanan” yang pembahasannya mesti melibatkan berbagai wawasan atau

pengertian baru yang dihasilkan akibat pergeseran paradigma ilmu pengetahuan, Amien (2005:220).

Organisasi dilihat dari perspektif Sains Baru adalah lebih menyerupai organisme ketimbang sebagai suatu mesin. Namun, harus digarisbawahi adanya perbedaan mendasar antara organisasi dan organisme. Perbedaan itu terletak pada fungsi komponen-komponennya. Komponen organisme berfungsi untuk menunjang keberlangsungan keberadaan organisme, sedangkan pada organisasi justru keberadaan organisasi diperlukan untuk menunjang kepentingan komponen-komponennya, (Amien, 2005:221).

Berdasarkan penjelasan di atas tentang pengertian organisasi, baik menurut pendekatan Sains Lama maupun Sains Baru, maka penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan organisasi dalam perspektif Sains Baru yang lebih relevan. Hal ini mengingat 'Aisyiyah merupakan organisasi kemasyarakatan dan social yang mengemban misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran), sehingga pendekatan yang digunakan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan harkat dan martabat manusia khususnya perempuan.

Organisasi sebagai suatu tatanandapat mengacu pada Teori Sistem Hidup (*living system*), sebagaimana direkomendasikan Capra (1996) yang telah dimodifikasi sesuai dengan lingkup pembahasan. Dengan demikian, bahasan tentang tatanan organisasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek utama dari Sistem Hidup, yaitu pola pengaturan, struktur pengaturan, dan proses pengaturan, (Capra dalam

Amien, 2005:222). Pola pengaturan mengacu kepada konsep *autopoiesis* yang dikembangkan oleh Maturana dan Varela (1987), struktur pengaturan pada konsep disipatif struktur yang dikembangkan oleh Prigogine (1991), dan proses pengaturan mengacu kepada konsep yang diperkenalkan oleh Bateson (1980) yang kemudian disempurnakan oleh Maturana dan Varela (1987).

Pola pengaturan merupakan esensi dari setiap tatanan, karena sebagai penjabaran konsep yang melatarbelakangi pembentukan tatanan. Pola tatanan organisasi, meliputi : (1) misi, merupakan penjabaran alasan pembentukan (*raison d'etre*) organisasi, biasanya berupa uraian tugas dan lingkup tugas yang akan diemban organisasi; (2) visi, gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai organisasi; dan (3) nilai atau etika organisasi yang merupakan acuan organisasi dalam bertindak dan mengemban misinya. Umumnya rumusan ketiga elemen pola pengaturan ini bersifat sangat spesifik, sehingga membuat setiap organisasi berbeda dengan organisasi lainnya. Itulah sebabnya, pola pengaturan sering pula diposisikan sebagai *identitas organisasi*, (Amien, 2005:222).

Istilah “pengaturan diri” atau *swatata*, pertama kali diperkenalkan oleh Kant (1970), bahwa organisme berbeda dari mesin, karena organisme memproduksi dan mengatur dirinya sendiri. Dalam sebuah mesin, setiap bagian mendukung bagian lainnya untuk menghasilkan fungsi tertentu (dari mesin itu), sedangkan pada organisme, setiap bagian memakai bagian lain, dalam arti saling menghasilkan satu sama lain. Karena itu, organisme akan mewujudkan dalam bentuk yang teratur dan mengatur dirinya. Pola pengaturan merupakan konfigurasi interkoneksi yang

melahirkan karakteristik-karakteristik utama yang spesifik dari sistem. Pola pengaturan merupakan deskripsi abstrak tentang hubungan-hubungan dan tidak atau bukan mengidentifikasi komponen-komponennya. Maturana dan Varela (1980), berasumsi bahwa *autopoiesis* adalah pola umum pengaturan yang lazim bagi semua sistem hidup, apa pun hakikat komponen-komponennya.

Prinsip dasar organisasi mengandung beberapa elemen penting yang memberikan gambaran tentang hakekat organisasi, yaitu: (1) bahwa organisasi merupakan suatu kerangka sosial, yaitu suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antara individu dalam organisasi; (2) bahwa dalam organisasi terdapat koordinasi yang dirancang untuk mengatur kegiatan kegiatan orang; (3) bahwa dalam organisasi terdapat pembagian kerja yang diatur dengan tingkatan otoritas seluruh kegiatan ditujukan untuk kegiatan pencapaian tujuan bersama, (Juwono, 2009).

Selain prinsip dasar organisasi yang dimaksud, terdapat beberapa azas yang memiliki pengertian sebagai “penyebab dasar pikiran daripada terciptanya sesuatu”. Dasar pikiran tersebut antara lain: (a) suatu pangkal tolak pikiran untuk sesuatu kasus, dan (b) suatu jalan dan sarana untuk menciptakan sesuatu tata hubungan atau kondisi yang dikehendaki. Lebih lanjut untuk memahami konsep kemandirian dengan meminjam ungkapan Toffler dalam Amien (2005: 220), bahwa semua realitas kemanusiaan dan sosial senantiasa tidak berada dalam keadaan stabil dan setimbang.

Organisasi yang menggunakan strategi pendekatan kontrol normatif atau berdasarkan norma-norma akan mendapatkan komitmen anggotanya lebih besar dibanding organisasi yang menggunakan metoda utilitarian dan organisasi dengan

strategi pemaksaan paling kecil komitmen anggotanya. William Ouchi belajar dari pengalaman Jepang menyimpulkan lebih mudah mengontrol orang melalui pergaulan dan norma-norma daripada insentif materi atau peraturan ketat birokratis. Tetapi budaya bisa diinterpretasikan berbeda-beda. Joanne Martin dalam Amien (2005: 221), menjelaskan tiga pendekatan dalam mempelajari organisasi yaitu: integrasi (*integration*), perbedaan (*differentiation*), dan fragmentasi (*fragmentation*). Berdasarkan perspektif integrasi anggota organisasi tahu persis prinsip dasar yang harus dilakukan dalam organisasi, sehingga mereka harus berperilaku. Jika saya rajin atau berprestasi maka gaji saya akan naik atau mendapat bonus.

Struktur adalah perwujudan pola pengaturan. Jika pola pengaturan bersifat abstrak, maka struktur pengaturan merupakan materialisasi atau perwujudan pola itu dalam bentuk struktur organisasi sebagaimana yang dipahami selama ini. Berbeda dengan organisasi klasik yang cenderung mempertahankan strukturnya, pada organisasi kuantum struktur tidaklah bersifat kaku tetapi senantiasa berubah akibat dua hal. *Pertama*, untuk mengikuti aktualisasi identitas dan aturan-aturan dasar organisasi. *Kedua*, untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan eksternal, yang umumnya bersifat probabilistic atau bahkan chaostik. Penyesuaian dimaksud adalah penting, karena struktur merupakan antarmuka (*interface*) organisasi dengan lingkungannya yang menentukan pertukaran materi, energi dan informasi. Pertukaran dimaksud merupakan syarat dan suatu keharusan, karena pada dasarnya organisasi adalah struktur disipatif yang membutuhkan pasokan energy dari luar untuk mempertahankan keberadaannya.

Reformasi struktur merupakan titik kritis dalam perjalanan sejarah keberadaan suatu tatanan organisasi, karena hasil tarik menarik antara tuntutan dinamika lingkungan dan identitas organisasi menentukan corak masa depan organisasi. Pada umumnya organisasi, yang memiliki identitas yang kuat akan mampu bertahan, karena proses reformasi dapat dilakukan pada tataran struktur tanpa harus diikuti dengan perubahan identitas organisasi. Hal ini disebabkan pada dasarnya identitas dapat mewujudkan dalam berbagai format struktur organisasi, (Amien, 2005: 232).

Beberapa dekade terakhir tampak bahwa lingkungan global terus berubah dengan laju yang semakin tinggi dan dengan pola yang terlihat chaotik. Artinya, jika ingin memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan tuntutan lingkungan organisasi, maka reformasi struktur sering dilakukan dengan pola yang chaotik pula. Misalnya, reformasi sulit dilakukan setiap saat karena membutuhkan sumber daya yang tidak kecil dan mengandung resiko yang cukup besar bagi keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, solusi yang harus ditempuh adalah mendesain struktur organisasi dengan mengacu kepada spirit zaman (*zeitgeist*). Hal ini dimungkinkan karena spirit zaman merupakan *strange attractor* yang banyak menentukan arah kecenderungan dari dinamika lingkungan strategis. Dengan strategi ini, reformasi struktur organisasi tidak perlu terlalu sering dilakukan karena spirit zaman cenderung tidak berubah banyak dalam kurun waktu yang relatif lama.

Proses pengaturan adalah aktivitas yang berlangsung secara kontinu untuk mewujudkan pola pengaturan menjadi struktur organisasi. Dalam sistem hidup (*living system*), proses ini berupa pertukaran energi dan materi antara tatanan dengan

lingkungannya agar tatanan bersangkutan dapat mempertahankan atau bahkan mengembangkan dirinya sesuai dengan pola pengaturannya. Proses ini identik dengan proses metabolisme yang dikenal dalam biologi dan proses adaptasi kreatif pada tatanan organisasi, (Amien, 2005: 236).

Setidaknya ada dua gaya pendorong terjadinya proses pengaturan. *Pertama*, dinamika lingkungan eksternal yang menuntut penyesuaian struktur agar tetap menjamin adanya pertukaran energi, materi dan informasi antara tatanan dengan lingkungannya. *Kedua*, dinamika internal antara komponen-komponen pembentuk tatanan. Dinamika ini terjadi karena setiap komponen tatanan pada dasarnya juga merupakan tatanan yang memiliki kreativitas, dalam arti senantiasa ingin melakukan pembaharuan terhadap dirinya, termasuk pembaharuan terhadap format interkoneksitasnya dengan komponen lainnya. Proses pembaharuan ini merupakan proses yang sangat dinamis, karena setiap komponen akan aktif melakukan semua upaya agar tetap mampu mempertahankan identitas dan kualitas keberadannya di dalam tatanan yang melingkupinya.

Adanya pola pengaturan yang jelas dan diterima serta dimengerti oleh semua komponen organisasi akan membuat tatanan organisasi mampu melakukan proses pengaturan secara otomatis. Hal ini berarti, tuntutan untuk berubah akibat dinamika lingkungan eksternal dan internal akan ditanggapi secara otomatis oleh setiap komponen organisasi sesuai dengan otonomi yang dimiliki, dengan tetap mengacu kepada identitas organisasi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa organisasi yang memberi otonomi yang besar kepada komponennya pada umumnya

memiliki kapasitas swatata yang besar. Pengaruh fluktuasi dari lingkungan eksternal didistribusikan kepada seluruh komponen organisasi, selanjutnya akan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan. Dengan demikian, sampai pada batas tertentu, dinamika lingkungan eksternal tidak akan mengubah struktur tatanan secara keseluruhan.

Mencermati penjelasan di atas, harus diakui bahwa ada perbedaan interpretasi dalam organisasi atau bahkan bervariasi pandangan di dalam organisasi yang mencerminkan kelompok interes (kepentingan) berbeda. Atasan bisa saja memiliki pemahaman yang berbeda dengan bawahan atas sikap tidak berat sebelah (*fairness*) dan tanggung jawab. Perspektif ini melihat tidak ada konsensus di tingkat organisasi, tetapi yang ada hanya konsensus di tingkat sub-unit dan pandangan ini cenderung menekankan bagaimana kelompok bawahan melihat organisasi untuk membedakan dengan pandangan integrasi. Perspektif ini sering digunakan untuk meneliti konflik dan keengganan yang tidak muncul dalam retorika manajemen atau organisasi yang menekankan kerja tim, harmoni, dan kerjasama.

Terkait dengan kemandirian organisasi sebagaimana dijelaskan oleh Amien (2005:171), bahwa kemandirian diperlukan untuk menjaga identitas organisasi, agar diversitas keseluruhan yang merupakan syarat untuk mempertahankan kesinambungan organisasi. Kemandirian organisasi yang merekomendasikan terhadap pelaksanaan semua tahapan kegiatan atau program kerja organisasi, dengan memanfaatkan sumber daya internal dan mengacu kepada karakteristik spesifik yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tatanan yang indikator

utamanya adalah tetap terjaganya keadilan berpartisipasi bagi semua komponen organisasi, serta meningkatnya kapasitas swatata tatanan. Tatanan yang dimaksud adalah perwujudan konsep interkoneksi sebagai tulang punggung Sains Baru, artinya, meninggalkan reduksionisme. Tidak kalah pentingnya ialah konsep ini menggeser paham materialisme dan menggantinya dengan pendekatan yang berbasis organik.

Menurut Bateson dalam Amien (2005:172), bahwa entitas yang selama ini didefinisikan sebagai obyek tidak memadai lagi digunakan untuk merepresentasikan semesta (realitas). Oleh karena itu, mengubah semua definisi yang berbasis obyek ke berbasis interkoneksi, maka entitas organisasi juga dilihat sebagai interkoneksi. Masyarakat yang mendiami suatu ruang tertentu dengan kelembagaan dan sistem kepercayaan yang beragam, serta sumber daya alam dan kondisi lingkungan hidup, harus dilihat sebagai satu kesatuan, tepatnya suatu jejaring interkoneksi yang kuat, tetapi tetap terbuka yang merupakan “bagian” dari entitas lain yang memiliki dimensi ruang maupun dimensi fungsional yang lebih luas.

Istilah “komponen” atau “bagian” yang dimaksud adalah seluruh pembahasan atau perwujudan seperangkat interkoneksi, tetapi dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di sekelilingnya. Dengan kata lain, tatanan merupakan sistem tanpa batas yang berbeda dengan pengertian sistem tradisional yang didefinisikan dengan batas yang jelas. Pemilihan model tatanan seperti ini lebih mencerminkan realitas yang sebenarnya, karena pada hakikatnya entitas pembangunan (organisasi) tidak memiliki batas yang kaku. Organisasi ‘Aisyiyah

misalnya, memiliki kelompok masyarakat (sebagai anggota) yang terikat dengan komponen masyarakat lainnya dalam wilayah yang sama (Kota Makassar) di satu sisi, dan di sisi lain memiliki keterkaitan fungsional dengan kelompok lainnya (Muhammadiyah dan Pemerintah) yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, tatanan juga memiliki keterkaitan fisik/ekologi yang sulit dibatasi, terutama menggunakan batas administrasi sebagai batas sistem. Sistem pelayanan, pembinaan dan pengkaderan terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi memiliki keterkaitan administrasi dengan entitas lain yang berada di wilayahnya.

Perwujudan interkoneksi, perhatian tidak pada komponennya tetapi pada interkoneksi yang terjadi. Dalam hal ini tidak akan banyak mempersoalkan ketersediaan sumber daya dalam suatu tatanan, tetapi pada interkoneksi sumber daya itu dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, lebih memperhatikan pola pengelolaan sumber daya, antara lain berupa tekno struktur masyarakat ketimbang sumber dayanya sendiri. Dalam konteks ini, tidak akan banyak memperhatikan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi pada interkoneksi yang tercipta antara kelompok-kelompok itu yang antara lain diukur apakah ada sumber daya dan atau fitur baru yang tercipta akibat keterhubungan itu. Misalnya, dalam bentuk pengembangan dan peningkatan kualitas modal sosial (*social capital*). Interkoneksi tatanan dengan lingkungannya juga menjadi fokus perhatian, yaitu apakah interkoneksi yang dimaksud memberikan sesuatu kepada tatanan, baik dalam arti positif maupun negatif.

Komponen tatanan, baik yang berupa komponen “lunak” seperti manusia dengan sistem nilai, kelembagaan, dan tekno strukturalnya, maupun yang berupa komponen “keras” seperti lingkungan alam dan sumber dayanya, merupakan entitas yang dinamis yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Demikian pula wujud interkoneksitasnya. Oleh karena itu, tatanan seyogyanya dipandang sebagai suatu organisme yang memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk berkembang secara mandiri serta melaksanakan asosiasi atau fusi dengan tatanan lainnya. Asosiasi adalah wujud interkoneksitas di mana setiap tatanan masih mempertahankannya, sedangkan fusi menghasilkan tatanan baru dengan karakteristik yang baru pula karena setiap tatanan yang bergabung lebur ke dalam tatanan baru tersebut. Dalam kondisi semacam ini, biasanya terbentuk sumber daya yang bukan merupakan hasil penggabungan sumber daya tatanan yang bergabung (*emergency resources*). Demikianlah hakikat sebenarnya dari interkoneksitas, karena dengan terciptanya sumber daya baru, maka keberlangsungan keberadaan tatanan akan terjamin. Dengan kata lain, sustainability akan tercapai (Amien, 2005:175).

Di samping ketiga elemen yang disebutkan di atas, terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah, pola pengaturan juga dilengkapi dengan seperangkat aturan-aturan dasar yang menjabarkan fungsi dan pola keterkaitan antarkomponen organisasi. Aturan dimaksud selain dirumuskan dengan mengacu kepada identitas organisasi, juga disesuaikan dengan konsep-konsep tatanan organisasi sehingga hasilnya adalah rumusan aturan dasar yang spesifik yang membuat organisasi kuantum berbeda dari organisasi tradisional. Setidaknya terdapat

tiga konsep dasar yang saling terkait dan saling melengkapi yang membentuk konsep yang utuh tentang tatanan organisasi, yaitu: (a) *autopoiesis*; (b) padadoks interdependensi; dan (c) medan visional (Amien, 2005).

Autopoiesis merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan proses pembentukan dan proses aktualisasi identitas organisasi. Terdapat beberapa teori tentang tatanan, khusus yang terkait dengan organisasi seperti yang dikembangkan oleh Arthur Koestler dalam Amien (2005: 223), menjelaskan bahwa kata *bolon* berasal dari bahasa Yunani *bolos* yang berarti *ubole* (keseluruhan) dan *on* yang berarti *part* (bagian). Hal tersebut sengaja dipilih Koestler untuk mencerminkan karakter dasar dari setiap entitas yang disebut efek Junus (Junus Effect), yaitu berupa kemampuan berinteraksi dengan entitas lainnya, baik dalam peran yang menekankan kebebasan maupun dalam peran ketergantungan.

Koestler menganalogikan *bolon* dengan Dewa Junus yang di dalam mitologi Rumawi digambarkan memiliki dua muka. Satu muka menghadap ke dalam, ke arah *bolon-bolon* kecil yang merupakan bagiannya, merepresentasikan kebebasan yang dimiliki oleh keseluruhan, sedangkan muka lain menghadap keluar, kepada *bolon* lebih besar yang mengandungnya merepresentasikan sifat ketergantungan yang dimiliki oleh bagian. Di dalam tatanan, efek Junus mewujud dalam bentuk dua kecenderungan. *Pertama*, adalah tendensi integratif yang berfungsi untuk mempertahankan posisinya sebagai bagian dari keseluruhan. *Kedua*, adalah tendensi penonjolan diri sebagai refleksi dari fungsi untuk melestarikan identitas dan otonomi individu-dunya. Otonomi yang dimaksud disini mengandung arti bahwa setiap

bolon memiliki pola irama dan fungsi yang spesifik didukung oleh kemampuan untuk mengatur diri (*swatata*) dan mempertahankan pola tersebut.

Kedua kecenderungan ini termanifestasi pada setiap tatanan, dari sel ke individu dan sampai pada kelompok masyarakat. Setiap *bolon* harus menegakkan individualitas atau jatidirinya untuk mempertankan struktur bertingkat sistem, tetapi pada sisi lain ia (individu) harus pula patuh pada tuntutan-tuntutan keseluruhannya agar sistem dapat terus berjalan. Selain itu, kedua tendesi ini saling berlawanan tetapi saling melengkapi, karena itu dinamakan paradoks interdependensi (*paradox of interdependence*). Jika dicermati lebih jauh, paradoks ini merupakan perwujudan dari prinsip komplementaris dan kemenduaan semesta yang merupakan basis dari pengaturan semesta, yaitu diferensiasi dan integrasi.

Terkait dengan pola tatanan yang sehat, baik individu, masyarakat maupun ekosistem terdapat keseimbangan yang dinamis antara kedua kecenderungan di atas. Kemampuan tatanan mempertahankan keberadaannya sangat tergantung kepada keseimbangan dimaksud. Kecenderungan penonjolan diri yang mendominasi menyebabkan kecenderungan integrasi menipis, akan bermuara pada rusaknya tatanan, sebaliknya kecenderungan integrasi yang membesar akan membuat identitas tatanan pembentuk mengecil atau hilang yang pada gilirannya bermuara kepatuhan terhadap tatanan (organisasi) sebagaimana yang diharapkan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebagai suatu tatanan, atau di dalam organisasi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah disebut "Khittah", yaitu perilaku organisasi sesuai dengan perilaku umum tatanan (*khittah*). Dalam hal ini, 'Aisyiyah ikut memberikan

jawaban atas berbagai permasalahan, baik di tingkat daerah, wilayah maupun pusat yang dari waktu ke waktu senantiasa mengalami pengembangan. Peran dan komitmen serta tanggung jawab 'Aisyiyah semakin besar dan terbuka. Kehadiran dan keterpanggilan ortom 'Aisyiyah di setiap jengkal lahan amal di setiap kondisi merupakan wujud 'Aisyiyah sebagai gerakan rahmatan lil 'alamin.

Terkait dengan keberlanjutan organisasi/lembaga (*theory scopt*), di bawah ini akan dijelaskan pandangan Brinkerhoff dan Goldsmith (1990: 19), menjelaskan bahwa keberlanjutan lembaga/organisasi para analis sering kali mengungkapkan alasan tertentu, dengan faktor-faktor penekanannya termasuk pada tingkatan komitmen, khususnya pada sebuah keinginan untuk menyiapkan biaya yang berkali-kali. Penggabungan lembaga atau pemerintah dan swasta secara tepat; pada sektor pemerintah, perutusan yang tepat dari berbagai tingkatan dalam pemerintahan; kepekaan terhadap suatu isu penurunan ekologi dan produktivitas pertanian jangka panjang; dan adopsi dari sistem manajemen yang mengenalkan pembangunan kapasitas. Dalam hal ini, penggambaran formalnya adalah teori sistem, teori kemungkinan dan politik ekonomi.

Kemudian dijelaskan bahwa, lembaga adalah sistem yang dibangun dari sebuah ide. Ada beberapa alasan untuk memulai dasar ini, antara lain: (1) bahwa teori sistem merupakan hal yang cukup umum untuk menutupi keberlanjutan permasalahan dalam lembaga pada semua jenis, mulai dari tanda/kode yang formal sampai kepada yang tidak formal untuk dilakukan; (2) bahwa teori sistem secara simultan ditentukan oleh proses internal dan hubungan diantara sistem dan lingkungannya sendiri. Hal ini

kemudian mendorong untuk memandang secara luas berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, teknis dan lainnya yang mempengaruhi keberlanjutan; (3) bahwa teori sistem menekankan pada hubungan diantara unsur yang terpisahkan, dan memungkinkan untuk memunculkan aspek-aspek agro lingkungan, ekonomi dan aspek manajerial dari keberlanjutan tersebut.

Selanjutnya Brinkerhoff & Goldsmith (1990: 20), bahwa teori sistem menyajikan pedoman tentang bagaimana menggambarkan hubungan antara proses sistem internal dan eksternal. Teori kemungkinan menjadi pengganti kesenjangan ini. Penyajian teori ini agar lembaga-lembaga dapat mencapai hubungan yang lebih baik. Selain itu, alasan penggunaan teori kemungkinan adalah untuk menghindari tendensi, perluasan referensi pada keberlanjutan lembaga yang direkomendasikan secara luas.

Menurut pandangan ilmu sosial, teori sistem yang paling bermanfaat dalam menganalisis lembaga atau organisasi formal, seperti lembaga atau organisasi pemerintahan, perusahaan bisnis, dan universitas. Sebagaimana pandangan Hage dan Aiken dalam Brinkerhoff dan Goldsmith (1990: 21), bahwa : (1) Sistem teori diciptakan dan berlanjut untuk mencapai tujuan umum yang lebih baik daripada tindakan individu; (2) Sistem teori dapat mengembangkan sub sistem untuk tujuan sub divisi dan peningkatan efisiensi; (3) Sistem teori menggunakan pola otoritas dan hubungan komunikasi untuk terhubung dan terintegrasi secara khusus dari kegiatan sub sistem; dan (4) Sistem teori tergantung pada transaksi dengan unsur luar dan penyedia untuk menyiapkan input atau memahami output yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem.

Sehubungan dengan penjelasan di atas terkait dengan keberlanjutan organisasi sebagai sistem, ada beberapa definisi kunci yang perlu dipahami sebagai berikut: (a) Input (sumberdaya), bahan mentah, uang, manusia, informasi dan pengetahuan yang dimiliki organisasi dan lingkungannya, serta kontribusi untuk menciptakan output; (b) Output berupa produk, layanan, program, dan ide yang dihasilkan dari tindakan organisasi; (c) Teknologi (metode dan proses), meliputi mental, fisik dan mekanis untuk mentransformasikan sumberdaya ke dalam output; (d) Lingkungan, terdiri dari lingkungan pekerjaan yang meliputi organisasi eksternal dan kondisi yang mempengaruhi suatu operasi utama dari organisasi dan teknologi, seperti klien, pesaing, pasar dan lingkungan umum meliputi lembaga dan kondisi yang mempengaruhi keberlanjutan organisasi; (e) Maksud-strategi, yakni tujuan, rencana dari pembuat keputusan untuk dominasi organisasi; (f) Sikap dan proses-pola sikap, yaitu hubungan antara individu dan kelompok; (g) Budaya-norma, kepercayaan, nilai kehidupan berorganisasi; dan (h) Struktur-hubungan diantara individu, kelompok, dan unit yang lebih besar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa postulat dasar dari teori kemungkinan yang kontras dengan asumsi yang sering membuat teori secara implisit dalam teori sosial dan ekonomi, yang merupakan pilihan untuk melegalkan kegiatan secara bersama. Persoalan mendasar yang diperoleh dari bagian analisis ini adalah: (1) tidak ada lembaga atau organisasi yang secara prinsip adalah benar untuk semua situasi; (2) kesuksesan organisasi bergantung pada kemampuan dalam penyesuaian lingkungannya; (3) untuk mencapai ketepatan ini, sebuah organisasi harus memiliki

struktur, strategi, budaya dan sebagainya. Demikian yang penting adalah, sebuah organisasi harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya (mendapatkan seseorang yang lebih cocok) untuk menjalankan organisasi tersebut, (Katz dan Kahn dalam Brinkerhoff & Goldsmith, 1990: 22).

Mencermati uraian di atas terkait dengan *Medan Visional* menurut Wheatley dalam Amien (2005: 227), menjelaskan bahwa visi organisasi yang jelas dan diterima oleh semua komponen organisasi akan menimbulkan medan visional di lingkungan organisasi bersangkutan. Medan inilah yang memicu terjadinya sinergi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap komponen organisasi. Keberadaan medan visional menyebabkan tidak diperlukannya upaya pengendalian yang berlebihan yang menjadi ciri khas organisasi *a la* Newtonian, karena walaupun memiliki otonomi, setiap komponen tetap akan memilih secara sukarela untuk bertindak sinergis dengan komponen lainnya. Hal ini merupakan bukti bahwa otonomi individu tidak berarti harus dikendalikan secara ketat karena memiliki potensi untuk memecah belah kesatuan organisasi. Upaya pengendalian dapat digantikan dengan visi yang jelas yang akan membangkitkan medan visional sekaligus berfungsi untuk mengarahkan kebebasan individu untuk mencapai cita-cita bersama.

Konsep medan visional Wheatley tersebut sangat relevan dengan prinsip dasar (khittah) dan konsep keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah yang telah diuraikan terdahulu. Konsep yang serupa dikembangkan Sheldrake tentang medan morfogenesis yang mengatur perilaku makhluk hidup. Hal ini seperti dijelaskan bahwa keberadaan medan ini akan membuat anggota organisasi berikutnya

(kaderisasi) lebih mudah menerima dan melanjutkan visi organisasi dari waktu ke waktu sesuai dengan pendahulunya.

Sejalan dengan penjelasan di atas, khususnya yang terkait dengan konsep *outopoesis*, paradoks interdependensi, dan medan visional dalam hubungannya dengan berdirinya organisasi Nasyyiatul 'Aisyiyah (NA) juga tidak bisa dilepaskan dengan rentang sejarah Muhammadiyah yang sangat memperhatikan keberlangsungan kader penerus perjuangan organisasi. Muhammadiyah dalam membangun ummat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah.

Gagasan mendirikan NA sebenarnya bermula dari ide Somodirdjo, seorang guru *Standart School Muhammadiyah*. Gagasan Somodirdjo ini digulirkan dalam bentuk menambah pelajaran praktek kepada para muridnya, dan diwadahi dalam kegiatan bersama. Dengan bantuan Hadjid, seorang kepala guru agama di *Standart School Muhammadiyah*, maka pada tahun 1919 berhasil mendirikan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putra siswa *Standart School Muhammadiyah*.

Kegiatan SP Wanita adalah pengajian, berpidato, jama'ah subuh, membunyikan kentongan untuk membangunkan umat Islam Kauman agar menjalankan kewajibannya yaitu shalat shubuh, mengadakan peringatan hari-hari besar Islam, dan kegiatan keputrian. Perkembangan SP Wanita cukup pesat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya mulai segmented dan terklasifikasi dengan baik. Kegiatan *Thalabus Sa'adah* diselenggarakan untuk anak-anak di atas umur 15 tahun.

Aktivitas Tajmilul Akhlak diadakan untuk anak-anak berumur 10-15 tahun. Jam'iatul Athfal dilaksanakan seminggu dua kali untuk anak-anak yang berumur 7-10 tahun.

Kegiatan SP Wanita merupakan terobosan yang inovatif dalam melakukan emansipasi wanita di tengah kultur masyarakat feodal saat itu. Kultur patriarkhis saat itu benar-benar mendomestifikasi wanita dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga. Para orang tua seringkali melarang anak perempuannya keluar rumah untuk aktivitas-aktivitas yang emansipatif. Namun dengan munculnya SP Wanita, kultur patriarkhis dan feodal tersebut bisa didobrak. Hadirnya SP Wanita sangat dirasakan manfaatnya, karena SP Wanita membekali wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan.

B. Kepatuhan Dalam Organisasi

Menurut Etzioni dalam Liliweri (1997: 66), sebuah organisasi dapat berjalan karena di dalamnya ada kepatuhan, baik pada level pengurus maupun pada level anggota. Kepatuhan dimaksud melibatkan variabel power dan variabel keterlibatan, dalam hal ini power pada pengurus dan keterlibatan pada anggota organisasi. Etzioni, menyusun skema klasifikasi organisasi berdasarkan sifat-sifat perilaku "*compliance*" (perilaku prososial). Etzioni memasukkan sikap "*compliance*" merupakan sikap yang umumnya dimiliki oleh bagian terbesar semua unit-unit sosial bahkan masyarakat. Menurutnya, perilaku "*compliance*" adalah unsure utama yang menata hubungan antara mereka yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dengan pihak yang dikuasai dan diwenangi.

Power terdiri dari power berdasarkan koersif, power berdasarkan remuneratif, dan power berdasarkan normatif. Sementara keterlibatan meliputi; keterlibatan berdasarkan prinsip alienatif, keterlibatan berdasarkan kalkulatif, dan keterlibatan berdasarkan moral. Lebih jauh dijelaskan Etzioni bahwa, dalam semua organisasi, para anggota selalu dihubungkan dengan anggota lain melalui hubungan hierarki yang menyebabkan para anggota mempunyai kedudukan lebih tinggi diberi kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar, kekuasaan dan kewenangan tersebut diatur dan dilegitimasi. Kedudukan selalu memiliki kuasa dan wewenang dalam menata hubungan atasan dengan bawahan. Karena itu, pimpinan suatu hierarki cenderung bertindak kepada bawahan. Tindakan itu untuk memperlihatkan kekuasaan, kekerasan, ganjaran bahkan membuat perhitungan, akibatnya kedudukan bawahan dianggap sebagai partisipan tingkat rendah (Liliweri, 1997: 67).

Apabila para anggota (bawahan) tetap bertindak sebagai partisipan yang rendah, maka anggota tersebut akan merasa terasing atau seolah-olah diasingkan organisasi. Sebaliknya, jika para anggota tidak diasingkan maka akan merasa dilibatkan dalam organisasi, dan akan merasa memiliki organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tidak mengherankan jika setiap bawahan selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang dapat diperoleh melalui hubungan yang tercipta dalam organisasi.

Lebih jelasnya dapat disimak tabel berikut tentang tipologi hubungan *compliance* dari Etzioni, bahwa dalam setiap organisasi pihak ordinas (atasan) mempunyai 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu koersif, remunerative, dan normative.

Sedangkan subordinasi (bawahan) mempunyai 3 (tiga) jenis keterlibatan, yaitu alienatif, kalkulatif, dan moral, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Tipologi Hubungan Compliance dari Etzioni.

Jenis Kekuasaan	Jenis Keterlibatan		
	Alienatif	Kalkulatif	Moral
Koersif	1	2	3
Remuneratif	4	5	6
Normatif	7	8	9

Sumber : Etzioni dalam Liliweri (1997: 67).

Tabel di atas menjelaskan bahwa di dalam organisasi, kekuasaan atasan merupakan bentuk kekuasaan untuk menekan, memerintah, dan memaksa (*koersif*), kekuasaan memberikan ganjaran/balas jasa (*reward, remunerative*) dan terakhir kekuasaan menetapkan aturan atau norma-norma dalam organisasi. Sedangkan dari pihak bawahan memiliki jenis keterlibatan, yaitu alienatif (keterlibatan rendah), kalkulatif (keterlibatan dengan perhitungan), dan moral (keterlibatan tinggi).

Klasifikasi tipologi *compliance* dari Etzioni pada table di atas memiliki 9 (Sembilan) bentuk hubungan yang bersifat *compliance*, yaitu :

- a. Hubungan yang bersifat *koersif-alienatif*, para bawahan yang merasa diri terasing karena ada tekanan dari atasan.
- b. Hubungan yang bersifat *koersif-kalkulatif*, yaitu para bawahan yang memperhitungkan tekanan dari atasan.

- c. Hubungan yang bersifat *koersif-moral*, adalah bawahan terlibat secara moral karena ada tekanan dari atasan.
- d. Hubungan yang bersifat *remuneratif-alienatif*, bawahan yang merasa diri terasing karena ada tekanan dari atasan.
- e. Hubungan yang bersifat *remuneratif-kalkulatif*, jenis keterlibatan bawahan yang memperhitungkan ganjaran dari atasan.
- f. Hubungan yang bersifat *remuneratif-moral*, bawahan yang secara moral menerima ganjaran dari atasan.
- g. Hubungan yang bersifat *normatif-alienatif*, bawahan merasa diri terasing karena ada norma-norma yang berlaku dari atasan.
- h. Hubungan yang bersifat *normatif-kalkulatif*, yaitu keterlibatan bawahan yang memperhitungkan norma-norma dari atasan.
- i. Hubungan yang bersifat *normatif-moral*, bawahan yang secara moral mengikuti norma-norma yang berlaku dari atasan.

Menurut Etzini, tipe 1, 5 dan 9 menggambarkan tipe hubungan yang bersifat *kongruen*, hubungan yang demikian dipandang lebih efektif untuk diterapkan dalam setiap organisasi (termasuk 'Aisyiyah). Hubungan yang kongruen akan mengakibatkan organisasi sebagai unit sosial (amal usaha) dapat mempertahankan diri dari tekanan "dalam" maupun "luar", termasuk dalam hal ini adalah Muhammadiyah dan Pemerintah. Kondisi demikian dapat dianalogikan seperti yang dialami seorang bawahan atau anggota organisasi meskipun merasa terasing karena

ada ancaman atau tekanan dari atasan (pimpinan organisasi), tetapi secara moral tetap taat (patuh kepada norma-norma yang mengatur hubungan tersebut). Sebagai contoh, organisasi militer; seseorang yang menjadi anggota harus mampu atau dapat memperhitungkan untung rugi menolak disiplin. Moralitas anggota korps sangat ditentukan oleh norma-norma organisasi tersebut. Kemudian Etzioni menjelaskan bahwa, kebalikan dari tipe kongruen ialah *inkongruen*, yaitu (3 dan (7) yang tidak selalu bertahan terhadap tekanan eksternal. Karena itu, langkah yang perlu diantisipasi organisasi adalah mengurangi kekuasaan atau perasaan superioritas.

Lebih jauh Etzioni menjelaskan bahwa, hubungan *normatif-alienasi inkongruen* (7) terjadi ketika seorang pastor, pendeta atau pejabat gereja merasa yakin bahwa anggota jemaat yang melakukan tindakan melawan perkawinan (contoh: “kumpul kebo”) adalah tindakan salah. Anggota jemaat itu harus diasingkan karena telah melawan norma; hubungan itu dapat berubah apabila anggota jemaat mau mengikuti kegiatan gereja sesuai dengan norma yang berlaku.

Bentuk inkongruen berikut ialah koersif-kalkulatif (2), yang ditujukan pada jenis hubungan antara bawahan yang penuh perhitungan terhadap tekanan atasan. Sebagai contoh, hubungan ketaatan para anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) terhadap tekanan dari atasan (pimpinan parpol). Bentuk inkongruen remuneratif-alienatif (4) dapat diilustrasikan dengan keuntungan yang diperoleh seorang prajurit upahan berjuang membela Negara karena mendapat uang. Dengan demikian sedikit bahkan tidak ada idealisme terhadap bangsanya, tetapi hanya membutuhkan upahan.

Tipe inkongruen remuneratif-moral (6) dapat terlihat pada seorang direktur lembaga pemakaman jenazah yang mendapat keuntungan dari bisnis tersebut, namun seringkali harus bersikap prososial membantu keluarga yang berduka. Tipe terakhir adalah hubungan inkongruen normatif kalkulatif (8), sebagai contoh seorang guru besar yang merasa yakin bahwa pendapatan dari pekerjaan atau spesialisasinya merupakan sumber utama untuk menhidupi keluarga. Namun, kadang-kadang harus berusaha untuk mencari penghasilan tambahan di luar tugas pokok seperti memberi kuliah tambahan, seminar, dan sebagainya.

Secara umum Etzioni dalam Liliweri (1997), menawarkan sintesis sistem bahwa organisasi mengadopsi untuk mengamankan kepatuhan anggota. Dalam hal ini adalah cara orang dalam organisasi sesuai dengan persyaratan dan mengikuti standar perilaku yang ditetapkan, berorientasi pada tujuan, organisasi diarahkan kinerja memerlukan kepatuhan anggota. Masalahnya adalah bahwa penyimpangan dari standar ini terjadi karena kelemahan dalam komitmen anggota. Sistem kontrol yang diberikan oleh anggota organisasi lainnya, baik oleh manajer maupun anggota lain. Dalam kepatuhan dipastikan dengan struktur kontrol dan wewenang organisasi, hierarki formal otoritas, pengawasan, definisi pekerjaan, dan prosedur kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan model birokrasi Weber membuat organisasi kurang tergantung pada variabilitas individu dan olahan. Ada elemen motivasi untuk ini karena struktur keterlibatan individu dalam organisasi. Proposisi sederhana adalah bahwa, semakin besar individu berkomitmen, kontrol formal kurang

diperlukan. Dengan demikian, organisasi atau bagian organisasi seperti misalnya mengadopsi sistem sebagai budaya yang berlaku.

Sistem koersif, ialah mencerminkan kemampuan organisasi untuk menerapkan fisik, kekuatan menghambat dan sakit untuk non-compliance. Misalnya organisasi kustodian, sistem kontrol memungkinkan penarikan anggota dan hak kebebasan. Keterlibatan dengan organisasi yang berasal dari sistem kontrol koersif mungkin terasing, paling pasif dengan perasaan negatif dan disassociation. Sistem organisasi ini menawarkan berbagai macam imbalan material atau non-materi untuk mengamankan kepatuhan anggota. Keanggotaan didasarkan pada kontrak dengan organisasi dan tawar-menawar atas hadiah yang diinginkan dengan imbalan kepatuhan, kehandalan loyalitas, kinerja. Anggota menghitung, Apa untungnya bagi saya?. Lembur, kenaikan gaji, promosi, penghasilan tetap, masa depan jangka panjang. Sistem normatif (Keterlibatan Moral), sistem organisasi kontrol tergantung pada nilai-nilai bersama yang dipromosikan dan yang anggota berlangganan. Organisasi sadar generates dan mempertahankan nilai-nilai yang diwakili dalam tanda-tanda dan sybmols - visual, verbal, perilaku dan konseptual. Komitmen terhadap ideologi organisasi membawa kekuatan persuasif, anggota menginternalisasikan nilai-nilai organisasi yang menjadi panduan dan perilaku yang mereka alami.

Istilah *Compliance* yang di-Indonesiakan dalam penelitian ini dengan “Kepatuhan”, hingga sekarang belum ditemukan makna yang lebih tepat (bervariasi). Istilah kepatuhan sering diasumsikan dengan perawatan yang

direkomendasikan dan diresepkan seorang dokter kepada pasien, untuk selalu taat dan patuh terhadap nasehat dokter. Dengan kata lain, konsep kepatuhan lebih mungkin ketika ada kesepakatan dan kepercayaan diri mengenai diagnosa dan prognosis (Liliweri, 1997).

Penelitian di psikiatri, psikologi, dan sosiologi menyediakan banyak penjelasan untuk variasi yang sesuai. Dalam psikiatri, masalah klinis seperti penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol kadang-kadang digunakan untuk menjelaskan ketidakpatuhan. Pasien juga dapat menghentikan minum obat karena efek samping yang tidak diinginkan. Dalam psikologi dan sosiologi, kesehatan kepercayaan dan perilaku (dalam konteks keluarga, pekerjaan, dll) dapat meningkatkan atau membatasi kepatuhan. Jika anggota keluarga individu mendukung kepatuhan pengobatan, dan individu percaya manfaat obat itu, kepatuhan dapat ditingkatkan. Jika seseorang tidak melanjutkan pengobatan maka akan membuat dia mengantuk dan mempengaruhi karya, kepatuhan dapat dikurangi. Orang-orang yang memiliki akses terbatas atau kepercayaan pada dokter, ilmu kedokteran, dan orang-orang yang imannya menghalangi mereka dari beberapa jenis perawatan medis, cenderung untuk mematuhi rekomendasi pengobatan.

Sejumlah teori yang mencoba untuk menangkap jenis atau sumber motivasi mempengaruhi anggota organisasi. Misalnya, dalam membahas penyebab internal dan eksternal perilaku, deCharms (1968) menyarankan dikotomi ekstrinsik motivasi intrinsik dibandingkan untuk mengkarakterisasi lokus yang berbeda dari kausalitas. Perilaku intrinsik termotivasi (perilaku yang terjadi tanpa adanya kontrol eksternal),

dikatakan mewakili kausalitas internal, sedangkan perilaku yang disebabkan kekuatan eksternal dikatakan untuk mewakili kausalitas eksternal (Liliweri, 1997). Kemudian dijelaskan efek imbalan ekstrinsik pada motivasi intrinsik dan dalam melakukannya, mencoba untuk menumpahkan beberapa lampu pada arti motivasi intrinsik. Perilaku intrinsik termotivasi jatuh ke dalam dua kategori, yaitu: a) meliputi perilaku yang individu terlibat dalam mencari situasi yang menantang. Tantangan-tantangan ini merupakan keganjilan antara stimuli dan standar perbandingan; b) mencakup perilaku yang bertujuan mengurangi keganjilan ini, yaitu mengatasi tantangan.

Selain itu, pemahaman motivasi intrinsik yang ditawarkan oleh Katz dan Kahn dalam Liliweri (1997), mereka berpendapat bahwa dasar motivasi dapat dikategorikan dalam hal kepatuhan hukum, penghargaan eksternal, yaitu, kepuasan instrumental dan motivasi diinternalisasi. Dalam hal ini, motivasi diinternalisasikan lebih lanjut dipecah menjadi ekspresi diri, yang berasal langsung dari peran kinerja dan nilai-nilai diinternalisasi, sehingga ketika organisasi menjadi tujuan dimasukkan ke dalam sistem nilai individu. Etzioni (1975), menjelaskan bahwa organisasi mendorong keterlibatan dari anggota mereka oleh salah satu dari tiga cara: alienatif, kalkulatif, atau moral. Ada dua macam keterlibatan moral murni dan sosial. Keterlibatan moral yang murni adalah hasil internalisasi norma-norma, sedangkan hasil keterlibatan sosial dari kepekaan terhadap tekanan kelompok-kelompok primer dan anggota organisasi. Keterlibatan moral tidak didasarkan pada kepuasan yang diharapkan dari kebutuhan dan bahkan dapat menuntut penolakan kepuasan kebutuhan dan pengorbanan kesenangan pribadi. Konsekuensi bertindak

sejalan dengan nilai-nilai diinternalisasi seseorang bukanlah rasa kesenangan atau pemenuhan kebutuhan, melainkan rasa penegasan dicapai ketika orang mematuhi dengan komitmen moralnya.

Dalam penelitian ini kemandirian dan keberlanjutan organisasi dapat dilihat dari perspektif scopt, yaitu 'Aisyiyah dilihat sudut sistem, terdiri dari unit-unit (amal usaha) yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, dan kemasyarakatan. 'Aisyiyah ditinjau dari aspek kontigensinya, yaitu hubungan 'Aisyiyah dengan Muhammadiyah di satu sisi, dan hubungan 'Aisyiyah dengan pengurus dan anggota di sisi lain. Di samping itu, bagaimana model pembinaan dan pengkaderan para anggota organisasi seiring dengan perubahan dan perkembangan organisasi yang semakin kompleks dan beragam.

Munculnya istilah baru yaitu "Filantropi", yang secara garis besar telah dijelaskan terdahulu mengingatkan kembali nilai-nilai sosial dalam pembangunan, yaitu nilai-nilai kedermawanan dan kesetiakawanan yang dirangkai dalam istilah asing yang lebih familiar. Kata *philanthropy* yang berasal dari bahasa Yunani dengan makna *phillen* yang berarti mencintai (*to love*) dan *anthropos* (manusia, *human kind*), sehingga *philanthropy* dapat diartikan sebagai ungkapan cinta kasih kepada sesama manusia. Karena itu kata kedermawanan, kesetiakawanan dan Filantropi memiliki esensi yang sama.

Philanthropy didefinisikan sebagai cara membantu sesama dimana "saling memberi perhatian dan saling membagi" adalah esensi utamanya (Seregar dalam Irdam, 2006). Tujuan itu dicapai melalui pengembangan perhatian dan kepekaan pada

orang lain, membuat orang peduli pada kebutuhan sesamanya di dalam suatu komunitas, mewujudkan perhatian dan kepedulian melalui tindakan berusaha menjawab kebutuhan mereka. *Philanthropy* dapat ditempatkan sebagai sebuah proses, di mana ada tindakan (*action*) memberi bantuan uang berupa atau bentuk lain kepada seseorang secara sukarela tanpa unsur paksaan, tekanan (*volunteerism*). Kesukarelaan dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang memberi manfaat bagi orang lain. Kepedulian dan kamauan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berderma kepada lembaga nir laba akan memberi banyak manfaat keberlanjutan misi dan program organisasi.

Keinginan seseorang atau masyarakat berderma, bermurah hati untuk berbagi pada seseorang, kelompok dan organisasi (masyarakat) sangat dipengaruhi oleh citra atau pandangan yang melekat di dalam lembaga tersebut. Orang tidak akan mau berderma apabila melihat bahwa dana yang diberikannya tidak sampai pada apa yang telah diniatkan. Selain itu, bantuan yang diberikan harus dikelola *se arif* mungkin berdaya guna terhadap sasaran yang diinginkan si penderma. Sebenarnya potensi masyarakat Indonesia untuk berderma cukup besar seperti halnya umat Islam, potensi umat Islam untuk zakat, infak dan sedekah (ZIS) mencapai 3 (tiga) trilyun setiap tahunnya (Mustafa E Nasution, 2001).

Mencermati uraian di atas dapat dijelaskan bahwa, dana tersebut cukup mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Tetapi pengelolaan ZIS tersebut jauh dari harapan. Persoalan yang mengemuka seputar pengelolaan dana kedermawanan sosial (Filantropi) tersebut, adalah image masyarakat yang muncul bahwa lembaga

pengelolaannya belum profesional, kredible dan transparan. Akhir-akhir ini keberadaan lembaga nir laba (ORNOP) mendapat sorotan dan penilaian oleh berbagai komponen masyarakat terhadap aktivitas yang dikerjakan. Pada awalnya masyarakat dan pelaku pembangunan memandang bahwa lembaga nir laba memiliki idealisme, integritas dan dedikasi yang tinggi di dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun citra baik tersebut dirusak dan diganggu oleh tindakan para aktivis dan pegiat lembaga nir-laba yang hanya ingin mendapatkan keuntungan sesaat (intans) dengan mengorbankan prinsip *kepatutan sosial* dan *hukum* (Budiyanto, 2007).

Belajar dari beberapa kasus penyimpangan pengelolaan dana yang melibatkan anggota KPU (Muliana W Kusuma) dan pengelolaan bantuan kemanusiaan Tsunami oleh ORNOP GOA (Fariq Faqih), telah mencoreng lembaga nir laba lainnya. Sedangkan di tingkat daerah (lokal) juga terjadi hal serupa dan konflik internal yang membuat citra dan kesungguhan hati lembaga nir laba dalam memperjuangkan kepentingan kaum marjinal dipertanyakan oleh masyarakat. Kondisi diatas jelas akan menyulitkan para pegiat ORNOP, yang memiliki niat kesungguhan hati memperjuangkan dan mengangkat harkat martabat kaum marjinal sulit masuk karena image (*Streo type*) terhadap tindakan-tindakan tabu yang semestinya tidak perlu terjadi. Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki para pegiat ORNOP, mustahil akan dapat menggalang dana kedermawanan sosial (Filantropi) masyarakat yang sesungguhnya memiliki tradisi berderma yang kuat.

Keberlanjutan sebuah lembaga sangat dipengaruhi oleh tersedia sumber dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan operasional dan program yang dirancang. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada satupun lembaga yang dapat bertahan menjalankan aktifitas dan programnya bila tidak didukung oleh sumber dana yang kuat. Disadari bahwa masalah yang amat pelik bagi sebagian besar ORNOP, adalah ketersediaan dana dalam menjalankan programnya. Seringterjadi ORNOP hilang begitu saja (*matisuri*) ketika lembaga donor luar negeri menghentikan bantuan.

Penggalangan dana(*fundraising*) melalui filantropi masyarakat merupakan solusi dalam mengatasi krisis keuangan di lembaga nir-laba ORNOP selain mengefektifkan *fundraising* unit-unit usaha yang dimiliki. Karena itu, para pegiat ORNOP perlu mensiasati upaya menggalang dana melalui filantropi masyarakat, sehingga ketergantungan pada lembaga donor luar negeri menjadi berkurang. Paling ada 4 strategi menggalang dana filantropi masyarakat yang dapat di terapkan pada lembag nir-laba:

1. Membangun *community Awareness* melalui media komunikasi dengan memberikan beberapa contoh, yaitu *best practice* filantropy yang telah mengubah kehidupan seseorang atau kelompok masyarakat dari kondisi yang memprihatinkan (sengsara) kearah hidup yang lebih baik (lebih manusiawi). Cara ini dipandang cukup efektif dalam mengugah dan menyadarkan masyarakat yang memiliki kemampuan berderma.
2. Membangun citra lembaga melalui peningkatan sumber daya manusia dan pengelolaan dana yang dapat dipertanggungjawaban, transparan, *accountable* serta

dana filantropi berdaya guna bagi penerima manfaat (*beneficiaries*). Masyarakat yang sudah berderma akan merasa puas dan berkesan bahwa niat untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung sudah tercapai.

3. Membangun konsistensi sebagai lembaga yang indenpenden, objektif, netralitas, serta profesional dalam menjalankan program-programnya. Biasanya sipenderma (masyarakat) akan melihat lembaga konsistensi dalam menjalankan visi dan misi, lembaga yang latah dengan berbagai kegiatan akan ditinggalkan masyarakat karena dianggap *opportunities*.

Keberlanjutan organisasi sosial masyarakat sipil ORNOP sangat bergantung dengan sumber dana yang dimiliki dalam menjalan visi dan misinya. Salah satu sumber domestik tersebut ialah dana kedermawanan sosial (filanmtropi) masyarakat, karena pada prinsipnya tradisi berderma amat kental dalam praktek setiap agama yang ada di Indonesia. Namun, upaya unuk mencapai sasaran perlu ditempuh dengan strategi yang telah dijelaskan di atas. Ada 2 (dua) tipe atau jenis manusia ,yaitu :

- a. Idealis ideologis, adalah para kader dan anggota yang senantiasa memegang teguh cita-cita ideal awal gerakan.Pikiran dan tindakannya mengarah pada bagaimana cara terwujudnya cita-cita gerakan.
- b. Pragmatis oportunis, mereka adalah para kader dan anggota yang memanfaatkan potensi organisasi hanya untuk memenuhi kemauan pribadinya (hawa nafsunya sendiri). Segala pikiran dan tindakan tertuju pada hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kehendak dan hawa nafsunya sendiri.

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah organisasi pergerakan dakwah amal makruf nahi munkar, di basis inipun tidak lepas dari kedua hal tersebut. Pelajar sebagai basis masanya tentu memiliki potensi yang sangat besar bagi kedua tipe orang di atas. Bagi orang tipe pertama basis masa yang besar tersebut memiliki potensi bagi keberlanjutan eksistensi gerakan dan penerus cita-cita ideal sang pendiri induk gerakan yang kini tengah difilmkan oleh Hanung Bramantyo dengan judul Sang Pencerah. Bagi orang tipe kedua basis masa yang besar tersebut bisa ia jadikan sebagai basis masa mengambang dalam meraih kehendak pribadinya. Ada kalanya basis masa tersebut, hanyalah ia jadikan sebagai pasar potensial bagi bisnisnya dengan melupakan proses internalisasi nilai-nilai dan cita-cita gerakan.

Setiap kader dan anggota tentunya mendambakan terwujudnya cita-cita gerakan, yaitu terwujudnya pelajar yang berakhlak mulia, terampil, dan berilmu sebagai manifestasi cita-cita terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-beanarnya di kalangan pelajar. Hal ini belaku juga bagi Muhammadiyah sebagai induk gerakan yang bercita-cita terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Adanya mereka-mereka yang bertipe pragmatis oportunistis tanpa sadar mereka telah mendekonstruksi makna dan nilai-nilai tujuan atau cita-cita pergerakan dan persyarikatan. Akibatnya dari masa ke masa yang terjadi hanya ada penurunan substansi cita-cita pergerakan meskipun secara simbolis (yang terwujud dalam redaksi kata-kata cita-cita gerakan sebagaimana awal berdirinya gerakan) tetap sama sebagaimana awal berdirinya gerakan.

Pembaca tentunya paham kader yang manakah dibutuhkan untuk menunjang terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau masyarakat utama sebagaimana dicita-citakan oleh KH Ahmad Dahlan sang pendiri Muhammadiyah. Sebagai gerakan yang memberdayakan perempuan, NA jangan bersifat sporadis. Kelompok perempuan, biasanya persoalan atau isu yang muncul selama ini masih dilihat sebagai bisul yang muncul kadangkala. Padahal sesungguhnya kiprah warga NA harus dibuat secara berkelanjutan sebagai sebuah gerakan.

Menjadi sebuah organisasi gerakan yang peduli dengan persoalan perempuan dan lingkungannya, warga apalagi pimpinan NA harus melihat isu tidak sekadar sebagai bisul atau luka yang nanti akan hilang meski kapan muncul lagi. Namun isu itu harus dilihat lebih mendasar hingga akar permasalahan sesungguhnya. Hal tersebut dilakukan dalam sosialisasi menjelang Muktamar NA di Makassar, November 2010. Dikatakan bahwa, sebagai perempuan muda Muhammadiyah kader NA hendaknya memiliki bingkai wawasan yang kuat untuk menganalisis persoalan yang dihadapi. Karena dengan bingkai itu akar persoalan dari sebuah permasalahan bisa diurai untuk kemudian dicari solusi atau kebijakannya.

Kehidupan dan pergaulan dunia yang semakin kompleks, pelbagai persoalan yang dihadapi umat khususnya perempuan, menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam kiprah dan gerak dakwah. Fakta di masyarakat ini menuntut dinamika organisasi yang makin cepat, mengingat tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks. Banyak persoalan yang dihadapi perempuan dewasa ini. Menurut penulis

yang membuat kiprah 'Aisyiyah lebih di-break-down sehingga dirasakan membela dan memberdayakan masyarakat bawah.

C. Hubungan 'Aisyiyah dengan Muhammadiyah

Sebelum menjelaskan hubungan Muhammadiyah dengan 'Aisyiyah secara organisasi, terlebih dahulu dikemukakan perbedaan istilah, fungsi dan kedudukan organisasi 'Aisyiyah dan Nasyyiatul 'Aisyiyah (NA) sebagai organisasi otonom yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian dengan tetap mengedepankan gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, yang diamanatkan Persyarikatan Muhammadiyah. Tugas ini dilakukan baik secara kolektif organisasional maupun secara individu oleh personil-personil NA. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa, hubungan Muhammadiyah, 'Aisyiyah dengan Nasyyiatul 'Aisyiyah baik dilihat dari garis komando, fungsional, struktural dan kultural merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

1. Hubungan yang bersifat Koordinasi.

'Aisyiyah dan NA hadir di kalangan Muhammadiyah berkat adanya kesadaran religius yang positif tentang masa depan dan kelangsungan cita-cita Muhammadiyah. Kesadaran ini menjadi wacana organisasi untuk membangun generasi muda Islam untuk tetap eksis dan memegang peran penting dalam perjuangan bangsa. Upaya ini sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang sedang menapaki tahap kebangkitan bangsa di awal abad ke-20.

Kondisi awal abad ke-20 bangsa Indonesia dihadapkan adanya upaya mempersatukan visi anak bangsa. Kondisi ini telah dibaca para pemuka Muhammadiyah. Siswa Praja Wanita yang merupakan embrio NA merupakan wadah dan wahana untuk menjalin persatuan di antara anak bangsa. Nilai-nilai kejuangan dan kebersamaan selalu ditanamkan kepada mereka sejak dini. Ukhuwah Islamiyah diimplentasikan dalam kehidupan berbangsa agar jalinan persatuan lebih erat, di samping kesamaan dalam penderitaan yang juga menjadi tali pemersatu. Dengan demikian hubungan Muhammadiyah dengan 'Aisyiyah serta hubungan 'Aisyiyah dengan NA, merupakan hubungan komando atau koordinasi, karena melalui kedua ortom ini Muhammadiyah berusaha menanamkan dan mensosialisasikan gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar; memberantas Tahayul, Bid'ah, dan Churafat (TBC); dan membangun akhlakul karimah di kalangan perempuan (kaum ibu-ibu Muhammadiyah) dan generasi muda putri Islam.

2. Hubungan yang bersifat Struktural.

Perkembangan yang lebih positif terjadi tahun 1966, ketika posisi organisasi NA ditingkatkan lagi menjadi organisasi otonom yang struktur organisasinya berjenjang mulai dari Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting melalui Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 1/1966 (PP 'Aisyiyah: 48). Pokok-pokok kedudukan organisasi NA sebagai organisasi otonom dalam Muhammadiyah, adalah: (1) Mempunyai wewenang penuh mengelola, membina, dan mengembangkan organisasi; (2) Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah di bawah PP Muhammadiyah; (3)

Setiap jenjang organisasi terdapat hubungan konsultatif dengan pimpinan organisasi yang setingkat, dalam hal pendirian organisasi, pemilihan pimpinan, dan keputusan musyawarah; (4) Organisasi 'Aisyiyah berwenang mengadakan hubungan/ kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi luar. Bentuk hubungan dengan instansi/lembaga dari luar negeri atas persetujuan persyarikatan (PP Muhammadiyah); (5) Dalam bidang hukum yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah (PP 'Aisyiyah : 51).

Fakta menunjukkan bahwa NA merupakan kader utama 'Aisyiyah. 'Aisyiyah sebagai ibu kandung NA turut bertanggung jawab membina dan membimbing NA (SK Muhammadiyah No. 3/1987 dan Keputusan Munas NA II, 1995), melalui dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Sedang bagi Muhammadiyah, NA merupakan kader yang akan meneruskan dan mengembangkan gerakan Islam dan gerakan dakwah. Karena itu, Muhammadiyah berkewajiban untuk memberikan bekal agama yang cukup kepada kader NA, menentukan arah pembinaan, membekali kemuhammadiyahannya, ilmu dan ketrampilan.

Hubungan 'Aisyiyah dengan NA dalam Muhammadiyah mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai ortom Muhammadiyah. Artinya 'Aisyiyah dan NA mempunyai tugas yang sama, yaitu berusaha mengembangkan serta menghidupkan cita-cita Muhammadiyah, hanya bidang garapannya yang berbeda. NA mempunyai bidang sasaran pada generasi muda wanita untuk dibina agar menjadi pelopor, pelangsunng, penyempurna, pembaharu usaha dan cita-cita Muhammadiyah. Meskipun antara 'Aisyiyah dan NA memiliki status yang sama di

Muhammadiyah, namun secara informal 'Aisyiyah mempunyai posisi lebih tinggi ketimbang NA. secara struktural 'Aisyiyah di bawah koordinasi Muhammadiyah, serta NA di bawah koordinasi 'Aisyiyah.

Sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang pembinaan generasi muda wanita Islam, NA mempunyai struktur organisasi yang sama dengan Muhammadiyah, yaitu mulai dari ranting bertempat di kalurahan/desa, cabang pada tingkat kecamatan, daerah yang bertempat di kabupaten/kota, wilayah untuk tingkat propinsi, dan tingkat pusat (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nasyyiatul 'Aisyiyah, 1996). Struktur ini telah mengacu pada susunan dan struktur Persyarikatan Muhammadiyah, seperti yang tertuang pada Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 15 ayat 2, dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 18 ayat 6. Untuk struktur organisasi Nasyyiatul 'Aisyiyah, menurut Anggaran Dasar Nasyyiatul 'Aisyiyah pasal 14 dinyatakan bahwa Pimpinan Pusat/Pimpinan Wilayah/ Pimpinan Daerah NA membentuk Departemen sebagai badan pembantu pimpinan (ayat 1). Dan Pimpinan Cabang/Pimpinan Ranting membentuk Seksi-seksi sebagai pembantu untuk melaksanakan dan memelihara usaha-usaha organisasi (ayat 2).

3. Hubungan yang bersifat Fungsional.

Secara fungsional kebangkitan bangsa Indonesia merupakan modal utama untuk lebih mengefektifkan perjuangan secara organisasional dan menyeluruh. Demi kepentingan bangsa, segala atribut kepentingan pribadi dan golongan dikorbankan

untuk membangun kebersamaan dan kejuangan yang bersatu untuk mengusir kemunkaran. Keberadaan 'Aisyiyah dan NA yang dimulai dari proses perintisan hingga menjadi ortom Muhammadiyah tidak terlepas dari peran aktif tokoh 'Aisyiyah. Berjuang untuk mengangkat NA sebagai ortom yang membina generasi muda putri Muhammadiyah (Islam) melalui proses panjang. Proses pendewasaan NA hingga dipercaya untuk mengelola rumah tangganya sendiri mengalami tiga tahap, yaitu: tahap perintisan, pembinaan, tahap otonomi. Masing-masing tahap memiliki jati diri yang berbeda-beda, sesuai dengan usia, tingkat kedewasaan, dan tantangan zaman.

Atas dasar realitas seperti itu, anggota siswa praja wanita semakin banyak, anggotanya berasal dari berbagai daerah. Kedatangan siswa praja wanita dari berbagai daerah sangat membantu penyebarluasan (*publication effect*) dari keberadaan perkumpulan ini. Setiap anggota siswa praja wanita yang pulang ke daerahnya, diwajibkan kepada mereka untuk mengamalkan dan menyebarluaskan kemampuan dan ketrampilan teknis yang dimiliki kepada remaja putri di kampungnya.

Pada masa kepemimpinan Siti Buchainah, telah dilakukan kegiatan-kegiatan: shalat Jum,at secara jamaah, peningkatan dakwah melalui kampung-kampung, dakwah luar kota, kursus administrasi. Setiap dakwah ke kampung-kampung dan ke luar kota, NA senantiasa membawa induk organisasinya, yaitu Muhammadiyah untuk mengenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat luas, dan untuk mengenalkan

posisi Nasyiatul 'Aisyiyah dalam Muhammadiyah yang turut bertanggung jawab mengemban misi Muhammadiyah di bidang keputrian generasi muda.

4. Hubungan yang bersifat Kultural.

Kesadaran sosio-kultural para pemuka Muhammadiyah ini disadari sebagai fenomena masyarakat Indonesia, terutama di Jawa cenderung memelihara TBC. Marginalisasi ajaran Islam ini dikarenakan oleh proses akulturasi Islam dengan budaya setempat yang tidak segera direformasi. Akibatnya tata kehidupan dan sendi-sendi religius masyarakat tidak menampilkan ciri kehidupan yang Islami. Amar ma'ruf nahi munkar dan ukhuwah Islmiah telah menjadi senjata yang ampuh untuk membangun emosi kesatuan anak bangsa dalam rangka mengusir penjajah.

Sejak tahun 1924 segala macam urusan dan keorganisasian siswa praja wanita menjadi tanggung jawab 'Aisyiyah. Untuk mengaktifkannya, 'Aisyiyah melakukan beberapa terobosan, misalnya pada tahun 1925 Siswa Praja Wanita dibelikan sebuah rumah sebagai pusat kegiatan; pada tahun 1926 aktivitas Siswa Praja Wanita dimuat di Suara 'Aisyiyah. Terobosan ini merupakan upaya mengangkat eksistensi Siswa Praja Wanita mendapat sambutan positif. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak Siswa Praja Wanita, dan dibuka cabang-cabang baru di beberapa daerah.

Sehubungan telah semakin melebarnya sayap Siswa Praja Wanita, maka pada kongres ke-18 telah disepakati bahwa setiap cabang 'Aisyiyah harus mendirikan Siswa Praja Wanita. Hal ini merupakan upaya untuk meligitimasi posisi dan peran Siswa Praja Wanita di dalam wadah 'Aisyiyah. Sesuai hasil kongres Muhammadiyah

ke-20 tahun 1929 di Yogyakarta diputuskan bahwa semua gerakan di dalam tubuh Muhammadiyah harus memakai istilah dalam bahasan Arab, maka Siswa Praja Wanita mengubah diri menjadi NA. Nama baru yang disandang NA tidaklah mengubah visi dan misi gerakannya, karena yang berubah hanyalah baju, sedang wadah dan isinya tetap sama.

Proses otonomi NA dimulai pada Mukhtamar 'Aisyiyah di Palembang tahun 1956, dimana NA dimunculkan suatu pemikiran bahwa NA sebaiknya diberi hak otonom untuk mengelola, memenej, dan membentuk jati dirinya. Prasaran dari Dra.Baroroh Baried ini belum mendapat respon yang serius. Kemudian Mukhtamar 'Aisyiyah pada tahun 1959 di Yogyakarta, Bagian NA yang dipegang oleh Zuhra Daris belum juga diberi hak otonom. Ketika itu NA hanya diberi keleluasaan oleh PP. 'Aisyiyah untuk mengembangkan kegiatannya. Kesempatan ini dimanfaatkan NA mengembangkan diri guna menuju kedewasaannya. Iktikad ini disambut baik oleh PP. 'Aisyiyah dengan dibuktikan oleh diberinya kesempatan bermusyawaran sendiri.

Program pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan setiap Mukhtamar jika terdapat kekurangan dalam periode yang satu, maka akan mewarnai pada periode selanjutnya. Pelaksanaan program jangka panjang ini bersifat akumulatif (menumpuk), namun frekunsinya akan semakin berkurang. Dan yang menjadi stressing program adalah prioritas program pada masing-masing periode. Adapun yang dimaksud program jangka pendek NA yaitu program yang dilaksanakan untuk satu periode dengan memprioritaskan program-program yang dicanangkan dalam program jangka panjang.

Perkembangan IPTEK dan perubahan yang semakin pesat, di satu sisi telah mempermudah kiprah manusia dalam memahami dan menguasai dunia. Namun di sisi lain, perkembangan itu telah merusak sendi-sendi peradaban manusia dan tatanan moral bangsa. Budaya primordial dan hedonistis seakan menjadi idola kehidupan. Batas ruang dan waktu tidak lagi menjadi penghalang. Pada saat yang sama, berbagai macam bentuk budaya menyebar ke segala penjuru dunia.

Kondisi ini perlu adanya kendali moral agar bangsa Indonesia tetap pada bingkai budayanya. Upaya ini hanya bisa dilakukan melalui moral dan akhlak agama dalam kehidupan sehari-hari dengan pembentukan sikap dan perilaku yang baik. Inilah dasar pijakan NA menyusun Matan Kepribadian. Perjuangan ini memerlukan waktu yang panjang, tidak dibatasi oleh umur manusia. Untuk itu diperlukan generasi penerus yang memahami cita-cita NA. Penyempurnaan matan Kepribadian NA mutlak diperlukan.

Kepribadian NA merupakan cermin akhlakul karimah yang didasari AD/ART NA. Kepribadian yang dimilikinya tidak sekedar ruh organisasi, tetapi kepribadian itu juga melekat pada segenap anggotanya. Karena itu, kepribadian NA merupakan keseluruhan jiwa raga yang dimiliki oleh setiap anggota NA, baik sebagai kader umat, kader organisasi, dan kader bangsa, yang dimanifestasikan dalam sikap dan perilakunya. Demikian sikap dan perilaku anggota NA tidak sekedar membangun citra dan cita-cita saja, tapi harus mampu membangun moralitas bangsa. Upaya NA ini sangat berarti bagi bangsa Indonesia untuk membangun moralitas bangsa ini.

Kemajuan IPTEK harus dimanfaatkan untuk kemajuan NA di dalam bermain dakwah. Artinya, NA secara bijak harus bersatu dengan IPTEK, dan IPTEK dimanfaatkan untuk sarana dakwah secara ilmiah. Globalisasi informasi sangat membantu penyebaran informasi keagamaan (dakwah bil-lisan) lewat media masa. Derasnya informasi dapat menambah khasanah pemberdayaan sumber daya putri Islam. Di pihak lain, NA dituntut untuk melakukan dakwah interaktif - dialogis di dalam mensikapi proses pergeseran nilai. Menurut Amin Abdullah pada Muktamar NA 1995 di Aceh, "NA perlu terlibat dalam mengenal seluk beluk dan memahami berbagai persoalan moralitas kontemporer.

Persoalan KDRT, tidak mudah membongkar pemahaman karena masih banyak yang menggunakan dalil-dalil agama yang tekstual, tidak kontekstual. 'Aisyiyah selama ini sudah memberikan banyak penyuluhan, jika kemudian laporan bahwa dari waktu ke waktu angka KDRT meningkat, berarti memang ada pemahaman masyarakat bahwa kekerasan itu ada dan kini disadari sebagai sebuah "KDRT". Fakta tersebut merupakan 'PR' besar bagi organisasi perempuan termasuk 'Aisyiyah. Oleh karena itu, masalah ini harus menjadi prioritas perjuangan pergerakan, dan harus diakui bukan hanya menjadi persoalan masyarakat kelas bawah namun juga elite yang ada terutama elite politik.

Sidang Tanwir 'Aisyiyah, sesuai dengan regulasi Organisasi yang berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, merupakan permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar dan menjadi forum permusyawaratan dari Pimpinan

Teras Organisasi yang bersifat nasional. Dalam periode 2005 – 2010. Sidang Tanwir kali ini adalah Sidang Tanwir yang ketiga, Sidang Tanwir yang mempersiapkan persidangan Mukhtamar 'Aisyiyah yang ke-46 yang telah berlangsung di Yogyakarta, tanggal 3 – 8 Juli 2010. Sidang Tanwir ini menjadi forum yang fungsional dan potensial bagi materi dan pembicaraan dalam Sidang Mukhtamar tersebut.

Mukhtamar merupakan ajang tertinggi untuk menentukan kebijakan, strategi, dan langkah konkret gerakan 'Aisyiyah pada periode kerja lima tahun. Mencermati situasi ummat, masyarakat, dan bangsa seperti yang terungkap di atas, situasi dengan krisis kehidupan yang multikompleks, permusyawaratan organisasi yang tertinggi ini menjadi penting. Materi persoalan sebagai bahan mencetak program organisasi perlu mendapat perhatian, penyiapan dan pencermatan untuk merancang program yang kondusif dan aplikatif. Perhatian, pencermatan, dan penyiapan dilakukan dengan berbagai cara yang efektif.

Mengingat pentingnya Sidang Tanwir sebagai forum persiapan Sidang Mukhtamar ke-46, materi pembicaraan dipersiapkan lebih dahulu melalui berbagai kegiatan, antara lain kegiatan yang berupa *Round Table Discussion-Round Table Discussion* dan menghadirkan para narasumber dalam berbagai bidang yang terkait, sesuai dengan bidang kegiatan 'Aisyiyah. Alhamdulillah *Round Tabel Discussion* tersebut telah berhasil menampung isu, pandangan, saran, dan menyiapkan strategi pemecahan serta langkah konkretnya, yang semuanya akan disajikan dalam Sidang Tanwir ini. Selain pembicaraan tentang topik-topik yang ditunjuk oleh regulasi Organisasi, seperti, laporan, peninjauan Anggaran Dasar, dan pemilihan dan

penetapan Anggota dan Ketua Umum Pimpinan Pusatnya, persoalan yang terkait dengan fenomena dalam masyarakat bangsa kita menjadi perhatian utama.

Selain *Round Tabel Discussion*, sejumlah rangkaian kegiatan pun dilaksanakan dengan tema kegiatan yang mendukung, yaitu Rapat Akbar dengan mengambil tema yang diangkat dari situasi masyarakat bangsa yang marak dengan kekerasan, kekerasan yang mendera para warga masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak. Meskipun Undang-undang yang terkait telah diterbitkan tampaknya, regulasi itu belum mampu menyaingi kekerasan yang tetap berlangsung, bahkan mengalami eskalasi.

Menghadapi fenomena tersebut ‘Aisyiyah memandang perlu untuk ‘menyaingi’nya dengan mengangkatnya dalam Rapat Akbar, forum yang dengan citra ke’akbar’annya dan dengan besarnya jumlah partisipannya, adanya dan berkembangnya bencana masyarakat ini dapat dihilangkan, sekurang-kurangnya dieliminasi. Demikianlah Rapat Akbar mengambil tema ‘nirkekerasan’, kehidupan masyarakat tanpa kekerasan. Rangkaian kegiatan yang mengiringi Mukhtamar ‘Aisyiyah ke-46 ini dilahirkan oleh kepentingan bangsa dalam tataran global yang digariskan dalam rancangan menciptakan masyarakat baha-gia dalam lingkup global yang dikenal dengan MDGs.

Menghadapi program di atas, ‘Aisyiyah menyelenggarakan seminar internasional yang diikuti oleh para peserta dan pengamat baik dari dalam maupun dari luar negeri. Topik utama seminar diangkat dari fenomena kunci MDGs, yaitu bidang ekonomi. Hakikatnya, ekonomi yang dipandang mampu untuk mencapai

MDGs. Program dunia yang diharapkan dapat tercapai tahun 2015 itu, dievaluasinya bulan September 2010. Seminar mengajak para pemerhati baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendiskusikan, membahas strateginya, dan merancang langkahnya, bagi pencapaian MDGs khususnya, di Indonesia dapat sesuai dengan jadwal yang telah digariskan. Seminar itu menampilkan pembicara baik tingkat nasional maupun internasional.

Rangkaian kegiatan yang lain berupa bazar dan pameran yang menampilkan produk dari kegiatan Organisasi, produk amal usahanya, hasil kerjanya, bahkan proses kerja yang dapat diikuti dengan teknologi yang relatif canggih. Hal itu sejalan dengan program Organisasi yang memotivasi, menggerakkan jiwa dan semangat independensi para warga masyarakat dalam menjalani kehidupan. Kemandirian menjadi topik utama bagi penyelamatan bangsa. Mencermati isu-isu tersebut, 'Aisyiyah terus meningkatkan daya tampilnya dalam peran kebangsaan. Di samping itu, yang menjadi dasar gerakan persoalan sosiologis, ekonomis, pendidikan, kesehatan, keadilan, hukum, dan lingkungan seperti dikemukakan di atas dihadapi oleh 'Aisyiyah dengan semangat iman yang diperoleh melalui cinta tanah air. Sebagai pelaku perempuan gerakan Muhammadiyah, sikap, semangat, dan gerak langkah 'Aisyiyah diarahkan oleh ideologi yang digariskan Muhammadiyah, yaitu ideologi yang dijiwai oleh Islam yang *rachmatan li'l-'alamin* dan yang bersemangat *tajdid*.

Rancangan pemikiran yang dibawakan dalam Sidang Tanwir ialah langkah konkret telah digariskan, yaitu mengefektifkan gerak langkah dengan menjalin kemitraan, baik dengan instansi pemerintah maupun institusi non pemerintah. Dalam

Muktamar 'Aisyiyah ke-46, telah diadakan peresmian kerjasama dengan pihak pemerintah dalam bentuk penanda tangan nota kesepahaman (MOU) yang menggariskan langkah konkret program. Terkait dengan kemitraan dengan pemerintah, kerjasama dalam bidang hukum dan HAM perlu dilakukan dan dikonkretkan dalam bentuk kegiatan yang konkret pula.

Situasi masyarakat yang memperlihatkan gejala kriminalitas yang makin tinggi yang berakibat pada berjejalnya penghuni lapas. Situasi ini membuka suatu kebutuhan bagi kehidupan mental spiritual dan perhatian terhadap kondisi kesehatannya. 'Aisyiyah memandang bahwa kehidupan sebagai orang yang sedang dalam konsinyasi lapas memerlukan siraman rohani bagi kehidupan mental spiritualnya, dan pelayanan kesehatan bagi kondisi fisiknya. Dua kepentingan tersebut diharapkan menghindarkan lapas sebagai ajang peningkatan ketrampilan kriminalitas, ajar penyubur penyakit. Penanganan kedua hal tersebut, akan menghilangkan sekurang-kurangnya mengurangi dampak yang berakibat pada bencana masyarakat luas. Untuk itulah MOU ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.

Bencana nasional berupa rusaknya lingkungan yang selama ini menjarah wilayah tanah air, telah menjadi program 'Aisyiyah untuk tetap menjadi perhatian. Pada tanggal 5 Juli 2007, 'Aisyiyah seluruh Indonesia telah melakukan gerakan nasional penanaman pohon dengan tekad HIJAU BUMIKU LESTARI ALAMKU, maka dalam event Muktamar, tekad tersebut lebih dikonkretkan dengan gerakan massal nasional penanaman pohon. Gerakan massal nasional penanaman

pohon di event Mukhtar merupakan peningkatan perhatian atas meluasnya kepedulian lingkungan. Peningkatan ini sejalan dengan jumlah pohon yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu apabila program semula 'satu juta pohon' pada periode ini ditingkatkan menjadi 'satu miliar pohon'.

Mukhtar Aisyiyah selama ini diselenggarakan bersamaan dengan Mukhtar Muhammadiyah, baik waktu maupun tempat berlangsungnya Mukhtar. Tentu penyelenggaraan yang demikian mengandung untung dan rugi bagi perjuangan perempuan Muhammadiyah. Di pandang dari segi penyelenggaraan, sangat menguntungkan karena Aisyiyah tinggal mempersiapkan materi yang akan dibahas dalam Mukhtar sedangkan mengenai tempat penyelenggaraan dan fasilitas lain cukup diurus oleh panitia bentukan Muhammadiyah. Dari segi kepentingan perempuan Muhammadiyah, Aisyiyah kurang bisa memperjuangkan kepentingan tersebut dalam Mukhtar Persyarikatan.

Timbul pemikiran untuk menyelenggarakan Mukhtar tersendiri secara terpisah di kemudian hari. Paling tidak lontaran pemikiran ini timbul dari pucuk pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiyah. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa, pemisahan penyelenggaraan Mukhtar tersebut selain akan menambah kemandirian Aisyiyah, juga maksimal dalam memperjuangkan kepentingan perempuan Muhammadiyah. Lebih lanjut Menurut Ketua Aisyiyah Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah Soeratno, menegaskan bahwa perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah dari aspek perempuan yang tertuang dalam keputusan Mukhtar kurang optimal, karena ketetapan organisasi yang dilakukan Aisyiyah

dimusyawarahkan dalam waktu yang bersamaan dengan waktu memusyawaratkan garis-garis perjuangan yang menjadi dasar, dan strategi Muhammadiyah.

Akibatnya, keputusan berupa hasil musyawarah Persyarikatan Muhammadiyah dari segi keperempuan tersebut diambil tidak dari garis-garis kebijaksanaan yang dilahirkan permusyawaratan yang dilakukan Aisyiah Keberadaan wakil Aisyiyah di Muktamar Muhammadiyah yang diselenggarakan dalam waktu bersamaan dengan Muktamar Aisyiyah juga tidak akan mengakomodasi keberhasilan penyelenggaraan perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah oleh Aisyiyah. Beberapa pertimbangan lain tentang Muktamar yang terpisah ini adalah sebagai berikut:

- a. Aisyiyah merupakan komponen Persyarikatan Muhammadiyah dan berfungsi menyelenggarakan perjuangan Persyarikatan dalam aspek kewanita.
- b. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pergerakan yang berjuang menciptakan masyarakat utama juga memerlukan Aisyiyah. Ini karena jumlah sasaran perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah berupa masyarakat perempuan lebih dari 50 persen.
- c. Perkembangan dan kemajuan yang dicapai pada sasaran perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah yang berupa perempuan menuntut perkembangan, kemajuan, perhatian dan penanganan terhadap program Persyarikatan Muhammadiyah dari sisi kiprah sasaran perjuangan wanita.
- d. Muktamar Muhammadiyah merupakan forum tertinggi Organisasi di dalam Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk organisasi otonom, yang

memusyawarahkan garis-garis kebijaksanaan perjuangan yang menjadi dasar perjuangan komponen yang lain, termasuk Aisyiyah.

- e. Gerakan Aisyiyah sebagai pelaksana kebijakan di lapangan perlu menyesuaikan gerakan dengan garis-garis perjuangan. Persyarikatan Muhammadiyah, adalah forum yang memusyawarahkan perjuangan Aisyiyah. Hal ini berarti bahwa forum yang membicarakan perjuangan Aisyiyah perlu diatur dengan memperhatikan waktu penyelenggaraan, Dengan demikian, Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyiyah merupakan forum yang memusyawarahkan kegiatan yang memiliki porsi yang besar bagi keberhasilan perjuangan.

Pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa, timbulnya kesadaran sosio-kultural para pemuka Muhammadiyah ini didasari oleh fenomena masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, yang cenderung memelihara TBC. Marginalisasi ajaran Islam ini dikarenakan oleh proses akulturasi Islam dengan budaya setempat yang tidak segera direformasi. Akibatnya tata kehidupan dan sendi-sendi religius masyarakat tidak menampilkan ciri kehidupan yang Islami. Amar ma'ruf nahi munkar dan ukhuwah Islmiyah telah menjadi senjata yang ampuh untuk membangun emosi kesatuan anak bangsa dalam rangka mengusir penjajah. Kebangkitan bangsa Indonesia merupakan modal utama untuk lebih mengefektifkan perjuangan secara organisasional dan menyeluruh. Demi kepentingan bangsa, segala atribut kepentingan pribadi dan golongan dikorbankan untuk membangun kebersamaan dan kejuangan yang bersatu untuk mengusir kemunkaran.

Keberadaan NA yang dimulai dari proses perintisan hingga menjadi organisasi otonom Muhammadiyah tidak terlepas dari peran tokoh NA. Mereka berjuang untuk mengangkat NA sebagai salah satu organisasi yang membina generasi muda putri Islam. Proses pendewasaan NA hingga dipercaya untuk mengelola rumah tangganya sendiri mengalami proses tiga tahap, yaitu: tahap perintisan, tahap pembinaan, dan tahap otonomi.

1. Tahap Perintisan

Embrio NA bermula dari idealisme Somodirdjo yang memikirkan kelangsungan dan masa depan Muhammadiyah. Bahwa kelangsung dan masa depan Muhammadiyah sangatlah bergantung pada upaya pengkaderan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Untuk itu, Riwayat Singkat Nasyyatul 'Aisyiyah dan Khittah Perjuangannya, bermula dari pemikiran ini yang kemudian mendapat bantuan dari R.H. Hadjid, kepala guru agama di Standart School Muhammadiyah, idealisime Somodirdjo ini kemudian dituangkan ke dalam wadah/diorganisasi yang dinamakan Siswa Praja pada tahun 1919. Wadah ini merupakan organisasi yang menampung remaja putra dan putri Standart School Muhammadiyah.

Mengingat urgensitas perkumpulan ini, maka wadah ini kemudian disebarluaskan ke perbagai cabang dan ranting Muhammadiyah. Perkembangan selanjutnya, tahun 1919 telah diadakan pemisahan antara Siswa Praja Putra dan Siswa Praja Putri. Setelah lima bulan dari pemisahan ini, Siswa Praja Putri

diserahkan kepada Siti Wasilah sebagai Ketua, Umayah sebagai Wakil Ketua, Penulis dan Bendahari dipegang oleh Siti Juhainah dan Siti Zuhriyah. Dengan menggunakan fasilitas tempat Haji Irsjad (Mushola 'Aisyiyah Kauman Yogyakarta sekarang) Siswa Praja Wanita melaksanakan kegiatan-kegiatannya, seperti pengajian, berpidato, jama'ah sholat, mengadakan peringatan hari besar Islam, kegiatan jajan keputrian, dan lain-lain.

Awalnya kegiatan yang dilakukan Siswa Praja Wanita mengalami hambatan yang cukup serius. Para orang tua siswa pada umumnya merasa keberatan untuk melepas putrinya guna mengikuti tambahan pelajaran dan kegiatan keputrian yang diadakan oleh Siswa Praja Wanita. Berkat kesabaran, ketekunan, dan kerja keras pengurus untuk memberikan pengarahan kepada para orang tua, maka akhirnya mereka sadar dan mengerti arti dan manfaat pelajaran tambahan dan kegiatan keputrian. Ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya ketrampilan praktis wanita, wawasan pengetahuannya dan keagamaan para Siswa Praja Wanita. Atas dasar realitas itu, anggota Siswa Praja Wanita semakin hari semakin banyak. Bahkan anggotanya berasal dari berbagai daerah. Kedatangan anggota Siswa Praja Wanita dari berbagai daerah sangat membantu atas penyebarluasan (*publication effect*) dari keberadaan perkumpulan ini. Setiap anggota Siswa Praja Wanita yang pulang ke daerahnya, diwajibkan kepada mereka untuk mengamalkan dan menyebarluaskan kemampuan dan ketrampilan teknisnya kepada remaja putri di kampungnya, merupakan ibadah, penyebaran ini sangat membantu eksistensi dan pengembangan Siswa Praja Wanita di masa datang.

Pada tahun 1924 segala macam urusan dan keorganisasian Siswa Praja Wanita menjadi tanggung jawab 'Aisyiyah. Untuk mengefektifkan Siswa Praja Wanita, 'Aisyiyah melakukan beberapa terobosan, antara lain pada tahun 1925 Siswa Praja Wanita dibelikan sebuah rumah sebagai pusat kegiatan; pada tahun 1926 aktivitas Siswa Praja Wanita dimuat di Suara 'Aisyiyah. Hal ini merupakan upaya mengangkat eksistensi Siswa Praja Wanita yang mendapat sambutan banyak. Ini dibuktikan dengan semakin suburnya anggota Siswa Praja Wanita, dan tumbuhnya cabang-cabang baru di beberapa daerah.

2. Tahap Pembinaan

Sehubungan dengan semakin melebarnya sayap Siswa Praja Wanita, maka pada kongresnya ke-18 telah disepakati bahwa setiap cabang 'Aisyiyah harus mendirikan Siswa Praja Wanita. Ini merupakan upaya untuk meligitimasi posisi dan peran Siswa Praja Wanita di dalam wadah 'Aisyiyah. Sesuai hasil kongres Muhammadiyah ke-20 pada tahun 1929 di Yogyakarta diputuskan bahwa semua gerakan di dalam tubuh Muhammadiyah harus memakai istilah dalam bahasan Arab, maka Siswa Praja Wanita mengubah diri menjadi NA. Nama baru yang disandang NA tidaklah mengubah visi dan misi gerakannya, karena yang berubah hanyalah baju, sedang wadah dan isinya tetap sama. NA baru semakin hari semakin menampakkan kegiatannya. Pada masa era kepemimpinan Siti Buchainah, dilakukan kegiatan-kegiatan shalat Jum'at secara jamaah,

peningkatan dakwah melalui kampung-kampung, dakwah luar kota, kursus administrasi.

Setiap dakwah ke kampung-kampung dan ke luar kota, 'Aisyiyah senantiasa membawa induk organisasinya, yaitu Muhammadiyah. Hal ini bertujuan: (1) Mengenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat luas; (2) Mengenalkan posisi Nasyiatul 'Aisyiyah dalam organisasi Muhammadiyah yang turut bertanggung jawab mengemban misi Muhammadiyah di bidang keputrian generasi muda.

Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada tahun 1938 telah diambil keputusan tentang simbol padi sebagai simbol NA. Pada tahun ini, Achyar Anies mengarang lagu simbol padi dan kemudian dijadikan mars NA. Masa pendudukan Jepang sampai masa revolusi kemerdekaan, organisasi Muhammadiyah dan ortomnya mengalami stagnasi. Baru pada tahun 1950, suhu politik Indonesia sudah agak menurun, Muhammadiyah mengadakan muktamar di Yogyakarta. Muktamar ini bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan dan langkah Muhammadiyah. Muktamar ini ada beberapa perubahan yang fundamental, yaitu 'Aisyiyah diangkat menjadi organisasi otonom Muhammadiyah. Kemudian NA dijadikan bagian yang diistimewakan oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, sehingga NA diberi wewenang untuk mengelola dan memenej organisasinya di seluruh nusantara. Bahkan keistimewaan NA sampai pada diberi wewenang oleh 'Aisyiyah untuk mengadakan konferensi sendiri. Sejak saat itu penampilan NA lebih mandiri dan meyakinkan.

3. Tahap Otonomi

Proses otonomi NA dimulai pada Mukhtamar 'Aisyiyah tahun 1956 di Palembang, dimana NA dimunculkan suatu pemikiran bahwa NA sebaiknya diberi hak otonom untuk mengelola, dan membentuk jati dirinya. Prasaran dari Dra.Baroroh Baried ini belum mendapat respon yang serius.Kemudian pada Mukhtamar 'Aisyiyah pada tahun 1959 di Yogyakarta, Bagian NA yang dipegang oleh Zuhra Daris belum juga diberi hak otonom.Ketika itu NA hanya diberi keleluasaan oleh PP. 'Aisyiyah untuk mengembangkan kegiatannya.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh NA mengembangkan diri guna menuju kedewasaannya.Iktikad ini disambut baik oleh PP.'Aisyiyah dengan dibuktikan oleh diberinya kesempatan bermusyawaran tersendiri. Pada Mukhtamar 'Aisyiyah di Jakarta tahun 1962 merupakan sinyalemen bahwa NA harus dituntut untuk mulai memikirkan kebutuhan dan pengembangan dirinya. Untuk itu pada kesempatan ini Bagian NA di bawah kepemimpinan Siti Karimah membuat rencana kerja baru yang meliputi : kaderisasi, popularisasi NA, pembinaan, dll. Semangat Jakarta ini betul-betul menjadi motivasi bagi NA untuk membenahi diri dan membina rumah tangganya.

Semangat Jakarta ini betul-betul telah menjadi Nasyiatul 'Aisyiyah dewasa.Pada sidang tanwir 1963 telah disepakat bahwa NA diberi status otonom.Siti Karimah dan kawan-kawan mulai mengadakan persiapan-persiapan untuk mengadakan musyawarah pertamanya di Bandung.Persiapan ini mendapat bimbingan dari majlis bimbingan pemuda.Sebelum mukhtamar, terlebih dahulu

diadakan konferensi NA di Solo. Konferensi ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi NA; mempersiapkan program-program kerja, penyusunan AD, berbagai hal yang berkaitan dengan keorganisasian, dan lain-lain.

D. Kerangka Konseptual

Masyarakat Indonesia dengan keberagaman etnik, bahasa, agama dan adat istiadat telah memiliki mekanisme dan pengaturan sosial yang berbeda-beda. Namun demikian seluruh aktivitas tersebut dilakukan secara mandiri dan mendorong partisipasi dalam kebersamaan. Bentuk masyarakat partisipatif demikian inilah yang kembangkan 'Aisyiyah dan Muhammadiyah dalam kehidupan yang demokratis dapat ditopang oleh masyarakat madani. Dalam hal ini, 'Aisyiyah memberikan jawaban atas berbagai permasalahan, baik problematika daerah, wilayah maupun global yang dari waktu ke waktu mengalami pengembangan. Peran, fungsi, komitmen serta tanggung jawab 'Aisyiyah semakin besar dan terbuka. 'Aisyiyah lahir sebagai komponen perempuan Muhammadiyah, yang didirikan pada tanggal 27 Rajab 1375 bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 di Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan. Bermula dari perkumpulan gadis-gadis dalam pengajian rutin yang dikenal sebagai Sapa Tresna pada Tahun 1914, para kader 'Aisyiyah yang kemudian berkembang sampai pada kalangan ibu-ibu rumah tangga, kemudian diajak untuk memikirkan persoalan kemasyarakatan khususnya masalah peningkatan harkat kaum perempuan.

Dalam perkembangannya, gerakan 'Aisyiyah dari waktu ke waktu terus meningkatkan peran dan memperluas jaringannya dalam rangka peningkatan

dan pemajuan harkat wanita Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan sekolah dari Taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, rumah sakit, balai bersalin, panti asuhan, panti jompo, rumah-rumah sosial, lembaga ekonomi dan lain-lain. Perkumpulan 'Aisyiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang bercita-cita untuk *memperbaharui* aspek pemahaman dan pengembangan agama Islam di dalam masyarakat untuk dikembalikan pada ajaran Islam murni yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Struktural 'Aisyiyah tersebar dan berjenjang dalam beberapa level yang mempunyai kewenangan dan wilayah kerja masing-masing. Jaringan yang tersebar di seluruh daerah ini merupakan potensi yang sangat besar untuk membangun umat dan bangsa ini menuju masyarakat utama dalam bentuk sinergi dan jaringan yang kuat di beberapa bidang. 'Aisyiyah sangat besar dalam mengakomodasikan warga untuk menyalurkan aspirasinya, sekaligus mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh daerah melalui berbagai aktivitas, seperti keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan sebagainya. Pengembangan dakwah Islam melalui dakwah jamaah dan dakwah kultural merupakan strategi dakwah masa kini. Strategi ini mengingat tantangan global, perkembangan teknologi, dan pola pikir umat yang semakin berkembang. Konsep tersebut diwujudkan melalui gerakan TIT 'Aisyiyah melalui pendekatan sumber daya manusia, ekonomi, dan kesejahteraan, pendekatan struktural serta global.

Peran dan partisipasi 'Aisyiyah menjadi sangat berarti, terutama di dalam hal gerakan Desa Qoryah Toyyibah, Desa Siaga, yang merupakan gerakan pemberdayaan

untuk meningkatkan status desa agar menjadi tentram, tenang, sejahtera baik lahir maupun batin yang terpancar pada setiap keluarga, yang pada gilirannya tercermin pada masyarakat. Untuk lebih jelasnya kerangka konseptual tersebut dapat digambarkan dalam bentuk skema atau bagan, yang akan dikembangkan sesuai dengan fakta empiris yang diteliti berdasarkan peran dan fungsi masing-masing komponen, serta keterkaitan antar variabel (fenomena) yang dibahas.

Dinamika kemandirian organisasi, adalah sebuah proses yang terkait dengan proses pelaksanaan aktivitas secara kontinu untuk mewujudkan pola pengaturan menjadi struktur organisasi. Proses yang dimaksud adalah pola pengaturan energi dan materi antara tatanan dengan lingkungannya sesuai dengan pola pengaturan yang berlaku. Setidaknya ada 2 (dua) jenis pendorong terjadinya proses pengaturan, yaitu: (1) Dinamika lingkungan eksternal yang menuntut penyesuaian struktur agar tetap menjamin adanya pertukaran energi, materi dan informasi antara tatanan dengan lingkungan; (2) Dinamika internal yaitu antara komponen-komponen pembentuk tatanan karena pada dasarnya setiap komponen tatanan memiliki kreativitas, dalam arti senantiasa ingin melakukan pembaharuan terhadap dirinya, termasuk pembaharuan terhadap format interkoneksi dengan komponen lainnya. Pembaharuan ini merupakan proses yang sangat dinamis, karena setiap komponen aktif melakukan berbagai upaya agar tetap mempertahankan identitas dan kualitas keberadaannya di dalam tatanan organisasi.

Demikian halnya kemandirian organisasi 'Aisyiyah sejak berdirinya hingga dewasa ini. Hal ini karena upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi tidak lagi

didasarkan pada desain yang ketat oleh segelintir pimpinan puncak organisasi, tetapi lebih merupakan aktivitas spontan yang dipilih dan dilaksanakan oleh semua komponen (pengurus dan anggota 'Aisyiyah). Model ini tetap dipertahankan sejak awal berdirinya organisasi 'Aisyiyah, karena mampu memberikan jawaban yang lebih tepat terhadap berbagai masalah yang dipicu oleh dinamika lingkungan strategis. Selain itu, sumber daya yang dimiliki berupa amal usaha yang meliputi pendidikan, kesehatan, panti asuhan, dan lain-lain dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin karena dikelola sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, secara teoritis kemandirian organisasi 'Aisyiyah sebagai salah satu ortom perempuan Muhammadiyah memiliki otonomi seluas-luasnya dapat bersinergi membentuk organisasi yang efektif dan efisien, dengan menggunakan cara pandang Sains Baru. Secara teoritis kerangka konseptual penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) konsep utama yang terkait dengan kemandirian. *Autopoiesis*, mengandung pengertian kemandirian atau otonomi (mengatur diri sendiri). Dalam hal ini, 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah yang diberikan otonomi untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri unit-unit organisasi (amal usaha 'Aisyiyah). Namun, tetap dalam bingkai (koridor) induk organisasi 'Aisyiyah dan kontrol dari Muhammadiyah sebagai satu kesatuan sistem yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Paradoks interdependen, ialah secara menyeluruh 'Aisyiyah dapat mengontrol unit-unit organisasi (amal usaha) yang dimiliki, namun secara internal setiap unit organisasi memiliki hak otonomi untuk mengembangkan

amal usaha tersebut. Medan visional, adalah visi dan misi atau dalam 'Aisyiyah lebih dikenal istilah "khittah" untuk mengikat setiap pengurus dan anggota agar tetap konsisten menjalankan fungsi organisasi. Dengan demikian, organisasi 'Aisyiyah memiliki fungsi mengembangkan sumber daya yang dimiliki sehingga berhasil mengikat para pengurus dan anggotanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konsep keberlanjutan organisasi, dapat dikaji melalui 3 (tiga) unsur pokok, meliputi: sistem, kontigensi, serta lingkungan politik dan ekonomi. Keberlanjutan suatu organisasi dapat dianalogikan sebagai suatu sistem yang dibangun dengan pertimbangan antara lain, sistem merupakan hal-hal yang cukup umum untuk menutupi keberlanjutan permasalahan organisasi dan mencakup semua jenis usaha atau kegiatan, baik yang bersifat formal maupun non-formal yang telah digariskan oleh organisasi. Di samping itu, organisasi sebagai sistem karena secara simultan ditentukan oleh proses internal dan hubungan diantara sub-sub sistem atau komponen organisasi berupa unit-unit kegiatan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Organisasi sebagai sistem yang menekankan pada hubungan diantara unsur yang terpisahkan dan memungkinkan untuk memunculkan aspek-aspek agro lingkungan, ekonomi, politik dan sosial budaya yang dapat dikelola secara sistematis dan konsisten dalam aspek manajerial keberlanjutan organisasi bersangkutan.

Demikian kelahiran 'Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan di tengah masyarakat yang sedang mengalami kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga memiliki kontigensi serta membawa pencerahan di berbagai bidang

kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Realitas gerakan dan manfaat 'Aisyiyah selama ini telah dirasakan oleh masyarakat luas terlihat dari banyaknya amal usaha yang dilakukan. Sebuah cita-cita yang didambakan oleh Nyi Ahmad Dahlan selangkah demi selangkah dan setahap demi setahap mulai diwujudkan. Menjelang usia satu abad bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah organisasi yang masih tetap eksis. Hal ini mengindikasikan sejauh mana estafet gerakan 'Aisyiyah telah berjalan diiringi dengan sistem organisasi yang solid dan mekanisme kerja yang terstruktur.

Eksistensi 'Aisyiyah sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan politik senantiasa menyesuaikan (beradaptasi) dengan perkembangan serta langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan masyarakat madani, merupakan salah satu indikator sebagai identitas yang dimiliki untuk mengidentifikasi ada tidaknya perkembangan. Relevansi indikatornya ialah termanifestasi dalam organisasi yang dipenuhi oleh gerakan 'Aisyiyah. Hal tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip organisasi dipegang teguh oleh masyarakat madani (termasuk pengurus dan anggota) sebagai perwujudan identitasnya secara material.

Dalam hal kepatuhan dalam organisasi sebagaimana dijelaskan oleh Etzioni, bahwa sebuah organisasi akan tetap bertahan dan berlanjut karena di dalamnya ada kekuasaan, keterlibatan, dan kepatuhan. Demikian halnya dengan organisasi 'Aisyiyah, di mana kepatuhan pengurus dengan anggota kepada 'Aisyiyah, dan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah sebagai organisasi otonom ialah lebih bersifat "kongruen" dengan jenis power yang kuersif. Dalam hal ini, 'Aisyiyah

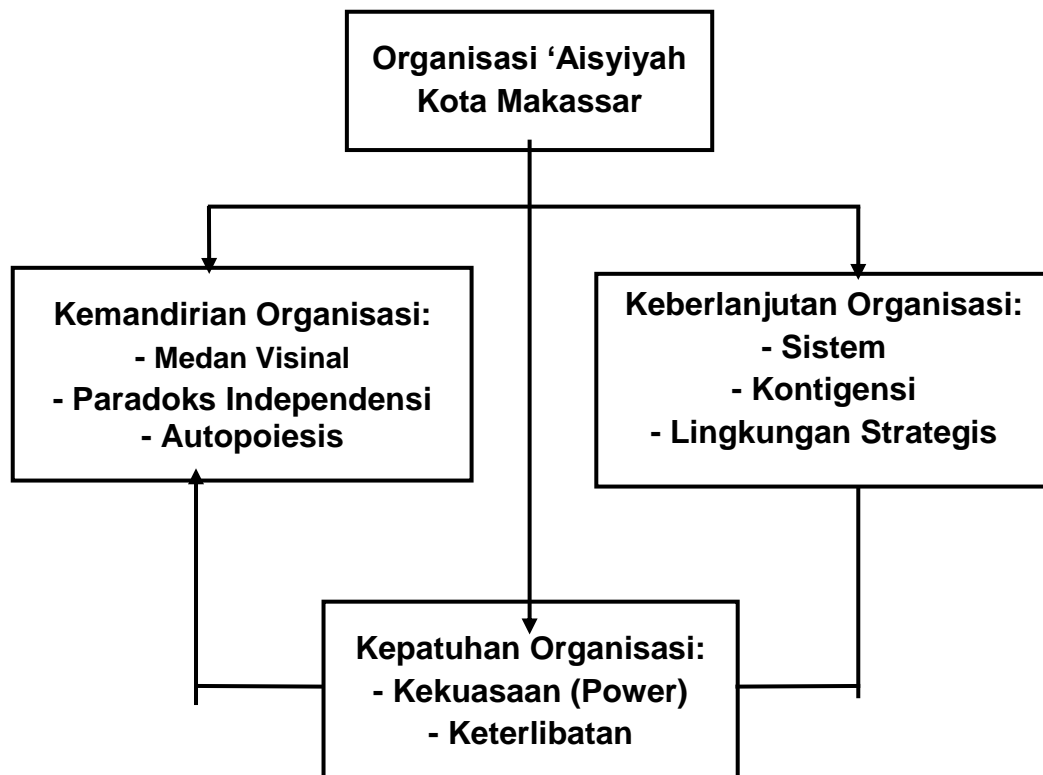
sebagai organisasi dakwah pengurus dapat menerapkan normatif power dalam menjalankan unit-unit organisasi (amal usaha).Demikian pula keterlibatan dan kepatuhan para anggota terhadap organisasi 'Aisyiyah lebih didasarkan pada pertimbangan moral.Kemudian kepatuhan 'Aisyiyah secara organisasi kepada Muhammadiyah didasarkan pada normatif power, serta keterlibatan dan kepatuhan yang lebih bersifat moral ketimbang alienatif atau kalkulatif.

Mencermati penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, variasi power (kekuasaan) yang dikembangkan organisasi 'Aisyiyah sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang berkembang, sesuai dengan jenis kegiatan (amal usaha) serta tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, kondisi dan situasi yang bagaimana 'Aisyiyah menerapkan power kuersif dengan jenis keterlibatan alienatif, kalkulatif atau moral. Namun, secara umum tipe yang dikembangkan 'Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan adalah normatif power dengan hubungan yang lebih efektif antara Muhammadiyah dengan 'Aisyiyah.Hal ini mengakibatkan 'Aisyiyah sebagai unit sosial dapat mempertahankan diri dari tekanan baik dari dalam maupun dari luar, dalam hal ini adalah Muhammadiyah dan Pemerintah.

Adapun hubungan atau kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah kurang lebih sama, yaitu pengurus 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah lebih bersifat normatif power, sedangkan kepatuhan anggota kepada 'Aisyiyah adalah moral. Sebagai contoh, dalam hal mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani bukan dalam arti individu-individu yang partisipatif dan otonom saja, tetapi terdiri atas sekumpulan individu warga yang tergabung dalam unit-unit organisasi yang memiliki tatanan

yang menjamin pengurus dan anggota untuk mampu mengekspresikan diri, mengembangkan minat, saling menukar informasi, memediasi perbedaan dan menciptakan pola-pola hubungan yang stabil. Di samping itu, tertata dalam organisasi modern yang mengembangkan nilai-nilainya sendiri secara konsisten. Karena itu, cita-cita menuju masyarakat madani sejalan dengan visi pengembangan ‘Aisyiyah, yaitu tercapainya usaha-usaha yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah lebih berkualitas menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagai penjabaran yang berkesinambungan dari visi idealnya, yaitu tegaknya agama Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah Rasulullah saw.

Bagan Kerangka Konseptual



E. Definisi Fokus (Operasional)

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah atau konsep utama yang perlu didefinisikan secara jelas, untuk menyamakan persepsi dan kesamaan pandangan tentang makna dan tujuan penelitian ini. Selain itu, definisi operasional dalam studi ini dimaksudkan untuk memberi batasan terhadap tujuan agar tidak menimbulkan penafsiran yang telampau luas. Konsep-konsep utama tersebut, adalah:

1. Kemandirian yang dimaksud dalam disertasi ini adalah kedudukan atau posisi 'Aisyiyah yang tidak hanya karena otonomi dirinya, tetapi karena ada keterkaitan dengan struktur lain terutama Muhammadiyah sebagai induk organisasi dan merupakan lingkungan strategis terdekat.
 - a. Medan visional, ialah medan magnet yang mengikat semua anggota organisasi untuk bergerak bersama dan berkontribusi mewujudkan visi dan tujuan yang telah ditentukan, yaitu "Tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".
 - b. Paradoks independensi, adalah kedudukan organisasi 'Aisyiyah di satu sisi sebagai sistem yang otonom, namun di sisi lain merupakan bahagian dari sistem yang lebih besar yaitu Muhammadiyah.
 - c. Austopoiesis, adalah 'Aisyiyah selalu mereproduksi diri sendiri serta memperbaharui unit-unitnya sendiri untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan organisasi dari waktu ke waktu, dari fase ke fase sehingga mampu bertahan dan eksis.

2. Keberlanjutan dalam penelitian ini, dapat diartikan sebagai kemampuan 'Aisyiyah dalam merespon lingkungan strategis terdekat Muhammadiyah dan lingkungan strategis yang lebih luas (masyarakat baik secara lokal, regional maupun global) melalui program kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah dibuat secara terarah, sistematis, dan terencana.
 - a. Sistem, adalah unit-unit yang diciptakan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan organisasi secara keberlanjutan suatu melalui input, proses, dan output.
 - b. Kontigensi, adalah strategi, kebijakan, dan langkah-langkah yang ditempuh organisasi berdasarkan teori kemungkinan agar organisasi senantiasa melakukan perubahan, perbaikan dan adaptasi terhadap perkembangan lingkungan eksternal maupun internal organisasi. Hal ini dimaksudkan agar 'Aisyiyah memiliki daya saing.
 - c. Lingkungan strategis, adalah Muhammadiyah, masyarakat, bangsa, dan negara yang mewarnai perkembangan organisasi sebagai suatu sistem yang harus mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang terkait dengan kondisi objektif 'Aisyiyah sejak awal didirikan hingga sekarang.
3. Kepatuhan yang dimaksud dalam studi ini, dimaknai sebagai kombinasi antara kekuatan yang diterapkan organisasi dengan keterlibatan semua anggota (warga 'Aisyiyah) dalam berorganisasi di balik kemandirian dan keberlanjutan organisasi tersebut. Dalam hal ini, kekuatan (power) yang diterapkan organisasi 'Aisyiyah

adalah bersifat kongruen;sedangkan keterlibatan semua warga (anggota dan pengurus) adalah bersifat moral normatif.

- a. Kekuasaan (power),adalah kepatuhan pengurus 'Aisyiyah terhadap Muhammadiyah yang bersifat kongruen dalam mengendalikan unit-unit organisasi (amal usaha 'Aisyiyah) sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang telah disepakati bersama untuk mewujudkan visi dan tujuan yang telah ditentukan.
- b. Keterlibatan, adalah bentuk kepatuhan yang dilakukan semua warga 'Aisyiyah dalam mengelola amal usaha yang bersifat moral normatif, bukan karena honor atau insentif, janji atau paksaan melainkan semata-mata karena "amar makruf nahi munkar".

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif yang dikembangkan oleh Creswell (1997), adalah Tradisi Biografi, Fenomenologi, Grounded Theory, Etnometodelogi, dan Studi Kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus analisis pada tingkat individual dan pengalaman individu (*human document*) dalam mengelola organisasi. Pendekatan kualitatif dimaksud adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metodologi untuk mengkaji suatu fenomena dan masalah manusia (Bungin, 2001). Dalam kaitan ini, peneliti membuat suatu gambaran yang kompleks untuk menjelaskan fenomena kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah berdasarkan fakta empiris. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa, metode kualitatif lebih mudah ketika berhadapan dengan kenyataan ganda, untuk menjelaskan hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. Dengan kata lain, metode kualitatif di mana data yang dikumpulkan berupa artikel (embrio) cikal bakal berdirinya 'Aisyiyah (bukan angka-angka) tapi deskriptif yang dapat dianalisis berdasarkan interpretasi peneliti untuk memberikan gambaran serta penjelasan secara komprehensif fenomena sosial yang berkaitan dengan konsep yang diteliti, yaitu kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah. Dalam hal ini, peneliti menelusuri latar belakang

dari fenomena yang dibahas sebagai suatu konsep yang utuh ditinjau dari aspek sejarah (historis) dan sosiologis.

Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini, adalah suatu studi yang bertujuan mendeskripsikan suatu masalah dengan batasan yang sistematis dan terperinci, pengambilan data yang mendalam dan melibatkan berbagai sumber (informan). Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, di mana kasus yang dibahas adalah organisasi 'Aisyiyah, yang meliputi: (1) sejarah organisasi yaitu informasi tentang sejarah berdirinya 'Aisyiyah; (2) dinamika organisasi, dalam hal ini informasi tentang perkembangan 'Aisyiyah sejak didirikan hingga sekarang; (3) Aspek-aspek kemandirian organisasi, yakni konsep yang digunakan dalam menjelaskan proses pembentukan dan aktualisasi identitas organisasi (*autopoiesis*), paradoks independensi dalam mengelola unit-unit organisasi (amal usaha), serta medan visional dalam menjaga komitmen dan konsistensi organisasi yang telah disepakati; (4) Aspek keberlanjutan organisasi, meliputi data dan informasi tentang sistem organisasi yang berkelanjutan. Kontigensi organisasi dalam mengantisipasi kemungkinan yang akan dihadapi dan proses adaptasi terhadap perubahan di lingkungan eksternal dan internal, agar organisasi tetap eksis; dan (5) Aspek kepatuhan organisasi, data dan informasi yang dibutuhkan meliputi kekuasaan (power) pengurus 'Aisyiyah dalam mengendalikan unit-unit organisasi, keterlibatan anggota 'Aisyiyah dalam mengelola amal usaha, serta kepatuhan pengurus dan anggota terhadap 'Aisyiyah; di samping kepatuhan organisasi 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah dibalik kemandirian dan keberlanjutan organisasi tersebut.

Penelitian kualitatif tidak sekedar diartikan sebagai pemilihan metode yang difokuskan pada jenis data dan analisis yang bersifat kualitatif, tetapi mempunyai landasan filosofis yang mendasari lahirnya paradigma tertentu tentang metode. Pemilihan metode bukanlah hal yang sederhana, karena di dalamnya menyangkut asumsi-asumsi dasar tentang teori sosial. Peneliti kualitatif telah membuat rel sendiri untuk tidak menggunakan pendekatan ilmu alam di dalam mempelajari masyarakat. Bila pendekatan kuantitatif dikembangkan penganut aliran *positivisme*, maka pendekatan kualitatif dikembangkan penganut *filsafat hermeneutika*. Hermeneutika adalah aliran filsafat ilmu pengetahuan yang selama beberapa dekade terakhir menjadi pokok perdebatan ilmu-ilmu sosial (Strauss & Juliet, 2003).

Studi kasus dipilih sebagai desain penelitian yang dikembangkan dalam studi ini, dikombinasi dengan jenis-jenis penelitian yang relevan, antara lain: studi sejarah (historis), grounded research, dan studi etnografi sebagai salah satu kerangka kerja yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Sebagai suatu kategori desain penelitian, studi ini tidak mudah didispezifikasi dari segi akurasi dan generalisasi. Meskipun demikian, dari aspek-aspek ini dapat dijelaskan sesuai dengan pandangan berbagai ahli, bahwa pemahaman atas makna, proses pemaknaan, dan produksi makna oleh interaksionisme simbolik, ethnometodologi, dan etnografi praktis, semuanya mengarah kepada penentuan obyek yang spesifik. Penggunaan jenis dan tipe penelitian yang dimaksud adalah analisis data secara induktif, bertujuan untuk mencari kesamaan-kesamaan secara komprehensif atau menyeluruh (*universalitas*), dan membuat kategori-kategori umum melalui pemberian makna secara ketat sesuai

dengan konsep-konsep utama yang dikembangkan dalam penelitian ini (Kerlinger, 2002).

Penggunaan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif-kualitatif berupa informasi lisan dan tertulis dari berbagai subjek yang diteliti, serta tingkah laku yang dapat diamati secara holistik (Bogdan dan Taylor, 1993). Hal ini sejalan dengan pendekatan fenomenologi, yang menekankan makna subjektif dari perilaku berdasarkan struktur kesadaran dan pengalaman hidup sehari-hari. Peneliti fenomenologi berusaha masuk ke dalam dunia konseptual subjek yang diteliti, sehingga dipahami apa dan bagaimana suatu fenomena dikembangkan dalam kehidupan (Moleong, 1995).

Melalui pendekatan ini diharapkan temuan empiris dari lapangan (*setting*) berupa jawaban, ucapan, kata-kata, dan tindakan atau perilaku subjek yang teramati, dapat dideskripsikan secara lebih terinci dan akurat ditinjau dari berbagai aspek yang berkaitan dengan fenomena kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar. Untuk memahami dan menafsirkan makna-subjektif tentang pikiran, ucapan, perilaku, dan tindakan orang yang diteliti, dalam hal ini pengurus dan anggota 'Aisyiyah dalam konteks lapangan, yaitu kemandirian, keberlanjutan dan kepatuhan pengurus dan anggota kepada organisasi melalui metode *vrestehen* yakni pengertian interpretatif terhadap pemahaman subjektif manusia (Ritzer, 1992); atau memahami pengertian subjek menurut sudut pandang mereka sendiri (Moleong, 1995). Metode tersebut sejalan dengan apa yang disebut *perspektif emik*, yaitu menggali data dan informasi berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan

dilakukan subjek (pengurus dan semua warga 'Aisyiyah) dalam mengelola amal usaha, dan bukan berdasarkan apa yang dipikirkan peneliti (Sugiyono, 2007).

Keseluruhan data dan informasi tersebut dapat diorganisir kemudian dijelaskan secara komprehensif dalam bentuk narasi secara sistematis dan mendalam tentang kasus organisasi 'Aisyiyah, meliputi kemandirian dan keberlanjutan melalui fase-fase tertentu. Proses penelitian ini mulai dari pengumpulan data, analisis data, sampai penarikan kesimpulan, peneliti adalah instrumen utamanya (*human instrument*), tinggal di lapangan dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena dipandang dari segi pendekatan yang digunakan, maka kelak hasil penelitian ini akan melahirkan suatu kajian yang berparadigma sosiologi interpretatif (Berger & Kellner, 1985).

B. Fokus Penelitian dan Penentuan Informan

Fokus perhatian dalam penelitian ini adalah fenomena sosial yang terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah. Untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial secara lebih alami, penuh makna, dan mendalam (Muhajir, 2008). Sebagaimana telah dijelaskan bahwa, fokus penelitian ialah konsep utama yang dikembangkan sekaligus merupakan tujuan yang diharapkan dalam disertasi ini, yaitu tercipta kemandirian dan keberlanjutan organisasi serta kepatuhan pengurus dan anggota kepada 'Aisyiyah, termasuk kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah. Secara garis besar fokus penelitian yang hendak ditelusuri disertasi ini adalah:

1. Dinamika kemandirian ‘Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan. Dalam hal ini, data dan informasi yang terkait dengan perkembangan ‘Aisyiyah Kota Makassar sejak didirikan Tahun 1926 dan dinamika yang dilalui ‘Aisyiyah yang secara garis besar dibagi dalam tiga fase, yaitu: (1) fase pra kemerdekaan 17 Agustus 1945; (2) fase kemerdekaan, dan (3) fase reformasi. Dengan kata lain, konsep kemandirian yang ditelusuri adalah medan visional, paradoks independensi, dan autopoiesis.
2. Keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah Kota Makassar dalam merespon dinamika lingkungan eksternal, yaitu data dan informasi tentang strategi atau langkah-langkah yang dilakukan ‘Aisyiyah dalam kaitannya dengan dinamika perubahan dan perkembangan lingkungan strategis terdekat, yaitu Muhammadiyah dan lingkungan strategis yang lebih luas termasuk di dalamnya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk melakukan adaptasi (penyesuaian) terhadap perubahan tersebut. Dalam hal ini strategis dan langkah-langkah yang dimaksud, antara lain program kerja dan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dll.
3. Dinamika kepatuhan anggota kepada ‘Aisyiyah dan kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah, di balik kemandirian dan keberlanjutan adalah data dan informasi tentang bagaimana tingkat kepatuhan pengurus dan anggota kepada ‘Aisyiyah terkait dengan unit-unit organisasi atau amal usaha yang dikeola, yaitu: (a) amal usaha di bidang pendidikan, meliputi Taman Kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah; (b) amal usaha di bidang

kesehatan, antara lain Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), dan (c) amal usaha di bidang sosial kemasyarakatan, seperti Panti Asuhan.

Selanjutnya untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan fokus penelitian di atas, maka penentuan Informan sebagai sumber utama (data primer) dapat dipilih secara *purposive* sesuai dengan mekanisme, karakteristik, dan kapabilitas yang dimiliki dalam memberikan keterangan, data, dan informasi secara obyektif. Sehubungan dengan itu, informan yang dipilih sebanyak 20 orang meliputi: Ketua dan wakil ketua, Sekretaris dan wakil sekretaris, Bendahara dan wakil bendahara 'Aisyiyah Kota Makassar sebanyak 10 orang; Ketua-ketua Majelis dan Lembaga, Guru (Pendidikan), Petugas Kesehatan (Perawat), dan Pengelola Panti Asuhan sebanyak 8 orang; Pengurus Wilayah Aisyiyah (PWA) Sulawesi Selatan 1 orang; dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan 1 orang. Lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data dan informasi tentang kemandirian dan fase-fase perkembangan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar dijelaskan oleh informan Ketua dan wakil ketua, Sekretaris dan wakil sekretaris, serta Bendahara dan wakil bendahara sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban dalam organisasi.
- b. Data dan informasi yang terkait dengan keberlanjutan organisasi dalam merespon dinamika lingkungan strategis (eksternal) dapat dijelaskan oleh informan Ketua-ketua Majelis dan Lembaga, Guru (Pendidikan), Petugas kesehatan, dan

Pengelola Panti Asuhan melalui program kerja yang dikembangkan sesuai dengan amal usaha yang dikelola.

- c. Data dan Informasi yang terkait dengan dinamika kepatuhan anggota kepada ‘Aisyiyah dan kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah di balik kemandirian dan keberlanjutan organisasi tersebut, dijelaskan oleh pengurus ‘Aisyiyah (ketua dan wakil ketua), Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah, dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan.

Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Pekerjaan/Jabatan
1.	Hj. Chaeriah Akib	Ketua ‘Aisyiyah Kota Makassar
2.	Hj. Aisyah Damopoli	Wakil Ketua ‘Aisyiyah Kota Makassar (Bidang Ekonomi, Pengkajian & Pengemb)
3.	Dra. Hj. Muliati Amin, M.Ag	Wakil Ketua ‘Aisyiyah Kota Makassar (Bidang Pendidikan dan Kebudayaan)
4.	Dra. Hj. Khaeriah Jabar	Wakil Ketua ‘Aisyiyah Kota Makassar (Bidang Pengembangan Kader)
5.	Hj. Tuty Suciaty, SH., MH	Wakil Ketua ‘Aisyiyah Kota Makassar (Bidang Hukum dan HAM)
6.	St. Rahmah Abdullah	Wakil Ketua ‘Aisyiyah Kota Makassar (Bidang Kesejahteraan Sosial)
7.	Djuharmi Mustari	Sekretaris ‘Aisyiyah Kota Makassar
8.	Ratna Dewi Ibrahim, SS., M.Hum	Wakil Sekretaris ‘Aisyiyah Kota Makassar
9.	Hj. Rukiah Khalid	Bendahara ‘Aisyiyah Kota Makassar
10.	St. Zohrah Marzuki	Ketua Majelis Tabligh ‘Aisyiyah Kota Mks
11.	Dra. Hj. Syahribulan K., M.Pd	Ketua Majelis Pendidikan Dasar & Menengah (Dikdasmen) ‘Aisyiyah Kota Mks.
12.	Dra. Hj. Hamdana Dahlan, M.Kes	Ketua Majelis Kesehatan ‘Aisyiyah Kota Makassar
13.	Maryam Siking	Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial ‘Aisyiyah Kota Makassar

LANJUTAN TABEL 3.1		
14.	Budiarti Bachtiar, SE	Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan 'Aisyiyah Kota Makassar
15.	Sulfiah Wahab, SP	Ketua Majelis Pembinaan Kader 'Aisyiyah Kota Makassar
16.	Hj. Djalaliah Jamal	Ketua Majelis Hukum dan HAM 'Aisyiyah Kota Makassar
17.	Dra. Munirah, M. Pd.	Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan 'Aisyiyah Kota Makassar
18.	Dr. St. Aida Azis, S.Pd., M.Pd	Ketua Lembaga Kebudayaan 'Aisyiyah Kota Makassar
19.	Dra. Hidayah Quraisy, M.Pd	Pengurus Wilayah 'Aisyiyah (Ketua PWA) Sulawesi Selatan
20.	K.H. Iskandar Tompo	Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan

Sumber: Penentuan Informan Penelitian, Februari 2012.

C. Penentuan Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar, yang mencakup semua unit organisasi (amal usaha) yang dikelola 'Aisyiyah dan tersebar baik di tingkat wilayah, daerah, cabang dan ranting. Menyadari akan kompleks dan luasnya lokasi penelitian ini, maka penentuan lokasi dilakukan secara purposive dan proporsional berdasarkan fokus dan tujuan penelitian. Lokasi penelitian tidak ditetapkan begitu saja, melainkan dibingkai dalam kerangka teoretik dan fakta empirik yang telah ditentukan, serta dilandasi pertimbangan teknis-operasional. Sehubungan dengan lokasi penelitian tersebut, maka subjek penelitian yang dimaksud adalah pengurus dan anggota organisasi 'Aisyiyah; semua unit organisasi atau amal usaha yang dikelola oleh 'Aisyiyah; hubungan 'Aisyiyah dengan Muhammadiyah; serta hubungan 'Aisyiyah dengan warga masyarakat di lingkungan

amal usaha termasuk hubungannya dengan pemerintah. Unit organisasi atau amal usaha yang dikelola (dimiliki) 'Aisyiyah sebagaimana telah disebutkan, meliputi pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi; bidang kesehatan meliputi rumah sakit dan/atau rumah bersalin, BKIA, dll; serta bidang sosial kemasyarakatan, antara lain Panti Asuhan dan sebagainya.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. *Pertama*, Data primer adalah jenis data utama yang diperoleh (bersumber) dari informan melalui wawancara serta data dan informasi tentang masalah pokok yang dibahas, yaitu kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar. *Kedua*, Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh (bersumber) dari literature, dokumen atau bahan pustaka yang terkait dengan masalah pokok yang dikaji. Dalam hal ini, data primer dalam penelitian kualitatif adalah informasi atau keterangan yang diperoleh langsung dari informan dalam bentuk narasi, ceritera dan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terhadap objek sasaran, yaitu unit-unit organisasi (amal usaha) 'Aisyiyah meliputi pendidikan atau sekolah (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK, dan MA) yang dikelola 'Aisyiyah Kota Makassar. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dan atau tersedia di lokasi penelitian termasuk dengan masalah pokok.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah terkait dengan penelitian kualitatif, yaitu observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

1. Pengamatan (*Observasi*).

Pengamatan yang dilakukan adalah langsung kepada objek yang diteliti, yaitu unit-unit organisasi (amal usaha) yang dikelola 'Aisyiyah di dalam merealisasikan program kerja yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan amal usaha 'Aisyiyah, seperti TK Bustanul Atfal untuk melihat langsung keberadaan amal usaha tersebut. Demikian pula langsung terhadap kegiatan yang dilakukan rumah sakit atau BKIA dalam melayani masyarakat (pasien), serta Panti Ausahan dalam membina dan membina dan mengasuh anak-anak panti. Instrument penelitian yang digunakan ialah:

- a. Buku catatan, untuk mencatat hal-hal (data) yang dipandang perlu (penting);
- b. alat elektronik seperti *tape recorder*, *handycam* atau camera HP;
- c. pengamatan dipusatkan pada data yang relevan; dan
- d. melakukan klarifikasi data yang diperoleh dengan informan.

2. Wawancara (*Interview*).

Wawancara yang dilakukan ialah wawancara mendalam (*indepht interview*), di samping wawancara bebas. Wawancara mendalam adalah ditujukan

kepada Ketua dan wakil ketua, Sekretaris dan Bendahara PDA Kota Makassar termasuk pengurus dan pengelola amal usaha 'Aisyiyah meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan Panti Asuhan.

- a. Informan bidang pendidikan terutama pengurus dan pengelola amal usaha yang juga sebagai guru di TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) yang dikelola 'Aisyiyah untuk memberi data dan informasi tentang input, proses, dan output sesuai dengan standar pelayanan, prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- b. Informan bidang kesehatan, terutama pengurus yang juga sebagai pengelola Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, Bidan, dan Perawat untuk menjelaskan proses pelayanan (input, proses, dan output). Dalam hal ini dibatasi informasi yang relevan dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah.
- c. Informan di bidang kemasyarakatan dan keagamaan (Pengelola dan Pembina Panti Asuhan), termasuk pengurus dan anggota 'Aisyiyah yang terlibat langsung dalam pembinaan anak-anak panti untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.
- d. Warga masyarakat di sekitar amal usaha (unit organisasi) 'Aisyiyah yang memahami dan menerima akses dari amal usaha tersebut.

3. Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang data sekunder, meliputi sejarah berdirinya 'Aisyiyah, akta pendirian serta asset atau sumber daya

yang dimiliki. Data dokumentasi tersebut berupa laporan kegiatan, program kerja, jumlah amal usaha yang dikelola dan di bawah koordinasi 'Aisyiyah, struktur organisasi dan tata kerja, tanggung jawab dan kewenangan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah sebagai ortom secara periodik dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas tentang metode penelitian dalam studi ini, mulai dari tipe penelitian yang meliputi pendekatan, fokus, penentuan informan, sumber dan teknik pengumpulan data dapat dirangkul dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Prosedur Penelitian dan Pengumpulan Data

Tujuan	Konsep	Aspek-aspek	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Mendeskripsikan dinamika kemandirian 'Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan.	1. Kemandirian	<p>3) Medan Visional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip dasar organisasi - Visi dan tujuan organisasi - Unit-unit organisasi (amal usaha 'Aisyiyah) - Tatanan (Khittah) 'Aisyiah <p>2) Paradoks Independensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem yang otonom dalam Mengelola amal usaha - Bagian dari Muhamadiyah - Komitmen pada organisasi - Tanggungjawab bersama <p>1) Autopoiesis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mereproduksi diri sendiri - Menghasilkan unit-unit di dalam organisasi sendiri - Menyesuaikan diri dengan perkembangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua & Wkll Ketua, Sekretaris Aisyiyah Kota Mks - Pengelola Amal Usaha -Ketua-ketua Majelis dan Lembaga - Pengurus & Pengelola Amal Usaha -Ketua-ketua Majelis dan Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara Mendalam - Dokumentasi - Wawancara Mendalam - Pengamatan Langsung - Wawancara Mendalam - Dokumentasi
Menjelaskan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah dalam merespon dinamika lingkungan	2. Keberlanjutan	<p>1) Sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Input dari lingkungan - Proses pelaksanaan dan Pelayanan organisasi - Output (hasil produksi) <p>2) Daya Contigensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan adaptasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua-ketua Majelis dan Lembaga - Ketua & Wkll 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara Mendalam - Pengamatan Langsung

eksternal dan strategis		<ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi - Strategi pencapaian <p>3) Lingkungan strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muhammadiyah - Masyarakat & Pemerintah - Lokal, Regional, & Global 	<p>Ketua, Sekretaris 'Aisyiyah Kota Mks</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua PWA Sul – Sel & Pengurus PWM Sulsel 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara Mendalam - Dokumentasi
Menganalisis dinamika kepatuhan anggota kepada 'Aisyiyah dan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah di balik kemandirian & keberlanjutan organisasi tersebut.	3. Kepatuhan	<p>1) Kekuasaan (Power)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan pada organisasi - Pengurus ialah kongruen - Bersifat Normatif – Moral <p>2) Keterlibatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota pada organisasi Bersifat Moral - Normatif - Visi dan tujuan bersama <p>3) Kepatuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota kepada 'Aisyiyah adalah Normatif – Moral - 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah adalah kongruen dan Moral - Normatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua dan Wakil Ketua 'Aisyiyah - Ketua-ketua Majelis dan Lembaga - Ketua PWA Sul - Sel - Pengurus PWM Sul-Sel 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara Mendalam - Wawancara Mendalam - Wawancara Mendalam - Dokumentasi

Sumber : Klasifikasi Data Penelitian, Februari 2012

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data mengandung arti pengaturan data secara logis dan sistematis,

dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data di lapangan hingga seluruh proses penelitian selesai, serta peneliti sendiri sebagai instrumen utama, yang sejak awal telah berinteraksi dengan latar dan subjek, sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam sistem, pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema yang dapat diangkat menjadi teori substantif. Proses ini dimulai: (1) menelaah seluruh data yang telah diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahaminya; (2) mereduksikan data dengan cara abstraksi, yaitu menganalisis dan merangkum intisari data; (3) menyusun data tersebut dalam satuan uraian atau klasifikasi; (4) satuan itu kemudian dikategorisasi berupa sambil membuat *koding*; (5) memeriksa keabsahan data (Moleong, 1995).

Analisis data hasil penelitian ini adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh meliputi wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Pada tahap reduksi data, kegiatan yang dilakukan adalah merangkum, memilih, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang telah diperoleh dari hasil catatan lapangan untuk dicari tema dan polanya. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti mempertajam fokus, membuat kategorisasi, dan menyusun klasifikasi guna pendalaman dan penyusunan rencana kerja lebih lanjut. Pada tahap ini data yang tidak relevan dengan pertanyaan dasar penelitian, disisihkan.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data (*data display*) ke dalam pola hubungan yang bermakna, sehingga semakin mudah memahaminya. Kegiatan ini bermanfaat untuk mendalami masalah yang diteliti, yaitu fenomena yang berkaitan dengan kemandirian organisasi dan konsekuensinya. Penyajian dapat berupa uraian singkat dalam bentuk bagan, matriks, *flowchart*, namun yang lebih banyak ialah dengan teks bersifat naratif-tematik. Peneliti akan berupaya menyajikan data sebaik mungkin guna menghasilkan analisis data yang baik pula, bahkan apabila memungkinkan membangun teori *substantif*. Langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang merupakan tahap ketiga analisis data, yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi dari hasil reduksi dan penyajian data sebelumnya. Ketiga model analisis ini mengalir terus-menerus, interaktif, dan bersiklus selama pengumpulan data lapangan hingga seluruh proses penelitian berakhir.

Analisis data berdasarkan fakta empiris adalah teori berdasarkan data, bukan teori hasil telaah deduktif-logik. Teori substantif ditemukan dan dibentuk untuk daerah substantif tertentu. Dalam penelitian kualitatif dengan analisis induktif ialah teori berdasarkan data, sedang teori formal ditemukan dan dibentuk untuk kawasan kategori konseptual teoritik. Dalam klasifikasi Merton adalah “teori taraf menengah” (*middle range theories*), yang menampilkan keberlakuannya pada daerah substantif tertentu, dan tidak pada apa yang disebut *grand theoris*. Secara umum, pengolahan data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan interpretatif (Creswell, 1998). Tujuannya adalah menafsirkan terus-menerus data dan informasi yang diperoleh

melalui keterkaitan antarfenomena berdasarkan kerangka konseptual yang telah ditentukan. Dalam hal ini digunakan *verstehen* dua tingkat, *verstehen* secara emik berdasarkan pemahaman subjek dan *verstehen* ala etik berdasarkan kategori peneliti. Pendekatan ini bermakna bahwa data yang telah dianalisis tidak hanya dideskripsikan begitu saja, tetapi ditelaah secara kritis melalui diskusi dan abstraksi teoretik berkenaan dengan fenomena kemandirian dan *sustainability* organisasi.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data ialah bentuk pertanggungjawaban kebenaran dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, pengabsahan data yang dianjurkan ialah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, pengecekan anggota, analisis kasus negatif, kecukupan referensi, uraian rinci, dan *audit trail* (Moleong, 1995; Muhajir, 2007). Teknik ini berguna untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh betul-betul akurat, memenuhi kriteria keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), dan kebergantungan (*dependability*).

Perpanjangan keikutsertaan, adalah selain tinggal di lapangan dan berinteraksi lebih lama untuk membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan subjek (*rapport*), juga untuk menguji secara terus-menerus ketidakbenaran data atau informasi yang diakibatkan oleh *distorsi*; baik distorsi dari peneliti sendiri, (misalnya: menjadi asing, minder, atau *overaction* di lapangan); maupun distorsi dari informan (seperti: memberi informasi hanya sekedar menyenangkan peneliti, berdusta atau tidak, berpura-pura atau tidak, menipu atau tidak).

Ketekunan pengamatan ialah melakukan pengamatan secara lebih cermat, teliti, dan berkesinambungan terhadap faktor, ciri, atau unsur yang relevan dengan pokok persoalan (isu) yang sedang dicari. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, ketekunan pengamatan menyediakan *kedalaman* makna. Dalam hal ketekunan ini termasuk membaca berbagai referensi, hasil penelitian, dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Hal ini sekaligus terkait pengabsahan melalui dukungan kecukupan referensi lainnya, seperti catatan lapangan, hasil wawancara dan pengamatan, rekaman wawancara, foto-foto.

Trianggulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data dengan cara memanfaatkan sumber lain di luar data sebagai pembanding. Teknik ini berupa: triangulasi sumber (mengecek informasi pada sumber yang berbeda); triangulasi metode (mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik berbeda, atau sebaliknya); triangulasi waktu (memeriksa data atau informasi melalui sumber dan metode dalam waktu atau situasi yang berbeda); triangulasi teori (menjelaskan fakta penelitian dengan penjelasan pembanding (*rival explanations*) dari satu atau berbagai teori. Trianggulasi dalam penelitian ini tidak hanya diperlakukan sebagai teknik pengumpulan data, tetapi juga alat (strategi pengabsahan data).

Analisis kasus negatif digunakan untuk mencari contoh dan kasus yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan. Hal ini berguna untuk mengetahui suatu informasi secara lebih mendalam agar keteralihan laporan penelitian benar-benar dapat dilakukan melalui

pengabsahan uraian rinci (*thick description*) secermat mungkin, menggambarkan konteks dan fokus penelitian, serta penafsiran berdasarkan kejadian nyata.

Pemeriksaan sejawat dilakukan dengan kolega untuk memperoleh masukan dan kritik agar kualitas analisis lebih dipertanggungjawabkan. Demikian pula pengecekan anggota (*member check*) dilakukan dengan informan untuk menanyakan kembali pernyataan yang telah terangkum dalam pemahaman peneliti, guna memastikan kebenaran makna yang telah dibuat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengundang mereka untuk berkumpul dalam suatu diskusi bersama (semacam *focus group discussion*, FGD), ataupun dengan mendatangi satu persatu sambil membandingkan kritik atau pendapat mereka. Dengan cara ini dapat dilakukan *cross check* dan sekaligus konfirmasi dalam menarik kesimpulan.

Ketika seluruh catatan pelaksanaan proses dan hasil studi menjadi lengkap, dilakukan penelusuran audit (*audit trail*) menguji keakuratan data (catatan lapangan, hasil rekaman, dokumen, dan foto), hasil analisis data (rangkuman, konsep-konsep), hasil sintesis data (tafsiran, kesimpulan, definisi, interelasi tema, pola hubungan literatur atau teoretik, dan laporan akhir), dan proses yang digunakan (metode, disain strategi, prosedur). Auditing ini berguna untuk memeriksa dan mengetahui kepastian dan kebergantungan data, baik terhadap proses maupun hasil atau luaran.

BAB IV

SETTING LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya ‘Aisyiyah Kota Makassar

Sebelum menjelaskan sejarah terbentuknya ‘Aisyiyah Kota Makassar, terlebih dahulu akan dikemukakan pentingnya makna sejarah dalam suatu organisasi, khususnya ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia. Karena dengan mengetahui sejarah berdirinya organisasi, maka akan menentukan gerak langkah sehingga tetap komitmen dengan tujuan didirikannya Organisasi karena dengan melihat sejarah dapat menumbuhkan semangat juang para pelanjut setelah betapa gigihnya para pendiri Aisyiyah dalam memelopori dan memperjuangkan, seperti halnya dengan masuknya Aisyiyah di kota Makassar.

Sebagaimana diketahui bahwa ‘Aisyiyah lahir pada 27 Rajab 133 H, bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 dimana kondisi wanita pada saat itu sangat memprihatinkan, dalam hal ini kaum wanita hanya dijadikan teman untuk urusan rumah tangga saja, itu disebabkan umat Islam pada saat itu beku tertutup oleh Bid’ah Khurafat dan Tahayyul, hal itu berlaku pula pada wanita-wanita di kota Makassar.

Menyadari hal tersebut, maka sejak mendirikan Muhammadiyah, KH.Ahmad Dahlan sangat memperhatikan pembinaan terhadap kaum wanita. Karena itu, untuk pertama anak-anak wanita yang benar-benar mendapat penggemblengan dan dipersiapkan agar nantinya menjadi pengurus wanita Muhammadiyah, ada enam

orang yang dipersiapkan ketika itu, adalah: (1) Siti Bariyah; (2) Siti Dawimah; (3) Siti Dalalah; (4) Siti Busyro (puteri beliau sendiri); (5) Siti Wadingah; dan (6) Siti Badilah Zuber.

Meskipun mereka masih anak-anak yang paling tinggi usianya baru 15 tahun, namun mereka sudah diajak untuk memikirkan masalah-masalah kemasyarakatan. Sebelum `Aisyiyah secara resmi terbentuk, sifat gerakan pembinaan wanita itu baru merupakan kelompok anak-anak yang senang berkumpul kemudian diberi bimbingan oleh K.H. Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan dengan pelajaran agama. Kelompok anak-anak ini belum merupakan suatu organisasi, tetapi hanya kelompok anak-anak yang diberi pengajian. Disamping para gadis, para orang tua ataupun para perempuan Muhammadiyah yang sudah kawin menjadi perhatian beliau. Karena ajaran dalam agama Islam tidak diperkenankan mengabaikan wanita. Mengingat pentingnya peranan wanita yang harus mendapatkan tempat yang layak, Nyai Dahlan bersama KH Ahmad Dahlan mendirikan kelompok pengajian wanita yang anggotanya para gadis dan wanita yang sudah kawin.

Dalam perkembangannya kelompok pengajian wanita itu diberi nama "*Sapa Tresna*", ketika itu belum berupa organisasi tetapi hanya sebagai suatu gerakan pengajian saja. Maka untuk memberikan suatu nama yang konkrit menjadi suatu perkumpulan, K.H. Mokhtar mengadakan pertemuan dengan K.H. Ahmad Dahlan yang juga dihadiri oleh K.H. Fachruddin dan Ki Bagus Hadikusumo serta pengurus Muhammadiyah lainnya di rumah Nyai Ahmad Dahlan. Waktu memberikan nama perkumpulan itu diusulkan nama FATIMAH, tetapi nama itu tidak diterima rapat.

Kemudian oleh KH Fahroedin dicetuskan nama 'AISYIYAH. Nama inilah dianggap paling tepat sebagai organisasi wanita pertama itu. Mengapa nama 'Aisyiyah dipandang tepat, karena diharapkan perjuangan perkumpulan keum perempuan itu meniru perjuangan 'Aisyiyah isteri Nabi Muhammad saw. yang selalu membantu berdakwah. Setelah secara aklamasi perkumpulan wanita itu diberi nama 'Aisyiyah, kemudian diadakan upacara peresmian.

Upacara peresmian itu waktunya bersama-sama dengan peringatan isro' mi'roj Nabi Muhammad saw. pada tanggal 27 Rajab 1335 H, yang bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 M, diadakan oleh Muhammadiyah untuk yang pertama kalinya. Tempat duduk murid-murid wanita dan kaum ibu dipisahkan dengan kelambu berwarna merah jambu. Adapun yang bertindak sebagai pembuka kelambu pada upacara itu ialah K.H. Mokhtar. Susunan pengurus 'Aisyiyah hasil kesepakatan dalam pembentukan telah ditetapkan adalah sebagai berikut: (1) Siti Bariyah (ketua); (2) Siti Badilah (Penulis); (3) Siti Aminah Harowi (Bendahari); (4) Ny. H. Abdullah (Pembantu); (5) Ny. Fatimah Wasool (Pembantu); (6) Siti Dalalah (Pembantu); (7) Siti Wadingah (Pembantu); (8) Siti Dawimah (Pembantu); dan (9) Siti Busyro (Pembantu). Selanjutnya K.H. Mokhtar memberi bimbingan administrasi dan organisasi, sedang untuk bimbingan jiwa keagamaannya dibimbing langsung oleh K.H. Ahmad Dahlan.

Maksud dan tujuan KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah/Aisyiyah untuk mengajak umat Islam Indonesia kembali kepada ajaran Islam yang murni bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Bertitik tolak dari sejarah berdirinya Aisyiyah

sebagai organisasi perempuan, dengan latar belakang serta tujuan yang telah disebutkan di atas, maka organisasi ‘Aisyiyah lahir di Kota Makassar tahun 1926 dipelopori oleh beberapa ibu dan pada saat itu masih merupakan bagian dari Muhammadiyah dan masih disebut cabang, yaitu Cabang Makassar.

Adapun kepengurusan dan periodisasi ‘Aisyiyah kota Makassar sejak didirikan hingga sekarang, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh secara garis besar digambarkan sebagai berikut :

1. Tahun 1926, susunan pengurus atau tokoh pendiri ‘Aisyiyah Makassar, ketika itu masih merupakan cabang, yaitu :

Ketua : Hj. Fatimah (Hj. Tima)

Wakil Ketua : Hj. Maemunnah Dg. Rumpu

Sekretaris : St. Hidayah

Bendahara : Hj. Jasi

Pembantu-pembantu : 1) Hj. Sapuma

2) Dg. Macora

3) St. Hasanah

4) Tuan Mina (Ny. Mansyur Al-Yamani)

Kegiatan Organisasi ‘Aisyiyah waktu itu berpusat di Jl. Diponegoro / Jl. Muhammadiyah, karena keuletan, ketulusan, dan semangat juang pengurus dalam mengembangkan organisasi sehingga berhasil membentuk 4 Ranting, kemudian berkembang menjadi cabang, yaitu :

- a. Ranting Bonto Ala;
- b. Ranting Kampung Pisang;
- c. Ranting Ujung Tanah, dan
- d. Ranting Mariso.

Perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1940 secara resmi berdiri Cabang Makassar, kemudian pada tahun 1966 berubah status atau ditingkatkan statusnya menjadi Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Makassar. Adapun kepengurusan PDA kota Makassar hingga tahun 2000 sebagai berikut :

- 2. Tahun 1937 – 1940, Ketua : St. Djawiah SS Jamaan.
- 3. Tahun 1940 – 1950, Ketua : Muliati Abbas.
- 4. Tahun 1955 – 1965, Ketua : ZY. Intan, dan Sekertaris : Hadjrah Yusuf.
- 5. Tahun 1978 – 1985, Ketua : Hj. Wettoeing Saleh, dan Sekertaris : Dra. Hj. Rahmiah Kaduppa.
- 6. Tahun 1985 – 1990, Ketua : Hj. Djohrah AD, dan Sekertaris Dra. Rahmiah Badaruddin.
- 7. Tahun 1990 – 1995, Ketua : Hj. Djohrah AD, dan Sekertaris Dra. Rahmiah Badaruddin.
- 8. Susunan Pengurus ‘Aisyiyah Kota Madya Ujung Pandang Periode 1995 – 2000, terdiri dari :

Ketua : Hj. Djohrah AD

Wakil Ketua : Hj. St. Nursiah Zubair

Wakil Ketua II : Hadjrah Yusuf Yuddin

Wakil Ketua III	: Hj. St. Marwiah Abbas
Sekretaris I	: Dra. Ramiah Badaruddin
Sekretaris II	: Chaeriyah Akib
Sekretaris III	: Hj. Suryati Djabbar
Bendahara I	: Hj. Rukiah Khalid
Bendahara II	: Hj. Nasyiah Abdullah
Ketua Bidang Tabliq	: St. Ramlah Yunus
Ketua Bidang PK	: Hj. St. Zaenab Rakib
Ketua Bidang PKS	: St. Rusmah Lailu Abdullah
Ketua Bidang Ekonomi	: Hj. Suryati SM. Sanggu
Ketua Bidang Pembinaan Kader	: Hj. Misbahu Abdullah, S.Ag.

9. Periode 2000 – 2005, sesuai dengan Keputusan Musyawarah Daerah Aisyiyah Ke-13 tanggal 01 – 03 Dzulqadah 1421 H, bertepatan dengan tanggal 26 – 28 Januari 2001 M, bertempat di Cabang Mariso, dengan susunan Kepengurusan sebagai berikut :

Ketua	: Dra. Ramiah Badaruddin
Wakil	: Ramlah Yunus
Wakil	: St. Rusmah Abdullah
Wakil	: Hj. Chaeriyah Akib
Sekretaris	: Hadjrah Yusuf Yuddin
Wakil Sekretaris	: Badria Solo
Wakil Sekretaris	: Djuharni Mustari

Bendahara	: Hj. Rukiah Khalid
Wakil Bendahara	: Hj. Nasyiah Abdullah
Wakil Bendahara	: Hj. Rafiah H.
Ketua Tabligh	: Dra. Hj. Khaeriyah A. Jabbar
K. Dikdasmen	: Dra. Hj. Aisyiyah Damopoli
Ketua Binkes/LH	: Dra. Hj. Hamdana Dahlan, M.Kes.
Ketua PKS	: Maryam Siking
Ketua Ekonomi	: Hj. Suryati SM. Sanggu
Ketua Kader	: Sulaifah Wahab SP.
Ketua LPP	: Hj. Tuty Suciaty SH. M.Si
Ketua HLO	: Hj. Hj. Cendrawati Arfah
Ketua Lembaga Budaya	: Aida Azis, S.Pd. M.Pd.

10. Periode 2010 – 2015, berdasarkan Keputusan Musyawarah Daerah ‘Aisyiyah kota Makassar Ke-14, tanggal 14 Rabiul Akhir 1427 H, yang bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2006 M, bertempat di Cabang Tallo, menetapkan kepengurusan PDA kota Makassar sebagai berikut :

Ketua	: Hj. Chaeriyah Akib
Wakil Ketua	: Dra. Hj. Aisyiyah Damopoli
Wakil Ketua	: Dra. Rahmiah Badaruddin, M.Si
Wakil Ketua	: Dra. Hj, Khaeriyah A. Jabbar
Wakil Ketua	: Hj. Tuty Suciaty SH. M.Si
Wakil Ketua	: St. Rusmah Abdullah

Sekretaris	: Djuharni Mustari
Wakil Sekretaris	: Ratna Dewi Ibrahim SS. M.Hum
Wakil Sekretaris	: Hadjarah Yusuf Yuddin
Bendahara	: Hj. Rukiah Khalid
Wakil Bendahara	: Badria Solo
Ketua Majelis Tabligh	: St. Zohrah Marzuki
Ketua Majelis Dikdasmen	: Dra. Hj. Syahribulan K. M.Pd
Ketua Majelis Kesj. Sosial	: Maryam Siking
Ketua Majelis Kesehtan/LH	: Dra. Hj. Hamdana Dahlan, M.Kes
Ketua Majelis Ekonomi	: Budiarti Bachtiar SE.
Ketua Majelis Kader	: Sulaifah Wahab SP.
Ketua LPP	: Dra. Hj. Cendranawati Arfah
Ketua LHOHA	: Hj. Djalailah Jamal
Ketua L. Hub. Pub.	: Hj. Ir. Faidah Azuz, M.Si

Setelah terbentuknya kepengurusan 'Aisyiyah kota Makassar secara resmi, dalam perkembangannya tetap mengacu serta berpedoman kepada struktur organisasi maupun tujuan didirikan 'Aisyiyah, dalam merealisasikan program kerja sebagaimana amanah K.H. Ahmad Dahlan memberikan bekal perjuangan sebagai berikut :

- a. Dengan keiklasan hati menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam sesuai dengan bakat dan kecakapannya, tidak menghendaki sanjung puji dan tidak mundur selangkah karena dicela.

- b. Penuh keinsyafan bahwa beramal itu harus berilmu
- c. Jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap sah oleh Tuhan Allah hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan
- d. Membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam
- e. Menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sekerja dan seperjuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah (PPA), Dra.Hj. Nurjannah di Yogyakarta, tanggal 22 Maret 2012, bertempat di Kantor Pimpinan Pusat 'Aisyiyah menjelaskan bahwa, "Realitas gerakan dan manfaat 'Aisyiyah selama ini telah dirasakan oleh masyarakat luas terlihat dari banyaknya amal usaha yang dilakukan. Sebuah cita-cita yang didambakan Nyai Ahmad Dahlan sejak didirikan 'Aisyiyah; selangkah demi selangkah, setahap demi setahap mulai diwujudkan. Satu abad bukan waktu yang singkat untuk sebuah organisasi yang masih tetap eksis. Hal ini menunjukkan estafet gerakan Aisyiyah telah berjalan diiringi dengan sistem organisasi yang solid dan mekanisme kerja yang terstruktur.

Demikian halnya program kerja 'Aisyiyah kota Makassar, terutama program yang diprioritaskan sesuai dengan visi dan misi organisasi setelah resmi didirikan adalah, program konsolidasi organisasi, meningkatkan dan menggerakkan cabang dan ranting Aisyiyah sebagai basis dan ujung tombak gerakan di tingkat akar rumput refitalisasi ranting dengan kegiatan kunjungan pembinaan cabang dan ranting secara terpadu. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh bahwa, PDA kota Makassar sampai dengan tahun 2011 sebanyak 25 cabang dari 14 Kecamatan, dan 103 Ranting yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di kota Makassar.

Seiring dengan itu beberapa program kerja yang diprioritaskan yang secara garis besar dapat dijelaskan terkait dengan visi, misi, dan tujuan yang melatar belakangi didirikan 'Aisyiyah (Muhammadiyah), khususnya di kota Makassar yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam konteks program kerja 'Aisyiyah kota Makassar, terutama program operasional Thayyibah.

- 1) Program Qariyah Thayyibah, adalah wadah yang sangat tepat untuk meningkatkan program bidang secara terpadu. Tanggal 17-08-2008, PDA kota Makassar mengadakan sosialisasi Qarya Thayyibah yang dihadiri 25 cabang. PCA Ujung Tanah dan Manggala merupakan pembinaan secara terpadu kegiatan lintas dialogis cabang Bara-baraya dan Mariso dalam pembinaan tahap awal.
- 2) Menjadikan amal usaha khususnya TK ABA dengan wadah terbinanya "Hidup Sehat" dan penanaman nilai dasar keagamaan secara dini sasaran adalah murid dan guru-guru sebagai program lintas majelis MKLH Pendidikan dan Tabligh.
- 3) Konsolidasi Organisasi, dalam rangka meingkatkan profesionalisme pengelolaan administrasi, sehingga tercapai kearifan dan keefisienan PDA Makassar membangun kantor dengan nama "Pusat Dakwah Aisyiyah Makassar" terletak di jalan Landak Baru Lr II No. 9A. Dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Pembebasan tanah seluas 210 m² dan 333 m² jumlah 543 m² tahun 2002.

- (2) Peletakan batu pertama ; fondasi kantor dan aula tanggal 19 agustus 2006.
- (3) Pembangunan kantor selesai tahun 2007.
- (4) Pembangunan aula seluas 22,5 m rencana penyelesaian akhir 2010.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, eksistensi ‘Aisyiyah sebagai sebuah organisasi serta langkah yang ditempuhnya dalam upaya mewujudkan masyarakat madani merupakan salah satu indikator sebagai identitas yang dimiliki untuk mengidentifikasi ada tidaknya perkembangan masyarakat madani. Relevansi indikatornya yaitu termanifestasi dalam organisasi yang dipenuhi oleh gerakan ‘Aisyiyah. Hal tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip organisasi yang dipahami oleh masyarakat madani sebagai perwujudan identitasnya secara material. Dengan demikian, masyarakat madani bukan merupakan individu- individu yang partisipatif dan otonom saja, tetapi terdiri atas sekumpulan individu warga yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi yang memiliki tatanan, serta menjamin anggota-anggotanya untuk mampu mengekspresikan diri, mengembangkan minat, saling menukar informasi, memediasi perbedaan-perbedaan dan menciptakan pola-pola hubungan yang stabil. Di samping itu, mereka tertata dalam organisasi modern yang mengembangkan nilai-nilainya sendiri secara konsisten.

Hal senada diungkapkan oleh salah satu Pengurus Pusat ‘Aisyiyah (Dra. Hj. Shoimah), tanggal 25 Maret 2012 di Yogyakarta, bahwa makna gerakan ‘Aisyiyah sebagai manifestasi dari cita-cita menuju masyarakat madani juga sejalan dengan visi pengembangan organisasi ‘Aisyiyah, yaitu “tercapainya amal usaha Aisyiyah yang

mengarah terhadap penguatan dan pengembangan dakwah yang lebih berkualitas menuju masyarakat madani (masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”) yang merupakan penjabaran berkesinambungan dari visi idealnya untuk tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang utama.

Gerakan dakwah yang dimaksud adalah *Dakwah Islam Amar Makruf Nahi Munkar*. Dakwah Islam; artinya mengajak, menyeru dan memanggil kepada umat manusia untuk memeluk dan melaksanakan (menegakkan) ajaran Islam. Amar makruf; artinya mengajak dan menunjukkan pada hal-hal yang baik, bermanfaat dan terpuji. Dan, Nahi Munkar; artinya mencegah, melarang, menolak, menjauhkan dan mengikis hal-hal yang buruk, kotor dan keji. ‘Aisyiyah bukan hanya sekadar nama besar sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia. ‘Aisyiyah memiliki jaringan struktural yang cukup kuat dan luas di seluruh wilayah Nusantara yang sangat menunjang gerak dakwah yang dilakukannya.

Jaringan struktural organisasi ‘Aisyiyah tersebar dan berjenjang dalam beberapa level yang mempunyai kewenangan dan wilayah kerja masing-masing. Jaringan yang tersebar di seluruh daerah ini merupakan potensi yang sangat besar membangun umat dan bangsa ini menuju masyarakat utama dalam bentuk sinergi dan jaringan yang kuat di dalam berbagai bidang. Jaringan struktural merupakan kontribusi ‘Aisyiyah yang sangat besar dalam mengakomodasikan warga menyalurkan aspirasinya, sekaligus mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh daerah melalui berbagai aktivitas dakwah keagamaan, pendidikan, kesejahteraan, sosial, kesehatan dan sebagainya.

Pengembangan dakwah Islam melalui dakwah jamaah dan dakwah kultural merupakan strategi dakwah masa kini. Strategi ini dikembangkan mengingat tantangan global semakin kompleks, perkembangan teknologi, dan pola pikir umat yang semakin berkembang. Konsep tersebut kemudian diwujudkan melalui gerakan TIT 'Aisyiyah dengan menggunakan pendekatan sumber daya manusia (SDM), pendekatan ekonomi dan kesejahteraan, pendekatan struktural serta pendekatan global.

Pendekatan sumber daya manusia melalui upaya mencerdaskan kehidupan umat. Pendekatan ekonomi dan kesejahteraan dilaksanakan dengan mengajarkan etos kerja yang tinggi. Pendekatan struktural tetap ditingkatkan dengan mewujudkan kegiatan politik dan birokrasi sebagai pendukung dan pelindung dakwah. Pendekatan global juga perlu dilakukan dengan berpikir makro dan mikro secara seimbang, beraktivitas lintas sektoral, membangun kolektivitas dan individual, umum maupun khusus, untuk kemaslahatan umat dunia.

Dalam melaksanakan gerakannya, penggarapan masyarakat umum atau individu yang telah beragama Islam dilakukan melalui gerakan TIT tersebut, yaitu Tajdidiyah artinya pembaruan; Islahiyah artinya peningkatan, dalam pemahaman agama atau mengembalikan ajaran agama sesuai tuntunan Qur'an dan Sunnah. Islahiyah artinya perdamaian, kerukunan atau persaudaraan dalam kemasyarakatan. Tabsyiriyah artinya penggembiraan, pembimbingan serta pemberian dorongan dalam beribadah dan beramal saleh. Di antara bidang garap yang dapat diTITkan, yaitu Ibadah, Akhlaq, Tauhid, Tabligh, Kegiatan Jihad, Persatuan dan

Syi'ar Islam, Pendidikan, Seni dan Budaya, Kesehatan, Ekonomi, serta amalan-amalan Islam lainnya dengan tujuan untuk mewujudkan pribadi muslim, mukmin dan mukhsin.

Misi Gerakan TIT 'Aisyiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan meliputi: menanamkan keyakinan, memperdalam, memperluas pemahaman, meningkatkan pengalaman, menyebarkan ajaran agama Islam dalam segala aspek kehidupan; meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap agama Islam; memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, serta mempertinggi akhlak; meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, membangun dan memelihara tempat ibadah, serta amal usaha yang lain; meningkatkan pendidikan, membangun kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian.

Selain itu, memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas; meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup; meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan, kebenaran serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa; meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri serta usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

Masing-masing masyarakat di Indonesia dengan keberagaman etnis, bahasa, agama dan adat istiadat telah memiliki mekanisme dan pengaturan sosial yang berbeda-beda. Namun demikian, perlu dipahami bahwa seluruh aktivitas tersebut

dilakukan secara mandiri dan mendorong partisipasi dalam kebersamaan. Bentuk-bentuk masyarakat partisipatif yang demikian inilah yang terus dikembangkan agar kehidupan yang demokratis dapat ditopang oleh masyarakat madani. Hal tersebut, 'Aisyiyah ikut memberikan jawaban atas berbagai permasalahan, baik problematika daerah, wilayah maupun global yang dari waktu ke waktu senantiasa mengalami pengembangan. Peran dan komitmen serta tanggung jawab 'Aisyiyah semakin besar dan terbuka. Kehadiran dan keterpanggilan 'Aisyiyah di setiap jengkal lahan amal usaha merupakan wujud gerakan rahmatan lil 'alamin.

Seperti halnya Muhammadiyah, berdirinya 'Aisyiyah dilatarbelakangi adanya keprihatinan mendalam akan kondisi bangsa Indonesia, khususnya perempuan. Pada awal abad ke 20, paham budaya yang mensubordinasi derajat dan kedudukan kaum perempuan telah menjadi sumber kebodohan dan ketertinggalan. Pada masa itu, sekolah-sekolah hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki, itupun terbatas pada kalangan tertentu (priyayi). Jadi, tidaklah mengherankan jika peran perempuan pada masa itu dibatasi pada sektor domestik. Pandai di dapur dan mengasuh anak menjadi tolok ukur kualitas gadis-gadis masa itu. Demikianlah, "ketika para wanita disibukkan oleh pekerjaan domestik, KH. Ahmad Dahlan justru berpikir sebaliknya, dan mengatakan kepada wanita untuk menjalankan tugas dalam menghadapi masyarakat (publik)".

Setelah berdirinya organisasi 'Aisyiyah di kota Makassar tahun 1926, mulai melaksanakan kerja-kerja sosial untuk kemajuan dan peningkatan harkat dan martabat perempuan di daerah ini. Dalam hal hal ini 'Aisyiyah termasuk organisasi yang turut

memprakarsai dan membidangi terbentuknya organisasi wanita pada tahun 1928. Demikian, 'Aisyiyah bersama dengan organisasi wanita lain bangkit berjuang membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan kebodohan. Badan federasi ini diberi nama Kongres Perempuan Indonesia yang sekarang menjadi KOWANI (Kongres Wanita Indonesia). Lewat federasi ini berbagai usaha dan bentuk perjuangan bangsa dapat dilakukan secara terpadu.

B. Sambutan Masyarakat Terhadap 'Aisyiyah Kota Makassar

Kelahiran 'Aisyiyah pada Tahun 1926 di kota Makassar, pada zaman sebelum kemerdekaan sebagai organisasi kemasyarakatan didasari oleh semangat kebangsaan mengambil peran aktif untuk turut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, khususnya dalam mendampingi pejuang-pejuang kemerdekaan di kota Makassar, dalam membela harkat dan martabat bangsa Indonesia. Kegiatan awal yang dilaksanakan adalah membentuk kelompok-kelompok pengajian untuk para ibu-ibu dan remaja putri berupa pengajian pondokan. Kegiatan ini mendapat sambutan baik di berbagai kalangan masyarakat.

Perkembangan selanjutnya, 'Aisyiyah membuka lembaga pendidikan formal yang dikelola oleh pengurus yang menangani masalah pendidikan yang samapai sekarang masih digunakan istilah *Majelis Pendidikan*. Kemampuan 'Aisyiyah membuka lembaga pendidikan formal saat itu masih berorientasi pada pendidikan Taman Kanak-kanak di Indonesia yang pertama yaitu pada tahun 1940 dan diberi nama "Bustanul Athfal".

Melihat sambutan baik masyarakat terhadap keberadaan TK (Taman Kanak-kanak, maka Aisyiyah berusaha membuka lembaga pendidikan formal yang lebih tinggi yaitu “Sekolah Dasar” sehingga berdirilah Sekolah Dasar Aisyiyah di Cabang Makassar yang berlokasi di Jl. Muhammadiyah. Dalam bidang keagamaan yang dikelola oleh bagian Tabligh di cabang Mamajang didirikan mesjid yang diberi nama Aisyiyah yaitu “Mesjid Aisyiyah Cabang Mamajang”. Pada periode 1990-1995 sampai sekarang, salah satu program unggulan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) kota Makassar ialah “Pembinaan Karya Thoyyibah” yang berlokasi di cabang Manggala dilaksanakan oleh masing-masing PCA tersebut dalam rangka pembinaan karya thoyyibah hanya bersifat temporer seperti pembagian bantuan sembako, pemberian makanan tambahan, sunatan massal, pengobatan gratis bagi masyarakat khususnya warga binaan dan tidak menutup kemungkinan menjangkau masyarakat umum walaupun tidak terdaftar sebagai warga binaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat menjelang Hari Raya Islam atau dalam rangka Milad Aisyiyah.

Dalam rangka beberapa kegiatan yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat terhadap eksistensi Aisyiyah ditengah-tengah masyarakat cukup positif karena semua kegiatan yang dilaksanakan sangat relevan dan signifikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan karena selalu didukung oleh masyarakat. Dengan demikian, ‘Aisyiyah adalah sebuah organisasi atau gerakan perempuan Muhammadiyah yang lahir sebagai organisasi Islam di Indonesia. Dalam kiprahnya sebagai komponen perempuan Muhammadiyah hampir satu abad di Indonesia, saat ini ‘Aisyiyah telah

memiliki 33 Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) setingkat Provinsi, 370 Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) setingkat kabupaten/kota, 2.332 Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA) setingkat kecamatan, dan 6.924 Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah (PRA) setingkat kelurahan/desa. Selain itu, ‘Aisyiyah memiliki amal usaha yang bergerak di berbagai bidang yaitu: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat (Dokumen PPA, 2000: 39).

Amal Usaha dibidang pendidikan saat ini berjumlah 4.560 yang terdiri dari Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak (TK), Tempat Penitipan Anak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan lain-lain. Sedangkan amal usaha di bidang kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Badan Kesehatan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan dan Posyandu berjumlah 280 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai gerakan yang peduli dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan, ‘Aisyiyah hingga kini telah memiliki sekitar 459 amal usaha yang bergerak di bidang ini meliputi: Rumah Singgah Anak Jalanan, Panti Asuhan, Dana Santunan Sosial, Tim Pengrukti Jenazah dan Posyandu (Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 2000:57).

‘Aisyiyah menyadari, bahwa harkat martabat perempuan Indonesia tidak akan meningkat tanpa diikuti peningkatan kemampuan ekonomi di lingkungan perempuan. Karena itu, berbagai amal usaha yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi ini diantaranya koperasi, Baitul Maal wa Tamwil, Toko/kios, Simpan Pinjam, home industri, kursus ketrampilan dan arisan. Jumlah amal usaha ini hingga kini sebanyak 503 buah. Kemudian ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan

keagamaan yang terbesar di wilayah Indonesia juga memiliki beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya kesadaran terhadap kehidupan bermasyarakat muslim Indonesia. Hingga saat ini kegiatan yang mencakup pengajian, Qoryah Thayyibah, Kelompok Bimbingan Haji (KBIH), badan zakat infaq dan shodaqoh serta musholla berjumlah 3785 buah.

Sejalan dengan latar belakang lahirnya 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah, termotivasi oleh pemahaman kesejahteraan sosial yang diperjuangkan 'Aisyiyah adalah terciptanya suatu kondisi ideal dari tata kehidupan masyarakat yang *baldatun thayyibatun warabbun ghaffur*, yaitu suatu kehidupan bahagia sejahtera penuh limpahan rahmat dan nikmat Allah swt.di dunia dan akhirat. Dengan demikian, akan tercipta suatu titik keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah maupun aspek material dan spiritual. Sejak berdirinya 'Aisyiyah kota Makassar tahun 1926, kegiatan kesejahteraan sosial telah dimulai dengan kegiatan sosial yang membantu kaum miskin dan anak yatim. Dalam perkembangannya hingga sekarang, program kesejahteraan sosial 'Aisyiyah tersistim ke dalam unit-unit kegiatan sosial yang meliputi :

1. Kepedulian usaha-usaha pelayanan dan penyantunan bagi kelompok masyarakat Dhuafa (miskin).
2. Pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial yang dikelola oleh 'Aisyiyah seperti panti asuhan, panti jompo, balai latihan, rumah singgah, dan lain-lain.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan.

4. Pelayanan dan penanggulangan bencana (musibah).
5. Advokasi publik yang menyangkut masalah-masalah sosial di berbagai lapisan masyarakat.
6. Mengembangkan pola pencegahan dan pemberian bantuan terhadap korban trafficking serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terkait dengan sejarah berdirinya 'Aisyiyah kota Makassar sebagai organisasi perempuan yang pertama, termasuk memelopori hari lahirnya IBI (Ikatan Bidan Indonesia) yang seluruh anggotanya terdiri atas kaum wanita telah diterima menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) pada tahun 1951, hingga saat ini IBI khususnya yang dipelopori 'Aisyoyah kota Makassar aktif mendukung program-program KOWANI bersama organisasi wanita lainnya dalam meningkatkan derajat kaum wanita. Selain itu, sesuai dengan UU RI No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, maka IBI terdaftar sebagai salah satu Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) di kota Makassar. Untuk pertama kalinya IBI melangsungkan Kongres di luar pulau Jawa, tepatnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan dan dalam kongres ini juga didahului dengan pertemuan ICM Regional Meeting for Western Pacific yang dihadiri anggota ICM dari Jepang, Australia, New Zealand, Phillipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya pada tahun 1986 IBI secara organisatoris mendukung pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana oleh bidan Praktek Swasta melalui BKKBN.

Memasuki awal abad XX sebagian besar kondisi yang terbentuk di sepanjang abad XIX terus berlangsung. Dalam konteks ekonomi, perluasan aktivitas ekonomi

sebagai dampak perluasan penanaman modal swasta asing maupun perluasan pertanian rakyat belum mampu menimbulkan perubahan ekonomi secara struktural sehingga kondisi hidup sebagian besar penduduk di kota Makassar masih tetap relatif rendah. Di beberapa tempat penduduk pribumi memang berhasil mengembangkan pertanian khususnya tanaman ekspor dan mendapat keuntungan yang besar, akan tetapi ekonomi mereka masih sangat labil terhadap perubahan pasar.

Perluasan aktivitas ekonomi tersebut menimbulkan persaingan yang semakin besar sehingga para pengusaha industri pribumi Kota Makassar, harus bersaing dengan produk impor yang lebih berkualitas dan lebih murah di pasar-pasar lokal, sedangkan para pedagang pribumi harus bersaing ketat dengan pedagang-pedagang asing yang terus mendominasi perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional. Dalam perkembangan selanjutnya persaingan ini, khususnya di Kota Makassar tidak lagi hanya terbatas pada masalah ekonomi, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial, kultural, maupun politik. Walaupun dalam bidang politik terjadi pergeseran dari kekuasaan administratif yang tersentralisasi ke arah desentralisasi pada tingkat lokal (Kota Makassar), kontrol yang ketat pejabat Belanda terhadap pejabat pribumi masih tetap berlangsung.

Terkait dengan kondisi tersebut di atas, komitmen organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar untuk menegakkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dimulai sejak organisasi ini berdiri. Melalui majelis ekonomi mengimplementasikan berbagai program ekonomi dan program pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Program pengembangan ekonomi di mulai dari tingkat

ranting dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan usaha-usaha yang selama ini dirintis dan dikelola di tingkat ranting. Pengembangan ekonomi ini kemudian diwadahi dalam bentuk badan usaha ekonomi keluarga Aisyiyah (BUEKA). Secara garis besar keberadaan serta perkembangan BUEKA Kota Makassar, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. BUEKA merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan dan idealism yang sama untuk mengembangkan bisnis mereka;
- b. Wadah organisasi ini (BUEKA) tidak hanya bergerak dalam usaha pengembangan tetapi juga member pendidikan ketrampilan;
- c. Pengorganisasian anggota;
- d. Pemasaran, sewa menyewa, dan Simpan menyimpan;
- e. Pelatihan manajemen usaha, dan pengembangan ekonomi Aisyiyah juga difokuskan pada pemberdayaan perempuan.

Hal ini dimaksudkan agar mendorong mereka menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan tidak menjadi beban keluarga. Usaha-usaha yang dirintis dan dikembangkan 'Aisyiyah Kota Makassar, meliputi: koperasi, toko/kios, warung kantin, kursus ketrampilan, arisan, simpan pinjam, home industry, dan membina putri-putri dalam kegiatan bazaar. Tantangan Aisyiyah ke depan yang memiliki anggota yang banyak merupakan sesuatu yang potensial dalam mengembangkan ekonomi dan masih lemahnya sistem pemberdayaan.

Kebijakan ekonomi pemerintah kadang tidak mengakomodasikan dan tidak berpihak kepada kaum perempuan. Untuk itu Aisyiyah harus mampu mengembangkan

sumber dayanya secara optimal, agar dapat menciptakan peluang membangun hubungan kerja. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, serta menghidupkan ranting dalam menjalin silaturahmi.

Selain itu, peran 'Aisyiyah dalam bidang sosial tidak perlu diragukan. Sejak awal berdirinya organisasi ini mulai dari tingkat pusat sampai daerah (Kota Makassar) memiliki kepedulian sangat tinggi kepada masyarakat akar rumput (lapisan bawah). Melalui Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) dalam 5 (lima) tahun terakhir program yang dikembangkan terkait dengan bidang sosial 'Aisyiyah Kota Makassar membina :

- 1) Panti asuhan sejumlah 5 buah;
- 2) Memberi sumbangan pada kaum dua'fa/fakir miskin;
- 3) Member bantuan kunjungan ke lokasi musibah, longsor dan kebakaran;
- 4) Kunjungan silaturahmi kepada anggota Aisyiyah yang sakit dan kedukaan dan bantuan ini berupa pakaian, makanan, obat-obatan, dan dana yang sumbernya dari partisipasi anggota;
- 5) Pengajian, pembinaan pada kunjungan silaturahmi dipanti asuhan;
- 6) Mengadakan infaq dan zakat fitrah pada bulan ramadhan kepada masyarakat kecil.

Dengan demikian, gerakan Aisyiyah sangat menyentuh kepedulian masyarakat yang layak memperolehnya. Sementara itu, kebijakan Politik Balas Budi atau Politik Etis yang difokuskan pada bidang edukasi, irigasi, dan kolonisasi yang dilaksanakan sejak dekade pertama abad XX, telah memberikan kesempatan lebih

luas kepada penduduk pribumi termasuk Pengurus 'Aisyiyah Kota Makassar mengikuti pendidikan Barat dibandingkan dengan masa sebelumnya, yaitu melalui pembentukan beberapa lembaga pendidikan khusus bagi penduduk pribumi sampai di tingkat desa, tetapi, kesempatan ini tetap saja masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pribumi secara keseluruhan.

Kesempatan tersebut, masih tetap diprioritaskan bagi kelompok elit penduduk pribumi, atau kesempatan pertama yang ada hanya terbuka untuk pendidikan rendah, sedangkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di tingkat menengah dan tinggi masih sangat terbatas. Seperti pada masa sebelumnya, kondisi seperti ini terbentuk selain disebabkan oleh kebijakan pemerintah kolonial, juga dilatarbelakangi sikap antipati dari kelompok Islam, yang menjadi pendukung utama masyarakat pribumi terhadap pendidikan Barat itu sendiri.

Secara umum mereka lebih suka mengirimkan anak-anak mereka ke pesantren, atau hanya sekedar ke lembaga pendidikan informal lain yang mengajarkan pengetahuan dasar agama Islam. Namun, sebenarnya ada dualisme cara memandang pendidikan Barat ini. Di samping dianggap sebagai perwujudan dari pengaruh Barat atau Kristen terhadap lingkungan sosial dan budaya lokal maupun Islam, pendidikan Barat juga dilihat secara objektif sebagai faktor penting untuk mendinamisasi masyarakat pribumi yang mayoritas beragama Islam.

Pendidikan Barat yang telah diperkenalkan pada penduduk pribumi secara terbatas ini ternyata telah menciptakan kelompok intelektual dan profesional yang telah mampu melakukan perubahan-perubahan maupun memunculkan ide-ide baru di

dalam masyarakat maupun sikap terhadap kekuasaan kolonial. Perubahan dan pencetusan ide-ide baru itu pada masa awal hanya terbatas pada bidang sosial, kultural, dan ekonomi, akan tetapi kemudian mencakup juga permasalahan politik. Walaupun feodalisme dalam sikap maupun struktur yang lebih makro di dalam masyarakat, khususnya di Kota Makassar masih tetap berlangsung, pembentukan "organisasi modern" merupakan salah satu realisasi yang penting dari upaya perubahan dengan ide-ide baru tersebut.

Peran 'Aisyiyah Kota Makassar dalam bidang pendidikan secara garis besar dapat digambarkan bahwa, pendidikan merupakan salah satu elemen dasar dalam pembangunan bangsa. Pendidikan menyimbolkan kapasitas sosial dari sebuah masyarakat untuk menyerap pengetahuan dan sains yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. 'Aisyiyah dengan misi utam mengangkat harkat dan martabat wanita. Kondisi kaum wanita saat lahirnya 'Aisyiyah kurang berperan sesuai fungsinya, dan sisi ideologi pendidikan di daerah ini (Kota Makassar) sebenarnya sudah cukup mendapat tempat dari pendiri bangsa. Hal ini dapat terwujud dengan masuknya pendidikan sebagai salah satu prioritas utama. Dalam pembukaan UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) juga mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak rakyat dan kewajiban pemerintah untuk membiayainya. Kemudian UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mensyaratkan belanja pendidikan pada APBN sebesar 20% melalui majelis Dikdasmen.

Program Kerja 'Aisyiyah Kota Makassar bidang pendidikan meliputi :

- a) Aisyiyah kota Makassar membina taman kanak-kanak Bustanul Athfal sejumlah 56 buah. Suatu rekor terbesar di banding binaan organisasi lainnya. Walaupun masih sangat bervariasi pengelolaannya dan kapasitas baik guru maupun sarana dan prasarana, telah menyebar di setiap ranting di kota Makassar. Jelas Aisyiyah telah maksimal membantu pemerintah sebagai mitra untuk mencerdaskan bangsa;
- b) Di samping itu, membina satu SMU, satu SMP dan satu SD;
- c) Untuk meningkatkan mutu SDM, tenaga kependidikan dan karyawan, majelis Dikdasmen selalu mengadakan pelatihan/pentaran untuk meningkatkan pembelajaran;
- d) Aktif mengadakan pertemuan dengan semua taman kanak-kanak Bustanul Athfal bersama guru-gurunya sebagai pembinaan, dan
- e) Secara kontinyu melakukan kunjungan silaturahmi dan evaluasi kegiatan di setiap sekolah.

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis data yang diperoleh, harapan semua pengurus dan pimpinan 'Aisyiyah Kota Makassar, semoga usaha-usaha yang telah dilakukan dalam bidang pendidikan sains dapat ditingkatkan dan mendapat ridho dari Allah swt. Kepedulian dan peranserta 'Aisyiyah Kota Makassar dalam bidang pendidikan sejak berdirinya hingga dewasa ini, sejalan dengan Dunia Islam pada umumnya dan Masyarakat Muslim di Indonesia secara makro, perkembangan dunia Islam pada akhir abad XIX dan awal abad XX yang ditandai oleh usaha untuk

melawan dominasi Barat setelah sebagian besar negara yang penduduknya beragama Islam secara politik, sosial, ekonomi, maupun budaya telah kehilangan kemerdekaan dan berada di bawah kekuasaan kolonialisme dan imperialisme Barat sejak beberapa abad sebelumnya. Dalam masyarakat Muslim sendiri muncul usaha untuk mengatasi krisis internal dalam proses sosialisasi ajaran Islam, akidah, maupun pemikiran sebagian besar masyarakat, baik yang disebabkan oleh dominasi kolonialisme dan imperialisme Barat, maupun sebab-sebab lain yang ada dalam masyarakat Muslim itu sendiri.

Dalam kehidupan beragama ini terjadi kemerosotan *ruhul Ishmi*, jika dilihat dari ajaran Islam yang bersumber dari Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Pengamalan ajaran Islam bercampur dengan bid'ah, khurafat, dan syi'ah. Di samping itu, pemikiran umat Islam juga terbelenggu oleh otoritas mazhab dan taqlid kepada para ulama sehingga ijtihad tidak dilakukan lagi. Dalam pengajaran agama Islam, secara umum Qur'an yang menjadi sumber ajaran hanya diajarkan pada tingkat bacaan, sedang terjemahan dan tafsir hanya boleh dipelajari oleh orang-orang tertentu saja. Sementara itu, pertentangan yang bersumber pada masalah khilafiyah dan firu'iyah sering muncul dalam masyarakat Muslim, akibatnya muncul berbagai firqah dan pertentangan yang bersifat laten.

Terkait dengan kemerosotan tersebut, 'Aisyiyah Kota Makassar sejak berdirinya tahun 1926 muncul ide-ide pemurnian ajaran dan kesadaran politik di kalangan umat Islam melalui pemikiran dan aktivitas tokoh-tokoh di daerah ini terutama dipengaruhi oleh pemikiran Jamaludin Al-Afgani, Muhammad Abduh,

Rasyid Ridha, dan para pendukung Muhammad bin Abdul Wahab. Jamaludin Al-Afgani banyak bergerak dalam bidang politik, yang diarahkan pada ide persaudaraan umat Islam dan gerakan perjuangan pembebasan tanah air oleh umat Islam dari kolonialisme Barat. Sementara itu, Muhammad Abduh dan muridnya, Rasyid Ridha, berusaha memerangi kestatisan, syirik, bid'ah, khurafat, taqlid, dan membuka pintu ijtihad di kalangan umat Islam. Restrukturisasi lembaga pendidikan Islam dan mewujudkan ide-ide ke dalam berbagai penerbitan merupakan wujud usaha pemurnian dan pembaharuan yang dilakukan oleh para ulama daerah ini.

Selain itu, seperti yang terjadi di dalam dunia Islam secara umum, terutama di Kota Makassar pada abad XIX juga mengalami krisis kemurnian ajaran, kestatisan pemikiran maupun aktivitas, dan pertentangan internal. Perjalanan historis penyebaran agama Islam di daerah ini sejak masa awal, melalui proses akulturasi dan sinkretisme, pada satu sisi telah berhasil meningkatkan kuantitas umat Islam. Akan tetapi secara kualitas muncul kristalisasi ajaran Islam yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Di Pulau Jawa misalnya; persoalan kemurnian ajaran Islam ini sangat terasa karena unsur-unsur lokal sangat berpengaruh proses sosialisasi ajaran Islam dalam masyarakat seperti tahlilan, dan sebagainya.

Pemerintah kolonial cenderung melihat Islam sebagai ancaman yang langsung terhadap eksistensi kekuasaan kolonial. Karena itu, setiap aktivitas yang terkait dengan Islam selalu dicurigai dan dianggap sebagai langkah melawan penguasa. Berdasarkan konsep yang dikembangkan C. Snouck Hurgronje akhir abad XIX pemerintah kolonial secara tegas memisahkan Islam dari politik, namun Islam sebagai

ajaran agama dan kegiatan sosial dibiarkan untuk berkembang walaupun tetap berada dalam pengawasan yang ketat. Kecurigaan pemerintah kolonial yang berlebihan terhadap Islam, membatasi kreativitas umat, baik dalam pengertian ajaran, pemikiran, dan penyesuaian diri terhadap dinamika dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat secara umum.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh munculnya sikap taqlid kepada para ulama tertentu pada sebagian besar umat Islam di Kota Makassar, dan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Pemerintah kolonial juga berusaha mengeksploitasi perbedaan yang ada dalam masyarakat yang berhubungan dengan Islam, seperti perbedaan sosio-antropologis antarkelompok sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Selain itu, aktivitas kristenisasi yang dilakukan oleh misi Katolik maupun Protestan terhadap penduduk pribumi yang telah beragama Islam terus berlangsung tanpa halangan dari penguasa kolonial. Lembaga pendidikan dasar sampai menengah, panti asuhan, dan rumah sakit yang didirikan oleh missionaries sebagai pendukung proses kristenisasi, dan mendapat bantuan dana yang besar dari pemerintah.

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 'Aisyiyah Kota Makassar

Struktur organisasi adalah rangkaian aturan yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi organisasi yang meliputi pimpinan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan organisasi. 'Aisyiyah sebagai organisasi formal memerlukan adanya struktur organisasi yang sehat dan efisien. Organisasi yang sehat

berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tertib, sedang struktur organisasi yang teratur berarti dalam menjalankan peranannya itu, masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja (wawancara setelah diolah, Maret 2012).

'Aisyiyah merupakan suatu organisasi formal dan informal. Suatu organisasi formal belum tentu bekerja secara sehat dan efisien, apabila hanya didasarkan pada struktur formalnya, sedangkan segi informalnya diabaikan. Karena itu, organisasi informal merupakan sesuatu yang akan melengkapi segi formal dari organisasi tersebut ('Aisyiyah Kota Makassar). Adapun peranan organisasi informal sebagai saluran informasi untuk mempertajam perasaan dan keutuhan pribadi, percaya diri dan kebiasaan bertindak kepada orang-orang yang tergabung dalam organisasi ('Aisyiyah). Dengan demikian, organisasi informal bertujuan untuk memperlancar hubungan dalam melaksanakan peran, tugas, fungsi, dan tanggungjawab yang diemban dalam organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang makna struktur organisasi dan tata kerja, maka berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian berdasarkan fakta lapangan dalam lima tahun terakhir susunan kepengurusan dan tata kerja 'Aisyiyah Kota Makassar Periode Tahun 2010 – 2015 sebagai berikut :

1. Ketua (Hj. Chaeriah Akib), mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab meliputi:
 - a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Makassar.

- b. Mengarahkan, membimbing, mengendalikan pelaksanaan program organisasi.
- c. Mengkoordinasikan anggota Pimpinan Daerah lainnya dalam menjalankan tugas masing-masing.
- d. Melakukan peran-peran strategis organisasi yang terkait dengan peran keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan sesuai prinsip dan kepentingan organisasi.
- e. Melakukan peran-peran pelayanan organisasi dan warga 'Aisyiyah maupun pelayanan umat (masyarakat).
- f. Mewakili Pimpinan Daerah baik ke dalam maupun keluar organisasi, sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Memimpin rapat-rapat Pimpinan Daerah.
- h. Membina dan mengkoordinasikan unsur Badan Pembantu Pimpinan.

Dalam merealisasikan program kerja yang diamanahkan organisasi baik secara formal diatur oleh ketentuan yang berlaku maupun secara informal merupakan tugas serta tanggung jawab Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kota Makassar dibantu oleh: (1) Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan; (2) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan.

2. Wakil Ketua (Hj. Aisyah Damopoli), yang mengemban tugas, fungsi, dan tanggung jawab :
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah 'Aisyiyah yang diserahkan kepadanya.

- b. Mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan program konsolidasi organisasi, serta mengkoordinasikan dengan majelis terkait.
- c. Membantu Ketua dalam melakukan pelayanan-pelayanan organisasi
- d. Membantu Ketua dalam melakukan tugas ke dalam maupun keluar organisasi sesuai mandat.
- e. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Daerah.
- f. Membina dan mengkoordinasikan unsur Badan Pembantu Pimpinan.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Wakil Ketua PDA Kota Makassar sebagaimana disebutkan di atas, juga dibantu oleh: (1) Majelis Tabligh, dan (2) Majelis Kesehatan.

3. Wakil Ketua (Dra. Hj. Muliati Amin, M.Ag), mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah yang diserahkan kepadanya.
- b. Membantu Ketua dalam melakukan pelayanan-pelayanan organisasi
- c. Membantu Ketua dalam melakukan tugas ke dalam maupun keluar organisasi sesuai mandat.
- d. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas, Wakil Ketua PDA Kota Makassar dibantu oleh: (1) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dan (2) Lembaga Kebudayaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

4. Wakil Ketua (Dra. Hj. Khaeriyah A. Jabbar), mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Membantu Ketua dalam melakukan tugas ke dalam maupun keluar organisasi sesuai mandat.
 - c. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Daerah.
 - d. Mengkoordinasikan bidang organisasi yang terkait dengan regulasi.
 - e. Membina dan mengkoordinasikan unsur Badan Pembantu Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di atas, Wakil Ketua PDA Kota Makassar dibantu oleh Majelis Pengembangan Kader.

5. Wakil Ketua (Hj. Tuty Suciaty, SH., M.Si), mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Membantu Ketua dalam melakukan tugas ke dalam maupun keluar organisasi sesuai mandat.
 - c. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Daerah.
 - d. Membina dan mengkoordinasikan unsur Badan Pembantu Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di atas, Wakil Ketua PDA Kota Makassar dibantu oleh Majelis Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Wakil Ketua (St. Rusmah Abdullah), yang mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah yang diserahkan kepadanya.
- b. Membantu Ketua dalam melakukan tugas ke dalam maupun keluar organisasi sesuai mandat.
- c. Membantu Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Daerah.
- d. Membina dan mengkoordinasikan unsur Badan Pembantu Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di atas, Wakil Ketua PDA Kota Makassar dibantu oleh Majelis Kesejahteraan Sosial.

7. Sekretaris (Djuharni Mustari), yang diamanahi tugas, fungsi dan tanggung jawab:

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
- b. Mengendalikan segala informasi masukan dan informasi keluaran yang diperlukan organisasi.
- c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Pimpinan Daerah, serta menyiapkan dan menyelesaikan hasil yang tertuang dalam kesimpulan dan/atau rumusan keputusan.
- d. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan rapat-rapat Pimpinan Daerah.
- e. Membantu Ketua Umum dan Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Daerah ketika mereka berhalangan.

- f. Memimpin kegiatan Sekretariat Pimpinan Daerah.
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan Sekretaris Pimpinan Daerah diperlukan oleh unsur Badan Pembantu Pimpinan.
8. Wakil Sekretaris (Ratna Dewi Ibrahim, SS., M.Hum), mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Membantu Sekretaris Umum dalam mengendalikan informasi masukan dan informasi keluaran yang diperlukan organisasi.
 - c. Membantu Sekretaris Umum dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Pimpinan Daerah, serta menyiapkan dan menyelesaikan hasil yang tertuang dalam kesimpulan dan/atau rumusan keputusan.
 - d. Membantu Sekretaris Umum dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan rapat-rapat Pimpinan Daerah.
 - e. Membantu Sekretaris Umum dalam memimpin kegiatan rapat Sekretaris Pimpinan Daerah ketika berhalangan.
9. Wakil Sekretaris (Hadjrah Yusuf Yuddin), mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Membantu sekretaris umum dalam mengendalikan informasi masukan dan informasi keluaran yang diperlukan organisasi.

- c. Membantu sekretaris umum dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus (Pimpinan Daerah), serta menyiapkan dan menyelesaikan hasil yang tertuang dalam kesimpulan dan/atau rumusan keputusan.
 - d. Membantu Sekretaris Umum dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan rapat-rapat Pimpinan Daerah.
 - e. Membantu Sekretaris Umum dalam memimpin kegiatan Sekretaris Pimpinan Daerah (Kota Makassar).
10. Bendahara (Hj. Rukiah Khalid), yang diamanahi tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Melaksanakan usaha-usaha penggalan dan pengelolaan dana organisasi
 - c. Menyusun dan mengatur RAPB organisasi
 - d. Menyusun sistem keuangan organisasi transparan dan akuntabel
 - e. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban keuangan.
11. Wakil Bendahara (Badria Solo), memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Membantu Bendahara Umum dalam usaha-usaha penggalan dan pengelolaan dana organisasi.
 - c. Membantu Bendahara Umum menyusun dan mengatur RAPB organisasi
 - d. Menyusun laporan keuangan secara periodik

- e. Secara khusus, bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan Kantor Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kota Makassar, yang berlokasi di Jalan Landak Baru Kota Makassar.
12. Ketua Majelis Tabligh (St. Zohrah Marzuki), mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Majelis Tabligh
 - c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang Tabligh dan Kehidupan Islami berdasarkan keputusan Mukhtamar, Tanwir, dan Kebijaksanaan Pimpinan Pusat.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Majelis Tabligh.
13. Ketua Majelis Dikdasmen (Dra. Hj. Syahribulan K., M.Pd), mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Majelis Dikdasmen.
 - c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang Pendidikan, khususnya pendidikan pra sekolah sampai pendidikan menengah berdasarkan keputusan Mukhtamar, Tanwir, dan Kebijaksanaan Pimpinan Pusat.

- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Majelis Dikdasmen.
14. Ketua Majelis Kesehatan (Dra. Hj. Hamdana Dahlan, M.Ks), memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Majelis Kesehatan.
 - c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup berdasarkan keputusan Mukhtar, Tanwir, dan Kebijakan Pimpinan Pusat.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Majelis Kesehatan.
15. Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial (Maryam Siking), memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial.
 - c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang Kesejahteraan Sosial berdasarkan keputusan Mukhtar, Tanwir, dan Kebijakan Pimpinan Pusat.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Majelis Kesejahteraan Sosial.

16. Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (Budiarti Bachtiar, SE), memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab:
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Majelis Ekonomi.
 - c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan berdasarkan keputusan Mukhtamar, Tanwir, dan Kebijaksanaan Pimpinan Pusat.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Majelis Ekonomi.
17. Ketua Majelis Pembinaan Kader (Sulaifah Wahab, SP), mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab :
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Majelis Pembinaan Kader
 - c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang Pembinaan Kader dan Ketenagakerjaan berdasarkan keputusan Mukhtamar, Tanwir, dan Kebijaksanaan Pimpinan Pusat.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Majelis Pembinaan Kader.
18. Ketua Majelis Hukum dan HAM (Hj. Djalaliah Jamal), mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM.
 - c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang Hukum dan HAM berdasarkan keputusan Mukhtar, Tanwir, dan Kebijakan Pimpinan Pusat.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Majelis Hukum dan HAM.
19. Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan (Dra. Munirah, M.Pd), mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan (LPP).
 - c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan berdasarkan keputusan Mukhtar, Tanwir, dan Kebijakan Pimpinan Pusat.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Lembaga Pengkajian dan Pengembangan.
20. Ketua Lembaga Kebudayaan (Dr. St. Aidah Azis, S.Pd., M.Pd), yang mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah yang diserahkan kepadanya.
- b. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Lembaga Kebudayaan.
- c. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan penjabaran program bidang kebudayaan berdasarkan keputusan Muktamar, Tanwir, dan Kebijaksanaan Pimpinan Pusat.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program Lembaga Kebudayaan.

Mencermati uraian di atas tentang struktur organisasi dan tata kerja 'Aisyiyah Kota Makassar dalam lima tahun terakhir (2010 – 2015), dapat dipahami bahwa, Khitta perjuangan 'Aisyiyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah sejak didirikan tahun 1926, yaitu 9 tahun setelah 'Aisyiyah Pusat didirikan (1917), terutama dalam era reformasi berdasarkan Khitta Denpasar tahun 2002, dapat memberi peluang (kebebasan) bagi kadernya, untuk terjun dalam kancah politik praktis. Kebebasan kader 'Aisyiyah dalam memilih organisasi (partai politik) sebagai kendaraan berpolitik menjadikan integrasi sikap politik 'Aisyiyah tidak boleh berafiliasi (mendukung) kekuatan organisasi politik tertentu. 'Aisyiyah dalam berbagai aksi dan praktek yang berhubungan dengan politik selalu menjaga jarak dengan partai politik dan tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik.

Kebebasan berpartai tanpa menyalahi ideologi persyerikatan telah tercermin dalam hasil Muktamar Muhammadiyah ke-38 yang menegaskan bahwa 'Aisyiyah merupakan Gerakan Dakwah Islam, beramal dalam segala bidang kehidupan manusia

dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu Partai Politik atau Organisasi apapun. Setiap anggota 'Aisyiyah (Kota Makassar) sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Organisasi 'Aisyiyah.

Sikap politik yang demikian ini menjadi landasan dalam memandang pergolakan perpolitikan di Indonesia. Dengan demikian, dipahami bahwa para kader, pengurus dan warga 'Aisyiyah (termasuk Kota Makassar) tidak menjamin jumlah suara yang diperlukan karena kebebasan yang diberikan organisasi induk. Dalam hal ini warga 'Aisyiyah menggunakan hak berpolitik yaitu instruksi yang tidak mengikat dan lebih bersandar pada penghormatan hak asasi (kebebasan memilih dan dipilih). Fenomena yang lain juga terlihat pada setiap kegiatan rutin seperti Muswil atau Muktamar yang diadakan setiap lima tahun, para pengurus secara rutin meminta bantuan dana baik kepada pemerintah kota maupun pemerintah propinsi untuk menutupi biaya-biaya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan hajatan tersebut.

Perkembangan selanjutnya, gerakan 'Aisyiyah dari waktu ke waktu terus meningkat dengan memperluas kerja dalam rangka peningkatan dan kemajuan harkat wanita Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan sekolah dari Taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, rumah sakit, balai bersalin, panti asuhan, panti jompo, rumah-rumah sosial, lembaga ekonomi dan lain-lain. Sebagai organisasi sosial, semua kegiatan dibiayai iuran anggota serta bantuan baik berupa hibah, zakat, donasi, maupun kerjasama dengan berbagai pihak baik

dalam maupun luar negeri. Selain itu, juga mendirikan berbagai amal usaha baik sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain yang hasil keuntungannya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat dan kemanusiaan (Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sul – Sel, 2011).

Semangat tinggi yang dimiliki para pengurus dan anggota ‘Aisyiyah dapat dilihat dari indikator yang ada bahwa walaupun banyak pengurus yang sudah berusia lanjut tetapi keinginan untuk tetap menjadi pengurus tetap sangat besar dan terkesan tidak ikhlas untuk diganti. Namun demikian mereka tetap dibatasi masa bakti periode lima tahunan lewat musyawarah besar atau kongres. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang pengurus, Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan; Dra. Hidayah Quraisy, M.Pd, bahwa “hal seperti inilah ciri dan keunikan yang membedakan organisasi ‘Aisyiyah dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya di Indonesia dan khususnya di Kota Makassar (Wawancara, 12 Februari 2012).

‘Aisyiyah sebagai komponen Perempuan Muhammadiyah bergerak di bidang sosial keagamaan dalam usianya menjelang satu abad (95 tahun) ‘Aisyiyah Pusat, dan 86 tahun ‘Aisyiyah Kota Makassar telah menunjukkan kiprahnya terutama dalam pencerahan, pemberdayaan, dan kemajuan yang memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umat, masyarakat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Keberhasilan dan peran positif ‘Aisyiyah Kota Makassar tersebut merupakan karunia Allah yang diraih karena kekuatan keikhlasan, komitmen, potensi, dan partisipasi ‘Aisyiyah sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar serta tajdid sehingga selalu menunjukkan semangat yang tinggi untuk berkiprah konstruktif dalam kehidupan. Keberhasilan ini

juga diraih karena kepercayaan dan dukungan berbagai pihak yang memiliki semangat yang sama untuk memajukan kehidupan masyarakat.

Sebagai gerakan perempuan Muhammadiyah, organisasi ‘Aisyiyah dalam menjalankan usaha-usaha untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya senantiasa di dasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam diantaranya ajaran dakwah amar maruf nahi munkar, berbuat kebaikan, beramal shaleh baik bagi laki-laki maupun perempuan dan lain sebagainya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron:104.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (QS Ali Imran [3]: 104).

Kemudian firman Allah dalam al-Qur’an Surat An-Nahl: 97.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS An-Nahl [16]: 97).

‘Aisyiyah Kota Makassar sebagai komponen organisasi perempuan Muhammadiyah terus berjuang dalam konteks saat ini dan berada dalam dinamika,

masalah, dan tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, 'Aisyiyah semakin dituntut untuk meningkatkan peran gerakannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan aksi yang langsung dan menyentuh denyut kehidupan masyarakat luas. Peningkatan peran tersebut baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif selain didasarkan atas idealisme gerakan yang menjadi bingkai perjuangan, dikembangkan atas respons terhadap berbagai masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Menghadapi dinamika dan tantangan yang demikian kompleks itu, 'Aisyiyah Kota Makassar dituntut untuk memberikan jawaban (solusi) melalui usaha yang bersifat konkrit, terorganisasi, dan berkesinambungan. Usaha 'Aisyiyah tersebut diwujudkan dalam berbagai macam program, amal usaha, dan kegiatan yang disusun secara sistematis untuk meraih tujuan utama terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Namun demikian, dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut, maka setiap periode 'Aisyiyah senantiasa berada dalam situasi (konteks) kehidupan yang sarat masalah, baik dalam konteks kehidupan umat, bangsa, maupun perkembangan global. Di antara masalah-masalah tersebut, antara lain :

1) Masalah Umat Islam.

- a) Umat Islam Kota Makassar dan Sulawesi Selatan, meskipun dari segi jumlah merupakan penduduk mayoritas, tetapi dari segi kualitas masih tertinggal dan mengalami masalah kemiskinan, lemah secara politik, marginal secara sosial-budaya, dan belum menunjukkan diri sebagai kekuatan masyarakat madani (*civil society*) yang handal sebagai kekuatan strategis bangsa.

- b) Umat Islam, khususnya Kota Makassar dan Sulawesi Selatan saat ini dicitrakan secara negatif dalam stigma terorisme dan radikalisme yang menapikan arus utama Islam yang secara mayoritas bersifat moderat dan menampilkan sikap yang damai, toleran, dan maju.
 - c) Organisasi-organisasi Islam termasuk 'Aisyiyah mengalami sejumlah permasalahan, seperti menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, kecenderungan pada politik praktis, jaringan yang belum optimal, dan belum menunjukkan kekuatan masyarakat madani.
 - d) Kecenderungan sebagian anggota dan pengurus 'Aisyiyah yang lebih mengedepankan simbol dan formalitas ketimbang substansi, politisasi agama, dan komoditisasi agama yang melemahkan misi Islam yang lebih luas, mendasar, dan strategis sebagai agama pem bawa risalah rahmatan lil-'alamin.
- 2) Masalah Nasional
- a) Bangsa Indonesia setelah reformasi 1998, meskipun secara relatif menunjukkan kemajuan dalam demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik; namun selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir sejak Muktamar di Malang tahun 2005 dan Yogyakarta tahun 2010; persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa semakin kompleks baik menyangkut masalah-masalah politik, ekonomi, hukum, maupun sosial-budaya yang krusial serta memerlukan pemecahan secara cepat dan komprehensif. (1) dalam aspek politik, muncul masalah kerancuan tatanegara antara sistem presidensial dan parlementer, jumlah partai yang banyak, dan pragmatisme

politik. (2) dalam aspek ekonomi, masalah kebijakan yang tarik menarik antara orientasi pasar dan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu memecahkan kemiskinan dan ketenagakerjaan. (3) masalah sosial budaya, yang muncul adalah lemahnya kohesi dan solidaritas sosial, konflik horizontal, dan lemahnya karakter bangsa. (4) adalah masalah korupsi, mafia hukum, semakin memprihatinkan serta memerlukan pemecahan yang serius dan konsisten.

- b) Di bidang politik terdapat kecenderungan demokrasi prosedural lebih menonjol ketimbang demokrasi substansial, kerancuan dalam sistem ketatanegaraan antara presidensial dan parlementer, sentralisasi dan desentralisasi, berkembangnya lembaga-lembaga komisioner yang bersifat sementara, dan pragmatisme politik yang dialami elite dan partai politik.
- c) Di bidang ekonomi masih ditandai oleh kemiskinan, pengangguran, dualisme ekonomi, kecenderungan ekonomi yang liberal dan tidak sejalan dengan ekonomi konstitusi, rusaknya aset dan sumberdaya alam yang menjadi potensi bangsa dan negara.
- d) Dalam bidang hukum ditandai dengan korupsi yang masih meluas, pemberantasan korupsi yang tebang pilih, lemahnya penegakan hukum, maraknya mafia hukum, dan krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum.

- e) Bidang sosial budaya ditandai oleh melemahnya karakter, solidaritas sosial, toleransi, kemandirian, krisis moral yang dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- f) Terkait dengan perempuan, masih terdapat kecenderungan kurang penghargaan dan terjadinya ketidakadilan gender, baik karena masalah struktural maupun kultural yang bercorak patriarki.

Menghadapi masalah-masalah tersebut, baik masalah umat Islam maupun masalah-masalah nasional, di mana struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana telah dijelaskan di atas, oleh 'Aisyiyah Kota Makassar dapat menyesuaikan dengan lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diemban masing-masing majelis dan lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada pembahasan.

D. Revitalisasi Nilai-nilai Gerakan 'Aisyiyah Kota Makassar

Revitalisasi nilai-nilai gerakan dalam disertasi ini dimaknai sebagai upaya untuk menggali dan mengungkap kembali nilai-nilai gerakan 'Aisyiyah di masa lalu untuk menjelaskan gerakan organisasi dalam konteks kekinian yang merupakan target Muktamar XI 'Aisyiyah di Kota Makassar. Dalam hal ini, bagaimana 'Aisyiyah yang sudah menjelang satu abad mampu bertahan dan tetap eksis dalam memelihara serta memperbaharui kembali gerakannya; semacam revitalisasi. Gerakan aksi menjadi salah satu upaya revitalisasi keberadaan organisasi 'Aisyiyah. Melalui kegiatan ini dapat dikatakan bahwa 'Aisyiyah bermaksud menghidupkan kembali nilai-nilai

gerakan dan tentang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat."Kami ingin merangsang diri kami dengan gerakan aksi supaya benar-benar sesuai fakta lapangan, tidak berada pada tingkat mengawang-awang" (hasil wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Kader 'Aisyiyah Kota Makassar, 12 April 2012).

Berikut ini dikemukakan kutipan artikel yang terkait dengan rivitalisasi nilai-nilai gerakan, "Deradjat kaoem iboe di tanah Arab zaman dahoeleoe orang telah mengetahoei boeroeknja.Orang perempoean disamakan dengan binatang ternak dan sesamanja.Pada zaman itoe orang Arab soedah djadi kebiasaannja memboenoeh anaknja jang keloear perempoean meskipoen ta'berdosa" (Soeara Aisyiyah, No.1-4/September 1929; Analisis dokumentasi 'Aisyiyah Kota Makassar, April 2012).

Senada dengan hal itu, penjelasan yang disampaikan salah seorang pengurus (Ketua) PWA Sulawesi Selatan yang memberikan naskah mentah penelitiannya tentang kiprah 'Aisyiyah di dunia pers. Kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa:

Mencermati sebegitu besar peran perempuan Muhammadiyah bagi bangsa Indonesia. Di tengah dominasi pemahaman maskulin suara pena 'Aisyiyah menjadi gerbang memasuki kesadaran perempuan di Indonesia. Artikel dalam Soeara 'Aisyiyah yang ditulis sebelum Indonesia merdeka.Seperti diketahui bahwa, perempuan di era prakemerdekaan eksistensinya tidak dihargai. Karena itu, Nyai K.H. Ahmad Dahlan meningkatkan gerakan perempuan Muhammadiyah, waktu itu dikenal dengan nama perkumpulan Sopo Tresno. Perkumpulan kaum perempuan ini kemudian berubah menjadi 'Aisyiyah 22 April 1917 M (hasil wawancara HQ, 15 Maret 2012).

Ringkasan hasil penelitian Syafaat R Selamat, tentang kiprah Soeara 'Aisyiyah dalam dunia pers. Hasil penelitian ini menyadarkan bangsa atas peran perempuan sebelum kemerdekaan sampai negeri ini merdeka. Hal ini penting termasuk menginspirasi peneliti untuk mengkaji kemandirian organisasi 'Aisyiyah di

berbagai aspek pembangunan, serta untuk menghemat kavling (ruang) bagi artikel diringkas seringkas-ringkasnya, sehingga dapat dinikmati, ditelaah, diresapi, dan dihayati peran 'Aisyiyah bagi sistem pengokohan nasionalisme perempuan di negeri ini.

Perkumpulan Aisyiyah ialah organisasi otonom Muhammadiyah yang bercita-cita 'memperbaharui' aspek pemahaman dan pengembangan agama Islam di dalam masyarakat untuk dikembalikan pada ajaran Islam murni yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam rentang waktu 3 tahun (1917-1920), Aisyiyah bergerak menyertai gerakan Muhammadiyah. Utamanya setelah bergerak di Pulau Jawa sejak tahun 1920. Aisyiyah mengalami perkembangan sangat pesat bukan saja di Yogyakarta, tetapi juga di luar Yogyakarta. Terutama perkembangan ini setelah Kongres Muhammadiyah ke-11 tahun 1923 di Yogyakarta.

Pada kongres tersebut, setiap cabang dan groep Muhammadiyah wajib mengadakan bagian Aisyiyah, sehingga perkembangan organisasi perempuan Muhammadiyah ini semakin pesat. Anggota-anggotanya tidak saja gadis-remaja. Melainkan juga ibu-ibu rumah tangga. Bahkan dua tahun setelah Aisyiyah berdiri (1919), Aisyiyah sudah merintis Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau *Play Group*. Yang kemudian berkembang menjadi Taman Kanak-Kanak bernama TK Bustanul Athfal yang tersebar di seluruh Hindia Belanda. Selain itu pula mendirikan Siswo Proyo Wanito, sebuah perkumpulan murid-murid puteri di luar sekolah. Perkumpulan ini kemudian tahun 1930 berkembang menjadi Nasyi'atul 'Aisyiyah (NA).

Tahun 1922 Aisyiyah berkembang pesat di daerah kelahirannya. Kondisi ini mendorong pengurusnya untuk semakin intensif melakukan pertemuan, rapat-rapat persiapan untuk melakukan kegiatan-kegiatan. 'Aisyiyah berhasil mendirikan tempat pertemuan dan pendidikan khusus kalangan perempuan, yang dikenal dengan Masjid (Mushala) Isteri. Sebagai satu-satunya Masjid Perempuan pertama di Indonesia. Mushala ini menjadi sentral kegiatan 'Aisyiyah dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya. Dari sinilah muncul ide-ide baru untuk membuka amal usaha organisasi. Setahun kemudian, Aisyiyah mengadakan pemberantasan buta huruf baik buta huruf Latin maupun buta huruf Arab. Upaya ini diharapkan dapat menghilangkan kebodohan, karena dengan membaca dan menulis, orang dapat menggali ilmu-ilmu yang bermanfaat. Upaya ini memberikan bukti bahwa Aisyiyah memang benar-benar berperan dalam memajukan bangsa. Setelah 9 tahun berdirinya, tahun 1926, Aisyiyah berkembang pesat. Aisyiyah mengiringi perkembangan Muhammadiyah selama 9 tahun (1917-1926).

Kemudian bulan Oktober 1926 bertepatan dengan bulan Jumadil Akhir 1345 H, Aisyiyah menerbitkan majalah organisasi yang bernama Soeara Aisyiyah. Majalah organisasi yang sederhana, menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Dengan menerbitkan majalah ini berarti Aisyiyah benar-benar memahami perlunya alat komunikasi yang cepat sampai kepada umat, karena waktu itu 'Aisyiyah sudah mulai berkembang jauh dari Yogyakarta. Dengan demikian 'Aisyiyah dapat memberikan informasi tentang kemajuan organisasi penjelasan kepada umat melalui media massa (Majalah Soeara Aisyiyah). Majalah ini berisi tentang penyebaran agama

Islam. Misalnya, agar kaum wanita menutup aurat, memakai kerudung, menjauhi pergaulan bebas, menaati adat sopan santun keislaman, dan sebagainya. Majalah ini juga dijadikan alat dakwah melalui media massa dan menjadi bacaan bagi ibu-ibu, murid atau pengikut Aisyiyah Maghribi School (AMS).

Menarik untuk dicermati, waktu itu belum ada sebuah penerbitan yang dikelola langsung oleh sebuah organisasi kaum wanita. Kalau pun ada sebelumnya yang bergerak dalam dunia pers, belum berbentuk organisasi dalam pengertian modern. Tetapi perkumpulan sederhana belum memiliki tata aturan organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Organisasi. Misalnya koran Poetri Hindia (PH) yang terbit tahun 1908 itu karena dirintis RM. Tirta Adhi Soerjo, bukan oleh sebuah organisasi wanita. Disinilah letak keistimewaan gerakan pena yang digagas 'Aisyiyah, di mana organisasi ini merupakan partner dari gerakan Muhammadiyah yang lahir karena ingin memberikan pendidikan dan kesadaran kaum perempuan. Dengan wahana sebuah penerbitan berkala Majalah Soeara 'Aisyiyah cita-cita gerakan dapat tersampaikan ke setiap pelosok nusantara, sehingga terjadi semacam pembentukan kesadaran kolektif, bahwa perempuan juga mesti berperan dalam kebangunan negara Indonesia, di mana pada masa prakemerdekaan perempuan nasibnya masih di dominasi kaum laki-laki. Demikian ringkasan hasil penelitian tentang majalah Soeara 'Aisyiyah yang dilakukan Syafaat R Selamat dan D. Anindita.

Selain makna revitalisasi nilai-nilai gerakan 'Aisyiyah di atas, juga untuk menyegarkan kembali gerakan perempuan di tubuh Muhammadiyah, menjelang satu abad, naskah yang sudah diedit dapat dijadikan telaah awal dalam merancang bentuk

gerak perempuan di Muhammadiyah. Mencermati revitalisasi nilai-nilai gerakan 'Aisyiyah sebagai organisasi otonom terutama hubungannya dengan perilaku organisasi dapat dijelaskan bahwa, perilaku organisasi adalah suatu ilmu terapan yang dibangun atas sumbangan dari sejumlah disiplin ilmu. Bidang-bidang ilmu tersebut, antara lain: (1) Psikologi, ialah ilmu sains yang berusaha mengukur, menjelaskan dan bisa mengubah perilaku manusia; (2) Sosiologi, mempelajari sistem sosial dimana individu-individu mengisi peran mereka, dalam kaitan hubungan dengan sesama; (3) Psikologi sosial, merupakan perpaduan bidang ilmu antara psikologi dan sosiologi, yang berfokus pada pengaruh orang terhadap yang lainnya. Sumbangan perilaku organisasi adalah memberikan kontribusi dalam hal pengukuran, pemahaman, dan perubahan sikap, pola komunikasi, cara-cara bagaimana kegiatan kelompok memuaskan kebutuhan individu dan proses pengambilan keputusan kelompok; (4) Antropologi, mempelajari tentang budaya organisasi, lingkungan organisasi, budaya nasional, internasional, serta perbedaan nilai fundamental, sikap, dan perilaku diantara orang dalam negara yang berlainan dalam organisasi yang berbeda.

Selanjutnya untuk mengklasifikasikan lingkungan eksternal organisasi menjadi dua macam, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus.

- a. Lingkungan umum, adalah kekuatan-kekuatan yang berinteraksi dan berpengaruh terhadap seluruh sektor kehidupan manusia, meliputi komponen: (1) budaya (*culture*); (2) iklim ekonomi (*economic climate*); (3) lingkungan hukum dan politik (*legal and political*), dan (4) lingkungan pendidikan.

- b. Lingkungan khusus, sejumlah kekuatan yang terdiri atas organisasi, individu-individu dan lembaga yang berinteraksi dengan organisasi, yang meliputi komponen: (1) pemasok input (*input suppliers*), seperti tenaga kerja (*labor*), money, raw materials (bahan mentah); (2) penyalur output (*output distributors*), atau dunia perdagangan; (3) Pesaing/competitors, yaitu lembaga yang merupakan bagian dalam penyebaran *output* yang secara bersama-sama memperebutkan pasar; (4) peraturan pemerintah (*government jurisdiction*), dan (5) kelompok khusus (*special group*), seperti serikat buruh dan kaum profesional.

‘Aisyiyah merupakan organisasi perempuan yang bergerak di bidang sosial keagamaan dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks, baik yang berskala global, nasional, maupun lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut penting untuk diidentifikasi sebagai dasar dalam merumuskan program dan kegiatan ‘Aisyiyah dalam jangka waktu 5 tahun (Periode 2010–2015). ‘Aisyiyah sebagai organisasi yang memiliki ruang lingkup gerakan nasional, maka memerlukan langkah-langkah strategis dalam berkontribusi memecahkan permasalahan nasional maupun permasalahan yang ada di tingkat akar rumput sehingga kehadiran ‘Aisyiyah benar-benar dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat luas dan membawakan Islam sebagai rahmatan lil alamin.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Kemandirian Organisasi ‘Aisyiyah dalam Berbagai Fase Perkembangan.

Mengawali pokok bahasan tentang dinamika kemandirian organisasi ‘Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan, dengan mengutip pandangan H.M Amin Rais, mantan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dalam Tanwir II ‘Aisyiyah beliau mengatakan bahwa, “Bangsa Indonesia saat ini masih memprihatinkan kondisinya dibandingkan dengan berbagai Negara, dilihat dari berbagai aspek, yaitu sumber daya manusia, lemahnya memanfaatkan potensi yang dimiliki, daya saing yang lemah, dan karakter bangsa yang belum kuat”. Karena itu, diperlukan strategi untuk membangun bangsa yang bermartabat di tengah percaturan dunia. Lebih lanjut Amien Rais mengajak ‘Aisyiyah untuk melakukan tiga hal yaitu: memperkuat aqidah, memperkuat kemampuan bersaing, dan meningkatkan kekuatan multi dimensional antara lain peningkatan kualitas pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Telaah Dokumen PP ‘Aisyiyah, Yogyakarta, 2012).

Berdasarkan ilustrasi di atas sebagai landasan berpikir mengantarkan peneliti untuk menjelaskan dinamika kemandirian organisasi ‘Aisyiyah Kota Makassar dalam berbagai fase perkembangan, yang ditelusuri melalui tiga aspek kemandirian, yaitu “Medan Visional”, “Paradoks Independensi”, dan “Autopoiesis”. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, ‘Aisyiyah Kota Makassar berdiri sejak Tahun

1926. Seperti halnya struktur organisasi ‘Aisyiyah Pusat dimana ‘Aisyiyah Kota Makassar terdiri atas 7 (tujuh) majelis, yaitu: (1) Majelis Tabligh; (2) Majelis Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah); (3) Majelis Kesejahteraan Sosial; (4) Majelis Kesehatan; (5) Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan; (6) Majelis Pembinaan Kader, dan (7) Majelis Hukum dan HAM (Hak Azasi Manusia), sedangkan 2 lembaga, yaitu: (1) Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan (2) Lembaga Kebudayaan. Secara garis besar ketujuh bidang (majelis) tersebut merealisasikan program kerja atau bidang-bidang kegiatan yang telah direncanakan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2010 – 2015), dapat ditelusuri berdasarkan data dan fakta yang diperoleh sebagai berikut :

1. Medan Visional ‘Aisyiyah Kota Makassar

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa visi organisasi ‘Aisyiyah Kota Makassar sama dengan visi ‘Aisyiyah Pusat sekaligus visi Muhammadiyah, yaitu *“Tegaknya Agama Islam dan Terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenarnya”*. Visi tersebut menjadi medan magnet yang mengikat dan menggerakkan semua warga ‘Aisyiyah dalam merumuskan, mengarahkan, dan memberi terhadap semangat semua pengurus untuk bergerak bersama serta melakukan tindakan berdasarkan visi organisasi. Dengan demikian, medan visional yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah lingkup kegiatan atau program kerja yang menjadi pegangan semua unsur dalam organisasi untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menyadari bahwa 'Aisyiyah merupakan organisasi yang bergerak di bidang dakwah keagamaan, kegiatan sosial dan kemasyarakatan dengan perinsip dasar "amar makruf nahi munkar". Berdasarkan perinsip dasar dan visi utama di atas, maka dirumuskan visi pengembangan organisasi, yaitu: "Tercapainya usaha-usaha 'Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah amar makruf nahi munkar secara lebih berkualitas menuju masyarakat madani (*civil society*), yakni masyarakat utama yang diridhoi oleh Allah swt. Selanjutnya dalam upaya mewujudkan perinsip dasar dan visi 'Aisyiyah di atas, maka dirumuskan misi organisasi 'Aisyiyah dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta menyebarkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran Islam.
- d. Memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, serta mempertinggi akhlak.
- e. Meningkatkan semangat ibadah, jihad zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, serta membangun dan memelihara tempat ibadah, dan amal usaha yang lain.
- f. Membina Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Puteri untuk menjadi pelopor, pelangsun, dan penyempurna gerakan 'Aisyiyah.
- g. Meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian.

- h. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
- i. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup.
- j. Meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa.
- k. Meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
- l. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

Selanjutnya program kerja 'Aisyiyah Kota Makassar Periode 2010 – 2015, meliputi:

- 1) Bidang Dakwah, yaitu: (1) mengintensifkan pembinaan aqidah, ahklak, ibadah, di kalangan 'Aisyiyah dan masyarakat melalui pengajian dan kajian-lajian; (2) mengintensifkan kajian tafsir al-Qur'an dan al-Hadist bagi anggota, kader, dan pimpinan; (3) memasyarakatkan pelaksanaan kehidupan sehari-hari berdasarkan pedoman kehidupan Islami sesuai tuntutan tarjih Muhammadiyah; (4) meningkatkan dan mengembangkan kemampuan muballigat dalam berbagai aspek seperti: penguasaan metode, materi serta strategi dakwah; (5) meningkatkan fungsi masjid, mushallah, dan sarana dakwah lainnya sebagai pusat kegiatan Tabligh atau penyiaran Islam secara terprogram; (6) mengintensifkan program pembelajaran al-Qur'an bagi anggota 'Aisyiyah.

Program kerja ‘Aisyiyah di bidang dakwah di atas, dilaksanakan oleh Majelis Tabligh berdasarkan visi organisasi sebagai medan pergerakan dalam melaksanakan program kerja yang telah ditentukan, yaitu untuk: menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, serta meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita sesuai dengan ajaran Islam.

- 2) Bidang Pendidikan, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kreatifitas dalam penyelenggaraan pendidikan dasar tingkat PAUD dan TK ‘Aisyiyah; (2) menjadikan lembaga pendidikan ‘Aisyiyah sebagai basis kaderisasi ‘yang dilakukan secara sistematis; (3) meningkatkan kualitas pendidikan melalui jenajng pendidikan, forum diskusi dan berbagai cara yang lain; (4) meningkatkan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan organisasi berdasarkan kinerja, komitmen dan pengabdian terhadap ‘Aisyiyah; (5) membuat data base sebagai pusat informasi dan basis pengembangan pendidikan ‘Aisyiyah; (6) penggunaan administrasi anak didik dari organisasi; (7) penggunaan RAPBO/RAPBS; (8) iuran anak didik, dan (9) infaq guru.

Kesembilan program kerja bidang pendidikan di atas direalisasikan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

- 3) Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi: (1) pendataan amal usaha; (2) konsolidasi dan penguatan organisasi; (3) meningkatkan usaha-usaha dan kualitas penanggulangan bencana antara lain pada tanggap darurat, kesiapan SDM dan sinergi dengan amal usaha; (4) pelatihan perawatan jenazah; (5) membantu

masyarakat dhuafa/fakir miskin; (6) meningkatkan sosialisasi penghapusan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keenam program kerja dan kegiatan tersebut direalisasikan oleh Majelis Kesejahteraan Sosial.

- 4) Bidang Kesehatan, meliputi: (1) meningkatkan kualitas sumber daya di bidang kesehatan melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan seminar-seminar; (2) meningkatkan upaya penurunan angka kematian bayi dan balita melalui imunisasi ASI eksklusif dan pemberian gizi seimbang; (3) meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan keluarga, amal usaha, tempat umum, dan tempat ibadah; (4) meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, TB, dan penyakit lainnya; (5) meningkatkan sinergi kerjasama dengan pemerintah dan berbagai pihak lain dalam rangka meningkatkan peran 'Aisyiyah dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kelima program kerja bidang kesehatan tersebut, dilaksanakan oleh Majelis Kesehatan.
- 5) Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, yaitu: (1) kewirausahaan melalui penguatan dan pengembangan usaha makro, menengah yang dikelola oleh perempuan agar mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya; (2) optimalisasi pembinaan ekonomi melalui Badan Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah (BUEKA); (3) mengadakan berbagai macam pelatihan dan keterampilan, dan (4) mengadakan bazaar. Keempat program kerja tersebut dilaksanakan oleh Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan.

- 6) Bidang Pengkaderan, meliputi: (1) mengembangkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengkaderan di tingkat daerah sampai di tingkat ranting secara terencana, periodic, dan berkelanjutan; (2) optimalisasi fungsi dalam peran amal usaha sebagai pendidikan dan pembinaan kader; (3) mengoptimalkan pembinaan kader, melalui keluarga, amal usaha, AMM, untuk menjadi pelopor dan pelangsup gerakan. Ketiga program kerja di bidang pengkaderan ini dilaksanakan oleh Majelis Pembinaan Kader.
- 7) Bidang Hukum dan HAM, yaitu: (1) berpartisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum dan HAM di Indonesia, sehingga terwujud rasa keadilan bagi setiap warga negara; (2) meningkatkan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencegahannya; (3) meningkatkan pengawasan dan pencegahan perdagangan manusia. Ketiga program kerja tersebut, dilaksanakan oleh Majelis Hukum dan HAM.

Selain program kerja ketujuh majelis yang telah disebutkan di atas, juga program kerja lembaga, yaitu: Lembaga Penelitian dan Pengembangan adalah: (1) mengembangkan penelitian dan pengkajian masalah-masalah keorganisasian untuk mendukung kebijakan dan pengembangan organisasi; (2) meningkatkan dan mengembangkan fungsi data dan informasi sebagai salah satu sumber penting dalam pengambilan kebijakan organisasi dan pengembangan gerakan, dan (3) mengembangkan publikasi hasil kajian dan penelitian secara luas melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Sementara program kerja Lembaga Kebudayaan, meliputi: (1) meningkatkan perhatian terhadap masalah-masalah social

budaya, seperti: kesenian, perubahan budaya masyarakat, termasuk gaya hidup, kepariwisataan, serta aspek social lainnya, dan (2) mengembangkan apresiasi seni budaya masyarakat religious yang membawa pada pencerahan akal budi atau akhlak dalam kerangka dakwah Islam.

Selanjutnya dalam merealisasikan program kerja ketujuh majelis dan dua lembaga 'Aisyiyah Kota Makassar, secara garis besar berpedoman pada visi organisasi sebagai medan yang mengikat semua anggota, yaitu:

- a) Majelis Tabligh, bahwa 'Aisyiyah sebagai organisasi dakwah keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan melaksanakan aktivitas penanggulangan masalah kemiskinan dengan prinsip bahwa:

Masalah kemiskinan telah menjadi permasalahan sosial yang sangat memprihatinkan dan menuntut perhatian serius semua pihak, termasuk 'Aisyiyah. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (sandang, pangan, dan papan atau perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial). Salah satu penyebab kemiskinan menurut saya sebagai pribadi dan sebagai salah satu Pengurus 'Aisyiyah Kota Makassar adalah semakin menipiskannya keberpihakan kebijakan publik terhadap kelompok masyarakat miskin akibat adopsi terhadap paham ekonomi pasar yang berlebihan. Karena itu, 'Aisyiyah tetap menjadikan masalah kemiskinan sebagai salah satu kegiatan dengan berpedoman pada visi organisasi (hasil wawancara AD, tanggal 15 Maret 2012).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa salah satu tujuan organisasi 'Aisyiyah adalah membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung (penyandang masalah sosial). Dalam menangani masalah kemiskinan dengan mekanisme pasar dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat untuk menyediakan berbagai kebutuhan dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, air dan listrik yang merupakan pelayanan dasar,

lebih baik bila diserahkan kepada pasar karena dianggap pasarlah yang dapat melayani dengan efisien. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa, 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan yang peduli terhadap berbagai persoalan yang dihadapi ibu-ibu rumah tangga terutama pelayanan dasar (air dan listrik), sebagaimana dijelaskan Ketua Majelis Tabligh bahwa:

Banyak ibu rumah tangga yang semakin berat menghadapi kenaikan tarif air dan tarif dasar listrik yang melaju lebih kencang dibanding laju pertumbuhan pendapatan keluarga. Dengan paradigma pasar, pelayanan rumah sakit dan pendidikan juga bukan lagi hak dasar yang wajib untuk dapat diakses seluruh rakyat, tetapi sudah menjadi industri jasa yang memerlukan modal, kekuatan dalam persaingan untuk mengaksessnya. Menyadari hal tersebut Majelis Tabligh menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk mengatasi masalah ini (wawancara ZM, 12 Maret 2012).

Berpedoman pada visi 'Aisyiyah terkait dengan paradigma ekonomi pasar, peran pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja secara aktif bagi rakyat juga telah bergeser. Paham bahwa pemerintah wajib untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat sesuai amanah UUD 1945, tidak berlaku lagi. Menurut pemikiran ekonomi pasar bahwa pasarlah yang akan menyediakan lapangan kerja, karena diyakini akan lebih efisien dibanding pemerintah. Dalam paradigma ini, 'Aisyiyah memandang bahwa masyarakat miskin dan penganggur yang memiliki berbagai keterbatasan tidak akan memiliki peluang yang sama. Keluarga miskin masuk dalam putaran lingkaran kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah menjadikan posisi tawar kelompok miskin sangat lemah, sehingga peluang lapangan pekerjaan dan pendapatan juga akan sangat terbatas dan pada

akhirnya tidak mungkin memberikan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi generasi penerusnya.

Masalah kemiskinan yang menjadi pusat perhatian ‘Aisyiyah Kota Makassar bukan semata-mata masalah individual dan sosial, tetapi sudah menjadi masalah politik karena proses pemiskinan secara sistematis. Oleh karena itu, memerlukan paradigma dalam memandang kemiskinan. Paradigma yang berbeda terhadap kemiskinan akan berdampak pada strategi yang berbeda dalam menyelesaikannya. Masalah kemiskinan di Kota Makassar harus dipandang sebagai kemiskinan struktural sehingga strategi penanggulangan tidak semata-mata melakukan program-program *income generating*, karena itu harus dibarengi proses penyadaran kolektif terhadap kelompok miskin dan masyarakat penyandang masalah sosial melalui gerakan memperjuangkan perubahan kebijakan menghentikan kemiskinan dan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Hal ini karena kemiskinan memiliki dampak yang sangat besar terhadap perempuan. Tidak sedikit saat ini dari persoalan ekonomi dan krisis global yang terjadi menyebabkan timbulnya persoalan bagi perempuan. Di antara persoalan yang timbul akibat kemiskinan adalah, tingginya angka kematian ibu; menurunnya anak perempuan yang mengikuti pendidikan formal tingkat sekolah lanjutan; terpusatnya pekerja perempuan di sektor yang rendah pendidikan, rendah keterampilan dan rendah upah, serta mudah terjadi kekerasan terhadap perempuan.

Masalah tersebut merupakan persoalan yang krusial bagi kehidupan manusia. Sebab kemiskinan bukan hanya dipandang sebatas bagian dari aspek ekonomi yang tidak terkait dengan aspek lain. Akan tetapi, problem kemiskinan membawa dampak terhadap aktivitas lain dan menghambat manusia untuk meraih kualitas hidup yang ideal. Karena itu, diperlukan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap individu agar tidak ada hambatan menjalankan kehidupan yang lebih baik dan terjamin setiap warga negara. Sudah selayaknya negara menjamin distribusi kekayaan (sumber daya) kepada seluruh rakyat, yaitu menjamin distribusi yang adil bagi pemenuhan kebutuhan pokok secara keseluruhan.

- b) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen); berdasarkan visi organisasi sebagai medan yang mengikat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran Islam serta memperteguh iman, memperkuat dan mengembangkan ibadah, serta mempertinggi akhlak di dalam mengelola amal usaha di bidang pendidikan.

Visi organisasi yang menjadi medan gerakan semua warga ‘Aisyiyah dalam mengelola amal usaha di bidang pendidikan, seperti dijelaskan oleh Ketua Majelis Dikdasmen, bahwa:

Kota Makassar termasuk salah satu kota di Sulawesi Selatan yang cukup baik dalam hal penyediaan layanan akses pendidikan dasar. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi pendidikan dasar mencapai lebih dari 70 persen baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam menerima pendidikan, bahkan perempuan untuk dapat mengakses pendidikan semakin sulit. Karena itu, saya sebagai penanggung jawab di bidang pendidikan tetap mengarahkan semua warga untuk menjadikan visi ‘Aisyiyah sebagai pedoman dalam mengelola amal usaha pendidikan mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, dengan memberikan kesempatan

yang samabaik laki-laki maupun perempuan memperoleh pendidikan seperti yang diharapkan (hasil wawancara SK, 15 Februari 2012).

Lebih jauh dijelaskan bahwa, dalam hal perbandingannya dengan laki-laki yang tidak mampu membaca, menulis dan/atau berhitung (tidak sekolah): 1 laki-laki buta huruf berbanding dengan 3 perempuan buta huruf. Data lain juga memperlihatkan kecenderungan yang sama, dimana perempuan sangat jauh ketinggalan dalam mengakses pendidikan dibandingkan laki-laki. Senada dengan itu, menurut salah satu pengurus (Wakil Ketua Aisyiyah Kota Makassar, yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan) dalam laporannya tentang pemberantasan buta aksara baik Latin maupun Arab menjelaskan bahwa:

Upaya pengurangan angka buta huruf telah dilakukan. Namun diakui bahwa, representasi perempuan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Bagi perempuan buta huruf (tidak tamat SD), dalam hal kerja selain dibebani kendala gender (karena dia perempuan), maka pekerjaan yang cocok ialah pekerjaan perempuan seperti di bidang garmen, elektronik, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Pekerjaan yang dapat ia peroleh hanyalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kecekatan dan ketelitian, tanpa membutuhkan keahlian atau pendidikan formal (hasil wawancara KJ, tanggal 10 Maret 2012).

Penjelasan di atas tampak bahwa, meskipun UUD 1945 maupun UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional telah memberikan akses yang luas bagi kaum perempuan untuk menikmati pendidikan, namun nilai-nilai (budaya) masyarakat yang masih mendahulukan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan telah berpengaruh sangat besar pada partisipasi perempuan di bidang pendidikan. Kurikulum, buku-buku teks pelajaran sekolah dan praktek pengajaran yang bias gender dan kebijakan umum negara tentang perempuan telah

memperkuat prasangka dan stereotip gender dalam masyarakat. Hal ini berakibat pada terbatasnya akses kaum perempuan pada bidang-bidang pekerjaan yang ada. Untuk meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, diperlukan perubahan nilai-nilai budaya di tingkat masyarakat dan kebijakan yang mengarah pada hilangnya segala bentuk perbedaan peran dan fungsi jenis kelamin serta penstereotipan perempuan.

Masalah pendidikan lainnya adalah mahalnya biaya pendidikan yang sangat variatif di masyarakat yang mengakibatkan masyarakat miskin dan tidak mampu semakin jauh untuk dapat mengakses pendidikan, sehingga tidak sedikit masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pendidikan atau berhenti. Rendahnya persentase pendidikan perempuan, khususnya di Kota Makassar akan mudah terjadi ketimpangan sosial, dimana mereka yang rendah kualitas pendidikannya akan selalu menjadi subordinat atau menjadi sasaran persoalan sosial yang terjadi. Seperti kaum perempuan yang selama ini masih banyak yang sulit mengakses dunia pendidikan akibat berbagai faktor seperti ekonomi, budaya serta sosial.

Munculnya ketimpangan perempuan dalam masalah pendidikan ini, sebagai akibat masih kuatnya budaya patriarkhi dalam masyarakat yang mendiskriminasikan perempuan untuk mengakses pendidikan. Budaya yang dipahami bahwa perempuan bukan pencari nafkah utama dan perempuan sebagai penanggung jawab utama dalam urusan-urusan domestik, maka perempuan ditempatkan sebagai kelompok yang kurang penting mengakses pendidikan. Karena rendahnya tingkat pendidikan tersebut maka berdampak padasebagian

besar perempuan terserap dalam pekerjaan-pekerjaan di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, TKW dengan upah rendah, pedagang kecil, industri rumah tangga, serta buruh rendahan lainnya. Di samping persoalan rendahnya SDM serta proses ketimpangan sosial yang mengiringinya, persoalan lain dalam dunia pendidikan yang memprihatinkan adalah kurangnya korelasi antara sistem pendidikan dengan pembentukan karakter manusia. Dalam hal ini, untuk melahirkan SDM yang kuat, dimulai dari pembentukan karakter manusia yang utuh, sebagai basis pembentukan kepribadian, sikap, dan tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang utama dalam kehidupan.

Kecenderungan yang berjalan selama ini, seakan-akan terjadi jarak antara pendidikan di satu sisi dengan karakter manusia pada sisi lain karena belum terintegrasinya proses dan sistem pendidikan ke dalam setiap aspek kehidupan. Proses dan sistem pendidikan yang dijalankan kemungkinan besar lebih ditekankan pada pembentukan kualitas kognisi dan psikomotorik, terbatas pada kemampuan yang bersifat instrumental. Pendidikan kurang memberikan perhatian terhadap pembentukan afeksi dan *life skill* yang utuh. Sebagai akibatnya subjek didik kurang dibentuk kapasitas dirinya selaku manusia yang berprinsip pada kebenaran, kebaikan, kepatutan, dan nilai-nilai utama dalam hidup.

- c) Majelis Kesejahteraan Sosial; fakta yang menunjukkan bahwa semua warga menjadikan visi organisasi sebagai medan yang menggerakkan berbagai aktivitas amal usaha termasuk bidang kesejahteraan sosial dan penyandang masalah sosial, seperti anak terlantar, anak jalanan, putus sekolah, dan lain-lain dijelaskan oleh

salah satu pengurus Panti Asuhan juga sebagai Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa:

‘Aisyiyah mengelola beberapa Panti Asuhan, selain Panti Asuhan yang dibina oleh Muhammadiyah dalam merumuskan langkah-langkah pembinaan dengan mengarahkan semua warga tetap upaya mewujudkan visi di atas sebagai semua warga untuk mematuhi visi ‘Aisyiyah dalam membina anak-anak panti, meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, serta membangun dan memelihara tempat ibadah, dan amal usaha yang lain (wawancara MS, 15 Maret 2012).

- d) Majelis Kesehatan; fakta yang menunjukkan bahwa visi organisasi yang menjadi medan magnet dalam mengelola amal usaha bidang kesehatan, untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup. Hal ini dijejaskan oleh Ketua Majelis Kesehatan bahwa:

Saya sebagai ketua Majelis Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan, mengarahkan semua pengelola Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA untuk berpegang teguh pada visi organisasi dalam memberikan pelayanan. Kualitas kesehatan masyarakat di Kota Makassar masih sangat memprihatinkan khususnya bagi masyarakat lapisan bawah dan kelompok marginal terutama perempuan. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat tidak terlepas dari kondisi kemiskinan, sehingga tidak dapat menikmati kesehatan yang seharusnya menjadi hak bagi setiap warga masyarakat. ‘Aisyiyah sebagai organisasi dakwah dan sosial, selain visi organisasi sebagai medan pelayanan juga berpegang pada prinsip dasar, yaitu “amar makmuf hani munkar”. Permasalahan dan rendahnya derajat kesehatan perempuan. Akses perempuan terhadap pelayanan reproduksi yang bermutu belum sepenuhnya menjadi prioritas pembangunan selama ini. Akibatnya, angka kematian ibu (AKI) yang disebabkan oleh kehamilan dan persalinan masih tinggi di Kota Makassar (hasil wawancara HD, tanggal 20 April 2012).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, secara medis penyebab kematian ibu di Kota Makassar pada umumnya adalah perdarahan (terutama pasca persalinan), eklampsia, dan pre-eklampsia (tekanan darah tinggi yang terjadi pada kehamilan),

Infeksi, serta persalinan macet. Secara fisik, hal ini terjadi karena masih banyak ibu yang terlalu muda melahirkan, terlalu singkat jarak antara persalinan, terlalu sering melahirkan, serta masih melahirkan pada usia yang sudah terlalu tua.

Senada dengan penjelasan di atas, diperkuat oleh pandangan salah seorang pengurus (Wakil Ketua 'Aisyiyah Kota Makassar) bahwa:

Selain peningkatan angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan yang disebabkan minimnya anggaran yang diperuntukkan untuk penurunan AKI ini masih dibawah satu persen dari APBN dan APBD Kota Makassar. Karena 'Aisyiyah sebagai komponen perempuan Muhammadiyah tetap memiliki komitmen mewujudkan visi organisasi sebagai medan gerakan yang memberi semangat pengelola Rumah Sakit, Rumah Bersalin, dan BKIA. Persoalan tingginya AKI melahirkan tersebut semakin diperparah oleh kuatnya pengaruh budaya patriarki yang melingkupi kehidupan masyarakat (hasil wawancara TS, tanggal 15 Maret 2012).

Selanjutnya dijelaskan bahwa, masyarakat termasuk warga Aisyiyah masih menganut pandangan bahwa hamil dan melahirkan merupakan kodrat perempuan. Oleh karena itu, penderitaan dan kesakitan, bahkan kematian yang dialami perempuan sebagai akibat (resiko) dari fungsi reproduksi juga merupakan "kodrat" yang sudah seharusnya ditanggung oleh kaum perempuan. Sebagai akibatnya, penanganan kesakitan dan penderitaan selama hamil dan penurunan AKI bersalin sangat lambat dan kurang mendapat perhatian masyarakat, termasuk perempuan sendiri.

Problem kesehatan lainnya yang kini menjadi fenomena ;Aisyiyah di Kota ialah menyangkut persoalan Epidemii HIV/AIDS di masyarakat. HIV adalah virus yang ditemukan pada tubuh manusia yang menyebabkan AIDS. HIV merupakan singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* (virus defisiensi imun manusia).

Lebih umum dikenal sebagai virus penyebab menurunnya sistem kekebalan manusia. Sedangkan kata AIDS merupakan singkatan dari *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome*. Secara medis AIDS berarti sindrom kumpulan dari berbagai gejala dan infeksi sebagai akibat dari kerusakan spesifik sistem kekebalan tubuh karena infeksi virus HIV pada tubuh manusia.

Pejelasan di atas diperkuat oleh informan lain, Sekretaris 'Aisyiyah Kota Makassar sebagai berikut:

Para ahli menyebutkan bahwa dibanding laki-laki, risiko terkena HIV pada perempuan jauh lebih besar, terutama apabila berhubungan seks tanpa memakai kondom. Organ-organ reproduksi pada diri perempuan lebih rentan dibanding dengan organ reproduksi laki-laki. Kerentanan ini lebih tinggi terjadi pada perempuan remaja, karena perempuan terhadap virus ini tampak dalam banyak aspek. Perempuan dalam kehidupan sosial sering dinomorduakan dan didiskriminasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksinya. Akibat budaya yang menciptakan ketertutupan perempuan untuk mengungkapkan fakta-fakta biologisnya, berbagai penyakit yang berkaitan dengan organ-organ reproduksinya sering tidak terdeteksi (hasil wawancara DM, tgl. 20 Maret 2012).

Mencermati masalah ini, dalam ranah domestik perempuan rentan terhadap pemaksaan hubungan seks, termasuk dalam banyak kasus oleh suaminya. Perempuan seringkali tidak bisa menolak hubungan suami istri, meski mengetahui suami telah terinfeksi HIV. Karena di ruang publik, perempuan juga seringkali mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Apabila pola hubungan laki-laki dan perempuan masih seperti ini, maka masuk akal kalau banyak perempuan terkena virus HIV. Hal ini lebih membahayakan pada saat hamil. Virus yang ada dalam tubuhnya dapat menular kepada bayinya. Selain itu, anak dan remaja juga sangat

mudah terserang penyakit HIV/AIDS ini, sebagaimana diberitakan oleh salah satu media nasional, hanya dalam tempo empat bulan terakhir ini, terdapat 60 bayi yang positif mengidap virus HIV/AIDS.

- e) Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, dalam merealisasikan program kerja tetap berpedoman pada visi organisasi sebagai medan perjuangan dalam memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah peraikan hidup yang berkualitas. Upaya mewujudkan visi organisasi sesuai dengan permasalahan ekonomi selain masalah kemiskinan yang berdampak luas dalam kehidupan, terkait dengan usaha mikro dan kecil di Kota Makassar, khususnya yang dihadapi oleh perempuan yang mengelola usaha (Amal Usaha 'Aisyiyah). Sektor ekonomi mikro dan kecil merupakan tumpuan kehidupan bagi banyak keluarga lapis bawah dan miskin. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan bahwa:

Saya sebagai penanggung jawab Majelis Ekonomi mengarahkan semua warga untuk mematuhi visi organisasi. Ketika krisis ekonomi tahun 1998 diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), ratusan ribu orang menggantungkan hidupnya pada sektor ekonomi mikro yang kebanyakan dikelola oleh kaum perempuan. 'Aisyiyah Kota Makassar dengan usaha mikro kecil mampu bertahan pada situasi krisis ekonomi dan berperan sebagai penyangga perekonomian masyarakat bawah yang sebagian besar pelakunya adalah perempuan. Walaupun usaha mikro kecil (UMK) menjadi tumpuan masyarakat lapisan bawah, nampaknya kebijakan pemerintah dan implementasi kebijakan belum menyentuh akar persoalan agar benar-benar berpihak pada mereka. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang berdampak pada UMK adalah pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas (hasil wawancara BB, tanggal 20 Maret 2012).

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh perempuan yang mengelola usaha mikro (amal usaha) 'Aisyiyah adalah terkait dengan ketidakadilan gender yang

terjadi di masyarakat pada umumnya maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang bias gender. Hambatan tersebut antara lain akses memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal (perbankan). Ini terjadi dikarenakan berbagai kendala dan keterbatasannya, seperti lokasi kelompok-kelompok perempuan pengusaha mikro yang sangat jauh dari lembaga formal, kegiatan usaha yang masih kecil, sehingga dana tambahan yang dibutuhkan sangat kecil maka tidak akan dilayani oleh lembaga formal, karena tidak efisien. Selain itu, usaha mikro belum memiliki administrasi keuangan yang dikelola dengan baik, sehingga tidak memenuhi standar pembukuan yang disyaratkan oleh lembaga keuangan formal. Persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan merupakan rangkaian masalah yang tidak terpisahkan. Hal ini dipertegas oleh salah seorang informan (Bendahara 'Aisyiyah Kota Makassar), bahwa:

Persoalan ekonomi juga berkaitan sangat erat dengan kemiskinan. Problem ekonomi yang menimpa suatu kelompok keluarga, mendorong setiap keluarga untuk mencari berbagai pilihan yang bisa dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Ketika krisis ekonomi keluarga terjadi, seperti pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh suami, atau pengangguran, maka inisiatif kerja diambil oleh seorang ibu/perempuan untuk menempuh usaha yang mudah dilakukan. Salah satunya adalah menjadi tenaga kerja di luar negeri atau lebih dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Mereka biasanya bekerja di sektor informal dengan gaji yang sangat rendah, seperti pembantu rumah tangga, buruh bangunan, penjaga toko dan sebagainya. Upaya tersebut sebagai bentuk pemahaman visi 'Aisyiyah (hasil wawancara RK, 22 Maret 2012).

Sehubungan dengan itu berbagai masalah pun tidak bisa dihindari, terutama pekerja perempuan, seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, penganiyaan, dan sebagainya. Meskipun demikian halnya yang terjadi, tidak menyurutkan para pekerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Bahkan angka migrasi tenaga kerja

Indonesia ke luar negeri ini semakin meningkat. Hal ini karena problem ketenagakerjaan dalam negeri belum terpecahkan dengan baik khususnya di Kota Makassar.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebagian besar tenaga kerja (buruh migran) berada pada usia produktif (di atas 18 - 35 tahun), namun banyak yang berada pada usia anak-anak. Kenyataan ini terjadi karena banyak yang memalsukan identitas yang sebenarnya. Oleh karena itu, kekerasan dalam proses migrasi mendapat perhatian serius pemerintah termasuk 'Aisyiyah terutama perempuan sebagai tenaga kerja di luar negeri dengan membuat target jumlah pengiriman tenaga kerja tanpa diikuti dengan perbaikan perlindungan. Sementara keluarga menjadikan perempuan sebagai tumpuan untuk menyelamatkan kebutuhan ekonomi keluarga, sebagian masyarakat melalui calo yang mengambil manfaat atas proses pengiriman tenaga kerja secara illegal dan tidak bertanggung jawab.

Di satu sisi buruh migran adalah penyumbang devisa yang sangat besar, tapi tidak diperlakukan sebagaimana layaknya warga Negara. Mereka sering sekali menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mulai dari penipuan upah, pelecehan seksual, penganiayaan, hingga pembunuhan. Semakin jelaslah bahwa proses migrasi ini rentan dengan eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan perempuan. Lemahnya perlindungan dan penanganan bagi perempuan yang bermigrasi yang menjadi korban eksploitasi, kekerasan dan perdagangan menjadi siklus kekerasan yang sistematis. Arus migrasi perempuan ke luar negeri

sebagai akibat program pembangunan yang dilakukan pemerintah masih mengabaikan kontribusi ekonomi perempuan.

- f) Majelis Pembinaan Kader, sebagai bukti bahwa visi organisasi sebagai medan yang memberi arahan dan semangat untuk membina Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Puteri untuk menjadi pelopor, pelangsong, dan penyempurna gerakan ‘Asiyiyah. Masyarakat Kota Makassar pada dasarnya adalah masyarakat yang religius dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Masyarakat religius, nilai-nilai agama terpancar dalam kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi kehidupan dalam keluarga, masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, misi organisasi kehidupan masyarakat menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan maraknya kegiatan-kegiatan yang berdimensi ibadah di masyarakat seperti kegiatan-kegiatan pengajian, majelis taklim, membangun musholla, masjid, hari-hari besar Islam dan lain-lain. Beberapa permasalahan dalam praktek kehidupan beragama yang memerlukan perhatian AMM Puteri sebagai bentuk atas pemahaman visi organisasi, diungkapkan oleh Ketua Majelis Pembinaan Kader sebagai berikut:

Saya sebagai penanggung jawab bidang pengkaderan ‘Aisyiyah, selalu menekankan visi organisasi sebagai medan pergerakan semua warga AMM Puteri dalam mengatasi:

- (1) Lahirnya kelompok-kelompok sempalan, aliran keagamaan yang berbeda dari arus besar Islam yang berkembang di Indonesia pada umumnya dan Kota Makassar pada khususnya yang membelokkan paham keagamaan yang bersumber dari al-Qur’an dan jauh dari prinsip-prinsip aqidah Islam;
- (2) Konflik-konflik kelompok keagamaan yang berbeda paham secara tajam dan menimbulkan perpecahan dalam tubuh umat Islam;

- (3) Penyalahgunaan agama yang mendorong dan membawa kepada banyak penyimpangan, kekerasan, dan menjadikan agama sebagai komoditas politik, ekonomi untuk kepentingan individu, kelompok, dan golongan;
- (4) Pandangan keagamaan yang menimbulkan bias gender serta berbaur dengan budaya masyarakat, sehingga melahirkan diskriminasi dan ketidakadilan perempuan;
- (5) Pandangan keagamaan yang cenderung radikal, karena radikalisme keagamaan yang sering bersikap eksklusif, mengklaim pandangannya yang paling benar dan membawa muatan konflik dengan pihak lain yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bahwa, nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Qur'an dan Sunnah adalah membawa perdamaian, toleransi, dan ukhuwah Islamiyah;
- (6) Praktek keagamaan yang penuh simbol-simbol dan semarak secara ritual, tidak dibarengi dengan pemaknaan secara substantif, sehingga membawa kesalehan sosial dan amal yang bersifat mencerahkan;
- (7) Pemahaman dan pengamalan keagamaan yang kurang peduli dengan masalah-masalah kemasyarakatan dalam menghadapi kemiskinan, kekerasan, persoalan perempuan dan anak, serta masalah sosial lainnya (hasil wawancara SW, tanggal 20 Maret 2012).

Menghadapi berbagai persoalan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Di satu pihak diperlukan penanaman pemahaman keislaman yang mendalam, luas, dan menyeluruh sehingga ajaran agama Islam tidak dipahami secara parsial. Di pihak lain diperlukan pemecahan berbagai persoalan secara bijak baik sosial, ekonomi, dan politik terkait dengan keberagamaanumat yang berpengaruh satu sama lain.

- g) Majelis Hukun dan HAM (Hak Azasi Manusia), menjadikan visi sebagai medan pergerakan dalam meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran, serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Indonesia sebagai negara sedang berkembang, persoalan perempuan dan anak ialah persoalan yang selalu muncul. Salah satunya adalah masalah kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Perkembangan terkini kekerasan terhadap

perempuan penting sebagai sebuah ukuran kemajuan pemenuhan HAM. 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah juga memiliki perhatian terhadap kekerasan berbasis gender telah diakui sebagai bagian dari pelanggaran HAM serta melanggar nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Diantara masalah yang sering muncul dan mendapat perhatian dari 'Aisyiyah, seperti dijelaskan oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM, bahwa:

Majelis Hukum dan HAM dibentuk di era reformasi sebagai wujud kepedulian 'Aisyiyah terhadap masalah yang berkembang terkait dengan masalah hukum dan HAM, terutama kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Intensitas kekerasan terhadap perempuan dinilai sangat tinggi. Fakta menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan dominasi dan diskriminasi laki-laki terhadap perempuan (hasil wawancara JJ, 22 Maret 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa, bentuk kekerasan terhadap perempuan secara umum dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu: (1) kekerasan dalam rumah tangga (ranah domestik), dan (2) kekerasan di luar rumah tangga (ranah publik). Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga (domestik), adalah salah satu bentuk ketidakadilan jender (*gender inequalities*). Ketidakadilan jender dalam realitas sehari-hari melahirkan pelbagai bentuk, seperti pemiskinan ekonomi, perkosaan, prostitusi, penyunatan anak wanita, kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi keluarga berencana, dan dalam bentuk pelecehan seksual yang banyak terjadi akhir-akhir ini.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang rumit dan kompleks. Banyak kasus tentang KDRT, tetapi hanya sedikit yang

terungkap. Berbagai alasan mengapa sulit memperoleh data: (1) terjadi dalam rumah tangga sehingga sulit dipantau dan terabaikan; (2) masyarakat memandang persoalan ini sebagai masalah internal keluarga (persoalan privat) sehingga tidak perlu campur tangan dari pihak lain; dan (3) sebagian besar masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga, sebagai bunga-bunga hidup berumah tangga.

Fenomena lain terkait dengan kekerasan dalam ranah publik adalah pelecehan seksual, pemerkosaan, penjualan anak perempuan untuk pekerja seks komersial (PSK), eksploitasi, dan sebagainya. Fenomena kedua ini semakin meningkat, bahkan persoalan kekerasan dalam ranah publik banyak terjadi di lembaga pendidikan, kantor dan lebih ironisnya terjadi dalam lembaga perwakilan rakyat. Tentu saja jika dilihat fenomena tersebut sangat banyak dan terjadi dimana-mana. Namun, pertanyaan yang muncul adalah mengapa kekerasan terhadap perempuan sering terjadi. Setidaknya ada beberapa faktor, yaitu: (1) ketimpangan gender; (2) pemahaman terhadap ajaran Islam yang bias; (3) tatanan hukum yang belum memadai; dan (4) nilai-nilai patriarki yang begitu dominan.

Dalam konteks ini 'Aisyiyah memberi apresiasi atas perkembangan yang signifikan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penegakan hak-hak perempuan termasuk penanganan dan penghapusan kekerasan atas perempuan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Setidaknya ada beberapa kebijakan telah dihasilkan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kebijakan tersebut, antara lain UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU No 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornografi.

Bentuk kekerasan lain yang sering terjadi dan mendapat perhatian dari ‘Aisyiyah adalah fenomena kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang dilakukan kepada anak biasanya dalam berbagai bentuk, antara lain kekerasan seksual yang meliputi sodomi, pemerkosaan, pencabulan atau hubungan seksual sedarah. Bentuk kekerasan lainnya meliputi kekerasan fisik seperti pekerja anak, pemukulan, penganiyaan, dan lain-lain. Selain itu, kekerasan dalam bentuk psikis, ialah dipermalukan, dihina, dikucilkan, diancam (ditolak), selanjutnya kekerasan dalam bentuk penggunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya. Semua fenomena ini menjadi bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak yang sering muncul ke permukaan. Kemudian dijelaskan oleh Wakil Sekretaris ‘Aisyiyah, bahwa:

Bentuk kekerasan terhadap anak selain terjadi dalam lingkungan keluarga, juga terjadi di lingkungan sosial atau ranah publik. Di Kota Makassar, bentuk kekerasan terhadap anak ini selalu menjadi isu utama yang muncul dalam masyarakat. Hampir tiap tahun, jumlah kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan. Maraknya peristiwa kekerasan yang terjadi pada anak sesuai pengalaman saya sebagai pengurus yang sering menangani kasus kekerasan yang dialami anak terutama yang ditangani ‘Aisyiyah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ada kultur kekerasan yang sangat kuat di sebagian masyarakat, dimana anak dilihat sebagai milik mutlak yang harus takluk untuk *menggayuh* keinginan orang dewasa. Anak menjadi target dalam rangka memenuhi ambisi orang dewasa, dan ketika tidak bisa memenuhi anak akan diperlakukan dengan kekerasan (hasil wawancara RD, tanggal 17 Maret 2012).

Tindakan kekerasan terhadap anak ini tidak hanya di dalam rumah, atau komunitas tertentu saja, bahkan di sekolah, dimana anak mestinya memperoleh jaminan rasa aman, terjadi juga praktek kekerasan. Selain itu, masih banyak guru

yang menganggap, kekerasan adalah bagian dari proses pendidikan. Mereka lupa, atau mungkin tidak memahami bahwa dasar pendidikan adalah cinta. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan komitmen yang dibangun pemimpin dan pengelola amal usaha 'Aisyiyah sejak usia dini (PAUD dan TK), dengan simbol-simbol: Jangan mendidik, jangan mengajar, bila gelora hatinya bukan gelora cinta, sebaliknya gelora dendam dan kebencian.

Terkait dengan latar belakang munculnya perilaku represif terhadap anak, faktor lain yang juga turut mendukung terjadi kekerasan terhadap anak antara lain: immaturitas/ketidakmatangan orang tua, kurangnya pengetahuan bagaimana menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis pada kemampuan dan perilaku anak, pengalaman negatif masa kecil orang tua, isolasi sosial, problem rumah tangga, serta problem obat-obat terlarang dan alkohol. Ada orang tua yang tidak menyukai peran sebagai orang tua sehingga sering terlibat pertentangan dengan pasangan dan yang menjadi sasaran amarah dan kebencian.

- h) Lembaga Penelitian dan Pengembangan, bahwa visi organisasi sebagai medan pergerakan dalam melakukan tindakan meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian. Realitas yang menunjukkan bahwa, semua warga termasuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah Kota Makassar menjadikan visi organisasi sebagai medan yang mengikat dalam melaksanakan setiap aktivitas penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap isu-isu yang berkembang, seperti perdagangan manusia (*trafficking*) merupakan bentuk

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan melanggar nilai-nilai agama. Lebih lanjut dikemukakan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan, bahwa:

Masalah perdagangan manusia menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan dan kompleks. Hal ini sebenarnya menjadi tugas Majelis Hukum dan HAM, tetapi saya sebagai penanggung jawab lembaga yang membidangi penelitian dan pengembangan merasa perlu dan terpanggil untuk melakukan kajian terhadap masalah ini. Hal ini karena tidak mudah mengidentifikasi kegiatan perdagangan perempuan, sebab pelakunya seringkali merupakan sindikat yang terorganisir rapi dan berkedok sebagai pencari tenaga kerja legal. Umumnya, mereka datang untuk menawarkan pekerjaan, seperti menjadi TKW di luar negeri (sebagai *migrant worker*), pekerja industri dan pekerjaan lainnya. Mereka melakukan operasinya dengan cara merayu, membujuk, dan janji-janji muluk yang menggiurkan, gaji besar, hidup senang, dan sebagainya. Namun, kenyataan sebaliknya (hasil wawancara MR, tanggal 20 Maret 2012).

Perdagangan perempuan dan anak jelas adalah tragedi kemanusiaan yang berlangsung rapi dan terorganisir, namun persoalan ini tidak mendapat perhatian serius, terutama dari kalangan pemerintah, sehingga upaya untuk menghentikan perilaku biadab ini masih menjadi impian kosong. Demikian, 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan yang memiliki komitmen, visi, dan tujuan yang jelas dapat memahami bahwa perdagangan perempuan dan anak seringkali melibatkan sejumlah orang, mulai dari perekrut yang datang ke desa mencari perempuan dan anak-anak sampai kepada orang terakhir yang membeli atau menerima korban, seperti pemilik tempat kerja paksa, atau orang yang menahan orang tersebut dalam kondisi seperti perbudakan. Umumnya mereka ditempatkan atau diperdagangkan dalam kondisi yang sangat eksploitatif dan kejam, seperti dalam industri garmen, pertanian, perikanan, perkebunan, mengemis, dan seks, termasuk dalam bentuk kerja domestik sebagai pembantu rumah tangga.

Timbulnya bentuk kejahatan *trafficking* ini kebanyakan akibat kaum perempuan memilih meninggalkan rumah dan keluarganya untuk bermigrasi dengan alasan ekonomi, untuk meningkatkan pendapatan bagi keluarga, membayar uang sekolah anaknya, membayar hutang, membayar biaya perawatan orang tua yang sakit berkepanjangan, membeli sebidang tanah untuk digarap sebagai sumber kehidupan, dan membangun rumah tempat tinggal yang lebih layak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa umumnya perempuan bermigrasi dengan harapan dapat memperbaiki kondisi hidup, khususnya untuk masa depan anak-anak mereka.

Selain itu, globalisasi dalam bidang ekonomi telah mengubah pola perburuhan di seluruh dunia. Kini peluang lebih terbuka untuk lalu lintas arus barang dan produk, dan lebih terbuka peluang bagi buruh untuk bermigrasi kerja ke negara dengan ekonomi yang lebih maju. Sayangnya, hal ini dapat menciptakan situasi dimana majikan memperoleh keuntungan lebih besar dengan mempekerjakan buruh migran dari negara lebih miskin. Karena itu, berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global seperti telah diuraikan di atas.

Wujud kepedulian dan komitmen 'Aisyiyah terhadap visi organisasi sebagai medan yang menggerakkan semua warga tidak terlepas dari latarbelakang lahirnya 'Aisyiyah adalah untuk keselamatan umta terutama kaum wanita sebagai masyarakat utama tiang Negara. Seperti diketahui bahwa kaum wanita rusak maka rusaklah Negara. Keadaan masyarakat menjelang abad ke XX yang percaya tahyul, bid'ah dan

khurafat, sehingga jauh dari tuntunan ajaran Islam yang sebenarnya. Sehubungan dengan itu, menurut penjelasan Ketua Majelis Pembinaan Kader, bahwa:

Sejak lahirnya Aisyiyah dengan visi organisasi yang lebih domain dalam bidang sosial dan keagamaan mengingatkan kepada semua warga agar tidak membawa nama organisasi dalam kegiatan politik praktis. Hal ini karena di khawatirkan menimbulkan perpecahan umat. Warga 'Aisyiyah bebas memilih orang yang sesuai dengan hati nurani. Terkait dengan hak politik 'Aisyiyah beliau mengingatkan semua warga untuk menggunakan hak pilihnya sebagai simbol tanggung jawab terhadap perubahan bangsa dan negara. Sebagai warga Negara yang baik perlu menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya karena merupakan sarana untuk mencari pemimpin yang baik (hasil wawancara SW, tanggal 20 Maret 2012).

Sebagaimana diketahui bahwa, salah satu pengurus 'Aisyiyah Kota Makassar mencalonkan diri sebagai DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004 dan 2009, namun belum berhasil. Hal ini perlu ditegaskan sebagai bentuk partisipasi 'Aisyiyah dalam mendorong anggota dan/atau pengurus yang berkiprah dalam dunia politik agar tetap istiqamah bahwa setelah duduk dalam legislatif harus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan tetap dalam koridor visi 'Aisyiyah. Dengan demikian simbol yang digunakan dalam hal politik warga 'Aisyiyah, adalah "Sukseskan pemilu legislatif dan jadilah warga Negara yang baik dan bertanggung jawab".

Seiring dengan perkembangan dan perubahan yang dialami 'Aisyiyah Kota Makassar dilihat dari sisi kemandirian melalui visi organisasi sebagai medan pergerakan yang mengikat semua warga, juga dijelaskan oleh Ketua Lembaga Kebudayaan, yang merupakan salah satu lembaga yang dibentuk seiring dengan perkembangan dan perubahan tersebut, bahwa:

Lembaga Kebudayaan, seperti halnya majelis dan lembaga “Aisyiyah lainnya dalam merealisasikan program kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati, saya selalu mengarahkan semua anggota untuk tetap menjadikan visi organisasi sebagai medan yang memberi semangat bagi warga untuk meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan komunikasi, ukhuwah Islamiah, kerjasama berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri (hasil wawancara AA, tanggal 12 April 2012).

Berdasarkan penjelasan dan uraian terdahulu tentang medan visional ‘Aisyiyah Kota Makassar, maka dapat ditegaskan bahwa semua anggota dan elemen dalam organisasi ‘Aisyiyah menjadikan perinsip dasar, “amar makruf nahi munkar”, dan visi utama “terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” sebagai medan pergerakan, perjuangan, serta tujuan bersama demi tercapainya perinsip dasar dan visi utama yang dimaksud. Dengan demikian, kemandirian ‘Aisyiyah dilihat dari visi organisasi sejak awal hingga sekarang karena adanya perinsip dasar organisasi dan visi utama yang telah dipahami bersama oleh semua anggota, serta dapat mengilhami setiap gerakan, tindakan, dan usaha yang dilakukan pimpinan, pengurus, dan pengelola amal usaha ‘Aisyiyah Kota Makassar sehingga terus bertahan dan mandiri sebagaimana yang diharapkan.

Fakta yang dapat ditunjukkan sesuai hasil penelitian, yaitu antara lain: setelah berdiri Tahun 1926, ‘Aisyiyah Kota Makassar terus berjuang untuk kemajuan perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga menjadi saksi sejarah bagi perkembangan umat manusia dengan berkiprah amaliah di berbagai bidang kehidupan. Setelah kemerdekaan, ‘Aisyiyah Kota Makassar memasuki babak baru dalam perjalanan dan perjuangan yang penuh dinamika sejak masa Orde Lama,

Orde Baru, dan reformasi. Gerakan 'Aisyiyah dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan fungsi dan peran serta memperluas jaringan kerja dalam meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia, khususnya di Kota Makassar.

Realitas lain terkait dengan visi organisasi yang dapat direalisasikan di dalam mengelola amal usaha 'Aisyiyah, sebagaimana dikemukakan salah seorang pengurus yang juga sebagai Wakil Ketua PDA Kota Makassar, yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pembinaan Panti Asuhan (PA), mengkoordinir pelaksanaan program kerja Majelis Dikdasmen dan Lembaga Kebudayaan, menjelaskan bahwa :

Berdasarkan visi organisasi, saya sebagai penanggung jawab dalam pembinaan PA dimana 'Aisyiyah membina beberapa panti, antara lain: Panti Asuhan Ummu Aiman di jalan Beruang, dan Panti Asuhan Sejati di jalan Cakalang Kota Makassar, mengarahkan semua warga agar dalam membina dan mengasuh anak-anak panti tetap berpedoman pada visi 'Aisyiyah sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, dalam hal ini tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar- benarnya (hasil wawancara RB, tanggal 17 Februari 2012).

Pernyataan di atas menegaskan kembali bahwa, semua pengurus dan anggota 'Aisyiyah Kota Makassar dalam merealisasikan program kerja yang telah ditentukan tetap dalam satu komitmen, satu prinsip, dan satu tujuan yang dirangkul dalam satu visi bersama sehingga menuntun semua unsur dalam bergerak dan bertindak bersama di bidang pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, gerakan dakwah yang dilakukannya telah membentuk akhlak, keperibadian, dan kecerdasan masyarakat sebagai bagian dari visi ideal membentuk masyarakat madani, yakni masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Namun demikian masih terdapat berbagai masalah yang perlu dihadapi dan dijawab dengan

langkah-langkah kegiatan yang sistematis sehingga 'Aisyiyah dalam melaksanakan gerakannya tetap menjadi pembawa risalah *rahmatan lil-'alamin* dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dalam kehidupan umat Islam khususnya dan masyarakat Kota Makassar umumnya.

Demikian halnya di bidang pendidikan, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), bahwa:

'Aisyiyah Kota Makassar sebagai salah satu ortom Muhammadiyah dalam mengelola amal usaha di bidang pendidikan mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, sampai SMA/SMK dan Madrasah Aliyah (MA) tetap berpegang teguh visi organisasi sebagai medan yang memberi petunjuk dan arahan sehingga semua warga memahami dan mewujudkan visi tersebut dalam menggerakkan sektor pendidikan yang dikelola 'Aisyiyah sehingga akan tercipta tunas-tunas muda 'Aisyiyah yang siap melanjutkan visi organisasi di masa mendatang (hasil wawancara SK, tanggal 22 Februari 2012).

Pernyataan di atas diperkuat oleh Ketua Lembaga Kebudayaan PDA Kota Makassar, bahwa peningkatan fungsi dan peran 'Aisyiyah baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif selain didasarkan atas prinsip dasar dan visi ideal gerakan yang menjadi bingkai perjuangan, juga dikembangkan atas respon atau antisipasi terhadap berbagai masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga 'Aisyiyah terus eksis, bertahan dan mandiri karena mampu memanfaatkan faktor-faktor yang menjadi kelebihan, kelemahan, peluang, dan tantangan dimana visi organisasi sebagai medan sekaligus acuan dalam menentukan langkah-langkah 'Aisyiyah baik yang bersifat strategis maupun operasional.

Demikian halnya pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Kesehatan 'Aisyiyah Kota Makassar: terkait dengan visi organisasi sebagai medan pergerakan

pengurus dan anggota dalam mengelola amal usaha di bidang kesehatan, menjelaskan bahwa:

Saya sebagai penanggung jawab Majelis Kesehatan ‘Aisyiyah dalam mengelola Rumah Sakit, Rumah Bersalin, dan BKIA yang dibina ‘Aisyiyah mengarahkan semua warga untuk mematuhi visi organisasi. Dalam hal ini, semua tindakan pelayanan yang dilakukan oleh petugas kesehatan harus sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan visi tersebut, khususnya kesehatan ibu dan anak sebagai fungsi utama yang menjadi tugas pokok Majelis Kesehatan, yang harus diprioritaskan sehingga mengembangkan program kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik secara internal dengan Muhammadiyah maupun secara eksternal dengan Pemerintah (Dinas Kesehatan) sebagai medan pergerakan atau lingkup kerja yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan visi organisasi ‘Aisyiyah (hasil wawancara HD, tanggal 12 Maret 2012).

Berdasarkan penjelasan, uraian, dan pernyataan beberapa informan di atas, tentang keseluruhan tindakan, gerakan, dan dinamika organisasi yang berkembang didasarkan atas visi organisasi yang menjadi medan magnet yang mengikat semua warga sehingga tercipta medan visional ‘Aisyiyah Kota Makassar dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, keseluruhan penjelasan dari informan terkait dengan kemandirian ‘Aisyiyah dapat disimpulkan bahwa semua warga ‘Aisyiyah Kota Makassar menjadikan visi organisasi sebagai medan yang mengikat mereka dalam mengelola dan membina amal usaha, sehingga dari fase ke fase tercipta komitmen dan kerjasama semua warga tetap terpelihara dalam visi organisasi yang telah ditentukan.

2. Paradoks Independensi ‘Aisyiyah Kota Makassar

‘Aisyiyah berada dalam posisi paradoks independensi, artinya di satu sisi ‘Aisyiyah adalah sistem yang otonom; yaitu sistem yang terdiri atas unit-unit atau

bagian-bagian yang utuh dalam mengambil keputusan-keputusan secara otonom dan diaplikasikan secara otonom untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditentukan melalui program-program kerja dan kegiatan-kegiatan bersama untuk mewujudkan visi tersebut. Namun, di sisi lain, 'Aisyiyah merupakan bahagian dari sistem yang lebih besar, yaitu Muhammadiyah terutama dalam merealisasikan nilai-nilai dan norma-norma yang telah digariskan visi organisasi.

Data dan informasi yang menunjukkan bahwa, 'Aisyiyah adalah sistem yang otonom dalam mengambil keputusan-keputusan secara mandiri karena berada dalam posisi paradoks (mendua), terutama memiliki kewenangan, struktur, jaringan, dan unit-unit yang utuh dalam mengelola amal usaha secara otonom untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, khususnya terkait dengan prosedur dan mekanisme kewenangan 'Aisyiyah. Keputusan-keputusan yang diambil secara otonom terhadap prosedur dan mekanisme kewenangan 'Aisyiyah tersebut, untuk :

- a. Menguatkan fungsi dan peran 'Aisyiyah sebagai gerakan perempuan di bidang da'wah keagamaan, social, dan kemasyarakatan.
- b. Menguatkan posisi dan peran 'Aisyiyah sebagai kekuatan strategi di dalam memberi kontribusi dinamika pencegahan dan perberdayaan.
- c. Mengembangkan sistem kepemimpinan kolektif, kolegial, visioner, efektif, dan responsif.
- d. Mengembangkan manajemen organisasi yang baik dan dinamis, sehingga mampu mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.

- e. Mengembangkan sistem koordinasi dan komunikasi efektif antar pimpinan dan jajarannya secara kontinyu dan dinamis.
- f. Mengembangkan komunikasi dan kerjasama organisasi yang semakin luas dengan berbagai pihak terkait.
- g. Mengembangkan jumlah cabang dan ranting sesuai pengembangan kecamatan sehingga berdiri cabang-cabang dan ranting-ranting baru sebagai basis gerakan di tingkat akar rumput.

Penjelasan di atas dapat dipertegas pula oleh Ketua dan Sekretaris 'Aisyiyah Kota Makassar bahwa, dalam posisi yang paradoks 'Aisyiyah tetap memiliki kewenangan dalam merealisasikan program kerja 5 (lima) tahunan (2010 – 2015) sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing unit (amal usaha), bertujuan untuk “Meningkatkan kualitas pimpinan dalam mengelola dan mengarahkan organisasi serta kualitas, komitmen, wawasan, visi dan misi kemampuan operasional kader sebagai gerakan”. Kegiatan yang dapat dilakukan meliputi: (1) mendata dan memberdayakan potensi yang dimiliki pimpinan dan anggota; (2) seminar pemberdayaan perempuan, dan (3) pelatihan kepemimpinan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, 'Aisyiyah sebagai sistem yang otonom dalam menjalankan keputusan di atas adalah bertujuan untuk:

“Meningkatkan kualitas pimpinan dalam mengelola, mengarahkan, dan menggerakkan organisasi, serta meningkatkan komitmen, wawasan, dan kemampuan operasional kader 'Aisyiyah terhadap visi organisasi”. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung posisi 'Aisyiyah sebagai sistem yang otonom adalah: (1) menyusun wilayah pembinaan cabang-cabang; (2) kunjungan pimpinan, pembinaan, dan supervise; dan (3) mendorong berdirinya

cabang-cabang dan ranting-ranting dalam wilayah kewenangan 'Aisyiyah Kota Makassar (hasil wawancara CA dan DM, tanggal 17 Februari 2012).

Selanjutnya contoh lain tentang keputusan-keputusan yang diambil menunjukkan bahwa posisi 'Aisyiyah adalah paradoks seperti pengurus di masing-masing majelis dalam menentukan langkah-langkah pengembangan organisasi, terutama terkait dengan majelis yang dipimpin misalnya; Majelis Dikdasmen mengambil keputusan tentang pengembangan TK Bustanul Atfal, keputusan tentang kurikulum SD, MI, SMP, dan MTs yang dibina 'Aisyiyah secara otonom dan diaplikasikan secara otonom oleh pengelola amal usaha tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Majelis Dikdasmen bahwa:

Majelis Dikdasmen memiliki kewenangan seperti halnya majelis lain, dalam mengambil keputusan tentang pengembangan pendidikan yang akan diaplikasikan secara otonom. Namun demikian, tetap mengacu pada sistem yang berlaku secara nasional terutama sistem pendidikan di Muhammadiyah. Demikian pula tentang kurikulum, Majelis Dikdasmen mengambil keputusan secara otonom dalam menyusun kurikulum SD, MI, SMP, dan MTs sesuai dengan tingkat jenjang pendidikan yang dibina 'Aisyiyah dan menjadikan KBK dan KTSP sebagai dasar penyusunan kurikulum, serta ketentuan yang digariskan oleh Muhammadiyah (hasil wawancara SK, 22 Februari 2012).

'Aisyiyah menyadari bahwa, posisi paradoks dalam kemandirian bidang pendidikan adalah suatu proses panjang bukan bawaan atau sesuatu yang datang secara simultan. Ada peroses yang dibutuhkan yaitu di satu sisi dia otonom, namun di sisi yang lain tetap mempertimbangkan kekuatan (sistem) yang lebih besar (Muhammadiyah dan Pemerintah). Proses ini berlangsung secara terus menerus, konsisten, dan tetap dalam koridor organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Demikian halnya, Majelis Kesehatan dalam mengambil keputusan-keputusan tentang pengelolaan dan pengembangan Rumah Sakit, Rumah Bersalin, dan BKIA terutama langkah-langkah yang diambil agar pasien dan warga yang berobat mendapat pelayanan seperti yang diharapkan, semua keputusan ditentukan secara otonom untuk dilaksanakan secara otonom. Namun, tidak berarti mengabaikan kebijakan-kebijakan yang berlaku umum baik oleh Muhammadiyah maupun Pemerintah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Majelis Kesehatan 'Aisyiyah Kota Makassar, yang bertanggung jawab dan membina beberapa amal usaha, menjelaskan bahwa:

Dalam hal pengabilan keputusan tentang pelayanan kesehatan yang akan diterapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki 'Aisyiyah adalah secara otonom, karena yang paling memahami proses pelayanan adalah pengurus dan anggota yang memiliki latar belakang pendidikan serta pengalaman bidang kesehatan, termasuk Rumah Sakit dan Rumah Bersalin yang dikelola oleh Muhammadiyah, seperti Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadidjah di Jalan Kartini, dan Rumah Sakit Sitti Khadidjah III di Jalan Veteran Selatan. Dalam hal ini, segala keputusan dan kebijakan tentang pelayanan ditentukan oleh 'Aisyiyah dengan tetap berkoordinasi dengan Muhammadiyah (hasil wawancara HD, 12 Maret 2012).

Data dan informasi yang menunjukkan bahwa, 'Aisyiyah merupakan bahagian dari Muhammadiyah dan keputusan-keputusan yang ditetapkan secara otonom, kemudian diintervensi oleh Muhammadiyah antara lain: (1) Keputusan tentang pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Dalam hal ini, Majelis Dikdasmen 'Aisyiyah mengambil keputusan tentang pengelolaan pendidikan dengan tetap mengacu kepada standar yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah, di samping Standar Nasional (SN) yang ditentukan oleh UU. Misalnya, standar penilaian, standar

kelulusan, standar kurikulum, dan kompetensi guru. Apabila Majelis Dikdasmen 'Aisyiyah menetapkan sebuah keputusan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan di atas, maka Muhammadiyah melakukan intervensi terhadap keputusan tersebut, agar 'Aisyiyah tetap memelihara posisi paradoks.

Demikian pula keputusan-keputusan yang diambil secara otonom oleh majelis lain, seperti penjelasan dari Ketua Majelis Kesehatan bahwa:

'Aisyiyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah tetap memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri pengelolaan amal usaha, namun tetap dalam koordinasi Muhammadiyah. Misalnya, dalam hal memberikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan warga Muhammadiyah, tanpa menyalahi prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan. Apabila ada keluhan dari warga bahwa keputusan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, maka Muhammadiyah melakukan intervensi terhadap keputusan itu, agar 'Aisyiyah lebih memperhatikan warga Muhammadiyah sebelum warga lain demi menjaga kemandirian dan keberlanjutan organisasi (hasil wawancara HD, 12 Maret 2012).

Demikian, para pimpinan dan semua pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap majelis sesuai dengan struktur di tingkat cabang dan ranting berhubungan satu sama lain, dimana 'Aisyiyah sebagai organisasi otonom untuk mencapai tujuan organisasi tetap memelihara posisiparadoks dengan Muhammadiyah. 'Aisyiyah sebagai bagian dari sistem menciptakan sikap kemandirian dalam menjalankan roda organisasi, sehingga mampu menjaga dan memelihara posisi paradoks. Dengan kata lain, semua anggota dan pengurus 'Aisyiyah dituntut untuk membangun kemandirian dengan memberikan kontrol secara berkala dan berkelanjutan.

Selanjutnya keputusan yang menunjukkan sebagai posisi paradoks, kapan ‘Aisyiyah otonom, dan kapan diintervensi oleh Muhammadiyah. Hal ini seperti dikemukakan oleh Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial bahwa:

Saya sebagai penanggung jawab Majelis Kesejahteraan Sosial di dalam mengelola amal usaha ‘Aisyiyah, khususnya Panti Asuhan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku termasuk kebijakan tentang pembinaan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah bahwa, pembinaan yang dilakukan harus mengutamakan warga Muhammadiyah & ‘Aisyiyah (anak yatim, piatu, dan/atau yatim piatu, serta anak-anak yang kurang beruntung/tidak mampu karena sesuatu sebab (penyandang masalah sosial), sebelum warga lain (bukan Muhammadiyah). Apabila kebijakan atau ketentuan tersebut tidak diperhatikan atau diabaikan oleh pengelola panti, maka Muhammadiyah sewaktu-waktu mengintervensi atau tidak memberi dukungan terhadap ‘Aisyiyah. Dengan sendirinya kemandirian atau posisi paradoks ‘Aisyiyah akan terganggu. Demikian kondisi tersebut terus berjalan (hasil wawancara MS, tanggal 20 Maret 2012).

Kebijakan lain yang menunjukkan bahwa, ‘Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah yang sewaktu-waktu dapat diintervensi apabila ‘Aisyiyah mengambil keputusan secara otonom yang tidak sesuai dengan kebijakan Muhammadiyah, adalah berkaitan dengan upaya mewujudkan masyarakat madani sebagai salah satu indikator untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya pengembangan program-program kerja setiap majelis. Dalam hal ini, relevansi indikatornya termanifestasi dalam amal usaha yang dibina ‘Aisyiyah ditinjau dari prinsip-prinsip organisasi yang dianut oleh masyarakat madani sebagai perwujudan identitasnya secara material.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa realisasi program kerja ‘Aisyiyah Kota Makassar periode (2010 – 2015) melalui tujuh majelis dan dua lembaga yang telah disebutkan sebelumnya, terkait dengan masyarakat madani yang dicita-citakan dan

terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar- benarnya sebagai visi utama ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah. Di samping itu, pelaksanaan nilai-nilai dan norma-norma yang partisipatif dan otonom oleh warga ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi yang memiliki tatanan yang menjamin semua anggota untuk mampu mengekspresikan diri, mengembangkan minat, saling menukar informasi, memediasi perbedaan-perbedaan dan menciptakan pola-pola hubungan yang stabil. Oleh karena itu, warga juga tertata dalam organisasi modern yang mengembangkan nilai-nilainya sendiri secara konsisten.

Posisi ‘Aisyiyah dalam mengelola organisasi yang sewaktu-waktu di intervensi oleh Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat madani serta memelihara otonomi sebagaimana dikemukakan oleh salah satu Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, membidangi dakwah dan kerjasama antar lembaga bahwa “tercapainya amal usaha Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah secara berkualitas menuju terciptanya masyarakat madani. Selanjutnya ditegaskan bahwa, ‘Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah dalam penjabaran secara berkesinambungan visi idealnya untuk tegaknya agama Islam berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadist. Kemudian disebutkan bahwa:

‘Aisyiyah dalam mengambil keputusan tentang pelaksanaan dakwah tetap mengikuti ketentuan dari Muhammadiyah, biasa disebut “Gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar”. Dakwah Islam ialah mengajak, menyeru dan memanggil manusia untuk memeluk, melaksanakan, dan menegakkan ajaran agama Islam. Amar makruf, adalah mengajak dan menunjukkan hal-hal yang baik, bermanfaat dan terpuji. Nahi munkar, artinya mencegah, melarang, menolak,

mengikis, dan menjauhkan hal-hal yang buruk, kotor dan keji (hasil wawancara HQ, 20 Maret 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa 'Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah yang memiliki jaringan struktural yang sangat luas di dalam menunjang gerakan dakwah Islam. Jaringan struktural yang tersebar dan berjenjang dalam beberapa level yang mempunyai kewenangan dan wilayah kerja sesuai dengan kebijakan Muhammadiyah. Jaringan yang tersebar di seluruh daerah ini merupakan potensi yang sangat besar untuk membangun umat menuju masyarakat utama dalam bentuk sinergi dan jaringan yang kuat di beberapa bidang. Jaringan struktural merupakan kontribusi 'Aisyiyah yang besar sebagai sistem yang otonom dalam mengakomodasikan warga dalam menyalurkan aspirasinya, sekaligus mengkoordinasikan gerakan Islamiyah di Kota Makassar melalui berbagai aktivitas dakwah, keagamaan, pendidikan, kesejahteraan, sosial, kesehatan dan sebagainya.

Contoh lain yang dapat dikemukakan hubungannya dengan posisi 'Aisyiyah yang paradoks dalam mengambil keputusan secara otonom, serta diintervensi oleh Muhammadiyah dalam memelihara kemandirian, adalah kebijakan tentang struktur dan program-program pembinaan keluarga, yaitu "Terbina dan berkembangnya kualitas kehidupan keluarga yang meliputi semua aspek menuju terciptanya keluarga sakinah". Kebijakan dan program tersebut sejalan dengan keputusan Muhammadiyah, sehingga didukung. Jika tidak sejalan akan diintervensi. Kebijakan dan program yang dimaksud ialah: (1) meningkatkan kelompok desa binaan karya tayyibah dengan keluarga sakinah; (2) sosialisasi tentang pendampingan anak dalam beradaptasi

dengan media dan informasi; (3) sosialisasi UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Senada dengan hal tersebut, dijelaskan oleh salah satu Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (PWA) Sulawesi Selatan, bahwa:

'Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah tetap menjaga dan memelihara kemandirian dalam pengembangan dakwah Islam melalui dakwah jamaah dan dakwah kultural sebagai strategi dakwah masa kini. Hal ini mengingat 'Aisyiyah sebagai sistem yang otonom di satu sisi, dan di sisi lain sebagai bagian dari kompleksitas sistem (Muhammadiyah), sehingga harus konsisten dalam menghadapi berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, dan pola pikir umat manusia yang semakin kompleks. Karena itu, diwujudkan melalui gerakan Tajdidiyah, Islahiyah, dan Tabsyiriyah (TIT) melalui pendekatan sumber daya manusia (SDM), ekonomi dan kesejahteraan, pendekatan struktural serta pendekatan global" (hasil wawancara HQ, tanggal 20 Maret 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pendekatan 'Aisyiyah dalam pengembangan kualitas SDM melalui upaya mencerdaskan kehidupan umat. Pendekatan ekonomi dan kesejahteraan dilaksanakan untuk mengajarkan etos kerja. Pendekatan struktural dapat ditingkatkan dengan mewujudkan kegiatan politik dan birokrasi sebagai pendukung dakwah. Pendekatan global dilakukan dengan berpikir makro dan mikro secara seimbang, beraktivitas lintas sektoral, membangun kolektivitas dan individual, umum dan khusus, untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks ini posisi 'Aisyiyah tetap menjadi bagian dari Muhammadiyah sebagai proses bimbingan.

Dalam konteks keputusan politik yang diambil secara otonomi, serta diintervensi oleh Muhammadiyah. Sebagai contoh; pada Pemilihan Umum (Pemilu Legislatif) Tahun 2004 dan 2009 'Aisyiyah mengambil keputusan mencalonkan salah

satu pengurus (Ketua) untuk menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sulawesi Selatan, dan menghimbau semua warga 'Aisyiyah untuk mendukung Keputusan tersebut diintervensi (tidak didukung) oleh Muhammadiyah, karena mempunyai calon sendiri untuk maju sebagai DPD Pemilu 2004 dan 2009. Pada akhirnya baik calon dari 'Aisyiyah maupun Muhammadiyah gagal meloloskan wakilnya di DPD dalam dua kali Pemilu tersebut. Akibat dari keputusan yang tidak sejalan ini, sempat terganggu kemandirian 'Aisyiyah (posisi paradoks). Namun, seiring dengan berjalannya waktu posisi paradoks independensi dapat kembali normal. Dengan kata lain, 'Aisyiyah menyadari posisinya sebagai sistem yang otonom di satu sisi, tapi di sisi lain dia adalah bagian dari Muhammadiyah, sehingga keputusan-keputusan yang diambil kapan-kapan dapat diintervensi.

Sehubungan dengan keputusan politik yang diambil dalam Pemilu 2004 dan 2009 di atas, diperkuat oleh Ketua 'Aisyiyah bahwa :

Tidak mudah mengelola organisasi besar seperti 'Aisyiyah, terutama untuk menjaga dan memelihara kemandirian dalam mengambil sebuah keputusan secara otonom, dengan memperhatikan keputusan-keputusan dari sistem yang lebih besar (Muhammadiyah) sebagai induk organisasi. Oleh karena itu, baik pimpinan maupun semua anggota harus memahami posisi paradoks tersebut. Di satu sisi dia otonom di dalam menentukan kebijakan dan program kerja secara mandiri. Namun, di sisi lain 'Aisyiyah adalah bagian dari Muhammadiyah yang harus menerima konsekuensi-konsekuensi yang telah digariskan. Kematangan dan komitmen tersebut menjadi pegangan semua warga untuk menjalankan amanah organisasi dengan baik. (hasil wawancara CA, 17 Februari 2012).

Lebih lanjut dijelaskan oleh ketua PDA Kota Makassar bahwa, seluruh anggota dan pengurus 'Aisyiyah menyadari akan posisi dan kedudukan di atas, sehingga dalam merealisasikan program kerja dan kegiatan yang telah ditentukan,

dengan tetap memperhatikan aspek-aspek yang menjadi otonom 'Aisyiyah dan aspek-aspek yang tidak boleh dilanggar sebagai bagian dari Muhammadiyah. Hal ini sudah menjadi komitmen dalam menyusun struktur organisasi sesuai dengan pedoman Persyarikatan Muhammadiyah.

Fakta yang menunjukkan bahwa 'Aisyiyah Kota Makassar sebagai bagian dari Muhammadiyah, ialah perkembangan awal terdapat dua cabang sebagai pelopor dan merupakan cabang tertua yaitu: Cabang Makassar dan Bontoala. Berdirinya organisasi 'Aisyiyah untuk membantu Muhammadiyah dalam pembinaan masyarakat, khususnya perempuan yang dalam banyak hal tertinggal bila dibandingkan dengan laki-laki. Namun, pada kenyatannya terutama dalam perkembangan selanjutnya; 'Aisyiyah lebih agresip sehingga wilayah kerja 'Aisyiyah lebih banyak dari pada Muhammadiyah. Hingga saat ini, 'Aisyiyah telah memiliki 25 cabang dari 14 kecamatan di Makassar; dan 96 ranting di tingkat kelurahan. Dalam satu kecamatan terdapat lebih dari satu cabang. Bahkan ada kecamatan terdapat empat cabang. Demikian pula di tingkat ranting dimana dalam satu kelurahan terdapat beberapa ranting. Hal ini menunjukkan perkembangan 'Aisyiyah lebih cepat dibanding dengan Muhammadiyah, terutama dalam hal pembinaan kader.

Kunci keberhasilan pengurus, pimpinan, dan anggota 'Aisyiyah tidak dapat diukur dengan materi dalam memimpin. Karena banyak para pemimpin organisasi ternyata mengecewakan anggotanya. Hal ini terutama disebabkan beberapa hal, antara lain: (1) tidak adanya komunikasi yang baik antara pemimpin dengan anggota. Seorang pemimpin lebih mengedepankan sikap otoriternya dan mengabaikan aspirasi

anggota. Harus dipahami organisasi bukan milik individu, perorangan atau kelompok karena itu sikap individual harus dihindari, dan (2) setiap orang memiliki kepentingan dan penting bagi seorang pemimpin memahami kepentingan anggotanya. Hal ini tidak berarti pemimpin harus tunduk dan terkontaminasi oleh banyak kepentingan.

3. Autopoiesis ‘Aisyiyah Kota Makassar

Sepanjang perjalanan ‘Aisyiyah menjelang satu abad dan ‘Aisyiyah Kota Makassar kurang lebih 86 tahun terus bertahan dan tetap eksis karena mampu mereproduksi dirinya. Dengan demikian, Autopoiesis adalah proses pembaharuan dari sistem dalam perjalanan panjang suatu organisasi. Dalam hal ini, ‘Aisyiyah Kota Makassar didirikan Tahun 1926 selalu memperbaharui dirinya, menyesuaikan dengan perkembangan serta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan hal-hal yang baru, sehingga ‘Aisyiyah terus bertahan dan berkembang menyesuaikan diri dengan segala tuntutan baik terhadap lingkungan internal (Muhammadiyah) maupun terhadap lingkungan eksternal (masyarakat dan pemerintah).

Secara etimologis, istilah “autopoiesis” terdiri dari dua kata yaitu *auto* artinya sendiri, dan *poiesis* artinya diri sendiri. Dengan demikian *autopoiesis* mengandung pengertian, selalu berusaha memperbaharui dan memproduksi diri sendiri. Autopoiesis ‘Aisyiyah Kota Makassar adalah sebuah organisasi yang terdiri dari unit-unit atau bagian-bagian yang utuh, dalam perjalanannya yang penuh dinamika selalu berusaha memperbaharui dan memproduksi hal-hal yang baru sesuai dengan tuntutan

perubahan dan perkembangan, sehingga tidak ketinggal dalam memperjuangkan visi utama dan tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Data dan informasi yang menunjukkan bahwa, 'Aisyiyah Kota Makassar melakukan autopoiesis (memperbaharui, mereproduksi diri) dari periode ke periode sesuai dengan pola perubahan yang berjalan terus menerus untuk menyesuaikan diri dengan pola perkembangan dalam lingkungan strategis terdekatnya (Muhammadiyah) dan lingkungan strategis yang lebih luas, yaitu masyarakat dan pemerintah. Sebagai contoh, perubahan struktural bidang pendidikan, sebelumnya menggunakan Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasn). Demikian pula perubahan struktural bidang lain seperti, Pembinaan Kesejahteraan Umat (PKU); sekarang berubah Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Majelis Kesejahteraan Sosial. Majelis Hukum dan HAM, sebelumnya hanya bagian dari majelis lain. Perubahan-perubahan tersebut, menunjukkan bahwa 'Aisyiyah selalu mereproduksi diri dan menghasilkan unit-unitnya sendiri untuk menyesuaikan dengan perkembangan di lingkungan internal dan eksternal, demi terwujudnya visi, misi, dan tujuan yang telah ditentukan.

Contoh yang dapat ditunjukkan bahwa, pola lama yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ditinjau dari berbagai aspek. diganti dengan pola baru sesuai dengan tuntutan perubahan dalam konteks lokal, nasional, dan global untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita 'Aisyiyah Kota Makassar khususnya, dan Muhammadiyah pada umumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Pembinaan Kader bahwa:

'Aisyiyah dalam perjalanan panjang mampu bertahan dan mandiri, karena memiliki kekuatan dan daya autopoiesis, mereproduksi diri dalam berbagai bidang, khususnya bidang kaderisasi yang bertujuan untuk: (1) meningkatkan kualitas pimpinan dan kader sebagai penggerak organisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) meningkatkan kualitas sumber daya pimpinan di setiap tingkatan dalam menjalankan fungsi-fungsinya; (3) optimalisasi fungsi dan peran amal usaha sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan kader; (4) melibatkan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Puteri setiap kegiatan sesuai tingkatan, dan (5) menyusun data base pimpinan dan kader untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki (hasil wawancara MS, tanggal 20 Maret 2012).

Dalam merealisasikan program-program kerja tersebut, majelis kader menjalin hubungan dan kerjasama secara internal dengan majelis lainnya sesuai dengan bidang tugas, peran dan fungsi serta tujuan organisasi setiap bidang dalam organisasi 'Aisyiyah. Selain itu, menjalin hubungan eksternal dengan organisasi perempuan terutama pemerintah, untuk mengembangkan jejaring dengan organisasi keagamaan sosial dan kelompok strategis lainnya di setiap tingkatan. Selain itu, meningkatkan dan mengembangkan kemitraan yang harmonis dan saling memberi manfaat kepada organisasi sosial lainnya seperti LSM, Yayasan, Pemerintah, dan institusi swasta.

Hasil penelusuran lapangan terkait dengan autopoiesis 'Aisyiyah Kota Makassar melalui program kerjasama yang dikembangkan dari fase ke fase, dalam konteks memproduksi diri sendiri bertujuan, agar terus terjalin secara optimal hubungan organisasi dalam menjalankan misi serta memajukan dan memperluas gerakan organisasi secara internal maupun eksternal. Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan untuk mendukung kelancaran program kerja tersebut, serta terwujudnya tujuan yang dimaksud adalah: (1) mengadakan Baitul Arqam dan Darul Arqam; (2)

melaksanakan pembinaan langsung terhadap Amal Usaha; (3) menyusun data base organisasi, dan (4) menjalin kerjasama dengan organisasi keagamaan, organisasi sosial melalui diskusi dan temu wicara.

Selanjutnya masih terkait dengan penerapan autopoiesis, 'Aisyiyah Kota Makassar di dalam merealisasikan program kerja melalui setiap majelis dan lembaga, termasuk dalam hal pembangunan masyarakat madani bukan saja penting, tetapi juga merupakan kondisi dan jaringan yang menyertai terbangun serta bekerjanya demokrasi, penegakan hukum, persamaan hak tanpa diskriminasi, keadilan sosial dan perdamaian. Gerakan 'Aisyiyah Kota Makassar sejak berdiri (1926) masih tetap eksis hingga sekarang. Salah satu hal yang mengikat semua anggota dan pimpinan, adalah berpegang teguh pada prinsip dasar, visi utama, dan tujuan bersama.

Dengan demikian kemandirian organisasi 'Aisyiyah sangat bergantung pada kemampuan semua anggota pengurus dan pimpinan dalam meramu program kerja, baik program otonom 'Aisyiyah maupun program dari sistem yang lebih besar Muhammadiyah termasuk pemahaman tentang masyarakat madani. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh, yaitu kegiatan yang dikembangkan oleh masing-masing majelis secara garis besar dapat dikatakan bahwa pengembangan dan pembangunan masyarakat yang membangun komunitas yang tidak pecah secara eksklusif oleh perbedaan pandangan dan kepentingan. Perbedaan tersebut justru sebagai pentingnya komunitas masyarakat yang inklusif, toleran, terbuka dan berbudaya, serta harus terus dikembangkan dan dibangun. Bentuk nyata masyarakat madani dapat dilihat dari kemampuan masyarakat mengembangkan musyawarah dan

toleransi. Dengan kata lain, masyarakat telah mampu mengembangkan budaya kebebasan berpendapat, menghormati perbedaan dan menghargai keberagaman. Upaya merealisasikan wacana masyarakat madani menjadi perhatian besar dari organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar.

Sebagai organisasi sosial keagamaan, 'Aisyiyah Kota Makassar dapat merespon carut-marutnya peradaban masyarakat di era globalisasi dengan melakukan ijtihad untuk membangun peradaban yang luhur. Kenyataan menunjukkan bahwa upaya keterlibatan dan kepedulian 'Aisyiyah terhadap problematika masyarakat khususnya di Kota Makassar semakin kompleks, tercermin dari pertumbuhan dan perkembangan kualitas serta kuantitas amal usaha yang dikelola masing-masing majelis dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang positif (hasil wawancara setelah diolah, Maret 2012).

Pelaksanaan gerakan terhadap masyarakat (umum) yang beragama Islam melalui TIT, yaitu Tajdidiyah, yang artinya pembaharuan, peningkatan dalam pemahaman agama (mengembalikan) ajaran agama sesuai tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah. Islahiyah, yang artinya perdamaian, kerukunan, persaudaraan dalam masyarakat, dan Tabsyiriyah, artinya penghiburan, pembimbingan serta pemberian dorongan dalam beribadah dan beramal saleh. Bidang-bidang yang dapat di-TIT-kan adalah Ibadah, Akhlaq, Tauhid, Tabligh, Kegiatan Jihad, Persatuan, Syi'ar Islam, Pendidikan, Seni Budaya, Kesehatan, Ekonomi, serta amalan-amalan Islam lainnya dengan tujuan utama untuk mewujudkan pribadi muslim, mukmin dan mukhsin. Hal senada juga dijelaskan oleh Ketua Majelis Tabligh, bahwa:

‘Aisyiyah sebagai organisasi dakwah selalu memperbaharui dirinya, terutama dalam pengembangan dakwah keagamaan dan sosial, selalu menyesuaikan diri dengan perubahan baik struktur maupun materi yang akan disampaikan. Misalnya, “Misi Gerakan TIT diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan program kerja yang bertujuan: menanamkan keyakinan, memperdalam, memperluas pemahaman, menambah pengalaman, dan menyebarluaskan ajaran agama Islam dalam segala aspek kehidupan; meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap agama Islam; memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, serta mempertinggi akhlak” (hasil wawancara ZM, 25 Maret 2012).

Penjelasan di atas sejalan dengan hasil pengamatan penulis tentang aktivitas TIT pada beberapa Amal Usaha ‘Aisyiyah Kota Makassar, tampak bahwa gerakan tersebut dapat meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, serta membangun dan memelihara tempat ibadah, serta amal usaha yang lain; meningkatkan pendidikan, membangun kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, menggairahkan penelitian; memajukan perekonomian, kewirausahaan, dan perbaikan hidup yang berkualitas; meningkatkan dan mengembangkan kegiatan di bidang sosial, kesejahteraan, kesehatan, serta lingkungan hidup; meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan, memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa; meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang baik dalam dan luar negeri serta usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi ‘Aisyiyah Kota Makassar.

Terkait dengan dinamika kemandirian ‘Aisyiyah Kota Makassar, serta fase-fase perkembangan organisasi sejak didirikan hingga sekarang, dalam era reformasi sejumlah kisah sukses di berbagai bidang kehidupan, seperti keberhasilan dalam demokrasi, pemulihan krisis ekonomi, resolusi konflik di beberapa daerah

(Sulselbar), diakui bahwa hingga kini masih menghadapi berbagai masalah sosial keagamaan yang kompleks. Di antaranya masalah politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang memerlukan prioritas dan perhatian untuk dipecahkan dalam perjalanan Kota Makassar ke depan.

Setelah reformasi (1998), peranan 'Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan khususnya Kota Makassar menunjukkan dinamika antara keberhasilan dan permasalahan yang harus dihadapi, yang seringkali tidak mudah dikelola karena berbagai kendala dan kelemahan termasuk masalah kepemimpinan dan cara mengurus organisasi. Reformasi 1998 merupakan pilihan yang niscaya dan telah menjadi bagian penting dari sejarah 'Aisyiyah sebagai jalan keluar dari kondisi dan era otoritarian rezim Orde Baru pada masa sebelumnya.

Peran dan tanggung jawab 'Aisyiyah di era baru ini diharapkan dapat membawa perubahan ke arah perbaikan sistem politik dan ekonomi seperti tertuang dalam program kerja masing-masing majelis dan lembaga 'Aisyiyah. Dalam sejumlah kasus telah menunjukkan prestasi atau perkembangan yang positif terutama dalam demokratisasi. Karena dengan reformasi 'Aisyiyah tetap berada dalam posisi paradoks, yaitu di satu pihak menjadi organisasi yang otonom dalam mengelola amal usaha, di sisi lain 'Aisyiyah merupakan bagi dari Muhammadiyah terutama dalam merealisasikan nilai dan norma yang telah digariskan sebagai wilayah perjuangan bersama dalam rangka mencapai visi dan tujuan bersama.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa konsep kemandirian menjadi faktor sangat penting dalam sebuah organisasi termasuk 'Aisyiyah. Konsep ini tidak hanya

mencakup pengertian kecukupan diri (*self-sufficiency*) bidang ekonomi, politik, sosial budaya tetapi juga faktor manusia secara pribadi, di dalamnya mengandung unsur penemuan diri (*self-discovery*) berdasarkan kepercayaan diri (*self-confidence*). Kemandirian adalah suatu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi pelbagai masalah demi mencapai tujuan, tanpa menutup diri terhadap pelbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan.

Dalam pengertian sosial atau pergaulan antar manusia, kemandirian juga bermakna sebagai organisasi diri (*self-organization*) atau manajemen diri (*self-management*). Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi dan melengkapi satu sama lain sehingga muncul suatu keseimbangan. Dewasa ini, pencarian pola yang tepat, agar interaksi antar unsur selalu mencapai keseimbangan, menjadi penting. Setiap keseimbangan yang dicapai akan menjadi landasan bagi perkembangan berikutnya. Dengan demikian, proses kemandirian yang dicapai ‘Aisyiyah adalah proses yang berjalan tanpa ujung. Dalam konteks pembangunan, sikap mandiri harus dijadikan tolok ukur keberhasilan, yakni warga ‘Aisyiyah atau masyarakat menjadi lebih mandiri atau malah semakin bergantung. Misalnya, pendiri dan pengelola amal usaha ‘Aisyiyah; apakah lebih bebas atau malah semakin bergantung pada organisasi ‘Aisyiyah atau Muhammadiyah, atau Pemerintah (Kota Makassar).

Implikasi dari saling bergantung dari unsur-unsur dalam kemandirian, khususnya ‘Aisyiyah Kota Makassar diwujudkan dalam program kerja majelis dan lembaga baik di tingkat daerah, cabang, dan ranting. Program-program kerja di bidang ekonomi bagi golongan miskin harus dirancang secara tepat, sesuai dengan

tingkat keseimbangan yang ada pada mereka. Kemiskinan yang mereka tanggung tidak boleh dilihat semata-mata sebagai masalah fisik, melainkan harus dilihat sebagai tantangan atau dorongan bagi hadirnya harapan baru atau kondisi yang lebih baik. Dengan demikian program kerja masing-masing bidang (majelis dan lembaga), harus dapat dijangkau oleh kemampuan organisasi. Karena itu, program harus memungkinkan golongan miskin ikut berpartisipasi, mulai dari tahap implementasi sampai pada tingkat pengambilan keputusan sesuai dengan fakta yang dihadapi.

Dinamika kemandirian 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan tetap eksis, sekaligus merupakan gerakan dakwah, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan diharapkan interaksi unsur-unsur dalam kemandirian menjadi efektif dan perkembangan ke arah *selfish* bisa dihindari, perkembangan pribadi individu yang positif dibangun lewat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk dan diselenggarakan secara wajar secara bertahap. Dalam kelompok semacam inilah proses belajar-mengajar akan berlangsung, dimana kesenjangan antara penerima pelajaran dan pengajar disebabkan perbedaan latar belakang sosial-ekonomi, bisa dihindari.

Dengan demikian, kecenderungan ke arah *selfish* sebagai pola lama mulai terkikis karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan, akan diganti oleh pola baru yaitu *empati* yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Bila kemampuan individu (anggota) 'Aisyiyah yang bertindak sebagai murid dari proses perkembangan golongan miskin. Proses ini menuntut komitmen, dedikasi, dan pandangan hidup

yang baik dari pendamping. Artinya, mereka harus memperhatikan proses kemandirian yang terjadi dalam KSM seperti yang terjadi pada dirinya sendiri.

Sehubungan dengan proses kemandirian melalui autopoiesis tersebut, menurut Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 'Aisyiyah Kota Makassar, menjelaskan bahwa:

Pengembangan organisasi 'Aisyiyah menuju kemandirian melalui autopoiesis dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, ialah "Para pengurus dan anggota bersama-sama membuat *work plan* (perencanaan kerja) yang terperinci dan detail dengan budget kegiatannya. Beberapa item yang menjadi titik sorot dalam perencanaan kerja adalah; kegiatan pendidikan dan penyadaran pro lingkungan dan pro rakyat terpinggir (*grassroot*), pemberdayaan pada petani di kampung, memperkuat tim dan jejaring (*net work*) serta kegiatan yang bersifat mendesak dan karitatif(hasil wawancara MR, tanggal 25 Februari 2012).

Penjelasan ini mempertegas bahwa, dalam perencanaan kerja yang dilakukan selama priode kepemimpinan lima tahun, khususnya wilayah kerja PDA Kota Makassar (2010 – 2015), kegiatan yang direncanakan merupakan hasil reproduksi dari periode sebelumnya. Kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam merealisasikan program kerja yang telah ditentukan, namun para anggota memperhatikan hal-hal yang terkait dengan program kerja masing-masing majelis dan lembaga kebudayaan untuk mempertajam kegiatan tersebut dalam rentang waktu satu tahun sebagai langkah gerakan.Hal ini sebagai bentuk reproduksi diri pengurus dan anggota, menyadari bahwa setiap perencanaan mesti dibarengi dengan usaha dan kerja keras secara bersama-sama saling mengisi dan melengkapi.

Autopoiesis Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kota Makassar, proses pembaharuan mencapai kemandirian seperti sekarang merupakan upaya yang

berkesinambungan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dan penyadaran terhadap semua pihak. Dalam hal ini, sebagai fasilitator untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kemandirian. Dengan kata lain, PDA Kota Makassar mengajak semua pengurus dan anggota untuk lebih mampu melakukan kegiatan pemberdayaan dengan metode inovatif dan kreatif melalui daya autopoiesis.

B. Keberlanjutan Organisasi ‘Aisyiyah dalam Merespons Dinamika Lingkungan Eksternalnya

Prinsip dasar keberlanjutan sebuah organisasi adalah terletak pada sistem yang bersiklus melalui imput dari lingkungan, kemudian memproses imput tersebut sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari lingkungan agar dapat menghasilkan output seperti yang diharapkan oleh lingkungan eksternalnya. Dalam hal ini, keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah seperti telah dijelaskan di atas bahwa, ‘Aisyiyah merupakan sistem yang otonom terdiri atas unit-unit yang utuh menerima imput dalam merespon tuntutan dari lingkungan untuk memproses input tersebut sesuai dengan tuntutan yang berlaku, sehingga menghasilkan output yang diharapkan oleh lingkungan (masyarakat).

Dengan demikian, di balik kemandirian ‘Aisyiyah sebagai sistem yang otonom, juga dapat memelihara keberlanjutan organisasi karena komponen atau sistem yang dimiliki berkembang melalui ketiga aspek yang dimaksud, yaitu input, proses, dan output. Sebagai contoh, sistem atau unit-unit yang mengelola bidang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, dan Madrasah Aliyah (MA), yang di bawah koordinasi Majelis Dikdasmen

melakukan perubahan-perubahan dalam menerima input berupa calon siswa dari lingkungan (masyarakat), kemudian diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu TK diproses selama 2 tahun untuk menghasilkan output calon-calon siswa SD/MI. Kemudian diproses selama 6 tahun untuk menghasilkan output calon-calon siswa SMP/MTs, kemudian melalui proses selama 3 tahun dan menghasilkan output calon-calon siswa SMA/SMK dan MA untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku selama 3 tahun, sehingga menghasilkan output calon-calon mahasiswa sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Demikian pula sistem yang mengelola bidang kesehatan, menerima input berupa calon pasien di rumah sakit atau rumah bersalin, kemudian diproses dalam hal ini menjalani perawatan dan pengobatan kesehatan atau persalinan bagi, sehingga menghasilkan output yang diharapkan yaitu para pasien mendapat pelayanan yang baik dan memuaskan sehingga sembuh dari penyakit yang diderita, atau melahirkan dengan baik.

Sementara sistem yang menangani bidang dakwa keagamaan dapat menerima input berupa calon da'i baik di Pesantren maupun lembaga yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan dakwah, untuk diproses sesuai kebutuhan sehingga menghasilkan output yaitu para da'i atau ustadz yang handal yang mampu memberikan cemahan dan dakwah sebagaimana yang diharapkan masyarakat dan pemerintah (lingkungan eksternal). Dengan kata lain, input, proses dan output yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dakwah adalah untuk merespon tuntutan perkembangan serta perubahan berbagai aspek, terutama metode, materi dan

substansi dakwah yang terus berubah serta berkembang demikian kompleks agar tidak ketinggalan sebagaimana yang dijelaskan pada konteks autopoiesis hubungannya dengan kedudukan atau posisi 'Aisyiyah yang paradoks agar tetap bertahan dan berlanjut.

Data dan informasi yang menunjukkan bahwa, 'Aisyiyah merespons dinamika lingkungan strategis, baik Muhammadiyah maupun Pemerintah melalui daya kontingensi terhadap berbagai program kerja dan kegiatan yang diemban masing-masing majelis dan lembaga setiap periode. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah proses perkembangan dan perubahan yang dialami dari periode ke periode khususnya periode 2010/2015 yang terungkap dalam wawancara dengan Wakil Ketua PDA Kota Makassar, yang membidangi pengembangan kader, menjelaskan bahwa:

Keberkelanjutan 'Aisyiyah sebagai salah satu ortom Muhammadiyah bergerak dan berkontribusi memajukan bidang pembinaan dan kaderisasi termasuk anak-anak yang sedang dan akan dibina di Panti Asuhan (PA). Melalui input anak-anak yatim, piatu, anak terlantar, dan anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau biasa disebut penyandang masalah sosial untuk diproses atau dibina dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dialami, serta menghasilkan output yaitu anak-anak yang mandiri dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara seperti yang diharapkan. Demikian pula halnya dengan penyandang masalah sosial lain seperti lanjut usia di Panti Jompo dengan input dari lingkungan para usia lanjut (lansia) yang tidak mampu dan terlantar (hasil wawancara KA, tanggal 17 Maret 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa, keberlanjutan 'Aisyiyah karena mampu merespon lingkungan strategis terdekat terutama Muhammadiyah. Selain itu, keberlanjutan tersebut merupakan karunia Allah yang diraih atas kekuatan yang lahir dari keikhlasan, komitmen, potensi, dan partisipasi semua warga sebagai

gerakan dakwah amar makruf nahi munkar, serta tajdid sehingga selalu menunjukkan semangat tinggi untuk berkiprah konstruktif dalam kehidupan. Dengan demikian, keberlanjutan merupakan daya kontigensi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan strategis serta kepercayaan dan dukungan berbagai pihak yang memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan visi dan tujuan organisasi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kemandirian 'Aisyiyah Kota Makassar karena mampu mengelaborasi tiga aspek utama organisasi, yaitu medan visional yang telah dipahami oleh semua anggota serta menjadi pegangan dalam melaksanakan semua kegiatan dan program kerja 'Aisyiyah dengan tetap memposisikan diri paradoks independensi, serta berautopoisis menyesuaikan diri dari fase ke fase; dari waktu ke waktu seiring perubahan dan perkembangan sejak didirikan hingga sekarang. Sementara ditinjau dari aspek keberlanjutan, 'Aisyiyah terus berkembang dan berlanjut karena telah melakukan tiga hal penting dengan baik, yaitu input, proses, dan output yang diterima dari lingkungan strategis melalui program kerja setiap majelis dan lembaga seperti dalam periode (2010-2015).

Data dan informasi yang dapat ditunjukkan dalam disertasi ini, antara lain: Majelis Tabligh, program kerja yang direalisasikan sebagai respon dari lingkungan strategis meliputi: (a) mengintensifkan pembinaan aqidah, akhlak, dan ibadah di kalangan 'Aisyiyah dan masyarakat melalui pengajian serta kajian-kajian; (b) mengintensifkan kajian tafsir al-Qur'an dan Hadist bagi anggota, kader dan pimpinan 'Aisyiyah; (c) memasyarakatkan pelaksanaan kehidupan sehari-hari berdasarkan pedoman kehidupan Islam sesuai tuntunan tarjih Muhammadiyah; (d) meningkatkan

dan mengembangkan kemampuan muballigh dalam berbagai aspek, seperti penguasaan metode, materi, serta strategi da'wah; (e) meningkatkan fungsi mesjid, mushallah dan sarana dakwah lainnya sebagai pusat kegiatan Tabligh (penyiaran Islam secara terprogram), dan (f) mengintensifkan program pembelajaran al-Qur'an bagi anggota 'Aisyiyah.

Selanjutnya, data dan informasi tersebut dipertegas oleh salah satu Wakil Ketua PDA Kota Makassar yang membidangi pengembangan kader, bahwa:

Tujuan yang ingin diwujudkan melalui program-program di atas ialah "Terbangunnya kualitas aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah kalangan umat, atau masyarakat luas yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah melalui pesan-pesan yang bersifat pencerahan dan kemajuan". Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka proses kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) Pengajian tentang aqidah, akhlak, dan ibadah; (2) Sosialisasi tentang pedoman kehidupan Islami sesuai HTP; (3) Pelatihan muballigh secara berkala, dan (4) Memfungsikan mesjid dan mushallah pada setiap kegiatan (hasil wawancara KJ, tanggal 10 Maret 2012).

Selanjutnya masih terkait dengan program kerja Majelis Tabligh PDA Kota Makassar, dalam pembinaan keluarga ialah meliputi: (a) meningkatkan dan menguatkan pembinaan keluarga dengan basis nilai-nilai agama untuk membentuk manusia yang memiliki iman, mentalitas dan karakter yang kuat; (b) meningkatkan dan mengintensifkan peran keluarga (orang tua) sebagai pendamping anak dalam beradaptasi dengan media dan informasi, dan (c) sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, dan UU tentang penghapusan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).

Data dan informasi yang menunjukkan keberlanjutan 'Aisyiyah melalui program kerja Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), yaitu: (a)

meningkatkan kualitas dan kreativitas penyelenggaraan pendidikan dasar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) ‘Aisyiyah dalam wilayah Kota Makassar; (b) menjadi lembaga pendidikan ‘Aisyiyah sebagai basis kaderisasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan; (c) meningkatkan kualitas pendidikan melalui jenjang pendidikan, forum diskusi dan berbagai cara yang lain yang telah digariskan; (d) meningkatkan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan organisasi berdasarkan kinerja, komitmen dan pengabdian terhadap ‘Aisyiyah di Kota Makassar; (e) membuat data base sebagai pusat informasi dan basis pengembangan pendidikan ‘Aisyiyah di Kota Makassar, dan (f) penggunaan administrasi anak didik dan organisasi.

Menurut salah seorang Wakil Ketua ‘Aisyiyah Kota Makassar Periode (2010-2015), yang bertanggung jawab di bidang pendidikan mengatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan di atas sebagai wujud keberlanjutan organisasi adalah untuk meningkatkan kualitas keunggulan ‘Aisyiyah sebagai strategi pembentukan manusia yang utuh, berilmu dan berkarakter sesuai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) kunjungan pembinaan dan supervise langsung terhadap amal usaha yang dibina oleh ‘Aisyiyah Kota Makassar; (2) mengikutsertakan pendidikan dan latihan kepada tenaga kependidikan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan ‘Aisyiyah; (3) penataran/pelatihan kurikulum dan pembahasan ke ‘Aisyiyahan dan ke Muhammadiyah; (4) melaksanakan seminar tentang pendidikan pengurus dan guru-guru; (5) menetapkan kesejahteraan setiap pendidik dan tenaga kependidikan sesuai

dengan kondisi lembaga (amal usaha) masing-masing; (6) memberikan penghargaan terhadap guru yang memiliki masa kerja 10 tahu ke atas; (7) membuat data base (anak didik, guru dan pengurus); (8) menggunakan administrasi anak (peserta) didik seperti: Ijazah, laporan pendidikan, buku induk; (9) membuat RAPBO/ RAPBS, dan (10) menetapkan uang infaq siswa Rp 3000/Tahun/Anak, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Pimpinan Cabang 'Aisyiyah (PCA) = 40%; (b) Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) = 35%; (c) Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (PWA) = 15%, dan (d) PPA Pimpinan Pusat 'Aisyiyah = 10%; (11) menetapkan dana pembinaan organisasi tingkat daerah Rp. 5000/Tahun/Anak, dan (12) Zakat Profesi.

Senada dengan penjelasan di atas, diperkuat oleh pandangan Ketua Lembaga Kebudayaan 'Aisyiyah Kota Makassar, bahwa:

'Aisyiyah sebagai salah satu organisasi dakwah keagamaan, sosial dan budaya dalam era reformasi tidak terlepas dari krisis multikompleks, dan multidimensional yang muncul antara lain dalam bidang keuangan, politik, hukum yang dialami oleh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar dari hari ke hari terus berlangsung dan berkepanjangan. Namun, 'Aisyiyah telah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola daya kontigensi amal usaha yang dikelola melalui program kerja secara berkelanjutan termasuk Lembaga Kebudayaan, sebagai salah satu dari dua lembaga 'Aisyiyah yang dibentuk seiring dengan perkembangan dan perubahan, merespon lingkungan strategis terutama untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi sehingga 'Aisyiyah terus berkembang dan berlanjut (hasil wawancara AA, 22 Maret 2012).

Keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar dalam merespon lingkungan strategis serta persoalan yang dihadapi dengan langkah konkrit. Dalam Sidang Tanwir 'Aisyiyah 2010 mengimplementasikan semua program kerja masing-masing majelis dan lembaga serta membulatkan sikap dan tekad, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam era yang penuh

dengan kompetisi (persaingan) segenap komponen bangsa, terutama warga Aisyiyah, dituntut untuk lebih cerdas dalam menanggapi serta memecahkan persoalan-persoalan bangsa. Situasi krisis multidimensi yang dialami hubungannya dengan program kerja masing-masing majelis dan lembaga telah direspon sebagaimana yang diharapkan.

Data yang menunjukkan bahwa 'Aisyiyah tetap eksis karena mampu merespon perubahan lingkungan strategis, khususnya dalam satu dekade terakhir antara lain menangani berbagai persoalan yang dihadapi perempuan seperti kekerasan, diskriminasi termasuk KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) memberi kesempatan kepada semua majelis dan lembaga di bawah koordinasi Majelis Hukum dan HAM untuk menanggapi isu yang berkembang dengan langkah-langkah konkrit. Misalnya, masalah gender hubungannya dengan kedudukan perempuan dalam Islam. Menurut Wakil Sekretaris PDA Kota Makassar bahwa:

'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia terus berbenah diri menyesuaikan dengan perkembangan, terutama masalah-masalah yang dihadapi dewasa ini semakin kompleks. Namun, 'Aisyiyah tetap menyadari keberlanjutan organisasi ini prinsip dasar dan azas yang dikembangkan bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena itu, dalam mengatasi persoalan perempuan baik diskriminasi, KDRT atau bentuk kekerasan lain yang dialami perempuan apalagi dikaitkan dengan gender, maka 'Aisyiyah perlu mengkaji ulang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah tentang kedudukan, hak, dan kewajiban perempuan dalam Islam. Dengan demikian, 'Aisyiyah merespon lingkungan strategis tidak hanya program rutinitas tetapi juga mengikuti perkembangan regional, nasional maupun global (hasil wawancara RD, 17 Maret 2012).

Konsekuensi dari pilihan gerakan 'Aisyiyah Kota Makassar, terutama dilihat dari kualitas kegiatan bahwa peningkatan perhatian terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik pimpinan maupun segenap warganya, peningkatan kualitas

kegiatan, dan kualitas organisasi. Kepedulian ‘Aisyiyah dan kepekaan terhadap isu-isu sosial dalam segenap aspek kehidupan. Isu-isu yang berkembang dalam masyarakat dari fenomena-fenomena sosial menjadi sasaran garapan ‘Aisyiyah, antara lain bidang ekonomi, bidang yang fenomenal (isu gender), dan bidang sosial dalam meningkatnya kualitas dan kuantitas yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Fakta lain yang menunjukkan bahwa, ‘Aisyiyah merespon berbagai persoalan dari lingkungan strategis juga dijelaskan oleh Sekretaris PDA Kota Makassar, bahwa seiring dengan perubahan bidang-bidang strategis, maka ‘Aisyiyah mengubah bidang kerja TKI/TKW dan PRT menjadi tenaga ahli. Hal ini karena ‘Aisyiyah memiliki potensi untuk menyelenggarakannya. Demikian pula bidang pendidikan, seperti TK, SD dan pendidikan formal. ‘Aisyiyah menyelenggarakan sekolah unggulan, dengan program beasiswa menjadi hal yang penting. Program beasiswa dalam hal ini merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan, untuk merespon tuntutan kelompok masyarakat yang tidak mampu mendapatkan pendidikan yang layak.

Senada dengan penjelasan ini diperkuat oleh salah satu Wakil Ketua Majelis ‘Aisyiyah Kota Makassar yang membidangi pendidikan menawarkan program kerja dalam Sidang Tanwir ‘Aisyiyah 2010-2015; yang memberikan beasiswa bagi anak-anak yang memerlukan keberlanjutan studi. Program ini ditindak lanjut oleh semua Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah sebanyak 33 PWA di seluruh Indonesia, disediakan beasiswa Rp. 300 ribu untuk siswa di tingkat cabang. Program ini kemudian

direalisasikan PDA Kota Makassar dalam 25 cabang yang tersebar di 14 kecamatan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

Selain program-program kerja dalam bidang pendidikan ini, Aisyiyah juga menyelenggarakan pendidikan luar sekolah, seperti Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Program PLS yang dilaksanakan oleh Majelis Dikdasmen PDA Kota Makassar sebagai respon atas perkembangan dan tuntutan dari lingkungan strategis, sekaligus untuk menjawab besarnya jumlah drop out yang dialami anak-anak usia sekolah. Hal ini menunjukkan 'Aisyiyah sebagai organisasi sosial budaya yang memiliki lembaga pendidikan yang tetap eksis dan mampu menyediakan paket-paket pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kebutuhan anak-anak dari masyarakat yang tidak mampu (putus sekolah). Penyelenggaraan paket-paket semacam ini telah menjadi "profesi Aisyiyah" selama ini. Tentu harus dijawab dengan langkah konkrit bagi Aisyiyah (hasil wawancara MA, 15 Maret 2012).

Selain bidang pendidikan yang merupakan program andalan sejak organisasi ini didirikan di Kota Makassar, juga dalam bidang hukum yang fenomenal antara lain dipicu oleh hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dengan tindak kekerasan, terutama kepada perempuan yang lepas dari tindakan hukum. Karena itu, 'Aisyiyah menyelenggarakan lembaga *Crisis Centre* untuk menghadapi berbagai macam kekerasan.

Selain masalah-masalah di atas yang bersifat lokal (Kota Makassar), masalah-masalah yang bersifat nasional, dan global/internasional, sebagai bentuk kepedulian (respons) 'Aisyiyah terhadap permasalahan di lingkungan eksternal (masyarakat dan bangsa). Dalam hal ini 'Aisyiyah Kota Makassar setelah reformasi (1998), meskipun secara relatif menunjukkan kemajuan demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik. Namun demikian, 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah selama sepuluh tahun terakhir sejak Muktamar 2005 merespons berbagai persoalan yang

dihadapi masyarakat, baik yang menyangkut politik, ekonomi, hukum, maupun sosial dan budaya yang krusial dan memerlukan pemecahan yang komprehensif.

Respons ‘Aisyiyah sebagai organisasi modern yang tetap konsisten terhadap visi dan misi gerakan sosial keagamaan, terutama di tingkat pusat sekaligus sebagai bentuk kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah yang direalisasikan di tingkat daerah, khususnya di Kota Makassar dalam rangka merespons perkembangan politik global menuju era dunia yang lebih adil dan damai, tetapi dalam praktik masih ditandai oleh hubungan antar negara terutama antar negara maju dengan sedang berkembang yang masih belum adil dan terjadi hegemoni kekuatan negara-negara besar yang merugikan masyarakat negara-negara sedang berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Globalisasi cenderung menjadi alat kekuatan ekonomi dan politik internasional yang semakin memperluas cengkeraman kapitalisme global dan hadirnya neoliberal yang memporak-porandakan kekuatan nasional dan lokal di negara-negara sedang berkembang, terutama Indonesia.

Meluasnya gaya hidup global yang membawa sikap hidup bebas seperti pornografi, perilaku asusial, penghargaan yang berlebihan terhadap materi (materialisme) dan kesenangan duniawi (hedonisme), permisivisme, kebebasan tanpa batas nilai (liberalisme/nihilisme), dan budaya populer yang bertentangan dengan norma-norma agama, moral, dan budaya Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain juga membawa dampak negatif terhadap masyarakat dan mempengaruhi perkembangan kebudayaan nasional maupun lokal Indonesia. Dampak negatif yang

dimaksud, adalah terbukanya kecenderungan materialisme (faham kebendaan), sekularisme (memisahkan urusan dunia dengan nilai-nilai agama), hedonisme (memuja kesenangan duniawi), dan pragmatisme (mementingkan nilai kegunaan) yang meminimalisasikan, serta menihilkan nilai-nilai luhur, moral spiritual, dan norma-norma agama.

Berikut ini sekilas tentang fase-fase perkembangan 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan di Indonesia, termasuk Kota Makassar. Sebagaimana diketahui bahwa 'Aisyiyah Kota Makassar didirikan tahun 1926, tepatnya 9 tahun setelah 'Aisyiyah Pusat didirikan (1917) di Yogyakarta. Pertumbuhan yang demikian cepat ini tidak terlepas dari kerja keras para pengurus dan pimpinannya yang tanpa pamrih kecuali hanya mengharap ridha Allah swt., dan meyakini bahwa mengurus organisasi 'Aisyiyah merupakan pekerjaan mulia. Hal ini diperkuat beberapa informan, bahwa perkembangan 'Aisyiyah yang demikian cepat merupakan penanam pendidikan yang baik. Organisasi ini diminati para anggota karena gerak langkahnya merupakan amal ibadah kepada Allah. Azas maupun tujuannya jelas. Melalui organisasi 'Aisyiyah, para remaja perempuan dan ibu-ibu yang telah berumah tangga berbuat dan berkarya dimana organisasi ini berakidah Islam.

Organisasi ini bagi umat Islam bukanlah tempat berjuang yang sia-sia, tetapi dijadikan media untuk beramal. Azas dan tujuan organisasi didasarkan prinsip bahwa Islam itu harus dikembangkan. Pendidikan untuk menghadapi masa depan perempuan harus diperluas. Dalam hal ini, Nyai Ahmad Dahlan sebagai pendiri 'Aisyiyah pertama bersama-sama dengan Muhammadiyah telah berkembang lebih maju dalam

berbagai aspek. Pondok atau asrama yang hanya untuk mendidik wanita-wanita terus dikembangkan. Pendidikan yang dirintis Nyai Ahmad Dahlan benar-benar telah tampak hasilnya. Mereka yang telah digembleng dalam 'Aisyiyah bangkit sebagai generasi penerus yang percaya pada kemampuan sendiri. Selanjutnya mereka mengamalkan pendidikan yang telah diperoleh dalam mengembangkan 'Aisyiyah. Dalam hal ini, fase-fase perkembangan 'Aisyiyah secara dibagi dalam tiga fase.

1. Fase Pra Kemerdekaan (17 Agustus 1945)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa 'Aisyiyah Kota Makassar didirikan pada Tahun 1926 (sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945), yaitu 9 tahun setelah 'Aisyiyah Pusat diresmikan (1917) di Yogyakarta. Amal Usaha 'Aisyiyah dijadikan modal dan diteruskan sebagai pedoman gerak langkah organisasi. Hal ini telah mendorong 'Aisyiyah untuk lebih memperhatikan pendidikan kaum wanita. Tiap-tiap cabang 'Aisyiyah dalam wilayah Makassar diharapkan dapat mengurus anak-anak di wilayahnya, seperti asrama dan lain-lain. Kesempatan untuk anak-anak perempuan bersekolah sekarang ini menumbuhkan kesyukuran 'Aisyiyah bahwa rintisan Nyai Ahmad Dahlan dahulu diteruskan dan dikembangkan hingga menjelang satu abad, tetap eksis dan terus berlanjut

Perkembangan selanjutnya, amal usaha rintisan K.H. Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan baik di pusat maupun di daerah, khususnya di Kota Makassar telah menjadi keputusan Muktamar dengan dibukanya sekolah-sekolah kejuruan, antara lain: Sekolah Bidan, Sekolah Perawat, Sekolah Kepandaian Puteri, Sekolah Guru

Kepandaian Puteri, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, dan lain-lain. Usaha ini merupakan dorongan dan semangat 'Aisyiyah untuk memperhatikan kemajuan puteri-puteri pada umumnya dan gadis-gadis khususnya agar kelak mengganti meneruskan amal usaha yang telah didirikan. Generasi muda inilah yang diharapkan mengemudikan gerak langkah organisasi 'Aisyiyah dengan sebaik-baiknya.

Keberlanjutan 'Aisyiyah Kota Makassar dalam merespon lingkungan strategis dengan memperluas amal usaha yang ada, antara lain membuka Rumah Sakit Bersalin. Program ini bersifat pendidikan atau kemasyarakatan sebagai wujud semakin majunya pemikiran, pengetahuan dan pengalaman maka dalam penyampaian agama Islam bukan hanya melalui pengajian, tetapi juga melalui pendirian panti-panti asuhan, sekaligus dapat dijadikan media dakwah untuk membantu bidang sosial dan kemasyarakatan sehingga tercapai sasaran organisasi yang lebih baik.

Terkait dengan perkembangan 'Aisyiyah pada masa penjajahan, maka dibentuk gerakan kepanduan, yaitu Padvinders Muhammadiyah. Kemudian atas usul Hajid nama pandu itu diganti menjadi Hizbul Wathon. Pembentukan organisasi siswa praja sebagai wadah kegiatan ekstra kurikuler bagi seluruh siswa sekolah Muhammadiyah. Terbentuknya kelompok-kelompok pengajian remaja putri, orang dewasa, dan ibu rumah tangga sehingga mendorong perkembangan dan kemajuan 'Aisyiyah termasuk di Kota Makassar. Selain itu, setelah berdiri secara resmi 'Aisyiyah di Kota Makassar, remaja putri lulusan sekolah Muhammadiyah dikirim ke seluruh pelosok Sulawesi Selatan dalam upaya mengembangkan visi dan misi 'Aisyiyah.

Fase perkembangan ‘Aisyiyah Kota Makassar semakin pesat setelah Kongres Muhammadiyah ke-21 (1935) diselenggarakan di Makasar, yang memutuskan supaya Muhammadiyah menerbitkan surat kabar (*dagblaad*). Pelaksanaannya diserahkan kepada Pengurus Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Cabang Solo. Kemudian sekolah lima tahun yang akan menyambung ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs yang setingkat SLTP saat ini) bagi murid tamatan *vervolg*school atau *standaardschool* kelas V. Dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah ini juga dipakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah Muhammadiyah saat itu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang didirikan pribumi yang dapat menyamai kemajuan pendidikan sekolah Belanda, sekolah Katolik, dan sekolah Protestan. Dalam hal ini, lembaga-lembaga pendidikan formal yang dirintis oleh ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah pada masa penjajahan (pra kemerdekaan) merupakan satu-satunya lembaga pendidikan bagi pribumi, untuk semua lapisan masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang diharapkan.

2. Fase Kemerdekaan (17 Agustus 1945)

Fase perkembangan ‘Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah pasca kemerdekaan (17 Agustus 1945), memberikan perhatian dan pembinaan sehingga konsep kemandirian organisasi ini masih dalam proses perjuangan. Sidang darurat Muhammadiyah pada tahun 1947, ‘Aisyiyah belum memiliki status otonom tetapi garis perjuangan ‘Aisyiyah tetap konsisten mendukung perjuangan Muhammadiyah hingga tahun 1950, Majelis ‘Aisyiyah diganti menjadi Pimpinan Pusat (PP)

‘Aisyiyah, tepatnya tanggal 21–26 Desember 1950 dalam Kongres XXXI atau Mukhtar I yang berlangsung di Yogyakarta. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam Mukhtar ini, yaitu:

- a. Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah untuk memperbaiki kerusakan akhlak.
- b. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan rakyat.
- c. Menyediakan *studiefonds* untuk membiayai para pelajar yang sekolah di luar negeri, dan mendirikan Universitas Muhammadiyah.
- d. Menghormati organisasi lain yang non-Islam selama tidak merugikan dan bersedia bekerjasama, saling menghargai agar tidak terjadi salah paham yang dapat merugikan perjuangan pokok Islam.
- e. Muhammadiyah dan/atau ‘Aisyiyah, baik sebagai organisasi maupun perorangan diperkenankan menjadi anggota DPR.

Tahun 1963 Nasyiatul ‘Aisyiyah (NA) diberi status otonom lepas dari ‘Aisyiyah. Ahmad Badawi diangkat menjadi Penasehat Pribadi Presiden di bidang agama. Berbagai gerakan dan aksi perjuangan yang dilakukan K.H. Fakhruddin adalah dalam rangka memperbaiki nasib dan kondisi umat serta bangsa Indonesia dari lumpur kebodohan, kehinaan dan ketertindasan di tangan penjajahan kolonial Belanda. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan, Pemerintah RI memberinya penghargaan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 162/1964. Kemudian penangkapan dan penahanan HAMKA

hingga 1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena dituduh pro-Malaysia. Dalam penjara beliau menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya terbesarnya.

Fase perkembangan 'Aisyiyah dalam masa pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998), mengalami dinamika perkembangan yang ditandai dengan pasang surut perubahan dan kemajuan, antara lain tanggal 16 Agustus 1966 Badan Koordinasi Amal (Muslimin) terbentuk. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi pendukung utama dari 16 organisasi yang tergabung dalam badan ini. Dengan demikian 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang dilakukan Muhammadiyah sebagai induk organisasi.

Perubahan mendasar yang pernah dialami 'Aisyiyah semasa rezim pemerintahan Orde Baru, adalah perubahan azas organisasi yang dilakukan Muhammadiyah, yang sebelumnya berazaskan agama Islam; berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, berubah menjadi azas tunggal yaitu Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan UU yang berlaku. Perubahan yang dilakukan 'Aisyiyah sebagai wujud respon atas lingkungan strategis dalam memelihara keberlanjutan organisasi.

Fase selanjutnya Ahmad Badawi diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Faqih Usman bersama Hasan Basri, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Anwar Haryono, mantan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mengirim nota politik kepada pemerintah Orde Baru, yang

dikenal dengan Nota KH. Faqih Usman; isinya permintaan agar Pemerintah Orde Baru merehabilitasi Masyumi sebagai partai terlarang. Hal ini terkait dengan “medan visional” yang ditulis para tokoh Muhammadiyah, terutama Ustadz K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA Ketua PP Muhammadiyah (1990-1995), secara khusus menulis Misi Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam. Muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh (1995), terpilihnya Prof. DR. H. M. Amien Rais, MA sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Wilayah kerja Majelis Tarjih tidak saja di bidang fikih, namun juga pengembangan pemikiran Islam. Karena itu, majelis ini sejak Muktamar Aceh berganti nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI).

3. Fase Reformasi (1998)

Fase reformasi (1998), adalah fase dimana berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah mundurnya Presiden Soeharto Wakil Presiden BJ. Habibie, menerima mandat sebagai Presidensi RI keempat menggantikan Soeharto. Sejumlah agenda reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya mewarnai perjalanan reformasi yang kini memasuki kurang lebih 15 tahun. Fase ini bagi ‘Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah cukup penting, karena sejumlah petinggi Muhammadiyah merupakan penggerak reformasi sehingga perubahan yang terjadi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah. Sebagaimana diketahui bahwa, Prof. Dr.

H.M. Amien Rais, MA merupakan tokoh utama reformasi, ketika itu sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Fase reformasi yang terkait dengan keberlanjutan 'Aisyiyah, seperti dijelaskan di atas bahwa tokoh utama reformasi Amien Rais sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah mengambil langkah untuk terlibat langsung dalam politik praktis. Maka Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif sebagai Ketua Umum menggantikan Prof. Dr. H.M. Amien Rais, MA yang meletakkan jabatan karena memimpin Partai Amanah Nasional (PAN), sebagai lanjutan dari amanat reformasi. Kemudian Tahun 2000 Muktamar XLIV Muhammadiyah di Jakarta, terpilih kembali Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif sebagai Ketua Umum. Kemudian Tahun 2002 Tanwir Muhammadiyah di Denpasar Bali, tanggal 24s/d 27 Januari 2002 menyepakati perlunya Muhammadiyah menyiapkan kader terbaiknya sebagai pemimpin nasional (Khittah Kehidupan Berbangsa dan Bernegara). Sidang Tanwir membahas Khittah Muhammadiyah dalam berbagai persoalan, termasuk rekomendasi Muhammadiyah bagi kemajuan bangsa dan negara. Masalah lainnya, adalah pembahasan tentang Bank Persyarikatan, di mana akan diputuskan apakah manajemen perbankan dapat diselenggarakan secara syariah atau secara konvensional.

'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah melakukan perubahan dan penyesuaian baik struktur maupun program. Sidang Tanwir 2009, di Bandar Lampung merupakan Sidang Tanwir kedua di era reformasi jelang Muktamar yang ke-46 di Yogyakarta pertengahan tahun 2010. Sidang Tanwir 2009 memiliki tujuan antara lain dihasilkannya keputusan untuk meningkatkan peran Muhammadiyah dan

'Aisyiyah sebagai Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dalam membangun kembali visi dan karakter bangsa, di tengah pergulatan bangsa-bangsa lain yang semakin maju. Sidang Tanwir 2009 dilaksanakan menjelang Pemilu 2009 dimana suasana politik Indonesia menghangat. Muhammadiyah dan 'Aisyiyah memberikan rekomendasi terkait Pemilu 2009, antara lain:

- a. Mendesak partai politik dan seluruh komponen untuk tidak menjadikan Pemilu 2009 sebagai ajang perebutan kursi kekuasaan yang menjurus pragmatisme dan menghalalkan segala cara. Pemilu harus dijadikan momentum untuk menghasilkan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden yang bertanggungjawab dalam menjalankan amanat rakyat, mengurus pemerintahan dengan benar, menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat kecil, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan etika publik, membangun kepercayaan, tidak menggunakan aji mumpung dalam melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya.
- b. Muhammadiyah menyerukan kepada segenap komponen untuk memilih pemimpin nasional yang memiliki: (1) visi, misi dan karakter yang kuat sebagai negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; (2) berani mengambil berbagai keputusan penting dan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak (umat), mampu menyelesaikan persoalan-persoalan krusial bangsa secara tegas, serta melakukan penyelamatan aset dan kekayaan negara, dan (3) mampu menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman baik di dalam maupun di luar negeri, serta mampu mewujudkan *good governance* termasuk melakukan pembe-

rantasan korupsi tanpa pandang bulu; dan (4) melepaskan jabatan di partai politik apapun dan berkonsentrasi dalam memimpin bangsa dan negara.

Fase perkembangan 'Aisyiyah di era reformasi menurut salah seorang Ketua PWA Sulawesi Selatan, yang sebelumnya Pengurus 'Aisyiyah Kota Makassa menilai bahwa:

Banyak perubahan yang harus dilakukan 'Aisyiyah dalam reformasi, baik struktur organisasi maupun program-program kerja terutama dalam bidang politik. Langkah perubahan perlu dilakukan merespon lingkungan strategis khususnya Muhammadiyah termasuk keterlibatan kader-kader terbaik 'Aisyiyah dalam politik praktis. Hal ini penting menurut tanggapan saya sebagai peribadi sekaligus mewakili pengurus 'Aisyiyah Sulawesi selatan, dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan organisasi, diantaranya melepaskan jabatan di 'Aisyiyah jika mengambil keputusan untuk terlibat dalam politik praktis seperti pengurus partai, dan lain-lain sebagaimana langkah yang diambil oleh Amien Rais. Selain itu, quota 30% perempuan dalam legislatif perlu dipertimbangan pengurus, dengan ketentuan tidak membawa nama organisasi karena kader-kader 'Aisyiyah harus tetap konsisten menjaga dan memelihara kemandirian dan keberlanjutan organisasi (hasil wawancara HQ, 12 Maret 2012).

Selain masalah politik praktis yang menjadi isu hangat awal reformasi, juga masalah yang terkait dengan responsif gender sebagai kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan. Dalam hal ini, konsep gender sebagai konstruksi peran sosial ditinjau dari sosiologis. Reformasi pemikiran di berbagai bidang khususnya peran perempuan merupakan ciri gerakan pembaruan. Demikian dapat ditegaskan bahwa "Kita tidak melupakan kodrat perempuan atau ingin mendominasi laki-laki, tapi yang kita minta adalah dilibatkan dalam peran kebangsaan, yakni 'Aisyiyah memainkan peran bagi seluruh bangsa. Kalau perempuan dilibatkan, akan lebih sempurna". Penegasan ini menunjukkan bahwa, budaya global dan Ideologi

globalisasi yang semakin meluas ditandai dengan paham dan sikap hidup masyarakat yang sangat mengagungkan materi dan kesenangan inderawi.

Perlu dipahami bahwa, respon ‘Aisyiyah dalam aplikasinya terhadap globalisasi lebih cenderung melahirkan manusia-manusia yang berwatak materialis, individualis, egois, hedonis dan bahkan materialis. Pengagungan manusia terhadap nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan bergeser menjadi pengagungan manusia terhadap nilai-nilai materi dan kekayaan. Watak dan karakter manusia yang demikian, jauh sebelumnya sudah ditantang dan dikritik keras oleh Aristoteles. Menurut Filusuf ternama ini, “Bahwa semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan dan materi, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan”.

Sikap individualisme secara diam-diam akan menyertai paham yang memutlakkan materialisme. Karena itu tidak heran jika penyebaran ideologi globalisasi ke dalam struktur sosial masyarakat, beriringan dengan retaknya etika, moralitas serta ikatan sosial yang sudah lama terbangun dalam kultur sosial masyarakat. Dasar-dasar, nilai-nilai keagamaan, kultural lambat laun namun pasti mulai terkikis seiring kuatnya hegemoni ideologi globalisasi dalam seluruh struktur sosial yang ada, mulai dari level negara, organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan, hingga pada level keluarga. Bahkan tidak asing lagi, jika ideologi yang sangat menganut paham materialisme dan rasionalisme mutlak ini, juga mendorong terjadinya proses liberalisasi agama sebagai komoditas pasar yang

diperjualbelikan, diiklankan dan dicitrakan dalam berbagai bentuk demi kepentingan ekonomis dan status sosial.

Masalah lain yang tidak luput dari respons 'Aisyiyah Kota Makassar, karena sangat memprihatinkan adalah praktek pornografi yang tersebar di ruang publik yang diproduksi dan tersebar secara meluas di media masa dan dunia maya yang vulgar dan menjadi komoditi. Hal ini menurut pandangan salah satu Wakil Ketua 'Aisyiyah, bahwa:

Masalah-masalah yang dihadapi dalam reformasi sangat kompleks sehingga 'Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan, merasa perlu untuk melakukan gerakan dan tindakan nyata melalui program-program kerja sebagai bentuk kepedulian dan respon terhadap masalah-masalah tersebut, agar tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap masyarakat khususnya generasi muda. Masalah ini diperparah oleh makin terbukanya sajian-sajian televisi, media cetak dan media lainnya yang menampilkan sikap kekerasan, perilaku permisif, serta hal-hal yang dapat melemahkan mental dan nilai budaya lokal maupun nasional. Permasalahan tersebut akan merusak nilai-nilai yang substansi dari ajaran agama sekaligus menjauhkan fungsi sosial dan kemanusiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, peran dan fungsi 'Aisyiyah dalam memberdayakan masing-masing majelis dan lembaga untuk mengatasi berbagai persoalan dalam reformasi sangat diperlukan (hasil wawancara RA, 25 Maret 2012).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa, pola kehidupan masyarakat yang demikian harus dibendung melalui kegiatan-kegiatan pendidikan rohani dan religius dengan pendekatan baru sehingga dapat membangkitkan dan menampilkan kesalehan manusia secara individual dan kolektif, serta tercipta peradaban yang Islami dan mengontrol peradaban seiring dengan dinamika kehidupan manusia. Agama dalam hal ini harus mampu menawarkan ajaran yang dapat menyembuhkan masalah sosial, kultural sekaligus menjadi landasan moral dan spiritual bagi terbentuknya kebudayaan dan peradaban yang membawa keselamatan hidup umat manusia.

Masalah budaya lainnya yang masih menjadi kendala khususnya dalam pemberdayaan perempuan adalah masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Budaya ini cenderung menegaskan posisi perempuan, melahirkan diskriminasi, dan relasi-relasi bias gender, yang bertentangan dengan peradaban mulia umat manusia dan ajaran agama Islam.

Kehidupan demokrasi mengalami kemajuan yang pesat, tetapi terjadi kecenderungan demokrasi prosedural yang tidak diimbangi dengan bentuk demokrasi substantif, sehingga kualitas dan perilaku berdemokrasi cenderung pragmatis serta mengalami penurunan terutama nilai-nilai moral. Respons 'Aisyiyah dalam menjaga keberlanjutan terhadap dinamika organisasi internal (lingkungan strategis Muhammadiyah) dan organisasi eksternal (lingkungan strategis Pemerintah) dalam kehidupan berdemokrasi cenderung menganut paham demokrasi liberal, sehingga dalam jangka panjang akan menimbulkan persoalan termasuk dalam hubungan moral dan agama. Dalam konteks ini, 'Aisyiyah yang sebelumnya berlandaskan agama Islam dan berpedoman kepada al-Qur'an menerima Pancasila sebagai azas tunggal sesuai dengan UU yang berlaku seolah kehilangan dasar orientasi nilai-nilai moral dalam membingkai demokrasi. Demikian halnya kecenderungan demokrasi liberal yang tampak menguat dalam mengembangkan otonomi dan melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Respons 'Aisyiyah terhadap masalah-masalah yang berskala nasional maupun lokal tersebut, sebagai wujud keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah di dalam merespon lingkungan strategis secara internal dan secara eksternal. Dalam hal sistem politik

multipartai di Kota Makassar semakin menunjukkan kerancuan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, disertai dengan perilaku elite politik dan parpol yang pragmatis, yakni orientasi politik yang berpusat pada kekuasaan semata sehingga menghalalkan segala cara juga menjadi sorotan 'Aisyiyah dalam Pemilu Legislatif maupun Pilkada.

Keberlanjutan 'Aisyiyah dalam reformasi selama kurang lebih 15 tahun juga direalisasikan melalui program kerja Majelis Kesehatan, meliputi: (a) meningkatkan kualitas SDM dalam bidang kesehatan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan; (b) upaya penurunan angka kematian bayi dan balita melalui imunisasi ASI Eksklusif dan pemberian gizi seimbang; (c) meningkatkan pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga, amal usaha, tempat umum, dan tempat ibadah; (d) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti malaria, TB dan penyakit lainnya, dan (e) meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan peran 'Aisyiyah terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Ketua Majelis Kesehatan, dalam memelihara keberlanjutan 'Aisyiyah merespon lingkungan strategis bertujuan untuk:

Meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat luas secara khusus bagi perempuan dan anak berbasis pada al-Qur'an Surat Al-Ma'un. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan meliputi: (1) senam lansia (lanjut usia); (2) pelatihan perawatan kulit bayi; (3) seminar kesehatan lanjut usia; (4) pelatihan kesehatan gizi anak; (5) penyuluhan sosialisasi pemberian makanan tambahan; (6) pelatihan kader deteksi dini kelainan tumbuh kembang bayi dan anak; (7) penyuluhan pembinaan dan sosialisasi PHBS; (8) bakti sosial, pengobatan gratis, pembinaan kelompok lansia;

(9) penyuluhan tentang bahasa NAPZA; (10) deteksi dini penyakit menular; dan (11) seminar kanker serviks (hasil wawancara HD, 12 Maret 2012).

Data dan informasi tentang pembangunan di bidang ekonomi banyak kemajuan yang telah diraih, yaitu pertumbuhan dan pendapatan perkapita penduduk terus meningkat. Namun, perhatian pemerintah terhadap ekonomi masyarakat semakin nyata dengan banyak dan beragamnya skema program ekonomi yang ditujukan pada masyarakat golongan menengah-bawah masih kurang. Karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai kemajuan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan dan stabilitas makro ekonomi masih jauh dari memadai, serta bias terhadap fakta-fakta ekonomi yang ada. Penjelasan dari Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, bahwa:

Saya sebagai penanggung jawab Majelis Ekonomi, melihat fondasi dan ketahanan ekonomi Kota Makassar masih lemah, hal ini disebabkan oleh orientasi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan kepada aspek pertumbuhan bertumpu pada investasi asing, utang luar negeri, dan konglomerasi. Kondisi ini mengakibatkan hasil pembangunan hanya dikuasai dan dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, kesenjangan melebar, dan sendi-sendi kehidupan sosial-ekonomi tumbuh tanpa akar yang kuat. Beberapa persoalan ekonomi nasional yang mendasar dan bersifat struktural adalah paradigma ekonomi yang tidak konsisten dan dualistik, di satu pihak kebijakan fiskal belum mandiri, sistem keuangan dan perbankan yang tidak memihak kepada rakyat, dan kebijakan industri yang liberal (hasil wawancara BB, tanggal 20 Maret 2012).

Keberlanjutan 'Aisyiyah dalam bidang sosial-budaya terutama di Kota Makassar telah mencapai berbagai keberhasilan. Menurut salah satu Wakil Ketua 'Aisyiyah yang mengkoordinir kegiatan sosial budaya, bahwa:

Kegiatan di bidang pendidikan terdapat peningkatan secara kualitas dan kuantitas pendidikan, pemerataan kesempatan belajar, peningkatan prestasi belajar anak-anak khususnya siswa yang dibina sekolah-sekolah 'Aisyiyah tingkat regional dan internasional. Di bidang penegakan hukum terdapat keseriusan

‘Aisyiyah Kota Makassar di dalam pemberantasan korupsi yang membawa implikasi pada moralitas publik, disertai lahirnya produk perundang-undangan yang berpihak pada hak asasi manusia, perlindungan perempuan dan anak, serta penegakan moral. Di bidang kehidupan beragama semakin meluas iklim dan kesadaran untuk hidup rukun dalam kemajemukan (hasil wawancara RA, 22 Maret 2012).

Dalam hubungan sosial masih cukup kuat budaya gotong royong dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan ketika menghadapi bencana alam. Namun demikian, masih terdapat permasalahan sosial-budaya yang perlu mendapatkan pemecahan yang serius, di antaranya memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan, disorientasi nilai keagamaan, memudarnya kohesi sosial, dan melemahnya mentalitas yang positif. Menyadari hal tersebut, ‘Aisyiyah Kota Makassar melalui program-program kerja yang dicanangkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, serta Lembaga Kebudayaan dalam upaya mencegah dan menanggulangi masalah-masalah yang dimaksud. Masalah lain yang kecenderungan melemahkan karakter bangsa adalah kekerasan yang terorganisir termasuk kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan, kriminalitas, perjudian, pornografi dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya serta merusak nilai-nilai agama dan moral.

Realisasi program kerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Periode (2010 – 2015), yaitu: (1) mengembangkan penelitian dan pengkajian masalah keorganisasian untuk mendukung kebijakan dan pengembangan organisasi; (2) meningkatkan dan mengembangkan fungsi data dan informasi sebagai salah satu sumber penting dalam pengambilan kebijakan organisasi dan pengembangan gerakan, dan (3) mengembangkan publikasi hasil kajian dan penelitian secara luas melalui

media, baik cetak maupun elektronik. Di samping itu, tujuan yang hendak diwujudkan melalui program kerja tersebut di atas, adalah terbangunnya kesadaran dan perilaku ramah lingkungan bagi anggota dan pimpinan di setiap tingkatan dan amal usaha.

Realitas yang menunjukkan bahwa, dalam upaya mencapai tujuan tersebut sebagai wujud keberlanjutan organisasi, seperti disampaikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan, meliputi: (1) membuat peta wilayah untuk mengadakan survey untuk mengetahui jumlah cabang 'Aisyiyah yang aktif; (2) mengumpulkan data atau informasi terkait dengan sasaran obyek kajian, dan (3) mempublikasikan kegiatan penelitian melalui media. Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

Realisasi program kerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan, kurang waktu lima tahun terakhir menunjukkan hasil positif, maka program kerja lima sampai sepuluh tahun ke depan harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dengan merespon lingkungan strategis secara berkelanjutan. Secara politik, respons 'Aisyiyah terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan Muhammadiyah, baik struktural maupun program kerja, meskipun belum mencapai stabilitas politik yang permanen. Secara ekonomi, 'Aisyiyah mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi belum menjamin adanya pemerataan dan keadilan untuk kemakmuran semua warga. Selain itu, 'Aisyiyah juga menghadapi berbagai masalah sosial yang tidak mudah untuk diselesaikan di bidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan, mengatasi kerusakan lingkungan, dan menjaga martabat serta kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, 'Aisyiyah tetap konsisten menjaga, memelihara, dan mempertahankan keberlanjutan organisasi (hasil wawancara MR, 20 Maret 2012).

Sementara budaya populer akan semakin menjadi kecenderungan yang luas dalam masyarakat seiring dengan perkembangan media elektronik yang sangat pesat, memungkinkan kebudayaan nasional dan daerah berada di persimpangan jalan dalam dinamika globalisasi yang semakin kompleks. Karena itu, 'Aisyiyah Kota Makassar memerlukan strategi dalam menghadapi globalisasi maupun dinamika masyarakat

majemuk yang sering mengalami konflik sosial. Selain itu, keragaman bahasa, sistem ekonomi, politik, strata sosial, religi, dan kesenian, cenderung menguat dengan semakin efektifnya proses demokrasi dan otonomi daerah, yang dapat membawa konsekuensi luas dalam sistem kebudayaan masyarakat Kota Makassar dan Indonesia. Hal tersebut akan menjadi tantangan besar bagi organisasi Muhammadiyah yang telah berkembang semakin besar dan kompleks, dengan jangkauan wilayah yang sangat luas untuk menghadirkan gerakan Islam berwawasan kebangsaan dan kebudayaan yang mampu memberikan alternatif jawaban mencerahkan, membebaskan, dan memberdayakan kepentingan kejayaan masa depan umat dan bangsa.

Menghadapi situasi dan kondisi yang demikian, segenap Pengurus dan Pimpinan 'Aisyiyah Kota Makassar, lima sampai sepuluh tahun ke depan memerlukan revitalisasi visi, misi dan karakter organisasi sebagai tolok ukur melakukan konsolidasi internal dan eksternal reformasi. Dengan menyadari nilai positif yang dihasilkan reformasi dan kesadaran adanya masalah yang kompleks tersebut, maka kini diperlukan penajaman-penajaman terhadap visi dan misi 'Aisyiyah secara berkelanjutan. Reformasi 'Aisyiyah perlu dirancang ulang yang diintegrasikan ke dalam pembangunan yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga reformasi berada dalam arah dan jalur yang benar. Pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan perlu dikembangkan dalam bingkai paradigma pembangunan berkelanjutan yang bermakna (*sustainable development with meaning*).

Paradigma ini bertumpu pada prinsip pengembangan sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan, pemanfaatan sumberdaya alam secara produktif dengan menjaga kelestarian, kebijakan ekonomi dan politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi moralitas dan menjaga martabat bangsa. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan dan bermakna sebagai upaya perbaikan dalam kehidupan manusia dengan menjaga keseimbangan material dan spiritual, individu dan masyarakat. Cara untuk meningkatkan martabat bangsa melalui rekonstruksi.

Hal ini menurut salah satu Wakil Ketua PDA 'Aisyiyah Kota Makassar, menegaskan bahwa:

Sejak awal berdirinya 'Aisyiyah berada *on the track* untuk menjawab problem mentalitas ini, karena 'Aisyiyah merupakan *jam'iyah* (organisasi massa) dan gerakan yang dinamis membentuk bangsa yang bermartabat. Salah satu hal yang penting dalam memperkuat pemahaman mengenai *jihad* dalam arti luas. Hal ini disebabkan lemahnya karakter dan martabat manusia dapat menimbulkan banyak masalah di bidang agama, politik, sosial, ekonomi, hukum dan pendidikan. Masalah-masalah tersebut yang menjadi perhatian dan komitmen 'Aisyiyah dalam melahirkan berbagai rekomendasi dalam upaya membangun kemandirian dan keberlanjutan organisasi (hasil wawancara BB, tanggal 22 Maret 2012).

Lebih jauh dijelaskan bahwa, 'Aisyiyah sebagai organisasi massa dan memiliki komitmen sejak awal didirikan hingga sekarang terus diperjuangkan secara berkesinambungan, khususnya di Kota Makassar dalam merespons berbagai persoalan termasuk kasus tenaga kerja wanita asal Indonesia yang teraniaya di Malaysia dan Arab Saudi sebagai wujud kepedulian masalah-masalah sosial yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh sebab itu 'Aisyiyah mendesak pemerintah dan lembaga-lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri untuk lebih serius dan

selektif dalam pengiriman Tenaga Kerja Wanita. Selanjutnya pemerintah wajib memberi perlindungan serta advokasi terhadap para TKI khususnya TKW yang sering menjadi korban kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi melalui langkah-langkah yang lebih tegas dan optimal. Selain itu 'Aisyiyah juga mendesak pemerintah agar menindak tegas pihak-pihak yang melakukan perdagangan manusia (*trafficking*) dan mengefektifkan pelaksanaannya.

Selanjutnya informasi lain terkait dengan keberlanjutan organisasi di dalam merespons lingkungan strategis, menurut salah seorang Wakil Ketua yang membidangi dakwah keagamaan, mengatakan bahwa:

Perkembangan 'Aisyiyah lebih cepat dibanding dengan pemerintah sejak didirikan, karena kemampuan dalam mengelola daya kontigensi, ketekunan, dan kesungguhan semua warga dan para pengurus. Saya juga tidak tahu persis mengapa kondisi itu bisa terjadi, padahal kalau dilihat dari segi tanggung jawab terutama para pengurus yang pada umumnya berkeluarga, selain mengurus rumah tangga dan profesinya (pekerjaannya) sebagai PNS (umumnya adalah guru), tetap menyisihkan waktunya untuk mengurus 'Aisyiyah sehingga dalam perkembangannya sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia, hingga saat tetap berlanjut dan bertahan dalam goncangan serta desakan arus globalisasi dan modernisasi yang demikian kompleks, dan ke depan 'Aisyiyah tetap menunjukkan jati dirinya sebagai organisasi perempuan modern di dalam membina ummat (masyarakat) sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, (hasil wawancara, AD, tanggal 17 Februari 2012).

Dinamika keberlanjutan 'Aisyiyah Kota Makassar dilihat dari realisasi program-program kerja yang telah dirancang secara sistematis, kemudian diimplementasikan sesuai dengan kondisi masing-masing majelis di tingkat cabang dan ranting secara berkeberlanjutan. Sebagai contoh, pemahaman 'Aisyiyah tentang bidang kesejahteraan sosial yang diperjuangkan adalah terciptanya suatu kondisi ideal dari tata kehidupan masyarakat yang *baladun thayyibatun wa rabbun ghaffur*, yaitu

suatu kehidupan bahagia sejahtera penuh limpahan rahmat dan nikmat Allah swt. di dunia dan akhirat. Dengan demikian, tercipta suatu titik keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah ataupun aspek material dan spiritual.

Menurut Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial bahwa, sejak berdirinya 'Aisyiyah Kota Makassar kegiatan kesejahteraan sosial telah dimulai dalam bentuk membantu kaum miskin dan anak yatim. Dalam perkembangan saat ini, program kesejahteraan sosial tersistem ke dalam unit-unit kegiatan sosial antara lain: (1) kepedulian dan usaha-usaha pelayanan terhadap kelompok dhuafa; (2) pengembangan dan pemberdayaan lembaga-tembaga sosial yang dikelola oleh 'Aisyiyah seperti panti asuhan, panti jompo, balai latihan, dan rumah singgah; (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan; (4) pelayanan korban dan penanggulangan bencana atau musibah; (5) advokasi publik yang menyangkut masalah- masalah sosial di berbagai lapisan masyarakat, dan (6) mengembangkan pola pencegahan dan pemberian bantuan terhadap korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan lain-lain.

Jenis dan bentuk program Dakwah Terpadu terkait dengan dinamika keberlanjutan 'Aisyiyah Kota Makassar, adalah:

- a) Tabligh Bina Ummat, yaitu bentuk penyiaran Islam (dakwah bil-lisan) yang diprogram secara intensif dan berkelanjutan. Tabligh ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemahaman dan pengamalan. Tabligh ini mengarah pada pembinaan yang dilakukan secara dialogis, intensif, dan berkelanjutan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan Islam secara kaffah.

Tabligh Bina Umat berbentuk kelompok kajian, dan konsultasi keagamaan tentang persoalan keseharian, dan lain-lain.

- b) Tabligh Media, yakni dakwah bil lisan dengan melalui media masa. Dakwah ini berbentuk penyebaran informasi keagamaan dengan melalui tulisan (brusur, pamflet, bulletin) dan kaset, dengan sasaran kelompok-kelompok kajian yang anggotanya masih awam dalam pemahaman, kesadaran, dan pengamalan ajaran Islam.
- c) Bina Remaja Putri, yaitu pembinaan yang khusus diberikan kepada para remaja putri Islam di semua lapisan masyarakat: bimbingan keagamaan, kesadaran hukum, partisipasi politik, dan ketrampilan wanita dalam rangka pengembangan potensi dan sumber daya remaja putri Islam.
- d) Bina Keluarga Dhu'afa, yaitu kegiatan dakwah yang khusus bertujuan untuk membantu memecahkan masalah dan peningkatan taraf hidup kehidupan masyarakat yang lemah ekonominya. Bentuk dakwah ini meliputi membuka lapangan kerja, pendidikan ketrampilan wirausaha, pelayanan kesehatan, pembinaan keluarga sakinah.
- e) Kesehatan bagi Wanita, yakni program dakwah yang khusus untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, baik secara individu, jamaah, ataupun kesehatan masyarakat. Jenis kegiatan yang dikembangkan adalah penyuluhan dan pelayanan kesehatan, apotik hidup, kesehatan mental, kesehatan ibu dan anak, dan kegiatan lain yang menuju pada perilaku hidup sehat. Sebagai sasarannya yaitu kelompok kaum wanita, baik remaja maupun ibu rumah tangga.

Program Kerja Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaanterkait dengan dinamika keberlanjutan ‘Aisyiyah Kota Makassar, meliputi: (1) kewirausahaan melalui penguatan dan pengembangan usaha makro, menengah yang dikelola oleh perempuan agar memperjuangkan hak dan kepentingannya; (2) optimalisasi pembinaan ekonomi melalui BUEKA, dan (3) mengadakan berbagai macam pelatihan dan keterampilan.

Ketiga program kerja di atas bertujuan agar “Terbangunnya kesadaran dan perilaku ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga, umat dan masyarakat”. Untuk mencapai tujuan ini, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan melakukan kegiatan: (1) Membuat home industry; (2) Mengaktifkan BUEKA di setiap cabang ‘Aisyiyah; (3) Pendataan pengusaha ‘Aisyiyah di cabang-cabang; (4) Mengadakan kursus kue dan makanan, (5) Pameran dan Bazaar d. Mengadakan bazaar

Program kerja Majelis Pengkaderan (Pembinaan Kader), meliputi: (a) mengembangkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengkaderan di tingkat cabang dan ranting secara terencana dan berkelanjutan; (b) optimalisasi fungsi dalam peran amal usaha sebagai pendidikan dan pembinaan kader; (c) mengoptimalkan pembinaan kader melalui keluarga, amal usaha, AMM, untuk menjadi pelopor dan pelangsupng gerakan.

Tujuan yang hendak diwujudkan dalam merealisasikan program kerja Majelis Pengkaderan (Pembinaan Kader), ialah meningkatkan kuantitas dan kualitas kader yang memiliki integritas, kompetensi, keagamaan, keilmuan, sikap dan tindakan yang berpegang pada nilai-nilai Islam. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka

kegiatan yang dilakukan adalah : (a) Penataran pimpinan; (b) Job Training kesekretariatan dan kebidaharaan; (c) Pelatihan kepemimpinan dan keprotokuleran; (d) Cerdas cermat tentang ke 'Aisyiyahan dan ke Muhammadiyah.

Program kerja Majelis Hukum dan HAM, meliputi: (a) berpartisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum dan HAM, sehingga terwujud rasa keadilan bagi setiap warga Negara; (b) meningkatkan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencegahannya; (c) meningkatkan pengawasan dan pencegahan perdagangan manusia.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program kerja Majelis Hukum dan HAM, adalah terbangunnya kesadaran perilaku hukum dan HAM dalam menciptakan keadilan, ketertiban dan kebaikan hidup bersama yang berbasis pada norma-norma hukum, agama, dan budaya bangsa. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) Penataran pimpinan; (2) Job Training kesekretariatan dan kebidaharaan; (3) Pelatihan kepemimpinan dan keprotokuleran; (4) Cerdas cermat tentang ke 'Aisyiyahan dan ke Muhammadiyah.

Program Nasional yang bersifat umum, terkait dengan keberlanjutan 'Aisyiyah Kota Makassar, ialah: (a) mengembangkan pedoman atau tuntunan dan materi tabligh dalam berbagai aspek kehidupan untuk pembinaan masyarakat yang bersifat peneguhan dan pencerahan; (b) mengembangkan peta dakwah sebagai panduan pelaksanaan tabligh di seluruh tingkatan dari tingkat pusat sampai tingkat ranting; (c) mengintensifkan pembinaan aqidah, akhlak, ibadah, dikalangan warga 'Aisyiyah dan masyarakat luas melalui pengajian, kajian, publikasi dan media lainnya

secara terprogram sesuai faham agama dalam Muhammadiyah yakni Islam yang berkemajuan; (d) mengintensifkan pembinaan dhuafa', muallaf dan masyarakat khusus (suku terasing, nelayan, petani, jermal, dan lain sebagainya); (e) mengintensifkan kajian tafsir Al Qur'an dan hadits bagi anggota, kader, dan pimpinan untuk meningkatkan pemahaman Islam yang benar; (f) pelaksanaan kehidupan sehari-hari berdasarkan pedoman kehidupan Islami; (g) mengintensifkan pembinaan keluarga yang berpedoman pada tuntunan keluarga sakinah serta mengembangkan media konsultasi keluarga.

Selanjutnya dipertegas oleh salah satu Wakil Ketua PWM Sulawesi Selatan, bahwa 'Aisyiyah Kota Makassar memelihara keberlanjutan dengan melaksanakan kegiatan Dakwah Islamiah, meliputi:

- (1) Gerakan jamaah pengajian dan kajian-kajian keagamaan di tingkat komunitas sebagai basis perintisan program Qaryah Thayibah.
- (2) Pembinaan paham agama sesuai dengan tuntutan Muhammadiyah bagi kelompok-kelompok bimbingan haji Aisyiyah.
- (3) Meningkatkan penyiapan ulama tarjih perempuan yang memahami dan mampu menguasai perkembangan fiqh dan masalah-masalah Islam sebagaimana faham agama di Muhammadiyah.
- (4) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mubalighot dalam berbagai aspek seperti penguasaan metode, materi, strategi dakwah serta penguasaan IT (*information technology*).
- (5) Mengembangkan media tabligh sebagai sarana pembinaan umat melalui media cetak dan elektronik untuk memperluas jaringan dan jangkauan dakwah yang bersifat peneguhan dan pencerahan.
- (6) Melaksanakan tuntunan dakwah kultural melalui kegiatan tabligh dalam berbagai aspek kehidupan bagi masyarakat yang majemuk sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah.
- (7) Meningkatkan fungsi masjid, mushalla, dan sarana-sarana dakwah sebagai pusat kegiatan penyiaran Islam secara terprogram.
- (8) Mengembangkan tabligh dengan pemahaman Islam secara benar yang mendorong pencapaian ketaqwaan tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mencegah berbagai bentuk radikalisme, kekerasan, dan ketidak

adilan sejalan dengan misi Islam rahmatan lil-alamin yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (hasil wawancara IT, tanggal 25 Maret 2012).

Program Khusus Pembinaan Keluarga, dengan tujuan: Terbina dan berkembangnya kualitas kehidupan keluarga dalam seluruh aspek secara berkeadilan dan berkemakmuran menuju terciptanya keluarga sakinah. Hal ini dapat direalisasikan melalui program-program sebagai berikut:

- 1) Memperkuat pembinaan keluarga dengan basis nilai-nilai agama, untuk membentuk manusia yang memiliki kekokohan iman, mentalitas dan karakter yang kuat agar mampu mengembangkan potensi dan kapasitas diri yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan bangsa.
- 2) Memperluas sosialisasi dan peningkatan kualitas pembinaan keluarga berpedoman pada tuntunan keluarga Sakinah bagi masyarakat luas melalui berbagai model yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 3) Mengintensifkan pembinaan keluarga khususnya bagi anak-anak dan remaja yang berpedoman pada tuntunan keluarga Sakinah.
- 4) Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dan kewajiban dalam keluarga serta kesadaran tentang kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
- 5) Meningkatkan peran keluarga (orang tua dan orang dewasa) sebagai pendamping anak dalam beradaptasi dengan dunia media dan informasi yang sangat berpengaruh pada perkembangan kejiwaan dan kehidupan anak-anak melalui pendidikan media literasi.

- 6) Mengembangkan pendekatan, model-model perlindungan dan bantuan hukum bagi para perempuan korban kekerasan dan anak-anak korban berlandaskan pendekatan agama dan hukum.
- 7) Memasyarakatkan usaha pencegahan dini terhadap bahaya-bahaya miras, napza, demoralisasi, seks bebas, kriminalitas, dan bentuk-bentuk penyakit social lainnya melalui pembinaan keluarga secara langsung, penyebaran leaflet, booklet, dan publikasi media cetak dan elektronik.
- 8) Mengembangkan model pendidikan bagi orang tua (parenting) dalam pembinaan karakter anak di keluarga melalui berbagai model sesuai dengan tuntunan keluarga sakinah.

Program Bidang Pengkaderan, bertujuan Meningkatnya kuantitas kader yang memiliki integritas, kompetensi keagamaan dan keilmuan, serta sikap dan tindakan yang berpegang pada nilai-nilai Islam, meliputi:

- a) Sistem perkaderan yang mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam yang berkemajuan, nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dan nilai-nilai ‘Aisyiyah untuk mewujudkan kader-kader yang berkualitas, memiliki mentalitas tangguh, kesadaran, keyakinan, perilaku, dan komitmen dalam perjuangan.
- b) Mengembangkan pelaksanaan perkaderan dari tingkat pusat sampai tingkat ranting secara terencana, periodik dan berkelanjutan melalui Darul Arqam, Baitul Arqam, kajian intensif, dan model kajian lainnya agar mampu berperan sebagai kader umat, dan kader bangsa.

- c) Optimalisasi fungsi dan peran amal usaha ‘Aisyiyah sebagai lembaga pembibitan dan pembinaan kader ‘Aisyiyah, termasuk pada lembaga pendidikan tinggi.
- d) Mengoptimalkan pembinaan kader melalui keluarga, amal usaha, dan transformasi AMM putri untuk memperkokoh kelangsungan gerakan.
- e) Mengembangkan pembinaan kader ulama perempuan sesuai dengan pemahaman Islam dalam Muhammadiyah.
- f) Mengembangkan model perkaderan untuk pendidikan kader bangsa dalam rangka meningkatkan peran ‘Aisyiyah dalam melaksanakan misi dakwah kebangsaan.
- g) Mengembangkan model pembinaan kader lintas ilmu-profesi baik di amal usaha ‘Aisyiyah maupun melalui kelompok di masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan lintas majelis/lembaga.
- h) Pemetaan potensi, kebutuhan, dan distribusi kader baik yang ada dalam struktur maupun di luar struktur untuk mendukung proses kaderisasi sistemik dengan menggunakan strategi pengembangan *interest group* (kelompok minat) di masyarakat.
- i) Mengembangkan dan memobilisasi transformasi kader AMM putri sebagai pelopor dan pelangsupng gerakan ‘Aisyiyah.

Bidang Pendidikan, dengan tujuan meningkatnya kualitas keunggulan pendidikan 'Aisyiyah sebagai strategi pembentukan manusia yang utuh, berilmu dan berkarakter sesuai dengan tujuan pendidikan.

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sampai Perguruan Tinggi baik jumlah maupun kualitas yang diarahkan kepada pencerahan, pencerdasan, dan pemberdayaan agar menjadi manusia yang taqwa, berilmu, terampil, berkepribadian, mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.
- b) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tingkat perguruan tinggi baik kuantitas maupun kualitas yang mencakup berbagai bidang ilmu untuk pengembangan dakwah.
- c) Meningkatkan mutu pendidikan 'Aisyiyah termasuk kurikulum sesuai UU yang berlaku, sehingga mampu memenuhi standart pendidikan nasional dan mengembangkan lembaga pendidikan 'Aisyiyah yang memiliki keunggulan khusus dan ciri khas 'Aisyiyah.
- d) Mengembangkan jenis, jenjang dan jalur pendidikan baru seperti pendidikan kejuruan, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan anak yang berkebutuhan khusus, dan model-model pendidikan informal sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat luas.
- e) Meningkatkan kualitas pendidik, peningkatan jenjang pendidikan, pelatihan kependidikan, pelatihan penguasaan IT, forum seminar dan diskusi, berbagai

cara lain yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah.

- f) Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan organisasi berdasarkan sistem kinerja disertai dengan pembinaan komitmen dan pengabdian terhadap 'Aisyiyah.
- g) Revitalisasi TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal dalam berbagai aspek agar mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain.
- h) Meningkatkan peran lembaga pendidikan sebagai basis kaderisasi yang dilaksanakan masing-masing lembaga pendidikan 'Aisyiyah.
- i) Mengembangkan data base lembaga pendidikan 'Aisyiyah sebagai pusat informasi dan basis pengembangan pendidikan.
- j) Meningkatkan program keaksaraan fungsional dengan life skill yang dikembangkan melalui berbagai kegiatan bersinergi dengan majelis dan lembaga (lintas majelis/lembaga).

Program kerja bidang kesehatan, bertujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, khususnya kaum perempuan, bayi dan anak yang berbasis pelayanan kesehatan dan komunitas, dengan kegiatan:

- a) Menyusun dan mengembangkan pedoman dan tuntunan manajemen amal usaha di bidang kesehatan yang berorientasi pada mutu dan profesionalisme serta berbasis pada nilai-nilai a-Qur'an, sehingga mampu bersaing dengan lembaga kesehatan lain di masyarakat.

- b) Mengembangkan panduan pengelolaan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan untuk menjadi acuan bagi para penggerak/penggiat kesehatan di masyarakat.
- c) Meningkatkan kualitas sumberdaya di bidang kesehatan melalui berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan, pelatihan, magang, dan kegiatan lainnya untuk peningkatan kapasitas.
- d) Meningkatkan upaya penurunan angka kematian ibu yang melahirkan melalui berbagai kegiatan.
- e) Meningkatkan upaya penurunan angka kematian bayi dan balita dengan prioritas program seperti Imunisasi, ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), pemberian gizi seimbang dan tumbuh kembang anak, dan program lainnya.
- f) Meningkatkan kualitas Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana (KB) yang berkeadilan dan berbasis nilai-nilai Islam.
- g) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilingkungan keluarga, lingkungan amal usaha 'Aisyiyah, tempat umum, tempat ibadah dan di lingkungan komunitas masyarakat luas.
- h) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit menular (malaria, TBC, dan penyakit lainnya seperti diabetes millitus, kanker, stroke, dan HIV/AIDS).
- i) Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui implementasi konsep Keluarga sakinah dan

Qaryah Thayyibah di bidang kesehatan atau Desa Siaga (Pengembangan Taman Obat Keluarga, dan Posyandu Balita).

- j) Meningkatkan kuantitas dan kualitas motivator kesehatan masyarakat yang siap sebagai penggerak perilaku hidup sehat.
- k) Meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan dengan pemerintah dan berbagai pihak secara lebih aktif untuk memperluas peran 'Aisyiyah dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- l) Revitalisasi amal usaha kesehatan 'Aisyiyah antara lain Rumah Sakit (RS), Rumah Bersalin (RB), Balai Pengobatan (BP), dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) secara profesional dan berorientasi al Ma'un sehingga lembaga-lembaga pelayanan kesehatan 'Aisyiyah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
- m) Memperkuat sinergi Amal Usaha Pendidikan Kesehatan 'Aisyiyah dan Muhammadiyah dalam program magang kerja, pelatihan, penempatan tenaga kesehatan baik dalam maupun luar negeri.
- n) Mengembangkan data base Amal Usaha Kesehatan 'Aisyiyah sebagai pusat informasi dan basis peningkatan kualitas layanan maupun pengembangan amal usaha kesehatan.

Bidang Kesejahteraan Sosial, bertujuan agar berkembangnya atau meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan penyantunan masyarakat dhuafa dan berbagai kelompok yang termarginalkan melalui kegiatan:

- a) Menyusun dan mengembangkan pedoman dan tuntunan manajemen amal usaha di bidang kesejahteraan sosial antara lain panti asuhan, rumah singgah, dan amal usaha lainnya yang berorientasi pada mutu dan profesionalisme sehingga mampu bersaing dengan lembaga layanan sosial yang berkembang di masyarakat.
- b) Meningkatkan usaha pemberdayaan, pelayanan, dan penyantunan melalui berbagai model aksi bagi kelompok masyarakat miskin, anak-anak terlantar, anak jermal, Lansia, penyandang cacat atau orang yang memiliki kebutuhan khusus, korban narkoba, serta kelompok lain yang termarginalkan.
- c) Meningkatkan fungsi dan peran panti asuhan sebagai wadah untuk menggali dan mengembangkan potensi anak asuh yang berbakat serta menjadi pusat perlindungan anak.
- d) Meningkatkan sosialisasi pemahaman dan pendampingan bagi warga masyarakat lansia untuk menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- e) Mengembangkan sistem dan implementasi konsep asuhan keluarga sebagai bagian dakwah dalam bidang sosial.
- f) Pendampingan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan

peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan menggunakan berbagai model dan pendekatan yang pelaksanaannya dilakukan dengan lintas majelis maupun lembaga.

- g) Meningkatkan sosialisasi untuk penghapusan berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta melakukan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- h) Meningkatkan sosialisasi tindakan preventif terhadap perdagangan manusia serta pendampingan terhadap korban *trafficking*.
- i) Merintis program pelayanan anak dengan kebutuhan khusus dan layanan khusus lainnya sesuai kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat dhu'afa.
- j) Melakukan Advokasi publik yang menyangkut kebijakan masalah-masalah sosial khususnya bagi masyarakat yang termarginalkan dan dhuafa untuk mendapatkan rasa keadilan.
- k) Meningkatkan usaha-usaha dan kualitas penanggulangan bencana antara lain pada tahap tanggap darurat, manajemen bencana, kesiapan SDM, yang pelaksanaannya bersinergi dengan amal usaha.
- l) Mengintensifkan sosialisasi model kesiapsiagaan perempuan dalam menghadapi yang berbasis pada masyarakat baik melalui lembaga pendidikan maupun komunitas masyarakat.

Keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah juga dilihat dari implementasi program kerja bidang Ekonomi dan ketenagakerjaan, yang bertujuan agar:terbangunnya

kesadaran dan perilaku ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga 'Aisyiyah khususnya dan warga masyarakat pada umumnya, meliputi:

- a) Mengembangkan pedoman dan tuntunan pelaksanaan amal usaha di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan dengan berorientasi kepada profesionalisme serta berbasis pada nilai-nilai Islam, sehingga mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lain.
- b) Menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui pengembangan dan penguatan usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh perempuan untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi ummat.
- c) Optimalisasi pendampingan dan pembinaan ekonomi melalui Bina Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah (BUEKA).
- d) Menguatkan posisi dan kondisi usaha kecil yang dikelola perempuan dalam hal akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi.
- e) Membangun solidaritas dengan berbagai pihak dalam melakukan advokasi atas bentuk-bentuk ketidakadilan serta advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan usaha mikro-kecil.
- f) Melakukan pendampingan terhadap tenaga kerja wanita (buruh) baik buruh migran (bekerja di luar negeri) maupun buruh yang bekerja di dalam negeri seperti pemahaman tentang hak, perlindungan hukum, dan kondisi budaya di tempat kerja maupun pendampingan.

Bidang Pendidikan Politik, bertujuan agar terbangunnya kesadaran perilaku warga negara akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak warga negara melalui pengajian, pelatihan, diskusi, kegiatan forum warga, dan media kegiatan lainnya sebagai perwujudan penguatan masyarakat sipil (*civil society*)/masyarakat madani, yaitu: (a) meningkatkan peran kontrol sosial masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan secara bijak melalui berbagai saluran; (b) meningkatkan partisipasi politik warga negara dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan hak-hak politik warga, dan (c) mengembangkan jaringan sinergis dengan kader dan simpatisan 'Aisyiyah yang berada di lembaga pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya untuk meningkatkan peran dakwah 'Aisyiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Dinamika Kepatuhan Anggota Organisasi kepada 'Aisyiyah dan Kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah di Balik Kemandirian dan Keberlanjutannya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data menunjukkan bahwa, kekuasaan moral yang diaplikasikan oleh pengurus organisasi dan keterlibatan moral anggota 'Aisyiyah, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang pengurus 'Aisyiyah Kota Makassar (Wakil Ketua yang membidangi pendidikan dan kebudayaan), mengemukakan bahwa:

‘Aisyiyah merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, dimana dalam perkembangannya menghadapi berbagai dinamika dengan tetap berpegang teguh prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) dengan keikhlasan hati menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam sesuai dengan bakat dan percakapannya, tidak menghendaki sanjung puji dan tidak akan mundur selangkah pun karena dicela; (2) penuh keinsyafan, bahwa beramal itu harus berilmu; (3) jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap syah oleh Allah, hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan; (4) membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam, dan (5) menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sekerja dan seperjuangan (hasil wawancara RB, 12 Feb. 2012).

Bertitik tolak dari hasil wawancara di atas dapat ditegaskan bahwa, kekuasaan moral yang ditunjukkan para pengurus organisasi ‘Aisyiyah dan keterlibatan moral anggota telah diaplikasikan sejak awal berdirinya ‘Aisyiyah pada tahun 1926. Misalnya: Keputusan Pengurus ‘Aisyiyah Pusat di dalam mengantisipasi dinamika pendidikan bersamaan dengan berdirinya ‘Aisyiyah Kota Makassar. Dalam hal ini, keputusan tersebut berlandaskan moral dalam merintis pendidikan dini untuk anak-anak sehingga keterlibatan anggota dan pengurus ‘Aisyiyah, tunduk dan patuh keputusan ini karena pertimbangan moral. Sebagai contoh: Keputusan Ketua PDA Kota Makassar ketika itu, dan memberi perintah agar pendidikan dini untuk anak-anak dijadikan dasar atau landasan untuk mendirikan Taman Kanan-Kanak pertama di Kota Makassar. Keputusan atau perintah tersebut semata-mata karena pertimbangan moral, sehingga keterlibatan anggota ‘Aisyiyah juga berlandaskan pertimbangan moral, kemudian taman kanak-kanak ini diseragamkan namanya menjadi TK Aisyiyah Bustanul Athfal yang saat ini telah mencapai 54 TK yang dikelola ‘Aisyiyah di Kota Makassar, di mana setiap TK terdapat Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), dan 2 PAUD.

Selain itu, fakta dan data yang menunjukkan bahwa kekuasaan moral yang diaplikasikan oleh pengurus 'Aisyiyah dan keterlibatan moral anggota di dalam gerakan pemberantasan kebodohan yang menjadi salah satu pilar perjuangan 'Aisyiyah di Kota Makassar, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Majelis Dikdasmen, bahwa:

Kekuasaan moral oleh pengurus organisasi dan keterlibatan moral anggota 'Aisyiyah yang menjadi pertimbangan utama dalam mengadakan pemberantasan buta huruf, baik buta huruf arab maupun latin. Karena itu, dalam kegiatan ini peserta terdiri dari para gadis-gadis dan ibu-ibu rumah tangga belajar bersama, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi perempuan dalam dunia publik. Kemudian kekuasaan moral oleh pengurus dan keterlibatan moral anggota dalam berbagai kegiatan pendidikan berdasarkan keputusan 'Aisyiyah Pusat dengan menerbitkan majalah yang diberi nama Suara Aisyiyah. Melalui majalah bulanan inilah Aisyiyah, mengkomunikasikan semua program dan kegiatannya termasuk konsolidasi internal organisasi (hasil wawancara SK, 22 Feb. 2012).

Contoh lain yang dapat ditunjukkan berdasarkan hasil penelitian ialah, pengurus 'Aisyiyah memberi perintah terhadap kepala sekolah (pengelola amal usaha), dasar kuasanya adalah normatif. Kepala sekolah terlibat dan patuh melaksanakan perintah tersebut karena pertimbangan moral. Dengan demikian, secara moral kepala sekolah tunduk dan patuh kepada perintah tersebut demi kelangsungan dan kelanggengan organisasi semata-mata atas pertimbangan moral. Misalnya, keputusan atau perintah dari Muhammadiyah tentang libur selama bulan Ramadhan bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah dan 'Aisyiyah, kemudian 'Aisyiyah terlibat dan patuh kepada perintah atau keputusan tersebut karena pertimbangan moral. Dalam hal ini, meliburkan siswa mulai dari TK sampai SMA/SMK yang dikelola 'Aisyiyah

selama bulan Ramadhan. Untuk lebih jelasnya dikemukakan pernyataan salah satu

Wakil Ketua PDA Kota Makassar, bahwa:

‘Aisyiyah sebagai organisasi dakwah, sosial, dan kemasyarakatan dimana latar belakang pendiriannya sama dengan Muhammadiyah, yaitu memberikan pencerahan terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh umat manusia (masyarakat, bangsa dan negara). Oleh karena itu, segala keputusan dan perintah dalam organisasi dasar kuasanya adalah moral, demikian pula keterlibatan anggota juga bersifat moral. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang telah digariskan Persyarikatan Muhammadiyah, secara normatif-moral telah dipatuhi ‘Aisyiyah terutama untuk memprakarsai berdirinya organisasi wanita di Indonesia. Dalam hal ini, ‘Aisyiyah bersama dengan organisasi wanita lainnya berjuang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan dan kebodohan karena pertimbangan moral (hasil wawancara RA, tanggal 15 Maret 2012).

Penjelasan di atas semakin memperkuat bahwa, dinamika kepatuhan anggota kepada ‘Aisyiyah dalam bentuk keterlibatan dengan pertimbangan moral, serta kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah karena atas dasar normatif-moral. Contoh kasus yang dapat ditunjukkan berdasarkan data dan fakta yang ditemui adalah, ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia, karena atas dasar pertimbangan moral telah membentuk Badan federasi dan melakukan Kongres Perempuan Indonesia, sekarang menjadi KOWANI (Kongres Wanita Indonesia). Lewat federasi ini berbagai usaha dan perjuangan ‘Aisyiyah dapat dilakukan dengan pertimbangan moral.

‘Aisyiyah Kota Makassar berkembang pesat seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat dalam menemukan bentuknya sebagai organisasi wanita modern. ‘Aisyiyah Kota Makassar dalam mengembangkan berbagai program untuk pembinaan dan pendidikan kaum wanita. Diantara program-program ‘Aisyiyah yang

mendapat sambutan positif untuk mengembangkan kemampuan wanita ialah kegiatan di luar sekolah sebagai kader 'Aisyiyah. Selanjutnya Kongres Muhammadiyah ke-20 tahun 1931 Siswa Praja Wanita menjadi Nasyi'atul Aisyiyah (NA). Di samping itu, 'Aisyiyah juga mendirikan Urusan Madrasah yang bertugas mengurus madrasah khusus puteri, Urusan Tabligh yang mengurus penyiaran agama lewat pengajian, kursus dan asrama, serta Urusan Wal'asri yang mengusahakan beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. Selain itu 'Aisyiyah pada tahun 1935 juga mendirikan Urusan Adz-Dzakirat yang bertugas mencari dana untuk membangun Gedung 'Aisyiyah dan modal mendirikan koperasi.

Perkembangan Aisyiyah selanjutnya pada tahun 1939 mengalami titik kemajuan yang sangat pesat, dengan menambah Urusan Pertolongan (PKU) yang bertugas menolong kesengsaraan umum. Karena sekolah-sekolah putri yang didirikan 'Aisyiyah sudah semakin banyak, maka Urusan Pengajaran didirikan di Aisyiyah. Di samping itu 'Aisyiyah juga mendirikan Biro Konsultasi Keluarga, yang menjadi gerakan wanita Islam yang mendobrak kebekuan feodalisme dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat pada masa itu, serta sekaligus melakukan advokasi pemberdayaan kaum perempuan.

Senada dengan penjelasan di atas, bahwa dinamika kepatuhan yang mengawali perkembangan 'Aisyiyah yang didominasi oleh kekuasaan moral, dan keterlibatan anggota organisasi bersifat moral. Hal ini sejalan dengan penegasan salah

satu Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan tentang kepatuhan 'Aisyiyah, bahwa:

Kekuasaan pengurus yang berlandaskan pertimbangan moral, serta keterlibatan moral anggota dalam berbagai upaya yang telah dilakukan secara berkesinambungan di atas, merupakan wujud kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah, termasuk keputusan membentuk NA (Nasyiatul 'Aisyiyah) sebagai organisasi otonom (kader) yang tunduk dan patuh kepada 'Aisyiyah karena pertimbangan moral dalam bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. NA tetap mengedepankan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar seperti yang diamanatkan oleh Muhammadiyah sebagai keputusan moral. Tugas luhur ini dilakukan baik secara kolektif organisasional maupun secara individu (personil-personil) anggota organisasi (hasil wawancara IT, tanggal 12 Maret 2012).

Nasyiatul 'Aisyiyah (NA) hadir berkat adanya suatu kesadaran religius yang positif tentang masa depan dan kelangsungan 'Aisyiyah. Kesadaran ini menjadi wacana organisasi untuk membangun generasi muda Islam untuk tetap eksis dan memegang peran penting dalam perjuangan bangsa. Upaya ini sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang sedang menapaki tahap kebangkitan bangsa pada awal abad XX. Tuntutan sejarah inilah kemudian melatarbelakangi kelahiran NA sebagai wadah pembinaan dan pendidikan generasi muda putri Islam. Bangsa Indonesia sedang dihadapkan adanya upaya mempersatukan visi anak bangsa. Kondisi ini telah dibaca para pemuka Muhammadiyah. Siswa Praja Wanita yang merupakan embrio NA merupakan wadah dan wahana untuk menjalin persatuan di antara anak bangsa. Nilai-nilai kejuangan dan kebersamaan selalu ditanamkan kepada para anggota Siswa Praja Wanita sejak dini.

Ukhuwah Islamiyah diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa agar jalinan persatuan lebih erat, disamping kesamaan dalam penderitaan yang juga menjadi tali

pemersatu yang diwujudkan dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada visi dan tujuan organisasi. Bentuk kepatuhan AMM Puteri yang tergabung dalam Naisyiatu 'Aisyiyah sebagai organisasi yang dilahirkan oleh 'Aisyiyah untuk menopang kemandirian dan keberlanjutan organisasi, secara rinci dikemukakan oleh Ketua 'Aisyiyah Kota Makassar, bahwa:

Sebagaimana diketahui 'Aisyiyah merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, di samping beberapa organisasi otonom lain, seperti: Naisyiatul 'Aisyiyah (NA), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Tapak Suci, Hisbul Watan, dan Pemuda Muhammadiyah. Khusus NA sebagai ortom Muhammadiyah dan berada di bawah binaan, koordinasi dan tanggung jawab 'Aisyiyah di dalam melakukan berbagai aktivitas, karena latar belakang lahirnya NA sebagai anak kandung 'Aisyiyah tidak terlepas dari perjuangan pendiri Muhammadiyah berkat adanya suatu kesadaran religius yang positif tentang masa depan dan demi kelangsungan cita-cita Muhammadiyah (hasil wawancara KA, tanggal 12 Februari 2012).

Kesadaran ini menjadi wacana organisasi dalam upaya membangun generasi muda Islam untuk tetap eksis dan memegang peran penting dalam perjuangan bangsa. Upaya ini amat penting dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang sedang menapaki tahap kebangkitan bangsa di awal abad ke-20. Tuntutan sejarah inilah yang melatarbelakangi kelahiran NA sebagai wadah pembinaan dan pendidikan generasi muda putri Islam umumnya dan Muhammadiyah pada khususnya.

Keterangan di atas diperkuat oleh salah satu Wakil Ketua 'Aisyiyah Kota Makassar, bahwa berbicara tentang kemandirian organisasi 'Aisyiyah dalam mengelola amal usaha, memang betul-betul swadaya. Hal ini tidak berarti tanpa bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat baik internal Muhammadiyah maupun eksternal Pemerintah. Hal ini karena mengingat proses perjalanan panjang 'Aisyiyah

terutama yang berhubungan dengan pencarian dana untuk mengelola atau mendirikan amal usaha; saya sebagai ketua betul-betul merasakan jerih-payah, susah-senang, jatuh-bangun para pengurus dan anggota untuk mewujudkan impian menjadi kenyataan.

Menyimak penjelasan di atas, juga dipertegas kembali oleh pengurus lain (Bendahara 'Aisyiyah Kota Makassar) bahwa:

Sebagai anggota maupun pengurus merasakan suka-duka, dalam mengelola amal usaha khususnya di Makassar. Sampai saat ini, 'Aisyiyah Kota Makassar memiliki amal usaha di bidang pendidikan, antara lain: Taman Kanak-kanak (TK) 'Aisyiyah sebanyak 54, selain TK yang dibina oleh Muhammadiyah tetapi secara operasional dikelola 'Aisyiyah. Selain itu, 'Aisyiyah memiliki satu buah Sekolah Dasar (SD 'Aisyiyah).Memang 'Aisyiyah baru memiliki satu buah SD, tetapi betul-betul baik, unggul dan dapat diandalkan kualitasnya (hasil wawancara RK, 25 Maret 2012).

Kemudian amal usaha sosial kemasyarakatan 'Aisyiyah membia dua Panti Suhan (PA), yaitu PA Ummu Aiman di Jl. Beruang, dan PA Sejati di Jl. Cakalang.Selain itu, Panti Asuhan Bahagia di Jl. Muhammadiyah milik Muhammadiyah dan dikelola oleh 'Aisyiyah tapi tidak pernah mengklain PA Bahagia sebagai milik 'Aisyiyah.Amal usaha di bidang kesehatan, sejauh ini 'Aisyiyah membina empat BKIA bekerjasama dengan Muhammadiyah.Khusus di bidang kesehatan, 'Aisyiyah belum memiliki Rumah Sakit (RS) maupun Rumah Bersalin (RB), tetapi kebanyakan pengurus serta anggota berpartisipasi dalam membina RS dan/atau RB milik Muhammadiyah.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, 'Aisyiyah Kota Makassar memiliki TK sebanyak 54, tapi SD yang benar-benar milik 'Aisyiyah hanya satu.Kondisi yang

betul-betul sulit dipahami oleh masyarakat. Semesttinya agar pembinaan dapat berkelanjutan di mana TK sebanyak 54, maka SD yang dibina 'Aisyiyah paling sedikit 10 – 15 SD agar mampu menampung tamatan (lulusan) TK 'Aisyiyah tersebut. Namun, penjelasan selanjutnya dikaitkan dengan kedudukan 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah yang memiliki misi perjuangan mendukung terciptanya “masyarakat utama”, yaitu masyarakat yang sehat sejahtera jasmani dan rohani. Dengan kata lain, 'Aisyiyah telah meletakkan dasar-dasar pendidikan Islam melalui Taman Kanak-kanak, kemudian tersebar di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang dibina oleh Muhammadiyah, bahkan sampai Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, tentang hubungan 'Aisyiyah dengan NA sebagai ortom Muhammadiyah dijelaskan oleh salah satu Wakil Ketua PDA bahwa, antara 'Aisyiyah dengan NA mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Artinya 'Aisyiyah dan NA mempunyai tugas yang sama, yaitu membantu, membina dan mengembangkan cita-cita (visi, misi, dan tujuan) Muhammadiyah dengan bidang garapannya yang berbeda. NA mempunyai bidang sasaran pada generasi muda wanita untuk dibina agar menjadi pelopor, pelangsong, penyempurna, dan pembaharu usaha cita-cita Muhammadiyah. Meskipun antara 'Aisyiyah dan NA memiliki status yang sama di Muhammadiyah, namun secara informal 'Aisyiyah mempunyai posisi yang lebih tinggi dibanding NA.

Fakta yang menunjukkan bahwa NA merupakan kader dari 'Aisyiyah. Karena itu, 'Aisyiyah sebagai ibu kandung NA turut bertanggung jawab membina dan

membimbing NA berdasarkan SK Muhammadiyah No.3/1987 dan Keputusan Munas NA II, 1995, p.41-43), dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Sedang bagi Muhammadiyah, NA merupakan kader yang akan meneruskan dan mengembangkan gerakan Islam yang telah ditentukan Muhammadiyah. Karena itu, Muhammadiyah berkewajiban untuk memberikan bekal agama yang cukup kepada NA, menentukan arah pembinaan dengan membekali kemuhammadiyah, ilmu pengetahuan dan ketrampilan, serta kemampuan manajemen.

Bentuk kepatuhan anggota kepada 'Aisyiyah termasuk NA sebagai AMM Puteri, sekaligus kader penerus dan pelanjut 'Aisyiyah adalah "moral", sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Sekretaris PDA Kota Makassar sekaligus newakili beberapa guru mengatakan bahwa:

Tanggung jawab saya di 'Aisyiyah Kota Makassar, adalah sebagai Wakil Sekretaris; tugas pokok saya adalah sebagai dosen dan mengajar Bahasa Inggris di beberapa sekolah yang dibina 'Aisyiyah. Keterlibatan dan wujud kepatuhan saya sama dengan pengurus yang lain mempunyai kesibukan dan kegiatan pokok yang sangat padat, baik sebagai guru atau PNS maupun wiraswasta, namun tetap meluangkan waktu semata-mata karena panggilan moral; bukan karena insentif (honor), paksaan maupun bentuk lain. Karena mengurus 'Aisyiyah bagi saya begitu juga pengurus lain adalah panggilan jiwa untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Inilah yang membuat saya selalu patuh dan menyisihkan waktu, sesibuk apapun untuk 'Aisyiyah tetap bila perlu mengorbankan kegiatan lain. Hal ini karena prinsip yang tertanam di 'Aisyiyah bukan semata-mata untuk duniawi, tetapi untuk akhirat (hasil wawancara RD, 17 Maret 2012).

Demikian pula bentuk kepatuhan yang diperlihatkan oleh pengelola dan pengurus amal usaha seperti Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, dan lembaga kesehatan yang dikelola 'Aisyiyah dan Muhammadiyah. Mengutip pernyataan Ketua

Majelis Kesehatan 'Aisyiyah Kota Makassar yang mewakili tenaga medis (dokter, bidan, perawat, dan suster), bahwa:

Kalau dibandingkan dengan bekerja di tempat lain seperti RS Stela Maris, Akademis, dan RS yang dikelola organisasi swasta lain memiliki pendapatan (honor) lebih tinggi. Namun saya dan teman-teman pengurus baik sebagai dokter, perawat, bidan maupun suster rata-rata merupakan kader 'Aisyiyah sehingga masalah honor bukan satu-satunya faktor yang menjadi ukuran melainkan yang dominan adalah panggilan moral (jiwa), agar kehadiran 'Aisyiyah tetap bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara (hasil wawancara HD, tanggal 12 Maret 2012).

Kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah dapat dilihat melalui berbagai gerakan sejak Siswa Praja Wanita, Muhammadiyah juga berusaha untuk menanamkan dan mensosialisasikan gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar; memberantas Tahayul, Bid'ah, Churafat (TBC); dan membangun akhlakul karimah di kalangan generasi muda putri Islam. Kesadaran sosio-kultural para pemuka Muhammadiyah ini didasari oleh fenomena masyarakat Indonesia, yang cenderung memelihara TBC. Marginalisasi ajaran Islam ini dikarenakan oleh proses akulturasi Islam dengan budaya setempat yang tidak segera direformasi. Akibatnya, tata kehidupan yang religius masyarakat tidak menampakkan ciri kehidupan yang Islami.

Wujud kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah dapat dilihat pada program kerja Majelis Kesejahteraan Sosial dan Majelis Kesehatan Periode 2010 – 2015, antara lain: (1) pendataan amal usaha; (2) konsolidasi dan penguatan organisasi; (3) meningkatkan usaha dan kualitas penanggulangan bencana, antara lain pada tanggap darurat, kesiapan SDM 'Aisyiyah dan sinergi dengan amal usaha; (4) pelatihan perawatan jenazah; (5) membantu masyarakat dhuafa (fakir miskin); (6)

meningkatkan sosialisasi penghapusan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dinamika kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah di balik kemandirian dan keberlanjutannya mengalami pasang surut. Secara garis besar dijelaskan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa, bentuk kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah pada masa pra kemerdekaan 17 Agustus 1945, adalah kongruen sampai 'Aisyiyah sebagai ortom yang ditetapkan dalam Muktamar di Yogyakarta. Demikian pula halnya perkembangan 'Aisyiyah pasca kemerdekaan sampai pada tahun 1950, suhu politik mulai menurun, kepatuhan 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah adalah "normatif-moral" dan mengadakan muktamar secara mandiri. Dalam Muktamar ini bertujuan untuk mempercepat langkah 'Aisyiyah, ada beberapa perubahan yang fundamental, yaitu NA dijadikan bagian yang diistimewakan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, sehingga NA diberi wewenang untuk mengelola organisasinya sendiri.

Proses otonomi NA dimulai pada Muktamar 'Aisyiyah di Palembang tahun 1956, dimana NA dimunculkan suatu pemikiran bahwa NA sebaiknya diberi hak otonom untuk mengelola, memenej, dan membentuk jati dirinya. Prasaran dari Dra. Baroroh Baried ini belum mendapat respon yang serius. Kemudian Muktamar 'Aisyiyah pada tahun 1959 di Yogyakarta, Bagian NA yang dipegang oleh Zuhra Daris belum juga diberi hak otonom (Ibid). Ketika itu NA hanya diberi keleluasaan oleh PP. 'Aisyiyah untuk mengembangkan kegiatannya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh NA mengembangkan diri guna menuju kedewasaannya.

Iktikad ini merupakan salah satu bentuk keputusan atas pertimbangan moral yang disambut baik PP.'Aisyiyah dengan dibuktikan oleh diberinya kesempatan bermusyawaran tersendiri. Pada Muktamar 'Aisyiyah di Jakarta tahun 1962 merupakan sinyalemen bahwa NA harus dituntut untuk mulai memikirkan kebutuhan dan pengembangan dirinya. Untuk itu pada kesempatan ini Bagian NA di bawah kepemimpinan Siti Karimah membuat rencana kerja baru yang meliputi: kaderisasi, popularisasi NA, pembinaan, dan lain-lain. Semangat Jakarta ini betul-betul menjadi motivasi bagi NA untuk membenahi diri dan membina rumah tangganya. Semangat Jakarta ini betul-betul telah menjadi Nasyyatul 'Aisyiyah dewasa.

Sidang Tanwir 1963 telah disepakat bahwa NA diberi status otonom. Siti Karimah dan kawan-kawan mulai mengadakan persiapan-persiapan untuk mengadakan musyawarah pertamanya di Bandung. Persiapan ini mendapat bimbingan dari majlis bimbingan pemuda. Sebelum muktamar, terlebih dahulu diadakan konferensi NA di Solo. Konferensi ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi NA; mempersiapkan program-program kerja, penyusunan AD, berbagai hal yang berkaitan dengan keorganisasian. Berbekal hasil konferensi Solo, NA berhasil menggelar Muktamar NA yang perdana di Bandung tahun 1965, bersamaan Muktamar Muhammadiyah. Dari muktamar ini ternyata menjadi suatu hal yang surprise bagi NA, karena muktamar ini dihadiri oleh 66 daerah dan 166 cabang. Kehadiran sejumlah muktamirin NA ini menjadikan Muhammadiyah bangga, sehingga pada Muktamar Muhammadiyah berikutnya secara resmi NA mendapat

status otonom dari Muhammadiyah. Secara organisatoris, NA telah terlepas dari 'Aisyiyah dan mendapat pengawasan langsung dari Muhammadiyah.

Sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang pembinaan generasi muda wanita Islam, NA mempunyai struktur organisasi yang sama dengan Muhammadiyah, mulai dari ranting yang bertempat di kalurahan/desa, cabang pada tingkat kecamatan, daerah yang bertempat di kabupaten/ kota madya, wilayah untuk tingkat propinsi, dan tingkat pusat (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nasyyiatul 'Aisyiyah, 1996). Struktur organisasi Nasyyiatul 'Aisyiyah, menurut Anggaran Dasar Pasal 14 dinyatakan bahwa Pimpinan Pusat/Pimpinan Wilayah/Pimpinan Daerah NA membentuk Departemen sebagai badan pembantu pimpinan (ayat 1). Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting dapat membentuk Seksi-seksi sebagai pembantu untuk melaksanakan dan memelihara usaha-usaha organisasi (ayat 2). Rincian struktur ini lebih diperjelas pada pasal 16 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Nasyyiatul 'Aisyiyah, yaitu Departemen/Seksi dalam NA, meliputi: (1) Departemen/ Seksi Kader; (2) Departemen/ Seksi Dakwah; (3) Departemen/Seksi Dokumentasi dan Informasi, dan (4) Departemen/Seksi Khusus dan Biro. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa usaha/kegiatan yang tidak dapat dimasukkan dalam salah satu Departemen/Seksi, dibentuk Lembaga Khusus atau Biro (AD/ART, 1996, p.34).

NA sebagai gerakan AMM Putri dalam mencapai tujuannya melalui beberapa periodisasi dalam mendukung 'Aisyiyah. Masing-masing periode memiliki prioritas dan spesialisasi program yang berbentuk program jangka pendek satu tahun, dan

jangka menengah lima tahun, sedang untuk program jangka panjang 25 tahun, dan telah dipahami bahwa masing-masing periode waktu mempunyai prioritas program yang berkaitan dan saling tergantung (interdependensi program) dengan bentuk kepatuhan “moral-normatif”.

Program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dalam konteks kepatuhan moral normatif, bertujuan untuk membentuk pribadi putri AMM yang bermakna bagi agama, bangsa, dan negara menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah swt. Oleh karena itu, Keputusan Musyawarah Nasional Pimpinan Pusat (PP) Nasyiatul 'Aisyiyah II, bulan April 1995, telah mengambil keputusan mengenai prioritas periode untuk program jangka panjang meliputi: (1) Prioritas periode Kaderisasi pada tahun (1985-1990); (2) Prioritas periode Kemubalighatan (1990-1995); (3) Prioritas periode Kemasyarakatan, tahun (1995-2000); (4) Prioritas periode Kebangsaan (2000-2005); dan (5) Prioritas periode Internasionalisasi pada tahun (2005 - 2010).

Implementasi program NA di atas dapat diartikan bahwa jika terdapat kekurangan dalam periode yang satu, maka akan mewarnai pada periode selanjutnya. Pelaksanaan program jangka panjang ini bersifat akumulatif (menumpuk), namun frekuensinya akan semakin berkurang. Yang menjadi stressing program adalah prioritas program pada masing-masing periode. Adapun yang dimaksud program jangka pendek NA, adalah program yang dilaksanakan untuk satu periode dengan memprioritaskan program-program yang dicanangkan dalam program jangka panjang.

Program kerja NA yang sinergi dengan 'Aisyiyah sebagai organisasi induk merupakan kelanjutan dan rangkaian program periode sebelumnya, dan program ini yang menjadi dasar bagi pembuatan program selanjutnya setelah diadakan evaluasi dan revisi. Secara garis besar program NA yang terkait dengan kepatuhan adalah : (a) Bidang Konsolidasi Organisasi; (b) Bidang Kaderisasi; (c) Bidang Dakwah; (d) Bidang Kemasyarakatan; (e) Bidang Pengkajian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan dunia yang semakin mengglobal, satu sisi telah mempermudah kiprah manusia dalam memahami dan menguasai dunia. Namun di sisi lain, perkembangan itu telah merusak sendi-sendi peradaban manusia dan tatanan moral agama. Budaya primordial dan hedonistik seakan menjadi idola kehidupan. Batas ruang dan waktu tidak lagi menjadi penghalang bagi transfer of technology and communication. Sehubungan dengan ini, segala macam bentuk budaya yang menyebar ke segala penjuru. Iklim keterbukaan ini perlu adanya kendali moral agar bangsa Indonesia tetap pada bingkai budayanya.

Upaya ini hanya dapat dilakukan melalui implementasi akhlak agama dalam kehidupan sehari-hari dengan melalui pembentukan sikap dan perilaku bangsa ini. Inilah yang mendasari NA untuk menyusun Matan Kepribadian. Perjuangan ini memerlukan waktu yang panjang, tidak dibatasi umur manusia. Untuk itu diperlukan generasi penerus untuk meneruskan dan menyempurnakan cita-cita NA. Penyempurnaan matan Kepribadian NA mutlak diperlukan, karena semenjak gagasan Dra. Chamamah Suratno, PP NA periode 1965 - 1968, dalam perjalanan waktu senantiasa menghadapi tantangan yang berfariatif.

Mengingat tantangan yang semakin kompleks, maka rumusan Matan Kepribadian NA perlu mendapat perhatian selaras dengan tantangan yang dihadapi. Rumusan pertama Matan Kepribadian disahkan pada Mukhtamar NA ke-2 di Yogyakarta tahun 1968, dan sebagai tim perumusanya adalah Muslimah Humam, BA. Rumusan ini ditinjau ulang dan direvisi pada Rapim PP NA 1986 kemudian disahkan pada Sidang Pleno III pada 5 September 1986, dan kemudian dikukuhkan dalam Munas tahun 1987. Penyempurnaan itu meliputi sistematika, redaksi, dan penyajiannya. Rumusan ini pada sidang Tanwir 'Aisyiyah Tahun 2005 – 2010 mengikaji ulang dan mengadakan penyempurnaan pada segi metodologi, materi, sistematika.

Kepribadian merupakan suatu keadaan jiwa yang terpancar pada sikap dan perilaku seseorang. Karena itu, sebagai ruh; kepribadian mampu membedakan antara orang yang satu dengan yang lain. Demikain pula halnya dengan NA, Kepribadian NA menjadi jati dirinya untuk membedakan antara organisasi ini dengan organisasi yang lain. Kepribadian NA, menurut Tanwir NA 1996, adalah "keseluruhan proses dan keadaan yang melekat pada gerakan NA yang meliputi hakekat dan missinya dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat, sehingga berbeda dengan organisasi lainnya". Kepribadian NA bercirikan akhlakul karimah sesuai AD/ART NA.

Bagi NA, kepribadian yang dimilikinya tidak sekedar ruh organisasi saja, tetapi juga melekat pada segenap anggotanya. Karena itu kepribadian NA merupakan keseluruhan jiwa raga yang dimiliki oleh setiap anggota NA, baik sebagai kader umat, kader organisasi maupun kader bangsa, yang dimanifestasikan dalam sikap dan

perilakunya. Dengan demikian sikap dan perilaku anggota NA tidak sekedar membangun citra dan cita-cita, tapi juga harus mampu membangun moralitas bangsa. Secara integral, upaya ini sangat berarti bagi Indonesia untuk membangun moralitas bangsa ini.

Sebagai ruh organisasi dan sikap serta perilaku anggota NA, Matan Kepribadian NA disusun dan dirumuskan atas dasar: (a) Muqaddimah Anggaran Dasar NA, memuat prinsip-prinsip dasar usaha dan perjuangan NA; (b) Anggaran Dasar Bab I Pasal 1 tentang nama, identitas dan kedudukan yang mencerminkan hakekat dan misi NA, sebagai organisasi otonom dan kader Persyarikatan Muhammadiyah/'Aisyiyah, serta sebagai kader umat dan bangsa; (c) Anggaran Dasar Bab II Pasal 3 tentang maksud dan tujuan NA, dan (d) Anggaran Dasar Bab II Pasal 4 tentang usaha yang harus dilakukan NA untuk mencapai tujuannya.

Dasar usaha dan perjuangan di atas dapat diartikan bahwa, NA memiliki prinsip : (1) hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah SWT; (2) menunaikan segala kewajiban agama, negara, dan bangsa untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang diridhoi Allah SWT; (3) menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ikhlas dalam beramal shalih, dan memiliki akhlakul karimah. Menegakkan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, seperti dicita-citakan Persyarikatan Muhammadiyah.

Secara esensi, dasar perjuangan matan Kepribadian NA merupakan upaya untuk membentuk anggota NA dan organisasi sebagai pelopor dan penerus perjuangan Persyarikatan. Inilah yang menjadi hakekat dan misi NA yang

memperjuangkan dan membina putri Islam. Artinya NA berusaha menggerakkan putri-putri Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, serta mengajak dan mengarahkan orang lain sesuai dengan kehendak al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu terciptanya masyarakat putri Islam yang mampu mengimplementasikan akhlakul karimah.

NA sebagai organisasi kader 'Aisyiyah mempunyai tanggung jawab dalam merealisasikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini sesuai visi dan tujuan 'Aisyiyah/Muhammadiyah. Dalam upaya merealisasikan tanggung jawab ini, NA mengambil terobosan penyiaran ajaran Islam, yaitu Dakwah Terpadu, yaitu gerakan dakwah NA yang meliputi segala aspek kehidupan dengan menggunakan metode pendekatan integratif, antara gerakan dakwah bil-lisan dengan dakwah bil-hal. Hal ini dapat diartikan bahwa, Dakwah Terpadu meliputi gerakan dakwah yang bersifat penyebaran informasi dan gerakan dakwah yang bersifat amal shalih. Upaya ini memerlukan perangkat manajemen dan sumber daya manusia yang terlatih. Karena di dalam Dakwah Terpadu meliputi beberapa program untuk mempersiapkan *software* dan *hardware* pelaksanaan Dakwah Terpadu NA. Program ini sangat berarti bagi NA dalam rangka mendinamisasikan NA di dalam mengantisipasi tuntutan dan permasalahan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

Bentuk kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah sebagai salah satu ortom juga diimplementasikan melalui Program Dakwah Terpadu NA yang dilatarbelakangi oleh faktor internal, meliputi : (1) peran NA di bidang kemasyarakatan yang terkesan belum menonjol, baik dari kuantitas maupun kualitasnya; (2) masih adanya perbedaan

visi di kalangan pimpinan NA di dalam mensikapi pengembangan dan liberasi sosial kemasyarakatan; (3) masih sedikitnya tenaga penggerak (motivator) dakwah NA di bidang kemasyarakatan yang berperan ganda, yaitu sebagai mubalighot dan pengembang masyarakat, dan (4) belum adanya tanggapan (respon) yang serius dari NA mengenai kondisi sosio-kultural dan sosio-ekonomi sebagai sasaran dakwah yang tepat. Faktor Eksternal, meliputi: (1) kondisi sosio-ekonomi masyarakat menuntut adanya model dakwah implementatif dalam kehidupan sosio-ekonomi sehari-hari. Hal ini menjadi modal Dakwah Terpadu NA yang strategis dan praktis untuk membentuk kultur sosio-ekonomi masyarakat yang Islami; (2) perkembangan daya nalar dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat, sehingga membutuhkan model dakwah aplikatif (dakwah kemasyarakatan yang menggabungkan teori ajaran Islam dengan kondisi dan perkembangan masyarakat, dan (3) perubahan beberapa aspek kehidupan yang makin cepat telah menimbulkan polarisasi kebudayaan dan bermacam-macam kecenderungan.

Menghadapi fenomena ini, NA tetap mendapat arahan dari 'Aisyiyah sebagai wujud kepatuhan organisasi dan masyarakat perlu diberi penjelasan secara dini. Berbagai trend sosio-kultural yang ditandai oleh peningkatan peran wanita di dalam berbagai aspek kehidupan (sosil, ekonomi, politik, budaya) yang menuju pada kemandirian wanita. Sinyalemen ini bagi NA harus dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam mempersiapkan sumber daya AMM Putri. NA menjadi sarana strategis dalam membina dan mendidik AMM putri agar memiliki kredibilitas, kapabilitas, dan profesionalisme.

Dakwah Terpadu yang dapat dijalankan 'Aisyiyah sebagai kepatuhan kepada Muhammadiyah, bertujuan:

- a) Memadukan antara dakwah bil-lisan dengan dakwah bil hal mampu menjawab tantangan dan perkembangan zaman dengan pemenuhan tuntutan dan menjawab permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian dalam jangka panjang, eksistensi dan peran 'Aisyiyah di masyarakat akan dirasakan kehadirannya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
- b) Mampu menjawab permasalahan sosio-kultural dan sosio-ekonomi dengan menegakkan gerakan amar ma'ruf nahi munkar di kalangan putri Islam. Tujuan ini dilaksanakan jika didukung oleh pemahaman kaidah Islam, baik secara integral maupun diferensiasi ajaran.
- c) Menyamakan visi dan misi 'Aisyiyah, mengingat kesatuan pandangan organisasi sangat bermanfaat untuk mengefektifkan gerakan yang dijalankan oleh NA. Program ini mampu menambah tenaga penggerak yang berperan ganda, yaitu sebagai mubalighot dan pengembang kemasyarakatan.
- d) Menyelaraskan aspek kehidupan masyarakat dengan perkembangan IPTEK, yang bermanfaat bagi kebangkitan dunia wanita, mengingat dakwah ini mengangkat dan membina peran wanita secara Islami.

'Aisyiyah merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah. Dengan demikian 'Aisyiyah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan cita-cita Muhammadiyah, hanya bidang garapannya yang berbeda. NA mempunyai bidang sasaran pada generasi muda wanita untuk dibina agar menjadi pelopor,

pelangung, penyempurna, dan pembaharu usaha dan cita-cita Muhammadiyah. Antara 'Aisyiyah dan NA memiliki status yang sama di Muhammadiyah, namun secara informal 'Aisyiyah mempunyai posisi lebih tinggi dibanding NA. Fakta menunjukkan bahwa NA merupakan kader utama 'Aisyiyah. Karena itu, 'Aisyiyah sebagai ibu kandung dari NA, ikut bertanggung jawab membina dan membimbing NA (SK Muhammadiyah No.3/1987 dan Keputusan Munas NA II, 1995, p.41-43), melalui dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Sedang bagi Muhammadiyah, NA merupakan kader yang akan meneruskan dan mengembangkan gerakan Islam dan gerakan dakwah Muhammadiyah. Karena itu, Muhammadiyah berkewajiban memberikan bekal agama kepada NA, serta menentukan arah pembinaan (Dokumentasi PPA, Yogyakarta, Maret 2012).

Hasil analisis dan penelusuran fakta empirik menunjukkan bahwa, Kecenderungan awal abad ke-21 akan diwarnai berbagai perubahan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perspektif ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, sehingga telah mempermudah umat manusia di dalam mengembangkan jati dirinya. Kondisi ini telah merubah sikap manusia di dalam berkompetisi menguasainya. Karena itu bagi yang menguasainya, maka dunia akan mudah ditaklukkan. Namun itu sulit dilakukan, karena masing-masing bangsa memiliki motivasi untuk berkompetisi. Akibatnya adalah memasuki millenium III akan diwarnai interdependensi global dalam segala bidang.

Potret manusia abad ke-21 hubungannya dengan kepatuhan akan diwarnai berbagai bentuk dinamika dan perubahan. Menurut Toeffler (dalam Sztompka, 2004),

perkembangan teknologi, komunikasi, komputerisasi, dan bio-teknologi telah menyebabkan perubahan masyarakat sedemikian cepat. Penemuan dan pengembangan teknologi informasi telah menyebabkan terjadinya globalisasi informasi dan budaya. Ruang dan waktu tidak lagi menjadi batas untuk pertukaran arus informasi. Bahkan masyarakat sangat dipengaruhi dan bergantung pada informasi. Artinya setiap orang yang ingin survive, maju, dan memiliki kualitas tertentu selalu membutuhkan informasi. Tanpa memiliki informasi, orang akan terlindas dan tertinggal.

Seorang pelaku bisnis akan menguasai pasar, jika dia menguasai informasi pasar, konsumen, moneter, manajemen, dan teknologi. Demikian pula halnya seorang pemimpin akan memiliki kualitas, jika dia didukung oleh kapabilitas informasi yang dimilikinya, seperti pranata sosial, perundang-undangan, peraturan, dan perangkat lunak lainnya. Demikian pentingnya informasi bagi manusia ternyata telah menggeser nilai-nilai dan tatanan masyarakat. Pola hidup dan budaya asing lambat laun telah memarginalkan nilai-nilai dan tatanan agama.

Manusia secara formal menganut suatu agama, namun keberadaan Tuhan merupakan Dzat yang "sangat jauh" di sana. Tuhan tidak menyatu dan mewarnai perilaku manusia. Masyarakat cenderung dipengaruhi oleh nilai-nilai sekularisme, pesimisme, materialisme, hedonisme, serta nativisme, bahkan primordialisme dan anarkhisme. Kondisi ini diperparah lagi dengan timbulnya masyarakat saintifik, yaitu masyarakat yang lebih menitikberatkan pada logika, rasionalitas dan objektivitas, sementara faktor relijiusitas dapat dikesampingkan. Menghadapi kenyataan ini,

kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah dalam merealisasikan program kerja mempunyai peran yang sangat strategis di dalam menyikapinya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan strategis yang semakin kompleks.

Muhammadiyah bertanggung jawab untuk membina generasi muda melalui Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) agar AMM turut memikul penyebaran ajaran Islam dan moralitas agama kepada masyarakat. Karena itu, NA secara struktural merupakan salah satu bagian dari AMM yang turut bertanggung jawab atas cita-cita Muhammadiyah. Dengan kata lain, NA dan 'Aisyiyah dituntut untuk kreatif dan inovatif di dalam memainkan perannya dalam masyarakat sesuai wilayah otonom yang dimiliki, namun tetap dalam koridor kepatuhan organisasi yang telah ditentukan. Kemajuan IPTEK harus dimanfaatkan untuk kemajuan NA di dalam bermain dakwah. Artinya, NA secara bijak harus bersatu dengan IPTEK, serta IPTEK dimanfaatkan untuk sarana dakwah secara ilmiah.

Globalisasi informasi membantu penyebaran informasi keagamaan (dakwah bil-lisan) lewat media masa. Derasnya informasi dapat menambah khasanah pemberdayaan sumber daya putri Islam. Di pihak lain, NA dituntut melakukan dakwah interaktif-dialogis di dalam mensikapi proses pergeseran nilai-nilai. Menurut salah seorang informan yang banyak membina NA, juga sebagai pengurus 'Aisyiyah menjelaskan bahwa NA sebagai kader utama 'Aisyiyah dan Muhammadiyah perlu terlibat dalam mengenal seluk beluk dan memahami berbagai persoalan moralitas terutama nilai-nilai dan norma-norma Islam kontemporer. Keterlibatan NA ini secara aktif melalui telaah historis-problematika dan telaah sosiologis. Hal ini

merupakan agenda yang sangat urgen untuk menentukan kebijakan program Dakwah Terpadunya. Tanpa adanya sikap peduli terhadap masalah moralitas yang kontemporer, niscaya posisi NA akan terlibas dalam percaturan informasi global. Karena itu, NA sejak dini telah memiliki jati diri, terutama sebagai gerakan moralitas keagamaan yang dibangun berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam bahasa yang sederhana, NA harus kreatif dan inovatif di dalam membumikan semangat dan pesan al-Qur'an dan as-Sunnah guna membangun moralitas generasi muda yang berlandaskan keagamaan dalam mensikapi perkembangan dunia yang semakin pesat. Semangat keagamaan harus menjadi modal utama bagi NA di dalam percaturan informasi global. Senada dengan itu, penjelasan ketua PDA Kota Makassar bahwa kedudukan 'Aisyiyah sebagai system yang otonom tetap patuh kepada Muhammadiyah, dan NA sebagai organisasi kader tetap dalam kolidor dan kendali 'Aisyiyah dalam mengelola dan mengembangkan amal usaha.

Pertimbangan yang perlu diklarifikasi terkait dengan kepatuhan dan keberlanjutan 'Aisyiyah agar tidak menimbulkan kesalah-pemahaman, Hal ini telah lama dipikirkan semua pengurus dan anggota 'Aisyiyah Kota Makassar. Apabila dicermati berbagai pertanyaan selama ini muncul tentang "mengapa 'Aisyiyah belum melaksanakan Mukhtar sendiri?. Jawabnya jelas, 'Aisyiyah telah melaksanakan Mukhtar sendiri terpisah dari Muhammadiyah, hanya waktunya yang bersamaan demikian juga tempat (daerah/kota yang sama) sehingga terkesan 'Aisyiyah selalu bergantung kepada Muhammadiyah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, keterlibatan moral anggota dan bentuk kekuasaan normatif 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah dapat ditunjukkan didalam pelaksanaan Mukhtamar secara terpisah. Hal ini sebagai bukti bahwa, keterlibatan tersebut semata-mata karena pertimbangan moral, sedangkan kekuasaan yang diaplikasikan adalah normatif. Hal ini seperti dijelaskan oleh salah satu Wakil Ketua 'Aisyiyah Kota Makassar, bahwa:

- 1) Hal tersebut telah menjadi pertimbangan semua pengurus dan anggota 'Aisyiyah bahwa berkaitan dengan kepatuhan melalui pembinaan kader dari usia dini (TK – SD) bahkan perguruan tinggi. Namun, alasan-alasan rasional terkait dengan posisi 'Aisyiyah yang paradoks, yaitu di satu sisi sebagai sistem yang otonom; namun di sisi lain 'Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah sehingga menjadi pertimbangan utama.
- 2) Meskipun 'Aisyiyah baru membina satu SD, tetapi pengelolaannya cukup permanen dan layak dibanding SD yang dibina Muhammadiyah. Karena itu, ke depan 'Aisyiyah sudah memikirkan untuk menambah SD sebagai jawaban atas pertanyaan dan desakan berbagai kebutuhan, terutama di kalangan 'Aisyiyah sendiri. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan ialah "aspek kemandirian". Harus dipahami bahwa, kemandirian 'Aisyiyah dalam mengelola amal usaha adalah betul-betul swadaya.
- 3) Sekali lagi saya tekankan, bukan berarti kami tidak menerima bantuan dari pihak lain (terutama Muhammadiyah dan Pemerintah). Tapi kami mengelola dan mengembangkan amal 'Aisyiyah usaha atas prakarsa dan swadaya murni dari

segenap pengurus dan anggota. Dengan kata lain, ada atau tidak ada bantuan amal usaha 'Aisyiyah harus berjalan. Fakta menunjukkan, setelah berkembang baru berdatangan bantuan sebagai keberlanjutan dari amal usaha tersebut, karena semua amal usaha yang dikelola 'Aisyiyah adalah milik ummat untuk membantu mencerdaskan kehidupan dan keterbelakangan masyarakat.

- 4) Khusus di bidang kesehatan, amal usaha yang di bawah koordinasi Majelis Kesehatan sudah banyak melakukan berbagai kegiatan, seperti pengobatan gratis, dan lain-lain. Sebagai contoh, cabang Bontoala sudah memiliki jadwal dan nama-nama pasien (keluarga) yang akan dibantu. Oleh karena itu, Majelis Kesehatan sudah mempunyai jadwal tetap pengobatan gratis yang akan dilaksanakan.

Berbagai kekuasaan dan keterlibatan yang telah dikemukakan di atas, sebagai wujud kepatuhan moral anggota organisasi dan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah juga merupakan kepatuhan yang bersifat moral, kemudian direalisasikan secara mandiri dan berkesinambungan hingga saat ini, yaitu: "Terbangunnya kualitas aqidah, akhlak, ibadah, dan muammalah di kalangan umat yang berlandaskan nilai-nilai Qur'an dan Sunnah".

D. Pembahasan dan Analisis Sosiologis

Kajian sosiologi tentang kemandirian sebuah organisasi, khususnya 'Aisyiyah Kota Makassar yang dibahas dalam penelitian ini ditinjau dari tiga aspek, yaitu medan visional, paradoks independensi, dan autopoiesis. Dalam hubungan dengan sosiologi, ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan melalui pandangan teoritis sistem terkemuka dalam sosiologi yaitu Niklas Luhmann, mengembangkan suatu pendekatan

sosiologis yang mengombinasikan elemen dalam fungsionalisme struktural Talcott Parsons dengan teori sistem umum serta memperkenalkan konsep dari biologi kognitif, sibernetika dan fenomenologi. Luhmann memandang ide-ide Parsons yang belakangan sebagai satu-satunya teori umum yang cukup kompleks untuk membentuk basis bagi pendekatan sosiologi baru yang merefleksikan temuan terakhir dalam sistem biologi dan sibernetik.

Lebih lanjut Luhmann menjelaskan bahwa, *Social Systems* tidak bertujuan untuk melakukan analisis sosiologis ataupun merumuskan teori tentang masyarakat, tetapi hendak mengelaborasi kerangka konseptual atas teori-teori masyarakat tersebut. Dalam hal ini, *Social Systems* menyediakan suatu instrumen konseptual untuk mengamati berbagai gejala yang ada di dalam realitas sosial, seperti masyarakat, organisasi, dan interaksi-interaksi yang terjadi di dalamnya. Teori sistem hendak mempertanyakan kondisi-kondisi kemungkinan bagi analisis tentang dunia sosial. Akan tetapi, tidak seperti yang dilakukan oleh Kant, teori sistem Luhmann tidak menganalisis subyek yang mengetahui, melainkan berpaling kepada realitas sosial yang memiliki karakter penentuan dan pengaturan dirinya sendiri yang dapat diamati secara inderawi. Fokus dari seluruh analisis teori sistem adalah problematika kompleksitas sosial sebagai subsistem yang bersifat partikular, yakni dari ilmu-ilmu sosial dengan analisis kualitatif.

Dalam konteks ini, kemandirian 'Aisyiyah ditinjau dari sudut pandang sosiologi terkait dengan pandangan Luhmann di atas, 'Aisyiyah merupakan subsistem dari kompleksitas sosial yang lebih besar, yaitu Muhammadiyah yang dibangun di

atas pondasi “amar makruf nahi munkar” (medan visional) yang sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, ‘Aisyiyah Kota Makassar didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka (1926), terus berkembang dan mandiri karena medan visional yang mengikat para anggota untuk bergerak bersama, serta berkontribusi mewujudkan visi dan tujuan organisasi, yaitu “tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.

Terkait dengan paradoks independensi tentang kemandirian ‘Aisyiyah dalam kajian sosiologi, sebagaimana Luhmann mendefinisikan apa yang dimaksud kompleksitas (*complexity*) dengan dua konsep, yakni antara sistem yang saling terkait dengan elemen-elemen atau sistem-sistem di sekitarnya, dan keterkaitan tersebut tidak lagi menjadi signifikan. Dalam kajian teori-teori informatika, kompleksitas sistem tidak lagi diteropong melalui keterkaitannya dengan sistem ataupun dengan lingkungan (sesuatu yang di luar sistem), melainkan dengan keseluruhan sistem itu sendiri. Dalam posisi paradoks (mendua), di satu sisi ‘Aisyiyah adalah sistem otonom dalam mengelola amal usaha, namun di sisi lain, ‘Aisyiyah merupakan bagian dari Muhammadiyah dari waktu ke waktu sehingga tetap eksis dan mandiri.

Kompleksitas selalu membutuhkan pemilahan untuk dapat dimengerti, dan pemilahan seringkali menciptakan reduksi, yaitu reduksi kompleksitas melalui pembedaan. Dalam hal ini, Luhmann menyebut pembedaan tersebut sebagai ‘pembedaan kompleksitas’ antara sistem di satu sisi, dan lingkungan di sisi lain. Dengan demikian, kemampuan untuk mereduksi kompleksitas dapat dianggap sebagai mekanisme perlindungan diri (*defense mechanism*) dari sistem

tersebut.Reduksi juga memungkinkan sistem untuk mengatur dimensi internalnya sendiri, sehingga kompleksitas yang tidak tertata dapat diubah menjadi kompleksitas yang tertata (*organized complexity*).Seperti telah disinggung sebelumnya, kompleksitas membutuhkan pemilahan, dan pemilahan tentu menyediakan kemungkinan-kemungkinan pembedaan, dan kemungkinan itu tentunya mengandaikan adanya resiko.

Dengan demikian, realitas yang berlangsung di ‘Aisyiyah sejak awal didirikan hingga sekarang ternyata relevan dengan apa yang dijelaskan oleh Luhmann tentang kompleksitas sebuah sistem dalam kondisi paradoks, yaitu kemungkinan selalu mengandaikan adanya resiko (*risk*). Pilihan yang tidak tepat dari berbagai kemungkinan akan membuat sistem hancur. Tantangan terberatnya tentu saja adalah sulitnya memberikan definisi-definisi yang koheren terhadap kompleksitas sistem tersebut.Kompleksitas tidak pernah sungguh-sungguh dapat diamati dan dipilah-pilah. Setiap upaya memahami kompleksitas selalu mengikutsertakan proses reduksi, yakni mengubah kompleksitas yang tidak terorganisir menjadi teorganisir.

Proses reduksi yang dimaksud Luhmann dalam kompleksitas sistem relevan dengan proses perubahan yang dilakukan ‘Aisyiyah, yaitu dengan perhitungan-perhitungan yang bersifat strategis. Dalam hal ini, organisasi ‘Aisyiyah adalah subsistem yang otonom melihat potensi perkembangan dari kompleksitas sistem yang lebih besar, yaitu Muhammadiyah.Artinya, semua anggota dan pengurus harus siap menerima bahwa, ‘Aisyiyah adalah bagian dari Muhammadiyah, karena terikat oleh visi dan tujuan bersama.

Dalam kemandirian 'Aisyiyah terkait dengan autopoiesis ditinjau dari aspek sosiologis Luhmann banyak dipengaruhi oleh Humberto Maturana, terutama pada tesisnya bahwa sistem memiliki ciri yang bersifat autopoiesis. Suatu sistem, demikian Maturana, terdiri dari jaringan-jaringan produksi dari komponen-komponen, yang melalui interaksinya, membentuk dan menyadari jaringan yang memproduksi mereka, di dalam ruang dimana mereka ada, batas-batas jaringan sebagai komponen yang berpartisipasi di dalam perwujudan jaringan tersebut. Yang membedakan sistem yang bersifat autopoiesis dengan sistem tertutup adalah karakter rekursifitasnya, yakni bahwa mereka tidak hanya memproduksi dan mengganti sendiri struktur-struktur mereka, tetapi semua yang digunakan sebagai unit di dalam sistem diproduksi juga sebagai unit di dalam sistem itu sendiri. Demikian 'Aisyiyah Kota Makassar terus berkembang dan mandiri karena sistem autopoiesis yang dilakukan dari waktu ke waktu, dari fase ke fase selalu memproduksi dirinya sendiri seiring dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan lingkungan eksternalnya, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara.

Refleksi tentang teori sistem sebenarnya dapat dirunut dalam sejarah filsafat itu sendiri. Ide tentang adanya sistem yang mampu mengatur dan mereproduksi dirinya sendiri memiliki logika internal, bahwa adanya tujuan final dari seluruh gerak alam. Semua refleksi semacam ini dapat ditemukan di dalam metafisika Aristoteles, *Monadology* tulisan Leibniz, dan *Critique of Judgment*-nya Immanuel Kant. Dengan munculnya dominasi kaum borjuis pada abad ke-18, hampir semua teori politik, ekonomi, dan etika mulai untuk menyelidiki bagaimana relasi antara bagian dengan

keseluruhan, yakni tentang bagaimana individu-individu sebagai bagian dari komunitas akhirnya dapat membentuk komunitas bersama tanpa saling menghancurkan. Refleksi ini banyak dikenal sebagai problem tatanan. Sampai sekarang, problematika tatanan tetap berada di dalam selubung misteri yang hanya dapat dipikirkan secara spekulatif dalam perdebatan panjang, dan tidak pernah berakhir. Tapi 'Aisyiyah memposisikan diri sebagai organisasi dakwah yang memiliki visi yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka perdebatan serupa, teori sistem banyak dipengaruhi terjadinya dua perubahan paradigma yang membuat problematika tatanan tidak lagi sekedar spekulasi metafisika, tetapi menjadi bagian dari penelitian saintifik. *Pertama*, perubahan paradigma yang dimotori oleh Ludwig von Bertalanffy, seorang biofisiolog dari Jerman pada pertengahan dekade 1950-an. Dalam hal ini, mengganti pembedaan antara bagian dan keseluruhan dengan pembedaan antara sistem dan lingkungan. Dengan pembedaan ini memungkinkan refleksi problematika tatanan berelasi dengan analisis dari disiplin ilmu lainnya. Misalnya; sibernetik, teori informasi, dan ilmu komputer. *Kedua*, perubahan paradigma ditandai dengan perubahan distingsi antara sistem dengan lingkungan menjadi suatu teori tentang sistem yang dapat membentuk dan mereproduksi dirinya sendiri.

Prinsip pengaturan diri ini disebut oleh Heinz von Foerster sebagai tatanan yang muncul dari kegaduhan. Penelitian tentang hal ini berkembang menjadi sebuah kajian multidisipliner yang melibatkan fisika, sibernetika, dan biologi. Jika para ahli dapat menemukan kesamaan pola di dalam gerakan atom-atom yang berkumpul, sel-

sel biologis, pola pergantian cuaca, terciptanya koloni-koloni serangga, serta pergerakan pasar, maka mereka dapat merumuskan sebuah teori yang mampu mengkonseptualisasi semua kesamaan itu tanpa menghilangkan perbedaan antara fenomena yang beragam tersebut.

Luhmann ikut ambil bagian di dalam proyek multidisipliner ini, tetapi setelah melalui penelitian yang terus menerus, proyek ini pun mengalami halangan yang besar, terutama dari argumen yang menyatakan bahwa ada perbedaan yang bersifat ontologis antara realitas kehidupan sosial manusia dengan realitas non sosialitas manusia. Oleh karena itu, pendekatan untuk memahaminya pun juga berbeda. Setiap upaya mereduksi realitas sosial ke dalam sistem dan fungsi selalu dicurigai sebagai timpang baik etis maupun politis. Pendekatan yang bersifat autopoiesis terhadap masyarakat mendapat tantangan baru. Di satu sisi, pertanyaan tentang pelestarian dan reproduksi sistem beralih menjadi pertanyaan tentang bagaimana struktur sistemik dapat digambarkan sebagai tatanan yang timbul dari kekacauan.

Bertitik tolak dari perkembangan ini, Luhmann menolak teori Parsons yang bersifat fungsionalis. Hal ini karena konsep autopoiesis tidak dapat diterapkan untuk menganalisis realitas sosial. Alasannya, jika sudah sepakat bahwa masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang dibentuk oleh elemen-elemen organisme yang hidup (manusia), maka tidak mungkin menjelaskan proses reproduksi sistem sosial tersebut tanpa menjelaskan elemen-elemen pembentuknya. Dengan manuver teoritis yang brilian, Luhmann mengajukan solusi atas dilema ini dengan mengkonseptualisasi ulang realitas sosial yang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan penerapan

konsep autopoiesis. Ia berpendapat bahwa premis Aristoteles yang menyatakan bahwa sistem sosial analog dengan organisme hidup (*living organism*) haruslah dilepaskan. Sistem sosial jangan dipikirkan sebagai sebuah organisme hidup, melainkan sebagai sistem yang terdiri dari komunikasi-komunikasi elemen terdasarnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu, dan membentuk tatanan yang muncul dari kompleksitas masyarakat yang bersifat temporal.

Karakter temporalitas tidak hanya dapat diterapkan di dalam analisis tentang sistem sosial, tetapi juga dapat diobservasi pada proses reproduksi sel-sel tubuh, sel-sel otak, serta perkembangan sistem psikis manusia. Akan tetapi, pola autopoiesis, temporalitas, dan kompleksitas sistem sosial tentu berbeda dengan sistem-sistem biologis. Proses reproduksi sel terjadi pada proses-proses kimia. Otak berfungsi juga dengan berdasarkan impuls-impuls neurofisiologis, sedangkan sistem sosial berfungsi dan berkembang dengan menjadikan kesadaran sebagai elemen dasarnya. Kesadaran itu terlihat di dalam proses komunikasi (*Social Systems Communications*), dan proses komunikasi membutuhkan makna untuk proses reproduksinya.

Konsep makna memiliki peranan sentral dalam teori sistem Luhmann. Konsep ini digunakan tidak dalam oposisi dengan “ketidakbermaknaaan” (*meaninglessness*), seperti dalam tradisi-tradisi hermeneutika, melainkan dalam arti fenomenologis (*phenomenological sense*). Artinya, konsep makna merupakan sebuah kerangka kemungkinan yang hadir dalam semua bentuk sistem sosial. Dengan kata lain, makna merupakan kondisi-kondisi yang memungkinkan sistem sosial terbentuk dan beroperasi. Luhmann tidak dapat memaksudkan hal ini sebagai kesadaran diri

transcendental, yang menurut Kant, menjadi kondisi yang paling mendasar bagi terciptanya pengetahuan, melainkan sebagai kondisi kemungkinan yang terlebih dahulu harus dipenuhi bagi gerak empiris dari sistem sosial yang memiliki karakter autopoiesis dan mereproduksi diri sendiri dari period eke periode.

Dengan demikian, memandang 'Aisyiyah sebagai sistem berarti sama halnya memandang masyarakat sebagai proses-proses komunikasi makna yang membentuk sebuah realitas sosial yang bersifat kompleks, temporal, dan autopoiesis. Tesis ini tentunya mengubah seluruh konsepsi mengenai hakekat dari tindakan sosial individu, peran bahasa, dan status subyek di dalam analisis sosiologi. Dalam hal ini, Luhmann menggabungkan analisis fungsionalis di dalam sosiologi dengan pendekatan fenomenologis di dalam filsafat yang dirumuskan oleh Husserl, untuk mendekatkan dua tradisi ini membuka ruang dimana berbagai disiplin tradisional dapat dipikirkan kembali dengan cara yang dapat membawa tradisi berpikir humaniora melampaui hermeneutika, dan menuju era informasi.

Dalam hal keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar ditinjau dari sudut pandang sosiologi terkait dengan pandangan, sebagaimana telah dijelaskan oleh Brinkerhoff dan Goldsmith, bahwa keberlanjutan organisasi atau lembaga oleh para analis sering kali mengungkapkan alasan tertentu. Lembaga merupakan sistem yang dibangun dari sebuah ide. Ada beberapa alasan yang dimaksud, antara lain: (1) bahwa teori sistem merupakan hal yang cukup umum untuk menutupi keberlanjutan permasalahan dalam lembaga pada semua jenis, mulai dari tanda atau kode yang formal sampai kepada yang tidak formal untuk dilakukan; (2) bahwa teori sistem

secara simultan ditentukan oleh proses internal dan hubungan diantara sistem dan lingkungannya sendiri. Hal inilah kemudian mendorong untuk memandang secara luas berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, teknis dan lainnya yang mempengaruhi keberlanjutan, dan (3) bahwa teori sistem menekankan pada hubungan diantara unsur-unsur yang terpisahkan, dan memungkinkan untuk memunculkan aspek-aspek agro lingkungan, ekonomi dan aspek manajerial dari keberlanjutan tersebut.

Lebih lanjut Brinkerhoff & Goldsmith menjelaskan bahwa, teori sistem menyajikan pedoman tentang bagaimana menggambarkan hubungan antara proses sistem internal dan eksternal. Teori kemungkinan menjadi pengganti kesenjangan ini. Penyajian teori ini agar lembaga-lembaga dapat mencapai hubungan yang lebih baik. Selain itu, alasan penggunaan teori kemungkinan adalah untuk menghindari tendensi, perluasan referensi pada keberlanjutan lembaga yang direkomendasikan secara luas. Dengan demikian penjelasan ini relevan dengan pola keberlanjutan yang dikembangkan oleh 'Aisyiyah dalam mengelola unit-unit organisasi (amal usaha) sebagai suatu kesatuan (subsistem) dalam keberagaman dan kompleksitas sistem untuk memenuhi tuntutan kebutuhan lingkungan eksternalnya, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku melalui input, proses, dan output.

Konsep keberlanjutan yang dikembangkan dalam organisasi 'Aisyiyah, ternyata relevan dengan pandangan para ahli sosiologi terkait dengan upaya mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku organisasi umumnya berasal dari teori sistem. Sebagai contoh, ahli biolog Ludwig von Bertalanffy menyatakan bahwa teori sistem dianalogikan dengan sistem yang ada pada organisme. Organisme sel itu terdiri

atas sel-sel, dan sel-sel membentuk suatu molekul. Tiap bagian yang ada membentuk sistem terintegrasi dan terdiri dari struktur yang saling terkait dan bekerja secara harmonis. Tiap molekul tahu tugasnya masing-masing dan bekerjasama serta memenuhi aturan yang ada.

Hukum keteraturan merupakan konsep yang bersifat menyeluruh. Ide tentang keteraturan adalah ide dasar dalam memahami dan menganalisis situasi yang kompleks. Dengan demikian, teori sistem memiliki dua konsep dasar yaitu: pertama, konsep subsistem yang melihat hubungan antar bagian sebagai hubungan sebab akibat. Konsep kedua memandang bahwa sebab jamak sebagai hubungan yang saling berkaitan yakni tiap bagian merupakan kompleks (kumpulan) yang tiap faktornya saling berkaitan.

Dalam konteks keberlanjutan, ada dua pola sistem yakni *open system* (sistem terbuka) dan *closed system* (sistem tertutup) dalam hubungan organisasi dengan lingkungan eksternal. Suatu sistem adalah “terbuka”, jika mempunyai transaksi dengan lingkungan mana ia berada. Transaksi antara suatu organisasi dengan lingkungannya mencakup “input” dan “output”. Input biasanya dalam bentuk informasi, energi, uang, pegawai, material dan perlengkapan yang diterima organisasi dari lingkungannya. Output organisasi pada lingkungannya dapat berbentuk macam-macam tergantung pada sifat organisasi. Demikian halnya yang dikembangkan ‘Aisyiyah adalah sistem terbuka (*open system*) dalam mengelola unit-unit (amal usaha).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa, hubungan pada tiap aspek input, proses, dan output yang ada di tiap-tiap unit dengan lingkungan yang lebih luas (masyarakat dan pemerintah) merupakan suatu interaksi yang membentuk siklus yang tiada akhir. Konsep input, proses, dan output sering kali disebut sebagai model linear, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana sistem dapat dijelaskan dalam konteks dunia nyata. Dalam hal ini, suatu teori yang beranjak dari konsep umum ke khusus yang tampak logis, rasional dan teratur berupaya untuk mencari jawaban terhadap upaya menghubungkan nilai input, proses, dan nilai output sehingga menghasilkan efisiensi biaya. Dalam konteks 'Aisyiyah sebagai organisasi sosial yang bergerak di bidang dakwah keagamaan dan kemasyarakatan, seperti sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan, berupaya mewujudkan visi dan tujuan yang telah ditentukan dengan keyakinan, komitmen, dan prinsip yang dipahami bersama.

Sejalan dengan penjelasan di atas, bahwa keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah terkait dengan teori sistem dalam menganalisis program kerja dan kebijakan organisasi sesuai dengan pandangan Brinkerhoff dan Goldsmith, antara lain: (1) sistem teori diciptakan dan berlanjut untuk mencapai tujuan umum yang lebih baik daripada tindakan individu; (2) sistem teori dapat mengembangkan subsistem, mencapai tujuan organisasi, dan peningkatan efisiensi; (3) sistem teori menganut pola otoritas dan hubungan komunikasi untuk terhubung dan terintegrasi secara khusus dari kegiatan subsistem, dan (4) sistem teori tergantung pada transaksi dengan unsur luar dan lingkungan untuk menyiapkan input, memahami proses, dan mendapatkan output yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem.

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan keberlanjutan organisasi sebagai sistem, ada beberapa definisi kunci yang perlu dipahami sebagai berikut: (a) Input ialah berupa sumberdaya, bahan mentah, uang, manusia, informasi dan pengetahuan yang dimiliki organisasi dan lingkungannya, serta kontribusi untuk menciptakan output; (b) proses adalah rangkaian kegiatan atau program sesuai dengan kebutuhan input yang diterima dari lingkungan, dan (c) output adalah berupa produk atau jasa, layanan, program, dan ide yang dihasilkan dari tindakan organisasi. Selain itu, keberlanjutan sebuah organisasi juga ditentukan teknologi meliputi mental, fisik dan mekanis untuk mentransformasikan sumberdaya ke dalam output.

Lingkungan, terdiri dari lingkungan pekerjaan yang meliputi organisasi eksternal dan kondisi yang mempengaruhi suatu operasi utama dari organisasi dan teknologi, seperti klien, pesaing, pasar dan lingkungan umum meliputi lembaga dan kondisi yang mempengaruhi keberlanjutan organisasi. Kemudian maksud-strategi, yakni tujuan, rencana dari pembuat keputusan untuk dominasi organisasi, dan yang tidak kalah pentingnya ialah memahami budaya, norma, kepercayaan, nilai kehidupan berorganisasi, dan struktur hubungan semua anggota dan unit-unit yang lebih besar.

Mengenai kepatuhan 'Aisyiyah sebagai organisasi yang berkembang dan berkelanjutan sebagaimana dijelaskan oleh Etzioni dalam Liliweri bahwa, sebuah organisasi dapat berjalan karena di dalamnya ada kepatuhan, baik oleh pengurus maupun anggota. Kepatuhan dalam organisasi dapat diukur dari power dan keterlibatan. Power pada pengurus dan keterlibatan pada anggota. Sehubungan dengan hal itu, Etzioni menyusun skema klasifikasi organisasi berdasarkan sifat-sifat perilaku

(*compliance*). Etzioni memasukkan *compliance* sebagai sikap yang umumnya dimiliki sebagian besar unit-unit sosial bahkan masyarakat. Menurutnya, perilaku (*compliance*) adalah unsur utama yang menata hubungan antara mereka yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dengan pihak yang dikuasai dan diwenangi.

Dalam konteks sosiologi, power yang dimaksud adalah berdasarkan koersif, remuneratif, dan normatif, sedangkan keterlibatan ialah berdasarkan prinsip alienatif, kalkulatif, dan moral. Karena itu, Etzioni menjelaskan bahwa, dalam semua organisasi, para anggota selalu dihubungkan dengan anggota lain melalui hubungan hierarki yang menyebabkan para anggota mempunyai kedudukan lebih tinggi diberi kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar. Kekuasaan dan kewenangan tersebut diatur dan dilegitimasi. Demikian pula, kedudukan selalu memiliki kuasa dan wewenang dalam menata hubungan atasan dengan bawahan.

Apabila para anggota (bawahan) tetap bertindak sebagai partisipan yang rendah, maka anggota tersebut akan merasa terasing atau ditinggalkan. Sebaliknya, jika para anggota merasa tidak ditinggalkan maka akan terlibat di dalam organisasi, sekaligus merasa memiliki organisasi. Dengan demikian, setiap bawahan selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang dapat diperoleh melalui hubungan yang tercipta dalam organisasi. Kondisi ini tidak ditemui dalam organisasi 'Aisyiyah, karena kepatuhan yang tercipta dan berkembang dalam organisasi ini ialah atas dasar moral, bukan remunerasi, honor (insentif), atau paksaan, tetapi rasa memiliki bersama semua amal usaha dalam berkontribusi dengan prinsip "amar makruf nahi munkar".

Secara umum dapat ditegaskan bahwa, realitas kepatuhan anggota kepada ‘Aisyiyah dan kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah adalah relevan dengan penjelasan teori kepatuhan oleh Etzioni yang menawarkan sintesis sistem organisasi untuk mengamankan kepatuhan anggota. Hal ini, sesuai dengan persyaratan dan mengikuti standar perilaku yang ditetapkan, berorientasi pada tujuan, diarahkan kinerja memerlukan kepatuhan anggota. Namun, fakta menunjukkan bahwa penyimpangan dari standar terjadi karena kelemahan dalam komitmen anggota. Sistem kontrol yang diberikan anggota organisasi, baik manajer maupun anggota lain. Dalam kepatuhan dipastikan dengan struktur kontrol dan wewenang organisasi, hierarki formal otoritas, pengawasan, definisi pekerjaan, dan prosedur kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu, sistem koersif ialah mencerminkan kemampuan organisasi menerapkan fisik, kekuatan menghambat dan sakit untuk non-compliance. Misalnya organisasi kustodian, sistem kontrol memungkinkan penarikan anggota dan hak kebebasan. Keterlibatan dengan organisasi yang berasal dari sistem kontrol koersif mungkin terasing, paling pasif dengan perasaan negatif dan disassociation. Sistem ini menawarkan berbagai macam imbalan material atau non-material untuk mengamankan kepatuhan anggota. Dalam hal ini, keanggotaan didasarkan pada kontrak dengan organisasi dan tawar-menawar atas hadiah yang diinginkan dengan imbalan kepatuhan, loyalitas, dan kinerja semua unit-unit yang saling terkait.

Selanjutnya Istilah *Compliance* yang di-Indonesiakan dalam penelitian ini adalah “Kepatuhan”, hingga sekarang belum ditemukan makna yang lebih tepat

(bervariasi). Istilah kepatuhan sering diasumsikan dengan perawatan yang direkomendasikan (diresepkan) seorang dokter kepada pasien, untuk selalu patuh terhadap nasehat dokter. Dengan kata lain, konsep kepatuhan lebih mungkin ketika ada kesepakatan dan kepercayaan mengenai diagnosa dan prognosis. Penelitian di psikiatri, psikologi, dan sosiologi menyediakan banyak penjelasan untuk variasi yang sesuai. Dalam psikiatri, masalah klinis seperti penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol kadang-kadang digunakan untuk menjelaskan ketidakpatuhan. Pasien juga dapat menghentikan minum obat karena efek samping yang tidak diinginkan. Demikian kepatuhan dalam 'Aisyiyah terus berlangsung karena berdasarkan "normatif moral".

Dalam psikologi dan sosiologi, kesehatan, kepercayaan, dan perilaku terkait dengan keluarga dan pekerjaan, dapat meningkatkan atau membatasi kepatuhan. Jika anggota keluarga mendukung kepatuhan pengobatan, dan individu percaya manfaat obat itu, maka kepatuhan dapat ditingkatkan. Jika seseorang tidak melanjutkan pengobatan akan membuat dia mengantuk dan mempengaruhi karya, maka kepatuhan dapat dikurangi. Orang-orang yang memiliki akses terbatas atau kepercayaan pada dokter, ilmu kedokteran, dan orang yang menghalangi mereka dari beberapa perawatan medis, cenderung untuk mematuhi rekomendasi pengobatan.

Sejumlah teori yang mencoba untuk menangkap jenis atau sumber motivasi mempengaruhi anggota organisasi. Misalnya; dalam membahas penyebab internal dan eksternal perilaku, deCharms menyarankan dikotomi ekstrinsik motivasi intrinsik dibandingkan untuk mengkarakterisasi lokus yang berbeda dari kausalitas. Perilaku

intrinsik termotivasi dan mewakili kausalitas internal, sedangkan perilaku yang disebabkan kekuatan eksternal dikatakan mewakili kausalitas eksternal. Kemudian dijelaskan efek imbalan ekstrinsik pada motivasi intrinsik dan dalam melakukannya, mencoba menumpahkan beberapa lampu pada arti motivasi intrinsik. Perilaku intrinsik termotivasi jatuh ke dalam dua kategori, yaitu: (a) meliputi perilaku yang individu terlibat dalam mencari situasi yang menantang. Tantangan-tantangan ini merupakan keganjilan antara stimuli dan standar perbandingan; (b) mencakup perilaku yang bertujuan mengurangi keganjilan ini, yaitu mengatasi tantangan.

E. Dalil-dalil Hasil Penelitian

Berdasarkan paparan sebelumnya tentang kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar, maka beberapa proposisi yang terkait dengan konsep utama yang dibahas berupa dalil-dalil hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kemandirian sebuah organisasi ditentukan oleh kemampuan mereproduksi dirinya seiring dengan tuntutan lingkungan eksternalnya dan menghasilkan unsur-unsur atau unit-unit untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan strategisnya.

Proposisi atau dalil tersebut di atas, penjabarannya di 'Aisyiyah dapat dilihat pada proses pembaharuan yang dilakukan oleh unit-unit organisasi (Amal Usaha 'Aisyiyah) secara terus menerus (mereproduksi diri sendiri) sesuai dengan tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan strategisnya, yaitu lingkungan strategis terdekat Muhammadiyah dan lingkungan strategis yang lebih luas masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, 'Aisyiyah melakukan perbaikan dan penyesuaian dari fase

ke fase (periode ke periode) terhadap unit-unit amal usaha 'Aisyiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.

Kemandirian 'Aisyiyah berdasarkan fakta empiris menunjukkan bahwa, sebagai organisasi dakwah keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan telah melakukan perubahan dan penyesuaian struktural bidang pendidikan, sebelumnya menggunakan Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, berubah menjadi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Demikian pula perubahan struktural bidang lain seperti, Pembinaan Kesejahteraan Umat (PKU); sekarang berubah Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup, dan Majelis Kesejahteraan Sosial. Majelis Hukum dan HAM, sebelumnya merupakan bagian dari majelis lain.

2. Sebuah organisasi dikatakan mandiri karena adanya otonomi pada dirinya dan di sisi lain ada keterkaitan dengan struktur lain yang lebih besar.

'Aisyiyah merupakan sistem yang otonom dalam mengambil kebijakan dan keputusan secara otonom untuk menggerakkan unit-unit organisasi (amal usaha) di satu sisi, namun di sisi lain 'Aisyiyah adalah bahagian dari sistem yang lebih besar, yaitu Muhammadiyah. Dalam hal ini, untuk menjaga dan memelihara kemandirian tersebut, 'Aisyiyah tetap berada dalam posisi mendua (dua eksistensi), yaitu di satu sisi merupakan organisasi otonom dalam melaksanakan program-program kerja secara mandiri, tetapi di sisi lain terikat atau bagian yang tidak terpisahkan dengan organisasi induk (Muhammadiyah).

'Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah memiliki jaringan struktural yang sangat luas dalam menunjang gerakan dakwah Islam. Jaringan struktural yang

tersebar dan berjenjang dalam beberapa level mempunyai kewenangan dan wilayah kerja sesuai dengan kebijakan Muhammadiyah. Jaringan tersebut tersebar di seluruh daerah, ini merupakan potensi yang sangat besar untuk membangun umat menuju masyarakat utama dalam bentuk sinergi dan jaringan yang kuat di beberapa bidang. Jaringan struktural merupakan kontribusi 'Aisyiyah yang besar sebagai sistem yang otonom dalam mengakomodasikan warga dalam menyalurkan aspirasinya, sekaligus mengkoordinasikan berbagai gerakan melalui aktivitas dakwah keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan sebagainya.

3. Keberlanjutan organisasi ditentukan oleh visi atau perinsip dasar yang menjadi medan magnet yang mengikat, menggerakkan dan menjadi pegangan semua unsur dalam organisasi untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Eksistensi dan kemandirian 'Aisyiyah sejak didirikan hingga menjelang satu abad, karena diikat oleh visi organisasi dan prinsip dasar yang kuat, serta dipatuhi oleh semua pengurus dan anggota. Visi 'Aisyiyah sekaligus visi Muhammadiyah adalah "Tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya", sedangkan prinsip dasar tetap dipegang teguh adalah "Amar ma'ruf nahi munkar". Hal inilah yang menjadi medan magnet yang mengikat dan menggerakkan semua pengurus dan anggota untuk bergerak bersama, berkontribusi melalui program kerja yang telah disepakati dalam mewujudkan visi organisasi tersebut.

Dengan demikian, keberlanjutan 'Aisyiyah sejak dibentuk hingga sekarang karena semua pengurus dan anggota dalam merealisasikan program kerja yang telah

ditentukan tetap dalam satu komitmen, satu prinsip, dan satu tujuan yang dirangkul dalam satu visi sehingga menuntun semua unsur dalam organisasi bertindak bersama untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, gerakan dakwah yang dilakukannya telah membentuk akhlak, kepribadian, dan kecerdasan masyarakat sebagai bagian dari visi ideal membentuk masyarakat madani, yakni masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

4. Keberlanjutan sebuah organisasi dipengaruhi oleh sistem yang bersiklus melalui input, proses, dan output sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungan eksternalnya.

Keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah sebagai sistem yang otonom terdiri atas unit-unit yang utuh menerima input dalam merespon tuntutan dari lingkungan untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat menghasilkan output (hasil) yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian, di balik kemandirian 'Aisyiyah sebagai sistem yang otonom, juga dapat memelihara keberlanjutan organisasi karena semua komponen atau unit-unit organisasi berkembang melalui ketiga aspek yang dimaksud, yaitu input, proses, dan output. Dengan demikian, unit-unit organisasi (amal usaha) yang mengelola bidang pendidikan, dilaksanakan Majelis Dikdasmen dalam menerima input berupa calon siswa dari lingkungan, kemudian diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian halnya, majelis lain seperti Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Pembinaan

Kader, serta Majelis Hukum dan HAM, melaksanakan hal yang sama sehingga ‘Aisyiyah tetap berkembang dan berkelanjutan.

Keberlanjutan ‘Aisyiyah karena mampu merespon lingkungan strategisnya, selain merupakan karunia Allah yang diraih atas kekuatan yang lahir dari keihlasan, komitmen, potensi, dan partisipasi semua warga sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar, serta tajdid sehingga selalu menunjukkan semangat tinggi untuk berkiprah konstruktif dalam kehidupan. Dengan demikian, keberlanjutan merupakan daya kontigensi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan strategis serta kepercayaan dan dukungan berbagai pihak yang memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan visi dan tujuan organisasi.

5. Adanya kepatuhan yang ditunjukkan oleh pengurus dan anggota dapat menunjang kemandirian dan keberlanjutan sebuah organisasi.

Kepatuhan pengurus dan anggota ‘Aisyiyah dalam mengantisipasi dinamika kemandirian organisasi semata-mata berlandaskan moral dalam merintis amal usaha. Dalam hal ini, keterlibatan anggota dan pengurus ‘Aisyiyah mengelola organisasi lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan moral. Keputusan Ketua PDA Kota Makassar ketika itu, agar pendidikan dini untuk anak-anak dijadikan dasar untuk mendirikan Taman Kanan-Kanak pertama di Kota Makassar. Keputusan tersebut karena pertimbangan moral, sehingga keterlibatan anggota juga karena pertimbangan moral.

Kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah karena atas dasar moral. Kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah dapat dilihat melalui berbagai gerakan

sejak Siswa Praja Wanita Muhammadiyah yang terus berusaha untuk menanamkan dan mensosialisasikan gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar; memberantas Tahayul, Bid'ah, Churafat (TBC); dan membangun akhlakul karimah di kalangan generasi muda putri Islam. Kesadaran sosio-kultural para pemuka Muhammadiyah ini didasari oleh fenomena masyarakat Indonesia, yang cenderung memelihara TBC. Marginalisasi ajaran Islam ini dikarenakan oleh proses akulturasi Islam dengan budaya setempat yang tidak segera direformasi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dinamika kemandirian 'Aisyiyah Kota Makassar dalam berbagai fase perkembangan menunjukkan bahwa, posisi 'Aisyiyah tidak hanya karena otonomi dirinya melainkan ada keterkaitan dengan struktur lain yang lebih besar, yaitu Muhammadiyah. Kemandirian yang dimaksud, ditinjau dari tiga konsep dasar, medanvisional, paradoks independensi, dan autopoiesis.

1. Dilihat dari aspek medan visional, warga 'Aisyiyah telah bergerak dalam arah yang sama dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan yang sama, yaitu "tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya" sebagai visi 'Aisyiyah sekaligus visi Muhammadiyah.
2. Dilihat dari aspek paradoks Independensi, posisi 'Aisyiyah berada dalam dua eksistensi, di satu sisi dia otonom, dalam merumuskan kebijakan-kebijakan, mengambil keputusan-keputusan untuk diaplikasikan secara otonom pula. Namun, di sisi lain 'Aisyiyah merupakan bagian dari Muhammadiyah dimana keputusan-keputusan yang telah diambil secara otonom bisa atau dapat diintervensi oleh Muhammadiyah sebagai organisasi induk (sistem yang lebih besar), jika tidak sesuai atau tidak sejalan dengan visi.
3. Dilihat dari aspek autopoiesis, ditemukan 'Aisyiyah selalu memperbaharui diri (memproduksi) dirinya sendiri sesuai dengan tuntutan lingkungan eksternal dan

menghasilkan unsur-unsur atau unit-unitnya sendiri untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan strategisnya, dalam hal ini Muhammadiyah, Pemerintah, dan masyarakat secara luas. Dengan demikian, 'Aisyiyah senantiasa melakukan perubahan-perubahan pola interaksi dan komunikasi terhadap lingkungannya (mereproduksi) terhadap unit-unit organisasi yang dimiliki dari period eke periode terus menerus dan berkelanjutan, sehingga tetap eksis dan bertahan hingga sekarang.

Sebagai sistem social, kemandirian 'Aisyiyah juga bermakna sebagai organisasi diri (*sef-organization*) atau manajemen diri (*self-management*). Dengan kata lain, unsur-unsur tersebut saling berinteraksi dan melengkapi sehingga muncul suatu keseimbangan. Dewasa ini, pencarian pola yang tepat, agar interaksi antar unsur selalu mencapai keseimbangan, menjadi sangat penting. Setiap keseimbangan yang dicapai akan menjadi landasan bagi perkembangan berikutnya. Proses kemandirian adalah proses yang berjalan tanpa ujung.

Dalam konteks pembangunan di berbagai bidang, sikap kemandirian telah dijadikan tolok ukur keberhasilan, sebagaimana 'Aisyiyah dalam setiap fase perkembangannya telah menunjukkan kemandirian dari waktu ke waktusehingga dia berlanjut dan berkembang sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan. Fase-fase perkembangan 'Aisyiyah merupakan suatu proses perjalanan panjang dalam mewujudkan visi organisasi.

Keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah dalam merespons dinamika yang terus berubah, terutama perkembangan bangsa saat ini memprihatinkan. Dalam hal ini

'Aisyiyah sebagai organisasi otonom yang bergerak di bidang sosial keagamaan dalam usianya yang relatif lama dan telah menunjukkan kiprahnya dalam memberikan pencerahan, pemberdayaan, kemaslahatan, dan kemajuan terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Keberhasilan dan peran positif 'Aisyiyah tersebut merupakan karunia Allah yang diraih karena kekuatan keihlasan, komitmen, potensi, dan partisipasi organisasi 'Aisyiyah sebagai gerakan dakwah "amar makruf nahi munkar" serta tajdid sehingga selalu menunjukkan semangat yang tinggi untuk berkiprah konstruktif dalam berbagai aspek kehidupan.

Keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar, dapat diukur dari sistem yang dikembangkan dalam unit-unit organisasi (amal usaha) melalui input, proses dan output. Dalam hal ini, 'Aisyiyah sebagai sistem yang utuh dan otonomi dapat menerima input dari lingkungan, yaitu calon murid untuk sekolah; calon pasien untuk rumah sakit; dan calon binaan untuk Panti Asuhan; kemudian diproses sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari lingkungan, sehingga menghasilkan output seperti yang diinginkan.

Input, adalah bahan baku berupa sumber daya atau potensi yang diterima dari lingkungan (masyarakat), dalam hal ini murid atau siswa untuk unit organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang dikelola 'Aisyiyah Kota Makassar sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan.

Proses, adalah pelaksanaan program kegiatan, kebijakan, dan tindakan yang ditempuh semua elemen organisasi ('Aisyiyah) terhadap input yang telah diterima dari lingkungan (masyarakat) sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari input, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Output, adalah hasil yang diharapkan dalam hal ini berupa produk yang dihasilkan dari proses kegiatan atau program kerja yang telah ditentukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, input, proses, dan output adalah rangkaian kegiatan dari sebuah sistem yang saling terkait, untuk mencapai hasil produksi yang optimal berupa jasa pelayanan yang memuaskan, kualitas pendidikan, kesehatan pasien, dan masa depan anak-anak binaan (panti asuhan) yang terjamin.

Dinamika kepatuhan anggota kepada 'Aisyiyah dalam mengelola dan mengembangkan amal usaha adalah normatif-moral, sedangkan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah di balik kemandirian dan keberlanjutan organisasi, diwujudkan dalam bentuk kesadaran kolektif dan komitmen moral semua pengurus dan anggota dalam mengelola serta mengembangkan unit-unit amal usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan anggota dan pengurus kepada 'Aisyiyah dilihat pada kesadaran kolektif dan komitmen moral yang dibangun di atas pondasi "amar makruf nahi munkar" untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khaerat), dan keikhlasan dalam berorganisasi, sehingga kesulitan apapun dihadapi bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dengan demikian, kekuasaan yang diaplikasikan adalah normatif dan keterlibatan yang diaplikasikan adalah moral, sehingga kepatuhan anggota kepada pengurus 'Aisyiyah dan kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah berciri normatif – moral. Ciri kepatuhan koersif – alienatif dan remuneratif – kalkulatif kurang teraplikasikan pada organisasi 'Aisyiyah dan hubungan 'Aisyiyah dengan Muhammadiyah.

Dinamika kepatuhan anggota kepada 'Aisyiyah dan kepatuhan kepada Muhammadiyah adalah bersifat normatif moral, yang mengikat pengurus dan semua anggota. Dengan kata lain, model kepatuhan yang dianut bukan sistem koersif yang mencerminkan kemampuan organisasi menerapkan fisik, kekuatan menghambat dan sakit untuk *non-compliance*. Selain itu, sistem kontrol memungkinkan penarikan anggota dan hak kebebasan. Keterlibatan dengan organisasi yang berasal dari sistem kontrol koersif mungkin terasing, pasif dengan perasaan negatif dan *disassociation*. Sistem ini menawarkan berbagai macam imbalan material untuk mengamankan kepatuhan anggota. Dalam hal ini, keanggotaan didasarkan pada kontrak dengan organisasi dan tawar-menawar atas hadiah yang diinginkan dengan imbalan kepatuhan, loyalitas, dan kinerja semua unit-unit yang saling terkait. Dengan demikian, model kepatuhan anggota kepada 'Aisyiyah dan kepatuhan Aisyiyah kepada Muhammadiyah, adalah “normatif moral”, bukan remuneratif, bukan insentif, dan bukan paksaan.

1. Power yang bekerja di 'Aisyiyah ialah kekuasaan yang sifatnya normatif. Dalam hal ini, kekuasaan yang diaplikasikan dalam organisasi 'Aisyiyah terhadap unit-

unit organisasi (amal usaha) adalah normatif. Oleh karena itu, power yang berlaku dalam ‘Aisyiyah memiliki kuasa dan wewenang dengan dasar pertimbangan normatif – moral.

2. Keterlibatan, bahwa di ‘Aisyiyah lebih banyak keterlibatan moral, alienatif, dan kalkulatif. Dengan demikian, keterlibatan anggota dan pengurus di dalam mengelola unit-unit organisasi (amal usaha ‘Aisyiyah) dominan moral – normatif. Dengan kata lain, kekuasaan pengurus dalam organisasi ‘Aisyiyah adalah bersifat normatif dan keterlibatan anggota dalam unit-unit organisasi semata-mata karena pertimbangan moral.
3. Kepatuhan, adalah hubungan yang bersifat *kongruen*, hubungan yang demikian dipandang lebih efektif untuk diterapkan dalam setiap organisasi termasuk ‘Aisyiyah. Dalam hal ini, kepatuhan hubungan yang kongruen akan mengakibatkan organisasi sebagai unit sosial (amal usaha) dapat mempertahankan diri dari tekanan internal maupun eksternal, dalam hal ini adalah Muhammadiyah dan Pemerintah, sehingga ‘Aisyiyah tetap eksis (bertahan), komitmen, mandiri, dan berkelanjutan.

B. Saran-saran (Rekomendasi)

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas sebagai inti pembahasan, maka dikemukakan beberapa saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Saran untuk pengurus Aisyiyah, bahwa Aisyiyah perlu lebih meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota dalam merespon secara adaptif perubahan pada lingkungan strategis, melalui peningkatan kompetensi dan kapabilitas pengurus dan anggota dalam urusan dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan maupun dalam urusan spiritualitas, serta peningkatan kapasitas organisasi terutama dalam membangun jejaring dengan organisasi lain yang visi dan misinya tidak bertentangan dengan organisasi 'Aisyiyah.
2. Saran terkait hubungan 'Aisyiyah dengan Muhammadiyah, menyadari bahwa 'Aisyiyah sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang didirikan untuk memperkuat Muhammadiyah dalam membina umat khususnya terkait dengan masalah-masalah perempuan yang dalam banyak hal masih tertinggal dibanding dengan laki-laki. Oleh karena itu, untuk memelihara kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah, semua pengurus dan anggota harus memahami visi, misi, dan posisinya di dalam menjalankan roda organisasi agar tetap langgeng sebagaimana telah terjalin selama ini.
3. Saran kepada Pemerintah dalam membina dan memfasilitasi organisasi perempuan semacam 'Aisyiyah. Dalam hal ini, 'Aisyiyah merupakan salah satu organisasi perempuan pertama di Indonesia yang keberadaannya atau eksistensinya menjelang satu abad perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, terutama dalam menangani masalah-masalah perempuan yang semakin kompleks antara lain: isu gender, kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia (*trafficking*) yang kebanyakan

korbannya adalah perempuan. Di samping itu, 'Aisyiyah perlu menjalin kerjasama dengan lembaga atau Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar dalam menanggulangi berbagai persoalan yang dihadapi kaum perempuan.

4. Saran kepada masyarakat umum, harus dipahami bahwa posisi 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah, belum dikenal luas oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, 'Aisyiyah masih perlu lebih banyak mensosialisasikan program-program kerja kepada masyarakat umum, baik dakwah keagamaan, sosial budaya, dan kegiatan kemasyarakatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Hal ini penting, karena fakta menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat belum mengenal 'Aisyah terutama kalangan bawah (petani, nelayan, dan kaum buruh). Di samping itu, sebagian warga Muhammadiyah juga belum akrab dengan 'Aisyiyah sehingga banyak program-program kerja yang tidak tersentuh oleh mereka dalam mengatasi berbagai kesulitan hidup. Dengan kata lain, 'Aisyiyah perlu lebih giat mensosialisasikan visi, misi, dan program kerja kepada warga Islam secara umum sehingga eksistensi, fungsi, dan peran yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat umum, umat Islam, bangsa dan negara mencapai hasil yang memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, A.G., 2001. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*, Jakarta: Penerbit Arga.
- Ahmadi, Rulam, 2005. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press).
- Ali, Fachri, dan Bahtiar Effendy. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*. Jakarta: Mizan.
- Amien, A. Mappadjantji, 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Amirin, Tatang M. 1984. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anwar, Dewi Fortuna, (et.al) (ed) 2005. *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, (LESMA – CNRS), KITLV.
- Arifin, M. 1991. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: CV. Bina Aksara.
- Artir, Mustafa O. (et.al) (ed) 1989. *Sosiologi Modernisasi: Telaah Kritis Tentang Teori, Riset, dan Realitas*. Terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Awang, San Afri, 2006. *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Konstruksi Sosial dan Perlawanan*. Yogyakarta: Debut Press.
- Azhar, Muhammad. 1997. *Filsafat Politik – Perbandingan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barry, John, 1999. *Environment and Social Theory*. New York: Routledge.
- Berger, Peter L., dan Hansfried Kellner, 1985. *Sosiologi Ditafsirkan Kembali: Esei tentang Metode dan Bidang Kerja*. Terj. Herry Joediono. Jakarta: LP3ES.

- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann, 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Berger, Peter L., 1994. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Terj. Hartono. Jakarta: LP3ES.
- Bertens, K., 1990. *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia.
- Bobbi Deporter & Mieke Hernachi, 2002. *Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*, Bandung: Kaifa.
- Bodine, Richard J., 1998. *The Handbook of Conflict Resolution Education: a Guide to Building Quality Programs in Schools*. Josses Bass USA.
- Bogdan, Robert, dan Steven J. Taylor, 1993. *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Borgatta, Edgar F., dan Marie L. Borgatta, 1992. *Encyclopedia of Sociology*. Volume 1,2,3,4. New York: Macmillan Publishing Company.
- Brannen, Julia. 1999. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Terj. H. Nukthah Arfawie Kurde, Imam Safe'i, dan Noorhaedi, H.A. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Brinkerhoff, Derick W., and Goldsmith, Arthur A., 1990. *Institutional Sustainability in Agriculture and Rural Development A Global Perspective*. New York: Westport, Connecticut London.
- Brojonegoro, Arjuno. 2000. *Indonesia Menapak Abad 21-Kajian Ekonomi Politik*. Jakarta: LPSK – LIPI.
- Budiman, Arief, 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Idiologi*. Jakarta: Gramedia.
- Budiyanto, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____, 2008. *Majalah Suara 'Aisyiyah No. 11 Tahun ke-85*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Pers 'Aisyiyah.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Bungin, Burhan (ed.). 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial; Sketsa Penilaian Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Coser, Lewis A., 1966. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press-London: Collier-McMillan Limited.
- Criblin, J., 1982. *Leadership Strategies for Organizations Effectiveness*. New York: Amacom.
- Creswell, John W., 1994. *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. Delhi: SAGE Publication.
- _____, 1997. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions*. India: SAGE Publication.
- Culla, Adi Suryadi, 1999. *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Davis & Newstrom, 1981. *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill International Editions.
- Djohar, 2003. *Pendidikan Strategik Alternatif Untuk Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: LESFI.
- Donald P. Kauchosck And Paul D. Eggen, 1998. *Learning And Teaching Research Basid Methods*. Baston: Allya And Baron.
- DuBrin, A.J., 1984. *Foundation of Organizational Behavior an Applied Perspective*. London: Prentice-Hall International Inc.
- Durkheim, Emile. 1984. *The Devision of Labor in Society*. Introduction: Lewis A. Coser. New York: The Free Press.
- Fauzi, Noer, 2005. *Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Insist Press.
- Feldman, D.C. dan Arnold, H.J., 1983. *Managing Individual and Group Behavior in Organizations*. London: McGraw-Hill International Book Company.

- Fisher, Simon, dkk., 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Terj. S.N. Karikasari, dkk. Jakarta: The British Council Indonesia.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1996. *Organization: Structure, Processes, Behavior*. Dallas: Business Publications Inc.
- Giddens, Anthony. 1981. *Perbedaan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*. Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 1984. *The Constitution of Society-Teori Struktural untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Pedati.
- _____, 1986. *Kapitalisme dan Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Marx, Durkheim dan Max Weber*. Terj. Soeheba Kramadibrata. Jakarta: UI Press.
- _____, 2004. *Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*. Terj. Dari judul aslinya: *The Constitution of Society*. Pasuruan: Pedati.
- Giddens, A., (et.al). 2004. *Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. Terj. Ninik Rochani Sjams, Editor: Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Gilbert H. Hunt, et al., 1999. *Efectie Teaching, Preparation And Implementation*. Illinois: Charless C. Thomas Publiesher.
- Ginting, C., 2003. *Kiat Belajar di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Goldschider, Calvin. 1985. *Populasi, Modernisasi, dan Struktur Sosial*. Terj. Nin Bakdi Sumanto. Jakarta: CV. Rajawali.
- Greenberg, Edward S., 1990. *State Changes: Approaches and Concept*, dalam Edward S. Greenberg dan Thomas F. Mayer (eds), 1990. *Changes in the State: Causes and Concequences*. Newbury Park California: Sage Publication.
- Hamid, Abu, 1994. *Syeh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hardiman, Fransisco Budi, 2004. *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Buku Baik.
- Harris, Marvin. 1979. *Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture*. New York: Random House.

- Henslim, James M. 2007. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi, Edisi 6, Jilid 1*. Terj. Kamanto Sunarto. Jakarta: Erlangga.
- Hunsaker, Phillip L., 2001. *Training in Management Skills*. New Jersey: Prentice Hall.
- Jerry Aldridge, and Renetta Soldman, 2002. *Current Issues And Trends In Education*. Boston, USA: Allya And Baron.
- Johnson, Doyle Paul, 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (2)*. Terj. Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- _____, 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (1)*. Terj. Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Juwono, Sudarmawan. 2009. *Teori Tindakan Rasional dan Moral*. Online (<http://sukawayang.wordpress.com/2009/02/03>).
- Kartodirdjo, Sartono, 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kerlinger, Fred N. 2002. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Terj. Landung R. Simatupang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat (ed). 1990. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo, 2000. *Kesadaran dan Perilaku dalam Menuju Tata Indonesia Baru*. Editor: Selo Sumardjan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuper, Adam & Jasica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Terj. Haris Munandar (et.al), dari judul aslinya: *The Social Sciences Encyclopedia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Laeyendecker, L., 1983. *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Terj. Samekto. Jakarta: Gramedia.
- Liliweri, Alo. 1997. *Sosiologi Organisasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lauer, Robert H. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Lederach, J, Building Oeace: 1997. *Sustainable Reconciliation in Diveded Societies*. Washington .D.C: USIP Press.
- Luthans, F., 1985.*Organizational Behavior*.New York: McGraw-Hill Bokk Company.
- Magnis Suseno, Frans, 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Maksum A., dan Ruhendi, L.Y., 2004. *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modern Mencari Visi Baru' atas 'Realitas Baru' Pendidikan Kita*. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.
- Merton, Robert King, 1968. *Social Theory and Social Structure*.Edition. New York: Enlarged Free Press.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng H. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metafisik, Telaah Studi Teks & Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Muhadjir, Noeng, 2007. *Metodologi Keilmuan*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulkham, Abdul Munir. 1989. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965 – 1987 dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mulwoso, E., 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsp, Karakteristik dan Implementas*. Bandug: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. E. 2004. *Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional*.Banaung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munandar, AS., 1987. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*, Seminar Strategi Pengendalian Konflik dalam Organisasi. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto (ed.). 2006. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.

- Nasikun, 2000. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nashir, Haedar. 1999. *Pragmatisme Politik Kaum Elit*. Pustaka Yogyakarta: Pelajar.
- _____ 2000. *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang.
- Nattingham, Elizabeth K. 1997. *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Terj. Abdul Muis Naharong, dari judul aslinya: *Religion and Society*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, H. Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- North, Douglass C., 2007. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.
- Owens, R.G., 1991. *Organization Behavior in Education*. Boston: Allyn and Bacon.
- Paloma, Margaret M., 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Terj. Tim Yasogama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Parsons, Talcott. 1969. *Political and Social Structure*. New York: The Free Press.
- Papayungan, M.M. 1992, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Teori & Praktek)*. Ujung Pandang: Pusat Studi Kependudukan UNHAS.
- Philipus, Ng dan Nurul Aini. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Punch, Keith F. 1998. *Introduction to Social Research Quantitative and Qualitative Approaches*. New Delhi: SAGE Publication.
- Paulo Freire, 2002. *Politik Pendidikan dan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dan ead.
- Polak, M., 1982. *Sosiologi: Suatu Buku Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT Ictiar Baru.

- Prabu-Mangkunegara A., 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rosdakarya.
- Priyono, B. Herry, 2003. *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Rahardjo, M. Dawan. 1993. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*. Bandung: Mizan.
- Raho, Bernard, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ritzer, George, 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Terj. Alimandan. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 1992. *Sociological Theory*. Third Edition. Singapore: McGraw-Hill Co-International Edition.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Terj. Alimandan. Jakarta: Kencana.
- Robbins, Stephen P., 1990. *Organization Theory: Structure, Design and Applications*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- , 2003. *Organizational Behavior*. Diterjemahkan oleh Indeks. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Rosyada, Dede, 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Rusmadi. 2008. *Krisis Lingkungan Dalam Bingkai Teori Strukturasi: Antara Governance dan Governmentality Lingkungan*. (online), (http://rusmadi-rusmadi.blogspot.com/2008/02/artikel_1848.html, diakses 01 Maret 2008)
- Salim, Agus, 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku untuk Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sanderson, Stephen K., 2003. *Sosiologi Makro; Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas*. Terj. Farid Wajidi dan S. Menno. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Sanit, Arbi. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat: Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum, dan Hak Asasi*. Jakarta: CV. Rajawali.

- _____. 2000. *Badai Revolusi: Sketsa Kekuasaan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schermerhorn, R. A., 1987. *Masyarakat dan Kekuasaan*. Terj. Soerjono Soekanto & Agus Brotosusilo. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Priyo Budi. 1993. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspektif Cultural dan Struktural*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sedarmayanti, 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan Ditinjau dari Beberapa Aspek Esensial dan Aktual*. Bandung: CV Mandar Maju.
- _____, 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siahaan, Hotman M., 1997. *Dinamika Politik Kelompok Marginal*, dalam Basis Susilo (ed). *Masyarakat dan Negara*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Simmel, Georg, 1995. *Conflict and the Web of Group-Affiliations*. New York: The Free Press.
- Siswanto, Sastrohadiwiryo B., 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Smith, Eugene D., 1985. *Agama dan Modernisasi Politik – Suatu Kajian Analitis*. Terj. Mahnun Husein. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, dan Winarno Yudho. 1986. *Georg Simmel: Beberapa Teori Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sodiq. A. Kuntoro., 1985. *Dimensi Manusia dalam Pemikiran Indonesia*. Yogyakarta: CV Bur Cahaya.
- Soekanto, Soerjono, 1991. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Strike, K.A dan Soltis, J.F., 2003. *Etika Profesi Kependidikan, Alih Bahasa F. Sinaradi*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.

- Subuki, Makyun. 2006. *Komunikasi dalam Interaksionisme Simbolis, Strukturasi, dan Konvergensi*. (online), <http://tulisanmakyun.blogspot.com/2008/02/teori-komunikasi-29.html>, diakses 01 Maret 2008)
- Sudarwan, Danim, 2003. *Agenda Pemabruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik: Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Susetiawan, 1999. *Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial : Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2000. *Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahatah, H., 2004. *Kiat Islami Meraih Prestasi*. Jakarta: Gema Insani.
- Syamsuddin, Din. 2000. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos.
- Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan, Editor: Triwibowo Budi Santoso, dari judul aslinya: *The Sociology of Social Change*. Jakarta: Prenada.
- Tahel, Elza Peldi (ed). 1994. *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Taneko, Soleman B. 1996. *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*. Bandar Lampung: Fajar Agung.
- Tilaar, H.A R., 2004. *Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tosi, H.L., Rizzo, J.R. & Carrol, S.J., 1990. *Managing Organizational Behavior*. (2nd Edition). New York: Harper Collins Publihsers.
- Turner, Bryan S. 1984. *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*. Terj. G.A. Ticoalu, dari judul aslinya: *Weber and Islam*. Jakarta: CV. Rajwali.

- _____ 1994. *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat*. Terj. Sirojuddin (et.al), dari judul aslinya: *Orientalism, Postmodernism and Globalism*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.
- Turner, Jonathan H., 1991. *The Structure Of Sociological Theory*. Belmont California: Wodsworth Inc.
- Veeger, K.J. 1993. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi, Akdam H. 2005. *Manajemen Konflik dalam Organisasi: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Efektif*. Bandung: Alfabeta.
- Wallace, Walter L. 1994. *Metode Logika Ilmu Sosial*. Terj. Yayasan Solidaritas Gajah Mada. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warsito, Tulus. 1999. *Pembangunan Politik: Refleksi Atas Krisis*. Jakarta: Bigraf Publishing.
- Warnaen, Suwarsih. 2002. *Stereotip Etnis Dalam Masyarakat Multietnis*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Walton, R.E., 1987. *Managing Conflict: Interpersonal Dialogue and Third-Party Roles*. (2nd Edition). Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Weber, Max, 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: The Free Press.
- _____ 2000. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. Terjemahan Yusup Priyasudiarja. Surabaya: Pustaka Promethea.
- _____ 2002. *Sosiologi Agama*. Terj. Muhammad Yamin, dari judul asli: *The Sociology of Religion*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- _____ 2009. *Sosiologi From Max Weber: Essays in Sociology*. Terj. Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widyanta, A. B., 2002. *Problem Modernitas dalam Kerangka Sosiologi Kebudayaan Georg Simmel*. Yogyakarta: Cindelaras.

- Weilenman, Alexander. 1994. *Riset Evaluasi dan Perubahan Sosial*. Terj. H. Soenarwan. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Wertheim, W. F., 1999. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Winardi, 1994. *Manajemen Konflik: Konflik Perubahan dan Perbandingan*. Bandung: Mandar Mamuju.
- Windhu, Marsana I. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan : Menurut Johan Galtung*. Jakarta: Kanisius.
- Worsley, Peter, (et.al). 1992. *Introducing Sociology*. Diterjemahkan oleh Hartono Hadikusumo, dengan judul: *Pengantar Sosiologi-Sebuah Perbandingan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Wuisman, J.J.J.M. 1996. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusup, Yusmar. 1988. *Dinamika Kelompok: Kerangka Studi dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Bandung: Armico.
- Zeitlin, Irving M. 1998. *Memahami Kembali Sosiologi (Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

RIWAYAT HIDUP



Nursalam, lahir di Enrekang pada tahun 1960 oleh pasangan Katanni, dan Hj. Sariba sebagai anak terakhir dari tiga orang bersaudara. Menamatkan pendidikan dasar di SDN 2 Kab Enrekang 1972, tingkat menengah pertama PGAN 4 Th di Kab Enrekang 1975, dan sekolah menengah atas di PGAN 6 Th di Kab.Enrekang pada tahun 1979, kemudian melanjutkan pendidikan di Univ. Veteran RI Ujung Pandang jurusan Pendidikan Umum, dan tamat pada tahun 1986.

Pada tahun 1988 diangkat menjadi Dosen Kopertis Wil. IX Diperkerjakan pada Univ.Muhammadiyah Makassar, tahun 1999 melanjutkan pendidikan pada Program Magister di Universitas Hasanuddin di bidang kajian Komunikasi Pendidikan, dan menyelesaikan studi pada tahun 2003.

Tahun 2004 diangkat menjadi sekretaris jurusan Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2006–sekarang. Tahun 2008 melanjutkan pendidikan Program Doktor di Universitas Negeri Makassar bidang kajian sosiologi.

Melakukan berbagai penelitian diantaranya :

1. Hubungan Intensitas Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Produktivitas Kerja Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Bantaeng. padatahun 2004
2. Peran Komunikasi Dalam Modernisasi di Sulawesi Selatan (Jurnal Ilmiah) 2005
3. Perilaku Mahasiswa Dalam Keluarga Single Parents (jurnal Ilmiah) 2006
4. Mobilitas Sosial Ekonomi Pedagang Buah-buahan dikota Makassar. (Jurnal Ilmiah) 2007.

Tahun 1993 menikah dengan Rahmawati, SP. MP. dan dikarunia dua orang putri : St.Adinda Srikandi , (16 tahun) siswa SMAN 17 Makassar, dan Dianita Nurrahma, (4 tahun), TK Kharisma Makassar, dan kami sekeluarga tinggal di Jl. Veteran Utara 41/55 Makassar.